



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN

2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Sistematis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten;
 - f. Bab VI : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Bab VIII : Penutup.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menyusun:

- a. Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumbabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
1.1 LATAR BELAKANG	- 1 -
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	- 3 -
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	- 5 -
1.3.1 Keterhubungan RKPD dan RPJMD	- 6 -
1.3.2 Keterhubungan RKPD dan RKP Tahun 2026	- 7 -
1.3.3 Keterhubungan RKPD dengan Renja PD	- 8 -
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	- 8 -
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	- 9 -
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	- 11 -
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	- 11 -
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	- 12 -
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	- 36 -
2.1.3 Aspek Daya Saing	- 52 -
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	- 62 -
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	- 212 -
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	- 212 -
2.2.2 Isu Strategis Daerah	- 223 -
2.3 EVALUASI RKPD TAHUN 2024	- 230 -
2.4 PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	- 281 -
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	- 284 -
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	- 284 -
3.2 KONDISI EKONOMI DAERAH	- 284 -
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	- 284 -
3.2.2 Struktur Ekonomi	- 285 -
3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	- 290 -
3.2.4 Inflasi	- 290 -
3.2.5 Tingkat Kemiskinan	- 291 -
3.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	- 294 -
3.2.7 Tingkat Ketimpangan	- 295 -
3.3 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	- 296 -
3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN	- 297 -
3.4.1 Proyeksi Keuangan Daerah	- 297 -
3.4.2 Neraca Daerah	- 307 -

3.4.3 Realisasi Anggaran yang Berasal dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur menurut SKPD.....	314 -
3.5 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	318 -
3.5.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	318 -
3.5.2 Analisis Pembiayaan.....	319 -
3.6 KERANGKA PENDANAAN	328 -
3.6.1 Arah Kebijakan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2026	328 -
3.6.2 Proyeksi Pendapatan	331 -
3.6.3 Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua.....	335 -
BAB IV SASASAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	340 -
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	340 -
4.1.1 Tujuan1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial	340 -
4.1.2 Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global.....	341 -
4.1.3 Tujuan 3: Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah	341 -
4.1.4 Tujuan 4: Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	341 -
4.1.5 Tujuan 5: Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah.....	341 -
4.1.6 Tujuan 6: Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik	341 -
4.1.7 Tujuan 7: Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP	342 -
4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	347 -
4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	364 -
4.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026.....	365 -
4.4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	365 -
4.4.2 Agenda Pembangunan Wilayah.....	365 -
4.4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Nasional.....	366 -
4.4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2026	371 -
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN.....	475 -
5.1 KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH.....	475 -
5.2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN	475 -
5.2.1 Kabupaten Fak-fak.....	476 -
5.2.2 Kabupaten Kaimana.....	477 -
5.2.3 Kabupaten Teluk Wondama.....	479 -
5.2.4 Kabupaten Teluk Bintuni	481 -
5.2.5 Kabupaten Manokwari	483 -
5.2.6 Manokwari Selatan.....	485 -
5.2.7 Kabupaten Pegunungan Arfak.....	486 -

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	- 498 -
6.1 KERANGKA PENDANAAN	- 499 -
6.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	- 501 -
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	- 539 -
BAB VIII PENUTUP	- 560 -
8.1 KAJIDAH IMPLEMENTASI	- 560 -
8.2 PEDOMAN TRANSISI	- 561 -
L A M P I R A N	- 562 -

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Daratan Papua Barat	- 12 -
Tabel II.2 Jumlah Kampung Menurut Letak Geografis, 2021	- 13 -
Tabel II.3 Sebaran Elevasi Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten	- 15 -
Tabel II.4 Banyaknya Kampung Menurut Kondisi Topografi.....	- 16 -
Tabel II.5 Luas Area Hidrologi di Provinsi Papua Barat.....	- 17 -
Tabel II.6 Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat	- 19 -
Tabel II.7 Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat	- 21 -
Tabel II.8 Luas Areal Air Tanah (<i>Ground Water</i>) di Papua Barat	- 23 -
Tabel II.9 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG di Provinsi Papua Barat, 2022.....	- 24 -
Tabel II.10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Papua Barat	- 27 -
Tabel II.11 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Berdasarkan Kabupaten Tahun 2023	- 28 -
Tabel II.12 Daya Dukung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat	- 31 -
Tabel II.13 Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat	- 32 -
Tabel II.14 Jumlah dan Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per km ² Menurut Kabupaten, 2024.....	- 33 -
Tabel II.15 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten, 2024	- 34 -
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Papua Barat Tahun 2024	- 35 -
Tabel II.17 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Juta Rupiah).....	- 38 -
Tabel II.18 Laju Pertumbuhan Total PDRB ADHK Menurut Kabupaten di Papua Barat (%)	- 38 -
Tabel II.19 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2019-2023	- 39 -
Tabel II.20 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2023	- 40 -
Tabel II.21 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten.....	- 42 -
Tabel II.22 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Barat Menurut Kabupaten, 2020-2024	- 44 -
Tabel II.23 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024.....	- 44 -
Tabel II.24 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	- 52 -
Tabel II.25 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah).....	- 53 -
Tabel II.26 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	- 54 -
Tabel II.27 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten, 2022-2023	- 55 -
Tabel II.28 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	- 56 -
Tabel II.29 Skor Indeks Berdasarkan Bentuk Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua Barat.....	- 56 -
Tabel II.30 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023	- 57 -
Tabel II.31 Rasio Pajak Konsolidasian Terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2022	- 61 -
Tabel II.32 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	- 62 -
Tabel II.33 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	- 62 -
Tabel II.34 Angka Partisipasi Sekolah, Provinsi Papua Barat, 2021.....	- 74 -
Tabel II.35 Angka Putus Sekolah Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin .	- 77 -
Tabel II.36 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat	- 80 -

Tabel II.37 Rumah Sakit yang Berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	- 80 -
Tabel II.38 Jumlah Posbindu di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019	- 83 -
Tabel II.39 Jumlah dan Sebaran SDM Kesehatan Berdasarkan Gender Per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 84 -
Tabel II.40 Distribusi Tenaga Medis Berdasarkan Jenisnya per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 84 -
Tabel II.41 Distribusi Tenaga Dokter Spesialis berdasarkan Jender dan Rasio Berbanding Satuan Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023.....	- 86 -
Tabel II.42 Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan Lainnya Berdasarkan Jenisnya per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 88 -
Tabel II.43 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	- 95 -
Tabel II.44 Perbandingan Persentase TSR Tuberkulosis di Papua Barat, 2018 dan 2021.....	- 100 -
Tabel II.45 Perkembangan Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 - 2021	- 105 -
Tabel II.46 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah (km).....	- 111 -
Tabel II.47 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Papua Barat 2017-2022....	- 111 -
Tabel II.48 Panjang Jalan di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan Tahun 2023	- 111 -
Tabel II.49 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, 2018-2023	- 113 -
Tabel II.50 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besardi Papua Barat, 2023	- 114 -
Tabel II.51 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua (Persen)	- 114 -
Tabel II.52 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak.....	- 115 -
Tabel II.53 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama, 2023	- 115 -
Tabel II.54 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Atap Rumah Terluas, 2022.....	- 117 -
Tabel II.55 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Dinding Rumah Terluas, 2022.....	- 118 -
Tabel II.56 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Lantai Rumah Terluas, 2022.....	- 118 -
Tabel II.57 Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	- 121 -
Tabel II.58 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Kejadian Perkelahian Massal di Wilayahnya.....	- 123 -
Tabel II.59 Indikator IDI Provinsi Papua Barat Menggunakan Metode Baru, 2021-2022	- 129 -
Tabel II.60 Persentase Keluarga yang Menerima Bantuan Pangan Non Tumi Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2024	- 130 -
Tabel II.61 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2023	- 131 -
Tabel II.62 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2017-2021	- 132 -
Tabel II.63 Persentase Keluarga Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2023.....	- 132 -
Tabel II.64 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2023.....	- 133 -

Tabel II.65 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2023 (%).....	134 -
Tabel II.66 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2023.....	136 -
Tabel II.67 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten di Papua Barat 2021-2023	141 -
Tabel II.68 Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten	141 -
Tabel II.69 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Barat, 2019-2022.....	142 -
Tabel II.70 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	144 -
Tabel II.71 APM SD, SMP dan SMA berdasarkan jenis kelamin di Papua Barat, 2018-2021.....	145 -
Tabel II.72 Perbandingan APS Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2022	145 -
Tabel II.73 Daya Dukung Pangan Papua Barat.....	146 -
Tabel II.74 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.....	148 -
Tabel II.75 Rata-rata Konsumsi Protein dan Kalori Per Kapita Sehari di Papua Barat 2018-2023.....	149 -
Tabel II.76 Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan, Provinsi Papua Barat, Maret 2023.....	150 -
Tabel II.77 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Barat,	153 -
Tabel II.78 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua Barat.....	153 -
Tabel II.79 Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran.....	155 -
Tabel II.80 Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	156 -
Tabel II.81 Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).....	157 -
Tabel II.82 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Papua Barat	157 -
Tabel II.83 Rekapitulasi Jumlah dan Persentase Kampung di Papua Barat Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM).....	159 -
Tabel II.84 Jumlah Kampung Penerima dan Alokasi Dana Desa (Ribu Rupiah) di Papua Barat Tahun 2016-2023	159 -
Tabel II.85 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Barat (%)	160 -
Tabel II.86 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 2019-2023 (%).....	161 -
Tabel II.87 Metode KB yang Digunakan Oleh PUS (%)	161 -
Tabel II.88 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua Barat (unit)	162 -
Tabel II.89 Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat	163 -
Tabel II.90 Kunjungan Kapal Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kegiatan di Papua Barat	163 -
Tabel II.91 Banyaknya Pesawat dan Penumpang yang Datang, Berangkat, dan Transit di Bandar Udara yang Diusahakan di Provinsi Papua Barat	164 -
Tabel II.92 Jumlah Angkutan Barang yang Melalui Dermaga Pelabuhan/Transportasi Udara di Papua Barat di Tahun 2017-2021	165 -
Tabel II.93 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel di Papua Barat, 2017-2023.....	165 -
Tabel II.94 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet), 2017-2023.....	166 -
Tabel II.95 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet	166 -

Tabel II.96 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019 dan 2024.....	167 -
Tabel II.97 Kondisi Koperasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2021.....	168 -
Tabel II.98 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	169 -
Tabel II.99 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	170 -
Tabel II.100 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Pemuda dan Domain Penyusunnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia 2017-2023.....	171 -
Tabel II.101 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Berolahraga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021	173 -
Tabel II.102 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tujuan Utama Berolahraga dan Jalur/Wadah Utama Dalam Berolahraga, 2021.....	173 -
Tabel II.103 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga Tahun 2021	174 -
Tabel II.104 Hasil Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2011-2023.....	175 -
Tabel II.105 Tiga Tipe Kepemimpinan yang Dianut di Dua Wilayah Adat Papua Barat.....	178 -
Tabel II.106 Bentuk Bentuk Kearifan Lokal di Provinsi Papua barat	179 -
Tabel II.107 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat 2023.....	182 -
Tabel II.108 Rekapitulasi Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat di Papua Barat Tahun 2023.....	184 -
Tabel II.109 Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Papua Barat, 2017-2021 (%)......	185 -
Tabel II.110 Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Rata-Rata Lama Tamu Menginap di Povinsi Papua Barat Tahun 2023	186 -
Tabel II.111 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB ADHB Papua Barat 2019-2023 (%).....	188 -
Tabel II.112 Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi Usaha Akomodasi di Papua Barat Tahun 2023	188 -
Tabel II.113 Jumlah Tamu Hotel Asing dan Domestik di Provinsi Papua Barat Menurut Klasifikasi Hotel Tahun 2023	189 -
Tabel II.114 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Papua Barat (ton)	190 -
Tabel II.115 Produksi Sayuran di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2023 (kuintal)....	191 -
Tabel II.116 Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2023 (kuintal)	192 -
Tabel II.117 Produksi Perkebunan (ton) di Provinsi Papua Barat 2022-2023	194 -
Tabel II.118 Populasi Ternak & Unggas di Papua Barat Tahun 2022 (ekor)	195 -
Tabel II.119 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Perairan Umum Daratan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	198 -
Tabel II.120 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022	199 -
Tabel II.121 Potensi Pertambangan.....	202 -
Tabel II.122 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal, 2022 dan 2023	204 -
Tabel II.123 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Negara Tujuan .	205 -
Tabel II.124 Volume dan Nilai Impor Provinsi Papua Barat Menurut Negara Asal dan Pelabuhan Bongkar Tahun 2022 dan 2023	207 -
Tabel II.125 Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2023.....	208 -
Tabel II.126 Kondisi Industri Besar dan Sedang di Papua Barat Tahun 2022	209 -
Tabel II.127 Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Barat, 2022	210 -

Tabel II.128 Usaha Industri Mikro dan Kecil yang melakukan Inovasi dan Bentuk Inovasi di Provinsi Papua Barat, 2020-2022.....	211 -
Tabel II.129 Sebaran Kawasan dan Jumlah KK Transmigrasi di Papua Barat, 2023.....	212 -
Tabel II.130 Pemetaan Masalah Pokok “Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan”.....	213 -
Tabel II.131 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Efektifnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara Produktif, Inovatif, Berkelanjutan dan Inklusif, serta Tingginya Kerawanan Pangan”	215 -
Tabel II.132 Pemetaan Masalah Pokok “Kerentanan Wilayah atas Perubahan Iklim, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana dan Peningkatan Emisi GRK”.....	217 -
Tabel II.133 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Konektivitas Daerah”	219 -
Tabel II.134 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus”	221 -
Tabel II.135 Pemetaan Masalah Pokok “Masih Terjadi Konflik Horizontal dan Kriminalitas Meskipun dalam Intensitas Rendah”	223 -
Tabel II.136 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Terhadap Anak”.....	223 -
Tabel II.137 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	231 -
Tabel II.138 Realisasi Serapan Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ..	231 -
Tabel II.139 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dan 2024	278 -
Tabel II.140 Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Berdasarkan Urusan Tahun 2020-2024	283 -
Tabel II.141 Capaian Penerapan SPM Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2020-2024 (%)	283 -
Tabel III.1 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Miliar Rupiah)	285 -
Tabel III.2 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tanpa Migas Kabupaten di Papua Barat (Milyar Rupiah) (Data Tersedia Terakhir 2022)	286 -
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan Total PDRB Menurut Kabupaten di Papua Barat (%) ...	286 -
Tabel III.4 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2020-2024.....	287 -
Tabel III.5 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2020-2024	289 -
Tabel III.6 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023.....	290 -
Tabel III.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (Rp 000) 2020-2024.....	291 -
Tabel III.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten, 2020-2024.....	294 -
Tabel III.9 Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2024.....	295 -
Tabel III.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2020-2024 (%)	296 -
Tabel III.11 Angka Gini Rasio menurut Kabupaten di Papua Barat.....	296 -
Tabel III.12 Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat 2025.....	297 -
Tabel III.13 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	298 -
Tabel III.14 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)	299 -
Tabel III.15 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024	301 -

Tabel III.16 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta).....	303 -
Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.....	306 -
Tabel III.18 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)	307 -
Tabel III.19 Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024.....	309 -
Tabel III.20 Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024	314 -
Tabel III.21 Daftar Alokasi Dan Realisasi Dana Otsus Dan Dti Sampai Dengan Semester I Di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 (Rp Juta)	316 -
Tabel III.22 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019-2023.....	319 -
Tabel III.23 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2020-2024 (Rp juta).....	320 -
Tabel III.24 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2020-2024	321 -
Tabel III.25 Surplus/Defisit Riil APBD Papua Barat, 2020-2024 (Rp juta).....	323 -
Tabel III.26 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Papua Barat (Rp Juta), 2020-2024	324 -
Tabel III.27 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2020-2024	324 -
Tabel III.28 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Papua Barat (Rp Juta)	328 -
Tabel III.29 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026-2030 (Rp juta).....	334 -
Tabel III.30 Daftar Alokasi Dan Realisasi Dana Otsus Dan DTI Sampai Dengan Semester I Di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025 (Rp Juta)	337 -
Tabel IV.1 Matrix Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat.....	343 -
Tabel IV.2 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026.....	348 -
Tabel IV.3 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	368 -
Tabel IV.4 Matrix Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Tahun 2026	373 -
Tabel IV.5 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah	456 -
Tabel IV.6 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah 2026	464 -
Tabel V.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Fak-fak	479 -
Tabel V.2 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Kaimana.....	480 -
Tabel V.3 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Teluk Wondama	482 -
Tabel V.4 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.....	484 -
Tabel V.5 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Manokwari	486 -
Tabel V.6 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan	488 -
Tabel V.7 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pegunungan Arfak	489 -
Tabel V.8 Prioritas 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial	493 -
Tabel V.9 Prioritas 2 Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif.....	494 -
Tabel V.10 Prioritas 3 Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan	495 -
Tabel V.11 Prioritas 4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas	496 -
Tabel V.12 Prioritas 5 Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah	497 -

Tabel V.13 Prioritas 6 Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju <i>Good Governance</i>	498 -
Tabel V.14 Prioritas 7 Optimalisasi Otsus Untuk Menyejahterakan OAP di Papua Barat.....	499 -
Tabel VI.1 Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026	501 -
Tabel VI.2 Indikasi Plafon Belanja PD Berdasarkan Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 (dalam Juta Rupiah)	502 -
Tabel VI.3 Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Provinsi Papua Barat Tahun 2026 Pada Masing-Masing Urusan Pemerintahan	503 -
Tabel VI.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026	506 -
Tabel VII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2026	542 -
Tabel VII.2 Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun 2026	549 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	- 5 -
Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Provinsi	- 6 -
Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat	- 13 -
Gambar II.2 Peta Sebaran Elevasi Provinsi Papua Barat	- 14 -
Gambar II.3 Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat	- 17 -
Gambar II.4 Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat.....	- 18 -
Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat.....	- 19 -
Gambar II.6 Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat	- 22 -
Gambar II.7 Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat	- 23 -
Gambar II.8 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Barat Tahun 2023.....	- 24 -
Gambar II.9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Barat, 2019	- 26 -
Gambar II.10 Peta Risiko Bencana Per Ancaman di Papua Barat Tahun 2023.....	- 27 -
Gambar II.11 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat	- 31 -
Gambar II.12 Peta Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat	- 32 -
Gambar II.13 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2020-2024 (jiwa).....	- 33 -
Gambar II.14 Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat, 2020-2024.....	- 36 -
Gambar II.15 IPM Menurut Gender dan IPG Papua Barat 2019-2023	- 37 -
Gambar II.16 IPM Menurut Gender dan IPG Kabupaten di Papua Barat, 2023	- 37 -
Gambar II.17 Rasio Gini menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat	- 43 -
Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem.....	- 45 -
Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat (<P21).....	- 46 -
Gambar II.20 Sebaran Penduduk Miskin (<P20) dan Miskin Ekstrem (<P2) di Papua Barat	- 46 -
Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Barat.....	- 47 -
Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Barat Tahun 2022.....	- 47 -
Gambar II.23 Capaian UHH Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2020-2024	- 48 -
Gambar II.24 UHH Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2023	- 49 -
Gambar II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2024... 49 -	- 49 -
Gambar II.26 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2020-2024.....	- 50 -
Gambar II.28 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Barat, 2020-2024	- 51 -
Gambar II.29 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Papua Barat	- 52 -
Gambar II.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 59 -
Gambar II.31 IKK Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019-2023	- 59 -
Gambar II.32 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet Tahun 2023	- 60 -
Gambar II.33 Jenis dan Proporsi Pendidikan Pra Sekolah di Papua Barat sebelum Pemekaran tahun 2021 (%)	- 64 -
Gambar II.34 Perkembangan Jumlah TK dan RA di Papua Barat, 2019-2023	- 64 -
Gambar II.35 Rasio Sekolah TK/RA dan Guru TK/RA Berdasarkan Kabupaten	- 64 -

Gambar II.36 Perkembangan Jumlah SD dan MI di Papua Barat, 2019-2023	- 65 -
Gambar II.37 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022	- 65 -
Gambar II.38 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022	- 66 -
Gambar II.39 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel.....	- 66 -
Gambar II.40 Perkembangan Jumlah SMP dan MTs di Papua Barat, 2019-2023.....	- 67 -
Gambar II.41 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2023/2024	- 68 -
Gambar II.42 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2023/2024	- 68 -
Gambar II.43 Perkembangan Jumlah SMA dan MA di Papua Barat, 2019-2023.....	- 69 -
Gambar II.44 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2023/2024.....	- 69 -
Gambar II.45 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2023/2024.....	- 70 -
Gambar II.46 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Barat, 2019-2023	- 70 -
Gambar II.47 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2023/2024.....	- 71 -
Gambar II.48 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2023/2024.....	- 71 -
Gambar II.49 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Papua Barat Tahun 2022	- 72 -
Gambar II.50 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Papua Barat Tahun 2022	- 72 -
Gambar II.51 Jumlah Peserta Didik pada Tiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2021	- 73 -
Gambar II.52 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019	- 74 -
Gambar II.53 APK Kabupaten di Papua Barat pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2020-2024.....	- 75 -
Gambar II.54 APM pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2019-2023 ..	- 76 -
Gambar II.55 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten, 2022	- 77 -
Gambar II.56 Peringkat Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran, Tahun Penilaian 2021	- 77 -
Gambar II.57 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Barat	- 78 -
Gambar II.58 Distribusi Puskesmas per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	- 79 -
Gambar II.59 Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	- 79 -
Gambar II.60 Rasio Puskesmas per Distrik Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022	- 79 -
Gambar II.61 Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019	- 81 -
Gambar II.62 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019	- 82 -
Gambar II.63 Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019	- 82 -
Gambar II.64 Jumlah Dokter dan Rasio Tenaga Dokter Terhadap Satuan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 85 -
Gambar II.65 Jumlah dan Rasio Dokter Gigi per Satuan Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2023	- 86 -

Gambar II.66 Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan terhadap Satuan Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023...	- 87 -
Gambar II.67 Jumlah dan Rasio Tenaga Kebidanan terhadap Satuan Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	- 88 -
Gambar II.68 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat, 2017-2022.....	- 89 -
Gambar II.69 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019.....	- 90 -
Gambar II.70 Jumlah dan Persentase Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat Tahun 2019	- 90 -
Gambar II.71 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019	- 91 -
Gambar II.72 Rata-Rata Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Barat, 2018- 2022.....	- 91 -
Gambar II.73 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022.....	- 92 -
Gambar II.74 Jumlah Ibu Bersalin dan Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019.....	- 92 -
Gambar II.75 Jumlah Kematian Anak Menurut Kelompok Umur.....	- 93 -
Gambar II.76 Jumlah Kematian Anak di Provinsi Papua Barat Tahun 2019.....	- 93 -
Gambar II.77 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua Barat, 2017-2022.....	- 94 -
Gambar II.78 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019.....	- 94 -
Gambar II.79 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Papua Barat, 2018	- 96 -
Gambar II.80 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita menurut Indeks TB/U, BB/U dan TB/BB di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.....	- 97 -
Gambar II.81 Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018	- 98 -
Gambar II.82 Persentase KEK pada Wanita Hamil dan Wanita Tidak Hamil	- 99 -
Gambar II.83 Persentase TC Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	- 100 -
Gambar II.84 Perkembangan Positivity Rate HIV di Papua Barat (Pra-Pemekaran),	- 101 -
Gambar II.85 Jumlah Kunjungan Klien dan Positivity Rate HIV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021.....	- 101 -
Gambar II.86 Jumlah Kasus Baru, Mulai ARV dan On-ARV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021	- 102 -
Gambar II.87 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Aktif dan Proporsi Kasus Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Februari 2023....	- 103 -
Gambar II.88 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Meninggal dan CFR Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Papua Barat sampai dengan Februari 2022.....	- 104 -
Gambar II.89 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat sampai dengan Februari 2023	- 104 -
Gambar II.90 Perkembangan <i>Annual Paracite Incidence</i> (API) per 100.000 penduduk Papua Barat, Tahun 2022	- 108 -
Gambar II.93 Cakupan Kepemilikan BPJS Kesehatan serta Cakupan Penduduk yang Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Kesehatan Menurut Kelompok Pendapatan di Provinsi Papua Barat, 2022	- 109 -
Gambar II.94 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Provinsi dan Kabupaten, 2023.....	- 110 -
Gambar II.95 IKK Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019-2023	- 110 -

Gambar II.96 Panjang Jalan di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan Tahun 2023.....	112 -
Gambar II.97 Cakupan Sanitasi Layak Berdasarkan Kategori Perdesaan-Perkotaan dan Kelompok Kesejahteraan di Papua Barat	113 -
Gambar II.98 Sumber Air Minum Utama Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat 2022 (%)	116 -
Gambar II.99 Cakupan Rumah Layak Huni di Provinsi Papua Barat dan Nasional (%).....	116 -
Gambar II.100 Cakupan Rumah Layak Huni di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kelompok Pendapatan (%)	117 -
Gambar II.101 Kepadatan Hunian dan Lokasi Rumah Tangga yang Luas Lantai Bangunan ≤ 21 meter persegi di Provinsi Papua Barat.....	119 -
Gambar II.102 Persentase Penduduk Korban Kejahatan di Papua Barat Tahun 2020-2022	120 -
Gambar II.103 Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022	120 -
Gambar II.104 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022	123 -
Gambar II.105 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan 2021	124 -
Gambar II.106 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, 2014-2020	125 -
Gambar II.107 Perkembangan Indeks Demokrasi Tahun 2016-2020 (Metode Lama) ...	126 -
Gambar II.108 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Papua Barat 2009-2020 (Metode Lama)	126 -
Gambar II.109 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020	127 -
Gambar II.110 Perbandingan IDI Papua Barat terhadap Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2021, 2022 dan 2023	128 -
Gambar II.111 Perkembangan Aspek IDI Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	128 -
Gambar II.112 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023	134 -
Gambar II.113 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Gender di Provinsi Papua Barat, 2022	135 -
Gambar II.114 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat 2018-2023.....	135 -
Gambar II.115 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Papua Barat Tahun 2022	137 -
Gambar II.116 Kondisi Pekerja Disabilitas di Papua Barat	138 -
Gambar II.117 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	139 -
Gambar II.118 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	139 -
Gambar II.119 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022	140 -
Gambar II.120 Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	140 -
Gambar II.121 Sebaran Jumlah Kejadian/Kasus Kekerasan di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023.....	143 -
Gambar II.122 Sebaran Jumlah Kejadian/Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 (kasus)	143 -
Gambar II.123 Karakteristik Korban Kekerasan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 (orang)	144 -
Gambar II.124 Peta Daya Dukung Pangan Papua Barat.....	147 -

Gambar II.125 Peta Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Papua Barat Tahun 2022	147 -
Gambar II.126 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019-2023 (%)..	151 -
Gambar II.127 Skenario Lingkungan Hidup Indonesia dan Kuadran Keberlanjutan (Papua Barat Berada pada Kuadran II).....	154 -
Gambar II.128 Capaian Pembangunan Pemuda Papua Barat Tahun 2023	171 -
Gambar II.129 Peta Bahasa Papua Barat Oleh SLI Internasional	177 -
Gambar II.130 Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional	181 -
Gambar II.131 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2023	182 -
Gambar II.132 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional (Unit) Tahun 2024	183 -
Gambar II.133 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Papua Barat Tahun 2023.....	184 -
Gambar II.134 Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	190 -
Gambar II.135 Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat	196 -
Gambar II.136 Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Papua Barat, 2023 (%)	200 -
Gambar II.137 Rumah Tangga dengan Akses Listrik Menurut Kelompok Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	200 -
Gambar II.138 Perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian di Papua Barat, 2019-2023	201 -
Gambar II.139 Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batubara di Provinsi Papua Barat	202 -
Gambar II.140 Peta Sebaran Cadangan Migas di Provinsi Papua Barat	203 -
Gambar II.141 Penduduk Bekerja di Sektor Manufaktur/Industri Pengolahan Berdasarkan Kelompok Pendapatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022	209 -
Gambar II.142 Persentase Penguasa IMK Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, serta Persentase Jenis Kesulitan Usaha IMK Tahun 2022...-	211 -
Gambar II.143 Peta Lokasi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat, 2023.....	212 -
Gambar II.144 Rata-Rata Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024.....	282 -
Gambar III.1 Inflasi Papua Barat Tahun 2020-2024.....	292 -
Gambar III.2 Rata-rata Inflasi tahun 2020-2024 Papua Barat.....	292 -
Gambar III.3 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024	300 -
Gambar III.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024	302 -
Gambar III.5 Komposisi Belanja Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024.....	305 -
Gambar III.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024.....	306 -
Gambar III.7 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat....-	327 -
Gambar III.8 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024.....	329 -
Gambar V.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah di Papua Barat	492 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah Papua Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah Papua Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam angka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang yakni wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis – partisipatif yang dilakukan Perangkat Daerah (PD) Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyerasian perencanaan provinsi dan kabupaten dalam rangka

penguatan sinergitas nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibahas bersama dengan DPRPB;
4. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kampung, distrik, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, proses penyusunan RKPD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Sesuai dengan uraian diatas, arah kebijakan tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Barat Periode 2025-2029 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat difokuskan dalam tema **“Penguatan Fondasi Transformasi dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Reformasi Tata Kelola, serta Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Pertanian Mandiri dalam Koridor Otonomi Khusus.”** yang didalamnya memuat fondasi awal untuk agenda-agenda transformasi didalam koridor Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus Papua) serta memperkuat dukungan sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah. Penjelasan Tema Pembangunan Daerah Papua Barat anara lain :

Penguatan Fondasi Transformasi dan Daya Saing Daerah

Frasa ini mencerminkan komitmen Papua Barat untuk meletakkan dasar-dasar perubahan sistemik yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Transformasi ini bertumpu pada manusia, institusi, dan sistem ekonomi yang produktif serta adil.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang unggul dan sehat menjadi prasyarat utama transformasi. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Ini menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan indeks daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi Tata Kelola

Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efisien menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan mempercepat pelayanan. Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan dana Otsus secara optimal dan berpihak.

Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Pertanian Mandiri

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memberdayakan sektor unggulan lokal, terutama pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, berbasis komunitas, serta menjamin keterlibatan aktif kelompok marginal, termasuk pemuda dan perempuan. Penguatan pertanian yang berdaulat dan berkelanjutan juga ditujukan untuk menjawab tantangan kerawanan pangan dan keterbatasan akses konsumsi.

Dalam Koridor Otonomi Khusus

Semua upaya transformasi dilakukan dalam semangat Otonomi Khusus yang berkeadilan dan kontekstual dengan realitas Papua Barat. Ini menegaskan bahwa pembangunan harus berpihak pada Orang Asli Papua dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya lokal, dengan tetap memastikan efektivitas dan integrasi dalam sistem nasional.

Tema ini mengandung pesan bahwa Papua Barat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kualitas hidup masyarakat, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan jati diri daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

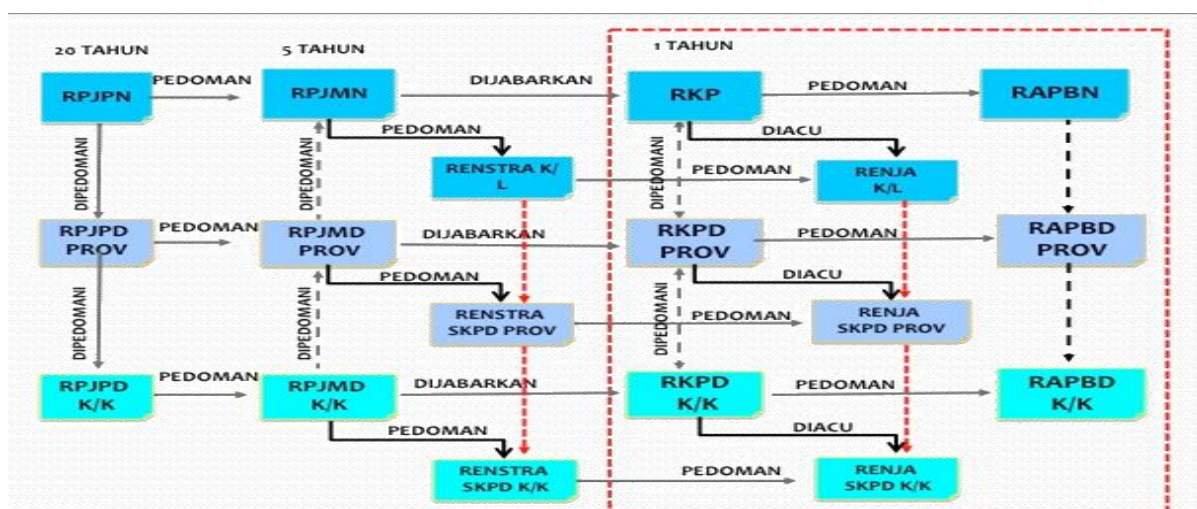
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2033;
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RKPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya disajikan dalam Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar I.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Sinkronisasi/Penyelarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional. Sinkronisasi perencanaan dokumen pembangunan antara pusat dan daerah untuk perencanaan pembangunan tahunan dilakukan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan salah satunya Koordinasi Teknis Pembangunan. Hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 307 dan 309 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan

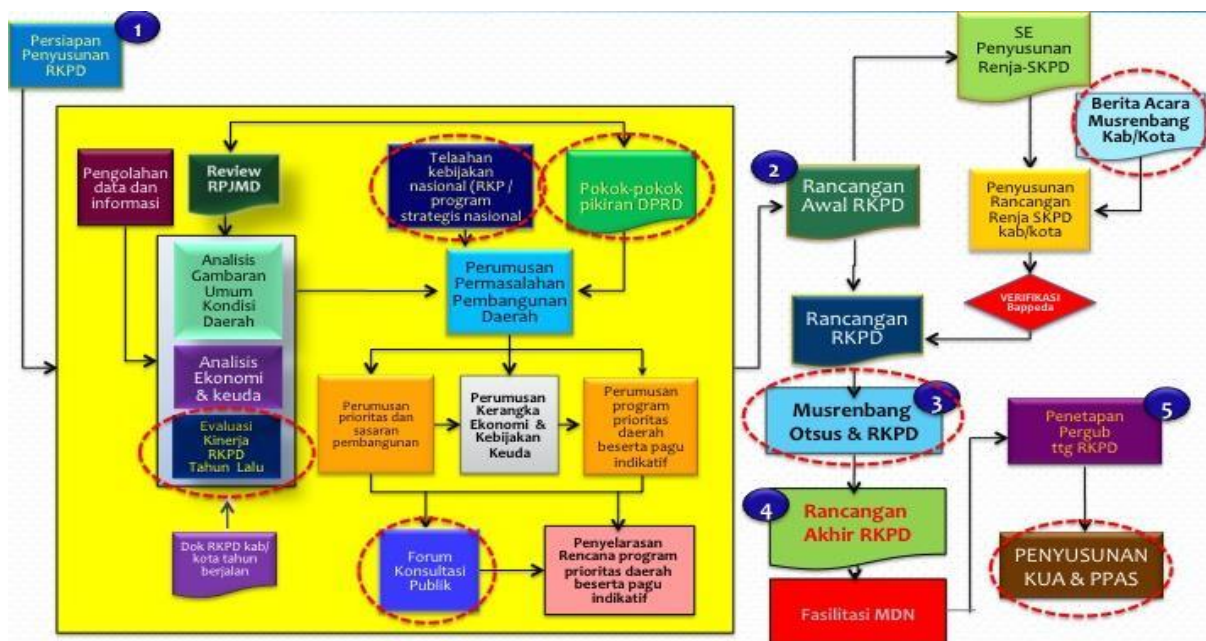
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunantahunan.

1.3.1 Keterhubungan RKPD dan RPJMD

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RKPD Papua Barat 2026 merupakan salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dari Gambar I.1, sesuai dengan arahan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang..... , maka berikut adalah bagan alir proses penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat :

Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Provinsi



Sumber: Bappeda Provinsi Papua Barat berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017, (diolah)

Adapun penjelasan Bagan alir tatacara Penyusunan RKPD Provinsi pada Gambar I.2 diatas adalah :

1. Nomor 1 (Persiapan Penyusunan RKPD)

Adalah proses dimana Bappeda mempersiapkan tim penyusun melalui SK Gubernur yang selanjutnya bertugas menyusun Rancangan Awal RKPD dengan mengacu kepada arahan RPD. Dalam tahapan ini tim penyusun akan melakukan Analisis Gambaran Umum, Analisis Kerangka Ekonomi dan Evaluasi kinerja RKPD yang lalu, serta menelaah kebijakan nasional dan pokok-pokok pikiran DPRD yang kemudian akan di konsultasikan dalam Forum Konsultasi Publik;

2. Nomor 2 (Rancangan Awal RKPD)

Pada tahapan ini, hasil Forum Konsultasi Publik akan menjadi masukkan pada Draft Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD selanjutnya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah akan diverifikasi oleh Bappeda dan selanjutnya melengkapi dokumen Rancangan Awal RKPD.

3. Nomor 3 (Rancangan RKPD)

Setelah proses verifikasi dan penggabungan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Rancangan Awal RKPD maka Rancangan Awal sudah menjadi Rancangan RKPD untuk selanjutnya masuk kedalam tahapan Musrenbang. Khusus bagi Provinsi Papua Barat akan dilakukan 2 (dua) Musrenbang yaitu Musrenbang Otonomi Khusus yang secara spesifik membahas arahan RKPD 2026 dalam kerangka Otonomi Khusus. Hasil dari pada Musrenbang Otonomi Khusus tersebut akan menjadi bahan didalam Musrenbang RKPD yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus.

4. Nomor 4 (Rancangan Akhir RKPD)

Hasil kesepakatan dari Musrenbang RKPD selanjutnya akan menjadi masukkan dalam Rancangan RKPD dan selanjutnya menjadi Rancangan Akhir RKPD. Setelah melakukan proses penyempurnaan, maka Rancangan Akhir RKPD akan melalui proses Fasilitasi Oleh Menteri Dalam Negeri yang dilakukan paling lambat 15 hari setelah dokumen lengkap. Rancangan Akhir ini akan menjadi bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD.

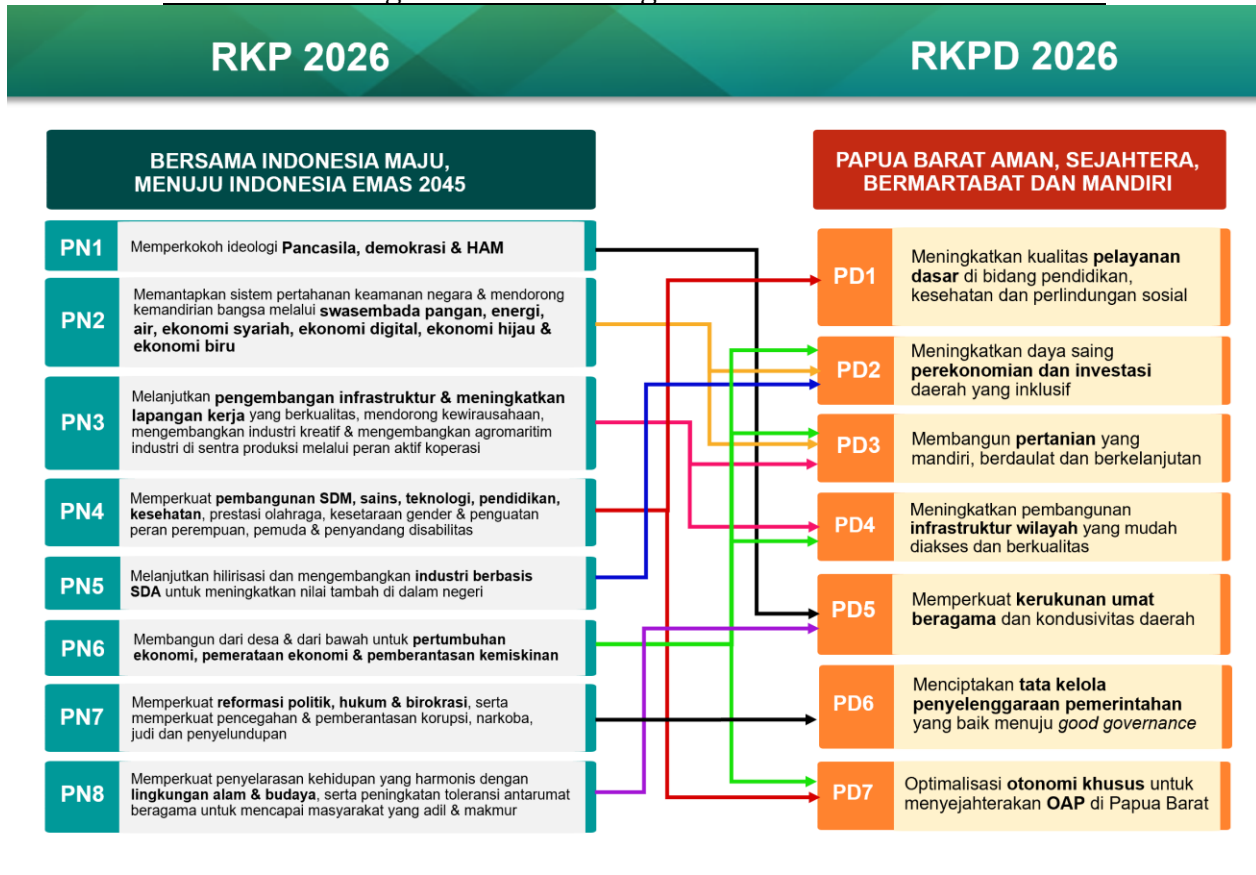
5. Nomor 5 (Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD)

Penetapan RKPD akan dilakukan paling terlambat setelah RKP ditetapkan untuk selanjutnya menjadi Acuan Gubernur untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

1.3.2 Keterhubungan RKPD dan RKP Tahun 2026

Penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat 2026 memperhatikan tiga prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2026. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kebijakan pembangunan nasional. Keterhubungan RKPD dan RKP Tahun 2026, dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar I.2 Diagram Keterhubungan RKPD dan RKP Tahun 2026



1.3.3 Keterhubungan RKPD dengan Renja PD

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis Restra PD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat. Renja PD memuat hasil evaluasi, tujuan dan sasaran, serta program, kegiatan dan sub kegiatan PD disertai dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yaitu periode Januari sampai dengan Desember 2026, yang akan digunakan sebagai pedoman pembangunan bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat harus melalui proses Fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya menjadi bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD tahun 2026. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Papua Barat 2026 yaitu:

1. Merumuskan Prioritas Daerah untuk Tahun 2026 sesuai arahan RPJMD Provinsi Papua Barat periode 2025-2029;
2. Sebagai media penyalarsan Perencanaan Pusat dan Daerah khususnya pada Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026;
4. Sebagai pedoman perencanaan bagi Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat;

5. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
6. Sebagai acuan konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahun 2026
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat disusun dalam 8 bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RKPD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian SDG's. selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah. Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Bab IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah. Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten. Bab ini memuat Mengemukakan capaian serta arahan pembangunan per wilayah Kabupaten Se Provinsi Papua Barat yang akan dikerjakan sesuai dengan kewenangan Provinsi.

Bab VI. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun dan akhir tahun perencanaan (2026).

Bab VIII. Penutup. Bab ini memuat Gambaran umum yang telah disampaikan dalam dokumen RKPD ini dan kaidah pelaksanaan RKPD sertacatatan penting dalam rencana pelaksanaan pada implementasi ke dalam dokumen anggaran (APBD).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah yang memuat 4 aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu bab ini memuat evaluasi hasil RKPD periode yang lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung serta pencapaian SDGs, selain itu juga memperhatikan dokumen Perubahan RPD Papua Barat 2023-2026 dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan penentuan target pembangunan RKPD Papua Barat 2026.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, bersama dengan beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya (Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong). Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut mendapat dukungan dari Surat Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsi menjadi tiga ditolak warga Papua di Jayapura dengan diadakannya demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditanggguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315, pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif untuk periode 2006-2011 yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah. Pada tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007.

Ibukota Provinsi Papua Barat berkedudukan di Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat sebelum memekarkan Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat, Tambrauw, Pegunungan Arfak dan Kota Sorong.

Sejak DPR RI menetapkan lahirnya daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tertanggal 17 November 2022, maka wilayah administrasi Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi menjadikan sebagian wilayah Papua Barat berada pada wilayah pesisir pantai dan laut, tepi sungai dan danau, gunung dan lembah-lembah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Wilayah Administrasi

Wilayah administratif Provinsi Papua Barat secara geografi terletak antara 00-40 Lintang Selatan dan antara 1240-1320 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Papua Barat berbatasan dengan:

- sebelah utara : Samudera Pasifik;
- sebelah selatan : Laut Banda, Provinsi Maluku;
- sebelah timur : Teluk Cendrawasih dan Provinsi Papua Tengah;
- sebelah barat : Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Maluku.

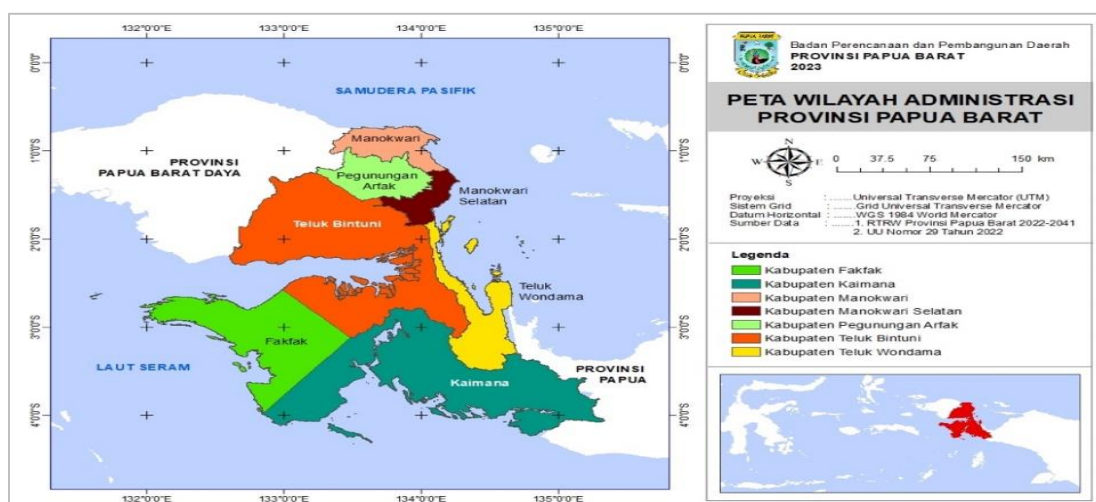
Pada awal pembentukannya (4 Oktober 1999), Provinsi Papua Barat terdiri atas 13 kabupaten/kota. Namun pasca pemekaran Provinsi Papua Barat Daya pada 8 Desember 2022, Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, yaitu: Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak (lihat Tabel II.1 dan Gambar II.1).

Tabel II.1 Luas Wilayah Daratan Papua Barat

No	Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi (km)	Luas (Ha)	Ibukota	Distrik	Kampung
1	Fakfak	295	1.432.000	Fakfak	17	149
2	Kaimana	303	1.850.000	Kaimana	7	86
3	Manokwari	3	295.794,02	Manokwari	9	136
4	Manokwari Selatan	67	183.702,79	Ransiki	6	57
5	Pegunungan Arfak	47	357.799,79	Ullong	10	166
6	Teluk Bintuni	128	1.863.700	Bintuni	24	262
7	Teluk Wondama	218	578.800	Rasiei	13	76
Total			6.561.797		86	932

Sumber: UU 26 Tahun 2002 & Materi Teknis PK RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041

Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041

Dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, secara keseluruhan terdapat 86 distrik yang terdiri dari 932 kampung/kelurahan. Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas (1.863.700 ha atau 28,40% dari luas wilayah provinsi), serta memiliki jumlah distrik terbanyak yaitu 24 distrik dengan 262 kampung/kelurahan. Adapun Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten dengan luas terkecil (183.702,79 ha atau 2,80% dari luas wilayah provinsi), dengan 6 distrik dan 57 kampung. Perbandingan luas kabupaten terluas dan tersempit di Provinsi Papua Barat sangat mencolok karena adanya perbedaan batas-batas kabupaten ketika pertama kali proses penyusunan dokumen pemekaran atas dasar kesepakatan etnis-etnis sehubungan dengan wilayah adat yang menjadi batas antar kabupaten.

Tabel II.2 Jumlah Kampung Menurut Letak Geografis, 2021

No	Kabupaten	Letak Geografis Kampung	
		Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
1	Fakfak	98	51
2	Kaimana	58	28
3	Teluk Wondama	62	14
4	Teluk Bintuni	35	227
5	Manokwari	58	115
6	Manokwari Selatan	17	40
7	Pegunungan Arfak	0	166
Papua Barat		328	641

Sumber: BPS Papua Barat, dalam “Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023”

Beberapa kabupaten dengan kabupaten lain berhubungan melalui daratan secara langsung. Batas daratan antar kabupaten dapat dimaknai secara lanskap karena memiliki arti ekologis dan sosial ekonomi yang penting untuk merumuskan rencana kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat. Walaupun beberapa kabupaten tampaknya lebih luas dari yang lainnya, namun pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan dan

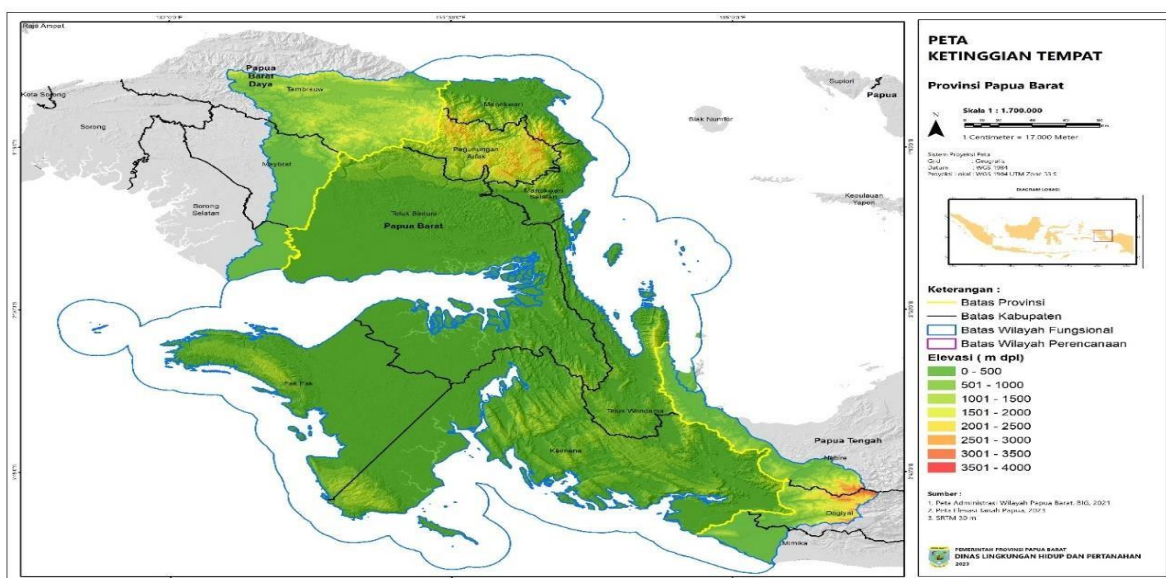
pengembangannya berjalan belum maksimal karena kendala kesesuaian lahan dan adanya beberapa kawasan konservasi. Secara umum, kondisi wilayah Provinsi Papua Barat meliputi wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan), pesisir dan kepulauan. Wilayah pedalaman/terpencil (pegunungan) di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, sedangkan wilayah yang memiliki kawasan pesisir adalah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Manokwari (lihat Tabel II.2).

2.1.1.1.2 Topografi

Topografi merupakan gambaran morfologi permukaan bumi atau suatu wilayah dalam batasan tertentu. Topografi disorot dari dua unsur utama yakni ketinggian tempat di atas permukaan laut (eleasi) dan aspek kelerengn atau kemiringan tempat yang diukur dari suatu bidang datar berdasarkan beda tinggi. Papua Barat merupakan Provinsi yang wilayah administrasinya berada pada dua sub bioregion utama dari Bioregion Indonesia New Guinea. Kedua sub-bioregion itu adalah Kepala Burung dan wilayah Leher Burung. Posisi yang demikian, menyebabkan Provinsi ini memiliki variasi elevasi yang sangat beragam dan cukup merata baik dalam batasan Provinsi maupun kabupaten.

Papua Barat memiliki ketinggian tempat mulai dari area yang cukup dekat dengan permukaan laut (\pm 0-20m dpl), hingga wilayah pegunungan dengan ketinggian >3000m dpl. Beberapa lanskap penciri topografi Papua Barat diantaranya daerah lembah-lembah yang datar tersebar di sekitar Teluk Bintuni, Isim, Prafi, Wosimi dan Teluk Arguni. Sementara kelompok pegunungan dengan puncaknya yang mencapai 3.000m di atas m dpl diantaranya Pegunungan Arfak, Pegunungan Tambrau, Pegunungan Kumawa, Pegunungan Fakfak dan Pegunungan Wondiwoi. Penciri topografi seperti ini, sangat ditentukan oleh faktor geologi (sejarah pembentukan suatu wilayah alami) dan unsur-unsur lain seperti hidrologi dan iklim yang efek-efeknya muncul kemudian setelah waktu evolusi yang sangat lama.

Gambar II.2 Peta Sebaran Elevasi Provinsi Papua Barat



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Wilayah Manokwari umumnya bertopografi datar di sepanjang pesisir Teluk Doreh dan lembah Prafi. Namun setelah daerah pesisir ± 1km, topografinya mulai bergelombang ringan sampai berat ke arah Selatan hingga berbatasan dengan distrik Oransbari kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Mokwam yang bergunung-gunung hingga wilayah di kabupaten Pegunungan Arfak. Di Sebelah Barat, sepanjang pantai Utara kondisi topografi masih sama yaitu bergelombang ringan sampai berat. Semakin ke Barat wilayah pesisir Utara, muncul bagian dari jajaran pegunungan Tambrau Utara yang curam membentuk tebing-tebing gunung terjal di tepi laut. Mulai wilayah pantai Amban hingga kampung Warpaperi, terbentang jajaran pantai bertebing curam, berpasir halus hingga berkerikil kasar. Pantai-pantai ini terbuka ke arah laut tanpa ada pelindung alami seperti pulau atau teluk-teluk dengan cekungan yang luas, sehingga wilayah ini cukup bergelombang ketika musim angin Selatan. Umumnya pantai berpasir halus di sepanjang Utara Manokwari relatif sempit, namun sangat panjang dan menempel rapat pada tebing-tebing gunung.

Manokwari Selatan bagian Barat mulai dari kampung-kampung di Distrik Oransbari yang berbatasan langsung dengan Distrik Tanah Rubuh Manokwari, memiliki topografi bergelombang ringan sampai berat dan sangat dekat dengan garis pantai. Daerah yang relatif datar adalah Kampung Sidomulyo, Margomulyo dan kampung sekitar seperti Muari, Warbiadi, Waroser, Watariri dan Wandoki. Distrik Oransbari relatif datar karena dekat dengan pantai, terdapat hutan mangrove dan hutan rawa yang dipengaruhi oleh aliran sungai Muari. Kawasan pertanian di Distrik Oransbari menempati wilayah yang cukup luas dan datar hingga berbatasan dengan kaki Pegunungan Arfak yang merupakan kawasan Cagar Alam (CA). Efek topografi Pegunungan Arfak adalah banyaknya sungai-sungai yang mengalir membela distrik Oransbari.

Tabel II.3 Sebaran Elevasi Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	0-500 mdpl	1001- 1500 mdpl	1501- 2000 mdpl	2001- 2500 mdpl	2501- 3000 mdpl	>3000 mdpl
1	Fakfak	824.011	32.096				
2	Kaimana	1.248.531	91.578	1.023			
3	Manokwari	153.787	37.157	25.602	12.293	1.551	
4	Manokwari Selatan	109.492	25.159	9.161	523		
5	Pegunungan Arfak						
6	Teluk Bintuni	333	92.030	131.117	76.678	5.921	
7	Teluk Wondama	1.776.973	38.528	1.362	450		

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana memiliki luas wilayah dengan ketinggian antara 1000-1500m dpl yang lebih kecil (Tabel 3). Penyebabnya adalah kabupaten-kabupaten tersebut yang berada di wilayah pesisir pantai,

dan relatif datar. Sebaliknya Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, sebagian wilayahnya merupakan dataran tinggi Pegunungan Arfak.

Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat, karena sebagian besar wilayahnya menempati area dataran tinggi dalam kawasan CA Pegunungan Arfak dengan ketinggian >3000 mdpl. Akibat berada di dataran tinggi, kabupaten Pegunungan Arfak memiliki daerah datar yang sangat sempit untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, termasuk ketersediaan wilayah pemukiman yang sangat terbatas. Sementara itu, Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan area terendah (0-500 m dpl) dan dataran terluas di Papua Barat. Area terendah dan datar di Teluk Bintuni adalah kawasan hutan mangrove dan hutan rawa. Terbentuknya kawasan mangrove dan rawa disebabkan oleh sedimentasi akibat beberapa sungai besar yang hulunya berada di Pegunungan di wilayah leher burung dan kepala burung.

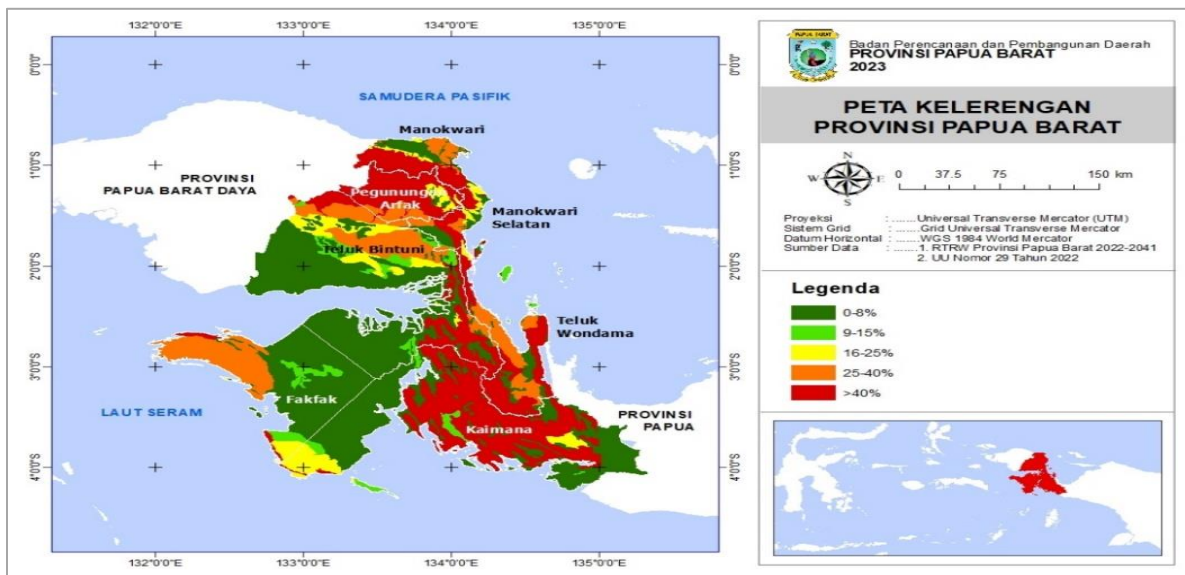
Tabel II.4 Banyaknya Kampung Menurut Kondisi Topografi

No	Kabupaten	Kondisi Topografi		
		Lereng/Puncak	Lembah	Dataran
1	Fakfak	135	5	9
2	Kaimana	80	0	6
3	Teluk Wondama	2	0	74
4	Teluk Bintuni	138	19	105
5	Manokwari	145	1	27
6	Manokwari Selatan	38	1	18
7	Pegunungan Arfak	147	3	16
Papua Barat		685	29	255

Sumber: BPS Papua Barat, dalam "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023"

Kaimana dan Fakfak adalah dua kabupaten dengan karakter topografi yang hampir sama, pembeda salah satunya adalah Teluk Arguni yang sangat panjang dan mulai menyempit hingga bertemu dengan wilayah leher burung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Wondama juga menempati wilayah relatif sempit dari sisi pengembangan wilayah kabupaten karena kabupaten ini berada tepat antara kaki Pegunungan Wondiwoi dan tepi Teluk Wondama.

Gambar II.3 Peta Kelerengan Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 dan pengolahan data 2024

Berdasarkan risalah singkat karakter morfologi wilayah, maka disimpulkan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama serta Teluk Bintuni, perlu upaya ekstra hati-hati dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, karena potensi bencana alam dan serangan wabah penyakit sangatlah tinggi di ketiga kabupaten tersebut.

2.1.1.1.3 Hidrologi

Studi tentang tata air/hidrologi dirasakan semakin penting, terutama di daerah berkembang yang memiliki permasalahan budaya, sosial dan teknologi dalam pengelolaan air agar sesuai dengan lingkungan. Pendekatan hidrologi menekankan bagaimana kaitan tumbuhan terhadap tata air. Pada daerah yang bervegetasi curah hujan sebelum sampai ke permukaan tanah akan terhalang oleh tajuk, ranting cabang dan batang pohon baik pada strata pohon yang paling tinggi sampai tumbuhan bawah. Dengan demikian vegetasi mengurangi energi kinetik air hujan sampai ke tanah yang berpengaruh terhadap aliran permukaan, infiltrasi dan ketersediaan air di dalam tanah. Pada daerah yang bervegetasi ancaman erosi, longsor, banjir dan bahkan banjir bandang sangat rendah karena air hujan banyak terserap oleh tajuk pohon, serasah dan tanah yang pada akhirnya tersimpan dalam tanah.

Tabel II.5 Luas Area Hidrologi di Provinsi Papua Barat

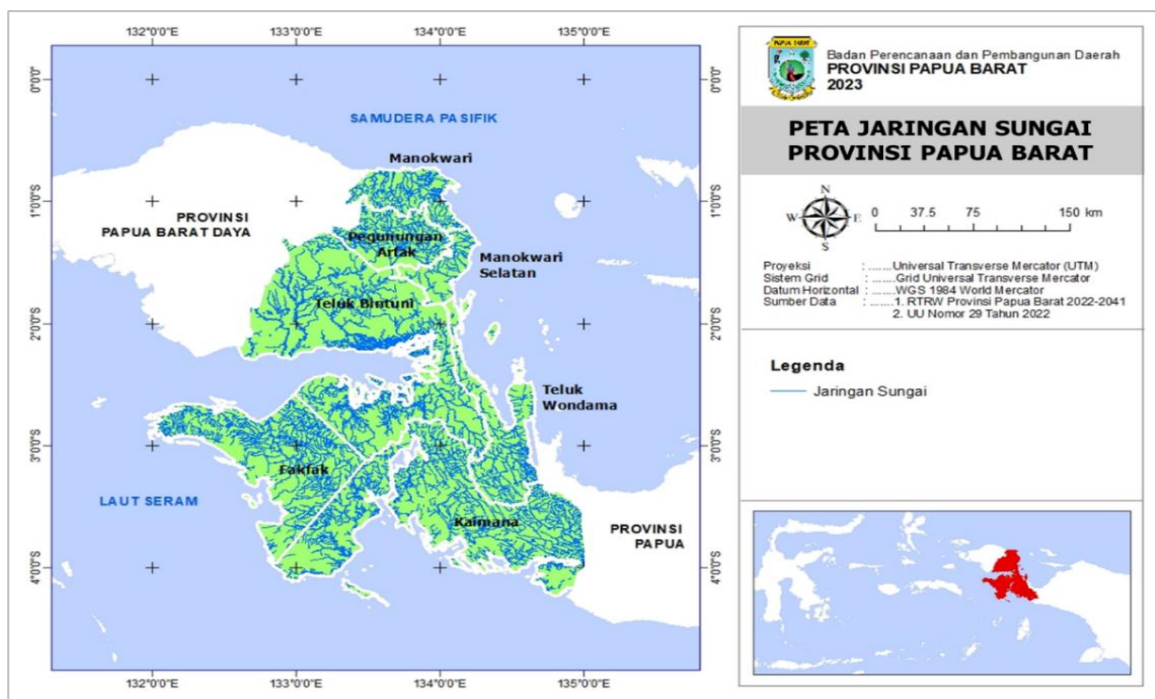
Wilayah	Jumlah DAS	Luas DAS	Jumlah Sungai	Panjang Total (km)
Fakfak	858	974.306	556	4.068
Kaimana	1.079	1.784.081	1.391	7.603
Manokwari	72	276.158	267	1.343
Manokwari Selatan	32	183.618	69	624
Pegunungan Arfak	12	329.792	316	1.630
Teluk Bintuni	90	1.992.408	1.543	7.252

Wilayah	Jumlah DAS	Luas DAS	Jumlah Sungai	Panjang Total (km)
Teluk Wondama	365	485.555	271	1.728
Total	2.679	9.170.343	6.393	32.050

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Provinsi Papua Barat memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Provinsi Papua Barat relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Provinsi Papua Barat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumber daya air sangat urgen sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik.

Gambar II.4 Peta Jaringan Sungai di Provinsi Papua Barat

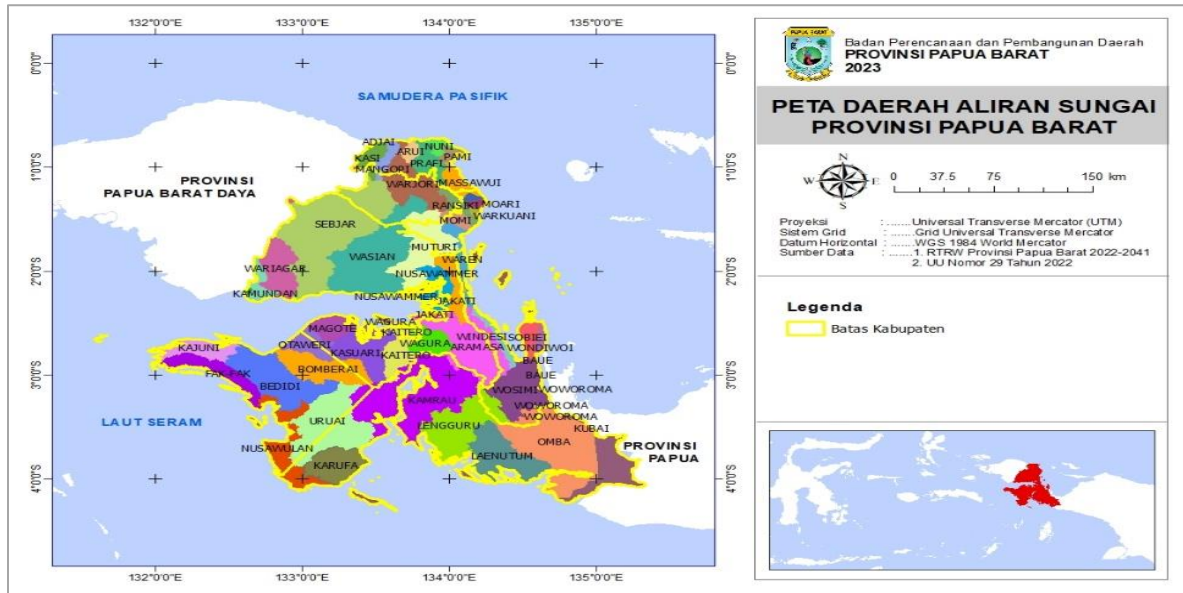


Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

DAS di Provinsi Papua Barat dengan klasifikasi dipulihkan daya dukungnya terdapat 8 DAS terdiri dari DAS Ransiki, DAS Aipiri, DAS Arui, DAS Prafi, DAS Warmare, DAS Pami, DAS Wosi dan DAS Batusini (BPDAS Remu Ransiki, 2014). Dari 8 (delapan) DAS dengan kategori dipulihkan daya dukungnya dan prioritas untuk ditangani yaitu, DAS Arui, DAS Prafi dan DAS Wosi. Ketiganya merupakan DAS yang terindikasi mengalami penurunan fungsi hidrologis. Provinsi Papua Barat dengan 7 kabupaten memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luasan 9.170.343 ha, yang terdiri atas 2.679 DAS, terdapat 6.393 sungai dan dengan panjang keseluruhan sungai 32.050 km (Gambar II.4).

Wilayah Provinsi Papua Barat dilewati beberapa sungai besar yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Secara garis besar, daerah tangkapan sungai (catchment area) di Provinsi Papua Barat terdiri atas 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu: (1) SWS Kamundan–Sebyar dengan luas wilayah yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni; serta (2) SWS Omba yang meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

Tabel II.6 Pembagian Satuan Wilayah Sungai (DAS) di Papua Barat

No	DAS	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
1	Adi	155,18	Kaimana	Omba
2	Andai	n.a	Manokwari	Kamundan – Sebyar
3	Angrameos	21,43	Teluk Wondama	Omba
5	Armasa	2.756,20	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Kamundan - Sebyar
6	Arui	232,35	Manokwari	Kamundan - Sebyar
10	Baue	173,75	Teluk Wondama	Omba
11	Bedidi	2.569,20	Fakfak	Omba
13	Bomberai	1.668,32	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba
15	Dramai	71,53	Kaimana	Omba
16	Fakfak	1.173,83	Fakfak	Omba
20	Jakati	893,53	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
22	Kabuai	0,03	Teluk Wondama	Omba
25	Kaitero	944,79	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba, Kamundan – Sebyar

No	DAS	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
26	Kajuni	932,70	Fakfak	Omba
27	Kamrau	5.021,88	Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
28	Kamundan	n.a	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
30	Karas	46,76	Fakfak	Omba
31	Karawatu	1,31	Kaimana	Omba
32	Karufa	1.328,42	Kaimana	Omba
33	Kasi	n.a	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
34	Kasuari	1.662,54	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
37	Kayumerah	24,28	Kaimana	Omba
42	Kuwoni	0,02	Teluk Wondama	Omba
44	Laenutum	2.054,42	Kaimana	Omba
45	Lengguru	2.515,37	Teluk Bintuni, Kaimana	Omba
46	Magote	713,25	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
49	Mangoapi	373,61	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
50	Maniai	17,36	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
54	Maransabadi	5,19	Teluk Wondama	Omba
57	Mioswaar	109,40	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
59	Moari	125,49	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
60	Momi	316,26	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
61	Muturi	2167,77	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
62	Namatote	38,84	Kaimana	Omba
63	Nuni	230,62	Manokwari	Kamundan - Sebyar
64	Nusawammer	827,60	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
65	Nusawulan	1.618,25	Kaimana, Fakfak	Omba
66	Ogar	18,22	Fakfak	Omba
67	Omba	4.238,39	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
68	Otaweri	794,38	Teluk Bintuni, Fakfak	Omba, Kamundan - Sebyar
70	Pami	216,47	Manokwari	Kamundan - Sebyar
71	Panjang	12,42	Fakfak	Omba
72	Prafi	675,58	Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
73	Ransiki	427,70	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar

No	DAS	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Wilayah Sungai
74	Roon	54,79	Teluk Wondama	Omba
75	Rorebo	0,04	Teluk Wondama	Omba
76	Rouw	0,94	Teluk Wondama	Omba
77	Rumberpon	100,37	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
79	Salakula	12,73	Kaimana	Omba
82	Sebyar	n.a	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
85	Sianiri Kecil	3,81	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
87	Sobieci	481,21	Teluk Wondama	Omba
90	Urat	5,39	Fakfak	Omba
91	Uruai	3.080,84	Kaimana, Fakfak	Omba
92	Wagura	814,34	Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
96	Warbiadi	93,44	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak	Kamundan - Sebyar
97	Waren	608,86	Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
98	Wariagar	n.a	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
100	Warjori	1.634,55	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Manokwari	Kamundan - Sebyar
101	Warkuani	69,46	Manokwari Selatan	Kamundan - Sebyar
104	Wasian	3.922,79	Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kamundan - Sebyar
105	Wassawui	499,50	Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari	Kamundan - Sebyar
110	Windsesi	385,51	Teluk Wondama	Kamundan - Sebyar
111	Wondiboy	247,03	Teluk Wondama	Omba
112	Wosimi	1.887,61	Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana	Omba
114	Woworoma	65,43	Teluk Wondama, Kaimana	Omba

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

Danau lain yang termasuk dalam kategori luas di Kabupaten Kaimana adalah Danau Laamora (2.445,14 Ha), Danau Kamakawulo (2.320,42 Ha), Danau Daiwasu (2.196,77 Ha), dan Danau Manami (919,75 Ha). Danau lain yang berukuran di atas 1.000 Ha di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah Danau Angga Gigi (2.124,87 Ha) dan Danau Angga Gita (2.237,23 Ha) di Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Danau Tanemot di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu seluas 1.723,61 Ha. Luas dan penyebaran danau di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel II.6.

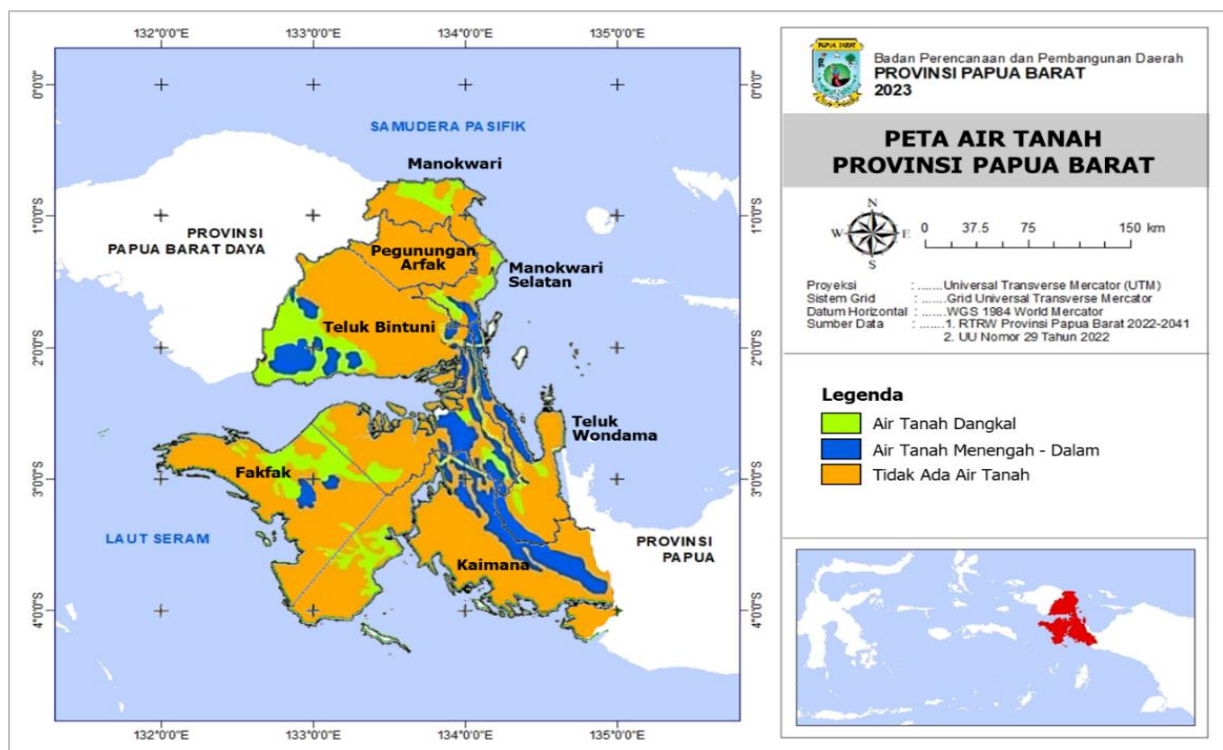
Tabel II.7 Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat

No	Danau	Luas (ha)	Kabupaten	No	Danau	Luas (ha)	Kabupaten
1	Wasidori	14,39	Manokwari	10	Kinumisumar	2,80	Fakfak
2	Kabori	25,84	Manokwari	11	Oyas	1,15	Fakfak
3	Anggi Gigi	2.124,87	Pegunungan Arfak	12	Kuniki	3,52	Fakfak
4	Anggi Gita	2.237,23	Pegunungan Arfak	13	Daiwasu	2.196,77	Kaimana
5	Makiri	661,62	Teluk Bintuni	14	Laamora	2.445,14	Kaimana
6	Tanemot	1.723,61	Teluk Bintuni	15	Kamakawulo	2.320,42	Kaimana
7	Tawajo	11,14	Teluk Bintuni	16	Jamur	3.533,34	Kaimana
8	Ayot	42,35	Teluk Bintuni	17	Manami	919,75	Kaimana
9	Ambuar	37,25	Teluk Wondama				

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

Selain potensi air permukaan yang berada di sungai dan danau, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi air tanah yang cukup tinggi. Air tanah mengandung dua pengertian. Pertama, air tanah yang terkandung dalam tanah hingga batas kedalaman perakaran pada umumnya tanaman atau pada solum tanah dan disebut sebagai kandungan lengas tanah atau soil moisture. Kedua, air tanah dibawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari yang tersebut di atas, dan disebut sebagai ground water atau air aquifer. Di Provinsi Papua Barat, potensi air tanah dangkal yang cukup signifikan terdapat di Kabupaten Sorong Selatan hingga mencapai 40%. Penyebaran lokasi air tanah di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel II.7 dan Gambar II.6.

Gambar II.6 Peta Air Tanah di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

Tabel II.8 Luas Areal Air Tanah (*Ground Water*) di Papua Barat

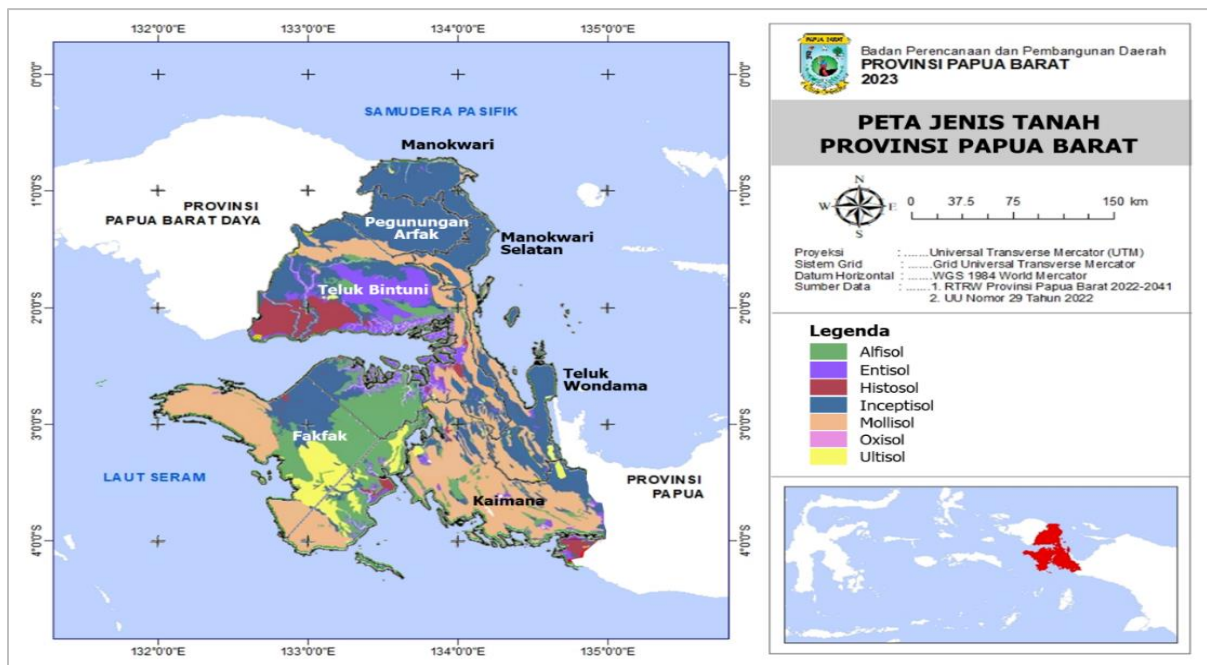
No	Kabupaten	Luas (km ²)	Air Tanah Dangkal (km ²)	Air Tanah Menengah-Dalam (km ²)	Tanpa Air Tanah (km ²)
1	Fakfak	11.036,48	1.557,58	356,89	9.122,00
2	Kaimana	16.241,84	982,99	2.615,05	12.643,79
3	Teluk Wondama	3.959,53	111,44	729,28	3.118,81
4	Teluk Bintuni	20.840,83	4.088,51	3.709,02	13.043,30
5	Manokwari	4.452,76	788,55	0,00	3.664,21
6	Manokwari Selatan	2.812,44	611,79	564,31	1.636,34
7	Pegunungan Arfak	2.773,74	57,08	2,93	2.713,73

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

2.1.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat berdasarkan sistem taksonomi tanah USDA terdiri atas: Histosols, Entisols, Inceptisols, Alfisols, Mollisols, Ultisols, dan Oxisols. Dari ketujuh ordo tanah yang ditemukan di Provinsi Papua Barat, luasan terbesar ditempati oleh Ordo Inceptisols dan Mollisols. Melihat kondisi demikian, Provinsi Papua Barat mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor pertanian karena tanah dengan Ordo Inceptisols dan Mollisols merupakan jenis tanah yang subur. Adapun peta sebaran jenis tanah di wilayah Papua Barat dapat dilihat pada Gambar II.7.

Gambar II.7 Peta Jenis Tanah di Provinsi Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2022-2041 (data diolah, 2024)

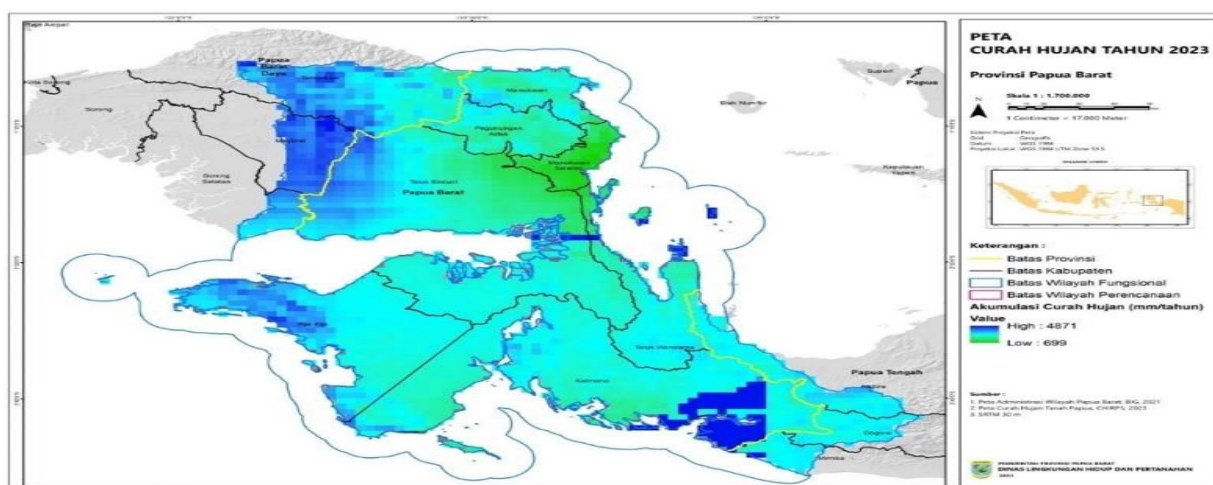
2.1.1.1.5 Klimatologi

Provinsi Papua Barat terletak tepat di sebelah Selatan garis khatulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah tropika humida. Karena daerahnya yang bergunung-gunung, maka iklim di Provinsi Papua Barat sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Pola umum iklim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh topografinya yang kasar. Suhu sangat

bergantung dari ketinggian, sedangkan ketinggian dan kejajaran barisan pegunungan mempengaruhi pola angin dan presipitasi dalam setiap daerah.

Suhu dan kelembaban merupakan komponen iklim paling konstan di Provinsi Papua Barat. Suhu udara rata-rata di Provinsi Papua Barat tahun 2023 cenderung stabil yaitu berkisar antara 26,50-28,00°C. Selain itu, kelembaban udara pada tahun 2023 berkisar antara 81-85 persen. Kecepatan anginnya terbilang normal dengan kisaran mencapai 2-3 knot. Selanjutnya rata-rata hari hujan di Provinsi Papua Barat tahun 2023 berkisar antara 150- 250 hari, dengan jumlah curah hujan yang cukup bervariasi sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar II.8.

Gambar II.8 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Barat Tahun 2023



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Tabel II.9 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG di Provinsi Papua Barat, 2022

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Suhu			Kelembaban (%)			Jumlah Curah Hujan (mm3)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum			
Fak Fak	Stasiun Meteorologi Torea	20,40	26,66	35,70	39,00	83,84	100	3.775,10	263,00	4,44
Kaimana	Stasiun Meteorologi Kaimana	22,40	27,71	36,70	54,00	83,32	99	2.576,30	246,00	4,97
Teluk Wondama	Pos Hujan Wasior	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2.329,50	222,00	n.a
Teluk Bintuni	Pos Hujan Tisai SPV	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2.487,50	122,00	n.a
Manokwari	Stasiun Meteorologi Rendani	22,80	28,24	34,60	51,00	81,12	98	2.769,80	245,00	4,62

Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Suhu			Kelembaban (%)			Jumlah Curah Hujan (mm3)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum			
Manokwari Selatan	Stasiun Klimatologi Papua Barat	20,00	28,10	36,00	47,00	84,27	100	1.889,90	200,00	4,64
Pegunungan Arfak	-	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Pada tingkat kabupaten, suhu udara maksimal tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Kaimana yaitu mencapai 36,70°C. Pada kondisi suhu udara minimum, suhu udara minimal terendah yang terdata di stasiun pengamatan BMKG pada tahun 2023 berada di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu 20,00 °C. Berdasarkan penyinaran matahari, pada tahun 2023 durasi penyinaran tertinggi berada di Kabupaten Kaimana sebesar 4,97%, sedangkan durasi penyinaran matahari terendah berada di Kabupaten Fak Fak sebesar 4,44%.

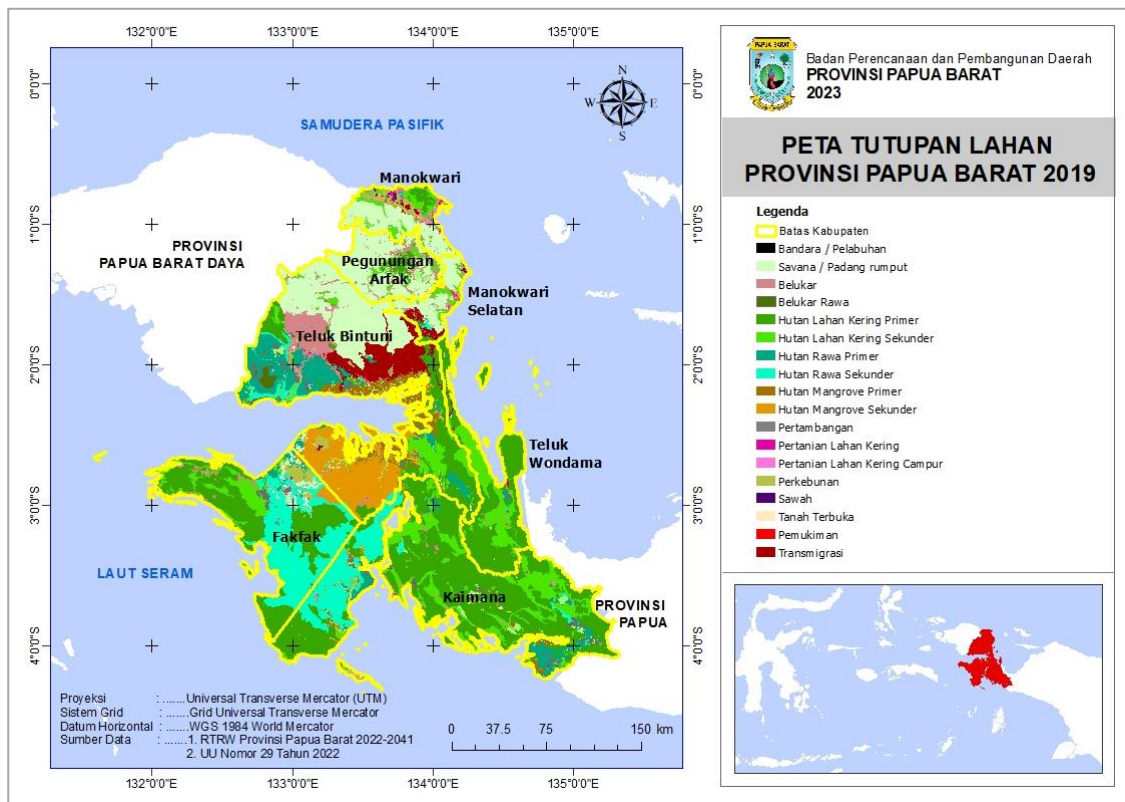
2.1.1.1.6 Tutupan Lahan

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas relief atau topografi, iklim, tanah dan air dan biotik seperti manusia, hewan dan tumbuhan yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Penggunaan lahan mempunyai makna berbeda dengan tutupan lahan karena berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tersebut.

Berdasarkan Gambar II.9 diketahui bahwa sebagian besar lahan di Provinsi Papua Barat didominasi hutan. Jenis hutan dengan luasan tertinggi adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan basah primer. Gambar II.9 juga menunjukkan bahwa lahan terbangun di Provinsi Papua Barat masih relatif kecil. Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Manokwari merupakan wilayah yang memiliki fungsi guna lahan permukiman tertinggi dan telah tumbuh menjadi sentra kegiatan perkotaan, di samping berperan sebagai ibukota Papua Barat.

Penduduk yang semakin bertambah dan kawasan perkotaan yang semakin ramai menyebabkan telah terjadi peningkatan pemanfaatan lahan guna keperluan pemukiman, pertanian, dan peningkatan kebutuhan air. Penutupan hutan di wilayah Papua Barat Daya secara agregat masih tertutup rapat dengan persentase kurang lebih 91 %. Hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder merupakan tutupan yang sangat besar di wilayah ini. Teluk Bintuni adalah Kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap tutupan hutan di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 33,08%, disusul kabupaten Kaimana 29,60% dan Kabupaten Fakfak 16,17%.

Gambar II.9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Webgis KLHK OpenSource (diakses pada 12 Maret 2023)

Pasca penetapan 6 kabupaten/kota (Kota Sorong, Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw dan Sorong Selatan) menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya pada 8 Desember 2022 (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022), maka kedepannya terdapat urgensi pembentukan pusat kegiatan ekonomi baru atau kawasan perkotaan baru di Provinsi Papua Barat karena beralihnya wilayah administrasi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong menjadi Papua Barat Daya. Kota Sorong selama ini memang telah tumbuh menjadi sentra-sentra kegiatan perkotaan dan pintu gerbang kegiatan jasa, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat perkotaan.

2.1.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2020, Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi Kajian untuk mendapatkan nilai IRB dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing kabupaten. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana, dan komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara, komponen kapasitas adalah unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistic, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta kapasitas pemulihan.

Wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik dan Australia. Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari sesar-sesar normal, antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-

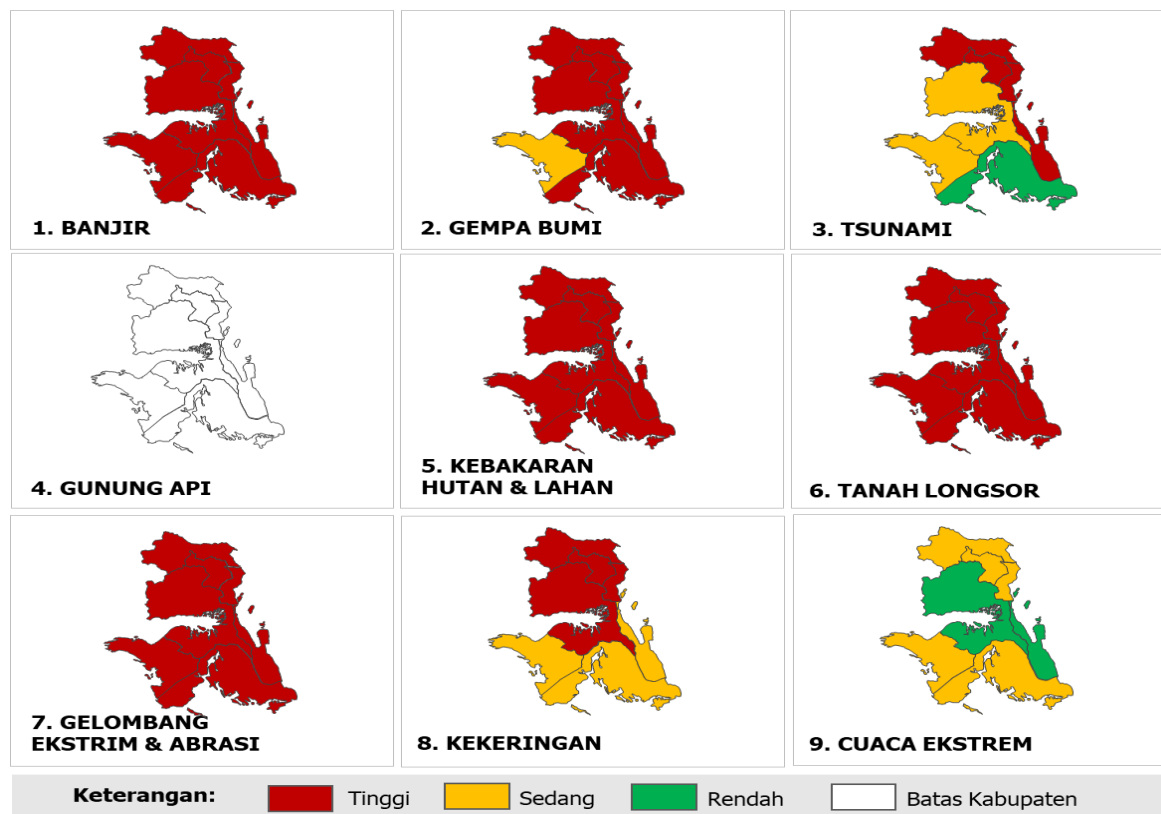
Aiduna sehingga wilayah Papua Barat rawan terhadap bencana gempa bumi. Secara spesifik, Tabel II.10 menunjukkan nilai indeks risiko bencana setiap kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Papua Barat

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
1	Teluk Bintuni	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	tinggi
2	Manokwari Selatan	152,06	152,06	152,06	160,35	160,35	160,35	tinggi
3	Pegunungan Arfak	152,06	152,06	152,06	160,35	160,35	160,35	tinggi
4	Teluk Wondama	147,20	147,20	147,20	143,74	143,74	139,00	sedang
5	Manokwari	146,96	146,96	146,96	146,96	148,96	165,71	tinggi
6	Kaimana	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	sedang
7	Fakfak	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	sedang
Papua Barat		137,63	137,63	137,63	143,63	143,92	145,76	tinggi

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023"

Gambar II.10 Peta Risiko Bencana Per Ancaman di Papua Barat Tahun 2023



Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023 (diolah)"

Tabel II.11 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Berdasarkan Kabupaten Tahun 2023

No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Teluk Bintuni	166,80	Tinggi	Banjir	36,00	tinggi
				Gempa bumi	21,60	tinggi
				Tsunami	9,60	sedang
				Kebakaran hutan dan lahan	24,00	tinggi
				Tanah longsor	24,00	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	24,00	tinggi
				Kekeringan	24,00	tinggi
				Cuaca ekstrim	3,60	rendah
2	Manokwari Selatan	160,35	Tinggi	Banjir	21,60	tinggi
				Gempa bumi	32,40	tinggi
				Tsunami	20,40	tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	32,40	tinggi
				Tanah longsor	21,60	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36,00	tinggi
				Kekeringan	20,40	tinggi
				Cuaca ekstrim	6,80	sedang
3	Pegunungan Arfak	160,35	Tinggi	Banjir	21,60	tinggi
				Gempa bumi	32,40	tinggi
				Tsunami	20,40	tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	32,40	tinggi
				Tanah longsor	21,60	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36,00	tinggi
				Kekeringan	20,40	tinggi
				Cuaca ekstrim	6,80	sedang
4	Teluk Wondama	139,90	Sedang	Banjir	27,75	tinggi
				Gempa bumi	19,21	tinggi
				Tsunami	17,08	tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	14,94	tinggi
				Tanah longsor	22,42	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	14,94	tinggi
				Kekeringan	11,39	sedang
				Cuaca ekstrim	3,20	rendah
5	Manokwari	165,71	Tinggi	Banjir	21,60	tinggi
				Gempa bumi	32,40	tinggi
				Tsunami	24,00	tinggi
				Kebakaran hutan dan lahan	36,00	tinggi
				Tanah longsor	24,00	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	36,00	tinggi
				Kekeringan	24,00	tinggi
				Cuaca ekstrim	6,80	sedang
6	Kaimana	122,00	Sedang	Banjir	36,00	tinggi
				Gempa bumi	14,40	tinggi
				Tsunami	4,80	rendah

No	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
				Kebakaran hutan dan lahan	16,80	tinggi
				Tanah longsor	16,80	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20,00	tinggi
				Kekeringan	6,40	sedang
				Cuaca ekstrim	6,80	sedang
7	Fakfak	105,20	sedang	Banjir	21,60	tinggi
				Gempa bumi	7,20	sedang
				Tsunami	9,60	sedang
				Kebakaran hutan dan lahan	16,80	tinggi
				Tanah longsor	16,80	tinggi
				Gelombang ekstrim dan abrasi	20,00	tinggi
				Kekeringan	6,40	sedang
				Cuaca ekstrim	6,80	sedang

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023"

Tabel II.11 menyediakan data indeks risiko per ancaman di setiap kabupaten. Berdasarkan Tabel II.11, dapat dilihat bahwa 4 kabupaten di Papua Barat pada tahun 2023 diklasifikasikan sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Manokwari. Sementara, 3 kabupaten lainnya diklasifikasikan sebagai daerah dengan risiko bencana sedang, yaitu Kabupaten Kaimana, Fakfak dan Teluk Wondama.

Berdasarkan Tabel II.11 dan Gambar II.10, dapat dilihat bahwa pada kasus bencana banjir, seluruh kabupaten di Papua Barat termasuk dalam kelas risiko tinggi. Wilayah yang memiliki risiko bencana banjir tertinggi adalah Teluk Bintuni dan Kaimana dengan skor IRB bencana banjir sebesar 36,00. Wilayah Provinsi Papua Barat juga sangat berpotensi terhadap gempa bumi dan kemungkinan diikuti oleh tsunami. Di Provinsi Papua Barat, terdapat sejumlah lipatan dan sesar naik sebagai akibat dari interaksi (tubrukan) antara kedua lempeng tektonik, seperti Sesar Sorong (SFZ), Sesar Ransiki (RFZ), Sesar Lungguru (LFZ) dan Sesar Tarera-Aiduna (TAFZ). Kabupaten yang memiliki risiko tinggi dalam bencana gempa bumi dan tsunami adalah Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sementara, kabupaten dengan risiko tinggi dalam bencana gempa bumi namun memiliki risiko sedang atau rendah dalam bencana tsunami adalah Teluk Bintuni dan Kaimana. Sementara, Kabupaten Fakfak dinilai memiliki risiko sedang untuk bencana gempa bumi dan tsunami. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Berdasarkan Tabel II.11 dan Gambar II.10 diketahui bahwa seluruh kabupaten di Papua Barat termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bencana longsor.

BNPB mendefinisikan gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang terjadi karena efek terjadinya siklon tropis yang memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, disertai hujan deras. Tabel II.11 menunjukkan bahwa seluruh wilayah kabupaten di Papua Barat yang memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana gelombang ekstrim.

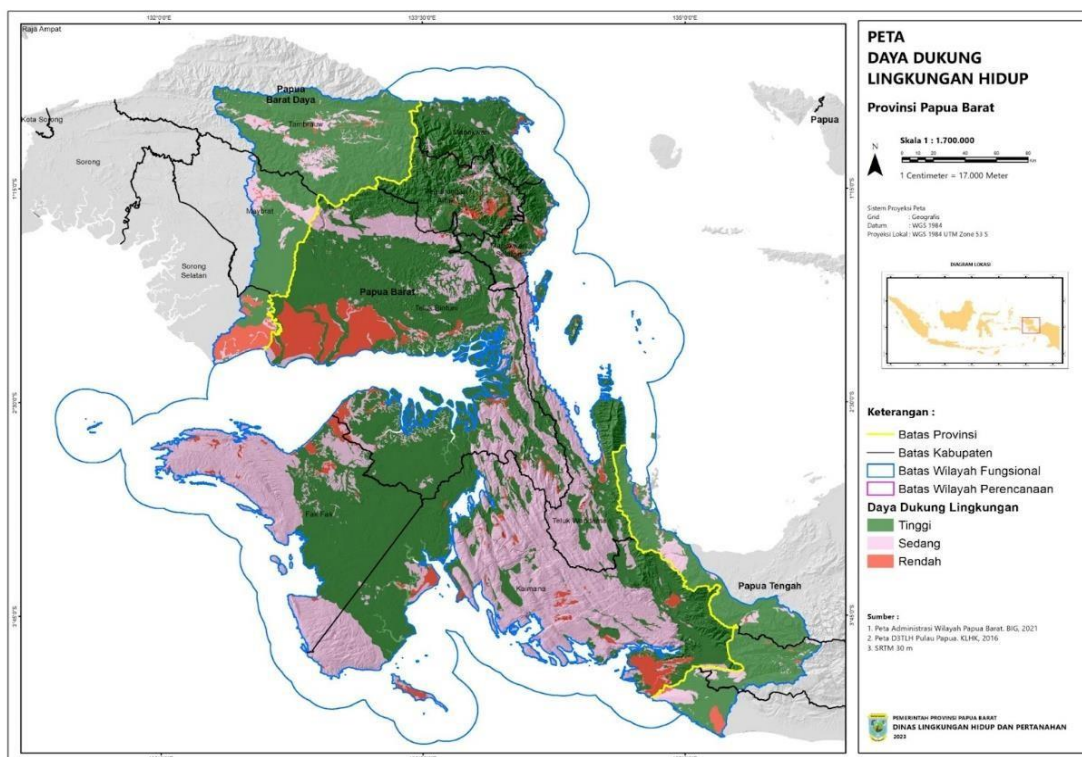
Sebagai daerah yang didominasi tutupan lahan hutan, kelas risiko bencana kebakaran lahan dan hutan di seluruh kabupaten Papua Barat termasuk ke dalam kategori tinggi. Bencana kebakaran lahan dan hutan juga dapat terjadi dikarenakan oleh kegiatan budidaya yang dilakukan manusia. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian juga menjadi salah satu penyebab bencana karena pembukaan tersebut dilakukan dengan pembakaran untuk meminimalisasi biaya dan hasilnya sangat cepat. Pada kasus bencana kekeringan, kabupaten dengan risiko tinggi adalah Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Manokwari. Sedangkan, kabupaten yang memiliki kelas risiko kekeringan sedang Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.

2.1.1.1.8 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan (carrying capacity) merupakan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan yang digambarkan sebagai batas atas dari pertumbuhan suatu populasi, dimana jumlah populasi tersebut tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. Hal ini dimaksudkan bahwa terdapat kepastian keterbatasan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan. Selanjutnya daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan atau ketersediaan sumber daya alam, kemampuan lingkungan dalam menangani limbah dan polusi, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pasal 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap segala sesuatu yang bersifat. Keberadaan sumber daya alam dalam suatu ekosistem tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Berbagai metode dan pendekatan dilakukan untuk memahami daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa daya dukung Provinsi Papua Barat kategori tinggi pada wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, diikuti Kaimana dan terendah pada kategori ini Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari (Gambar II.11). Hal tersebut menggambarkan kondisi lingkungan terutama wilayah DAS yang terhubung dengan wilayah bagian hulu DAS sebagai wilayah tangkapan air.

Gambar II.11 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

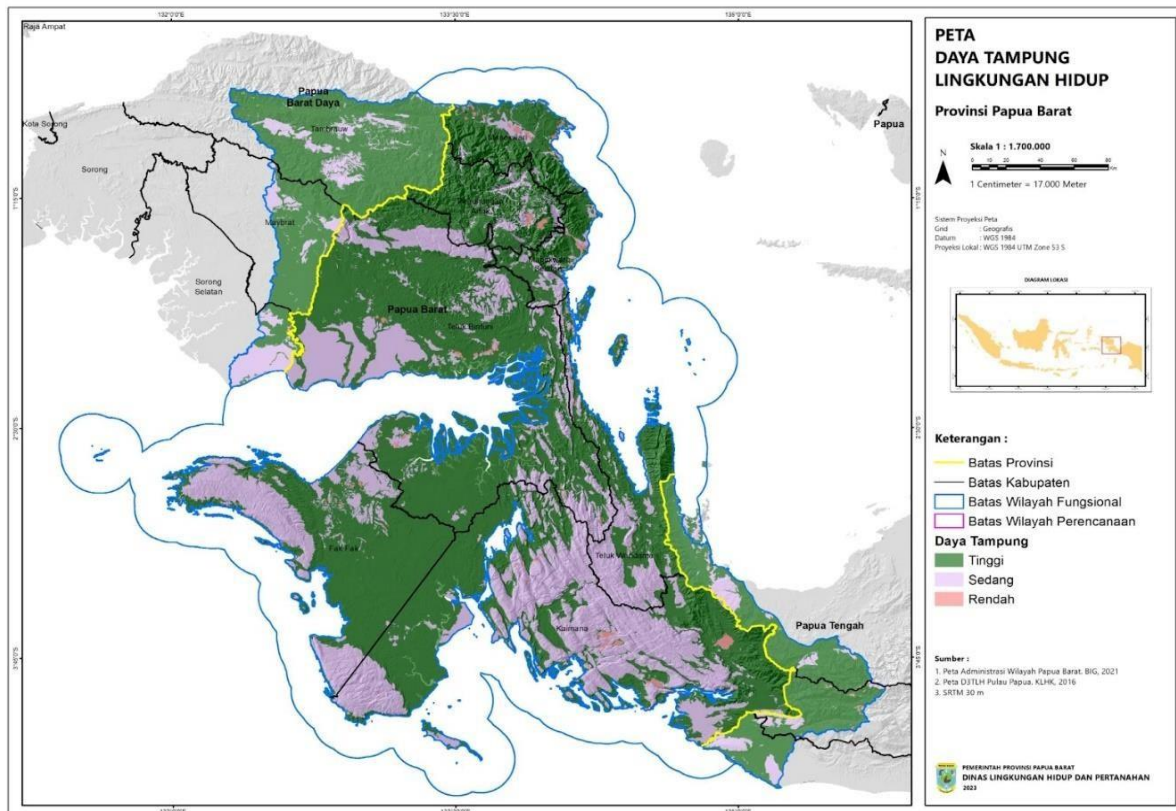
Tabel II.12 Daya Dukung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat

Kabupaten	Kelas Daya Dukung LH			Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Batas Wilayah Fungsional	1.282.305	221.625	94.890	1.598.821
Batas Wilayah Perencanaan	3.394.452	2.217.230	401.227	6.012.909
Fakfak	479.477	457.986	34.914	972.377
Kaimana	750.124	939.350	93.687	1.783.161
Manokwari	248.259	22.711	5.114	276.083
Manokwari Selatan	127.222	47.674	8.696	183.592
Pegunungan Arfak	257.869	49.382	22.541	329.792
Teluk Bintuni	1.310.918	450.629	223.476	1.985.023
Teluk Wondama	220.584	249.498	12.799	482.881
Total	4.676.758	2.438.856	496.117	7.611.730

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana memiliki potensi daya tampung kategori tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya (Tabel II.12). Selanjutnya status daya dukung kategori rendah didominasi Kabupaten Kaimana dan selanjutnya Teluk Bintuni. Kondisi tersebut menjadi peluang dan potensi terkait pengembangan wilayah yang perlu dilakukan secara baik dengan mempertimbangkan potensi daya dukung. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana memiliki potensi penunjang daya dukung yang lebih besar sehingga dapat menunjang pembangunan, selanjutnya wilayah lainnya dengan perencanaan secara baik.

Gambar II.12 Peta Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Tabel II.13 Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat

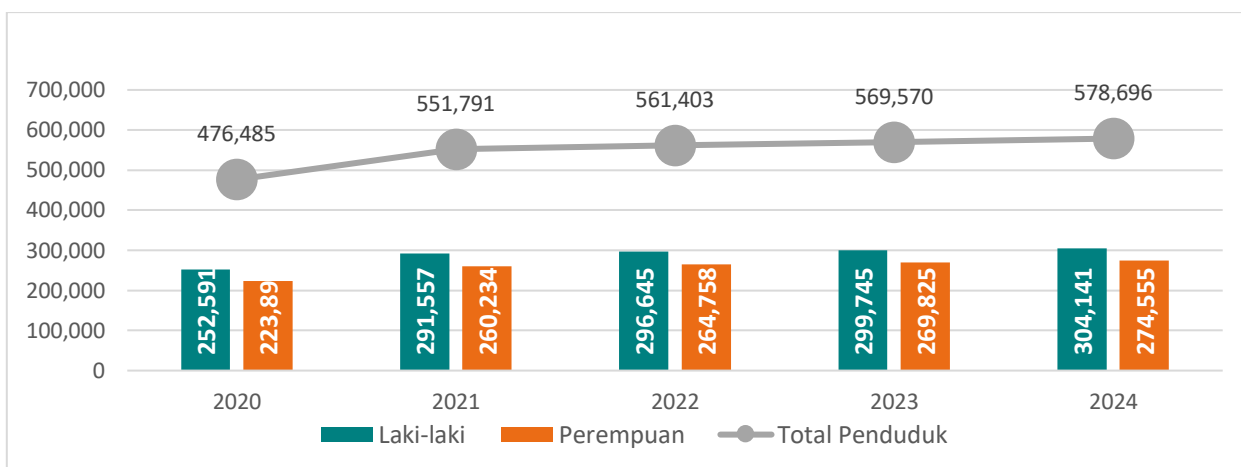
Kabupaten	Kelas Daya Dukung LH			Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Batas Wilayah Fungsional	1.307.735	286.220	4.866	1.598.821
Batas Wilayah Perencanaan	3.954.440	2.008.621	49.848	6.012.909
Fakfak	641.309	327.625	3.443	972.377
Kaimana	956.832	809.712	16.617	1.783.161
Manokwari	233.852	32.542	9.689	276.083
Manokwari Selatan	132.758	47.603	3.232	183.592
Pegunungan Arfak	259.607	65.235	4.949	329.792
Teluk Bintuni	1.437.993	537.327	9.703	1.985.023
Teluk Wondama	292.089	188.577	2.215	482.881
Total	5.262.175	2.294.841	54.714	7.611.730

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 578.696 jiwa. Jumlah penduduk Papua Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Barat (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah.

Gambar II.13 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2020-2024 (jiwa)



Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

Meskipun jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut perlu mendapat perhatian untuk dapat dilakukan pengendalian yang sesuai. Kondisi Provinsi Papua Barat dengan infrastruktur yang masih terbatas akan menyulitkan jika jumlah penduduk meningkat pesat dimana dikhawatirkan kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan dan penunjang kehidupan lainnya tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini pada gilirannya akan mempersulit kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat sendiri. Untuk itu, diperlukan pendidikan keluarga berencana kepada masyarakat Provinsi Papua Barat melalui koordinasi dengan instansi terkait di seluruh kabupaten dengan harapan menekan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan langkah jangka panjang untuk membentuk SDM yang berkualitas sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penduduk yang masih sedikit dan bertambah tidak terlalu pesat, program peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi kependudukan di Papua Barat berdasarkan kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.14.

Tabel II.14 Jumlah dan Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per km² Menurut Kabupaten, 2024

No.	Kabupaten	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan	Persentase	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2023
1	Fakfak	14.320,00	90.171	9,13	15,61	1,55
2	Kaimana	16.241,84	66.655	3,67	11,50	1,86
3	Teluk Wondama	3.950,53	45.561	9,19	7,82	2,47
4	Teluk Bintuni	20.840,83	91.064	4,52	15,82	1,25
5	Manokwari	3.186,28	204.955	73,04	35,43	1,70
6	Manokwari Selatan	2.812,44	38.820	20,71	6,68	2,09
7	Pegunungan Arfak	2.773,74	41.470	12,33	7,14	2,31
Papua Barat		64.125,66	578.696	9,60	100,00	1,65

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Papua Barat sampai pada tahun 2024 adalah Manokwari yaitu sebanyak 204.955 jiwa (35,42% dari total

penduduk di Papua Barat), diikuti Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 91.064 jiwa (15,74%), dan Kabupaten Fak Fak sebanyak 90.171 jiwa (15,58%). Sementara itu, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Manokwari Selatan yaitu sebanyak 38.820 jiwa (6,71%), dan Pegunungan Arfak sebanyak 41.470 jiwa (7,17%).

Tabel II.15 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten, 2024

No	Kabupaten	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin (L/P)
1	Fak Fak	90.171	103,93
2	Kaimana	66.655	108,47
3	Teluk Wondama	45.561	110,07
4	Teluk Bintuni	91.064	135,58
5	Manokwari	204.955	107,47
6	Manokwari Selatan	38.820	105,91
7	Pegunungan Arfak	41.470	103,49
Papua Barat		578.696	110,78

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari disebabkan kedua wilayah tersebut memiliki sarana transportasi dan aksesibilitas yang paling memadai, infrastruktur yang cukup bagus, memiliki variasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding kabupaten yang lain. Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi penduduk yang didorong meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan.

Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 110,78 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Provinsi Papua Barat terdapat 111 penduduk laki-laki. Berdasarkan kelompok umur sampai pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 56.608 jiwa, diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 54.080 jiwa, dan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 52.598 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori expansive dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah. Dengan jumlah penduduk muda dan angkatan kerja juga besar, maka pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Papua Barat Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
1	0-4	28.839	27.769	56.608
2	5-9	24.874	23.934	48.781
3	10-14	24.311	23.131	47.442
4	15-19	26.906	24.523	51.429
5	20-24	27.488	25.110	52.598
6	25-29	28.462	25.618	54.080
7	30-34	26.591	23.800	50.391
8	35-39	25.442	22.353	47.795
9	40-44	22.804	19.741	42.545
10	45-49	19.998	16.944	36.942
11	50-54	16.295	13.916	30.211
12	55-59	12.175	10.553	22.728
13	60-64	8.896	7.543	16.439
14	65-69	5.590	4.907	10.497
15	70-74	3.254	2.837	6.091
16	75+	2.243	1.876	4.119
Total		304.141	274.555	578.696

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

Kondisi Demografi OAP dan non-OAP

Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi demografi OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) sejak Mei 2020 di 13 kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya (sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya). Berdasarkan Tabel II.18 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 27 Agustus 2024 di 7 kabupaten di Papua Barat sebesar 240.603 jiwa atau 44,31% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 542.999 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SAIK+, sebanyak 62,76% adalah OAP sedangkan 37,23% lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Tabel II.18 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SAIK+ (per 27 Agustus 2023)

No	Provinsi/ Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan Jumlah Penduduk pada SAIK+			Cakupan SAIK+ Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Barat		542.999	151.009	89.594	240.603	44,31
1	Fakfak	85.197	33.659	25.809	59.468	69,80
2	Kaimana	62.256	21.887	13.818	35.705	57,35

No	Provinsi/ Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan Jumlah Penduduk pada SAIK+			Cakupan SAIK+ Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
3	Manokwari	192.663	33.917	26.349	60.266	31,28
4	Manokwari Selatan	35.949	18.565	6.137	24.702	68,71
5	Pegunungan Arfak	38.207	253	33	286	0,75
6	Teluk Bintuni	87.083	20.416	13.471	33.887	38,91
7	Teluk Wondama	41.644	22.312	3.977	26.289	63,13

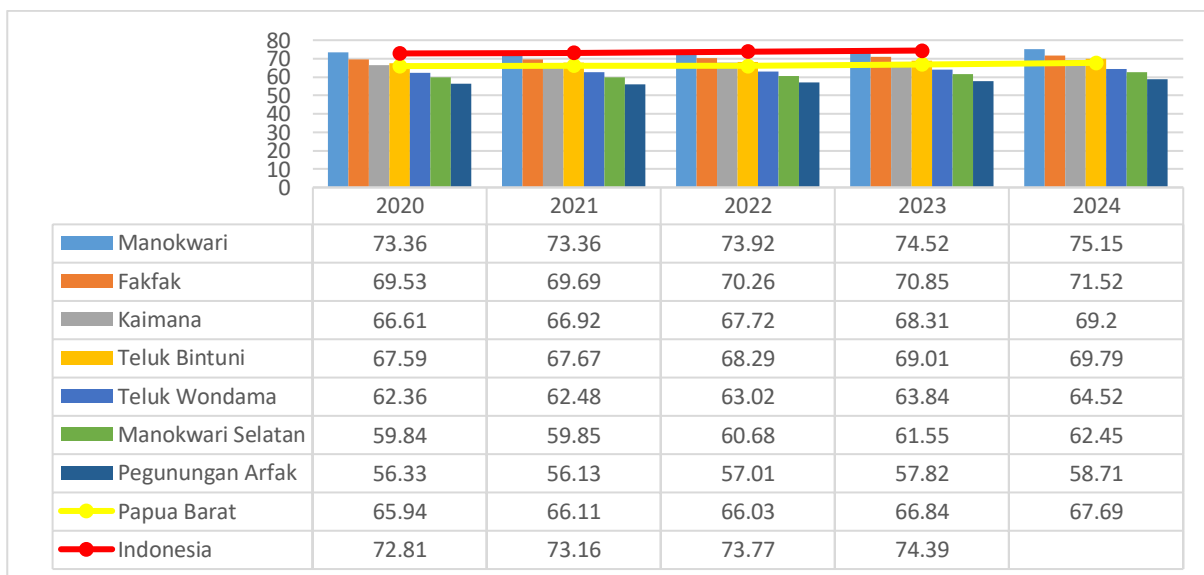
Sumber: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) <https://saikplus.papuabaratprov.go.id/>

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pembangunan Manusia

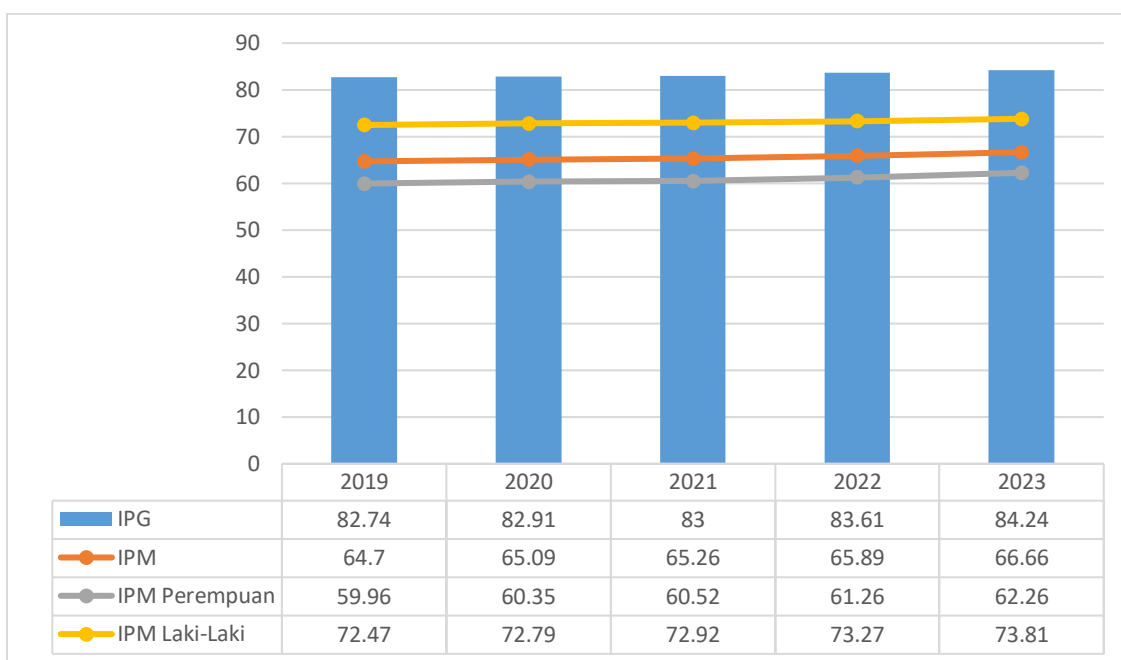
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori “sedang” yaitu berada pada rentang 60-69. Berdasarkan Gambar II.14, diketahui bahwa sejak tahun 2020, Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi dan menjadi satu-satunya kabupaten berkategori IPM “tinggi” (> 70) di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan IPM terendah pada tahun 2024 dengan angka 58,71.

Gambar II.14 Perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat, 2020-2024



Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

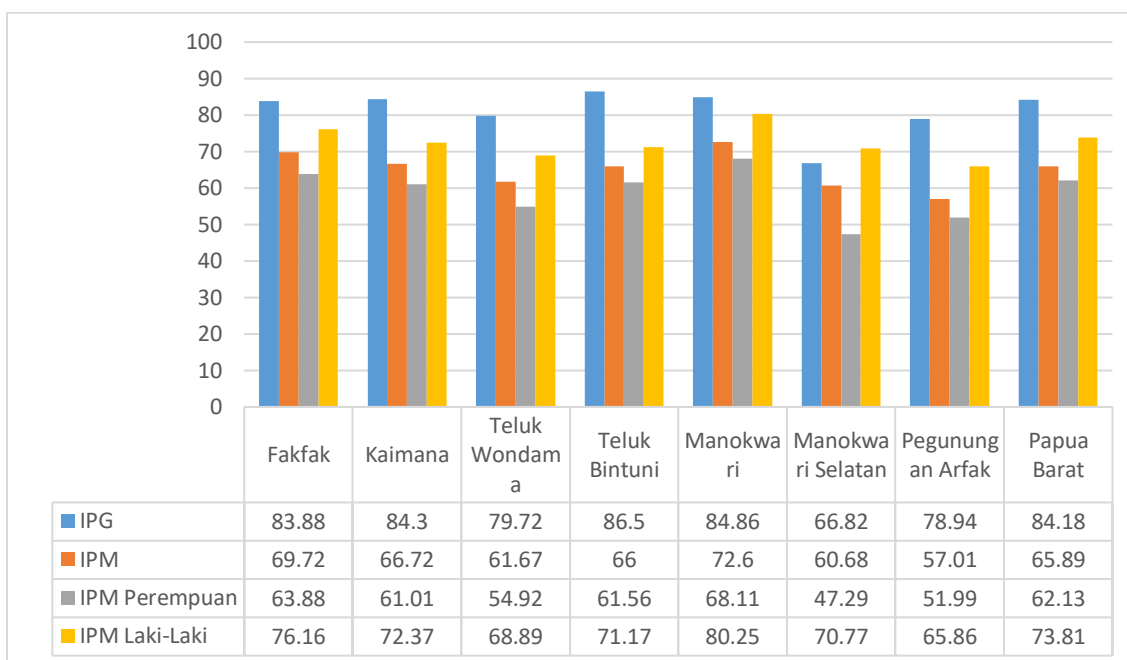
Gambar II.15 IPM Menurut Gender dan IPG Papua Barat 2019-2023



Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

IPM berdasarkan gender dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.15. Diketahui bahwa secara umum IPM perempuan di Provinsi Papua Barat konsisten lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki pada tahun 2019-2023. Adapun rata-rata IPG selama 2019-2023 berada pada kisaran angka 82,24.

Gambar II.16 IPM Menurut Gender dan IPG Kabupaten di Papua Barat, 2023



Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan Gambar II.16, diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten dengan IPG terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua Barat dengan angka di bawah 80 yaitu Kabupaten Manokwari Selatan (66,82), Pegunungan Arfak (78,94), dan Teluk Wondama (79,72). Capaian IPM Perempuan terendah juga berada pada ketiga kabupaten tersebut.

Angka IPM Perempuan di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi yang paling rendah bahkan berada di bawah 50.

2.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai maupun laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ditinjau dari dua sisi yaitu berdasarkan harga konstan (ADHK) dan harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi, dan PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis. Selama periode 2016-2021, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten di Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Kabupaten yang memiliki PDRB ADHK tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni Rp27.120.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun seratus dua puluh miliar rupiah) dan Kabupaten Manokwari Rp6.820.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh miliar rupiah).

Tabel II.17 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Juta Rupiah)

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Fakfak	3.545.307,64	3.440.577,18	3.474.011,49	3.551.876,59	3.603.350
Kaimana	1.803.958,82	1.752.821,56	1.716.000,85	1.735.217,97	1.791.370
Teluk Wondama	1.012.028,45	979.428,29	990.093,92	1.021.743,36	1.050.580
Teluk Bintuni	25.380.151,09	25.648.777,94	25.058.622,87	25.564.575,63	27.120.650
Manokwari	6.815.964,08	6.388.756,31	6.624.674,04	6.761.037,14	6.827.340
Manokwari Selatan	595.221,15	578.446,22	585.579,28	597.173,77	609.920
Pegunungan Arfak	142.569,45	151.225,06	158.112,79	180.201,08	198.540

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tabel II.18 Laju Pertumbuhan Total PDRB ADHK Menurut Kabupaten di Papua Barat (%)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fakfak	6,59	5,29	-2,95	0,97	2,06	1,63
Kaimana	5,58	3,71	-2,83	-2,10	1,09	3,26
Teluk Wondama	4,01	4,18	-3,22	1,09	3,19	2,78
Teluk Bintuni	5,25	3,41	1,06	-2,30	2,06	6,05
Manokwari	5,16	3,6	-6,27	3,69	1,98	1,0
Manokwari Selatan	4,48	8,54	-2,82	1,23	2,01	2,10
Pegunungan Arfak	10,62	6,91	6,07	4,55	14,03	10,12

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tingginya nilai PDRB di Kabupaten Teluk Bintuni disebabkan karena besarnya pendapatan dari sektor migas. Adapun Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan memiliki nilai PDRB yang relatif rendah dibandingkan Kabupaten lainnya karena belum sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yang mengalami laju pertumbuhan relatif stagnan atau menurun, serta masih belum optimalnya keterampilan masyarakat dalam memproduksi dan memberi nilai tambah produk pertanian.

Selain itu, pertanian yang dijalankan masyarakat Papua Barat secara umum masih bersifat subsisten tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana dan produktivitas yang rendah. Dalam hal ini, tidak sedikit petani yang hanya berfikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja melalui bertani, tanpa memiliki rencana untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian yang lebih tinggi atau menghasilkan usaha pertanian yang besar.

Tabel II.18 menunjukkan laju pertumbuhan total PDRB menurut kabupaten di Papua Barat tahun 2018-2023. Diketahui bahwa wilayah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak dari 10,62% pada tahun 2018 menjadi 10,12% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat percepatan pembangunan ekonomi di Pegunungan Arfak selama tahun 2018-2023 dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Papua Barat.

2.1.2.3 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam subbab ini, pembahasan struktur ekonomi dirumuskan berdasarkan sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten di Papua Barat. Pada tahun 2019-2023, secara umum struktur ekonomi kabupaten di Provinsi Papua Barat menunjukkan struktur ekonomi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel II.19 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2019-2023

Lapangan Usaha		Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,34	26,48	32,37	2,94	13,18	58,91	28,16
2	Pertambangan dan Penggalian	1,20	1,1	1,304	35,95	2,47	0,50	0,32
3	Industri Pengolahan	3,29	5,58	2,144	50,15	4,64	1,29	0,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,1	0,016	0,00	0,15	0,16	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,04	0,04	0,00	0,33	0,06	0,00
6	Konstruksi	27,23	19,82	17,346	7,34	18,79	3,58	14,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,67	11,54	8,42	0,49	14,89	1,29	0,13
8	Transportasi dan Pergudangan	5,45	5,08	2,262	0,15	4,87	2,53	0,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,26	0,84	0,412	0,03	1,69	0,40	0,23
10	Informasi dan Komunikasi	3,15	2,02	0,426	0,05	4,11	0,27	0,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,56	1,524	0,18	4,91	1,62	0,16
12	Real Estate	2,31	1,92	1,624	0,16	3,16	0,30	0,48
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,1	0,06	0,00	0,25	0,09	0,00

Lapangan Usaha		Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,90	20,86	27,776	2,21	19,94	22,98	50,90
15	Jasa Pendidikan	4,47	1,7	3,3	0,26	4,03	3,65	2,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	0,84	0,766	0,09	2,01	1,40	1,10
17	Jasa Lainnya	0,33	0,46	0,216	0,01	0,60	0,96	0,27
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut


Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.19, diketahui bahwa 6 dari 7 wilayah kabupaten di Provinsi Papua Barat memiliki struktur ekonomi yang didominasi kontribusi lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) konstruksi, serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Meskipun demikian, terdapat 4 (empat) kabupaten yang memiliki kontribusi lapangan usaha perdagangan yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Fakfak (12,67%), Kaimana (11,54%), Teluk Wondama (8,42%) dan Manokwari (14,89%). Khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni, sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian adalah sektor pertambangan dan penggalian (35,95%), serta industri pengolahan (50,15%). Dalam hal ini, subsektor industri batubara dan pengilangan migas masih mendominasi dibandingkan industri pengolahan non-migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan pemeran utama adalah industri Liquid Natural Gas (LNG).

Tabel II.20 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2017-2023

Lapangan Usaha		Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	0,90	-0,14	-0,07	1,00	1,32	-4,18
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,86	2,69	3,97	0,28	4,07	2,83	21,94
3	Industri Pengolahan	2,44	1,41	2,48	1,42	13,51	7,54	9,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,22	7,64	12,50	13,05	20,03	5,16	-1,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,50	1,08	0,82	2,86	3,73	32,70	0,00
6	Konstruksi	2,19	0,40	1,81	46,96	-5,58	3,39	67,96

Lapangan Usaha		Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,70	5,31	4,34	6,63	5,69	3,11	16,69
8	Transportasi dan Pergudangan	1,45	0,58	2,02	-2,61	-0,12	0,58	31,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,98	4,45	2,83	2,19	6,81	1,95	57,20
10	Informasi dan Komunikasi	6,87	5,76	2,56	8,13	5,34	16,51	28,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	3,11	11,91	7,08	5,95	50,61	84,50
12	Real Estate	2,46	0,55	4,37	5,22	1,86	2,77	11,62
13	Jasa Perusahaan	3,20	2,50	1,38	2,52	0,73	-0,02	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	-1,36	2,79	4,10	4,46	5,43	15,51
15	Jasa Pendidikan	2,21	3,02	3,68	2,62	-1,58	4,17	0,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	7,68	5,74	9,59	6,03	7,34	2,35
17	Jasa Lainnya	3,81	3,39	5,94	5,57	4,21	0,52	-0,73
PDRB		2,49	1,06	1,88	1,93	1,61	2,75	9,90

Keterangan:  Laju pertumbuhan lapangan usaha relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2024 (diolah)

Dalam menganalisis struktur ekonomi daerah, selain mengkaji kontribusi lapangan usaha juga perlu meninjau laju pertumbuhan lapangan usaha pada rentang tahun tertentu. Berdasarkan Tabel II.20 dapat diketahui terdapat laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa). Hal ini mengindikasikan mulai adanya transformasi struktural atau pergeseran pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja/struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Untuk menganalisis struktur ekonomi kabupaten di Papua Barat dilakukan analisis Tipologi Klassen terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha di Papua Barat tahun 2017-2023. Tipologi Klassen membagi lapangan usaha menjadi 4 kategori yaitu: kuadran 1 adalah sektor maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor berkembang cepat, kuadran III adalah sektor maju tapi tertekan, serta kuadran IV adalah sektor yang relative tertinggal (lihat Tabel II.21).

Tabel II.21 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2017-2023

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3	3	4	3	3	3
2	Pertambangan dan Penggalian	4	4	4	3	4	4	2
3	Industri Pengolahan	4	3	4	3	2	4	4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2	2	2	2	2	4	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	4	4	4	4	2	4
6	Konstruksi	3	3	3	2	3	4	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	1	1	4	1	4	4
8	Transportasi dan Pergudangan	4	4	4	4	4	4	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2	2	4	4	2	4	2
10	Informasi dan Komunikasi	2	2	4	2	2	2	2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2	2	2	2	2	2	2
12	Real Estate	4	4	2	4	4	4	4
13	Jasa Perusahaan	2	4	4	4	4	4	4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	3	4	3	3	3
15	Jasa Pendidikan	4	2	4	4	4	4	4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4	2	2	2	2	4	4
17	Jasa Lainnya	2	2	2	4	4	4	4

- Keterangan: ① Kuadran I: sektor maju dan tumbuh pesat
 ② Kuadran II: sektor potensial dan dapat berkembang pesat
 ③ Kuadran III: sektor maju tapi tertekan
 ④ Kuadran IV: sektor relatif tertinggal

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.21 dapat diketahui bahwa sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sektor konstruksi. Wilayah yang tidak memiliki sektor maju dan berkembang pesat adalah Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Di Kabupaten Teluk Bintuni, sektor pertambangan dan industri pengolahan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil sehingga termasuk dalam kategori “sektor maju tapi tertekan” (kuadran III). Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan karena sektor

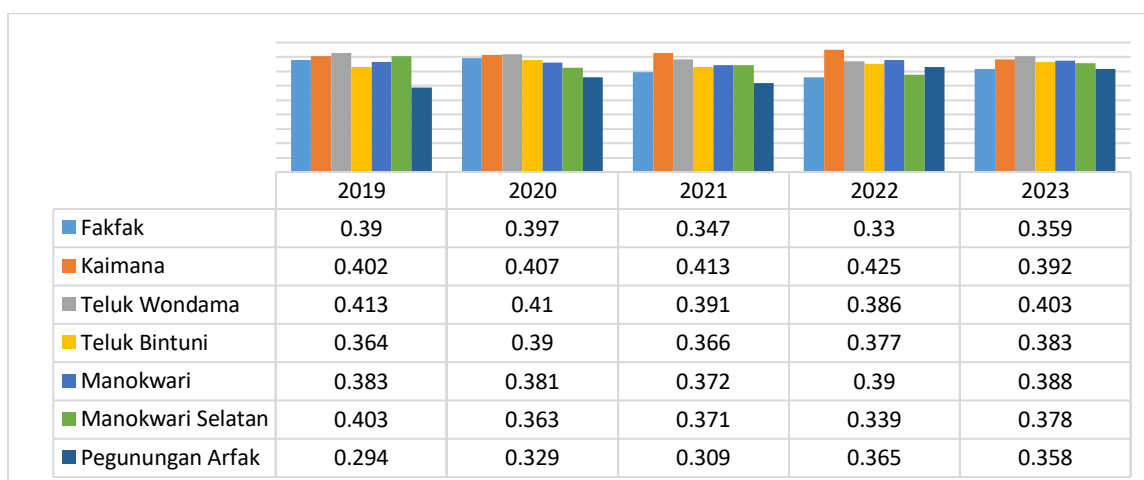
pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil.

Sebagai tindaklanjut dari analisis Tipologi Klassen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.21, dapat diketahui intervensi sektoral yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pembangunan ekonomi jangka pendek/menengah maupun jangka panjang. Untuk perbaikan ekonomi jangka pendek/menengah pemerintah provinsi/kabupaten dapat fokus pada perbaikan sektor potensial yang berkembang pesat.

2.1.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Semakin kecil rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin menurun antar masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi rasio gini, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin tinggi. Berdasarkan Gambar II.17, rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Barat termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Meskipun demikian, pada tahun 2019-2023 trend rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua Barat. Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan rendah pada tahun 2023 di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (skor: 0,358). Adapun wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Teluk Wondama (skor: 0,403) dan Kaimana (skor: 0,392).

Gambar II.17 Rasio Gini menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat



Sumber: BPS Papua Barat, 2023

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan.

Secara regional seluruh daerah di Papua Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020-2024, Terdapat 2 kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dari tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Manokwari, dan Kaimana. Adapun daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Papua Barat pada tahun 2024 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (31,76%), dan Teluk Wondama (28,47%) (lihat Tabel II.24).

Tabel II.22 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Barat Menurut Kabupaten, 2020-2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fak Fak	17,72	18,51	18,13	17,84	17,67	22,27	22,86	22,06	21,38	20,86
2	Kaimana	9,52	10,31	10,11	9,90	10,06	15,50	16,04	15,29	14,57	14,41
3	Teluk Wondama	10,22	10,74	10,44	10,24	10,30	30,91	31,61	30,06	28,90	28,47
4	Teluk Bintuni	19,22	20,07	20,45	19,82	19,33	29,39	29,79	29,73	28,24	26,99
5	Manokwari	35,92	35,63	34,96	33,35	33,29	20,14	20,56	19,90	18,73	18,45
6	Manokwari Selatan	7,09	7,65	7,68	7,69	7,64	28,88	29,30	28,55	27,80	26,83
7	Pegunungan Arfak	10,68	11,85	11,87	11,71	11,87	22,81	34,70	33,71	32,29	31,76
Papua Barat		114,32	114,32	112,54	110,37	114,76	110,16	27,77	26,88	24,27	26,41

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2025

Arah kebijakan dan Strategi terkait penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasn kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrim sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu.

Pada Tabel II.23 untuk tingkat kemiskinan kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan (P1) paling tinggi di tahun 2024 adalah Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 6,50, sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (P2) di tahun 2024 adalah Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 2,25.

Tabel II.23 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahsan Kemiskinan (P2)					Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fak Fak	5,87	6,11	5,33	4,92	4,60	1,95	2,12	1,92	1,62	1,35	578.510	596.406	628.418	671.021	725.257
2	Kaimana	2,36	2,83	3,32	3,13	3,17	0,59	0,73	1,00	0,91	1,01	438.991	450.301	511.011	609.865	682.231
3	Teluk Wondama	10,04	6,48	5,50	6,44	4,68	4,19	1,79	1,56	2,01	1,15	588.838	597.676	614.573	659.187	710.854
4	Teluk Bintuni	8,31	9,15	9,96	7,44	6,50	3,15	3,84	4,11	2,66	2,25	683.667	693.305	716.834	787.048	794.285
5	Manokwari	5,87	4,96	3,69	4,16	3,30	2,24	1,70	0,95	1,31	0,82	651.032	663.438	690.028	752.635	802.749

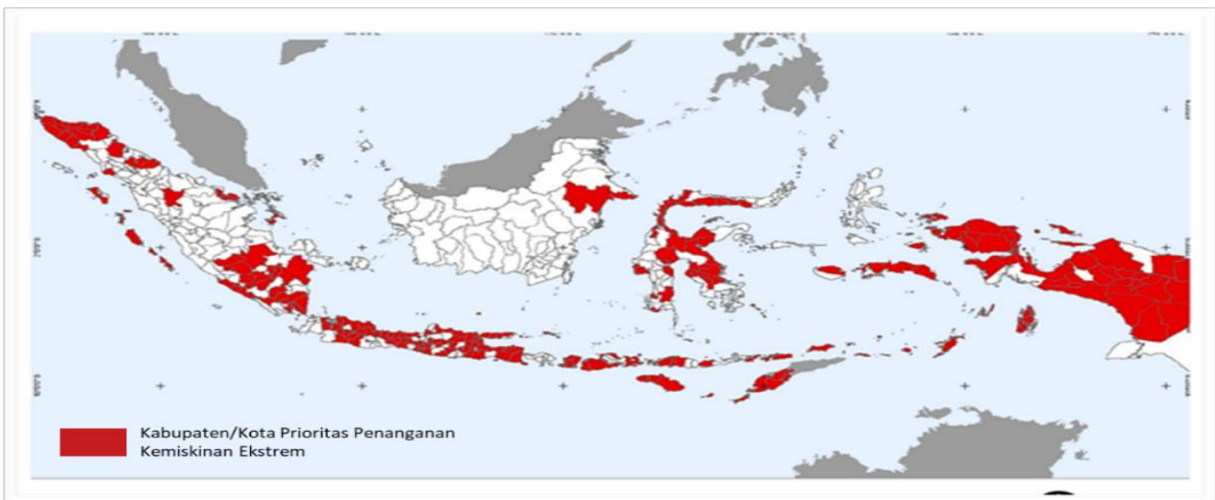
No	Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Manokwari Selatan	8,61	8,92	8,99	7,45	5,17	3,55	3,45	3,64	2,53	1,54	678.494	686.235	702.674	719.773	734.246
7	Pegunungan Arfak	5,53	5,28	6,43	6,21	5,54	1,25	1,15	1,66	1,70	1,38	670.687	683.722	706.497	723.662	738.135
Papua Barat		5,79	5,49	4,82	4,94	4,38	2,06	1,96	1,60	1,71	1,28	610.888	631.418	665.604	728.619	793.804

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2025

Kemiskinan Ekstrem

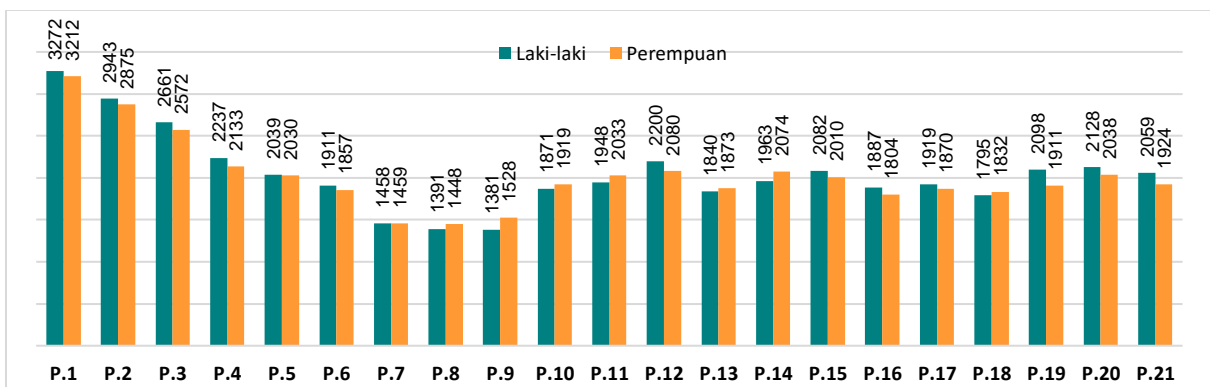
Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu. Berdasarkan Gambar II.18 diketahui bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem kecuali Kabupaten Kaimana.

Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022

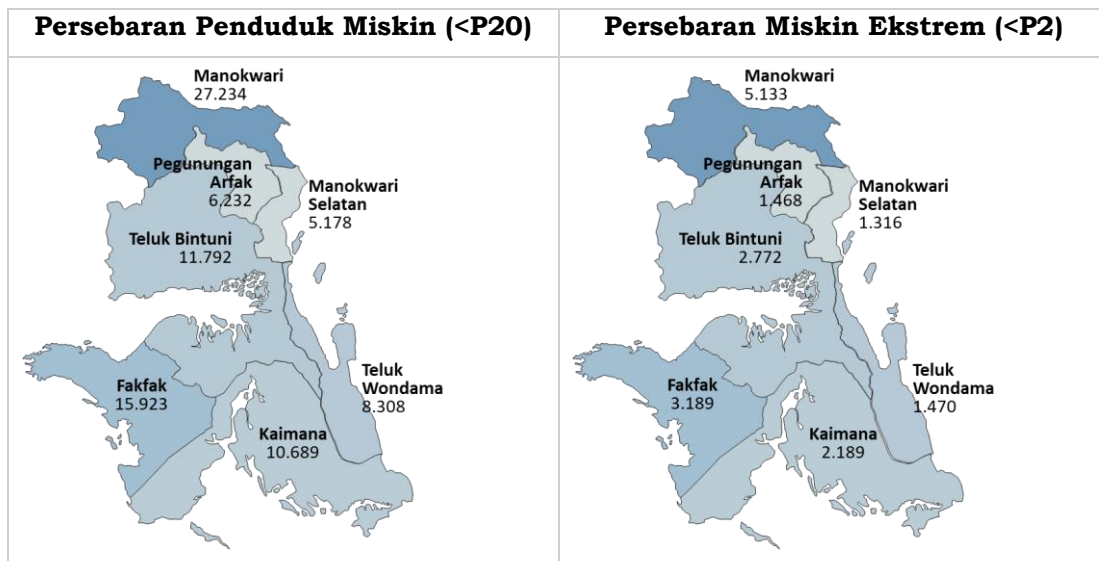
Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat (<P21)



Sumber: Regsosek, 2022

Gambar II.18 dan Gambar II.19 menunjukkan sebaran penduduk miskin (<P21) dan miskin ekstrem (<P2) di Papua Barat berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.18 dan Gambar II.19 diketahui bahwa sebanyak 85.565 penduduk (22,14%) dari total 386.435 penduduk berada pada 20% termiskin di Papua Barat, didominasi oleh laki-laki. Dari sebarannya, penduduk miskin terkonsentrasi di 3% termiskin di Papua Barat sebanyak 17.535 penduduk (4,54%) dari total penduduk di Papua Barat. Mereka tergolong dalam kelompok miskin ekstrim Papua Barat. Berdasarkan wilayahnya, mereka yang miskin terkonsentrasi di Kab Manokwari – wilayah terluar bagian utara dari Papua Barat, bahkan penduduk miskin ekstrim juga berada di Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari merupakan ibukota provinsi Papua Barat – yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Papua Barat. Selain itu, secara tipologi Kab Manokwari juga berada di pesisir laut utara Papua Barat sehingga pekerjaan utama banyak yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan, serta Kawasan Pelabuhan Manokwari.

Gambar II.20 Sebaran Penduduk Miskin (<P20) dan Miskin Ekstrem (<P2) di Papua Barat



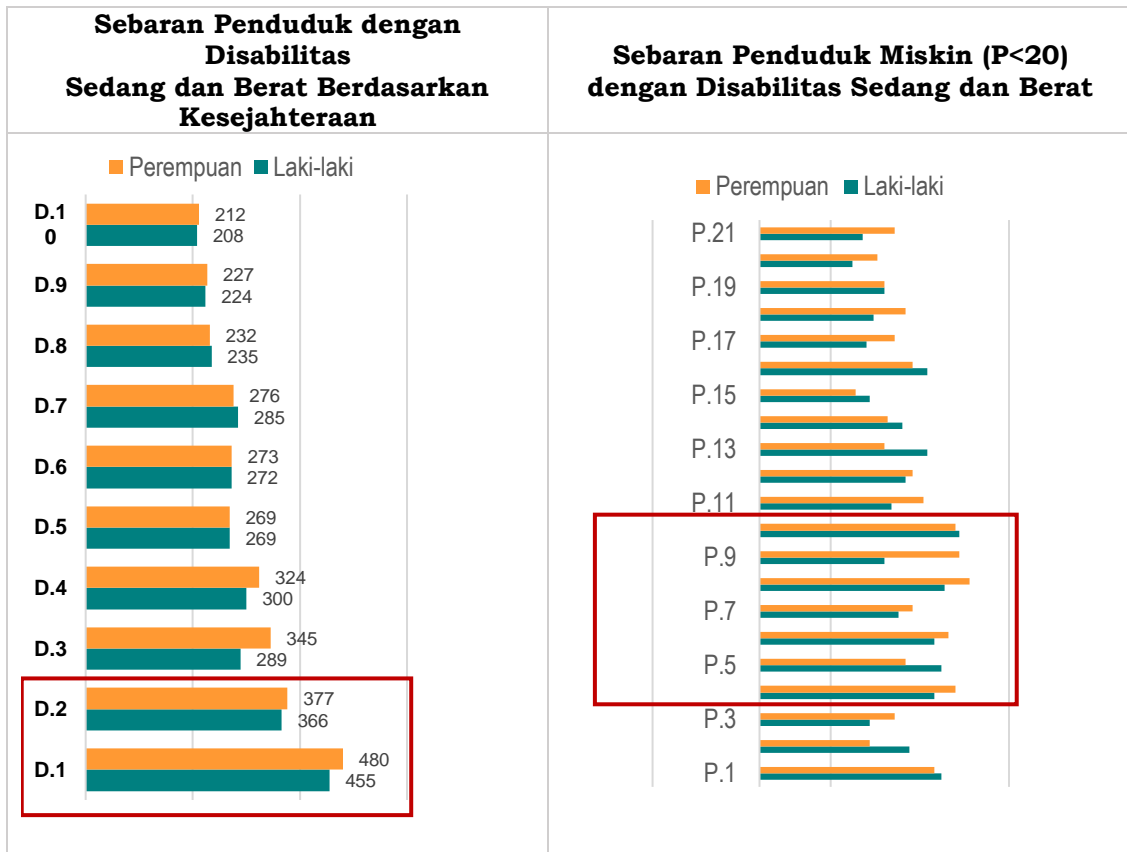
Sumber: Regsosek, 2022

Kondisi Kemiskinan Kelompok Disabilitas (Sedang dan Berat)

Gambar II.21 menunjukkan sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan kesejahteraan serta penduduk miskin (p<20) dengan disabilitas sedang dan berat di Papua Barat. Berdasarkan Gambar II.21

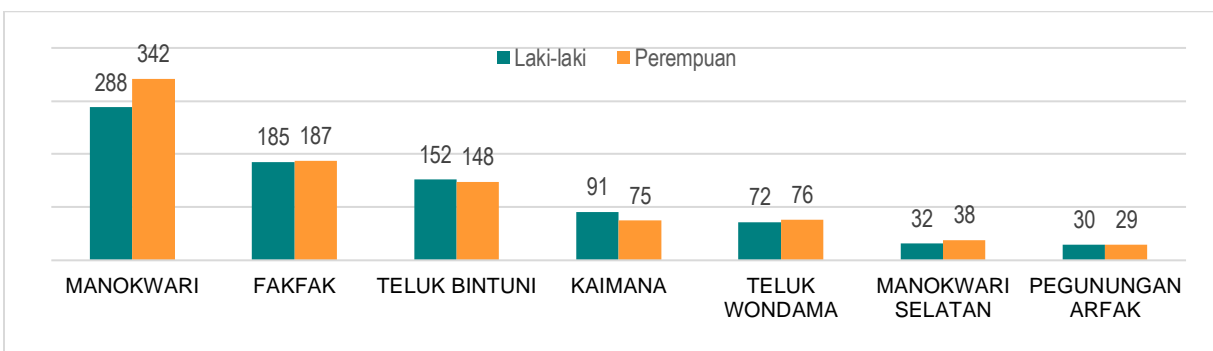
diketahui sebanyak 5.918 (1,53%) dari 386.435 penduduk di Papua Barat mengalami Disabilitas Sedang dan Berat.

Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Barat



Sumber: Regsosek, 2022

Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<20) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Regsosek, 2022

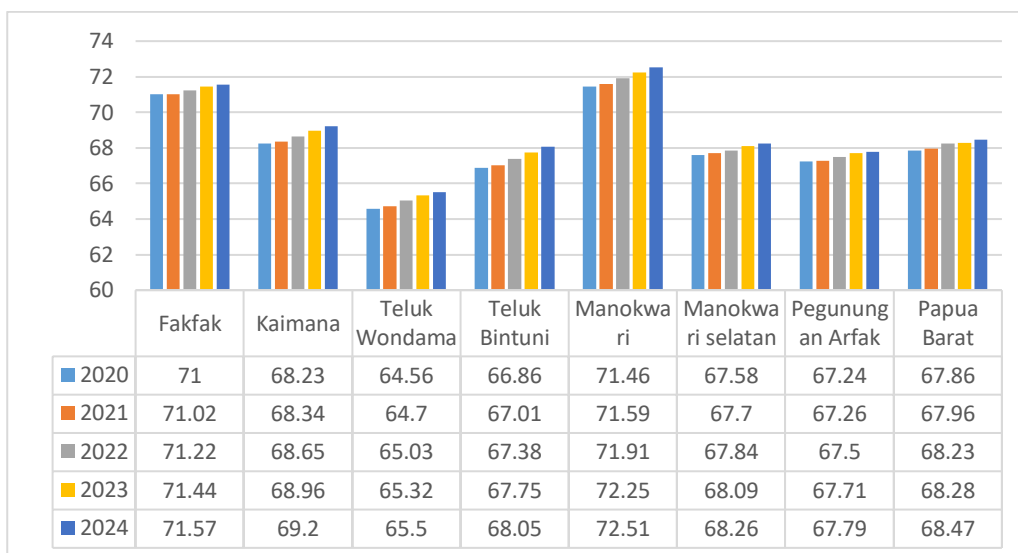
Sebanyak 727 (0,19%) dari total penduduk di Papua Barat mengalami Disabilitas Sedang dan Berat dengan Status Miskin. Penduduk disabilitas sedang dan berat yang berstatus miskin terbanyak berada di 4-10% termiskin dan berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan lokasinya, penyandang disabilitas di Papua Barat dengan status miskin paling banyak berada di Kab Manokwari. Mereka merupakan kelompok miskin ekstrim dan rentan (disabilitas, perempuan) yang perlu dibantu.

2.1.2.6 Angka Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH merupakan komponen penentu Indeks

Pembangunan Manusia bidang kesehatan. UHH menggambarkan usia kematian pada suatu populasi yang merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Angka ini menunjukkan kondisi kesehatan suatu wilayah secara garis besar. Tinggi rendahnya UHH ditentukan oleh beberapa faktor seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, pelayanan kesehatan yang tersedia, dan kondisi sosio-ekonomi (tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan serta gaya hidup dan kondisi psikososial) yang mempengaruhi status kesehatan seseorang.

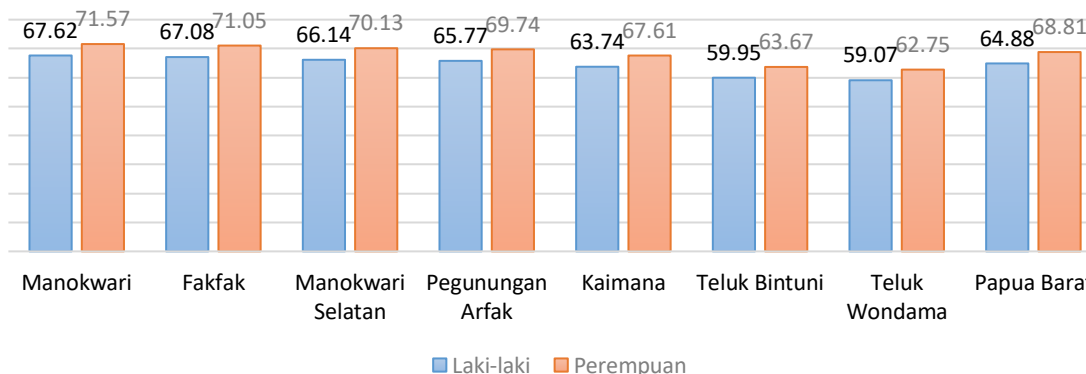
Gambar II.23 Capaian UHH Kabupaten di Provinsi Papua Barat 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Secara umum, UHH di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Kabupaten pada tahun 2024 UHH terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama sebesar 65,5 dan yang paling tertinggi adalah Kabupaten Manokwari sebesar 72,51. Provinsi Papua Barat sendiri pada tahun 2024 UHH sebesar 68,47.

Gambar II.24 UHH Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2023



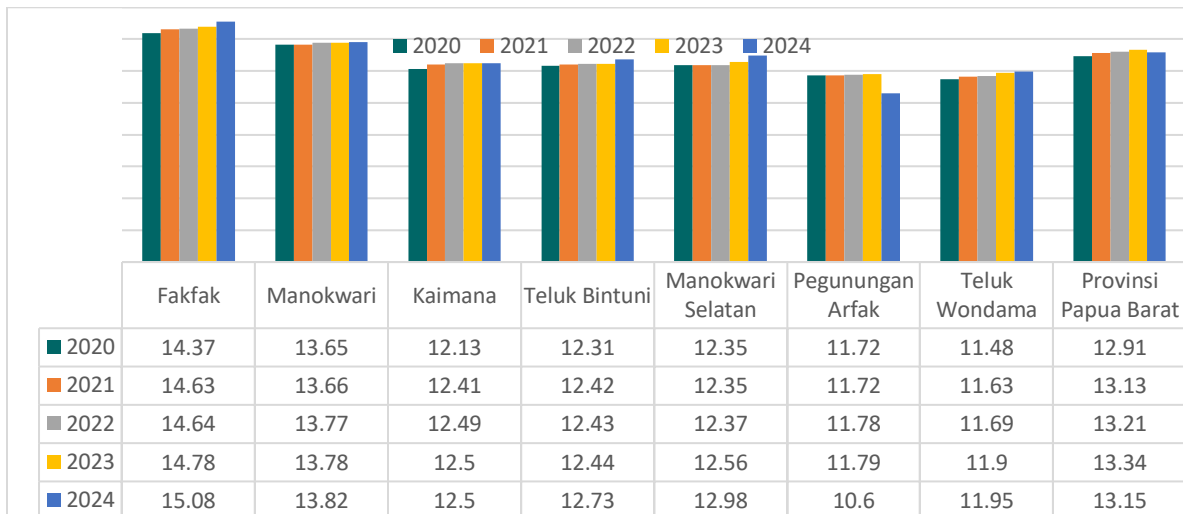
Sumber: BPS RI, 2024

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, diperoleh data UHH perempuan pada seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar II.24), yang merupakan pola yang sama pada UHH nasional maupun global. Data terbaru per kabupaten yang tersedia adalah data tahun 2023, merupakan hasil perhitungan dari Sensus Penduduk 2010.

2.1.2.7 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai pada usia tersebut sekaligus menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menyenjam pendidikan formal pada waktu tertentu.

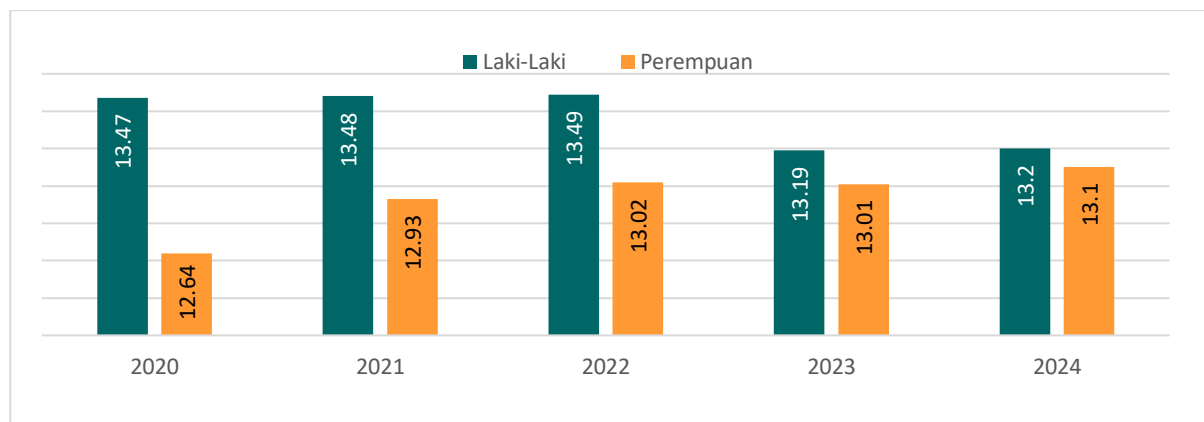
Gambar II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Apabila ditinjau berdasarkan masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat, diketahui bahwa angka HLS mengalami peningkatan pada 2020-2024. Pada tahun 2024, HLS di Papua Barat mencapai angka 13,15 yang dapat diartikan bahwa anak 7 tahun (laki-laki dan perempuan) yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,15 tahun atau setara dengan Diploma II.

Gambar II.26 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2020-2024

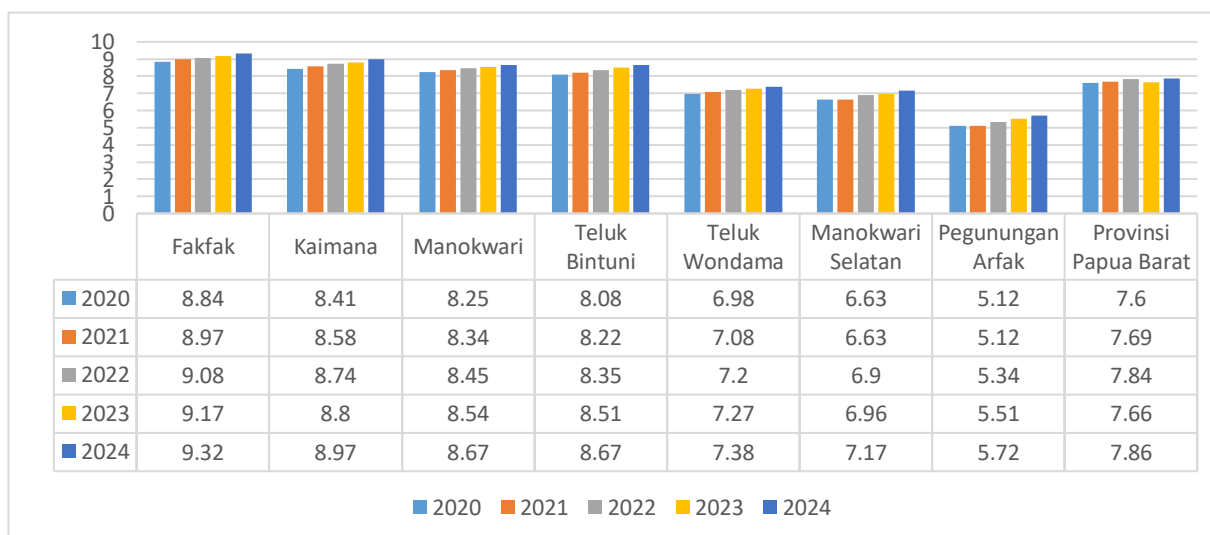


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

2.1.2.8 Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS dihitung berdasarkan angka partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka rata-rata lama sekolah di Papua Barat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dalam kurun waktu sejak tahun 2020 hingga 2024 secara rata-rata baru mencapai angka 7 tahun plus (untuk laki-laki dan perempuan), yakni 7,60, 7,69, 7,84, 7,66 dan 7,86 berturut-turut untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Artinya, penduduk Provinsi Papua Barat mengenyam pendidikan formal dengan rata-rata selama 7 tahun lebih atau setara dengan kelas 2 SMP.

Berdasarkan kabupaten, terdapat 4 kabupaten dengan angka RLS di atas 8 yaitu Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Manokwari dan Teluk Bintuni, sedangkan 3 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak belum mencapai angka 8. Gambar II.27 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Barat, 2020-2024



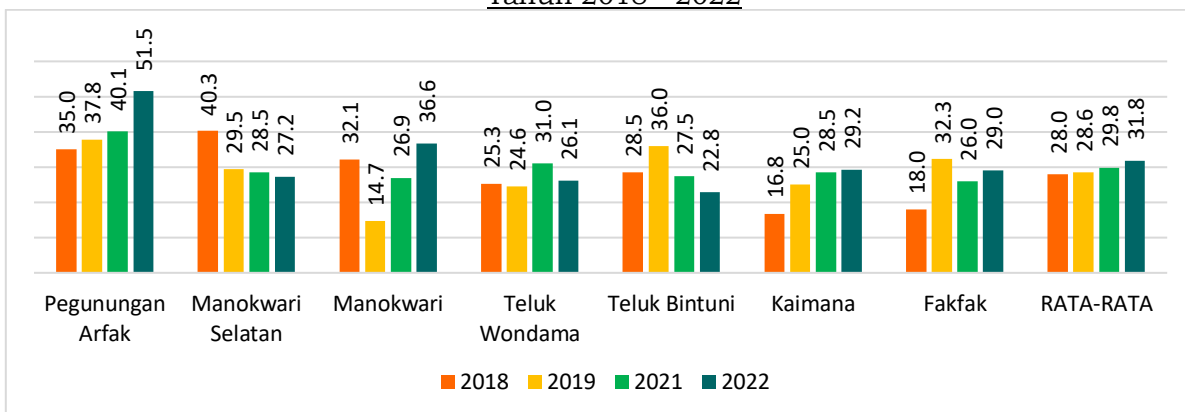
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

2.1.2.9 Prevalensi Stunting

Percepatan penurunan stunting pada balita adalah program prioritas nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024. Stunting merupakan isu yang penting dalam pembentukan kualitas SDM bangsa sebab anak yang stunting berpotensi memiliki kelambatan perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dalam program percepatan penurunan stunting, dilakukan intervensi berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/ kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Gambar II.28 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Papua Barat Tahun 2018 - 2022



Sumber: Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021 dan 2022

Target nasional adalah menurunnya prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka nasional sudah mencapai 21,6%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 24,4%. Prevalensi balita stunting di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat rata-rata sebesar 31,8%, yang menunjukkan penambahan dalam 5 tahun terakhir. Tidak tersedia angka prevalensi untuk Provinsi Papua Barat pasca pembentukan DOB, sebab survey dilakukan sebelum pemekaran provinsi. Berdasarkan kabupaten nampak bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki prevalensi balita stunting yang sangat tinggi dan dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Kabupaten yang menunjukkan kecenderungan penurunan prevalensi stunting dalam 5 tahun terakhir hanya kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni. Namun dalam 3 tahun terakhir tidak ada kabupaten yang prevalensinya di bawah 20%. Capaian Provinsi Papua Barat ini masih jauh di bawah angka nasional stunting yakni 27,67% (2019), 24,4% (2021) dan 21,6% (2022).

2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.1.3.1.1 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan perhitungan untuk melihat tingkat kemakmuran pada suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan cara menghitung pendapatan rata-rata penduduk dari hasil pembagian PDRB dengan populasi yang ada pada suatu wilayah. PDRB yang semakin meningkat menunjukkan kenaikan tingkat kemakmuran suatu wilayah. PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat ditinjau berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

Tabel II.24 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	66.804	60.954	62.231	64.889	65.383
2	Kaimana	44.778	43.355	42.448	43.086	44.495
3	Teluk Wondama	47.685	37.093	36.597	38.021	39.369
4	Teluk Bintuni	482.416	357.980	350.942	378.759	438.811
5	Manokwari	57.784	48.416	50.460	52.219	53.460
6	Manokwari Selatan	34.041	23.345	23.136	22.969	24.365
7	Pegunungan Arfak	6.413	5.956	6.240	7.028	7.877

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Berdasarkan tinjauan harga berlaku pada masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten dengan perolehan PDRB per kapita terbesar mencapai 438.811 ribu rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena terdapat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi cadangan minyak bumi dan gas yang melimpah. Adapun kabupaten dengan perolehan PDRB per kapita paling rendah adalah Pegunungan Arfak dengan perolehan PDRB sebesar 7.877 ribu rupiah.

Tabel II.25 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	43.515	44.997	40.323	40.482	41.165	40.540
2	Kaimana	29.783	29.481	28.152	27.257	27.269	27.353
3	Teluk Wondama	30.579	30.910	23.615	23.237	23.356	23.579
4	Teluk Bintuni	389.007	390.770	296.127	280.241	277.165	301.003
5	Manokwari	38.497	40.325	33.161	33.989	34.303	33.829
6	Manokwari Selatan	23.220	23.987	16.216	15.763	15.452	16.027
7	Pegunungan Arfak	4.385	4.407	3.969	4.061	4.532	4.880

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Sejalan dengan PDRB per kapita harga berlaku pada tahun 2023, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tertinggi mencapai 301.003 ribu rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten

dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan terendah yaitu sebesar 4.880 ribu rupiah. Berdasarkan tinjauan atas dasar harga berlaku dan konstan, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi tidak hanya di Papua Barat melainkan secara nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten paling makmur yang ada di Provinsi Papua Barat bahkan nasional.

2.1.3.1.2 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel II.29 diketahui secara umum pengeluaran per kapita penduduk Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional hingga tahun 2023. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Papua Barat mengalami trend peningkatan dari rata-rata 7.175 ribu rupiah/orang/tahun pada 2016 menjadi 8.404 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2023.

Tabel II.26 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

No	Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Fakfak	6.935	7.057	7.357	7.608	7.599	7.446	7.678	7.851
2.	Kaimana	7.538	7.752	8.071	8.304	8.325	8.151	8.453	8.749
3.	Teluk Wondama	7.434	7.694	7.927	8.198	8.219	8.034	8.177	8.490
4.	Teluk Bintuni	9.208	9.463	9.622	9.821	9.974	9.708	9.979	10.324
5.	Manokwari	11.440	11.595	11.789	11.994	12.207	11.977	12.179	12.566
6.	Manokwari Selatan	4.702	5.012	5.225	5.511	5.505	5.505	5.691	5.948
7.	Pegunungan Arfak	4.594	4.683	4.979	5.102	5.099	5.009	5.204	5.438
Provinsi Papua Barat		7.175	7.493	7.816	8.125	8.086	7.929	8.101	8.404
INDONESIA		10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2016-2021" dan BPS RI, 2023

Berdasarkan tinjauan kondisi pada masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat, wilayah dengan pengeluaran per kapita tertinggi dan telah melebihi angka nasional pada tahun 2023 adalah Kabupaten Manokwari dengan pengeluaran per kapita sebesar 12.566 ribu rupiah/orang/tahun. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita paling rendah di Provinsi Papua Barat dengan pengeluaran sebesar 5.438 ribu rupiah/orang/tahun disusul Kabupaten Manokwari Selatan dengan pengeluaran 5.948 ribu rupiah/orang/tahun.

2.1.3.1.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titik dimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan

pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

Berdasarkan Tabel II.30 diketahui bahwa kabupaten dengan jumlah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tertinggi untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2022 dan 2023 adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Jumlah pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2023 mencapai Rp1.977.353. Kabupaten dengan jumlah rata-rata pengeluaran per kapita makanan dan bukan makanan terendah pada tahun 2023 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu sebesar Rp1.017.738.

Tabel II.27 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten, 2022-2023

No	Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Fakfak	786.454	718.795	734.694	734.518	1.521.148	1.453.313
2	Kaimana	714.003	731.719	711.626	764.389	1.425.629	1.496.108
3	Teluk Wondama	623.025	729.207	430.653	624.825	1.053.679	1.354.032
4	Teluk Bintuni	873.843	1.036.667	677.680	940.686	1.551.523	1.977.353
5	Manokwari	771.141	817.436	776.597	1.021.349	1.547.738	1.838.785
6	Manokwari Selatan	770.873	796.717	559.940	755.990	1.330.813	1.552.706
7	Pegunungan Arfak	561.955	576.041	535.970	441.697	1.097.925	1.017.738
Provinsi Papua		723.855*	773.831*	724.651*	824.423*	1.448.505*	1.598.254*

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2023"

2.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.2.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (merit system) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Pada tahun 2022, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi Provinsi Papua Barat berjumlah 49.380 orang. Jumlah ini cenderung menurun dibandingkan pada tahun

2021 dengan jumlah 49.986 orang. Penurunan jumlah juga terjadi menurut tingkat pendidikan. Hanya tingkat pendidikan Diploma III, S2, dan S3 yang mengalami kenaikan jumlah meskipun tidak signifikan. Berdasarkan Tabel II.28 juga diketahui bahwa mayoritas PNS didominasi oleh tingkat pendidikan S1 pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah keseluruhan PNS masih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak 26.954 orang pada tahun 2022, sedangkan perempuan berjumlah 22.426 orang. Instansi kepegawaian negeri sipil di Provinsi Papua Barat diisi dari tingkat pendidikan SD hingga S3 sehingga pada masa mendatang diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan aparatur di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan kapasitas SDM merupakan aspek penting dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah kedepannya diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kepada aparturnya.

Tabel II.28 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
SD (Sekolah Dasar)	520	446	74	65	594	511
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	823	741	194	182	1017	923
SMA (Sekolah Menengah Atas)	8.040	7.801	4.386	4.158	12.426	11.959
Diploma I/Akta I	220	230	172	157	392	387
Diploma II/Akta II	490	433	539	489	1029	922
Diploma III/Akta III	2.352	2.399	3.842	3.840	6.194	6.239
Diploma IV/Akta IV	627	723	412	483	1.039	1.206
S1/Sarjana	12.447	12.197	11.929	11.914	24.376	24.111
S2/Pasca Sarjana	1.825	1900	987	1.109	2.812	3.009
S3/Doktor/Ph.D	80	84	27	29	107	113
Jumlah	27.424	26.954	22562	22426	49986	49380

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2023"

Tabel II.29 Skor Indeks Berdasarkan Bentuk Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Kinerja Pelayanan Pemerintah	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,18	1,18	2,04	2,10	2,28
Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC	CC	B	B
Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60	65	63	63	63,17
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	n.a	n.a	3	3	1,7

Sumber: Kementerian PAN RB, 2024 (<https://1data.menpan.go.id/>)

Berdasarkan data KemenpanRB melalui Portal Satu Data Kementerian PAN RB, Provinsi Papua Barat memiliki skor Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,28 yang dikategorikan dalam predikat “cukup” pada tahun 2023. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Papua Barat berada pada skor 63,17 yang termasuk dalam kategori “baik” pada tahun 2023. Penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di Papua Barat ditunjukkan dalam Tabel II.29.

2.1.3.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel II.30 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di Papua Barat pada tahun 2023. Pada tahun 2023 rasio ketergantungan Papua Barat sebesar 42,76. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi di Papua Barat adalah Teluk Wondama (53,66) dan Fakfak (49,71). Adapun wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling rendah di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (26,69) dan Teluk Bintuni (36,35).

Tabel II.30 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Uraian	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Papua Barat
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur								
0-4	9.013	6.349	5.671	7.568	18.915	3.830	3.808	55.154
5-9	8.793	5.330	4.005	6.964	18.051	3.017	1.756	47.916
10-14	8.379	6.077	4.408	7.069	17.542	2.825	2.017	48.317
15-19	8.584	6.953	4.733	7.872	17.368	3.244	2.912	51.666
20-24	8.217	6.540	4.019	8.094	18.337	4.046	3.995	53.248
25-29	7.314	5.622	3.634	8.637	19.714	4.072	4.450	53.443
30-34	6.814	5.170	3.428	8.794	18.074	3.434	4.317	50.031
35-39	6.732	5.152	3.363	8.362	16.215	2.938	4.203	46.965
40-44	6.114	4.701	3.000	7.602	14.394	2.443	3.347	41.601
45-49	5.073	4.072	2.422	6.391	12.291	2.349	3.316	35.914
50-54	4.364	3.435	1.840	5.014	9.740	1.946	2.561	28.900
55-59	3.465	2.506	1.405	3.302	7.593	1.540	1.912	21.723
60-64	2.695	1.688	1.139	2.013	5.742	1.100	1.101	15.478

Uraian	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	Papua Barat
65-69	1.721	996	751	1.187	3.957	664	570	9.846
70-74	994	557	427	694	2.332	359	248	5.611
75+	612	342	289	538	1.556	248	172	3.757
Penduduk Usia Belum Produktif (<15 tahun)	26.185	17.756	14.084	21.601	54.508	9.672	7.581	151.387
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	59.372	45.839	28.983	66.081	139.468	27.112	32.114	398.969
Penduduk Usia Tidak Produktif (>64 tahun)	3.327	1.895	1.467	2.419	7.845	1.271	990	19.214
Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	49,71	42,87	53,66	36,35	44,71	40,36	26,69	42,76

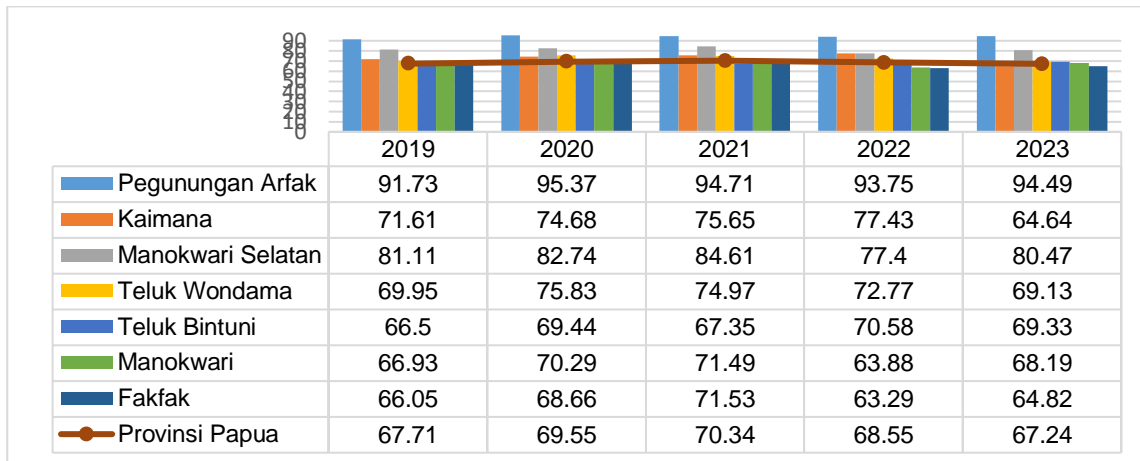
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dan Kabupaten, 2023” (diolah)

Semakin rendah rasio ketergantungan di suatu daerah maka akan memberi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri, seperti dengan mengakses pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, maupun akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika usia produktif tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menimbulkan persoalan karena banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kriminalitas.

2.1.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara provinsi ditinjau berdasarkan kabupaten-kabupaten yang termasuk di dalamnya. TPAK tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak mencapai 94,49%. Kabupaten Kaimana menjadi kabupaten dengan TPAK terendah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 dengan capaian 64,64%. Berdasarkan tinjauan gender pada tahun 2022, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan TPAK tertinggi baik laki-laki maupun Perempuan dengan capaian yang tidak jauh berbeda yaitu 94,32% dan 92,19%. TPAK pada seluruh kabupaten masih didominasi oleh laki-laki sehingga secara rata-rata provinsi, laki-laki memiliki capaian TPAK tertinggi yaitu sebesar 80,88%, lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yaitu 54,63%.

Gambar II.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023



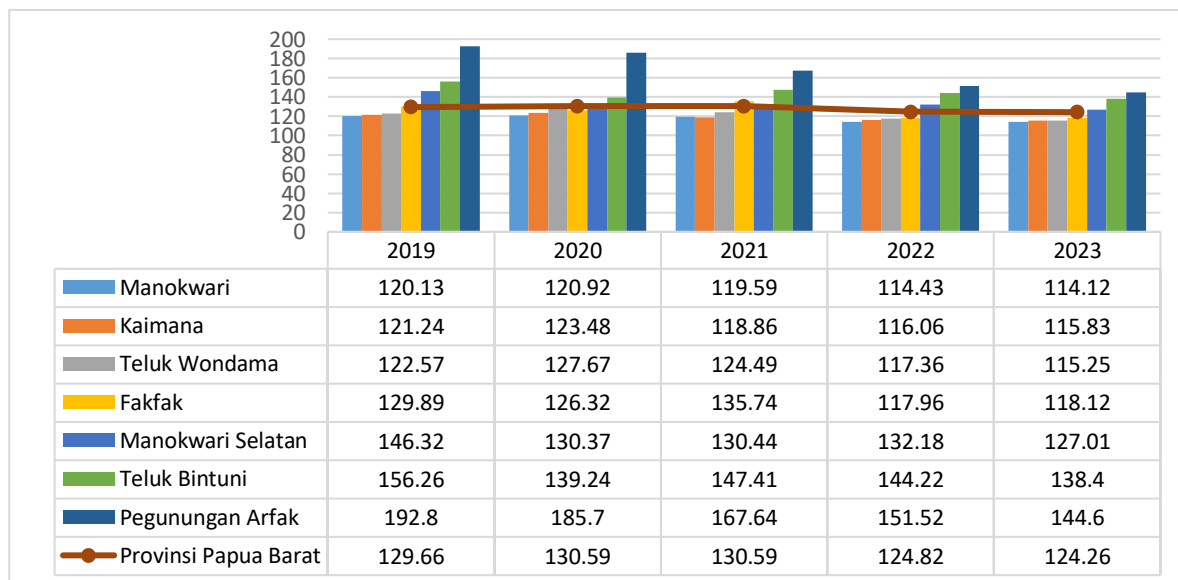
Sumber: BPS Papua Barat, 2024

2.1.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.1.3.3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan ukuran untuk menggambarkan perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga kota acuan. Komoditas konstruksi meliputi gedung tempat tinggal; gedung non tempat tinggal; dan jaringan jalan, irigasi, dan sistem. Semakin tinggi nilai indeks IKK dapat diartikan semakin sulit/mahal pembangunan konstruksi untuk dilakukan di daerah tersebut. IKK memberikan nilai 100 pada Kota Makassar sebagai kota acuan.

Gambar II.30 IKK Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam "Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2022"

Secara umum Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019-2023 telah mengalami penurunan kemahalan konstruksi signifikan. Pada tahun 2019, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat sebesar 129,66 dan mengalami penurunan menjadi 124,26 pada tahun 2023. Berdasarkan tinjauan secara kabupaten, IKK tertinggi berada di Kabupaten

Pegunungan Arfak dengan skor 124,26 pada tahun 2023. Meskipun begitu skor tersebut cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019 hingga 2023. Skor IKK yang cenderung tinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak diartikan bahwa harga barang atau jasa konstruksi di kabupaten ini menjadi yang paling mahal secara provinsi. Sebaliknya, Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan skor IKK terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 114,12 yang artinya rata-rata harga barang atau jasa konstruksi merupakan yang paling murah secara provinsi.

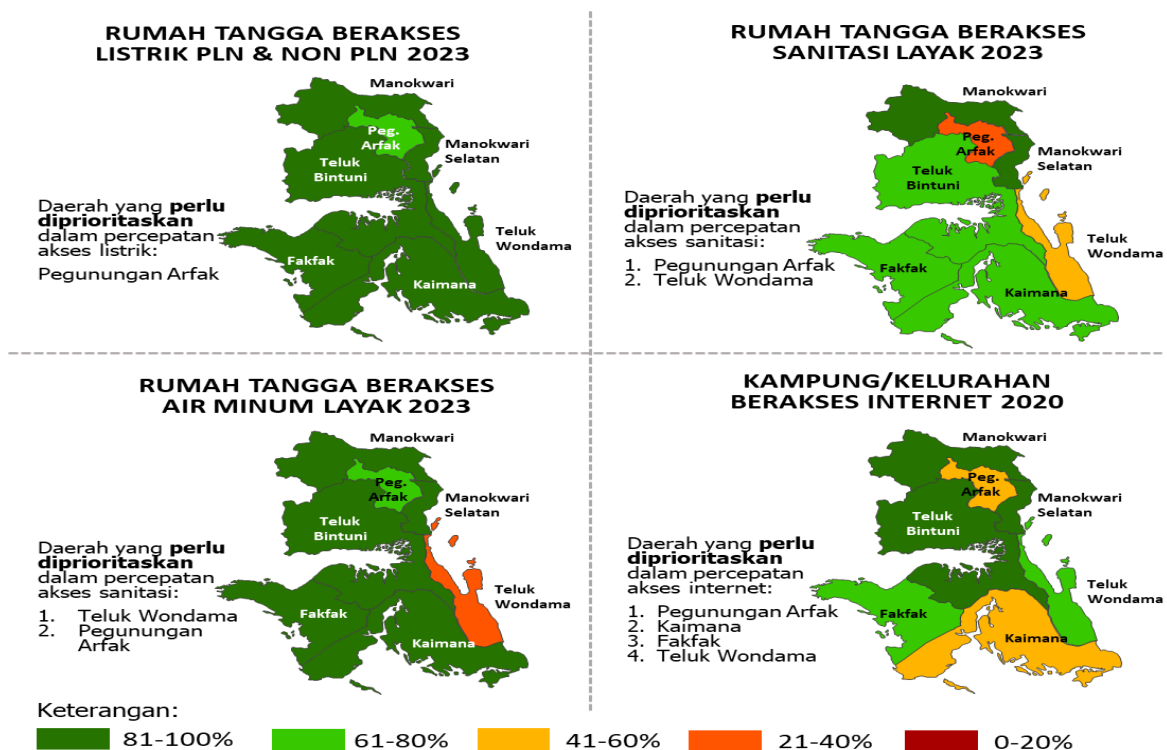
2.1.3.3.2 Sarana Transportasi

Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun sosialnya.

2.1.3.3.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi dan akses internet merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Berdasarkan Gambar II.32 diketahui kondisi infrastruktur khususnya air minum, sanitasi dan internet yang tidak terdistribusi merata di Provinsi Papua Barat. Daerah yang relatif berdaya saing tinggi karena memiliki cakupan listrik, air bersih, sanitasi dan akses internet baik adalah Manokwari dan Manokwari Selatan.

Gambar II.31 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Akses Internet Tahun 2023



Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Untuk meningkatkan daya saing kabupaten di Papua Barat, daerah yang perlu diprioritaskan/diakselerasi dalam peningkatan ketersediaan air bersih, sanitasi dan akses internet karena memiliki cakupan yang rendah adalah:

Percepatan akses listrik: Kabupaten Pegunungan Arfak

Percepatan akses sanitasi: Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama

Percepatan akses air minum layak: Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak

Percepatan akses internet: Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kaimana.

2.1.3.3.4 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Berdasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2020), Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan ancaman bencana yang beragam, termasuk banjir dan kekeringan. Definisi banjir yang digunakan adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sementara kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. BNPB mengukur indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak dari sungai pada daerah rawan banjir menggunakan metode *fuzzy logic*. Sementara, bahaya kekeringan dihitung menggunakan pendekatan kekeringan meteorologis yang dianalisis dengan metode perhitungan Indeks Presipitasi Terstandarisasi atau Standardized Precipitation Index (SPI) periode 3 bulanan.

Pada kasus bencana banjir, seluruh wilayah di Papua barat termasuk dalam kelas risiko tinggi. Wilayah dengan skor tertinggi untuk bencana banjir adalah Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni. Pada kasus bencana kekeringan, kelas risiko tinggi berada di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, seperti Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Manokwari. Sedangkan, kabupaten dengan kelas risiko kekeringan sedang adalah Kaimana, dan Fakfak. Terakhir, kabupaten dengan kelas risiko kekeringan rendah adalah Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

2.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.1.3.4.1 Rasio Pajak

Rasio pajak merupakan suatu indikator penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto. Rasio pajak terhadap PDRB di Papua Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 3,70%, cenderung meningkat pada 3 tahun terakhir sejak tahun 2020. Meskipun rasio pajak menunjukkan peningkatan namun nilai tersebut masih rendah dibandingkan secara nasional yaitu sebesar 10,4%.

Tabel II.31 Rasio Pajak Konsolidasian Terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp)	2.818,88	3.103,25	3.380,66
PDRB (Harga Berlaku) Papua Barat (miliar Rp)	83.528,71	85.072,86	91.291,75
Rasio Pajak (%)	3,37	3,64	3,70

Sumber: KPP Manokwari, KPP Sorong, OM SPAN, SIKD DJPK dan BPS Provinsi Papua Barat (data diolah) dalam "Kajian Fiskal Regional Tahun 2022 Provinsi Papua Barat"

Nilai rasio pajak menunjukkan bahwa porsi penerimaan pajak terhadap perekonomian di Papua Barat masih relatif kecil dan cenderung lebih rendah dari porsi belanja terhadap PDRB. Pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

2.1.3.4.2 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Tabel II.32 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Kabupaten	Jumlah Proyek					Realisasi Investasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	Juta Rupiah		US\$		
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	1	1	-	2	8	33.333	41.585	-	7.161.437	472.400
2	Kaimana	1	2	4	1	-	-	8.051	46.696	52.755	-
3	Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Bintuni	4	-	-	9	9	20.628	-	-	14.024.811	342.700
5	Manokwari	1	12	9	11	78	-	226.667	235.552	2.446.219	27.047.600
6	Manokwari Selatan	1	2	1	-	-	1	400	100	-	-
7	Pegunungan Arfak	1	1	1	-	-	-	550	150	-	-
Papua Barat		9	18	15	23	95	53.962	277.253	282.498	23.685.222	27.862.700

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tabel II.33 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Proyek						
1	Fakfak	2	5	53	105	135
2	Kaimana	2	3	12	114	291
3	Teluk Wondama	1	3	4	9	113
4	Teluk Bintuni	3	4	7	29	85
5	Manokwari	6	7	81	144	603
6	Manokwari Selatan	-	-	-	1	28
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	2	46
Papua Barat		14	22	157	404	1.301
Realisasi Investasi (Juta Rupiah)						
1	Fakfak	9.035	3.125	23.085	1.552.291	405.117

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
2	Kaimana	2.827	27.953	136.511	63.399	156.027
3	Teluk Wondama	-	135	39	11.877	5.644
4	Teluk Bintuni	1.468	17.781	45.431	9.830	82.964
5	Manokwari	108.427	6.150	138.911	643.982	607.193
6	Manokwari Selatan	-	-	-	1.100	150
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	1.892	15
Papua Barat		121.757	55.144	343.977	2.284.371	1.257.113

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tabel II.33 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) di Papua Barat tahun 2019-2023. Diketahui bahwa terdapat penambahan jumlah proyek sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Peningkatan realisasi investasi di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Manokwari. Sementara Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mengalami penurunan realisasi investasi menjadi 100 US\$ dan 150 US\$. Teluk Wondama sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tercatat tidak memiliki proyek sehingga tidak ada realisasi investasi yang terjadi di kabupaten tersebut.

Tabel II.33 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Papua Barat Tahun 2019-2023. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, Papua Barat mengalami kenaikan jumlah proyek. Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Manokwari menjadi kabupaten dengan jumlah proyek tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 dengan masing-masing jumlah proyek sebanyak 135 proyek, 291 proyek, dan 113 proyek. Tahun 2023, nilai realisasi investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Manokwari yang mencapai sebesar 607 miliar rupiah diikuti Kabupaten Fakfak sebesar 405 miliar rupiah.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.4.1.1 Pendidikan

Aspek Pelayanan Pendidikan yang dibahas dalam dokumen ini adalah pendidikan dalam jalur formal, yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta mencakup jenis pendidikan umum, vokasi, dan khusus.

2.1.4.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat Sedangkan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat digolongkan sebagai pendidikan nonformal. Proporsi masing-masing jenis PAUD di Papua Barat ditunjukkan dalam Gambar II.33 di bawah ini, yang menunjukkan jenis TK dan PAUD-Taman Posyandu sebagai benyuk pendidikan terbanyak (masing-masing 47,5% dan 46,9%). Perbandingan ini merupakan angka provinsi Papua Barat sebelum pemekaran, namun cukup mewakili kondisi pasca pembentukan DOB.

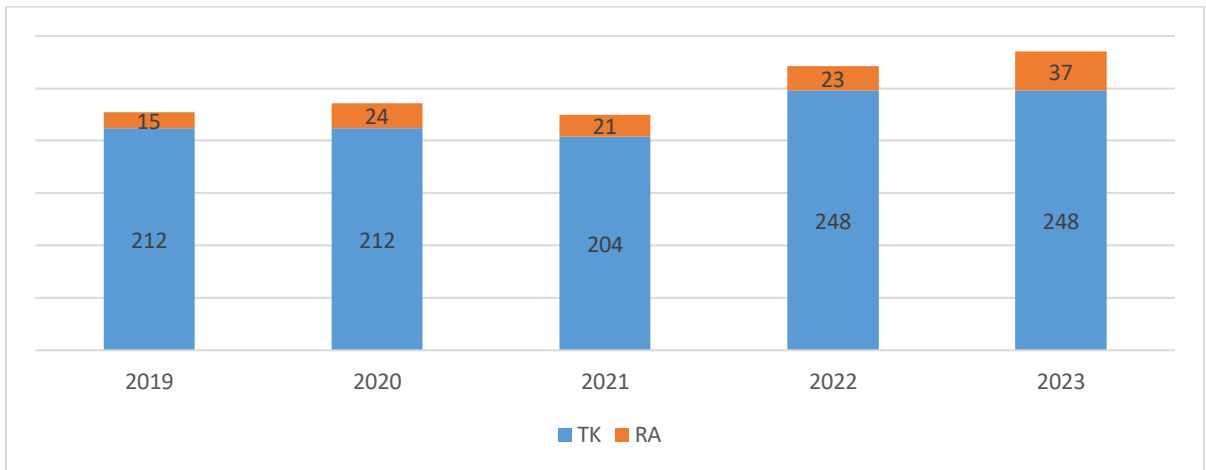
Gambar II.32 Jenis dan Proporsi Pendidikan Pra Sekolah di Papua Barat sebelum Pemekaran tahun 2021 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat, 2021

Jumlah TK dan RA di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat jumlah TK 212 sekolah dan RA 15 sekolah. Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah sekolah dibandingkan tahun 2019, dengan jumlah keseluruhan 248 TK dan 37 RA.

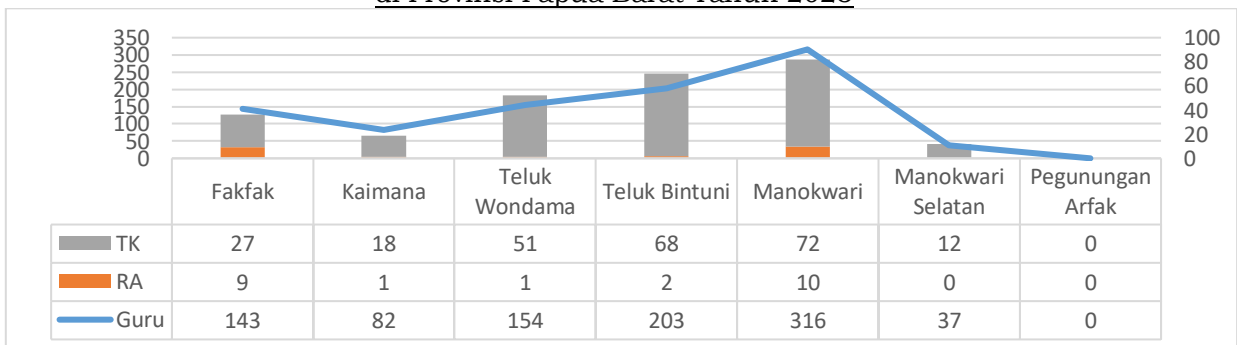
Gambar II.33 Perkembangan Jumlah TK dan RA di Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2020-2024

Berdasarkan kabupaten, jumlah TK dan RA di tahun 2023 terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (82 TK/RA). Sedangkan di Pegunungan Arfak tidak tercatat adanya fasilitas PAUD ini. Jumlah guru TK/RA di masing-masing kabupaten juga sebanding dengan jumlah sekolah, dengan guru terbanyak di Kabupaten Manokwari (316 guru).Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.35.

Gambar II.34 Rasio Sekolah TK/RA dan Guru TK/RA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Jika dihitung rasio guru per sekolah, secara keseluruhan tingkat provinsi diperoleh angka 3 guru per sekolah TK/RA. Di tingkat kabupaten, rasio guru per sekolah berkisar antara 3 guru (Teluk Wondama dan Teluk Bintuni) dan 4 guru (Fak Fak, Kaimana, Manokwari dan Manokwari Selatan)

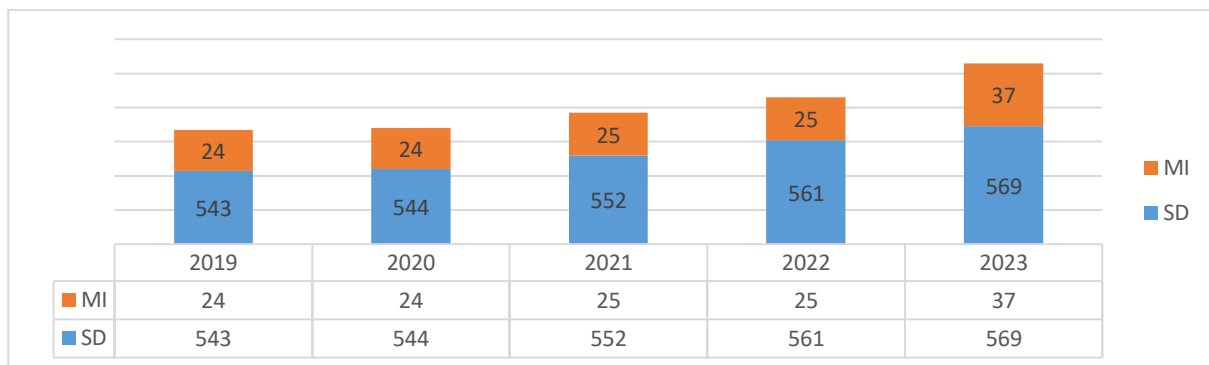
2.1.4.1.1.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

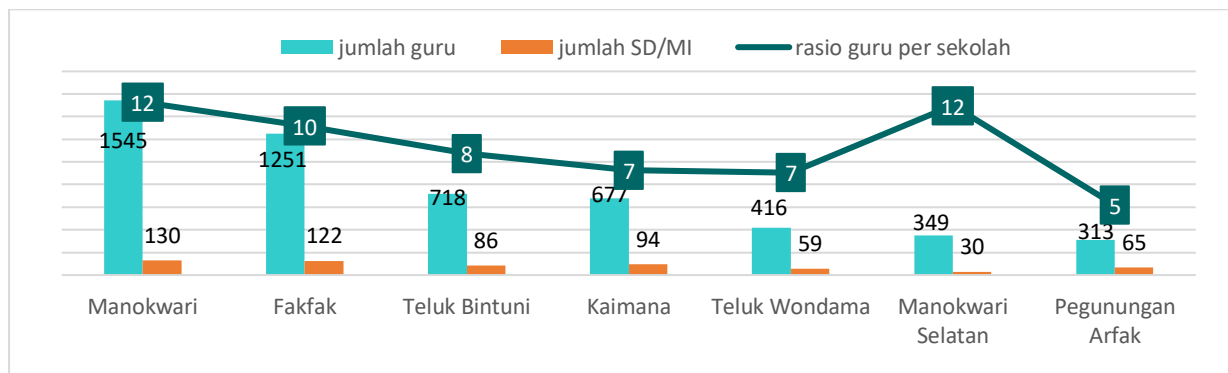
Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari sejumlah 567 SD/MI pada tahun 2019 menjadi 606 SD/MI tahun 2023. Gambar II.36 menunjukkan perkembangan jumlah SD dan MI di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

Gambar II.35 Perkembangan Jumlah SD dan MI di Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Gambar II.36 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



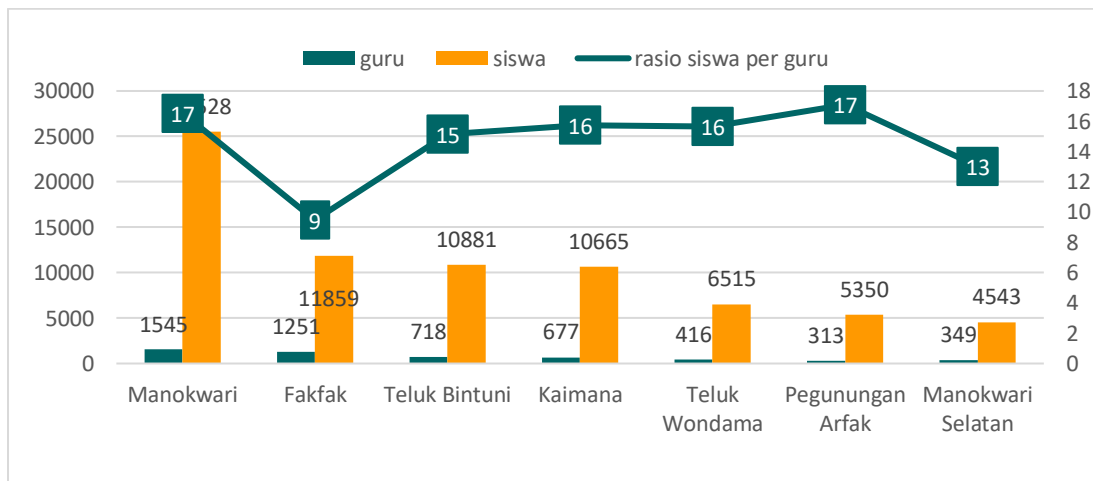
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Pada tahun 2022, SD/MI terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (130 sekolah) dan paling sedikit di Manokwari Selatan (30 sekolah). Sebaran ini sebanding dengan distribusi jumlah penduduk di wilayah Provinsi Papua Barat. Sedangkan guru yang mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 5269 guru, terdiri dari 4974 guru SD dan 295

guru MI. Dengan jumlah ini, diketahui bahwa rasio guru terhadap sekolah dasar di Provinsi Papua Barat adalah 9 guru per sekolah. Jika dipilah per kabupaten, maka kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SD tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, yakni 12 guru untuk 1 sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 5 orang guru per sekolah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.37. Sedangkan kecukupan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 14 siswa untuk 1 guru atau 699 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SD terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MI 15:1.

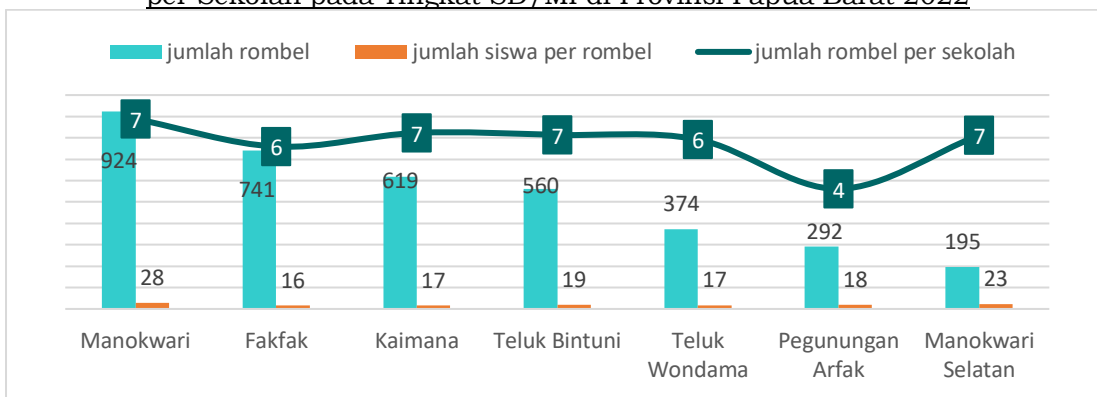
Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak memiliki rasio guru : siswa yang tertinggi yakni 1055 guru untuk 10,000 siswa atau dengan rasio 8 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak, yakni masing-masing 585 dan 605 untuk 10.000 siswa, atau masing-masing 17 siswa untuk 1 guru. Gambar II.38 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat.

Gambar II.37 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2019-2021 (Data diolah)

Gambar II.38 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SD/MI di Provinsi Papua Barat 2022



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

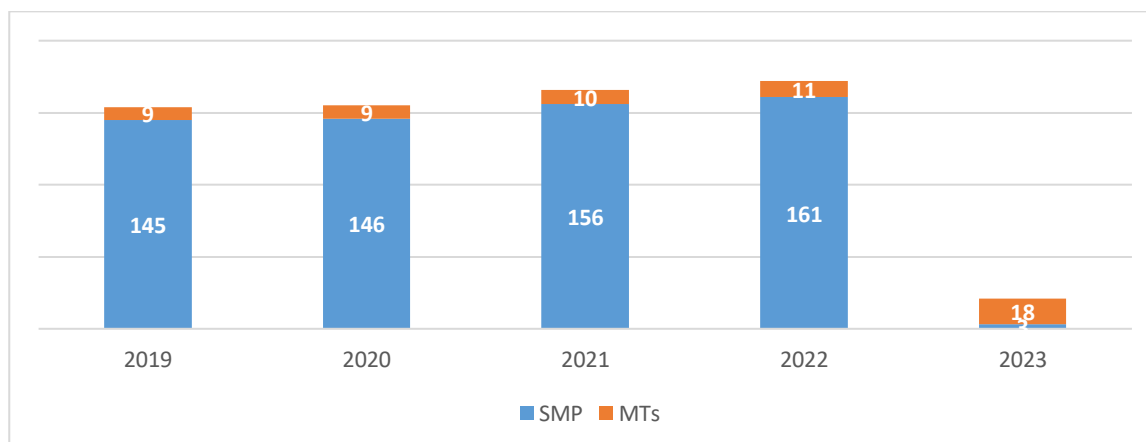
Dalam Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, indikator yang digunakan untuk menilai proses pendidikan yakni jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dalam tiap sekolah dan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan. Untuk tingkat SD, jumlah rombongan ideal adalah 6-24 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 28 anak. Untuk provinsi Papua Barat, rata-rata rombongan di tiap sekolah untuk tingkat SD/MI adalah 6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 20 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional.

Jika dipilah per kabupaten, hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memenuhi standar jumlah rombongan per sekolah (4 rombongan). Sedangkan mengenai jumlah siswa dalam 1 rombongan telah terpenuhi oleh semua SD/MI di semua kabupaten, dengan jumlah terbanyak peserta didik dalam 1 rombongan di Kabupaten Manokwari (28 siswa) (lihat Gambar II.39).

Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir, dari sejumlah 154 SMP/MTs pada tahun 2019 menjadi 21 SMP/MTs tahun 2023. Pada tahun 2023 Jumlah SMP/Mts berkurang akibat pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi 2 provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Gambar II.40 menunjukkan perkembangan jumlah SMP dan MTs di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

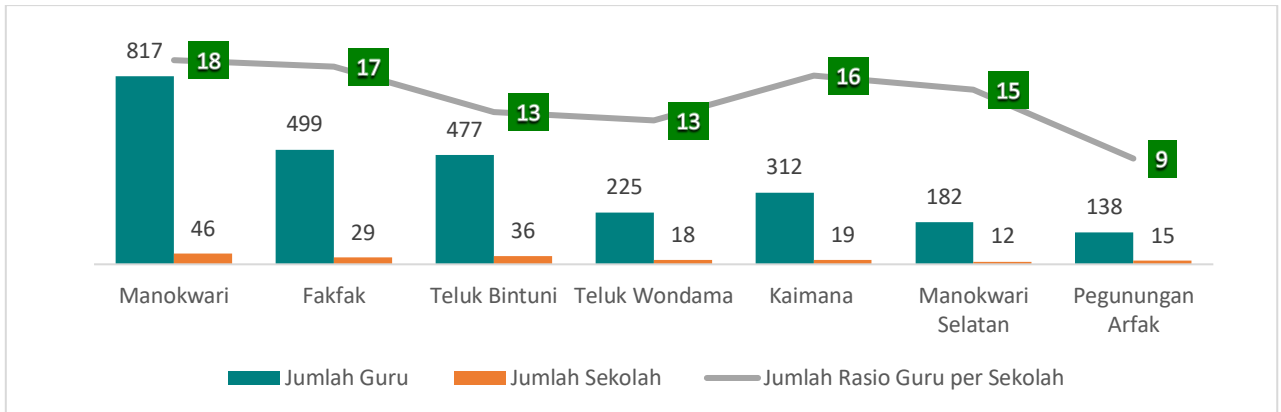
Gambar II.39 Perkembangan Jumlah SMP dan MTs di Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

SMP/MTs di tahun 2023 terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (49 sekolah) dan paling sedikit di Manokwari Selatan (12 sekolah). Jumlah guru yang SMP/MTs mengajar pada Tahun Ajaran 2023-2024 tercatat sebanyak 2761 guru, terdiri dari 2480 guru SMP dan 281 guru MTs. Dengan jumlah ini, terhitung rasio guru : sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Barat adalah 15 guru untuk 1 sekolah. Pemilahan kabupaten menunjukkan kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SMP/MTs tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari, yakni 18 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 9 orang guru per sekolah (lihat Gambar II.41).

Gambar II.40 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2023/2024

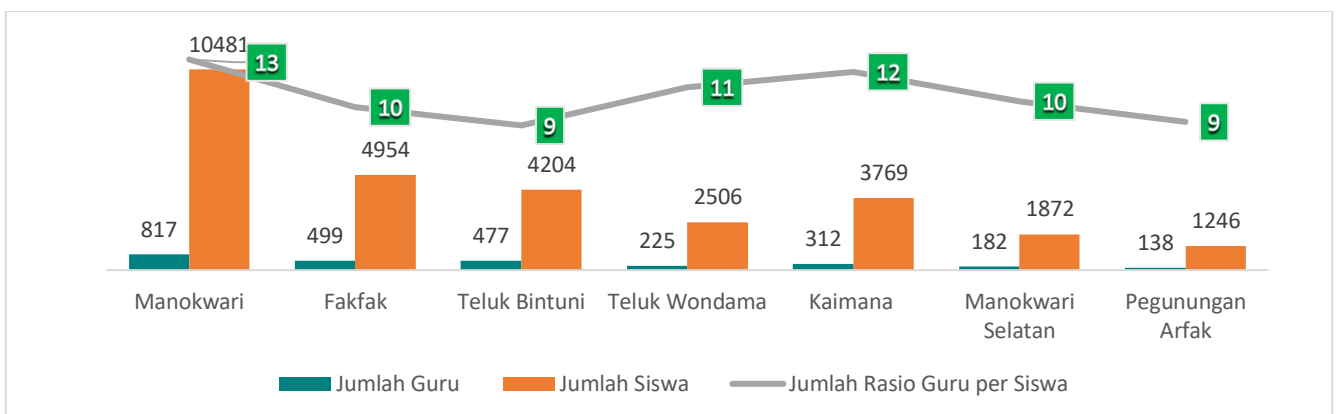


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Sedangkan ketersediaan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 10 siswa untuk 1 guru atau 956 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMP terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MTs 15:1

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi yakni 1134 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 9 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Manokwari, yakni 779 untuk 10.000 siswa, atau 13 peserta didik untuk 1 guru. Gambar II.42 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Gambar II.41 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa:Guru pada Tingkat SMP/MTs di Provinsi Papua Barat 2023/2024



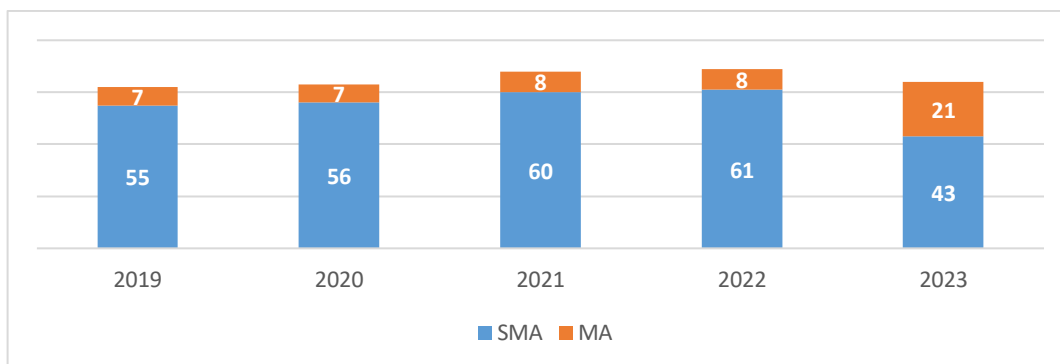
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024.

2.1.4.1.1.3 Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah

Seperti pada jenjang pendidikan di bawahnya, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir juga meningkat, dari 62 SMA/MA pada tahun 2019 menjadi 64 SMA/MA tahun 2023. Gambar II.43 menunjukkan perkembangan jumlah SMA dan MA di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

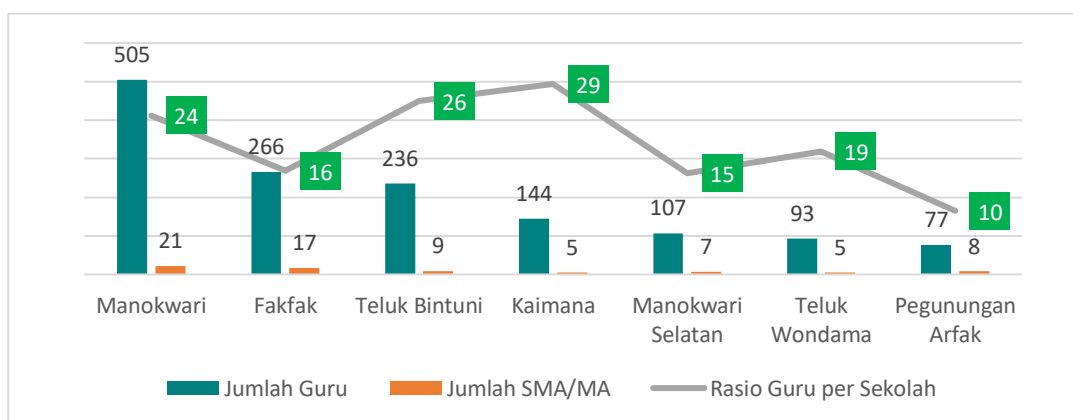
Gambar II.42 Perkembangan Jumlah SMA dan MA di Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020-2024

Jumlah SMA/MA terbanyak di tahun 2023 terdapat di Kabupaten Manokwari (21 sekolah) dan paling sedikit di Teluk Wondama (3 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2023-2024 tercatat jumlah guru SMA/MA sebanyak 1545 guru, terdiri dari 1285 guru SMA dan 260 guru MA. Dengan jumlah ini, rasio guru terhadap sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Barat adalah 19 orang guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per sekolah di tingkat SMA/MA tertinggi terdapat di Kabupaten Fak Fak dan Kaimana, yakni masing-masing 30 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 7 orang guru per sekolah. Gambar II.44 menunjukkan sebaran SMA/MA dan gurunya di Provinsi Papua Barat tahun 2023.

Gambar II.43 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru: Sekolah pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2023/2024

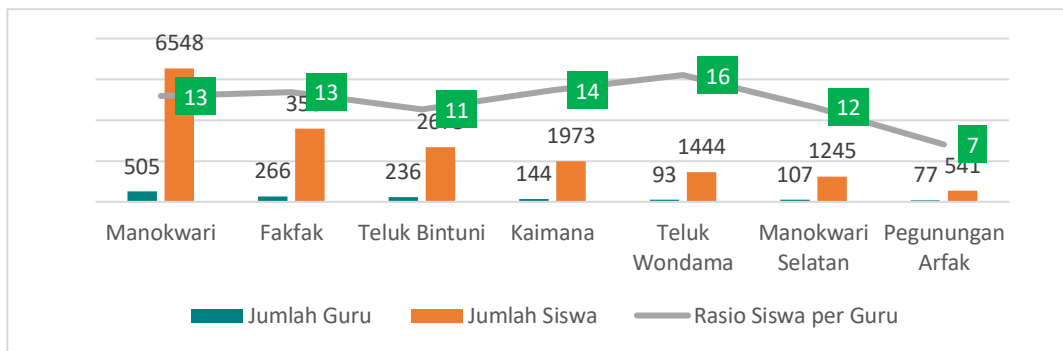


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 13 siswa untuk 1 guru atau 757 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMA terhadap gurunya adalah 20:1, dan untuk MA 15:1

Kabupaten yang memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi adalah tercatat Kabupaten Pegunungan Arfak yakni 918 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 7 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Teluk Wondama, yakni 471 untuk 10.000 siswa, atau 21 peserta didik untuk 1 guru. Sebaran guru, siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat ditunjukkan pada Gambar II.45.

Gambar II.44 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SMA/MA di Provinsi Papua Barat 2023/2024



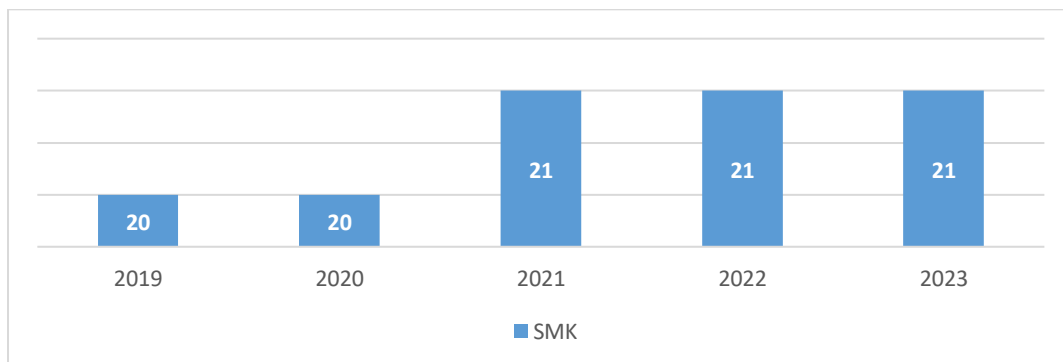
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Sekolah Menengah Kejuruan

Berbeda dengan jenjang dan jenis sekolah lainnya, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir relatif tetap, hanya terdapat penambahan 1 sekolah di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun Ajaran 2021-2023. Dalam wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 terdapat 20 SMK, dan pada tahun 2023 menjadi 21 SMK. Gambar II.46 menunjukkan perkembangan jumlah SMK di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir.

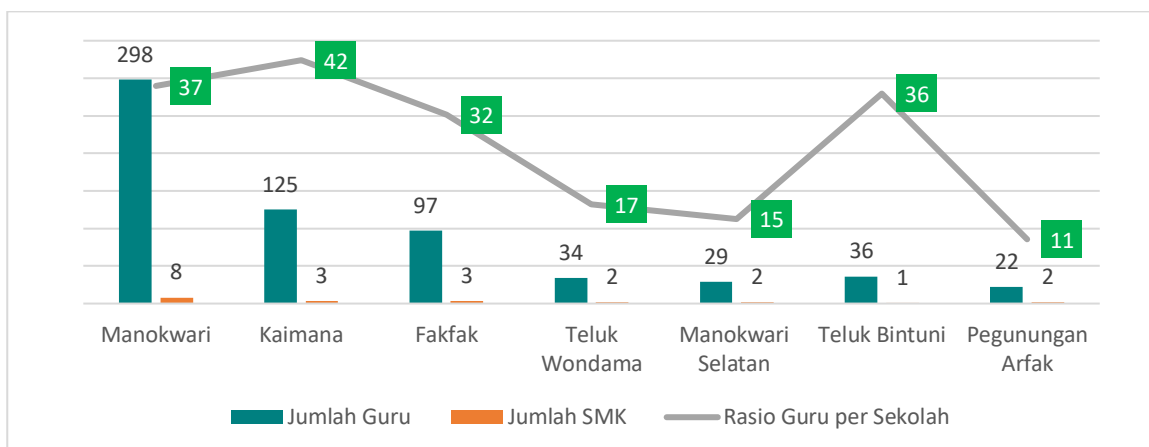
SMK terbanyak di tahun 2023 terdapat di Kabupaten Manokwari (8 sekolah), sementara di Kabupaten lain hanya terdapat 1- 3 SMK; paling sedikit di Teluk Bintuni (1 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2023-2024 tercatat jumlah guru SMK sebanyak 641 orang. Dengan jumlah ini, rasio guru SMK di Provinsi Papua Barat adalah 31 guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Kaimana, yakni 42 guru per sekolah. Pegunungan Arfak memiliki rasio terendah dengan 11 guru per sekolah. Gambar II.46 menunjukkan sebaran SMK dan gurunya di Papua Barat tahun 2023.

Gambar II.45 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

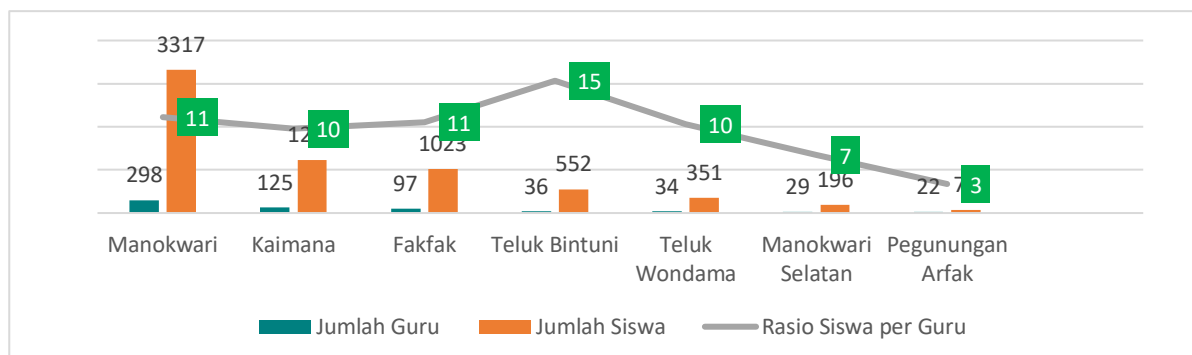
Gambar II.46 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Rasio Guru:Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2023/2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Kecukupan jumlah guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 13 siswa untuk 1 guru atau 781 guru per 10.000 siswa. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMK terhadap gurunya adalah 15:1

Gambar II.47 Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Rasio Siswa: Guru pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Barat 2023/2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

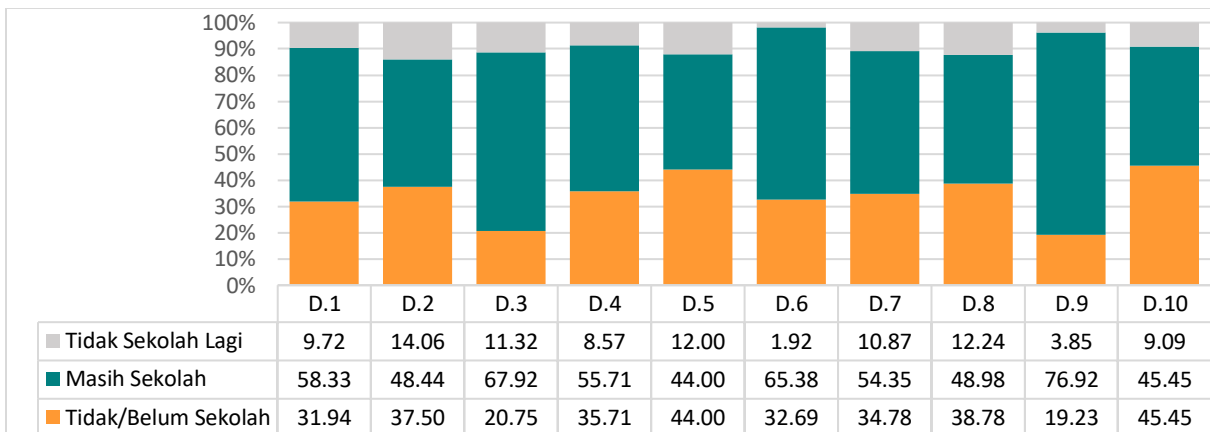
Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi yakni 1377 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 7 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni 383 untuk 10.000 siswa, atau 26 peserta didik untuk 1 guru. Gambar II.38 menyajikan jumlah guru, jumlah siswa dan rasio siswa per 1 guru berdasarkan kabupaten di Papua Barat.

Standar jumlah rombongan untuk tingkat SMK berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-72 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 telah memenuhi standar nasional, dengan jumlah rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMK adalah 14 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 24 orang.

2.1.4.1.1.4 Pendidikan Khusus

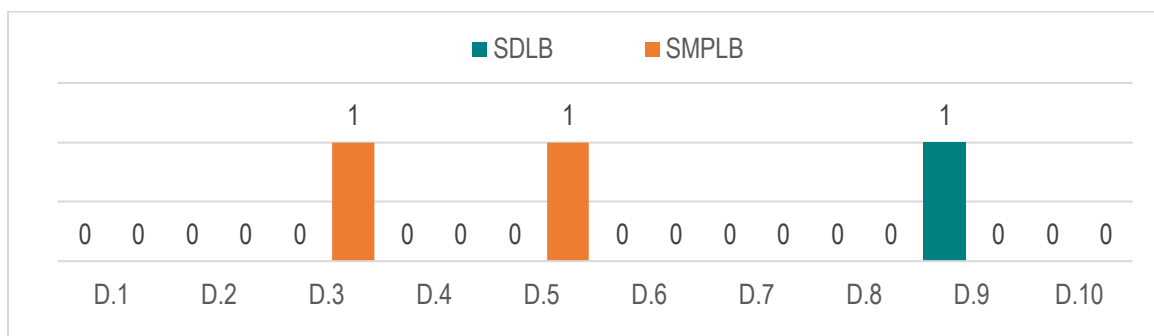
Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Barat berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada 1 sekolah, bertempat di Kabupaten Manokwari. Jumlah peserta didik di sekolah ini 42 orang, terdiri dari masing-masing 21 laki-laki dan perempuan (Dapodikdasmen 2023), dengan jumlah guru sebanyak 8 orang, Dengan demikian di sekolah ini rasio 1 guru untuk 2-3 peserta didik. Jumlah rombongan belajar adalah 6 rombel (Dapodik Kemendikbudristek 2023), sehingga jumlah peserta didik per rombel adalah 3-4 orang. SLB ini tidak tercantum dalam data akreditasi BANSM Kemendikbud. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021, Angka Partisipasi Pendidikan Khusus di Papua Barat sebelum pemekaran dengan penerima layanan penyandang disabilitas pada tahun 2021 adalah sebesar 63,28%. Data untuk empat tahun terakhir lainnya (2017-2020) tidak tersedia.

Gambar II.48 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.49 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.50 menunjukkan persentase penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan partisipasi sekolah di Papua Barat berdasarkan Regsosek (2022). Dari total 5.918 penduduk di Papua Barat yang mengalami disabilitas sedang dan berat, diantaranya terdapat 518 anak usia sekolah (5-18 tahun). Mayoritas anak usia sekolah yang disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, yaitu sebesar 283 penduduk (56,15%). Sisanya, sebanyak 172 penduduk (34,13%) tidak/belum sekolah dan 49 penduduk (9,72%) tidak sekolah lagi. Mereka yang tidak bersekolah, secara proporsinya paling banyak berada di

kelompok 10% termiskin serta merata hampir tiap kelompok pendapatan. Artinya, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja tetapi juga soal akses dan fasilitas yang kurang memadai sehingga baik kelompok miskin maupun rentan tidak/belum bersekolah.

Gambar II.50 menunjukkan sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Papua Barat berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.50 diketahui dari total 283 penduduk disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, hanya 3 penduduk disabilitas bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Padahal penduduk dengan disabilitas sedang dan berat membutuhkan pendamping atau sistem pendidikan khusus.

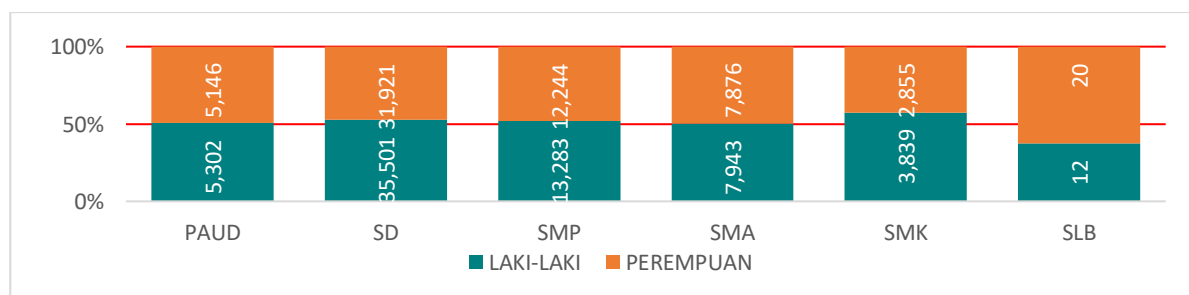
Gambar II.50 juga mengindikasikan jumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah masih jauh dibanding dengan non disabilitas. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif perlu turut menyertakan penyandang disabilitas sebagai subjek dan faktor penentu keberhasilan pembangunan salah satunya dengan memastikan keberterimaan dan keteraksesan layanan dasar termasuk pendidikan bagi disabilitas. Merespon hal tersebut, perlunya Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusi, aksesibel bagi kelompok disabilitas dan memiliki kurikulum vokasional yang diperlukan termasuk SDM pengajar, kebutuhan akan biaya tambahan untuk terapi dan alat bantu termasuk PJP, cek kesehatan rutin, dan pemberi rawat.

2.1.4.1.1.5 Partisipasi Sekolah

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), diketahui bahwa jumlah peserta didik mengalami penurunan dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Data ini menunjukkan adanya sejumlah peserta didik yang putus sekolah terutama dari jenjang SD ke SMP. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, proporsi peserta didik laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan di tahun ajaran 2021-2022, kecuali pada sekolah SLB. Gambar II.51 menunjukkan pertambahan jumlah peserta didik di Provinsi Papua Barat berdasarkan jenjang/ jenis pendidikan serta proporsinya berdasarkan jenis kelamin.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Data APS terkini untuk Provinsi Papua Barat yang tersedia adalah data tahun 2021, yang rangkumannya ditunjukkan pada Tabel II.34.

Gambar II.50 Jumlah Peserta Didik pada Tiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2021



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapodik.kemdikbud.go.id/>

Tabel II.34 Angka Partisipasi Sekolah, Provinsi Papua Barat, 2021

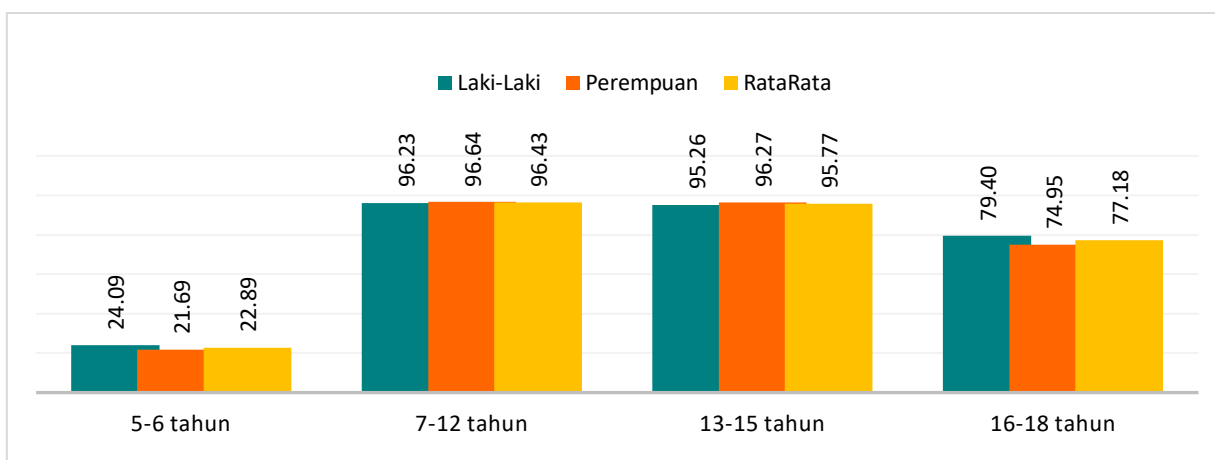
Kabupaten	7-12 tahun	13 – 15 tahun	16 – 18 tahun	19 – 24 tahun
Fakfak	99.48	98.47	89.58	44.43
Kaimana	98.65	98.55	75.46	16.25
Teluk Wondama	97.67	96.48	71.37	13.2
Teluk Bintuni	96.73	95.92	71.87	20.26
Manokwari	96.94	96.14	85.93	29.95
Manokwari Selatan	94.49	93.95	66.96	30.14
Pegunungan Arfak	94.79	93.52	77.92	17.58
Rata-Rata	96.96	96.15	77.01	24.54

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Dari Tabel II.34 nampak bahwa APS makin menurun dengan bertambah tingginya usia jenjang pendidikan. Dari APS anak usia 7-12 tahun yang setara dengan pendidikan sekolah dasar sebesar 96,96% sedikit menurun di kelompok usia 13-15 tahun (setara usia SMP), kemudian menurun cukup banyak di usia 16-18 tahun (usia SMA) hingga makin rendah pada usia 19-24 tahun (usia pendidikan tinggi) yang hanya 24,54%.

Sumber data dalam Tabel II.37 tidak mencakup usia PAUD. Namun data dari KemenPPPA dalam Profil Anak Indonesia 2017-2020 menyebutkan persentase anak usia 0-6 Tahun yang sedang mengikuti PAUD terhadap total anak 0-6 tahun di Provinsi Papua barat sebelum dimekarkan pada tahun 2019 sebesar 20,71%. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 27,22%. Namun keikutsertaan anak ini telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni 13,83% di tahun 2017 dan 15,59% tahun 2018 Sedangkan data APS berdasarkan kabupaten terpilah jender yang terakhir adalah data BPS untuk APS tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. APS laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada kelompok umur 5-6 tahun dan 16-18 tahun, sedangkan pada 2 kelompok umur pendidikan lainnya, APS perempuan lebih tinggi. APS berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata di 7 kabupaten ditunjukkan pada Gambar II.52.

Gambar II.51 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Tabel II.38 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, 2019

Kabupaten	5-6 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Fakfak	21.49	14.07	99.51	97.58	99.79	95.62	90.36	89.19
Kaimana	28.04	21.53	97.93	99.18	97.81	99.55	82.81	64.38
Teluk Wondama	35.17	24.37	98.14	96.4	95.57	98.48	69.41	73.74
Teluk Bintuni	12.56	21.63	92.88	98.83	94.47	96.69	71.19	72.18
Manokwari	19.39	30.54	98.18	92.28	94.68	98.59	78.59	97.11
Manokwari Selatan	25.37	29.03	93.04	94.38	96.41	87.71	70.48	61.82
Pegunungan Arfak	26.61	10.65	93.92	97.81	88.07	97.27	92.97	66.22
Rata-Rata	24.09	21.69	96.23	96.64	95.26	96.27	79.40	74.95

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

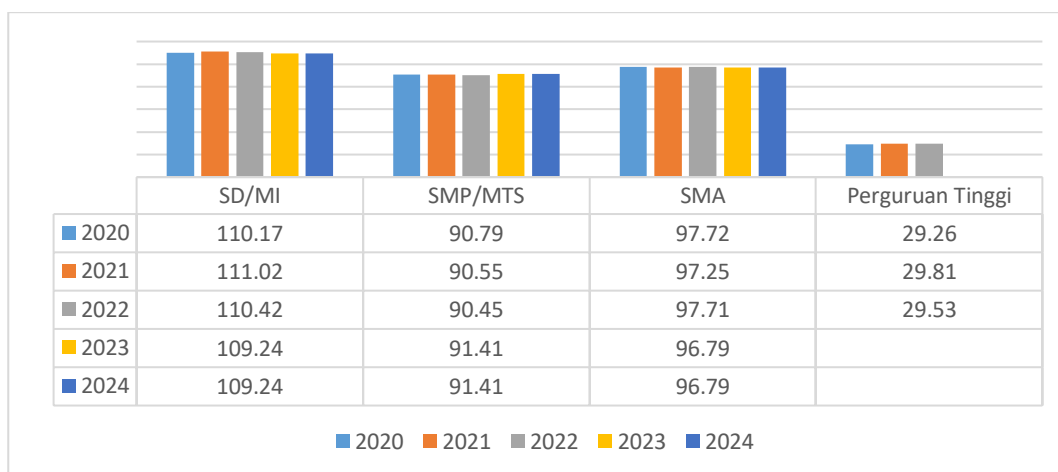
Pemilahan APS terpilah gender berdasarkan kabupaten ditampilkan pada Tabel II.38. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa kabupaten, terutama pada kelompok umur 13-15 tahun.

Angka Partisipasi Kasar

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Gambar II.53 menunjukkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Papua Barat pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat hingga Perguruan Tinggi. Dari gambar tersebut, nampak bahwa APK pada jenjang SD/MI menurun di tahun 2023 dibandingkan tahun 2019, sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA naik di tahun 2023 dibandingkan tahun 2019. Perguruan tinggi justru menurun di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Angka di atas 100% pada APK SD/MI menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peserta didik pada jenjang SD/MI yang usianya di luar usia sekolah pada jenjang ini. Tidak tersedia data terpilah jender mengenai APK di kabupaten-kabupaten wilayah Provinsi Papua Barat.

Gambar II.52 APK Kabupaten di Papua Barat pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2020-2024

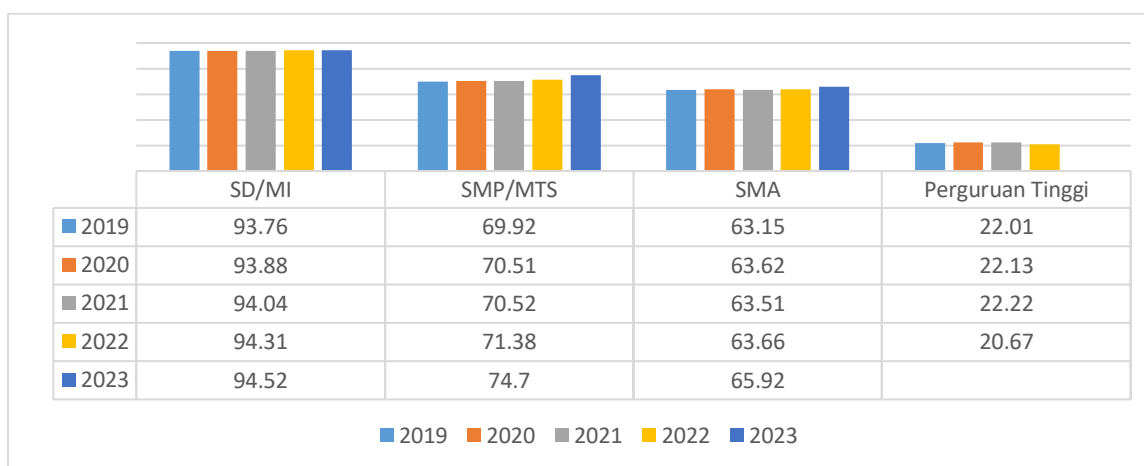


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa yang bersekolah pada satu jenjang pendidikan dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Indikator ini bermanfaat untuk menilai proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Perbandingan APM rata-rata dari 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya APM pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun terjadi penurunan APM pada jenjang pendidikan tinggi. Gambar II.54 menunjukkan perkembangan APM pada masing-masing jenjang pendidikan dalam kurun waktu 2019-2023.

Gambar II.53 APM pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

2.1.4.1.1.6 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Adapun data yang disajikan pada Tabel II.39 merupakan angka provinsi Papua Barat sebelum pemekaran berupa Angka putus sekolah anak berumur 7-17 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Angka di 7 kabupaten Provinsi Papua Barat pasca pemekaran diasumsikan tidak jauh berbeda dengan angka provinsi sebelum pembentukan DOB.

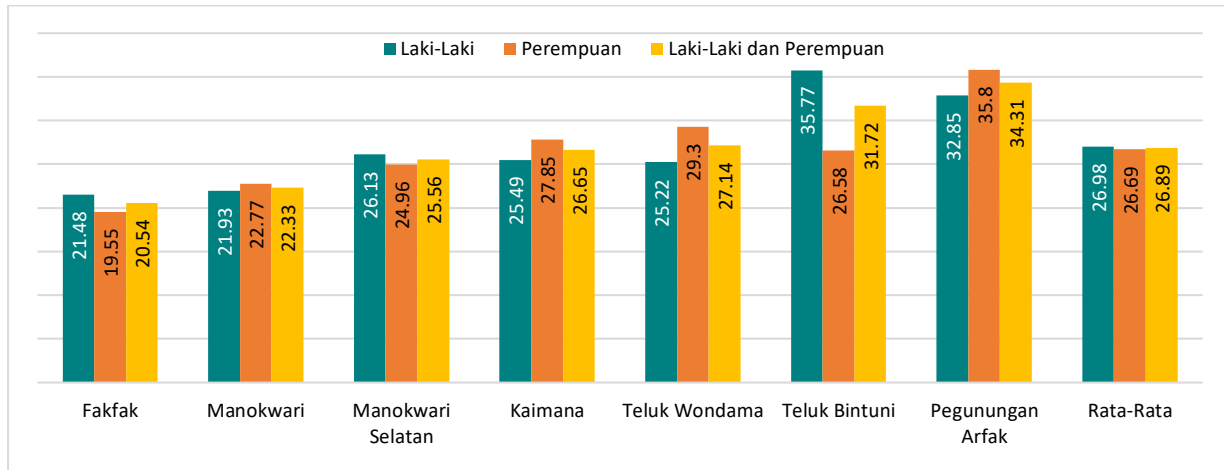
Dengan tidak adanya data terpilah kabupaten mengenai Angka Putus Sekolah, digunakan persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi. Kelemahannya persentase ini tidak bisa memilah keputussekolahan pada masing-masing jenjang pendidikan. Gambar II.55 di bawah menunjukkan Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Tidak Bersekolah Lagi. Berdasarkan Gambar II.55 nampak bahwa persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi paling tinggi angkanya di Kabupaten Pegunungan Arfak, terutama pada penduduk perempuan. Sedangkan penduduk usia sekolah laki-laki yang tidak bersekolah lagi tertinggi persentasenya di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel II.35 Angka Putus Sekolah Anak Berumur 7-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Indikator	2016	2017	2018
Laki-laki	1,51	0,75	0,98
Perempuan	0,85	1,24	1,23
Total	1,18	0,98	1,11

Sumber: KemenPPPA dalam Profil Anak Indonesia, 2017-2019

Gambar II.54 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten, 2022

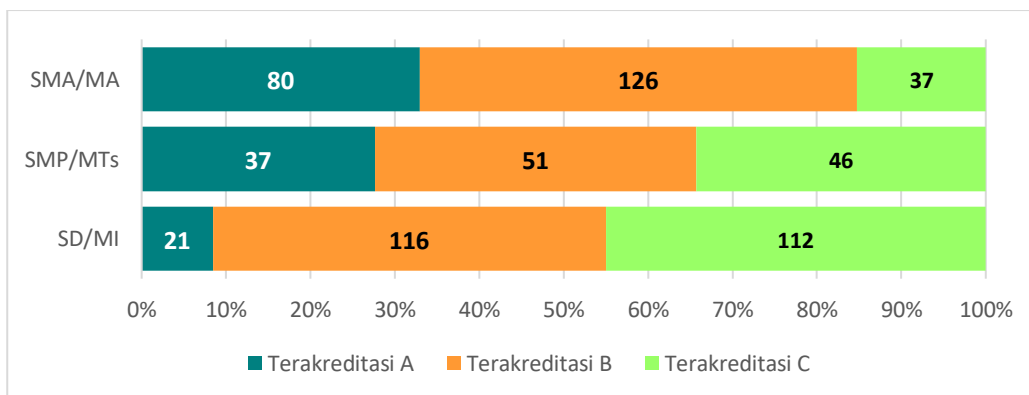


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.1.4.1.1.7 Akreditasi Sekolah

Berdasarkan data Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah dapat diketahui jumlah sekolah yang telah terakreditasi pada penilaian tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Barat (lihat Gambar II.56). Mayoritas sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Papua Barat berada dalam akreditasi B. Adapun data terkompilasi mengenai akreditasi sekolah terpilah kabupaten setelah pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi 2 provinsi tidak dapat ditampilkan berhubung pemilahan jenjang dan jenis sekolah berdasarkan status akreditasinya pada BANSM Kemedikbud per kabupaten belum tersusun.

Gambar II.55 Peringkat Akreditasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat Pra-Pemekaran, Tahun Penilaian 2021



Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2022 – BANSM kemdikbud.go.id

2.1.4.1.2 Kesehatan

2.1.4.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

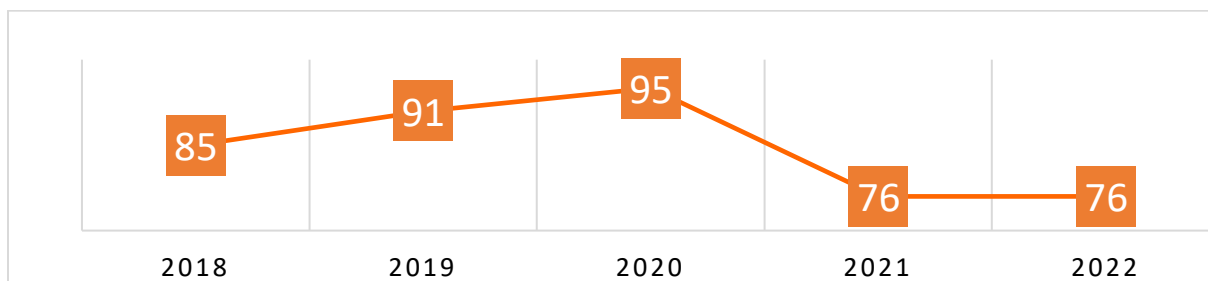
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Praktik Perseorangan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium, Rumah Sakit, Upaya Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Puskesmas

Di 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 terdapat 76 unit puskesmas, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni (4 rawat inap dan 16 nonrawat inap). Jumlah puskesmas ini mengalami penurunan sejak tahun 202, disebabkan karena perbaikan data dengan mengeluarkan sejumlah puskesmas yang belum teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI. Gambar II.57 dan Gambar II.58 berturut-turut menunjukkan perkembangan jumlah puskesmas di Provinsi Papua Barat sejak 2018 hingga 2022, dan distribusinya per kabupaten pada tahun 2022.

Dengan menggunakan data BPS, rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Barat adalah 1 : 7.387 penduduk. Rasio ini jauh melebihi standar nasional yakni minimal 1 puskesmas untuk 16.000 penduduk, dan pemenuhan standar ini juga tercapai di semua kabupaten (lihat Gambar II.59). Meskipun rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat tergolong sangat baik, namun diketahui kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi masih merupakan hambatan terhadap aksesibilitas penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan puskesmas.

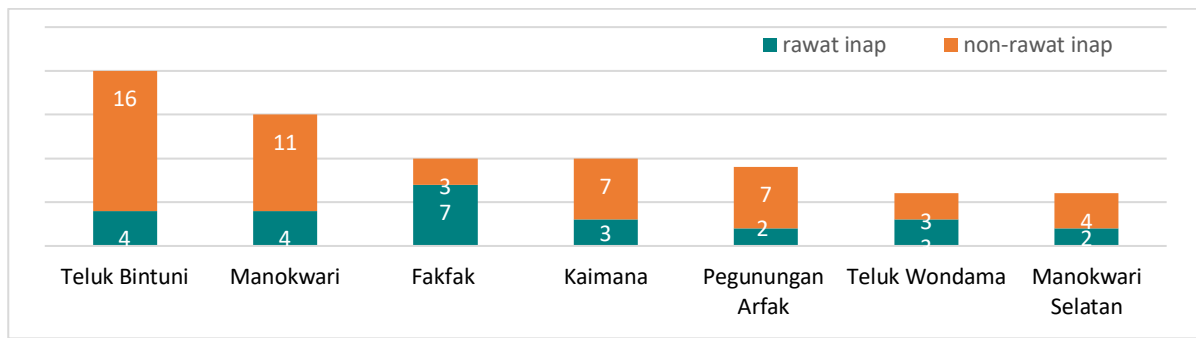
Gambar II.56 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Barat



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

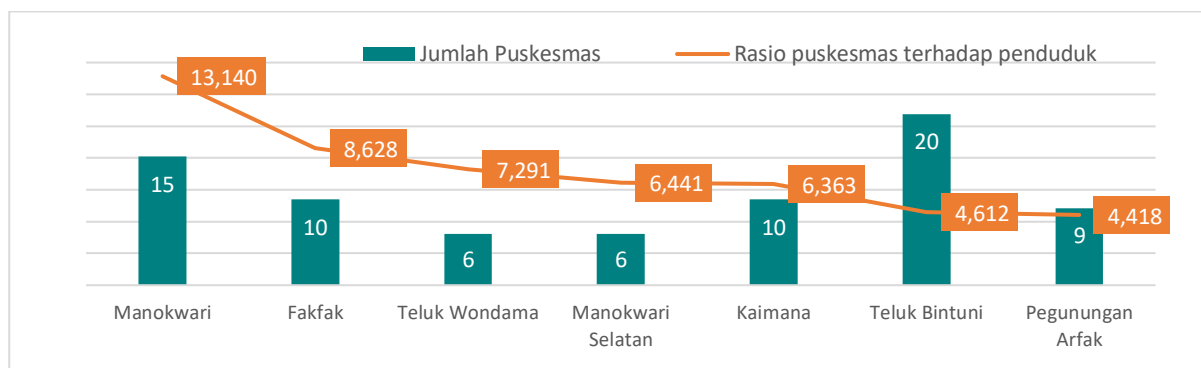
Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2022 menyebutkan tahun 2021-2022, dari seluruh puskesmas tersebut baru 43% Puskesmas yang telah terakreditasi. Laporan dari sebuah lembaga resmi akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan di Indonesia, Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LAKESI), pada laman webnya yang diakses bukan Februari 2024 menyebutkan 32 puskesmas di Provinsi Papua Barat yang sudah menjalani akreditasi dengan hasil terbanyak (37%) tingkat madya, sedangkan lainnya berturut-turut 28% tingkat utama, 19% tingkat paripurna dan 16% tingkat dasar.

Gambar II.57 Distribusi Puskesmas per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

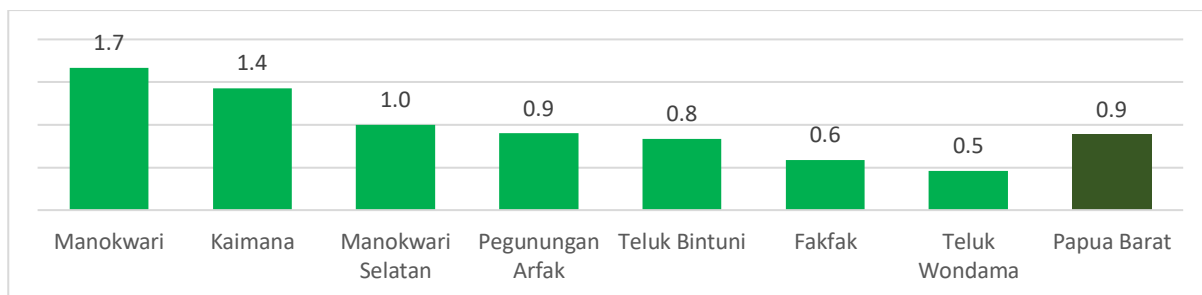
Gambar II.58 Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan Puskesmas terhadap distrik di Papua Barat pada tahun 2022 sebesar 0,9. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap distrik yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 distrik, di tingkat provinsi hampir terpenuhi. Tetapi jika diperhatikan distribusi Puskesmas tersebut di tingkat kabupaten, hanya 3 kabupaten yang rasionya telah mencapai standar nasional, yakni Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Manokwari Selatan. Pada Gambar II.60 dapat dilihat rasio puskesmas per jumlah distrik di masing-masing kabupaten.

Gambar II.59 Rasio Puskesmas per Distrik Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat, 2022



Sumber: Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Puskesmas dengan Kecukupan SDM Kesehatan

Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2020 menyebutkan secara nasional terdapat 6,9% puskesmas tanpa dokter. Sebelum pembentukan DOB, Provinsi

Papua Barat berada di urutan kedua tertinggi setelah Provinsi Papua dengan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 42,07% dari 154 puskesmas yang terdaftar.

Data terakhir SISDMK (31 Desember 2021) juga menunjukkan bahwa belum ada puskesmas di Provinsi Papua Barat yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup yaitu: (1) dokter atau dokter layanan primer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut. Secara nasional, cakupan puskesmas dengan ketersediaan 9 jenis nakes sesuai standar baru mencapai 39,6% dari seluruh puskesmas di Indonesia.

Rumah Sakit

Terdapat 11 rumah sakit di Provinsi Papua Barat, 8 di antaranya merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yakni 4 RS di Manokwari, dan masing-masing 1 RS di Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Di antara 8 RS tersebut, 6 di antaranya sudah terakreditasi, sebagian besar dengan tingkat Perdana. Nama serta kelas dan akreditasi ke-8 RS di Provinsi Barat terdapat dalam Tabel II.36.

Tabel II.36 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat

Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
Manokwari	RSUD Kabupaten Manokwari	C	Utama
	RSUD Provinsi Papua Barat	C	
	RSAL Dr. Azhar Zahir	D	Perdana
	RS Bhayangkara Lodewijk Mandatjan	D	
Fakfak	RSUD Kabupaten Fakfak	C	Perdana
Kaimana	RSUD Kabupaten Kaimana	D	Perdana
Teluk Wondama	RSUD Kabupaten Teluk Wondama	D	Perdana
Teluk Bintuni	RSUD Kabupaten Teluk Bintuni	C	Paripurna

Sumber: LAKIP Dinkes Provinsi Papua Barat, 2021 (diolah)

Selain 8 RS di atas, 3 rumah sakit lainnya berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana terdapat dalam Tabel II.37.

Tabel II.37 Rumah Sakit yang Berstatus sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
Manokwari	RS Tk.IV J.A. Dimara		
	RS Pratama Warmare	D Pratama	
Manokwari Selatan	RS Pratama Elia Waran	D Pratama	

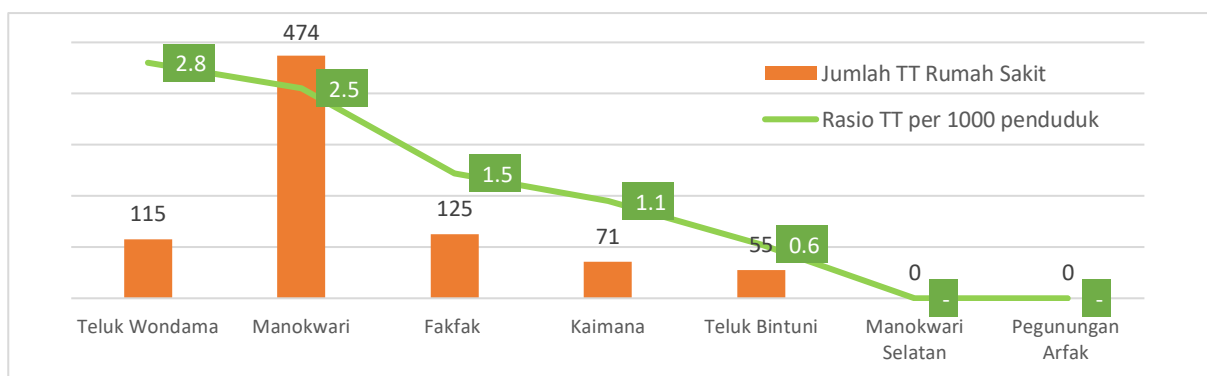
Sumber: LAKIP Dinkes Provinsi Papua Barat, 2021 (diolah)

Kabupaten yang tidak tercantum dalam daftar di atas adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, yang hingga tahun 2023 telah mempersiapkan sebuah RS Kelas D Pratama. Di antara

ke-11 rumah sakit yang ada di Provinsi Papua Barat, 8 di antaranya (73%) diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemprov, dan Pemkab) dan 3 oleh TNI-Polri.

Indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Menurut data Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019, seluruh tempat tidur RS di Papua Barat berjumlah 1786 Tempat Tidur, atau 1,6 Tempat Tidur per 1000 penduduk. Rasio ini melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun jika dipilah per kabupaten, selain 4 kabupaten yang belum memiliki RS sebagai FKTL, rasio TT per 1000 penduduk yang di bawah 1 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Gambar II.60 Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 (diolah)

Ketersediaan Obat dan Vaksin

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 menunjukkan capaian puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Provinsi Papua Barat sebelum pembentukan DOB sebesar 89,9%, yang telah melampaui target nasional sebesar 85%. Demikian pula persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat esensial di Papua Barat sebelum dimekarkan menunjukkan capaian yang sangat baik, yakni 91,7% (di atas target nasional 77%).

Cakupan Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) diukur dengan menggunakan persentase Puskesmas yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG (Bacillus Calmette-Guérin), Vaksin DPT-HB-HIB (Difteri, Pertusis, Tetanus - Hepatitis B -Haemophilus Influenza tipe B), Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Target nasional adalah 90% puskesmas di Indonesia memiliki ketersediaan vaksin IDL, sementara pada tahun 2021 angka Papua Barat sebelum dibentuk DOB mencapai 81,9%.

Data per kabupaten mengenai ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas tersedia secara kualitatif pada Profil Dinas Kesehatan provinsi Papua Barat Tahun 2019. Berdasarkan laporan tersebut, dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang puskesmasnya tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial.

Telemedicine

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI, di antara strategi pembangunan kesehatan yakni penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satu fokusnya pada: Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi, perluasan cakupan dan

pengembangan jenis layanan telemedicine. Papua Barat belum mencatat capaian terkait jenis layanan ini.

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

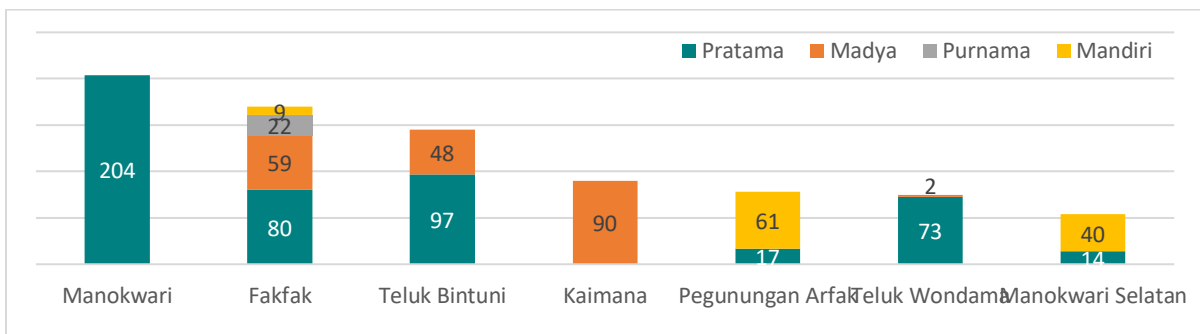
Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang diuraikan dalam dokumen ini yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Posbindu PTM (Pos pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular).

Posyandu

Jumlah posyandu di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebanyak 816 posyandu, yang terdiri dari 485 posyandu Pratama (59,4%), 199 Posyandu Madya (24,4%), 22 Posyandu Purnama (2,7%) dan 110 (13,5%) posyandu Mandiri. Posyandu Purnama dan Mandiri baru terdapat di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Fakfak, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan. Gambar II.62 menjabarkan jumlah serta strata posyandu di masing-masing kabupaten.

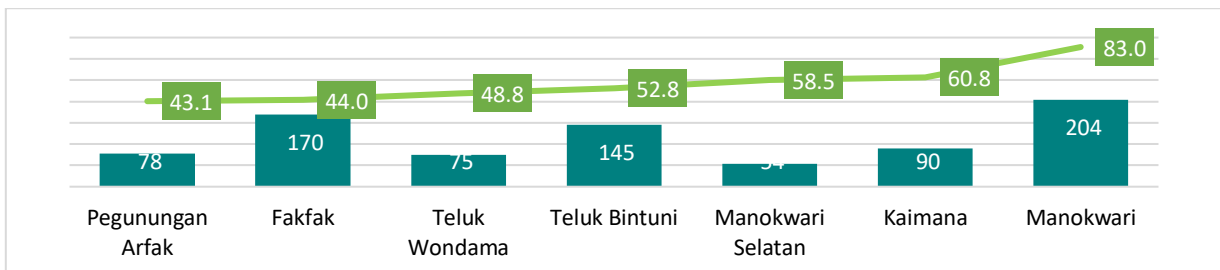
Jumlah keseluruhan posyandu di Provinsi Papua Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Data BPS Provinsi Papua Barat menunjukkan jumlah posyandu tidak berubah di tahun 2017 dan 2018, yakni sebanyak 776 unit, lalu menurun menjadi 684 di tahun 2019. Terdapat perbedaan data jumlah posyandu dibandingkan lapran Dinas Kesehatan, yang mungkin disebabkan adanya posyandu-posyandu di wilayah kerja puskesmas yang telah tercatat di dinas kesehatan namun tidak terdata oleh BPS. Data BPS Provinsi Papua Barat di tahun-tahun selanjutnya tidak menampilkan jumlah posyandu.

Gambar II.61 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Gambar II.62 Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: (1) Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 (2) Provinsi Papua Barat dalam Angka, BPS 2020 (diolah)

Untuk mengetahui rasio posyandu per jumlah balita, dalam pembahasan ini digunakan data jumlah posyandu yang tersedia hingga tingkat kabupaten yaitu data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2019. Dengan jumlah keseluruhan 816 posyandu, maka diketahui rasionya adalah 1 posyandu untuk 58,5 balita. (Jumlah penduduk usia 0-5 tahun di 7 kabupaten provinsi Papua Barat sebanyak 47.626 – BPS Provinsi Papua Barat 2021). Selanjutnya dengan menggunakan proyeksi jumlah balita seprovinsi Papua Barat untuk menentukan jumlah balita per kabupaten, maka dapat diketahui rasio posyandu per balita di masing-masing kabupaten sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.63. Berdasarkan Gambar II.63 nampak bahwa rasio posyandu terhadap jumlah balita di Kaimana dan Manokwari lebih rendah daripada angka provinsi, yakni berturut-turut 1:60,8 dan 1:83,0.

Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jumlah Posbindu PTM tahun 2019 di Provinsi Papua Barat sebanyak 87 unit. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak (31 Posbindu), sementara dari Kabupaten Kaimana dan Pegunungan Arfak tidak ada kegiatan Posbindu yang dilaporkan.

Tabel II.38 Jumlah Posbindu di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2019

No	Kabupaten	Jumlah Posbindu
1	Fakfak	31
2	Teluk Wondama	25
3	Manokwari	17
4	Teluk Bintuni	7
5	Manokwari Selatan	7
6	Kaimana	0
7	Pegunungan Arfak	0
Papua Barat		87

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

2.1.4.1.2.2 SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah pelaksana upaya pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan Kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan dikelompokkan menjadi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Tenaga Medis adalah dokter umum (selanjutnya disebut dokter), dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis. Sedangkan Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik,

tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Tabel II.39 Jumlah dan Sebaran SDM Kesehatan Berdasarkan Gender Per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023

No	Kabupaten	Tenaga Medis			Tenaga Kesehatan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Manokwari	67	109	176	303	1081	1384
2	Fakfak	15	44	59	272	811	1083
3	Teluk Bintuni	32	30	62	197	630	827
4	Teluk Wondama	24	19	43	111	384	495
5	Kaimana	25	26	51	172	477	649
6	Manokwari Selatan	10	19	29	86	250	336
7	Pegunungan Arfak	10	2	12	41	134	175
Jumlah		183	249	432	1182	3767	4949

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Berdasarkan pengelompokan itu, di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 terdapat 432 tenaga medis dan 4949 tenaga kesehatan, yang bertempat tugas terbanyak di Kabupaten Manokwari, sedangkan paling sedikit di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pada sisi jender, SDM Kesehatan perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, yakni 2,9 kali lebih banyak (lihat Tabel II.39).

Tenaga Medis

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyebutkan pada tahun 2023 tercatat 432 tenaga medis yang bekerja di Provinsi Papua Barat, terdiri dari 294 orang dokter, 47 dokter gigi dan 82 orang dokter spesialis, subspesialis dan dokter gigi spesialis. Angka ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 122 orang di tahun 2019 (data Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat) dan 381 orang di tahun 2021 (Data BPS Papua Barat). Di antara 432 tenaga medis itu, 64% di antaranya bekerja di Rumah Sakit. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah dan distribusi Tenaga Medis berdasarkan jenis tenaga per kabupaten tahun 2023.

Tabel II.40 Distribusi Tenaga Medis Berdasarkan Jenisnya per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023

No	Kabupaten	RS			Puskesmas			RS dan Puskesmas		
		dokter	dokter gigi	dokter spesialis*	dokter	dokter gigi	dokter spesialis*	dokter	dokter gigi	dokter spesialis*
1	Manokwari	81	16	35	27	8	0	108	24	35
2	Fakfak	22	1	11	21	4	0	43	5	11
3	Teluk Bintuni	14	1	14	31	2	0	45	3	14

No	Kabupaten	RS			Puskesmas			RS dan Puskesmas		
		dokter	dokter gigi	dokter spesialis*	dokter	dokter gigi	dokter spesialis*	dokter	dokter gigi	dokter spesialis*
4	Teluk Wondama	12	1	9	15	6	0	27	7	9
5	Kaimana	17	3	9	20	2	0	37	5	9
6	Manokwari Selatan	16	0	4	6	3	0	22	3	4
7	Pegunungan Arfak	0	0	0	12	0	0	12	0	0
Jumlah		162	22	82	132	25	0	294	47	82

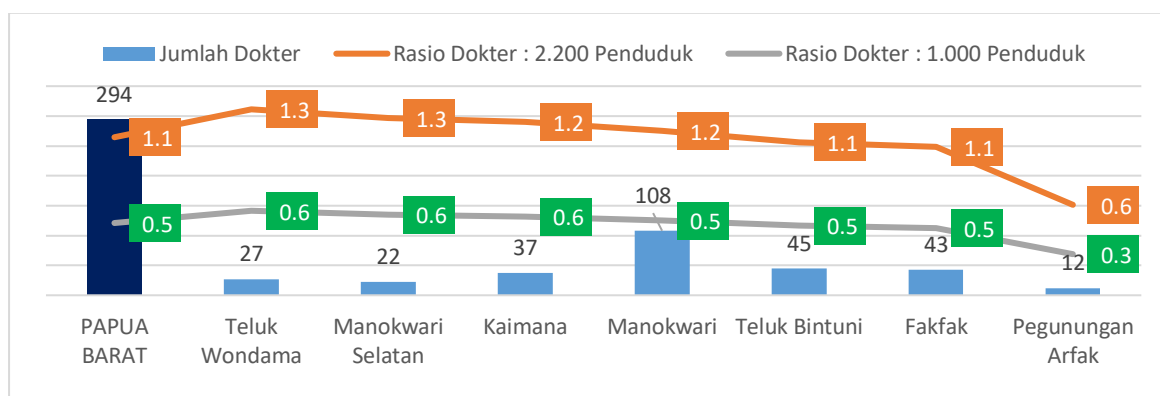
*mencakup dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspecialis

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Dokter

Persebaran dokter per kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.64. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Kabupaten Manokwari memiliki tenaga dokter paling banyak (108 orang) tetapi rasio terbaik antara dokter per satuan jumlah penduduk adalah di Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan.

Gambar II.63 Jumlah Dokter dan Rasio Tenaga Dokter Terhadap Satuan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023



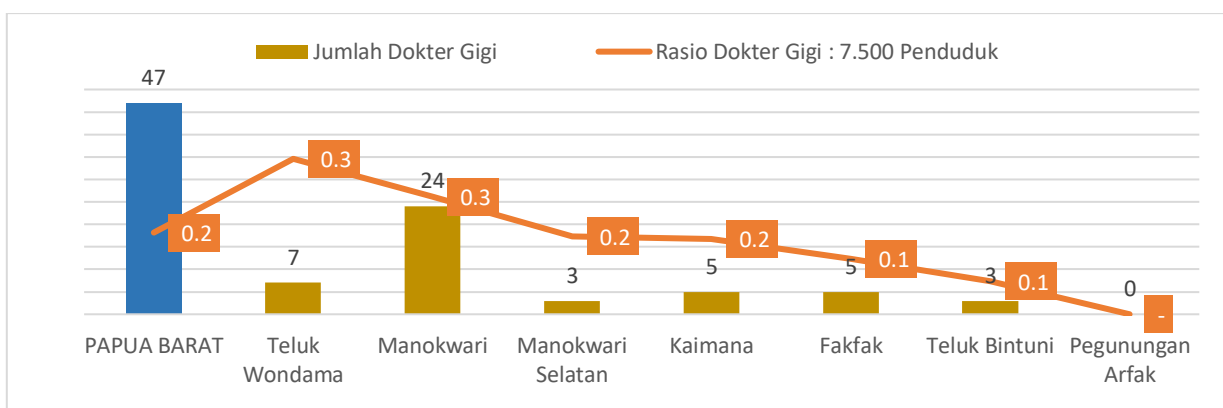
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Jika mengacu kepada standar yang direkomendasikan WHO, yakni rasio dokter : penduduk minimal 1 : 1000, maka Provinsi Papua Barat maupun semua kabupaten di Provinsi Papua Barat belum ada yang melampaui standar tersebut (rasio Provinsi Papua Barat 0,5 dokter :1000 penduduk). Sedangkan jika mengacu kepada standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yakni 1 dokter untuk 2200 penduduk, maka Provinsi Papua Barat, telah melampaui angka tersebut (1,1 dokter per 2200 penduduk), demikian pula angka kabupaten, kecuali Pegunungan Arfak (0,6 dokter : 2200 penduduk).

Dokter Gigi

Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah tenaga dokter gigi di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas, yakni 47 dokter gigi pada tahun 2023 (sebelumnya 20 dokter gigi di tahun 2019). Demikian pula rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Papua Barat masih di bawah standar nasional yakni 1 dokter gigi untuk 7.500 penduduk, dengan angka yang baru mencapai 0,2 dokter gigi : 7.500 penduduk. Sementara itu di Provinsi Papua Barat belum tercatat adanya dokter gigi spesialis yang bertugas. Distribusi dokter gigi per kabupaten ditampilkan dalam Gambar II.65.

Gambar II.64 Jumlah dan Rasio Dokter Gigi per Satuan Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Papua Barat, 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Dokter Spesialis

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2023, di Provinsi Papua Barat terdapat 80 dokter spesialis, 1 dokter subspesialis dan 1 dokter gigi spesialis. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah dokter spesialis dibandingkan tahun 2019, yakni 47 orang dokter spesialis, rasionya terhadap jumlah penduduk untuk tingkat provinsi sudah melampaui standar nasional yang ditetapkan sebesar 1 dokter spesialis : 16.000 penduduk, yakni 2,3. Dari tabel di bawah ini yang menampilkan jumlah dan rasio dokter spesialis per kabupaten, nampak bahwa jumlah dokter spesialis terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari (35 orang), namun rasio terbaik ada di Kabupaten Teluk Wondama (3,2 : 16.000 penduduk). Kecuali Pegunungan Arfak, 6 kabupaten lain di Provinsi Papua Barat telah memiliki dokter spesialis yang rasionya melampaui standar nasional.

Tabel II.41 Distribusi Tenaga Dokter Spesialis berdasarkan Gender dan Rasio Berbanding Satuan Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023

No	Kabupaten	Jumlah berdasarkan Gender		Jumlah Seluruhnya	Rasio per Satuan Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan		16.000 penduduk*	1.000 Penduduk
1	Manokwari	23	12	35	2.8	0.2
2	Fakfak	3	8	11	2.0	0.1
3	Teluk Bintuni	10	4	14	2.5	0.2
4	Teluk Wondama	6	3	9	3.2	0.2
5	Kaimana	8	1	9	2.2	0.1
6	Manokwari Selatan	4	0	4	1.7	0.1
7	Pegunungan Arfak	0	0	0	-	-

No	Kabupaten	Jumlah berdasarkan Jender		Jumlah Seluruhnya	Rasio per Satuan Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan		16.000 penduduk*	1.000 Penduduk
Jumlah		54	28	82	2.3	0.1

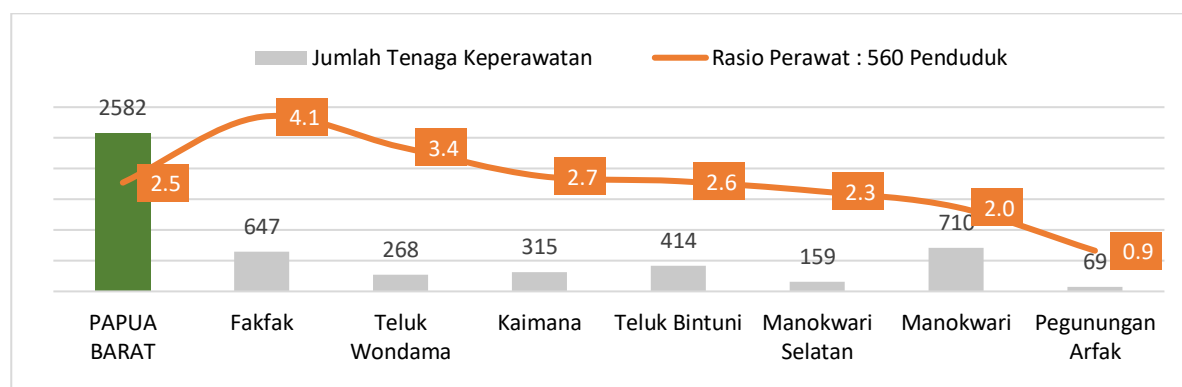
* Standar ratio berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Tenaga Keperawatan

Pada tahun 2023, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terdapat 2582 tenaga keperawatan, yang 56% (1441 orang) di antaranya bekerja di puskesmas-puskesmas. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan jumlah 1.542 orang (data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat), dan 2172 orang di tahun 2021 (data BPS Provinsi Papua Barat). Namun jumlah ini telah melampaui standar nasional jumlah perawat terhadap jumlah penduduk, yakni 1:560, bahkan Kabupaten Fakfak memiliki rasio perawat yang tinggi, yakni 4,1 per 560 penduduk. Distribusi tenaga perawat di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada Gambar II.66. Jumlah perawat terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari, tetapi rasionya terhadap jumlah penduduk yang terbaik ada di Kabupaten Fakfak. Semua kabupaten telah memenuhi standar jumlah perawat, kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak.

Gambar II.65 Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan terhadap Satuan Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023

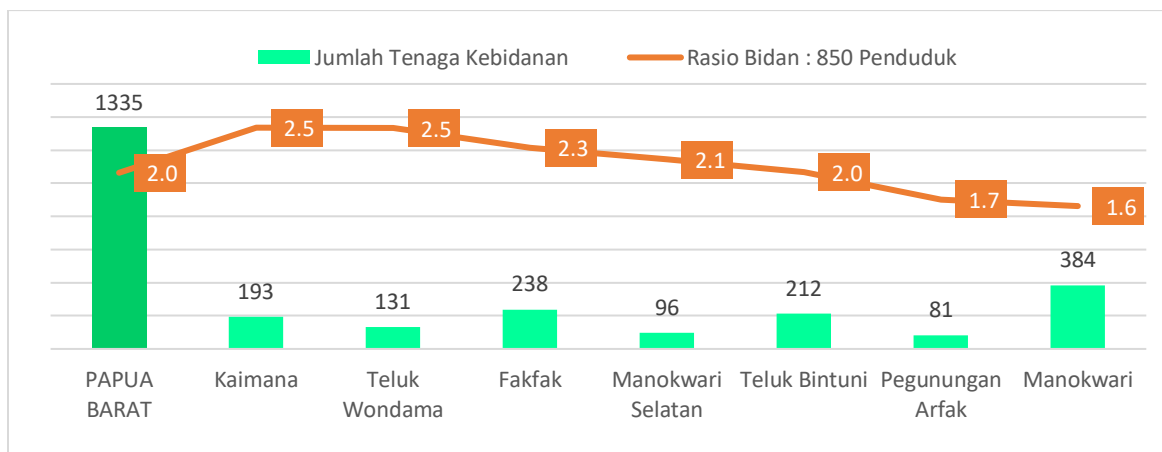


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Tenaga Kebidanan

Jumlah tenaga kebidanan yang tercatat bekerja di Provinsi Papua Barat tahun 2023 sejumlah 1335 orang, yang 71% (946 orang) di antaranya bekerja di psukesmas-puskesmas. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 (820 orang) dan tahun 2021 (145 orang). Dengan tenaga kebidanan sejumlah itu, maka Provinsi Papua Barat telah melampaui standar nasional (1: 850 penduduk), yakni 2,0 per 850 penduduk. Demikian pula di ke-7 kabupatennya, dengan rasio terbaik di Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama (masing-masing 2,5 per 850 penduduk), sebagaimana ditampilkan Gambar II.67.

Gambar II.66 Jumlah dan Rasio Tenaga Kebidanan terhadap Satuan Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

SDM Kesehatan Lainnya

Selain tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang diuraikan di atas, SDM Kesehatan lainnya mencakup psikolog klinis, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga teknik biomedika, tenaga keterampilan fisik, tenaga Kesehatan tradisional dan Tenaga Kesehatan lainnya. Distribusi tenaga kesehatan ini cukup merata di semua kabupaten, kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak, namun kecukupan jumlahnya belum memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan yang ada.

Tabel II.42 Jumlah dan Distribusi SDM Kesehatan Lainnya Berdasarkan Jenisnya per Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023

No	Kategori	Kabupaten							Jumlah
		Manokwari	Fakfak	Teluk Bintuni	Teluk Wondama	Kaimana	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak	
1	psikologi klinis	1	3	0	0	0	0	0	4
2	Farmasi	110	44	50	30	46	20	6	306
3	Gizi	31	32	28	19	17	10	1	138
4	Kesling	18	17	23	8	10	4	1	81
5	Kesmas	78	57	57	23	34	31	10	290
6	teknik biomedika	43	30	34	10	27	13	4	161
7	keteknisian medis	7	12	6	3	7	0	0	35
8	keterampilan fisik	0	1	0	1	0	0	0	2
9	kesehatan tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lainnya	2	2	3	2	0	3	3	15

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Juni 2024

Data SISDMK (Informasi SDM Kesehatan (kemkes.go.id) menunjukkan hingga Juli 2024 baru terdapat 9 puskesmas di Provinsi Papua Barat (11,25%) yang telah memiliki 9 jenis

tenaga kesehatan prioritas yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut.

Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Semua tenaga kesehatan yang bertugas di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak tergolong sebagai tenaga kesehatan Daerah Tertinggal. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 yang menetapkan 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat itu sebagai daerah tertinggal. Dalam Perpres dimaksud, digunakan kriteria penetapan suatu daerah sebagai Daerah Tertinggal antara lain berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagai sasaran utama pembangunan ini adalah salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

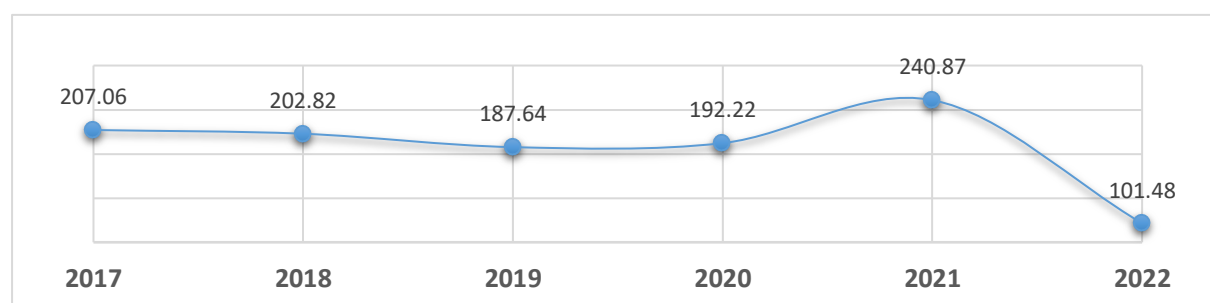
2.1.4.1.2.3 Kesehatan Keluarga

Angka Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Definisi kematian ibu dalam indikator ini adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan AKI yang jauh menurun pada tahun 2023, dibandingkan angka-angka dalam 5 tahun sebelumnya. AKI di Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, yang berarti lebih rendah dari angka nasional saat ini sebesar 306. Sangat mungkin terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan sehingga angka sesungguhnya diperkirakan lebih tinggi daripada angka yang dipaorkan oleh Dinas Kesehatan.

Gambar II.67 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat, 2017-2022

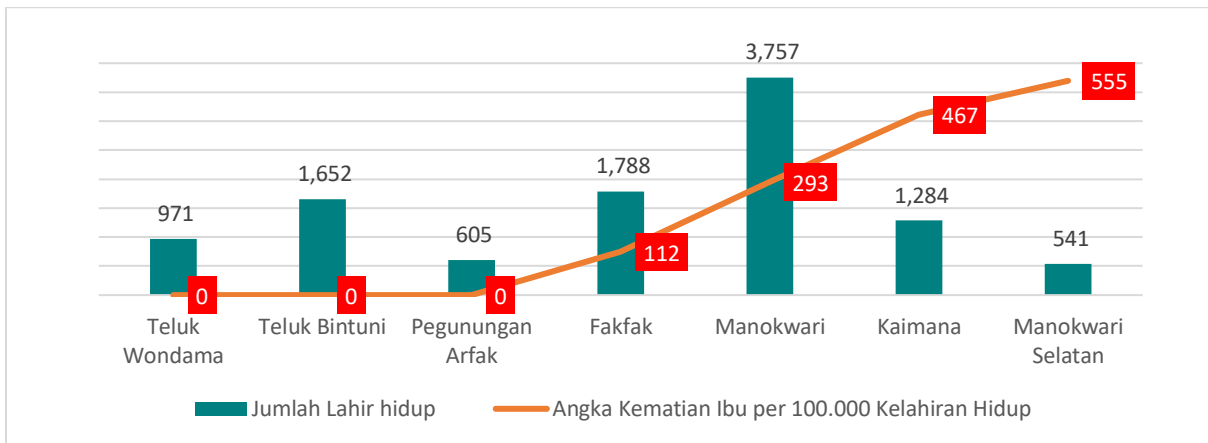


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2024

Sebaran angka kematian ibu per kabupaten, dapat diketahui menggunakan data tahun terakhir yang tersedia yaitu tahun 2019. Laporan Dinas Kesehatan menunjukkan terjadi 22 kematian ibu dari 10.598 kelahiran hidup, sehingga diperoleh AKI dari 7 kabupaten

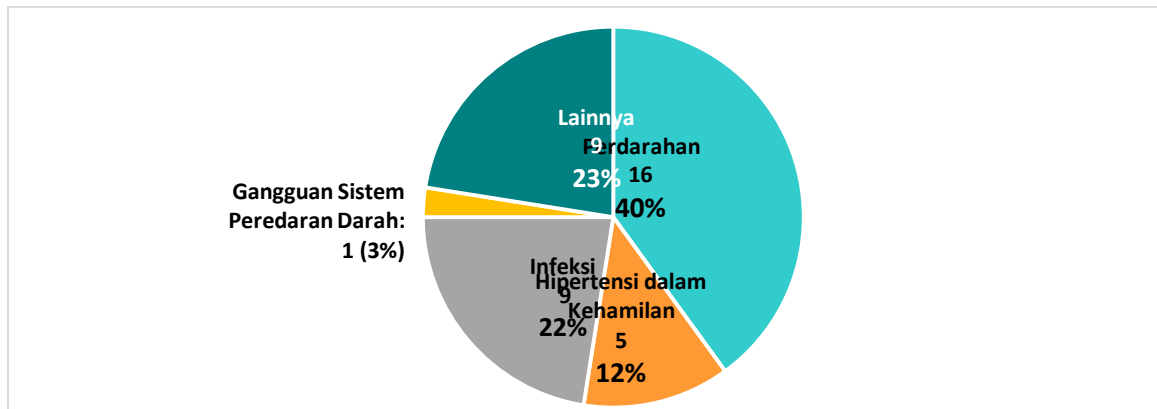
di Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar 208 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini juga sangat mungkin lebih kecil dari angka sesungguhnya mengingat ada kemungkinan kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Data ini menunjukkan terdapat 2 kabupaten yang AKInya di atas 300 per 100.000 kelahiran hidup, yaitu Kabupaten Kaimana dan Manokwari Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.69.

Gambar II.68 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Gambar II.69 Jumlah dan Persentase Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Mengenai Penyebab Kematian Ibu, tidak diperoleh data yang dapat dipilah untuk 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dari data sebelum pemekaran. Namun penyebab kematian ibu berdasarkan data sebelum dan sesudah pemekaran dapat diasumsikan masih sama, yakni yang terbanyak adalah perdarahan (40%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (22%), Hipertensi dalam kehamilan (12%), dan sebab lainnya yang jumlah dan proporsinya dapat dilihat pada Gambar II.70.

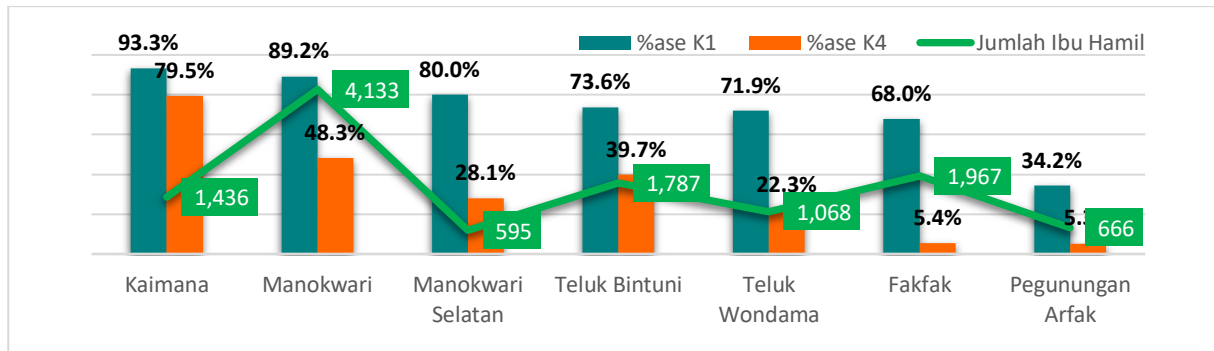
Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan

kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3.

Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019 menunjukkan cakupan K1 sebesar 78,5% dan K4 sebesar 37,7%. Cakupan K4 Provinsi Papua Barat ini jauh di bawah cakupan nasional pada tahun 2019 sebesar 88,5%. Jika dilihat per kabupaten, Kabupaten Manokwari memiliki jumlah ibu hamil paling banyak, namun cakupan K1 dan K4 tertinggi terdapat di Kabupaten Kaimana.

Gambar II.70 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019

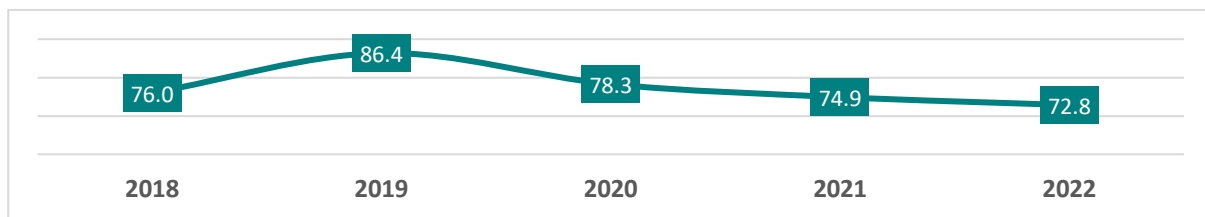


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi selain pada masa kehamilan adalah mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

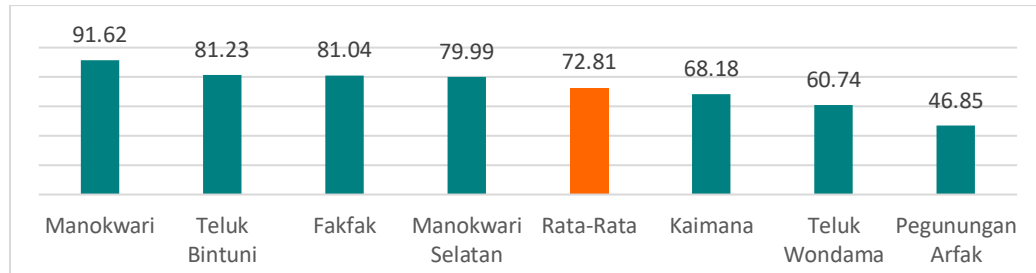
Gambar II.71 Rata-Rata Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua Barat, 2018- 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019 – 2023 (diolah)

BPS tidak menyediakan data mengenai pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, namun menampilkan data yang cukup lengkap mengenai persentase penolong persalinan. Terdapat kecenderungan penurunan rata-rata persentase pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan sejak 2019 hingga 2022 di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan cukup tinggi, bahkan pada tahun 2019 hampir mencapai target nasional sebesar 87%.

Gambar II.72 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022



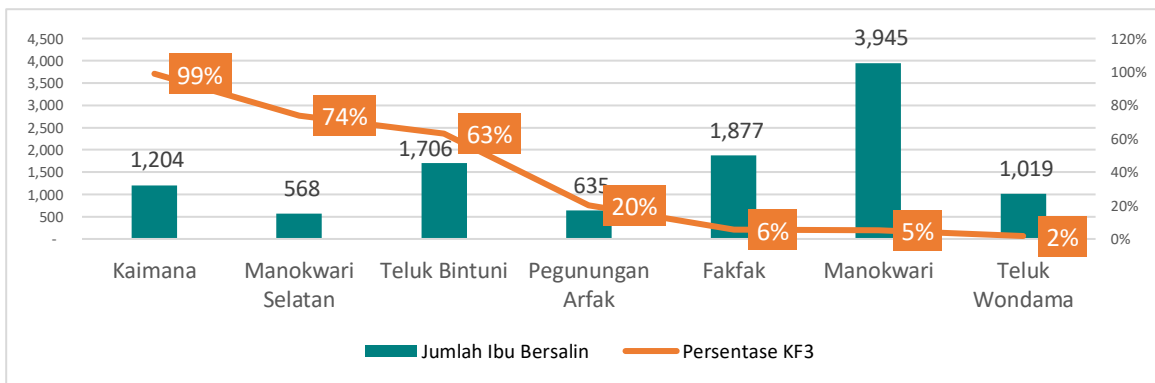
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 (diolah)

Distribusi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan per kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022 menunjukkan Kabupaten Manokwari telah melampaui target nasional dengan capaian 91.6%. Sementara 3 kabupaten: Kaimana, Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak berada di bawah rata-rata kabupaten dengan angka terendah di Pegunungan Arfak (46,95).

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Standar Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yang dianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tingkat provinsi, cakupan KF1, KF2 dan KF3 di 7 kabupaten se-Papua Barat tahun 2019 berturut-turut 56,3%, 53.3% dan 28,7%. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap secara nasional 88,3%.

Gambar II.73 Jumlah Ibu Bersalin dan Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Capaian kunjungan nifas menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat ditampilkan pada Gambar II.74. Berdasarkan data dari Dinkes tersebut nampak bahwa Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni Sorong Selatan mencapai cakupan Kunjungan Nifas Lengkap di atas 60%. Sedangkan cakupan di bawah 10% terdapat di Kabupaten Fakfak, Manokwari dan Teluk Wondama.

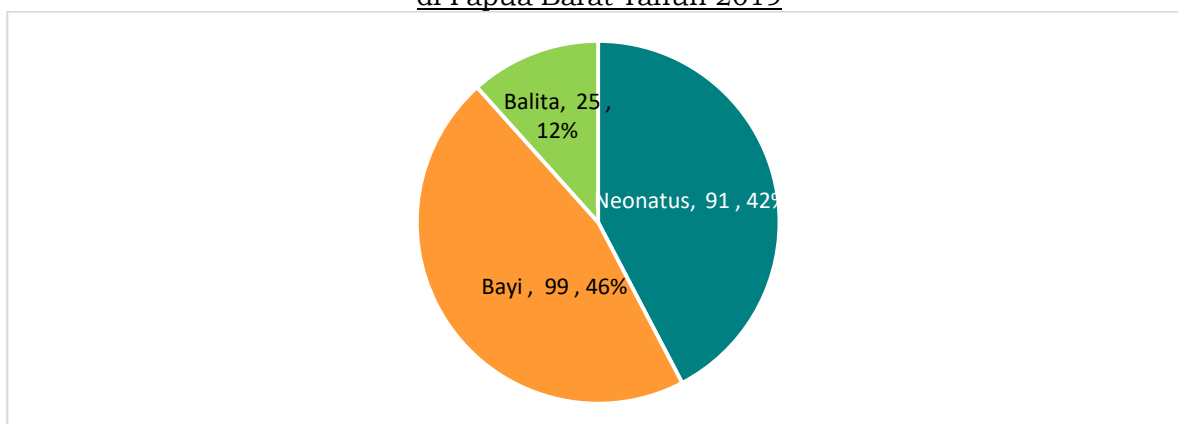
Angka Kematian Anak

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2019 diketahui bahwa jumlah seluruh kematian anak di 7 Kabupaten berjumlah 215 kasus, terdiri dari 91 neonatus (0-28 hari), 99 bayi (29 hari – 11 bulan) dan 25 balita (12 – 59 bulan). Dengan angka-angka ini maka angka kematian anak di Provinsi Papua Barat adalah 19,6 per 1000 persalinan (jumlah ibu bersalin 10.954 orang). Proporsi kematian pada 3 kelompok umur anak ditampilkan pada Gambar II.75.

Jika dipilah berdasarkan kabupaten, kematian anak terbanyak pada tahun 2019 dilaporkan di Kabupaten Manokwari dengan 69 kematian (lihat Gambar II.76). Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan melaporkan sangat sedikit kasus kematian anak. Kemungkinan di daerah-daerah sulit ini pelaporan kasus kematian dari kampung ke tingkat administrasi pemerintahan yang lebih atas belum berjalan dengan baik.

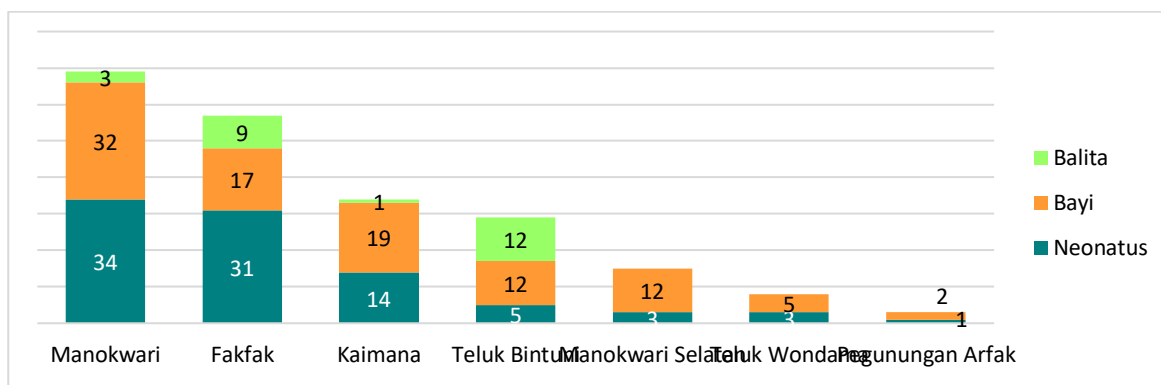
Angka Kematian Bayi seperti dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2017-2022, dan menunjukkan angka 10,34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Angka ini juga diduga tidak mewakili kondisi yang sesungguhnya mempertimbangkan keterbatasan pencatatan dan pelaporan yang disebutkan di atas. Diketahui bahwa angka kematian bayi secara nasional pada tahun 2022 adalah 16,9 per 1.000 kelahiran hidup. Gambar II.77 menunjukkan perkembangan angka kematian bayi tersebut.

Gambar II.74 Jumlah Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Papua Barat Tahun 2019



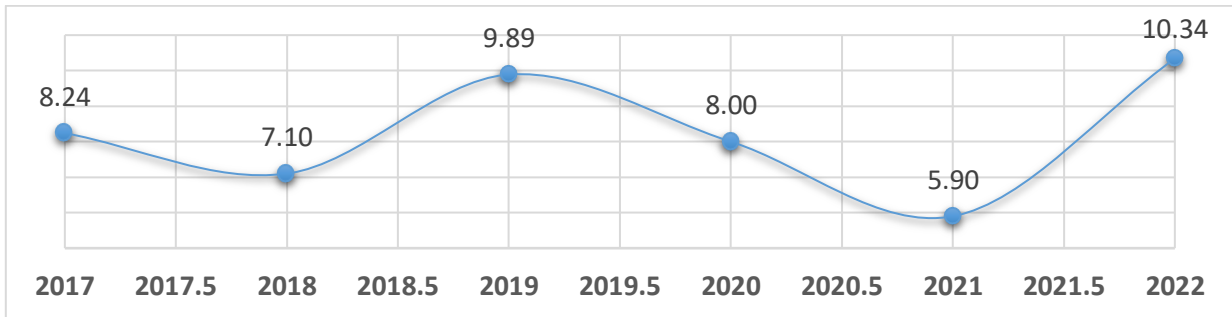
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Gambar II.75 Jumlah Kematian Anak di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Gambar II.76 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua Barat, 2017-2022



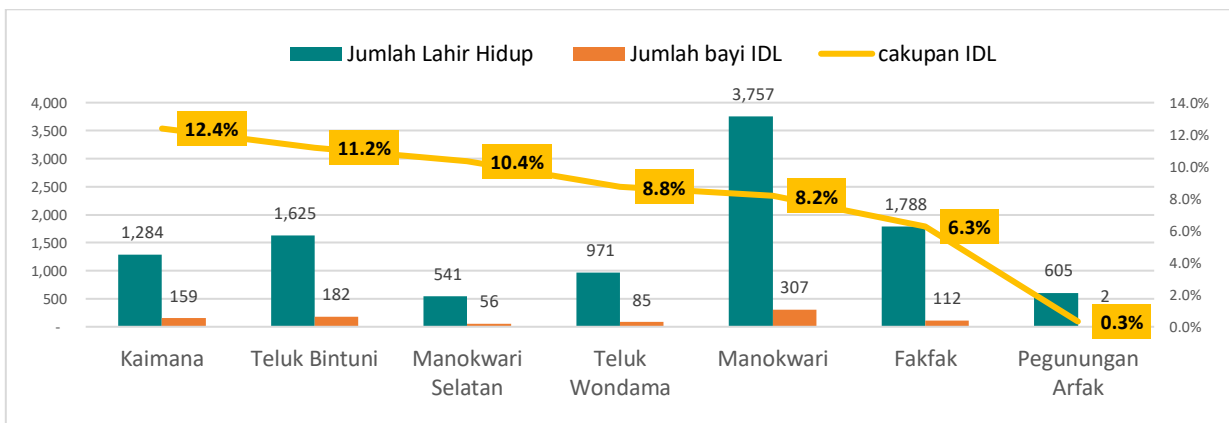
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2024

Penyebab kematian neonatal pada tahun 2019 terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, tetanus neonatorum, dan lainnya. Pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan, penyebab kematian terbanyak adalah diare, disusul oleh pneumonia, malaria dan lainnya. Demikian juga pada kelompok anak balita (12-59 bulan) penyebab kematian terbanyak adalah diare dan pneumonia.

Desa/ Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2019, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar 8,5%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%. Berdasarkan Gambar II.78 dapat diketahui bahwa separuh dari kabupaten di Papua Barat memiliki cakupan IDL sama atau lebih tinggi daripada angka provinsi, yakni Kaimana, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Manokwari.

Gambar II.77 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2019

Tabel II.43 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018

Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan UCI	Jumlah Seluruh Kampung/ Kelurahan	Persentase Kampung/ Kelurahan UCI
Fakfak	133	137	97%
Manokwari Selatan	53	58	91%
Teluk Wondama	35	40	88%
Teluk Bintuni	34	40	85%
Kaimana	70	83	84%
Manokwari	158	189	84%
Pegunungan Arfak	0	40	0%
Papua Barat	483	587	82%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018

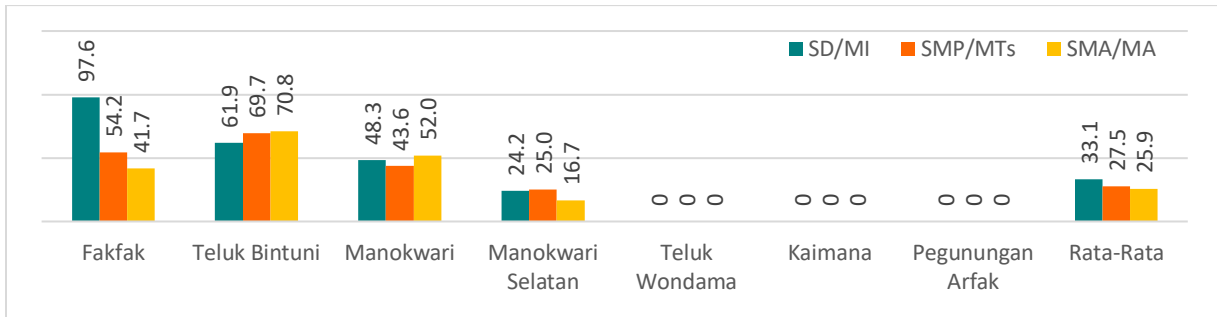
Mengenai *Universal Child Immunization* (UCI), menurut Profil Kesehatan Indonesia 2020, di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat belum ada laporan mengenai kampung/ kelurahan yang mencapai UCI, yakni kampung/ kelurahan dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Secara nasional, capaian desa/ kelurahan UCI adalah 59,2%. Dalam Profil Kesehatan Papua Barat 2019, terdapat ketidaklengkapan data, dengan hanya 1 kabupaten yang melaporkan capaian Desa/Kelurahan UCI. yakni Kabupaten Kaimana; 64% kampung/kelurahan UCI.

Data Dinas Kesehatan tahun 2018 menunjukkan angka yang lebih baik. Dari 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, 6 di antaranya (86%) melaporkan cakupan Kampung/ Kelurahan UCI di atas 80%. Dengan demikian jika dihitung dalam lingkup provinsi, yakni dengan menggunakan indikator Kabupaten yang 80% desa/kelurahannya mencapai UCI, didapatkan bahwa 86% kabupaten di Provinsi Papua Barat telah mencapai UCI. Angka ini telah melebihi target nasional yakni 78% pada tahun 2020. Namun disayangkan tidak ada data yang memadai untuk tahun 2019 dan selanjutnya. Selain itu jika dibandingkan dengan capaian persentase IDL pada bayi yang baru mencapai 8,5% pada tahun 2019, angka UCI ini perlu ditinjau kembali. Tabel II.43 menunjukkan data tahun 2018 mengenai Kampung/Kelurahan UCI.

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Gambar II.78 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah di Papua Barat, 2018



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018

Tidak terdapat laporan yang lengkap mengenai cakupan sekolah di Provinsi Papua Barat yang mendapat pelayanan kesehatan peserta didik dalam periode tahun 2018-2022. Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2018 diketahui bahwa pelayanan kesehatan sekolah dilakukan rata-rata dari 7 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat mencakup 33,1% untuk tingkat SD/MI, 27,5% tingkat SMP/MTs dan 25,9% tingkat SMA/ MA. Cakupan pelayanan untuk tingkat SD/MI tertinggi di Kabupaten Fakfak, sedangkan untuk tingkat SLTP dan SLTA tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni. Gambar II.79 menampilkan cakupan pelayanan kesehatan sekolah di masing-masing kabupaten pada tahun 2018. Sementara di tahun 2019 hanya 1 kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan ini. Secara nasional, cakupan pelayanan sekolah pada tahun 2020 mencakup 84,7% untuk tingkat SD/MI, 81,9% tingkat SMP/MTs dan 79,1% tingkat SMA/ MA.

2.1.4.1.2.4 Gizi

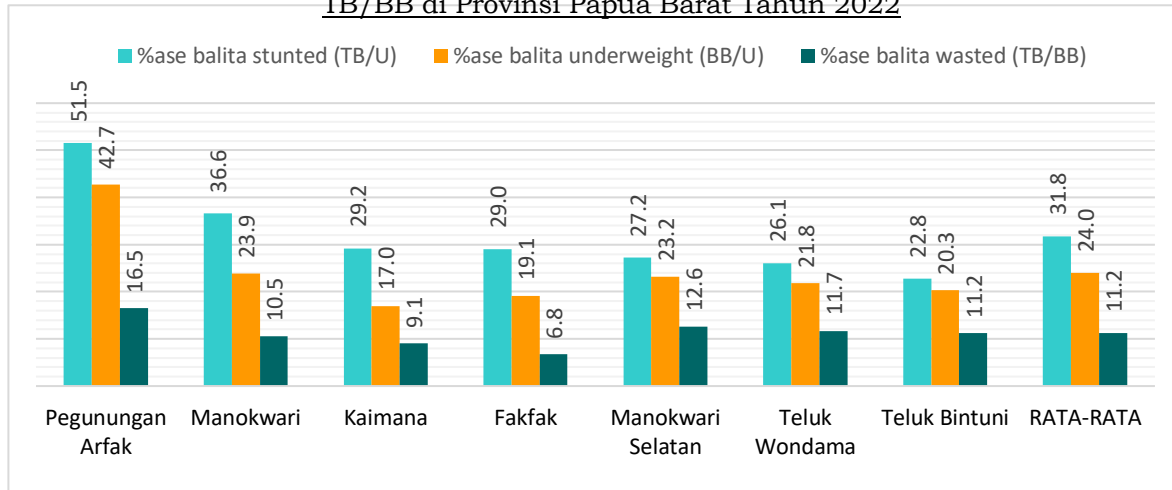
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, menetapkan bahwa status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB). Pengukuran status gizi ini didasarkan atas standar World Health Organization tahun 2005. Indeks yang banyak digunakan di fasilitas kesehatan saat ini adalah BB/U untuk menilai gizi buruk atau gizi kurang dan indeks TB/U untuk menilai kondisi anak stunting.

Data mengenai kondisi gizi anak di 7 kabupaten Provinsi Papua Barat yang dapat dijadikan acuan adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018, Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tahun 2021 dan 2022. Perbandingan kondisi gizi dari tahun ke tahun berdasarkan ke-3 survey ini menunjukkan bahwa kondisi gizi balita di Provinsi Papua Barat tidak membaik dalam 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan angka rata-rata kabupaten baik untuk balita dengan berat badan kurang maupun tinggi badan kurang. Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), yang disebut *underweight* di kabupaten-kabupaten di Papua Barat rata-rata 24,0% (Studi Status Gizi Indonesia/ SSGI 2022) Angka ini lebih tinggi dari pada angka nasional, yakni 17,1%, dan mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata tahun 2021 berdasarkan survey yang sama yakni 20,5%. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki proporsi balita kekurangan gizi sangat

tinggi berdasarkan indeks ini (42,7%), sedangkan proporsi terendah terdapat di Kaimana (17,0%).

Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak stunted (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan SSGI didapatkan angka rata-rata kabupaten sebesar 31,8%. Angka rata-rata kabupaten ini meningkat dibandingkan angka tahun 2021 yakni sebesar 29,8% dan masih jauh di atas angka nasional sebesar 21,6%. Angka Stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 51,6%.

Gambar II.79 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita menurut Indeks TB/U, BB/U dan TB/BB di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Dengan indeks TB/BB, dari hasil studi yang sama tahun 2022 diperoleh angka balita kurus (wasted) rata-rata dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat sebanyak 11,2%. Angka ini juga lebih tinggi dari pada angka nasional yakni 7,7% dan lebih tinggi dibanding rata-rata di tahun 2021 (11,8%). menunjukkan prevelensi kekurangan gizi pada balita di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022 berdasarkan ke-3 indeks pengukuran antropometri.

Selain masalah gizi pada balita, kekurangan gizi pada Wanita Usia Reproduksi terutama ibu hamil, juga mempengaruhi status kesehatan anak yang akan dilahirkannya. Kekurangan gizi pada kelompok ini disebut Kurang Energi Kronis (KEK). Secara rata-rata dari 7 kabupaten di Papua Barat, Ibu Hamil mengalami KEK berdasarkan hasil Riskesdas 2018 sebanyak 28,02%, dan pada Perempuan Tidak Hamil sebanyak 20,87%. Proporsi Ibu Hamil KEK yang sangat tinggi berdasarkan riset ini terdapat di Teluk Wondama (54,04%) dan Pegunungan Arfak (53,23%).

Pemantauan Pertumbuhan

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan setiap balita mendapatkan penimbangan minimal 8 kali setahun dan pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun. Pada Riskesdas 2018 Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran memiliki proporsi balita yang minimal 1 kali dalam 12 bulan terakhir melakukan penimbangan berat badan sebanyak 58,70% untuk balita laki-laki dan 61,16% balita perempuan, atau untuk keseluruhan balita sebesar 59,93%. Sedangkan pengukuran

panjang/ tinggi badan dilakukan pada 29,37% laki-laki dan 30,22% perempuan (seluruhnya 29,8%). Tidak tersedia data terpilah kabupaten mengenai cakupan pelayanan ini. Namun kondisi pasca pembentukan DOB untuk 7 kabupaen di wilayah Provinsi Papua Barat dapat diasumsikan tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelum pemekaran.

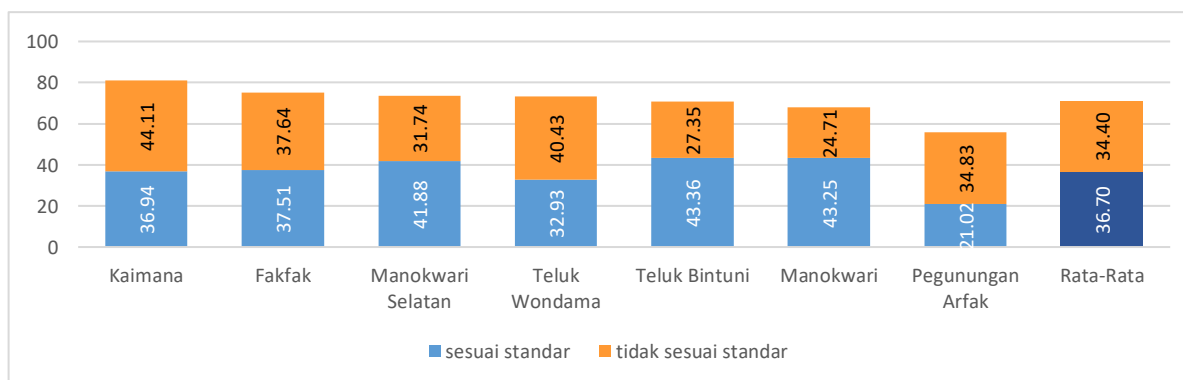
Pemberian Makanan Tambahan Balita

Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita adalah suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dengan formulasi khusus dan dilengkapi dengan vitamin dan mineral, baik untuk pemulihan atau pemenuhan status gizi. Dalam Riskesdas 2018, didapatkan proporsi anak umur 6-59 bulan di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran yang memperoleh PMT sebesar 28,83% anak laki-laki dan 28,02% anak perempuan (rata-rata 28,43%). Pemberian makanan yang dihitung dalam Riskesdas ini merujuk pada seluruh makanan tambahan yang diberikan ketika posyandu (PMT penyuluhan); makanan tambahan khusus diberikan untuk balita kurus yang diberikan selama 90 hari makan (PMT pemulihan). Tidak tersedia data terpilah kabupaten mengenai cakupan PMT pada balita, naum dapat siasumsikan bahwa cakupan PMT di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat setelah pemekaran terwakili oleh kondisi di 13 kabupaten sebelum pembentukan DOB.

Pemberian Kapsul Vitamin A

Berdasarkan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6-11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU. Hasil Riskesdas Provinsi Papua Barat Tahun 2018 mendapatkan pemberian Vitamin A pada anak usia 6-59 bulan rata-rata dari 7 kabupaten mencapai 71,10%, namun sebagian di antaranya (34,40%) tidak sesuai standar. Gambar II.81 menunjukkan distribusi cakupan pemberian kapsul Vitamin A menurut Kabupaten.

Gambar II.80 Persentase Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018

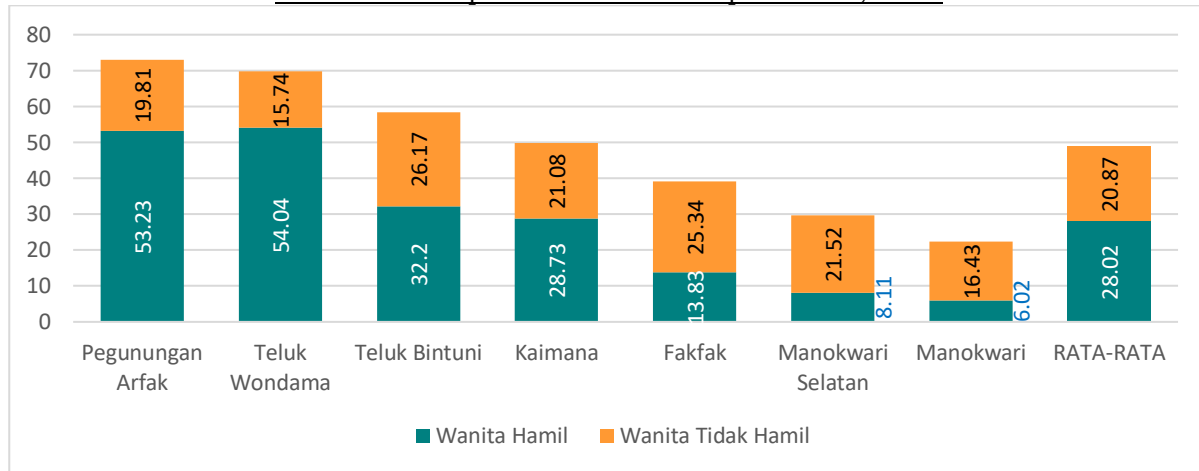


Sumber: Riset Kesehatan Dasar Provinsi Papua Barat 2018

Gambar II.81 menunjukkan bahwa cakupan distribusi Kapsul Vitamin A secara keseluruhan (sesuai standar atau tidak sesuai standar) tidak berbeda terlalu jauh antar

kabupaten. Sedangkan pemberian kapsul Vitamin A sesuai standar tertinggi di Kabupaten Bintuni dan Manokwari, yaitu masing-masing 43,36% dan 43,25%.

Gambar II.81 Persentase KEK pada Wanita Hamil dan Wanita Tidak Hamil Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2018



Sumber: Riset Kesehatan Dasar Provinsi Papua Barat 2018

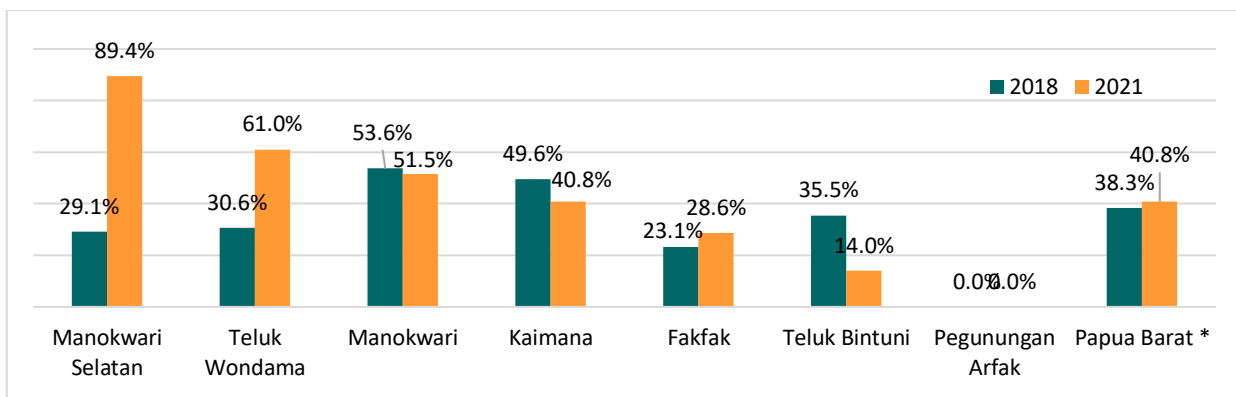
Selain masalah gizi pada balita, kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Reproduksi, terutama ibu hamil di Provinsi Papua Barat juga berada pada kondisi yang membutuhkan perhatian. Pada tingkat Provinsi, hasil Riskesdas 2018 mendapatkan angka 23,21% Ibu Hamil mengalami KEK, dan 20,83% Perempuan Tidak Hamil KEK. Sedangkan jika dipilah per Kabupaten, terdapat proporsi Ibu Hamil KEK yang sangat tinggi Di Teluk Wondama (54,04%) dan Pegunungan Arfak (53,23%) (lihat Gambar II.82).

2.1.4.1.2.5 Pengendalian Penyakit

Penyakit Menular

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada 2019 dan Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di dunia setelah India. Keberhasilan penanganan tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (Treatment Coverage, TC). Pada tahun 2020 belum ada provinsi di Indonesia yang mencapai angka TC \geq 80%, dengan rata-rata nasional baru mencapai 41,7%. TC Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, baru mencapai 22,1%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate, TSR) secara nasional baru mencapai 82,7%, masih di bawah target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%. Dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa capaian angka keberhasilan pengobatan Tbc Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran sebesar 60,1%.

Gambar II.82 Persentase TC Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2018, 2022

Tabel II.44 Perbandingan Persentase TSR Tuberkulosis di Papua Barat, 2018 dan 2021

Kabupaten	TSR Per Tahun		Peningkatan TSR
	2018	2021	
Manokwari	38.4%	74.8%	94.8%
Kaimana	29.9%	76.7%	156.5%
Teluk Bintuni	10.8%	58.3%	439.8%
Teluk Wondama	1.2%	59.6%	4866.7%
Manokwari Selatan	1.4%	30.2%	2057.1%
Fakfak	19.2%	78.3%	307.8%
Pegunungan Arfak	0.0%	0.0%	-
Rata-Rata	27.1%	54.0%	99.3%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat 2023

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018 dapat ditarik angka capaian TC dan TSR untuk wilayah Provinsi Papua Barat pasca-pemekaran. Dengan menggunakan estimasi insidens kasus per kabupaten 6,6 per 1000 penduduk (Laporan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2021 – Kemenkes RI 2022), diperoleh angka TC pada 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar 38,3% dan angka TSR sebesar 27,1%.

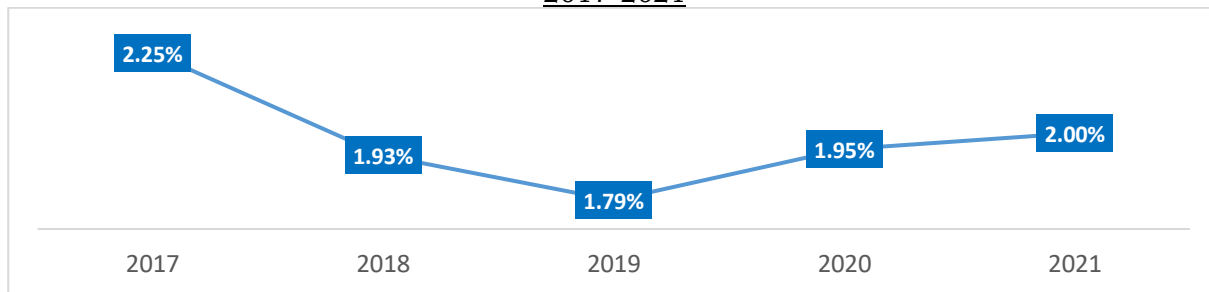
Upaya penanggulangan Tb di Papua Barat menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2021, dalam lingkup provinsi terjadi kenaikan TC menjadi 40,8% (menggunakan angka rata-rata kabupaten dari data BPS 2023). Peningkatan cakupan terjadi pada 3 kabupaten, yakni Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Fakfak. Tabel II.44 menunjukkan TC per kabupaten tahun 2021. Demikian pula TSR pada tahun 2021 meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2018 (dengan catatan angka tahun 2021 menggunakan angka rata-rata kabupaten).

HIV-AIDS

Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi. Secara nasional jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sejak tahun 1987, kasus pertama yang diakui pemerintah, sampai dengan Triwulan I 2021, jumlah kumulatif kasus HIV di Indonesia mencapai 427.201 orang, dengan kematian sebanyak 61.912 orang. Sebelum pembentukan DOB, Provinsi Papua Barat menduduki urutan ke 15 dari 34 provinsi dengan jumlah kasus kumulatif 6.139 orang (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021).

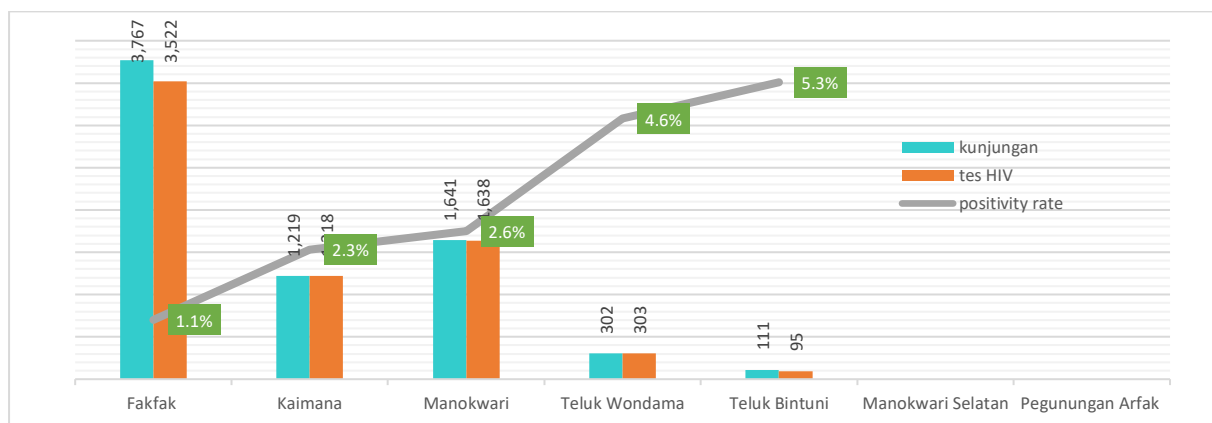
Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan selama tahun 2021 di wilayah Provinsi sebelum pemekaran ditemukan 364 kasus HIV baru. Jumlah orang yang dites dalam periode 1 tahun ini sebanyak 18.217 orang, sehingga positivity rate-nya mencapai 2,00% (LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2021). Perkembangan positivity rate HIV dalam 5 tahun terakhir ditampilkan dalam Gambar II.84. Dibandingkan tahun 2017, positivity rate tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,25%. Namun pada angka pada tahun 2021 ini lebih tinggi daripada tahun 2018 hingga 2020.

Gambar II.83 Perkembangan Positivity Rate HIV di Papua Barat (Pra-Pemekaran), 2017-2021



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

Gambar II.84 Jumlah Kunjungan Klien dan Positivity Rate HIV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021

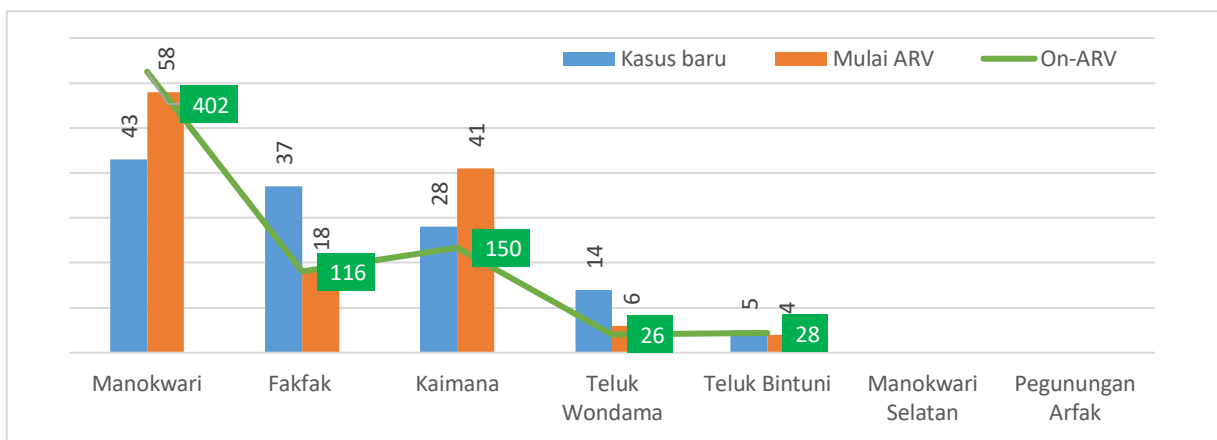


Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

Gambar II.85 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan dan tes HIV selama tahun 2021 terbanyak dilakukan di Kabupaten Fakfak (3767 kunjungan dengan 3522 orang dites), sementara positivity rate tertinggi terdapat di Teluk Bintuni (5,3%). Dua kabupaten; Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, tidak melaporkan adanya kunjungan dan tes HIV

selama tahun 2021. Terdapat 127 kasus baru di 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2021, dan juga terhitung 127 orang (100%) memulai pengobatan dengan ARV. Melihat kesamaan angka ini, nampaknya jumlah orang yang memulai pengobatan ini termasuk ODHA yang terdaftar dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah ODHA yang sedang dalam terapi ARV (on ARV) hingga tahun 2021 berjumlah 722 orang, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.86.

Gambar II.85 Jumlah Kasus Baru, Mulai ARV dan On-ARV Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2021

ODHA yang sedang dalam pengobatan ARV terbanyak terdapat di kota- Kabupaten Manokwari (402 orang), demikian pula jumlah kasus yang baru memulai ARV (58 orang), diikuti oleh Kabupaten Kaimana (41 orang). Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak hingga tahun 2021 belum melaporkan adanya kasus HIV. Mengenai tingkat pengetahuan penduduk terkait HIV, hasil Riskesdas 2018 menemukan bahwa pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat (sebelum pemekaran), 75,18% pernah mendengar tentang HIV.

Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 34,8% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran menunjukkan cakupan yang cukup baik (45,7%), sebagai urutan ke-3 secara nasional setelah DKI Jakarta (53,0%) dan Banten (46,0%). Pada tahun 2020 secara nasional dan provinsi target penemuan sebesar 80% belum tercapai.

Diare

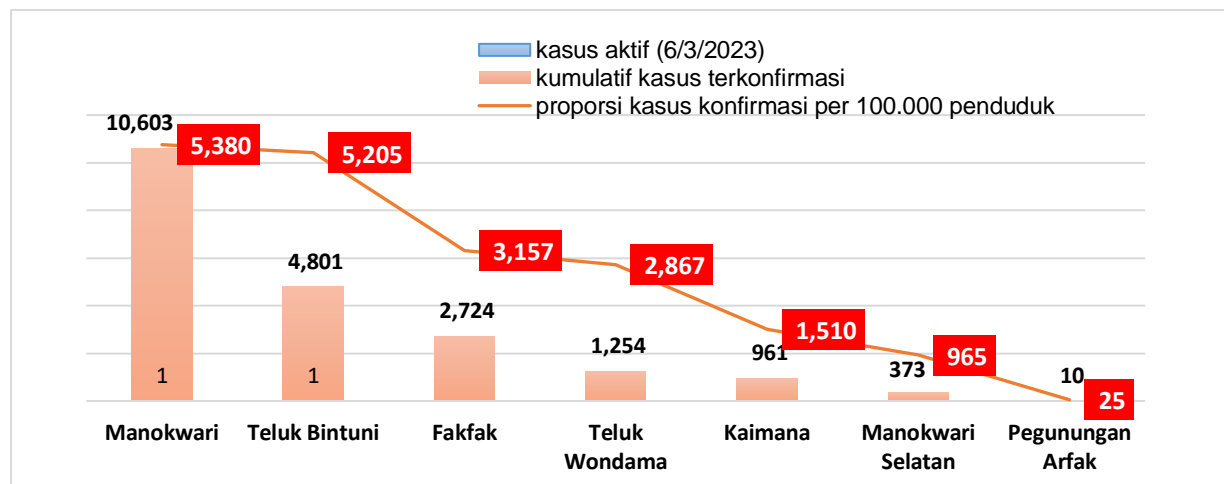
Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan

ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Secara nasional, pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang ditetapkan. Sedangkan capaian provinsi Papua Barat sebelum pemekaran sebanyak 1755 anak atau sebesar 10,2% dari sasaran yang berjumlah 17.160 anak. Capaian ini ke-3 terendah di antara 34 provinsi di Indonesia, setelah Provinsi Sulawesi Utara (4,0%) dan Bali (10,0%).

Covid-19

Hingga awal 2023, WHO melaporkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah merenggut 6,9 juta jiwa. Sementara di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi Covid-19 mencapai 29.726 orang, dengan kematian tercatat 218 jiwa. Jumlah ini menghasilkan angka kematian kasus (Case Fatality Rate, CFR) Covid-19 di Papua Barat sebesar 1,1%, lebih rendah daripada angka nasional yakni 2,4% dan hampir tinggi dibandingkan dengan angka global (0,9%).

Gambar II.86 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Aktif dan Proporsi Kasus Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Februari 2023



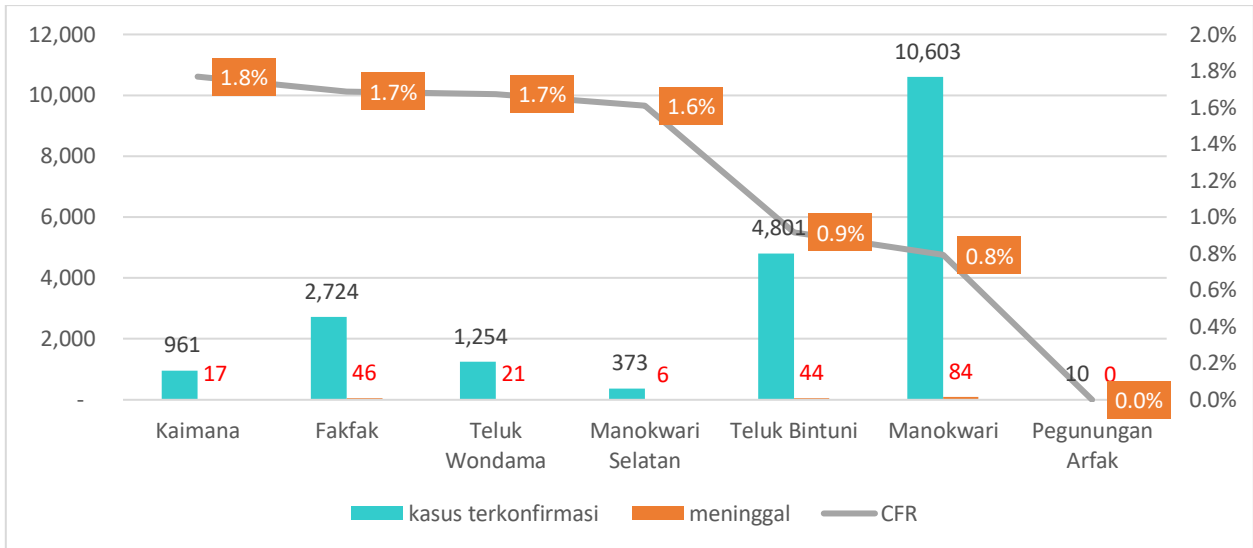
Sumber: dinkes.papuabaratprov.go.id

Di antara 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat, hingga awal Maret 2023 kasus kumulatif terbanyak dilaporkan di Kabupaten Manokwari (10.603). Sementara untuk kasus aktif yang masih dalam perawatan atau isolasi pada akhir Februari 2023 sudah sangat sedikit, yakni 2 orang masing-masing 1 orang di Manokwari dan Teluk Bintuni.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Manokwari juga menduduki peringkat tertinggi dengan proporsi kasus 5,380 per 100.000 penduduk, disusul Teluk Bintuni dengan proporsi 5.205 per 100.000 penduduk. Kabupaten pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan adalah wilayah yang paling sedikit melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19, yakni berturut-turut 10 dan 373 kasus.

Kabupaten yang melaporkan kematian karena Covid-19 terbanyak hingga akhir Februari 2022 adalah juga Kabupaten Manokwari (10.014 kematian). Namun jika dihitung CFR-nya, maka angka tertinggi diperoleh di Kabupaten Kaimana (1,8). Gambar II.88 menunjukkan sebaran tersebut per kabupaten.

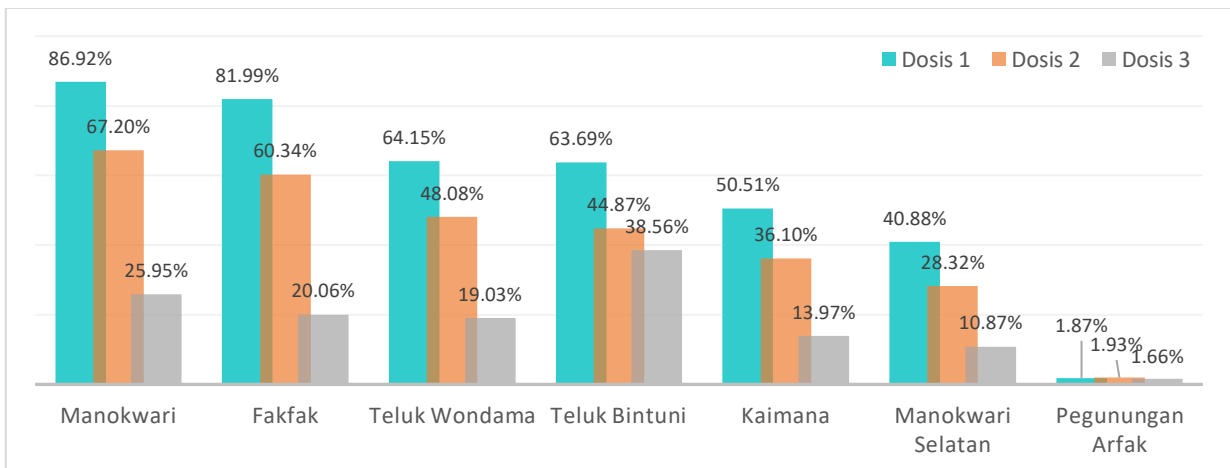
Gambar II.87 Jumlah Kumulatif Kasus, Kasus Meninggal dan CFR Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Papua Barat sampai dengan Februari 2022



Sumber: dinkes.papuabarprov.go.id

Respon yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggapi pandemi ini antara lain upaya pencegahan penularan secara individu, pembatasan penyebaran penyakit melalui asesmen berkala dan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelacakan kasus, penanganan kasus, serta pemberian vaksinasi secara masif.

Gambar II.88 Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat sampai dengan Februari 2023



Sumber: covid19papuabar.org

Hingga 28 Februari 2023, Papua Barat telah mencapai cakupan vaksinasi sebesar 66,7% dosis pertama, 49,8% dosis kedua dan 22,3% dosis ketiga/ booster pertama. Secara nasional hingga awal Maret 2023 telah tercapai 74,5% vaksinasi dosis kedua, lebih tinggi daripada cakupan global yang mencatat angka 65,1%.

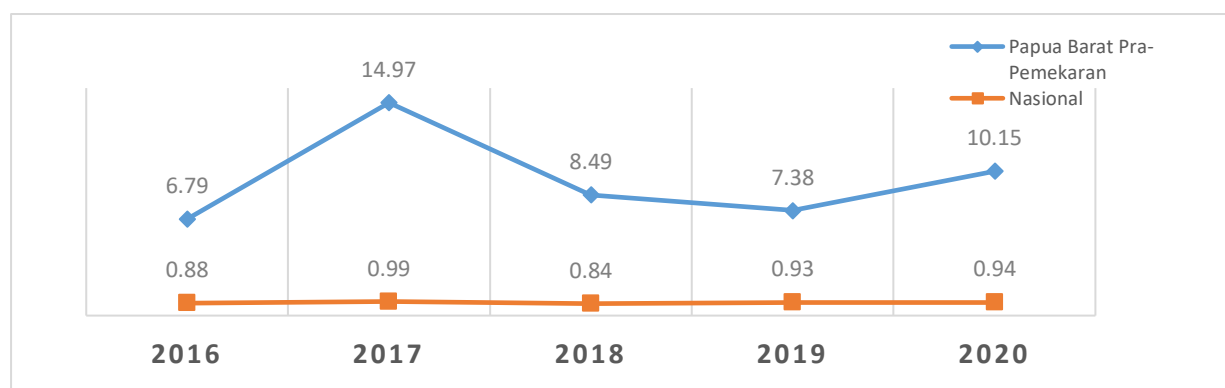
Gambar II.89 menunjukkan bahwa kabupaten Manokwari dan Fakfak merupakan 3 kabupaten tertinggi cakupan dosis pertamanya dengan telah mencapai vaksinasi dosis pertama di atas 70%, namun untuk dosis kedua belum ada kabupaten/ kota yang melampaui angka 70%. Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki cakupan vaksinasi yang terendah di antara semua kabupaten di Papua Barat.

Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional, target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

Pada tahun 2020, baru 3 provinsi di Indonesia yang seluruh kabupatennya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Papua Barat merupakan 1 dari 3 provinsi di Indonesia bagian timur yang belum memiliki kabupaten yang berstatus eliminasi malaria, bersama Provinsi Maluku dan Papua. Namun ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria.

Gambar II.89 Perkembangan *Annual Paracite Incidence (API)* per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat, 2016 - 2020



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020

Angka Kesakitan Malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence (API)* per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk di wilayah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir API nasional di bawah 1 per 1.000 penduduk, termasuk pada tahun 2020 yang sebesar 0,94%. Angka API di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi sejak 2016, namun belum mencapai di bawah 5/ 1000 penduduk. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan angka API Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran tahun 2020 sebesar 10,15/1000 penduduk, yang menunjukkan kenaikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan API menjadi 5.53/ 1000 penduduk. Tabel II.45 menunjukkan perkembangan API Papua Barat dibandingkan dengan angka nasional dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel II.45 Perkembangan *Annual Paracite Incidence (API)* per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 - 2021

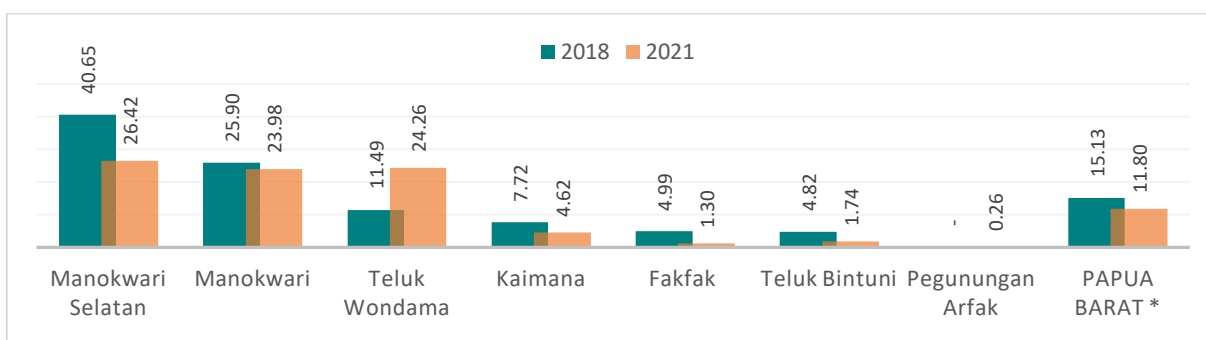
Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Manokwari Selatan	40.65	22.97	15.00	26.42
Manokwari	25.90	18.61	49.30	23.98
Teluk Wondama	11.49	6.06	15.60	24.26
Kaimana	7.72	2.66	2.80	4.62
Fakfak	4.99	2.29	1.50	1.30

Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Teluk Bintuni	4.82	1.09	1.60	1.74
Pegunungan Arfak	-	-	0.20	0.26
Rata-rata Kabupaten	15.13	9.48	12.29	11.80

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018, 2019 dan BPS Provinsi Papua Barat 2022, 2023

Perbandingan API per kabupaten pasca pembentukan DOB dapat dihitung dengan mengacu pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat (2018 dan 2019) serta publikasi BPS – Provinsi Papua Barat dalam Angka (2022, 2023), meskipun terdapat perbedaan angka dibandingkan dengan angka yang dipublikasikan oleh Kemenkes RI. API per kabupaten tersebut ditampilkan dalam Gambar II.91.

Gambar II.90 Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2018 dan 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2018 dan BPS Provinsi Papua Barat 2021

Secara umum API di Provinsi Papua Barat telah mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Meskipun angka provinsi tidak dapat dibandingkan karena angka tahun 2020 dan 2021 menggunakan angka rata-rata kabupaten. Namun data ini dapat menilai perkembangan per kabupaten. Gambar II.91 menunjukkan perbedaan API per kabupaten antara tahun 2018 dan 2021. Berdasarkan Gambar II.91 diketahui bahwa penurunan API terjadi pada hampir semua kabupaten, kecuali Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak.

Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan 70% penyebab kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, namun lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, jumlah kasus baru PTM yang dilaporkan secara keseluruhan pada tingkat provinsi sebelum pemekaran pada tahun 2019 adalah 167.778 kasus. Penyakit Diabetes Mellitus masih menempati proporsi terbesar, yaitu sebesar 40,26 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Hipertensi sebesar 5,69 persen. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Papua Barat.

Capaian upaya Pengendalian PTM diukur dengan jumlah kabupaten yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular oleh setidaknya 80% puskesmas. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Sampai tahun 2020, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas berjumlah 70 kabupaten/kota dari 103 yang ditargetkan, atau hanya 13,62% dari seluruh kabupaten/kota. Di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran, belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas (Profil Kesehatan Indonesia 2021).

2.1.4.1.2.6 Kesehatan Lingkungan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya yang dilakukan adalah mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan KTR, atau baru 54,3% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Papua Barat sendiri penerapan KTR ini belum berjalan dengan baik, meskipun telah ditetapkan Pergub tentang KTR di tahun 2015.

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan terutama penyakit yang diakibatkan oleh pangan atau Food Borne Diseases. Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar secara nasional pada tahun 2020 adalah 43,5%, yang telah melewati target Renstra 2020 sebesar 38%. Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran menunjukkan capaian yang baik, yakni sebanyak 393 TPP telah memenuhi standar atau 42,8% dari seluruh TPP yang terdaftar. Tidak tersedia data terpilah kabupaten mengenai cakupan pelayanan di bidang ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kabupaten/Kota Sehat

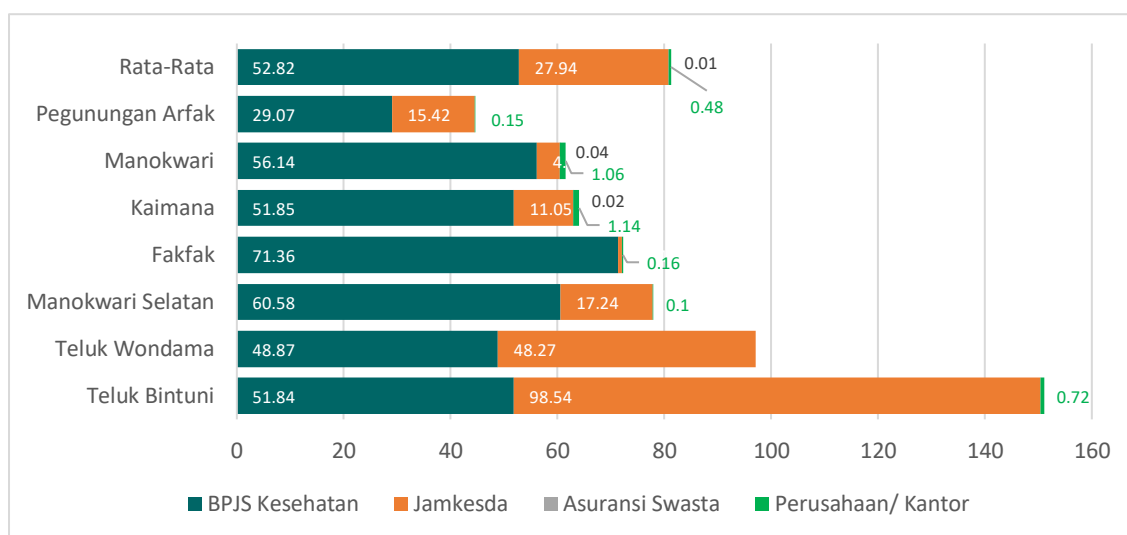
Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS. Sedangkan sebanyak 22 Provinsi hingga tahun 2020 belum menyelenggarakan KKS, termasuk Provinsi Papua Barat.

2.1.4.1.2.7 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN dielenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang membagi kepesertaan JKN menjadi 2 kelompok, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari oleh pemerintah. (2) Bukan PBI jaminan kesehatan, yang terdiri dari Pekerja maupun Non Pekerja beserta keluarganya.

Gambar II.91 Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2022

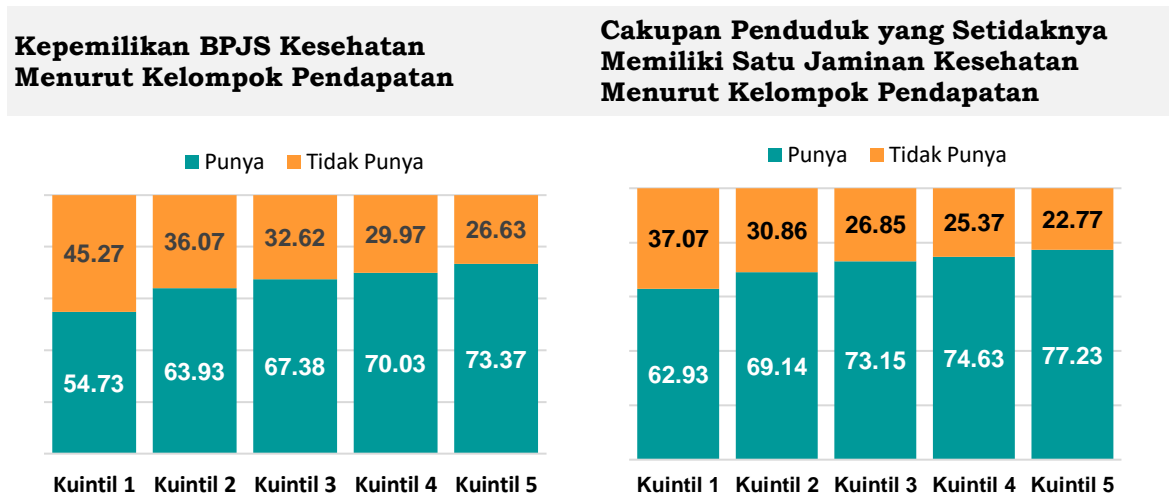


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Pada tahun 2020 sebanyak 82,0% (222.406.808 jiwa) penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional . Provinsi Papua Barat merupakan 1 dari 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC). Tiga provinsi lainnya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di Papua Barat jumlah peserta JKN PBI adalah 612.636 jiwa, dengan total keseluruhan peserta JKN sebanyak 1.135.204 jiwa. Dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebelum pembentukan DOB sejumlah 981.822 jiwa, maka cakupan peserta JKN tingkat provinsi mencapai 115,62%.

Namun data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa cakupan penerima Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Barat di wilayah kabupaten pasca pemekaran hanya 81,24% (angka rata-rata dari 7 kabupaten). Demikian pula untuk seluruh provinsi lama, cakupan keseluruhannya adalah 76,21%. Jaminan kesehatan ini mencakup BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta maupun perusahaan/kantor. Gambar II.99 menampilkan cakupan penerima Jaminan Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan Gambar II.99 diketahui bahwa cakupan penduduk yang menjadi peserta Jamkesda di Kabupaten Teluk Bintuni hampir 100%. Di Teluk Wondama, cakupan peserta BPJS Kesehatan ditambah Jamkesda mencapai hampir 100%.

Gambar II.92 Cakupan Kepemilikan BPJS Kesehatan serta Cakupan Penduduk yang Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Kesehatan Menurut Kelompok Pendapatan di Provinsi Papua Barat, 2022



Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

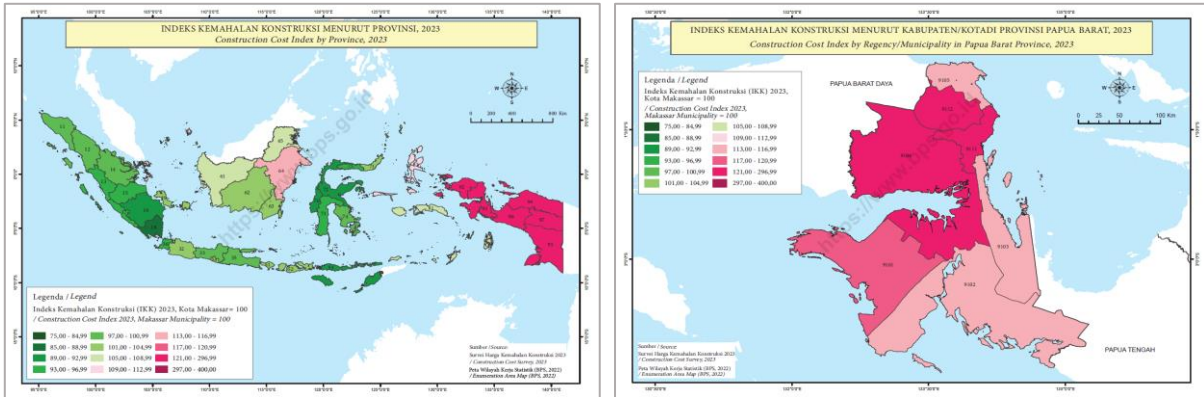
Gambar II.93 menunjukkan cakupan kepemilikan BPJS Kesehatan serta cakupan penduduk yang setidaknya memiliki satu jaminan kesehatan menurut kelompok pendapatan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Susenas (2022) dalam SEPAKAT. Berdasarkan Gambar II.93 diketahui bahwa rata-rata kepemilikan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat sebesar 65,89%. Masih ada 45,27% penduduk 20% termiskin yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan Kesehatan karena rendahnya kondisi sosial-ekonominya. Namun, di luar BPJS Kesehatan, rata-rata penduduk di Prov Papua Barat yang setidaknya memiliki satu jaminan kesehatan sebanyak 71,41%. Masih ada 37,07% penduduk 20% termiskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dalam hal ini, terdapat asumsi bahwa 8,2% penduduk dari 20% termiskin memiliki jaminan kesehatan lainnya selain BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka perluasan jaminan kesehatan secara meluas diperlukan agar tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan.

2.1.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.1.3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan ukuran untuk menggambarkan perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga kota acuan. Komoditas konstruksi meliputi gedung tempat tinggal; gedung non tempat tinggal; dan jaringan jalan, irigasi, dan sistem. Semakin tinggi nilai indeks IKK dapat diartikan semakin sulit/mahal pembangunan konstruksi untuk dilakukan di daerah tersebut. IKK memberikan nilai 100 pada Kota Makassar sebagai kota acuan.

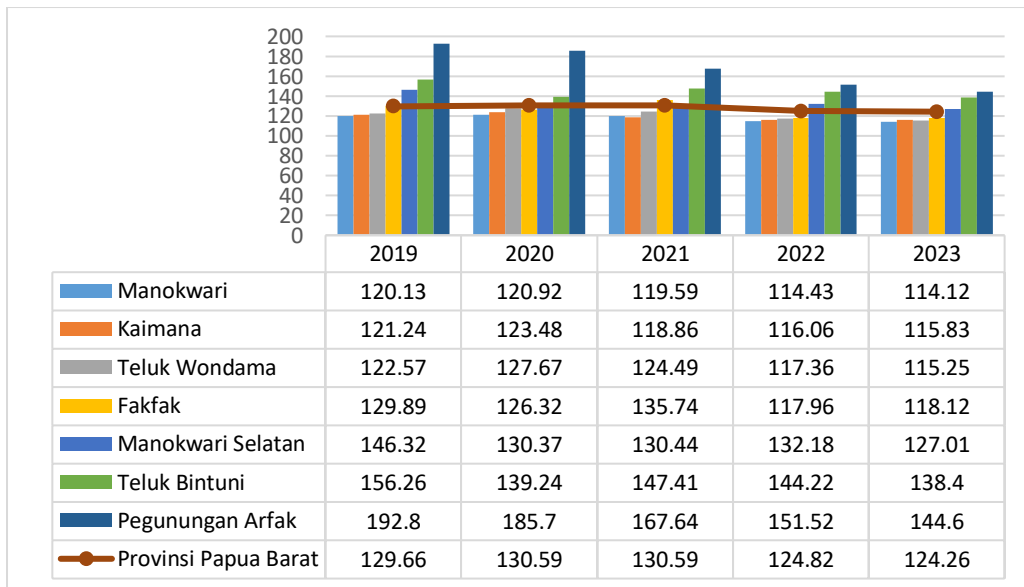
Gambar II.93 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Provinsi dan Kabupaten, 2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam “Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2023”

Secara umum Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018-2023 telah mengalami penurunan IKK signifikan. Pada tahun 2018, IKK Provinsi Papua Barat sebesar 132,67 dan mengalami penurunan menjadi 124,26 pada tahun 2023. Berdasarkan tinjauan secara kabupaten, IKK tertinggi berada di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan skor 124,26 pada tahun 2023. Meskipun begitu skor tersebut cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2018 hingga 2022. Skor IKK yang cenderung tinggi di Pegunungan Arfak diartikan bahwa harga barang atau jasa konstruksi di kabupaten ini menjadi yang paling mahal secara provinsi. Sebaliknya, Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan skor IKK terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 114,12 yang artinya rata-rata harga barang atau jasa konstruksi merupakan yang paling murah secara provinsi.

Gambar II.94 IKK Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam “Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2023”

2.1.4.1.3.2 Jalan

Jaringan jalan di Provinsi Papua Barat ditinjau berdasarkan panjang jalan dan tingkat kewenangan pemerintah seperti ditunjukkan pada table berikut. Diketahui bahwa, panjang jalan negara di Provinsi Papua Barat bertambah pada tahun 2023 menjadi 1.335 km. Panjang jalan Provinsi mengalami pengurangan dikarenakan telah terbentuk DOB Papua Barat Daya

sehingga dari 2.310 km pada tahun 2019 menjadi 1.327 km pada tahun 2023 dengan angka sementara. Panjang jalan kabupaten pun di Provinsi Papua Barat juga mengalami pengurangan dari 8.800 km pada tahun 2019 menjadi 4.871 km pada tahun 2023 dengan angka sementara. Sehingga total panjang jalan di Provinsi Papua Barat 7.533 km hingga tahun 2023, dengan rincian 1.335 km jalan negara, 1.327 km jalan provinsi dan 4.871 km jalan kabupaten.

Tabel II.46 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah (km)

Tahun	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan Provinsi	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km)	Jumlah Panjang Jalan (km)
2018	1.326	2.310	8.893	12.529
2019	1.326	2.310	8.800	12.436
2020	1.326	2.310	8.886	12.522
2021	1.326	2.310	9.379	13.015
2022	1.335	2.310	9.382x	13.027x
2023	1.335	1.327	4.871*	7.533*

Sumber: BPS RI, 2023 (x : Angka Sementara)

Pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah. Pergerakan penduduk dan jumlah kendaraan di Provinsi Papua Barat yang semakin meningkat membuat kebutuhan terkait ketersediaan prasarana dan sarana transportasi juga semakin meningkat. Panjang jalan merupakan total dari jalan negara dan jalan provinsi yang ada di Provinsi Papua Barat. Tabel II.47 menyajikan data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Nilai rasio menurun pada periode 2017 yaitu dari 0,10 menjadi 0,01 pada tahun 2019 dan mengalami stagnansi hingga tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan. Namun, nilai rasio ini masih bisa dikatakan masih rendah, sehingga belum dapat memicu kepadatan jalan oleh kendaraan yang ekstrem di daerah.

Tabel II.47 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Papua Barat 2017-2022

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan (km)	3591,48	3591,48	3590,14	3590,14	3590,14	3644,92
Jumlah Kendaraan (unit)	35455	48886	320505	338231	359652	380471
Rasio	0,10	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka, 2019-2023 (Data diolah)

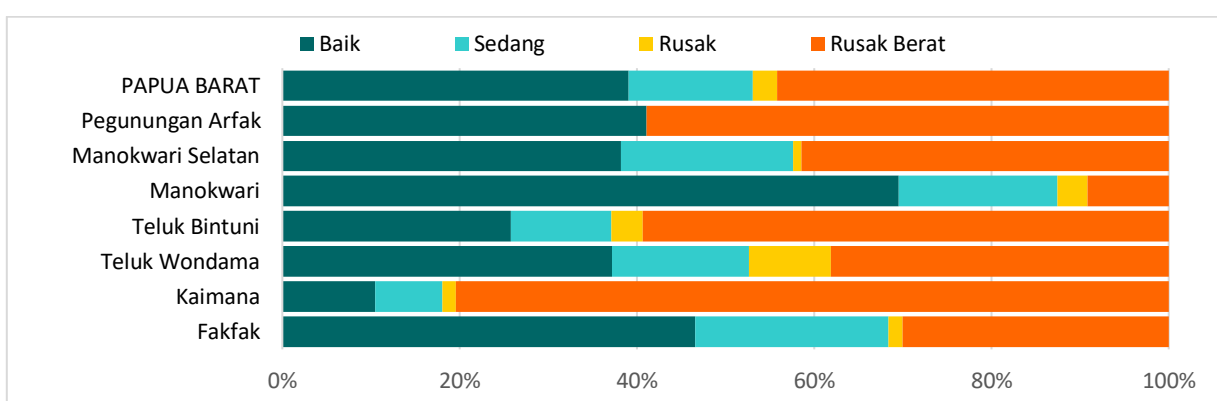
Tabel II.48 Panjang Jalan di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan Tahun 2023

Kabupaten	Kondisi Jalan (km)							
	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	km	%	km	%	km	%	km	%
Fakfak	212,91	46,57	99,86	21,84	7,02	1,54	137,35	30,05
Kaimana	36,47	10,46	26,50	7,60	5,41	1,55	280,37	80,39
Teluk Wondama	73,79	37,21	30,63	15,45	18,34	9,25	75,54	38,09

Kabupaten	Kondisi Jalan (km)							
	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	km	%	km	%	km	%	km	%
Teluk Bintuni	123,70	25,79	54,45	11,35	16,67	3,48	284,76	59,38
Manokwari	295,72	69,52	76,19	17,91	14,35	3,37	39,10	9,19
Manokwari Selatan	78,18	38,17	39,77	19,42	1,98	0,97	84,88	41,44
Pegunungan Arfak	90,91	41,09	0	0,00	0	0,00	130,33	58,91
PAPUA BARAT	911,68	39,04	327,4	14,02	63,77	2,73	1032,33	44,21

Sumber: BPS Papua Barat, 2024

Gambar II.95 Panjang Jalan di Provinsi Papua Barat Menurut Kondisi Jalan Tahun 2023



Sumber: BPS Papua Barat, 2024 (data diolah)

Tabel II.47 dan Gambar II.96 menunjukkan panjang jalan di provinsi papua barat menurut kondisi jalan pada tahun 2023. Berdasarkan Tabel II.51 dapat diketahui bahwa 44,21% jalan di Papua Barat dalam kondisi rusak berat, 39% dalam kondisi baik, 13,02% dalam kondisi sedang, dan 2,73% dalam kondisi rusak. Dalam Gambar II.96 dapat diketahui bahwa kabupaten dengan jalan rusak berat terbanyak terdapat di Kaimana (280,37 km), dan Kabupaten Teluk Bintuni (284,76 km).

2.1.4.1.3.3 Sanitasi Layak

Sanitasi menjadi salah satu unsur untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam salah satu poin SDGs terkait air bersih dan sanitasi yang layak. Sanitasi yang dikelola secara aman dapat terlihat dari persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi aman termasuk adanya fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Sanitasi memiliki akses aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Sistem sanitasi mencakup pengolahan air limbah dan irigasi menjadi perlu dimaksimalkan dalam pelayanan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Limbah manusia seperti urine dan feses dan limbah-limbah rumah tangga dapat menjadi sumber masalah kesehatan bila tidak diolah dalam sistem yang baik.

Berdasarkan Tabel II.49 diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat terus meningkat pada tahun 2018-2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama merupakan kabupaten yang memerlukan perhatian prioritas dalam perbaikan sanitasi.

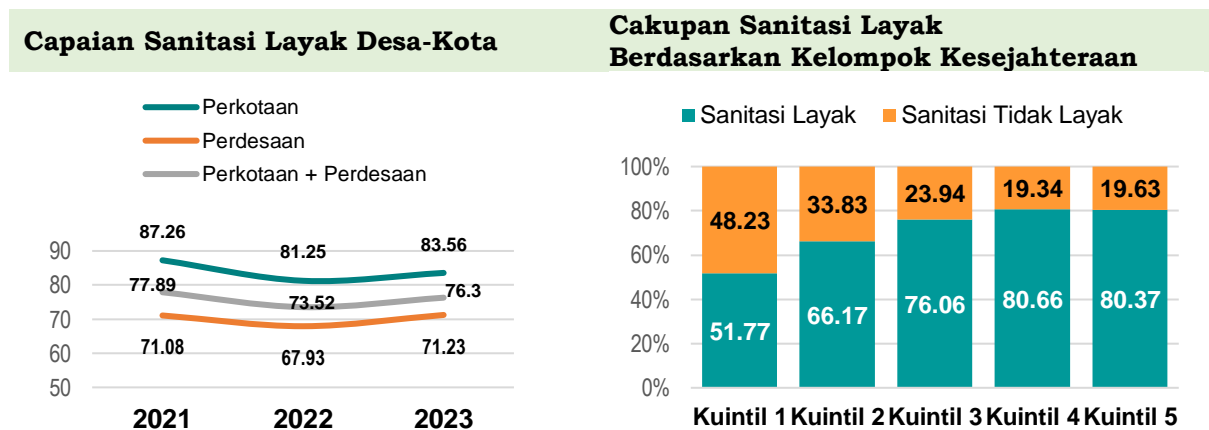
Tabel II.49 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, 2018-2023

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	65,83	68,25	75,60	65,86	69,18	73,42
2	Kaimana	81,11	75,20	70,73	74,57	76,48	75,57
3	Teluk Wondama	66,47	82,94	88,32	61,10	53,00	54,53
4	Teluk Bintuni	65,71	71,56	77,92	77,45	78,56	75,52
5	Manokwari	76,33	82,52	90,72	86,90	82,58	86,54
6	Manokwari Selatan	84,89	85,27	86,49	91,54	88,42	91,03
7	Pegunungan Arfak	32,33	43,31	43,28	45,21	34,98	30,98
Rata-rata		67,52	72,72	76,15	71,80	69,03	76,30

Sumber: BPS Papua Barat, 2023 dalam dokumen "Papua Barat dalam Angka 2024"

Tabel II.49 menunjukkan persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar di Papua Barat Tahun 2023. Berdasarkan Tabel II.49 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Meskipun demikian, apabila meninjau berdasarkan kabupaten, diperlukan percepatan pembangunan fasilitas tempat buang air besar di Kabupaten Pegunungan Arfak karena rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar masih tinggi yaitu sebesar 69,02%.

Gambar II.96 Cakupan Sanitasi Layak Berdasarkan Kategori Perdesaan-Perkotaan dan Kelompok Kesejahteraan di Papua Barat



Sumber: BPS 2023 dalam SEPAKAT

Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

Gambar II.97 menunjukkan cakupan sanitasi layak berdasarkan kategori perdesaan-perkotaan dan kelompok kesejahteraan di Papua Barat. Berdasarkan Gambar II.97 diketahui bahwa cakupan sanitasi di perdesaan (85,70%) lebih rendah dibandingkan perkotaan (96,02%), yang berarti bahwa semakin banyak penduduk yang menggunakan sanitasi tidak

layak di perdesaan. Sanitasi tidak layak di Papua Barat paling banyak digunakan oleh kelompok penduduk 20% termiskin sebanyak 48,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan penggunaan sanitasi layak antara penduduk termiskin dan terkaya juga terjadi di Papua Barat.

Tabel II.50 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besardi Papua Barat, 2023

Kabupaten	Sendiri	Bersama/ Komunal	MCK	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
Fakfak	75,35	8,46	13,20	0,00	2,89
Kaimana	75,63	9,96	8,94	0,00	5,47
Teluk Wondama	56,35	3,35	28,86	3,70	7,75
Teluk Bintuni	76,24	6,88	13,57	0,34	2,89
Manokwari	94,00	3,81	1,15	0,00	1,04
Manokwari Selatan	77,61	11,78	5,75	0,19	4,66
Pegunungan Arfak	29,96	27,39	30,32	0,47	11,86
Rata-rata	78,99	6,95	10,68	0,18	3,21

Sumber: BPS Papua Barat, 2023 dalam dokumen "Papua Barat dalam Angka 2024"

Tabel II.51 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua (Persen)

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Perkotaan+Perdesaan			
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Papua Barat	8,77	7,68	4,45	5,51	1,75	2,13	1,68	0,98	4,63	4,46	3	2,84
Indonesia	13,67	13,54	10,42	11,25	5,37	5,52	3,07	3,03	10,21	10,16	7,25	7,64

Sumber: Susenas Maret dalam BPS RI, 2023

Provinsi Papua Barat masih berada di bawah garis rata-rata nasional dalam persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman baik di perkotaan maupun perdesaan. Meskipun begitu, secara provinsi persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di perkotaan cenderung meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 5,51% menjadi 8,77% di tahun 2023. Hal serupa terjadi pada daerah perdesaan, dari 0,98% pada tahun 2020 menjadi 1,75% pada tahun 2023. Berdasarkan kenaikan pada daerah perkotaan dan perdesaan, maka persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi Papua Barat juga mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu sebesar 4,63%. Persentase yang cenderung masih rendah ini perlu ditingkatkan khususnya pada pengelolaan limbah domestik, akses sanitasi layak, dan akses sanitasi aman, serta tersedianya fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun.

2.1.4.1.3.4 Sumber Air Minum layak

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang penyediaan air minum, air minum merupakan air yang layak diminum dengan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan Tabel II.55 dapat diketahui terdapat peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sumber air

minum layak di Papua Barat pada 2018-2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, daerah yang memerlukan percepatan peningkatan akses sumber air minum layak adalah Kabupaten Teluk Wondama (tahun 2023: 25,77%) dan Pegunungan Arfak (tahun 2022: 71,21%).

Tabel II.52 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	75,22	70,41	63,40	98,00	98,49	98,24
2	Kaimana	53,47	44,29	45,88	83,78	85,88	87,41
3	Teluk Wondama	13,40	15,98	6,08	19,78	23,97	25,77
4	Teluk Bintuni	52,68	44,26	34,21	90,37	87,54	87,87
5	Manokwari	26,18	38,81	24,31	86,20	81,05	83,27
6	Manokwari Selatan	29,77	38,51	33,50	80,77	89,30	85,71
7	Pegunungan Arfak	24,71	36,63	38,64	82,47	77,17	71,21
Rata-rata		39,35	41,27	35,15	77,34	77,63	81,57

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2023

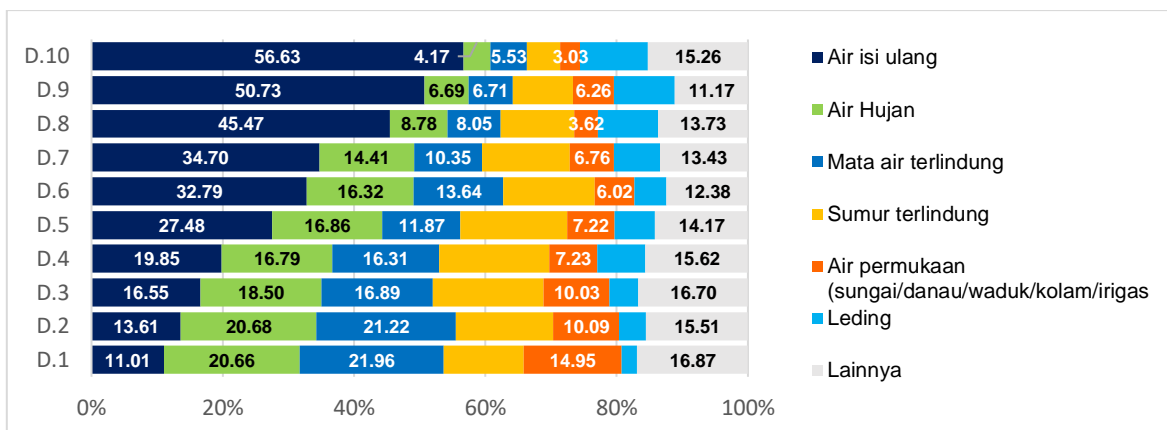
Tabel II.53 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama, 2023

	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
Leding	27,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pompa	1,19	1,95	3,20	13,41	32,00	15,09	0,00
Air Dalam Kemasan	15,04	34,65	8,35	41,76	39,44	20,73	0,38
Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	NA	9,56	13,33	13,43	32,00	32,21	11,67
Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	14,78	8,99	18,12	6,70	18,69	23,64	80,17
Air Permukaan, air Hujan, Lainnya	41,29	33,58	57,00	24,53	4,51	8,34	7,22

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Papua Barat adalah air ledeng, air pompa, air dalam kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya (Tabel II.53). Berdasarkan Tabel II.53 maka dapat diketahui bahwa air kemasan dan air isi ulang merupakan sumber air minum utama masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Gambar II.97 Sumber Air Minum Utama Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat 2022 (%)



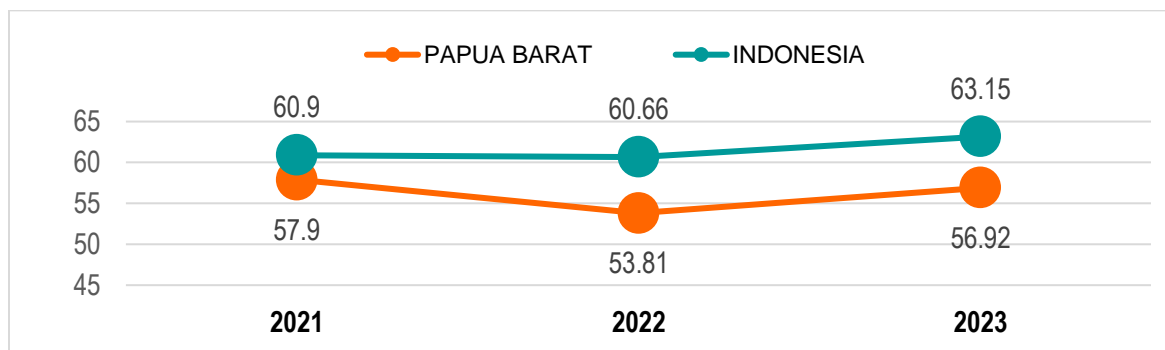
Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.93 menunjukkan sumber air minum utama berdasarkan kelompok kesejahteraan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.93 diketahui bahwa penduduk 20% termiskin menggunakan di Papua Barat menggunakan air hujan (20,66%) dan air permukaan (14,95%) sebagai sumber air minum utama. Penggunaan air permukaan sebagai sumber air paling tinggi terjadi di Teluk Wondama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan topologi tepi laut.

2.1.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

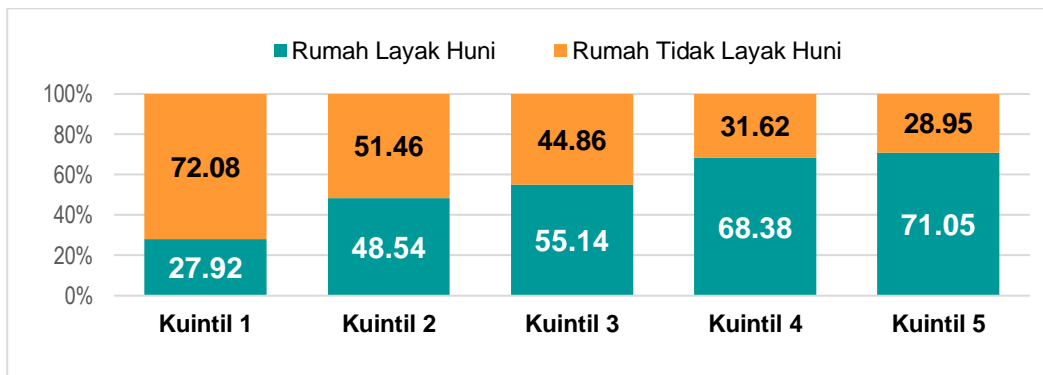
Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berperan dalam perumusan, pelaksanaan dan pembiayaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, untuk memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat termasuk pembangunan perumahan dan pendataan kawasan permukiman. Berdasarkan Gambar II.99 diketahui bahwa capaian rumah layak huni di Provinsi Papua Barat adalah 56,92%, masih lebih rendah dari nasional (63,15%). Rumah tidak layak huni di Papua Barat tersebar di seluruh kelompok pendapatan, terutama yang paling tinggi angka rumah tidak layak huni berada pada kelompok penduduk 20% termiskin. Sebanyak 72,08% penduduk 20% termiskin memiliki rumah tidak layak huni, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.99. Dalam hal ini, cakupan rumah layak huni Papua Barat juga memiliki kontribusi yang tinggi pada pembentuk garis kemiskinan non-makanan.

Gambar II.98 Cakupan Rumah Layak Huni di Provinsi Papua Barat dan Nasional (%)



Sumber: BPS, 2023 (data diolah)

Gambar II.99 Cakupan Rumah Layak Huni di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kelompok Pendapatan (%)



Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

Untuk melihat capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah, salah satu tolak ukur yang dapat digunakan adalah kuantitas dan kualitas tempat hunian. Berdasarkan versi penilaian dari BPS, rumah layak huni ditinjau dari kondisi rumah tinggal, yaitu; (1) Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas; (2) Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas; dan (3) Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas. Dengan kata lain, tiga faktor digunakan dalam penilaian kondisi rumah adalah atap, dinding dan lantai.

Tabel II.54 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Atap Rumah Terluas, 2022

Kabupaten	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu / Kayu / Sirap	Jerami / Ijuk / Daun / Rumbia	Lainnya
Fakfak	3,49	5,12	88,23	1,00	2,11	0,00	0,05
Kaimana	0,65	3,86	93,94	0,81	0,65	0,09	0,00
Teluk Wondama	0,00	2,67	96,35	0,00	0,23	0,41	0,34
Teluk Bintuni	0,20	3,47	95,11	0,89	0,00	0,33	0,00
Manokwari	0,51	1,53	95,54	1,04	1,07	0,00	0,31
Manokwari Selatan	0,25	1,72	95,93	0,49	0,80	0,81	0,00
Pegunungan Arfak	2,27	0,93	93,47	0,00	2,94	0,29	0,08
Rata-rata	1,05	2,76	94,08	0,60	1,11	0,28	0,11

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.54 menunjukkan distribusi rumah tangga menurut bahan utama atap rumah terluas di kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.54 diketahui bahwa mayoritas (94,08%) rumah tangga di Papua Barat menggunakan seng sebagai bahan utama atap rumah. Adapun rumah tangga yang menggunakan genteng relatif sedikit yaitu sebesar 2,76%. Kondisi ini terjadi di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.55 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Dinding Rumah Terluas, 2022

Kabupaten	Tembok	Plesteran Ayaman Bambu Kawat	Kayu Papan, Batang Kayu	Bambu, Anyaman Bambu	Lainnya
Fakfak	83,28	2,05	14,25	0,11	0,30
Kaimana	69,42	0,02	30,56	0,00	0,00
Teluk Wondama	52,67	0,00	46,31	1,02	0,00
Teluk Bintuni	35,80	0,01	64,18	0,00	0,01
Manokwari	74,74	0,32	24,62	0,00	0,32
Manokwari Selatan	69,33	0,00	30,45	0,05	0,16
Pegunungan Arfak	66,43	0,00	33,53	0,04	0,00
Rata-rata	64,52	0,34	34,84	0,17	0,11

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.56 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Utama Lantai Rumah Terluas, 2022

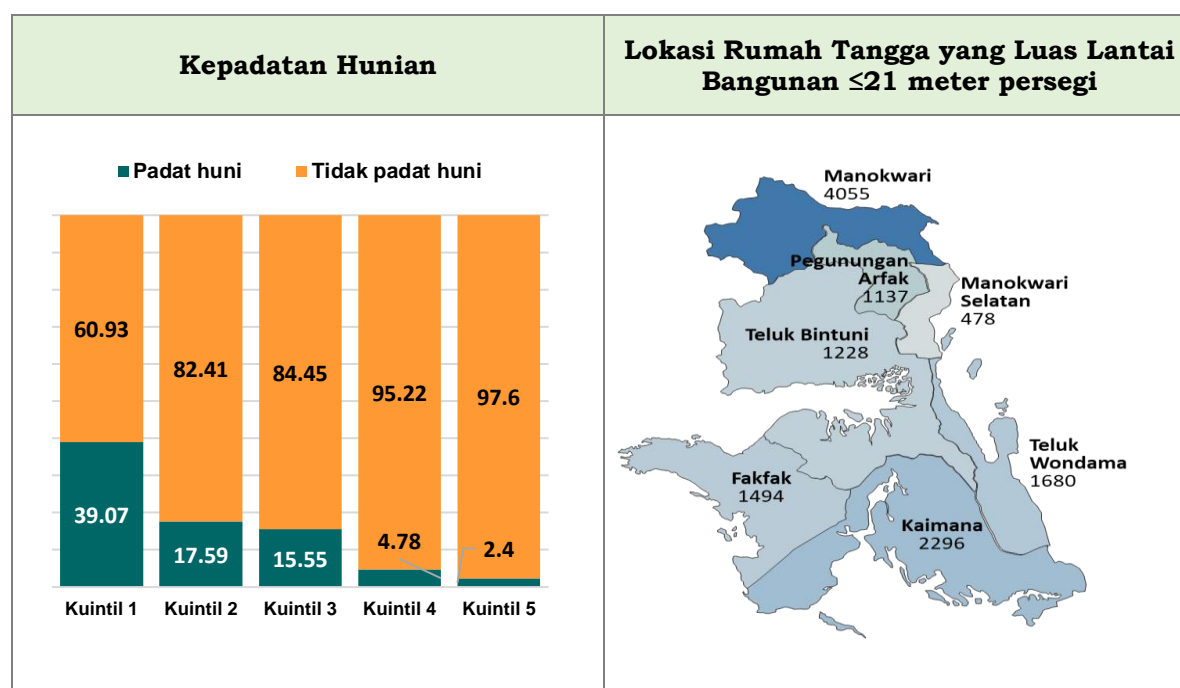
Kabupaten	Marmor / Granit	Keramik	Parket / Vinil / Karpét, Ubin / Tegel	Kayu / Papan	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya
Fakfak	0,66	42,84	7,51	11,85	34,72	0,41	1,68	0,33
Kaimana	0,42	36,15	9,65	11,90	38,03	0,36	3,49	0,00
Teluk Wondama	0,33	21,90	8,96	28,09	38,64	1,63	0,30	0,16
Teluk Bintuni	0,49	21,47	10,48	40,51	24,41	0,79	1,57	0,28
Manokwari	0,86	43,55	4,05	8,04	42,02	0,52	0,96	0,00
Manokwari Selatan	0,15	41,40	1,87	9,78	44,30	2,00	0,50	0,00
Pegunungan Arfak	0,67	11,20	13,52	32,20	40,41	1,17	0,23	0,60
Rata-rata	0,51	31,22	8,01	20,34	37,50	0,98	1,25	0,20

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat 2023

Tabel II.56 menunjukkan persentase rumah tangga menurut bahan utama dinding terluas di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.56 dapat diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat menggunakan bahan utama tembok (64,52%). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat karakteristik berbeda pada rumah tangga di Teluk Bintuni dan Teluk Wondama dengan banyaknya penggunaan kayu/papan/batang kayu sebagai dinding rumah. Rumah tangga di Teluk Bintuni yang menggunakan kayu/papan/batang kayu sebanyak 64,18%, sedangkan rumah tangga di Teluk Wondama sebesar 46,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik wilayah (iklim, budaya masyarakat, kemudahan memperoleh bahan baku) dapat mempengaruhi kecenderungan rumah tangga dalam memilih bahan utama dinding rumah.

Tabel II.56 menunjukkan persentase rumah tangga di Papua Barat menurut bahan utama lantai rumah terluas tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.56 diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di Papua Barat menggunakan semen/batas merah (37,50%) dan keramik (31,22%) sebagai lantai rumah. Meskipun demikian, apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat kondisi khusus di Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak yang cukup tinggi dalam menggunakan kayu/papan sebagai lantai rumah. Persentase rumah tangga yang menggunakan kayu/papan di Teluk Wondama sebesar 28,09%, di Pegunungan Arfak sebesar 32,20%, dan di Teluk Bintuni sebesar 40,51%.

Gambar II.100 Kepadatan Hunian dan Lokasi Rumah Tangga yang Luas Lantai Bangunan ≤ 21 meter persegi di Provinsi Papua Barat



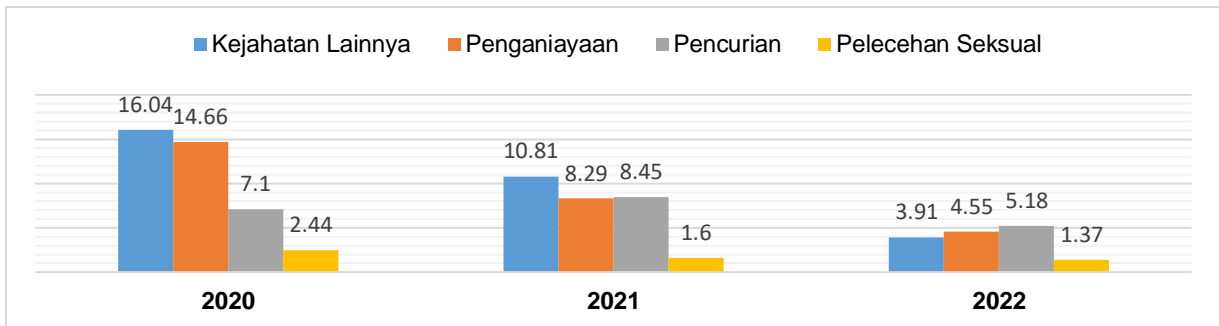
Salah satu faktor ketidaklayakan hunian di Papua Barat disebabkan oleh permasalahan kepadatan hunian. Sebanyak 39,07% penduduk 20% termiskin hidup dengan ukuran rumah di bawah 8 meter persegi per orang. Lokasi rumah tangga yang luas lantai bangunannya kurang dari 21 meter² paling banyak di Kabupaten Manokwari – ibu kota Provinsi Papua Barat. Isu kekumuhan yang disebabkan oleh padat huni di Papua Barat terjadi di wilayah perkotaan, terutama Kabupaten Manokwari (Gambar II.101).

2.1.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.4.1.5.1 Tindak Kejahatan

Indikator angka kejahatan yang terjadi digunakan untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah. Data BPS bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan data terkait jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres yang tersebar di seluruh kabupaten Papua Barat. Sehingga total agregasi jenis kejahatan di Papua Barat bisa berbeda antara data dari Polda dan total agregasi dari kabupaten.

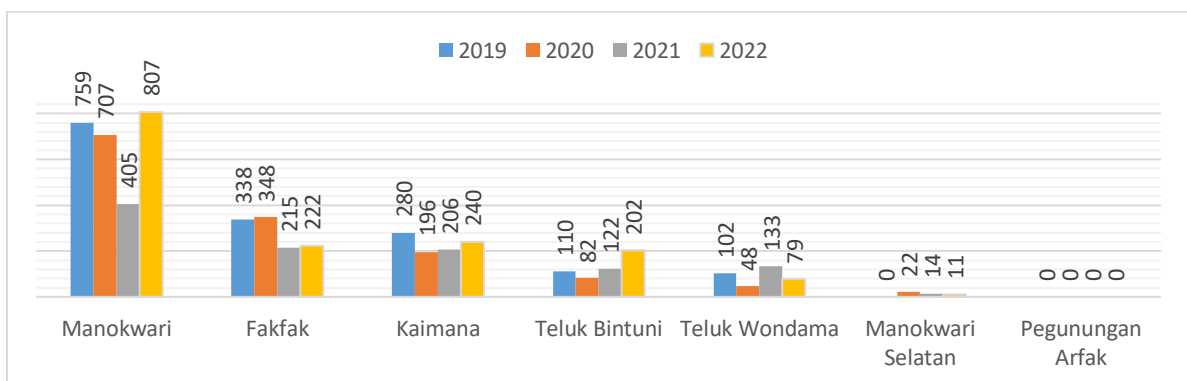
Gambar II.101 Persentase Penduduk Korban Kejahatan di Papua Barat Tahun 2020-2022



Sumber: BPS RI dalam "Statistik Kriminal 2023"

Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional oleh Susenas dalam Statistik Kriminal 2023, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pencurian, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya. Gambar II.102 menunjukkan persentase penduduk korban kejahatan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 hingga 2022. Penduduk yang menjadi korban jenis kejahatan lainnya memiliki persentase tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 16,04% dan 2021 yaitu 10,81%. Pada tahun 2022, persentase korban kejahatan pencurian lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis kejahatan yang ada yaitu sebesar 5,18%.

Gambar II.102 Jumlah Laporan Kasus Kejahatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2023

Jumlah laporan terkait kasus kejahatan di Provinsi Papua mengalami kenaikan di tahun 2022 khususnya pada Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Kasus kejahatan terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2019 hingga 2022 dilaporkan terjadi di Kabupaten Manokwari. Data Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2019 bernilai 0 karena data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Sorong. Begitu pun

untuk data Kabupaten Pegunungan Arfak yang bernilai 0 karena data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Manokwari. Gambar II.103 menunjukkan perkembangan kasus kejahatan di Provinsi Papua Barat dalam 4 tahun terakhir hingga 2022.

Jenis-jenis kejahatan dikelompokkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Tabel II.57 menunjukkan jumlah kasus kejahatan menurut jenisnya pada masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Diketahui bahwa penganiayaan ringan merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan dan paling banyak terjadi di Kabupaten Manokwari. Kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus terbanyak setelah penganiayaan ringan diikuti kasus pencurian. Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan jumlah kejahatan tertinggi di tahun 2022 yaitu sebanyak 732 kasus. Kabupaten Teluk Wondama menjadi kabupaten dengan jumlah kejahatan terendah yaitu sebanyak 42 kasus. Sementara data terkait jumlah kejahatan pada masing-masing jenis kejahatan di Kabupaten Pegunungan Arfak masih belum tersedia hingga tahun 2022.

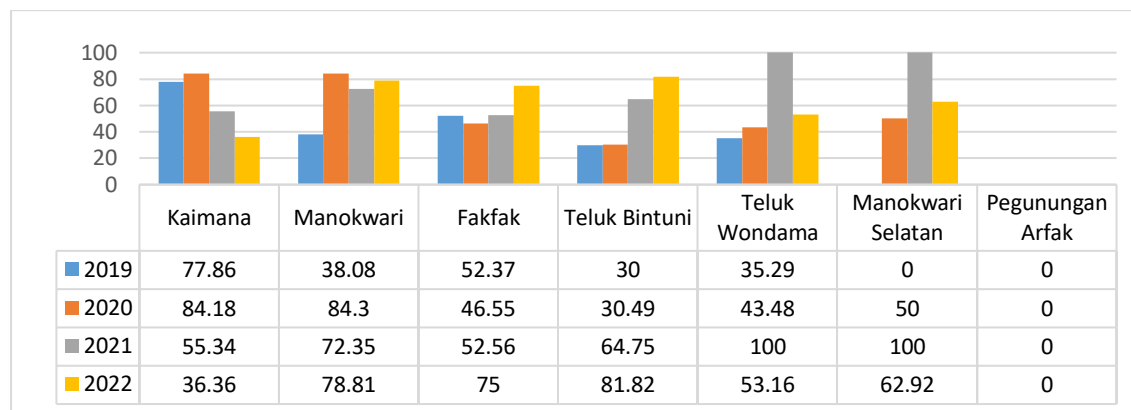
Tabel II.57 Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Jenis Kejahatan		Jumlah Menurut Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	-	-	-	5	1	1	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Ringan	73	76	15	33	159	15	-
	Penganiayaan Berat	-	2	-	2	1	0	-
	Kekerasan dalam Rumah Tangga	15	9	2	4	8	2	-
Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan	4	2	-	7	-	2	-
	Pencabulan	4	13	-	-	10	3	-
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	-	-	-	-	-	1	-
	Mempekerjakan Anak Di bawah Umur	-	-	-	16	-	5	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan	Pencurian dengan Kekerasan	-	1	-	-	32	3	-
	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-	-	-	-	-	-

Jenis Kejahatan		Jumlah Menurut Kabupaten						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-	-	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian	16	44	1	37	188	5	-
	Pencurian dengan pemberatan	-	-	11	29	109	12	-
	Pencurian Kendaraan Bermotor	1	14	2	-	73	-	-
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	8	9	4	6	18	6	-
	Pembakaran dengan Sengaja	-	-	-	-	-	-	-
	Penadahan	-	-	-	-	-	-	-
Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	6	3	-	-	21	-	-
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/ Perbuatan Curang	13	10	5	26	77	4	-
	Penggelapan	7	2	1	5	35	4	-
	Korupsi	-	-	1	-	-	1	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah		147	185	42	171	732	64	0

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2022

Gambar II.103 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam “Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2022”

Tindak kejahatan yang terjadi perlu dilihat dari aksi penyelesaian yang dilakukan oleh aparat keamanan. Persentase penyelesaian tindak kejahatan di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga 2022. Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan berhasil mencapai persentase penyelesaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu 100%. Pada tahun 2022, Kabupaten Kaimana mengalami penurunan persentase penyelesaian tindak kejahatan yang paling signifikan yaitu sebesar 36,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 55,34%. Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Teluk Bintuni mengalami kenaikan persentase di tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Persentase penyelesaian tindak kejahatan menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Gambar II.104.

2.1.4.1.5.2 Konflik Massal

Konflik merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal. Berdasarkan Tabel II.58, terdapat variasi jumlah kejadian perkelahian massal. Selama tahun 2021, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan dengan perkelahian massal tertinggi di Papua Barat, yaitu masing-masing sebanyak 11 desa/kelurahan. Sebaliknya, Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten yang kampung/kelurahannya paling sedikit dilaporkan sebagai tempat terjadi konflik massal dalam kurun waktu tahun 2018-2020.

Tabel II.58 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Kejadian Perkelahian Massal di Wilayahnya

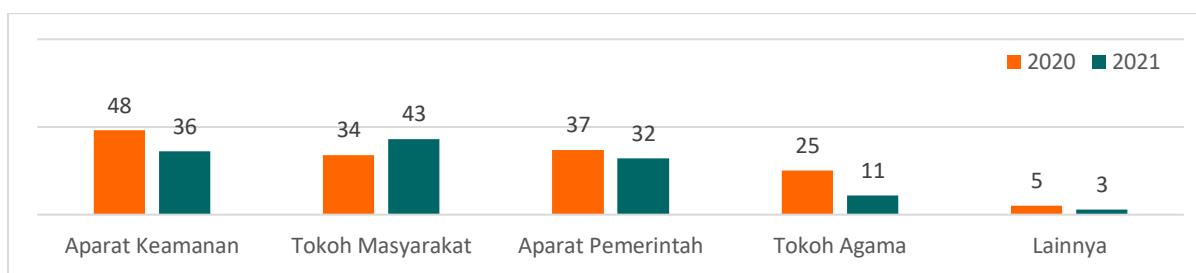
Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah kampung/ Kelurahan tempat terjadi Perkelahian massal				Persentase kampung/ kelurahan tempat terjadi perkelahian massal (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Fakfak	149	12	6	9	11	8.05%	4.03%	6.04%	7.38%
Kaimana	86	6	6	7	1	6.98%	6.98%	8.14%	1.16%
Teluk Wondama	76	5	5	4	0	6.58%	6.58%	5.26%	0.00%
Teluk Bintuni	261	10	5	1	6	3.83%	1.92%	0.38%	2.30%

Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Jumlah kampung/ Kelurahan tempat terjadi Perkelahian massal				Persentase kampung/ kelurahan tempat terjadi perkelahian massal (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manokwari	173	13	7	7	11	7.51%	4.05%	4.05%	6.36%
Manokwari Selatan	57	3	4	2	0	5.26%	7.02%	3.51%	0.00%
Pegunungan Arfak	166	3	0	0	1	1.81%	0.00%	0.00%	0.60%

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2019-2022

Dalam upaya menanggulangi isu konflik Pemerintah Daerah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sebagaimana Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial). Selain itu, terdapat strategi yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Gambar II.104 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan 2021



Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat, BPS Papua Barat 2021-2022

Gambar II.105 memetakan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik massal di Papua Barat. Diketahui bahwa Tokoh Masyarakat merupakan inisiator yang penting dalam penyelesaian konflik. Pada tahun 2020 tokoh Masyarakat menempati urutan kedua setelah Aparat Keamanan (36 dan 48 kampung/kelurahan), Namun pada tahun 2021, tokoh masyarakat menduduki urutan teratas dengan 43 kampung/kelurahan yang konfliknya diselesaikan oleh kelompok ini.

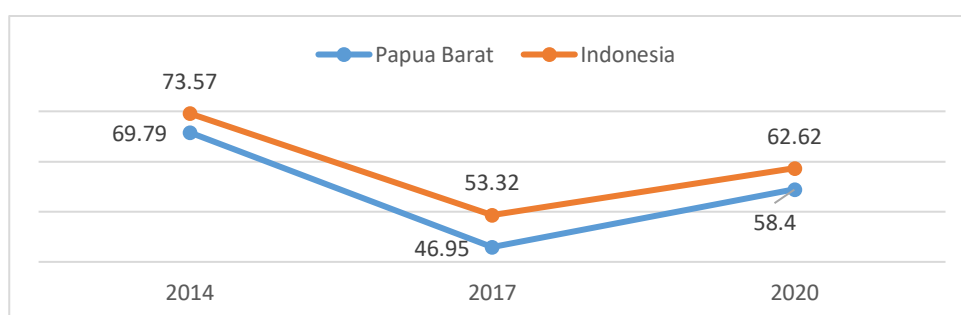
2.1.4.1.5.3 Rasa Aman

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan serta hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Rasa aman ditinjau dari beberapa aspek yaitu penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Perkembangan rasa aman di Provinsi Papua Barat cenderung menurun sejak tahun 2014 dengan capaian proporsi sebesar 58,4 pada tahun 2020. Proporsi tersebut masih berada di bawah garis proporsi rasa aman secara nasional. Perkembangan proporsi rasa aman dibandingkan secara nasional sejak tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar II.106.

Gambar II.105 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, 2014-2020

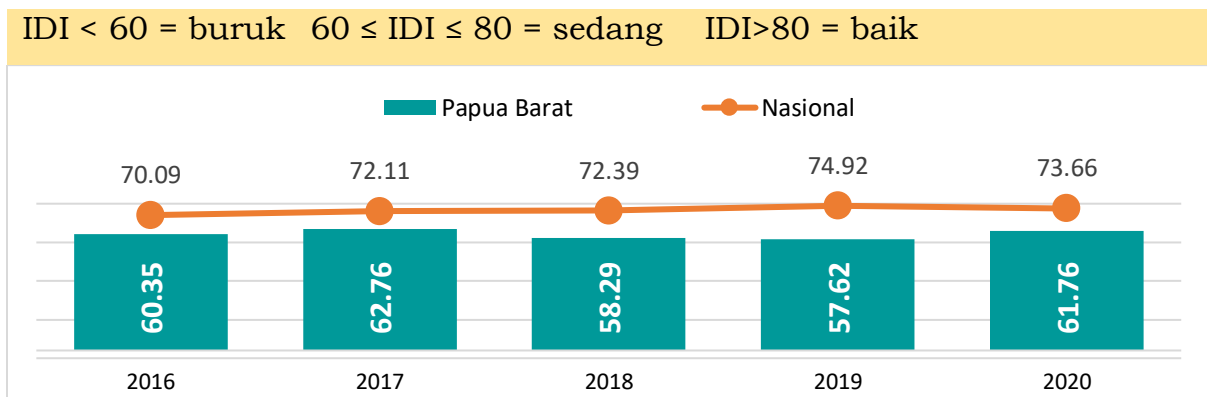


Sumber: BPS RI, 2021

2.1.4.1.5.4 Indeks Demokrasi

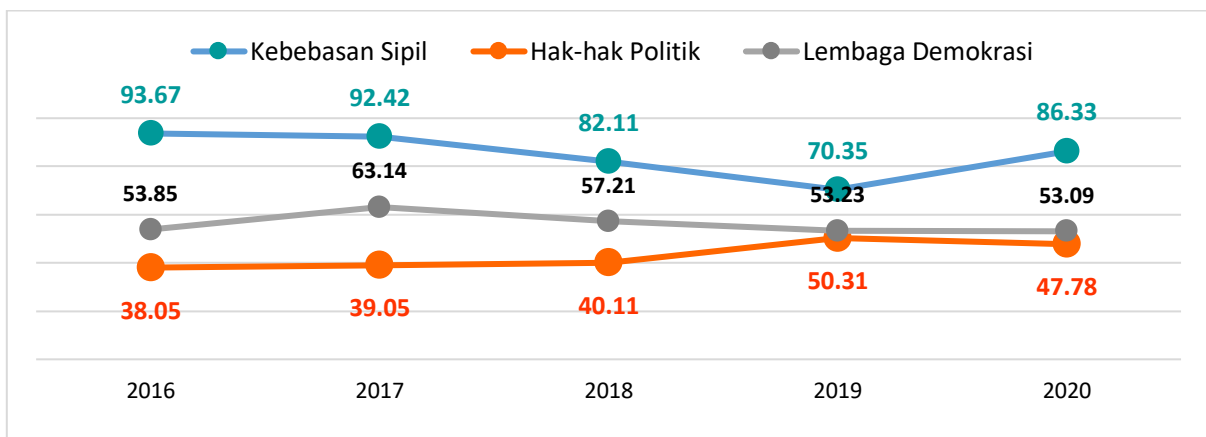
IDI menjadi alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Berdasarkan metode lama, IDI disusun oleh perkembangan dari 3 aspek utama yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (institution od democracy). IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta/kejadian), dengan data yang dikumpulkan dari berita media massa, dokumen instansi/peraturan daerah, focus group discussion (FGD) serta wawancara mendalam. Sejak tahun 2021, perhitungan IDI telah menggunakan metode baru. Metode baru tersebut menggunakan perkembangan 3 aspek utama yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi.

Gambar II.106 Perkembangan Indeks Demokrasi Tahun 2016-2020 (Metode Lama)



Sumber: BPS Papua Barat dalam “Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020”

Gambar II.107 Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Papua Barat 2009-2020 (Metode Lama)



Sumber: BPS Papua Barat dalam “Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020”

Sejak pengukuran pertama IDI tahun 2016 hingga tahun 2020, diketahui perkembangan IDI Papua Barat cukup berfluktuatif yang mencerminkan dinamika kinerja demokrasi Provinsi Papua Barat (lihat Gambar II.108). Namun tidak tersedia data terpilah kabupaten sehingga indeks yang diuraikan di dalam bahasan ini adalah IDI untuk Provinsi Papua Barat dengan 11 kabupaten sebelum pembentukan DOB.

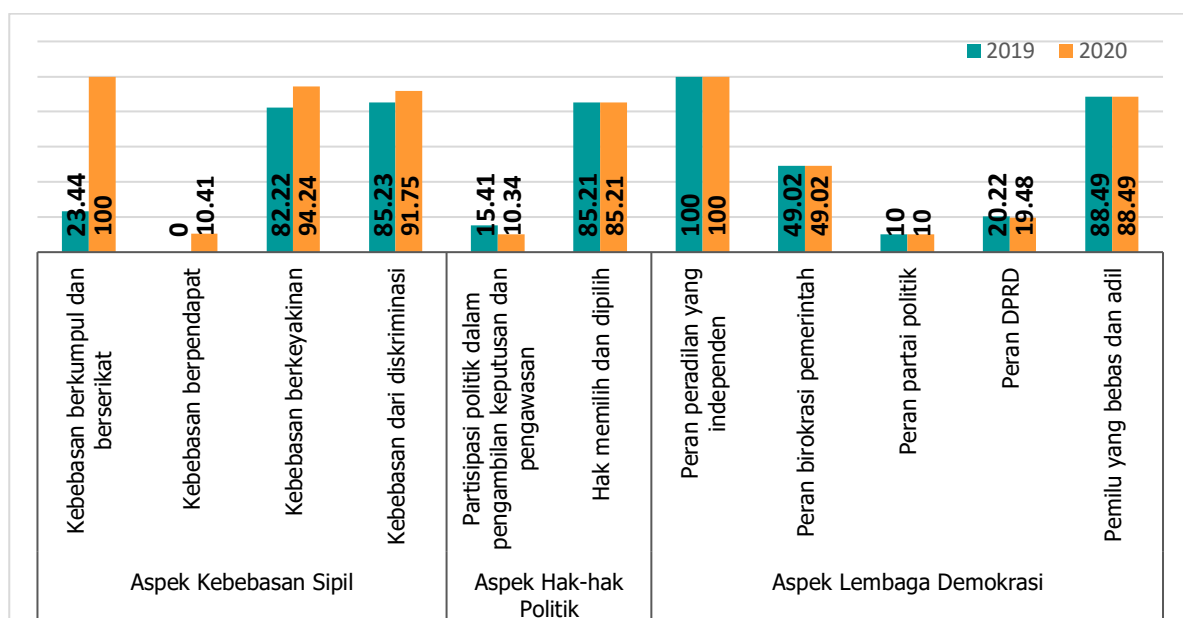
IDI Papua Barat pra-pemekaran pada umumnya termasuk dalam kategori “sedang” ($60 \leq \text{IDI} \leq 80$), kecuali pada tahun 2018 dan 2019 termasuk dalam kategori “buruk”. Capaian tertinggi IDI Papua Barat terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 62,76. Namun demikian, pada tahun-tahun setelahnya terjadi perlambatan bahkan penurunan kinerja demokrasi di Papua Barat, hingga pada tahun 2020 IDI Papua Barat sebesar 61,76. Pada tahun 2019 (pada saat IDI nasional mencapai indeks tertinggi sejak pengukuran IDI), IDI Papua Barat justru tercatat berada pada kategori buruk dengan indeks sebesar 57,62.

Pada tahun 2020 peningkatan IDI Papua Barat dipicu dengan adanya perbaikan aspek kebebasan sipil. Indeks kebebasan sipil mengalami peningkatan 15,98 poin dari 70,35 pada tahun 2019 menjadi 86,33 pada tahun 2020. Capaian ini mendongkrak kinerja aspek kebebasan sipil dari kategori sedang menjadi baik. Hal sebaliknya terjadi pada kedua aspek pembangun IDI lainnya. Indeks aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi pada tahun 2020 turun masing-masing sebesar 2,53 poin dan 0,14 poin. Apabila dilihat dari tren indeks

aspek pada kedua aspek tersebut, mulai tahun 2017 aspek lembaga demokrasi terus mengalami penurunan, menempatkan aspek ini berkinerja buruk seperti pada aspek hak-hak politik (lihat Gambar II.108).

Berdasarkan Gambar II.108, aspek yang menyumbangkan angka terbesar dalam skor IDI di Provinsi Papua Barat adalah kebebasan sipil. Aspek kebebasan sipil sempat mnurun pada tahun 2019 menjadi 70,35 dan kembali meningkat ke angka 86,36 pada tahun 2020. Aspek lembaga demokrasi menjadi aspek dengan perolehan skor lebih tinggi dari hak-hak politik dan menjadikan hak-hak politik berada pada skor terendah dari antara kedua aspek sebelumnya. Skor aspek lembaga demokrasi semakin menurun hingga tahun 2020 dengan skor 53,09. Berdasarkan sisi aspek hak-hak politik, peningkatan skor terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 50,31 dan diikuti pada taun 2020 meskipun menurun di angka 47,78.

Gambar II.108 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020



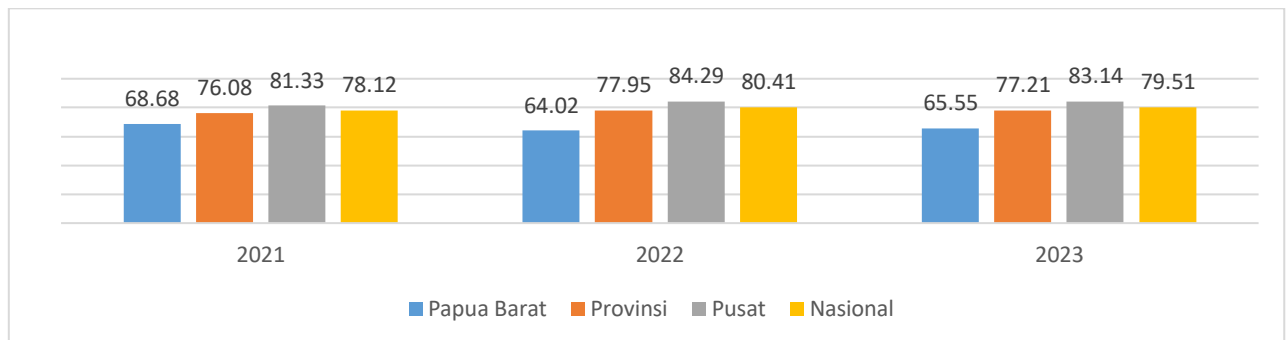
Sumber: BPS Papua Barat dalam "Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat Tahun 2020"

Perkembangan pada masing-masing variabel dalam aspek IDI ditunjukkan pada Gambar II.109. Peningkatan aspek kebebasan sipil Papua Barat tahun 2020 terutama disebabkan oleh menurunnya: (1) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; (2) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat; (3) tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya; (4) ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; serta (5) tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Penurunan aspek hak-hak politik Papua Barat tahun 2020 disebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun penurunan aspek lembaga demokrasi terutama disebabkan oleh menurunnya peran DPRD terutama dalam menghasilkan Perda inisiatif.

Sejak tahun 2021, IDI dihitung menggunakan beberapa indikator baru, sehingga menunjukkan perbedaan angka yang signifikan dibandingkan pada tahun-tahun

sebelumnya. IDI Provinsi Papua sejak tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar II.110. Nilai IDI secara nasional merupakan agregasi dari nilai provinsi dan pusat. IDI Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi (belum termasuk DOB).

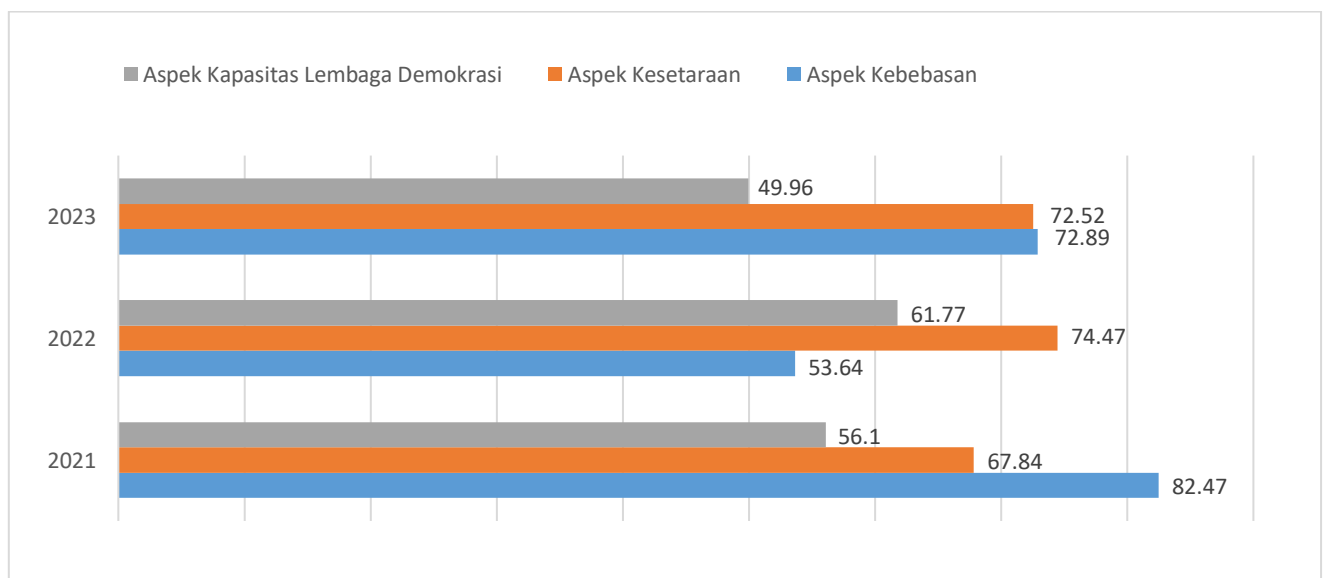
Gambar II.109 Perbandingan IDI Papua Barat terhadap Nasional, Pusat, dan Provinsi Tahun 2021, 2022 dan 2023



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Provinsi Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional maupun pusat dan provinsi pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan skor berturut-turut adalah 68,68, 64,02 dan 65,55. Apabila ditinjau secara aspek yaitu kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.111, diketahui bahwa aspek kebebasan mengalami penurunan skor dari 82,47 pada tahun 2021 menjadi 53,64 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 naik kembali menjadi 72,89. Aspek kesetaraan mengalami kenaikan skor pada tahun 2022 yaitu 74,47 dari 67,84 pada tahun 2021, pada tahun 2023 turun kembali menjadi 72,52. Kenaikan juga terjadi pada aspek kapasitas Lembaga demokrasi pada tahun 2022 yaitu 61,77 dari sebelumnya 56,1 pada tahun 2021 kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 49,96.

Gambar II.110 Perkembangan Aspek IDI Tahun 2021, 2022 dan 2023



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan Tabel II.59, terlihat bahwa masing-masing aspek dalam perhitungan IDI Papua Barat memiliki 7 indikator pendukung. Indikator dengan skor tertinggi pada tahun 2021 dan 2023 adalah Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Dan

Berpendapat Antar Masyarakat serta Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan (aspek kebebasan) dengan skor 100. Skor tertinggi pada tahun 2022 diperoleh oleh indikator Kinerja Lembaga Yudikatif (aspek kapasitas lembaga demokrasi) dengan skor 96.58. Indikator Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah baik pada tahun 2021 dan 2022 masih berskor 0 yang menjadikannya indikator dengan skor terendah pada kedua tahun tersebut.

Berdasarkan Tabel II.40, terlihat bahwa masing-masing aspek dalam perhitungan IDI Papua Barat memiliki 7 indikator pendukung. Indikator dengan skor tertinggi pada tahun 2021 adalah Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Dan Berpendapat Antar Masyarakat serta Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan (aspek kebebasan) dengan skor 100. Skor tertinggi pada tahun 2022 diperoleh oleh indikator Kinerja Lembaga Yudikatif (aspek kapasitas lembaga demokrasi) dengan skor 96.58. Indikator Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah baik pada tahun 2021 dan 2022 masih berskor 0 yang menjadikannya indikator dengan skor terendah pada kedua tahun tersebut.

Tabel II.59 Indikator IDI Provinsi Papua Barat Menggunakan Metode Baru, 2021-2022

Indikator IDI	2021	2022	2023
Aspek Kebebasan			
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	50.90	51.27	4.37
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100.00	0.00	100.00
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100.00	18.78	100.00
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	92.86	85.71	85.71
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	66.21	66.21	66.21
Pemenuhan hak-hak pekerja	99.30	91.86	93.67
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	70.59	69.23	68.22
Aspek Kesenjangan			
Kesenjangan Gender	81.98	81.67	82.31
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	57.14	85.71	75.00
Anti monopoli sumber daya ekonomi	49.00	51.17	50.00
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	82.23	80.26	77.69
Kesenjangan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94.16	94.63	94.62
Akses masyarakat terhadap informasi publik	45.69	67.60	67.83
Kesenjangan dalam pelayanan dasar	68.03	68.26	67.93
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi			
Kinerja Lembaga Legislatif	39.13	52.00	24.32
Kinerja Lembaga Yudikatif	88.15	96.58	87.57
Netralitas Penyelenggara Pemilu	64.29	64.29	64.29

Indikator IDI	2021	2022	2023
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	96.43	92.86	92.86
Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	81.80	84.22	83.31
Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0.00	0.00	0.00
Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	64.80	78.40	34.00
Pendidikan Politik pada kader partai politik	7.27	16.36	12.73
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68.68	64.02	65.55

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

2.1.4.1.6 Sosial

Penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran, yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui bantuan dan jaminan sosial yang merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Bentuk bantuan ini antara lain berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan. Program Indonesia Pintar (PIP), dan asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS).

2.1.4.1.6.1 Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM sebesar 110.000 rupiah tiap bulannya melalui mekanisme perbankan. Berdasarkan Tabel II.60, diketahui bahwa persentase keluarga yang menerima BPNT pada masing-masing kabupaten sejak tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2023. Tahun 2021 menjadi tahun dengan persentase tertinggi keluarga penerima manfaat yaitu mencapai 13,73%. Persentase keluarga penerima manfaat tertinggi sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 berada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sebaliknya, persentase terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Teluk Wondama menjadi kabupaten dengan persentase keluarag penerima manfaat tertinggi pada 2023 yaitu 8,56%. Pada tahun 2024 keluarga penerima manfaat tertinggi yaitu 28,04% kabupaten Manokwari Selatan.

Tabel II.60 Persentase Keluarga yang Menerima Bantuan Pangan Non Tumai Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	Persentase Keluarga Penerima Manfaat				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Fakfak	0	19,06	13,42	5,08	21,01
2	Kaimana	3,19	5,53	4,94	2	15,81
3	Teluk Wondama	0,27	18,61	13,88	8,56	10,19
4	Teluk Bintuni	7,38	12,8	12,93	3,58	21,11
5	Manokwari	13,37	11,75	8,34	2,75	16,79

No	Kabupaten	Persentase Keluarga Penerima Manfaat				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Manokwari Selatan	8,33	28,18	12,36	4,84	28,04
7	Pegunungan Arfak	4,94	20,5	5,7	-	1,66
Papua Barat		9,41	13,73	9,25	6,56	16,90

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Papua Barat, 2020-2024

2.1.4.1.6.2 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Berdasarkan Tabel II.61, persentase keluarga penerima manfaat PKH di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu 10,71% menjadi 11,86% pada tahun 2022 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 11,43% pada tahun 2023. Kabupaten Manokwari Selatan menjadi kabupaten dengan persentase keluarga penerima manfaat PKH tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,39% dan 2021 sebesar 16,72%. Pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Fakfak menjadi kabupaten dengan persentase keluarga penerima manfaat PKH tertinggi di Papua Barat yaitu sebesar 25,14% dan 20,6%.

Tabel II.61 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2020-2023

No	Kabupaten	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	6,14	13,22	25,14	20,6
2	Kaimana	1,05	2,44	4,99	11,25
3	Teluk Wondama	8,12	15,76	15,37	15,16
4	Teluk Bintuni	9,74	8,31	14,87	12,91
5	Manokwari	16,69	15,64	12,38	10,92
6	Manokwari Selatan	18,39	16,72	14,22	8,36
7	Pegunungan Arfak	2,53	0	7,41	6,47
Papua Barat		10,71	11,24	11,86	11,43

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Papua Barat, 2020-2023

2.1.4.1.6.3 Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Tabel II.62 Persentase Keluarga Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fakfak	16.06	13.44	10.88	6.27	8.32
2	Kaimana	12.54	13.33	11.49	7.69	11.41
3	Teluk Wondama	6.36	6.45	15.53	14.38	11.58
4	Teluk Bintuni	21.62	21.68	12.26	14.85	8.05
5	Manokwari	12.54	10.00	9.76	11.58	6.48
6	Manokwari Selatan	15.61	18.48	13.41	18.27	10.18
7	Pegunungan Arfak	6.42	0.38	1.46	2.99	2.50

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Papua Barat, 2017-2021

Data penerima manfaat PIP di Provinsi Papua Barat tersedia hingga tahun 2021. Dari data ini diketahui bahwa penerima manfaat cenderung menurun jumlahnya dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 cakupan PIP 8,3% (rata-rata dari 7 kabupaten) lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 10,4% di tahun 2019 dan 11,0% tahun 2020. Kabupaten yang paing tinggi persentasenya dari tahun ke tahun adalah Teluk Bintuni (2017-2018), Teluk Wondama (2019 dan 2021) dan Manokwari Selatan (2020). Tabel II.64 menunjukkan cakupan penerima manfaat PIP tahun 2017-2021.

2.1.4.1.6.4 Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Kartu ini merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial, antara lain BPNT dan PIP.

Tabel II.63 Persentase Keluarga Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten	Persentase Keluarga Penerima Manfaat				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	5,07	6,39	24,23	20,14	13,92
2	Kaimana	10,14	11,31	8,76	12,32	10,88
3	Teluk Wondama	7,31	12,67	14,04	11,14	12,57
4	Teluk Bintuni	5,54	9,86	9,41	14,75	10,44
5	Manokwari	13,06	11,11	10,04	7,53	3,15
6	Manokwari Selatan	11,97	17,61	13,04	10,64	4,52
7	Pegunungan Arfak	7,38	5,93	0,26	11,36	0,381
Papua Barat		11,65	10,88	10,36	12,05	7,18

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Papua Barat, 2019-2023

Di Provinsi Papua Barat, persentase keluarga pemegang KKS meningkat pada tahun 2020 yaitu 10,88% menjadi 12,05% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun

2023 menjadi 7,18%. Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten dengan persentase keluarga pemegang KKS tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,06% diikuti oleh Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020 sebesar 17,61%. Kabupaten dengan persentase keluarga pemegang KKS tertinggi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah Kabupaten Fakfak dengan persentase secara berturut-turut sebesar 24,23%, 20,14%, dan 3,92%, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.63.

2.1.4.1.6.5 Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial dari negara untuk menjamin penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar. Jaminan sosial terbagi dalam beberapa kategori diantaranya adalah jaminan pensiun, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK. Berdasarkan Tabel II.64, diketahui bahwa jaminan pensiun menjadi jaminan sosial dengan cakupan penerima manfaat tertinggi apabila dibandingkan dengan jenis jaminan sosial lainnya. Pesangon PHK menjadi jaminan sosial dengan persentase cakupan penerima manfaat paling rendah dibandingkan dengan seluruh jenis jaminan sosial lainnya. Pada tahun 2023, jaminan pensiun yaitu sebesar 10,44% dan asuransi kecelakaan kerja sebesar 10,2% menjadi jenis jaminan sosial dengan persentase cakupan penerima manfaat tertinggi di Papua Barat.

Tabel II.64 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Barat, Tahun 2019-2023

Jenis Jaminan Sosial	Cakupan Penerima Manfaat (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaminan Pensiun	10,19	12,7	11,13	9,32	10,44
Jaminan Hari Tua	7,89	11,56	9,98	8,5	8,92
Asuransi Kecelakaan Kerja	8,36	11,72	10,69	9,03	10,2
Jaminan / Asuransi Kematian	7,55	11,13	9,6	7,86	8,93
Pesangon PHK	2,05	3,38	2,44	2,11	1,39

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat provinsi Papua Barat, 2019-2023

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.4.2.1 Tenaga Kerja

2.1.4.2.1.1 Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja berhubungan erat dengan profil kependudukan, utamanya yang berusia produktif. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Tabel II.65 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu, 2023 (%)

Kabupaten	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1 Fakfak	38.102	2.658	40.760	93,48
2 Kaimana	29.958	1.003	30.961	96,76
3 Teluk Wondama	20.562	585	21.147	97,23
4 Teluk Bintuni	45.937	1.678	47.615	96,48
5 Manokwari	94.735	6.018	100.753	94,03
6 Manokwari Selatan	22.548	358	22.906	98,44
7 Pegunungan Arfak	31.333	47	31.380	99,85

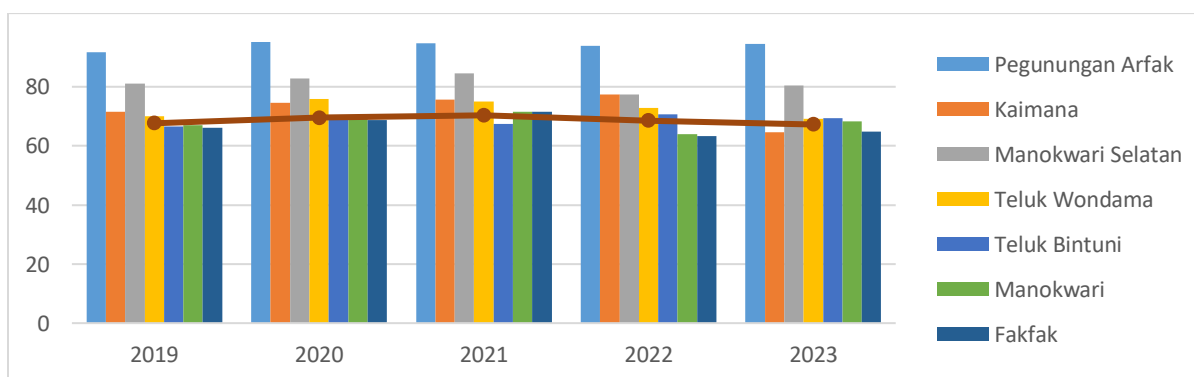
Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2024

Tabel II.65 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Barat menurut jenis kegiatan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.65, diketahui bahwa 94,62% Angkatan kerja di Papua Barat telah bekerja. Persentase Angkatan kerja yang telah bekerja tertinggi terdapat di Pegunungan Arfak (99,85%), sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Fakfak (93,48%). Meskipun demikian, jumlah angkatan pengangguran yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Manokwari, yaitu 6.018 penduduk.

2.1.4.2.1.2 Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

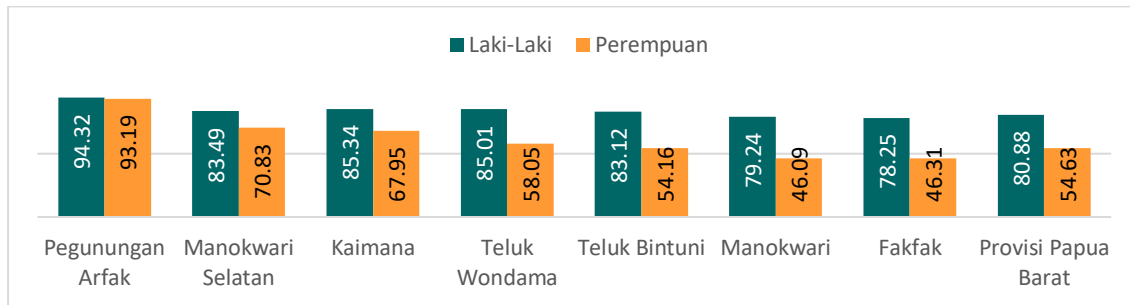
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara provinsi ditinjau berdasarkan kabupaten-kabupaten yang termasuk di dalamnya. TPAK tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak mencapai 94,49%. Kabupaten Kaimana menjadi kabupaten dengan TPAK terendah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 dengan capaian 64,64%. TPAK menurut kabupaten di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Gambar II.112. Berdasarkan tinjauan gender pada tahun 2022, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan TPAK tertinggi baik laki-laki maupun Perempuan dengan capaian yang tidak jauh berbeda yaitu 94,32% dan 92,19%. TPAK pada seluruh kabupaten masih didominasi oleh laki-laki sehingga secara rata-rata provinsi, laki-laki memiliki capaian TPAK tertinggi yaitu sebesar 80,88%, lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yaitu 54.63%.

Gambar II.111 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2023



Sumber: BPS Papua Barat, 2024

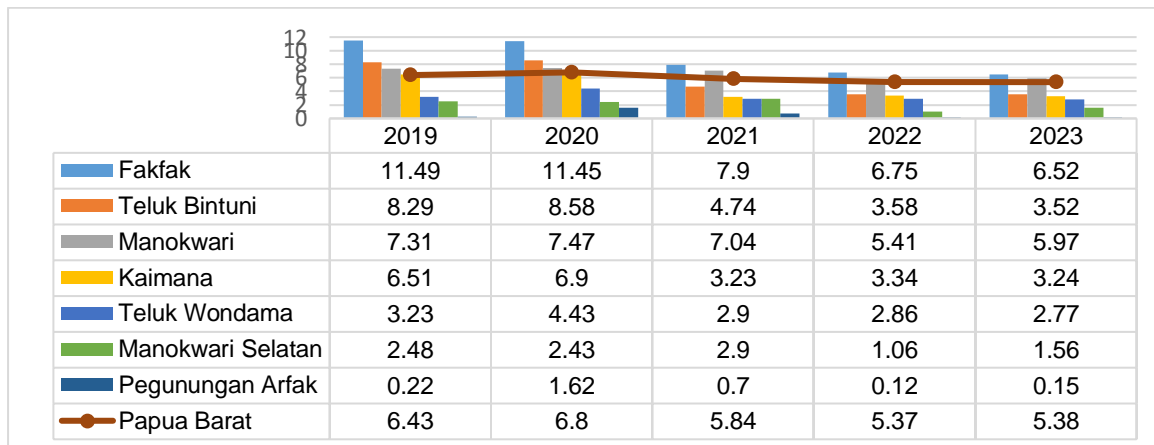
Gambar II.112 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Gender di Provinsi Papua Barat, 2022



Sumber: BPS Papua Barat, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Gambar II.114. Berdasarkan tinjauan kabupaten, Kabupaten Fakfak menjadi kabupaten dengan TPT tertinggi secara konsisten dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Sebaliknya sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan TPT terendah sejak tahun 2019 hingga 2023. Jumlah TPT di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 5,38 naik 0,01 dari tahun 2022.

Gambar II.113 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat 2018-2023



Sumber: BPS Papua Barat, 2023

2.1.4.2.1.3 Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel II.66 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023. Berdasarkan jumlah pada masing-masing jenis lapangan pekerjaan utama, diketahui bahwa mayoritas penduduk Papua Barat bekerja di sektor pertanian (35,58%) serta sektor perdagangan dan jasa (51,76%). Penduduk yang bekerja di sektor industri relatif kecil yaitu hanya sebesar 12,65% atau 70.964 penduduk.

Tabel II.66 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2023

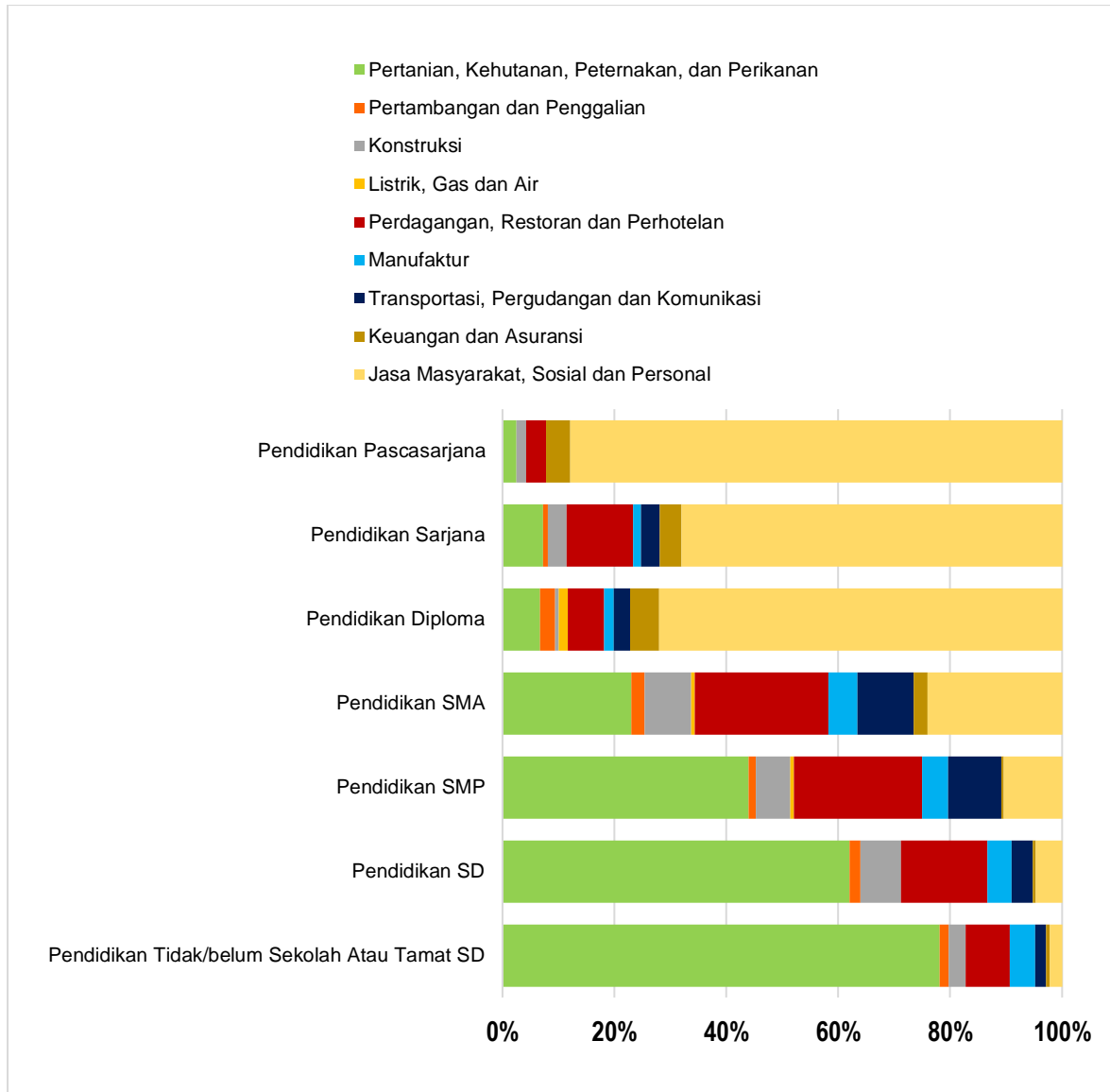
Kabupaten		Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		1	2	3	
1	Fakfak	14.459	3.140	20.503	38.102
2	Kaimana	11.130	3.475	15.353	29.958
3	Teluk Wondama	7.928	2596	10.038	20.562
4	Teluk Bintuni	3.955	5.044	26.938	45.937
5	Manokwari	31.639	13.291	49.805	94.375
6	Manokwari Selatan	11.714	411	10.423	22.548
7	Pegunungan Arfak	30.166	3	1.164	31.333
Papua Barat		199.599	70.964	290.320	560.883
		35,58 %	12,65%	51,76 %	100.00 %

Catatan: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.

Ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor pertanian adalah Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Adapun wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor perdagangan dan jasa adalah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Di sektor industri, meskipun memiliki penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil di tingkat provinsi secara umum, namun pekerja sektor industri cukup tinggi berada di Kabupaten Manokwari yaitu 13.291 penduduk.

Berdasarkan Gambar II.115 diketahui bahwa penduduk Papua Barat lulusan SMP ke bawah banyak bekerja di sektor pertanian. Pergeseran lapangan kerja mulai terlihat pada penduduk lulusan SMA yang beralih dari pekerjaan sektor pertanian ke sektor jasa masyarakat, sosial dan personal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Papua Barat dapat dicapai dengan menaikkan tingkat pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan nilai tambah pertanian dan sektor lainnya yang memerlukan keterampilan yang baik.

Gambar II.114 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Papua Barat Tahun 2022

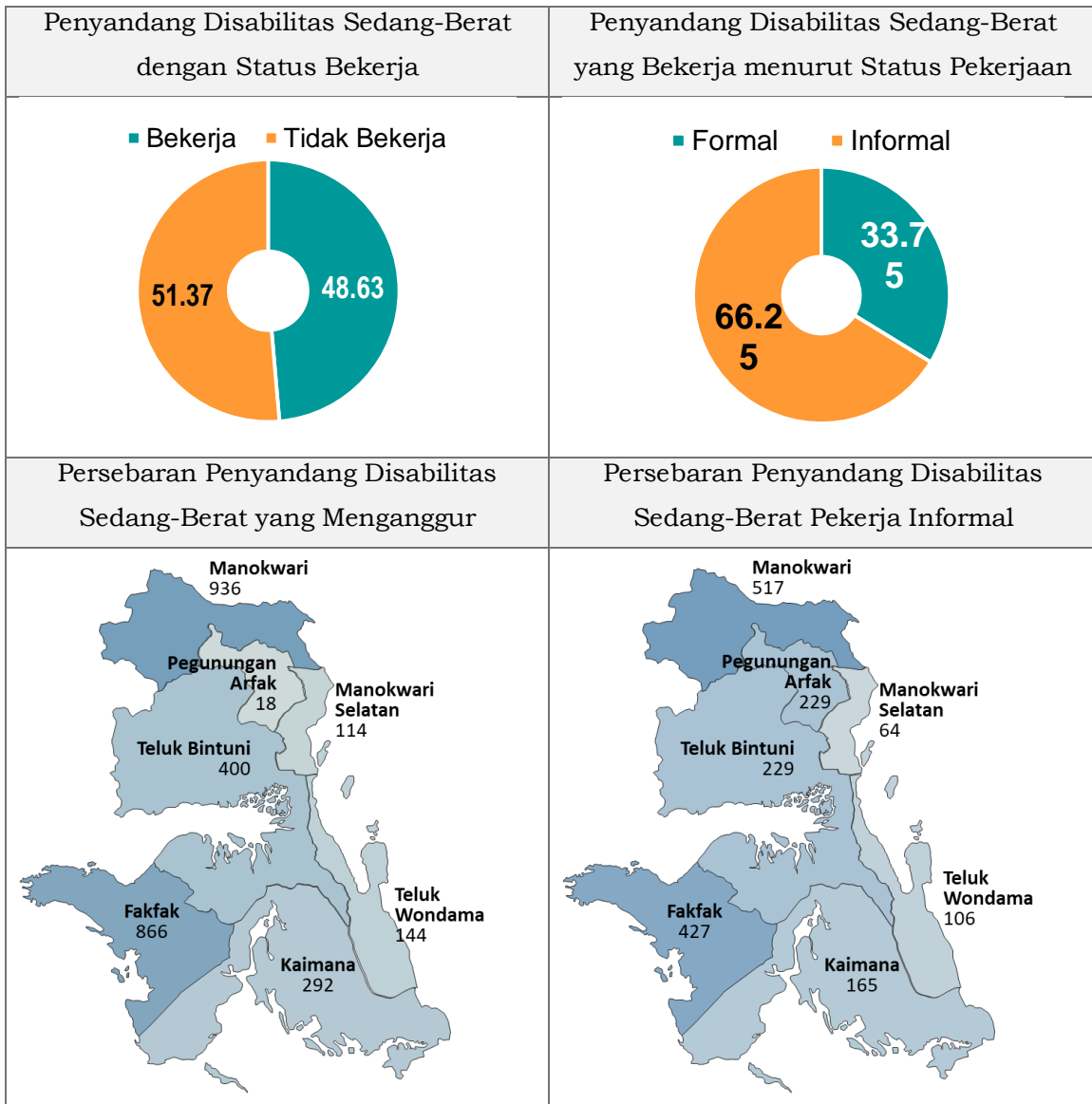


Sumber: Sakernas 2022 dalam SEPAKAT

2.1.4.2.1.4 Pekerja Disabilitas

Gambar II.116 menunjukkan kondisi pekerja disabilitas di Papua Barat berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.116 diketahui bahwa Dari total 5.392 penduduk disabilitas sedang dan berat yang berusia 15 tahun ke atas, diantaranya terdapat 2.770 (51,37%) yang tidak bekerja. Mereka yang tidak bekerja paling banyak di Kabupaten Manokwari dan Kab Fakfak. Selain itu, dari total 2.622 penduduk disabilitas sedang dan berat yang bekerja berusia 15 tahun ke atas, diantaranya terdapat 1.737 (66,25%) yang bekerja di sektor informal. Sektor informal merupakan pekerjaan yang rentan dan berisiko terhadap guncangan ekonomi dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Manokwari dan Fakfak.

Gambar II.115 Kondisi Pekerja Disabilitas di Papua Barat



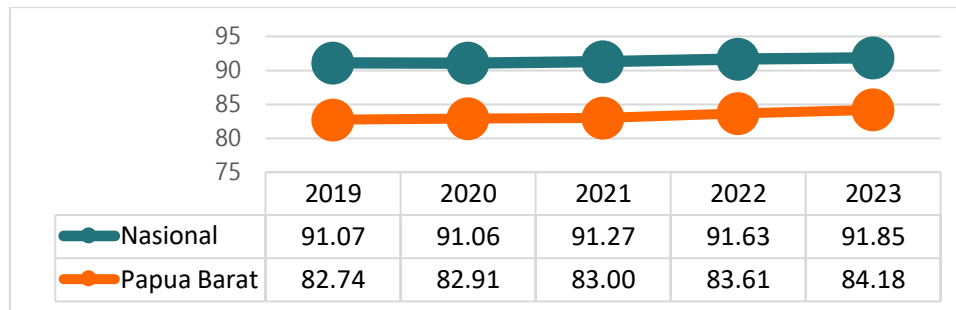
Sumber: Regsosek 2022 (dalam SEPAKAT)

2.1.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.4.2.2.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang menekankan pada status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah.

Gambar II.116 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



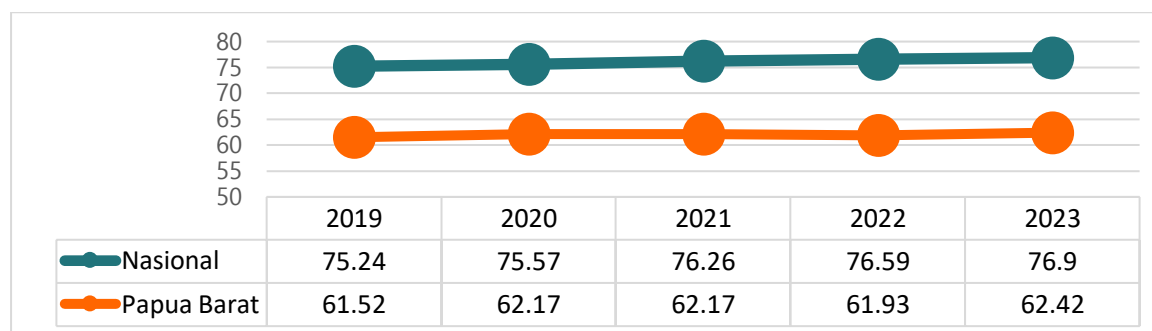
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

Berdasarkan Gambar II.117, diketahui bahwa IPG Provinsi Papua Barat dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2022 IPG Provinsi Papua Barat sebesar 83,61 naik sebesar 0,57 atau sebesar 84,18. IPG Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 84,18 di bawah IPG Nasional sebesar 91,85.

2.1.4.2.2.2 Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender tidak lepas dari adanya pemberdayaan gender. Pemberdayaan gender adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar. Tujuan pemberdayaan gender adalah untuk menghasilkan persamaan derajat antara laki-laki dan Perempuan. Tinjauan pemberdayaan gender dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

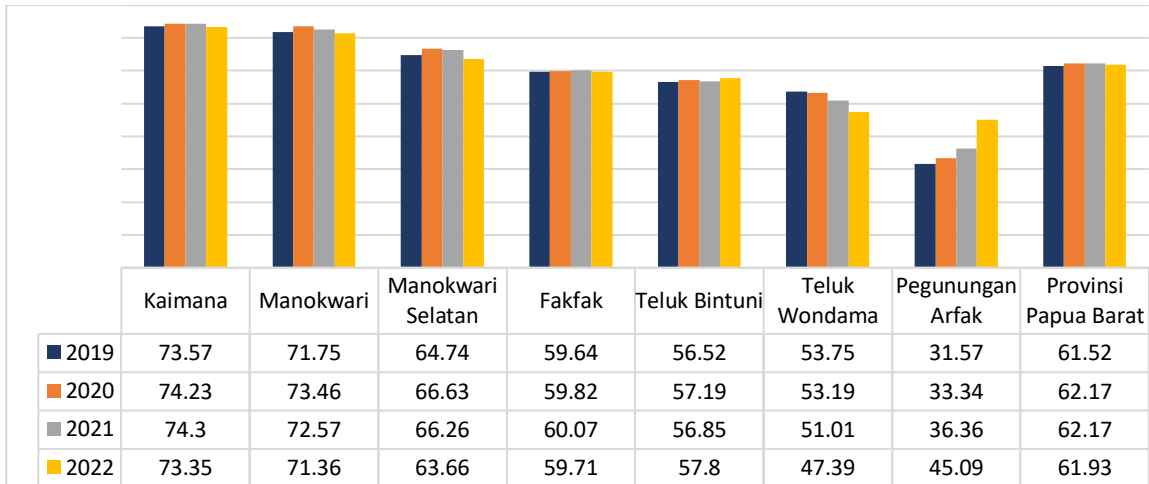
Gambar II.117 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

IDG di Papua Barat memperlihatkan ilustrasi dan data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan nasional. IDG Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 62,42 di bawah IDG Nasional sebesar 76,9. Jika dipilah berdasarkan kabupaten, peningkatan IDG pada tahun 2022 terjadi pada Kabupaten Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak. Gambar II.118 memperlihatkan capaian IDG Provinsi Papua Barat menurut kabupaten dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022.

Gambar II.118 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2022

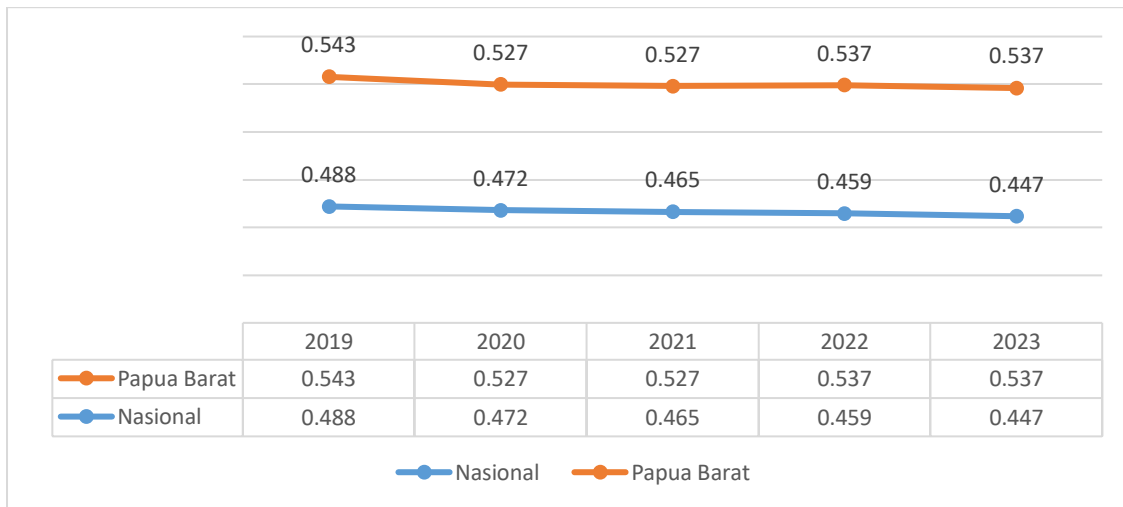


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.1.4.2.2.3 Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Gambar II.119 Perbandingan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS RI, 2024

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa IKG Provinsi Papua Barat tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 dengan tahun 2023. IKG Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar 0,537 lebih tinggi dari nasional sebesar 0,447.

Tabel II.67 menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten di Papua Barat 2021-2023. Berdasarkan Tabel II.67 diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 0,5367, turun sebesar 0,0006 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan pada dimensi Pemberdayaan menjadi faktor utama menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua Barat yakni pada

dimensi Kesehatan Reproduksi, Keterwakilan di Legislatif, Partisipasi pada pendidikan SMA, hingga pada partisipasi Perempuan pada Angkatan kerja.

Tabel II.67 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten di Papua Barat 2021-2023

Kabupaten	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
	2021	2022	2023
Fakfak	0.492	0.533	0.524
Kaimana	0.471	0.532	0.511
Teluk Wondama	0.593	0.592	0.587
Teluk Bintuni	0.515	0.571	0.564
Manokwari	0.478	0.480	0.485
Manokwari Selatan	0.500	0.494	0.480
Pegunungan Arfak	0.689	0.645	0.651

Sumber: BPS RI, 2024

2.1.4.2.2.4 Partisipasi Perempuan di Dunia Kerja

Tingkat peran perempuan dalam dunia kerja, diukur melalui Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten (Persen). Secara provinsi, persentase partisipasi perempuan dalam dunia kerja pada bidang-bidang tersebut mengalami kenaikan hingga tahun 2022 yaitu 41,61% dari 35,92% pada tahun 2019. Kabupaten Fakfak dan Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan kenaikan persentase partisipasi Perempuan hingga tahun 2022 yaitu masing-masingnya mencapai 47,33% dan 45,23%. Selain kedua kabupaten tersebut, 5 kabupaten lainnya mengalami penurunan persentase partisipasi Perempuan dalam dunia kerja. Adapun persentase pada masing-masing kabupaten ditunjukkan pada Tabel II.68.

Tabel II.68 Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten

Kabupaten	2019	2020	2021	2022
Fakfak	40.67	40.65	44.56	47.33
Kaimana	41.84	44.31	50.43	46.15
Teluk Wondama	39.21	36.72	32.79	27.6
Teluk Bintuni	38.88	41.3	40.98	38.42
Manokwari	35.85	40.72	41.47	36.15
Manokwari Selatan	35.74	43.69	41.54	33.01
Pegunungan Arfak	19.26	20.59	25.21	45.23
Papua Barat	35.92	38.28	39.57	41.61

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023

2.1.4.2.2.5 Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan Perempuan di parlemen menjadi salah satu variabel dalam pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Data terkait keterlibatan perempuan dalam parlemen menggunakan data dari masing-masing sekretariat DPR, DPRD per akhir tahun dan terdapat

kemungkinan terkait perubahan di tahun tertentu sebagai akibat dari sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) setelah hasil pemilu. Tabel II.69 menunjukkan keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Papua Barat. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR dan DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II.

Tabel II.69 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Barat, 2019-2022

Kabupaten	2019	2020	2021	2022
Fakfak	10	10	10	10
Kaimana	20	20	20	20
Teluk Wondama	10	10	10	10
Teluk Bintuni	10	10	10	10
Manokwari	28	28	28	28
Manokwari Selatan	20	20	20	20
Pegunungan Arfak	5	5	5	5
Papua Barat	14.29	14.29	14.29	14.29

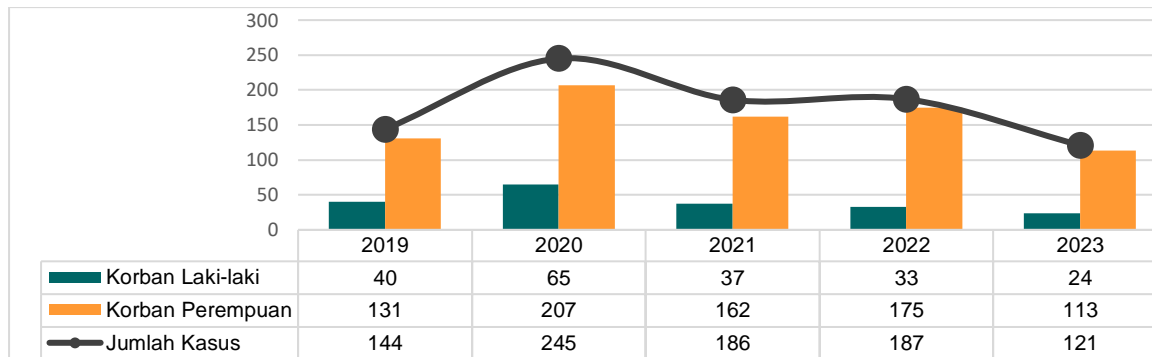
Sumber: BPS RI, 2023

Berdasarkan Tabel II.69, diketahui bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, tidak ada penambahan jumlah keterwakilan perempuan. Hal tersebut terjadi karena keterlibatan perempuan di parlemen bergantung terhadap periodisasi pemilu. Keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi berasal dari Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 28%. Sebaliknya, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan persentase keterlibatan terendah yaitu 5%.

2.1.4.2.2.6 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah: (a) mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender; serta (c) memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

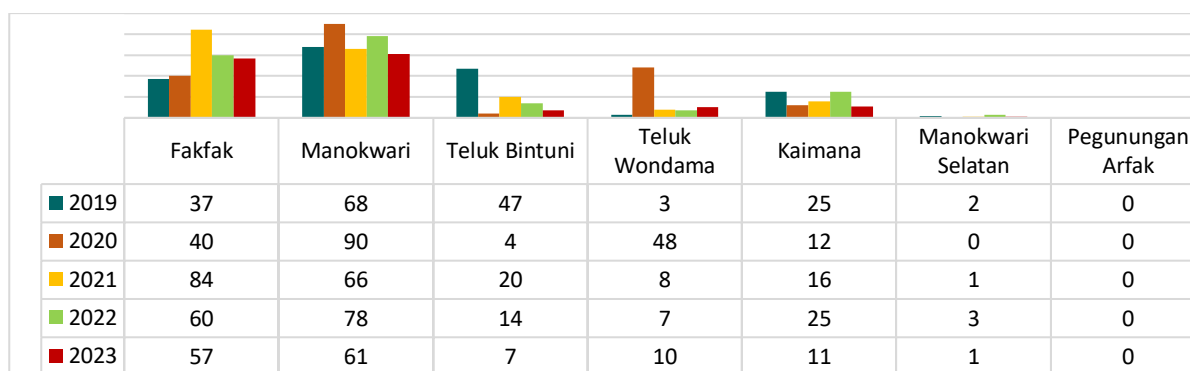
Gambar II.120 Sebaran Jumlah Kejadian/Kasus Kekerasan di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023



Sumber: SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)

Gambar II.121 menunjukkan sebaran jumlah kejadian/kasus kekerasan di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023. Berdasarkan Gambar II.121 diketahui bahwa di Provinsi Papua Barat telah terjadi 121 kasus kekerasan psikis dan seksual yang dilaporkan, dengan 24 laki-laki dan 113 perempuan menjadi korban. Korban paling banyak berasal dari usia anak yakni sebanyak 67 kasus dengan 36 korban masih berada di jenjang pendidikan SMA, 14 anak masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP dan SD sementara 17 anak masih belum bersekolah. Adapun kasus paling tinggi dilaporkan dari Kabupaten Manokwari dan Fakfak, hal ini berkaitan dengan ketersediaan layanan di kabupaten tersebut. Untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan, dan anak dari kasus kekerasan pemerintah daerah perlu secara konsisten memfasilitasi keberadaan layanan perlindungan anak dan perempuan dengan pendirian UPTD PPA, PATBM dan menyediakan layanan hukum, layanan psikologis, dan layanan medikolegal gratis bagi korban kekerasan salah satunya dengan memastikan ketersediaan pendamping dan pemberi bantuan hukum, psikolog.

Gambar II.121 Sebaran Jumlah Kejadian/Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 (kasus)



Sumber: SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)

Berdasarkan Tabel II.70 diketahui bahwa capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Fakfak dengan capaian persentase masing masing capaian 60,75 (IPA), 55,74 (IPHA) dan 78,84 (IPKA). Kabupaten Fak-fak juga memiliki persentase tertinggi pada capaian klaster II Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (70,70), Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (32,74), serta Klaster V Perlindungan

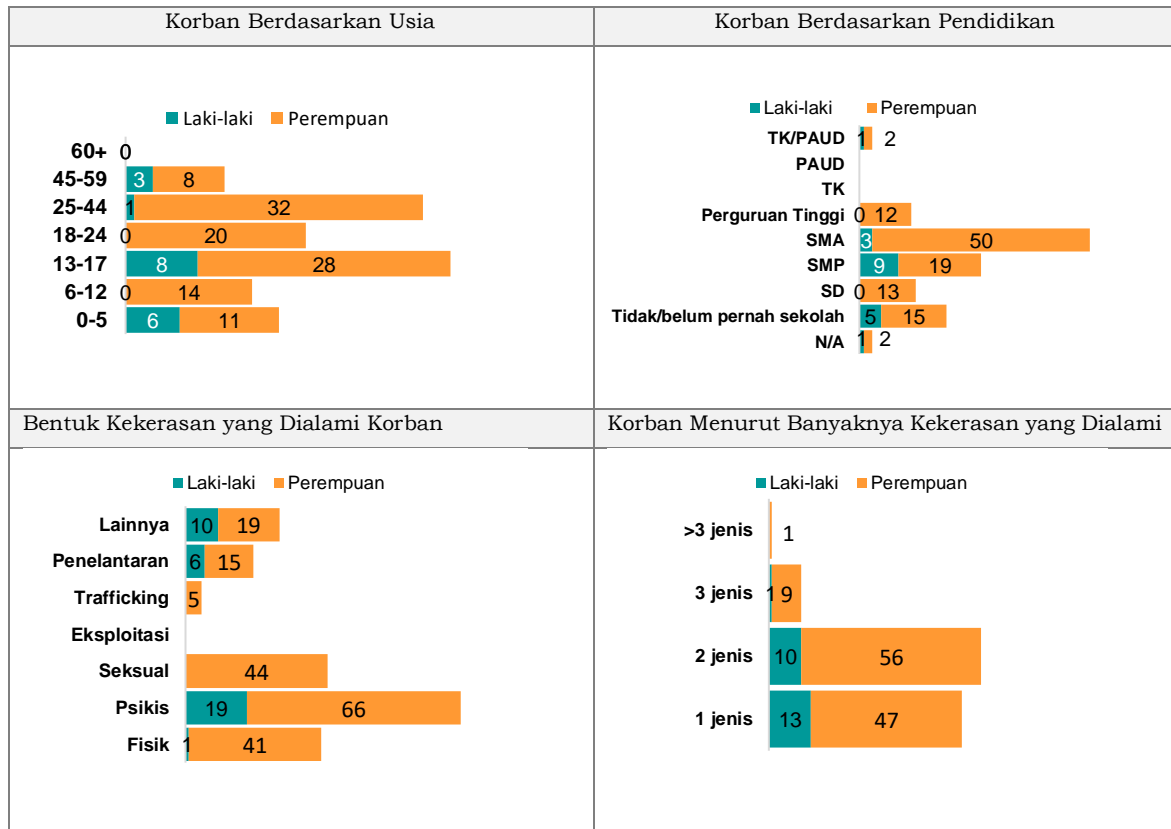
Khusus (78,34). Sementara itu, capaian terendah pada IPA (43,90) dan IPHA (43,42) di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak juga memiliki capaian persentase terendah pada kedua klaster penyusun IPA yaitu Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) (29,25) dan Klaster IV Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (26,06).

Tabel II.70 Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Kabupaten	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
Klaster I Hak Sipil & Kebebasan	47,65	35,2	40,89	46,4	46,37	40,67	29,25
Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	69,84	70,81	72,82	65,16	65,81	66,62	66,83
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	70,7	63,19	51,24	68,46	65,75	70,35	48,32
Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	32,74	30,44	26,99	27,15	29,34	27,03	26,06
Klaster V Perlindungan Khusus	78,34	46,8	41,78	73,41	71,21	45,25	45,25
IPA	60,75	49,77	47,47	56,98	56,53	50,02	43,90
IPHA	55,74	50,51	49,02	52,3	52,35	51,63	43,42
IPKA	78,84	48	39,39	71,8	70,54	43,01	38,37

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022, Publikasi oleh Kementerian PPPA yang diolah dari Data BPS

Gambar II.122 Karakteristik Korban Kekerasan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023 (orang)



Sumber: SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id)

Berdasarkan data-data tersebut, pada klaster I hak anak, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan intervensi dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan melalui peningkatan ruang partisipasi bagi anak melalui pengembangan forum anak mulai dari tingkat kampung hingga provinsi, selain itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kaimana merupakan kabupaten dengan pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan terendah di Papua Barat. Pada Klaster III daerah dapat memfokuskan pada penanganan stunting dan pemenuhan gizi anak dan ibu menyusui yang dimulai dari tingkat kampung, sehingga kampung dapat mengalokasikan dana untuk menekan angka stunting. Sementara perhatian pada klaster V dapat dilakukan dengan memperkuat layanan perlindungan anak melalui pengembangan UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Daerah bagi Perlindungan Perempuan dan Anak), dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat).

2.1.4.2.2.7 Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan

Perbandingan APM di tingkat SD, SMP, dan SMA dipilah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan pada Tabel II.71. Diketahui bahwa, pada tahun 2018 dan 2019 APM laki-laki lebih tinggi daripada APM perempuan, namun dua tahun setelahnya yaitu tahun 2020-2021, APM perempuan menunjukkan peningkatan yang bisa menyandingi, atau bahkan melebihi APM laki-laki. Pola tersebut berlaku di semua jenjang pendidikan.

Tabel II.71 APM SD, SMP dan SMA berdasarkan jenis kelamin di Papua Barat, 2018-2021

Kategori	2018	2019	2020	2021
APM tingkat Pendidikan SD				
Perempuan	92.8	93.04	93.38	94.07
Laki-laki	94.47	94.77	94.29	94.04
APM tingkat Pendidikan SMP				
Perempuan	68.62	68.88	72.56	71.19
Laki-laki	69.57	70.86	68.56	69.93
APM tingkat Pendidikan SMA				
Perempuan	60.05	64.97	65.52	65.48
Laki-laki	65.69	61.57	61.88	61.72

Sumber: BPS Papua Barat dalam Statistik Kesejahteraan Masyarakat

Tabel II.72 Perbandingan APS Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Selisih
5-6 tahun	24.09	21.69	2.40
7-12 tahun	96.23	96.64	-0.41
13-15 tahun	95.26	96.27	-1.02
16-18 tahun	79.40	74.95	4.45

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2023

Data terpilah kabupaten pasca pemekaran provinsi yang tersedia adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2022 yang ditampilkan pada Tabel II.72. Diketahui bahwa pada jenjang pendidikan SMP dan SMA (usia 7-12 dan 13-15 tahun), perempuan memiliki APS yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

2.1.4.2.3 Pangan

2.1.4.2.3.1 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung pangan merupakan penggambaran potensi sumber daya pangan tersedia di alam atau ekosistem dalam hubungannya dengan kebutuhan pangan bagi kehidupan. Secara prinsip ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan beragam manfaat bagi makhluk hidup.

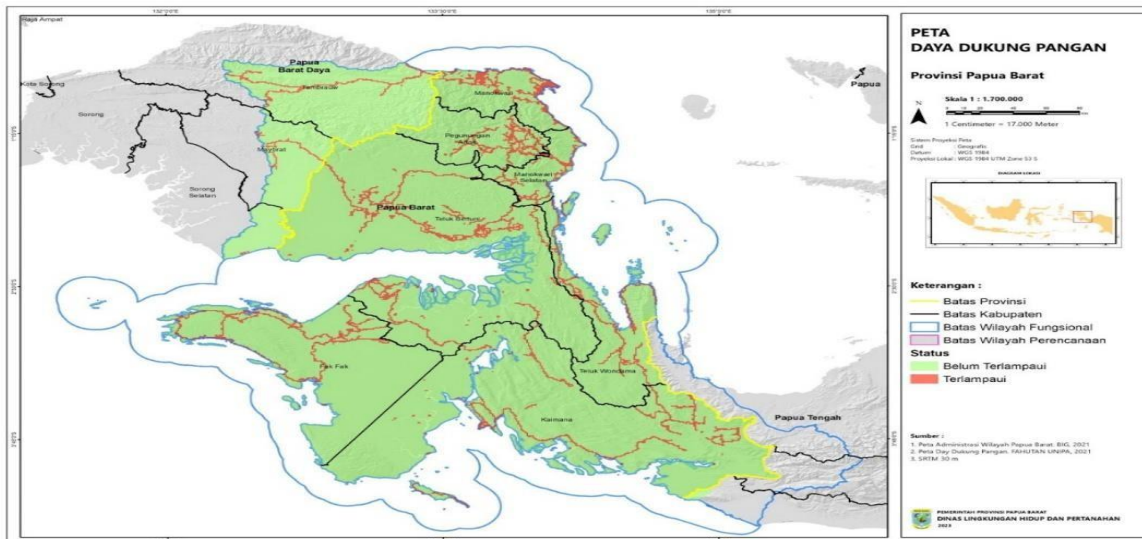
Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia. Jenis jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel II.73 Daya Dukung Pangan Papua Barat

Keterangan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Batas Wilayah Fungsional	5.563.054	465.648	6.028.703
Batas Wilayah Perencanaan	5.563.054	465.648	6.028.703
Fakfak	904.331	69.969	974.300
Kaimana	1.695.048	89.458	1.784.506
Manokwari	222.832	53.363	276.195
Manokwari Selatan	152.949	30.669	183.618
Pegunungan Arfak	284.169	45.623	329.792
Teluk Bintuni	1.871.960	123.930	1.995.890
Teluk Wondama	431.766	52.637	484.403
TOTAL	6.535.592	508.052	7.043.644

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Gambar II.123 Peta Daya Dukung Pangan Papua Barat



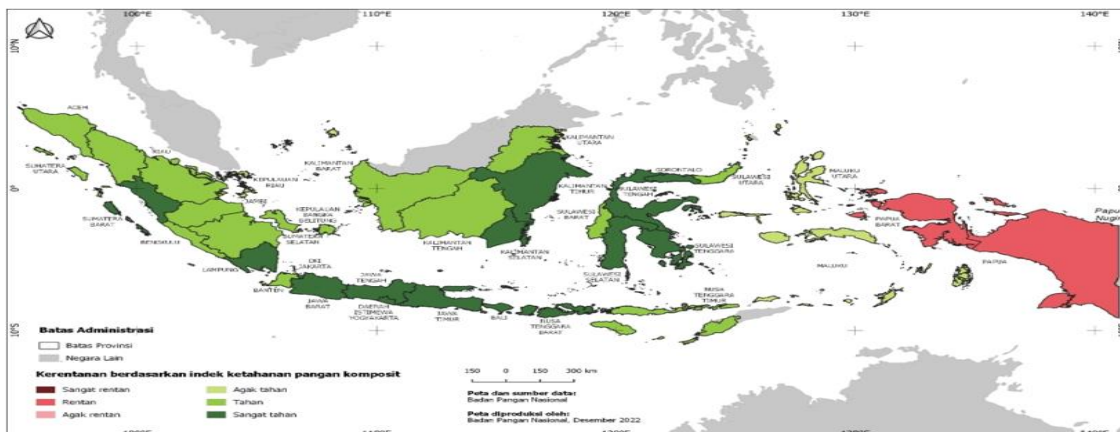
Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana memiliki potensi daya dukung pangan kriteria tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya daya dukung pangan kriteria rendah seperti halnya pada kriteria tinggi kedua wilayah tersebut memiliki daya dukung pangan yang tinggi lebih tinggi seperti halnya daya dukung air. Beberapa potensi pangan yang dimiliki berupa sagu, buah-buahan, sayuran dan ubi-ubian yang dihasilkan dari hutan juga dari wilayah sekitar pemukiman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kedua wilayah ini sangat tinggi, baik terkait keberadaan hutan sebagai penyedia pangan juga keberadaan lahan pertanian. Kondisi tersebut menjadi faktor penunjang pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang ada.

2.1.4.2.3.2 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan suatu daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Gambar II.124 Peta Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pangan Nasional dalam "Indeks Ketahanan Pangan 2022"

Berdasarkan IKP tahun 2018-2021 diketahui bahwa Papua Barat termasuk dalam wilayah rentan pangan prioritas 2 dan menjadi prioritas 1 pada tahun 2022 yang sangat bergantung pada supply pangan dari wilayah lain / sentra produksi pangan. Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Gambar II.125, diketahui bahwa Provinsi Papua Barat termasuk dalam daerah rentan pangan.

Berdasarkan Tabel II.74, diketahui bahwa IKP Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 49,40 namun kembali turun hingga 47,95 pada tahun 2023 dan menjadi provinsi dengan kategori prioritas 1. Secara nasional, Papua Barat termasuk dalam provinsi dengan IKP paling rendah. Rendahnya nilai IKP disebabkan oleh beberapa faktor seperti produksi pangan wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Jika ditinjau secara provinsi, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Wondama menjadi kabupaten yang berturut-turut berada pada kategori prioritas 1 sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Perlu adanya peningkatan IKP untuk kedua kabupaten dengan IKP terendah dengan melakukan sinergi lintas sektor baik dari pusat hingga daerah serta kerja sama antar pemangku kepentingan untuk membangun sistem pangan berkelanjutan.

Tabel II.74 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten dan Provinsi Papua Barat

Wilayah		Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Papua Barat	IKP (indeks)	N/A	30,12	49,40	46,05	45,92	47,95	
	Kategori	Prioritas 2					Prioritas 1	
	Interpretasi	Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi						
	Indeks Ketersediaan	N/A	28,23	14,83	14,83	11,81	13,46	
	Indeks Keterjangkauan	N/A	60,74	59,25	59,25	62,11	63,98	
	Indeks Pemanfaatan	N/A	54,59	56,29	56,29	56,17	58,29	
Kabupaten								
1	Fakfak	IKP (indeks)	39,29	47,74	45,51	45,06	47,32	47,32
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
2	Kaimana	IKP (indeks)	45,54	46,40	46,06	45,73	47,12	47,12
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
3	Teluk Wondama	IKP (indeks)	33,22	27,34	33,07	33,06	32,93	32,93
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
4		IKP (indeks)	37,23	41,47	47,09	38,58	40,88	40,88

Wilayah		Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Teluk Bintuni	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
5	Manokwari	IKP (indeks)	61,41	68,80	75,42	72,11	66,85	66,85
		Kategori	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 5	Prioritas 5	Prioritas 4	Prioritas 4
6	Manokwari Selatan	IKP (indeks)	54,30	36,33	65,78	65,31	67,12	67,12
		Kategori	Prioritas 3	Prioritas 1	Prioritas 4	Prioritas 4	Prioritas 4	Prioritas 4
7	Pegunungan Arfak	IKP (indeks)	30,22	23,40	29,05	29,73	32,87	32,87
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen “Indeks Ketahanan Pangan 2021-2022”

2.1.4.2.3.3 Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari

Angka kecukupan konsumsi kalori / energi (AKE) untuk penduduk Indonesia adalah 2.150 kkal per kapita sehari, sedangkan angka kecukupan konsumsi protein (AKP) adalah 50 gram per kapita sehari. Angka kecukupan tersebut menunjukkan banyak kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap penduduk dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif. Rata-rata konsumsi Protein dan Kalori Per Kapita Sehari di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Tabel II.75.

Tabel II.75 Rata-rata Konsumsi Protein dan Kalori Per Kapita Sehari di Papua Barat 2018-2023

No	Indikator	Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021	Maret 2022	Maret 2023
1	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (gram)						
	a. Papua Barat	56,48	56,6	55,16	54,82	55,32	54,62
	b. Indonesia	62,19	62,13	61,98	62,28	62,21	62,33
2	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (kkal)						
	a. Papua Barat	1944,26	1922,27	1902,71	1911,04	1.879,75	1.859,62
	b. Indonesia	2147,09	2120,52	2112,06	2143,21	2.079,09	2.087,64

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi”

Apabila ditinjau berdasarkan kecukupan kalori/energi dan protein, pada tahun 2018-2023 rata-rata konsumsi kalori masyarakat Papua Barat masih belum mencapai standar kecukupan konsumsi harian yaitu masih berada di bawah 2.150 kkal per kapita sehari. Sebaliknya, rata-rata konsumsi protein per kapita telah memenuhi standar hingga pendataan pada Maret 2023 yaitu lebih dari 50 gram per kapita sehari.

Data konsumsi pangan di Papua Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di Papua Barat masih bergantung pada sumber karbohidrat utama dari padi-padian serta protein dari hasil laut, dengan kontribusi protein hewani lainnya yang

relatif lebih rendah (lihat Tabel II.76). Padi-padian menyumbang 41,13% dari total kalori harian (764,89 kkal) dan 32,92% dari total protein (17,98 gram). Sumber protein utama lainnya berasal dari ikan, udang, cumi, dan kerang dengan kontribusi 28,62% terhadap total protein (15,63 gram), menunjukkan bahwa hasil laut memiliki peran penting dalam pola konsumsi masyarakat Papua Barat.

Tabel II.76 Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Komoditas Makanan, Provinsi Papua Barat, Maret 2023

No	Kelompok Komoditas Makanan	Total Konsumsi		Distribusi Konsumsi	
		Kalori (kkal)	Protein (gram)	Kalori (%)	Protein (%)
1	Padi-padian	764,89	17,98	41,13	32,92
2	Umbi-umbian	132	0,78	7,10	1,43
3	Ikan/ udang/ cumi/ kerang	83,17	15,63	4,47	28,62
4	Daging	67,47	3,59	3,63	6,57
5	Telur dan susu	41,39	2,2	2,23	4,03
6	Sayur-sayuran	41,35	2,98	2,22	5,46
7	Kacang-kacangan	30,52	3,04	1,64	5,57
8	Buah-buahan	48,29	0,54	2,60	0,99
9	Minyak dan Kelapa	291,18	0,07	15,66	0,13
10	Bahan minuman	94,66	0,65	5,09	1,19
11	Bumbu-bumbuan	7,33	0,28	0,39	0,51
12	Konsumsi lainnya	39,45	0,83	2,12	1,52
13	Makanan dan minuman jadi	217,93	6,05	11,72	11,08
Total		1.859,62	54,62	100,00	100,00

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen “Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi”

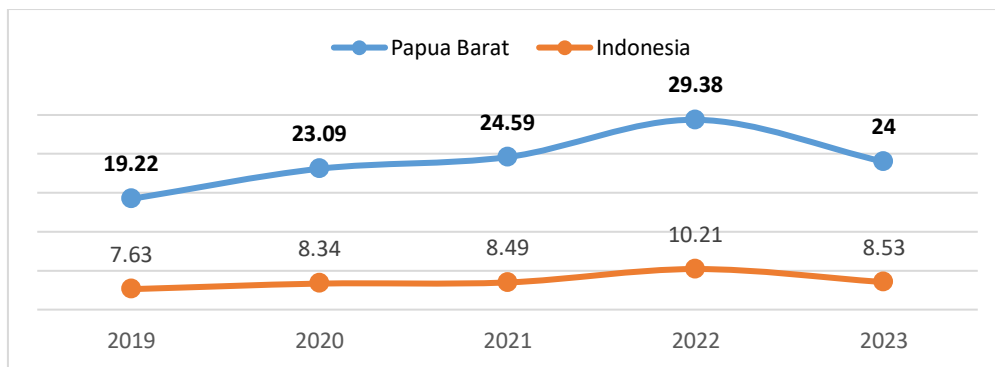
Kelompok daging dan telur/susu masing-masing menyumbang 6,57% dan 4,03% terhadap total protein, yang relatif lebih rendah dibandingkan ikan dan hasil laut. Konsumsi sayur-sayuran dan kacang-kacangan juga berkontribusi terhadap asupan protein, masing-masing sebesar 5,46% dan 5,57%. Sementara itu, buah-buahan hanya memberikan kontribusi kecil terhadap total kalori (2,6%) dan protein (0,96%). Minyak dan kelapa menjadi sumber energi yang cukup signifikan dengan sumbangan 15,66% terhadap total kalori, meskipun kandungan proteinnya sangat rendah (0,13%). Makanan dan minuman jadi juga menyumbang 11,72% terhadap total kalori dan 11,08% terhadap protein.

2.1.4.2.3.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) diartikan sebagai estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketidakcukupan konsumsi pangan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana

seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Gambar II.125 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS RI, 2024

Data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Papua Barat dan Indonesia tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa tingkat ketidacukupan konsumsi pangan di Papua Barat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2019, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Papua Barat mencapai 19,22%, jauh di atas angka nasional yang hanya 7,3%. Meskipun mengalami penurunan hingga 19,22% pada 2019, angka tersebut kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 29,38%, sebelum turun menjadi 24% pada 2023. Di sisi lain, angka nasional relatif stabil berkisar antara 7,63% hingga 10,21%. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Papua Barat masih menjadi tantangan besar dibandingkan nasional, dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap ketidacukupan konsumsi pangan.

2.1.4.2.4 Pertanian

Ketersediaan tanah atau lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai suatu rencana dasar memberikan gambaran terkait potensi lahan dan arahan untuk kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan adanya berbagai jenis status (penguasaan) tanah yang dirunutkan sebagai berikut:

Tanah negara bebas	Tanah negara yang telah diperuntukkan
Tanah negara yang dibebani, termasuk:	Tanah negara yang dikuasai penduduk
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH	Tanah negara yang dikuasai instansi
Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA)	Hak milik adat
Hutan Suaka Alam (HSA)	Hak guna usaha
	Hak pakai

Hutan Lindung	Hak pengelolaan
Hutan Produksi	Hak guna bangunan
Kontrak Karya	Hak milik
Kuasa Pertambangan	

Permasalahan yang sangat nampak terkait pertanahan di Provinsi Papua Barat adalah ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal tersebut dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis).

Pola kepemilikan lahan di Provinsi Papua terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau Ondoafi. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Tanah Milik, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu. Tanah Milik dengan Hak Pakai, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindahtangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal tersebut dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.1.4.2.5 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting di Provinsi Papua Barat, khususnya ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan Tabel II.79, IKLH Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 memiliki nilai 84,31 yang termasuk dalam klasifikasi “baik” dan merupakan provinsi dengan nilai IKLH tertinggi ke-2 secara nasional.

Berdasarkan data IKLH dan komponen penyusunnya di Provinsi Papua Barat tahun 2019-2023, terlihat bahwa IKLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Papua Barat

mengalami penurunan signifikan pada 2020, didorong oleh memburuknya kualitas air dan air laut. Namun, IKLH kembali meningkat hingga 83,31 pada 2023. IKA dan IKAL sempat menurun pada tahun 2020 tetapi menunjukkan perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, IKU terus meningkat, dan IKTL tetap stabil di angka 100. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, kualitas lingkungan hidup di Papua Barat menunjukkan tren pemulihan, dengan perlunya perhatian lebih pada peningkatan kualitas air dan air laut.

Tabel II.77 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Barat, 2019-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	89,96	78,65	81,80	84,22	83,31
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,89	52,22	54,44	62,00	59,52
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	80,91	70,83	81,12	89,30	86,83
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,64	94,57	94,02	95,32	95,87
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Untuk mempertahankan nilai IKLH yang tinggi, serta meningkatkan nilai pada aspek tertentu (secara spesifik di aspek kualitas air untuk Provinsi Papua Barat), diperlukan upaya lebih dalam strategi perbaikan kualitas lingkungan dan memfokuskan pada perbaikan indikator-indikator strategis. Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan intensitas pemantauan kualitas lingkungan agar data yang diperoleh untuk peningkatan kedepannya merupakan data yang lebih valid dan representatif terhadap mutu lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat. Selain nilai IKLH, terdapat beberapa aspek lainnya yang ditentukan sebagai indikator kinerja daerah provinsi. Berikut adalah indikator-indikator kinerja aspek lingkungan hidup.

Berdasarkan Tabel II.77, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian yang dilakukan oleh bidang lingkungan hidup dari tahun ke tahun, terutama dalam upaya penanganan sampah. Peningkatan upaya ini perlu diteruskan supaya lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat terus terjaga pelestariannya. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti prasarana pengelolaan lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pengembangan TPA, pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem terpadu, pengelolaan limbah industri dan pertambangan, serta pengembangan sistem drainase perlu diupayakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup dan mendukung komitmen Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang peka terhadap keadaan lingkungan hidup dan alam di sekitarnya.

Tabel II.78 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Papua Barat

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio sungai yang dipantau baku mutunya	-	-	24,00	20,14	-
2	Rasio udara yang dipantau	-	-	23,97	37,42	-

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
3	Rasio tempat pembuangan sampah sementara		-	-	-	27,00
4	Persentase penanganan sampah	-	25,00	55,00	74,12	75,64
5	Cakupan penghijauan di wilayah sumber air	-	4,00	-	-	-
6	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	-	-	50,00	-	-
7	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	-	-	50,00	50,00
8	Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	-	-
9	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	-	-	-	22,22	40,00
10	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL	78,00	82,00	73,52	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, 2022

Gambar II.126 Skenario Lingkungan Hidup Indonesia dan Kuadran Keberlanjutan (Papua Barat Berada pada Kuadran II)



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, kondisi kualitas lingkungan sangat baik di Provinsi Papua Barat seharusnya dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Provinsi Papua Barat masih memiliki koefisien Gini sebesar 0,80, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,70 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan sumber daya alam masih merupakan isu yang signifikan di wilayah ini. Kondisi ini tercermin dari tingkat kemiskinan dengan persentase penduduk miskin berkisar antara 21% hingga 27% selama periode 2012-2022. Artinya bahwa masyarakat miskin terus bertambah seiring berkembangnya wilayah. Tingginya tingkat kemiskinan disebabkan oleh beberapa

faktor, termasuk penambahan penduduk akibat pemekaran wilayah, produktivitas penduduk yang masih rendah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta program pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dalam skenario lingkungan hidup Indonesia tahun 2055 pada kuadran II, yang menggambarkan kondisi Papua Barat yang underutilized yaitu penurunan kesejahteraan masyarakat, sementara lingkungan hidup dan sumber daya alam masih melimpah (Gambar II.127).

2.1.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dalam hal ini, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Indikator kinerja pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dijelaskan dalam subbab ini mencakup; (1) persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran; serta (2) persentase Penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan.

Tabel II.79 Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
PENDUDUK 0-17 TAHUN						
1	Fakfak	83,65	88,47	87,13	90,20	93,10
2	Kaimana	69,18	68,60	69,17	70,47	72,99
3	Teluk Wondama	73,04	65,25	61,26	68,55	70,88
4	Teluk Bintuni	78,46	76,03	75,21	84,80	80,89
5	Manokwari	80,01	77,11	80,44	86,57	86,99
6	Manokwari Selatan	68,99	30,44	73,71	73,58	86,66
7	Pegunungan Arfak	21,35	23,15	47,72	45,35	39,24
Papua Barat		77,37	74,23	77,76	79,34	80,46
PENDUDUK 0-4 TAHUN						
1	Fakfak	62,72	71,03	71,65	72,65	81,35
2	Kaimana	47,18	43,47	46,77	45,53	48,17
3	Teluk Wondama	54,98	47,56	39,26	43,78	48,66
4	Teluk Bintuni	64,57	51,62	55,31	67,11	58,22
5	Manokwari	63,77	60,95	67,59	69,51	73,04
6	Manokwari Selatan	59,68	53,61	56,35	60,02	74,77
7	Pegunungan Arfak	20,62	13,24	31,22	35,38	37,35
Papua Barat		59,78	54,49	60,14	60,35	64,18

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.58 menunjukkan persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Papua Barat tahun 2020-2024. Berdasarkan Tabel II.58 diketahui bahwa angka kepemilikan akta kelahiran di Papua Barat naik dari 77,37% pada 2020 menjadi 80,46% pada 2024. Kabupaten Fakfak memiliki persentase tertinggi dengan peningkatan dari 83,65% (2020) menjadi 93,1% (2024), menunjukkan pencatatan sipil yang baik. Manokwari juga mengalami kenaikan signifikan dari 80,01% menjadi 86,99%. Sementara itu, Pegunungan Arfak memiliki angka terendah meskipun meningkat dari 21,35% (2020) menjadi 39,24% (2024), mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pencatatan kelahiran di wilayah tersebut. Secara umum, data ini menunjukkan kemajuan dalam pencatatan kelahiran di Papua Barat, namun masih terdapat kesenjangan antar daerah, terutama di wilayah terpencil seperti Pegunungan Arfak yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan.

Data persentase penduduk usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dari 59,78% pada 2020 menjadi 64,18% pada 2024. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan kepemilikan akta kelahiran pada kelompok usia 0-17 tahun, yang mengindikasikan tantangan dalam pencatatan kelahiran bagi bayi dan balita. Dalam hal ini, masih diperlukan upaya lebih lanjut, terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan kelahiran.

Tabel II.80 Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Uraian		2020	2021	2022
Penduduk 5 Tahun Ke Atas				
1	Fakfak	90,87	95,34	96,61
2	Kaimana	82,88	84,24	89,79
3	Teluk Wondama	86,94	88,24	95,01
4	Teluk Bintuni	94,39	92,33	97,56
5	Manokwari	85,20	90,95	96,92
6	Manokwari Selatan	90,61	88,92	96,04
7	Pegunungan Arfak	53,70	52,47	64,17
Papua Barat		88,84	90,09	94,79
Penduduk 17 Tahun Ke Atas				
1	Fakfak	91,35	95,55	97,56
2	Kaimana	85,66	85,20	92,87
3	Teluk Wondama	87,22	90,09	96,44
4	Teluk Bintuni	95,78	93,06	97,95
5	Manokwari	85,09	92,35	97,74
6	Manokwari Selatan	90,88	90,31	96,77
7	Pegunungan Arfak	54,18	50,83	63,33
Papua Barat		89,44	91,17	95,44

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016-2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.80 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2020-2022. Berdasarkan Tabel II.82 diketahui bahwa terdapat tren peningkatan penduduk berusia 5 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas yang memiliki NIK di Provinsi Papua Barat dari tahun 2020 hingga 2022. Pada kelompok penduduk 5 tahun ke atas, persentase kepemilikan NIK meningkat dari 88,84% pada 2020 menjadi 94,79% pada 2022. Teluk Bintuni memiliki angka tertinggi (97,56%), sedangkan Pegunungan Arfak memiliki angka terendah (64,17%), meskipun mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Pada kelompok penduduk 17 tahun ke atas, yang umumnya sudah memiliki KTP, terjadi peningkatan dari 89,44% (2020) menjadi 95,44% (2022). Fakfak dan Teluk Bintuni memiliki persentase tertinggi di atas 97%, sementara Pegunungan Arfak tetap terendah (63,83%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan NIK di Papua Barat semakin meningkat, namun masih terdapat disparitas antar daerah, terutama di wilayah terpencil seperti Pegunungan Arfak yang membutuhkan perhatian lebih dalam akses administrasi kependudukan.

2.1.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa/kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata sosialnya.

Tabel II.81 Klasifikasi Kampung Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	kampung sangat tertinggal	0,270 ≤ IDM ≤ 0,491
2	kampung tertinggal	0,491 < IDM ≤ 0,599
3	kampung berkembang	0,599 < IDM ≤ 0,707
4	kampung maju	0,707 < IDM ≤ 0,815
5	kampung mandiri	0,815 < IDM ≤ 0,920

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tabel II.82 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Papua Barat

Indikator	2016	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Rata-rata IDM Provinsi Papua Barat	0.4689	0.4914	0.5093	0.5131	0,5184	0,5196
Status IDM Provinsi Papua Barat	Sangat Tertinggal		Tertinggal			

Indikator	2016	2019	2020	2021	2022	2023	
Nilai Rata-rata IDM dan Status IDM Kabupaten							
1	Teluk Wondama	0,4710	0,5349	0,5401	0,5332	0,5319	0,5387
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
2	Kaimana	0,4267	0,5296	0,5328	0,5380	0,5453	0,5426
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
3	Manokwari	0,5403	0,5233	0,5308	0,5307	0,5593	0,5642
		Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
4	Manokwari Selatan	0,4969	0,4903	0,4971	0,4970	0,5039	0,5104
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
5	Teluk Bintuni	0,4351	0,4881	0,4887	0,5010	0,5254	0,5246
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
6	Fakfak	0,4909	0,4867	0,5416	0,5429	0,5500	0,5494
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal
7	Pegunungan Arfak	0,4211	0,4249	0,4575	0,4739	0,4797	0,4771
		Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal	Sangat tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen "Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2023"

Pemberdayaan merupakan paradigma baru pembangunan yang terfokus pada masyarakat dan institusi lokal daerah. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Barat dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan, yang mencerminkan perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Papua Barat berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.82. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitasi pemajuan kampung di Papua Barat menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel II.82 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2016-2023, status IDM Provinsi Papua Barat masih berada dalam kategori "tertinggal" dengan skor 0,5196 pada tahun 2023. Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana, Teluk Bintuni, Manokwari dan Fakfak mengalami perkembangan rata-rata IDM Kabupaten yang relatif signifikan karena telah meningkatkan status dari "sangat tertinggal" menjadi "tertinggal" yang

mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung. Berdasarkan Tabel II.83, juga dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan status IDM kampung di Papua Barat yang signifikan dari kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, maju dan mandiri selama tahun 2016-2022. Pada tahun 2022, Provinsi Papua Barat memiliki 2 kampung mandiri, 18 kampung maju, 116 kampung berkembang, 404 kampung tertinggal, dan 263 kampung sangat tertinggal. Kampung mandiri terdapat di Kabupaten Manokwari (Kampung Aimasi dan Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi). Kampung maju tersebar di Kabupaten Manokwari, Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan. Adapun kampung sangat tertinggal dan tertinggal paling banyak terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel II.83 Rekapitulasi Jumlah dan Persentase Kampung di Papua Barat Berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Status IDM	Jumlah Kampung		Persentase	
		2021	2022	2021	2022
1	Mandiri	0	2	0,00	0,25
2	Maju	10	18	1,25	2,24
3	Berkembang	87	116	10,83	14,45
4	Tertinggal	356	404	44,33	50,31
5	Sangat Tertinggal	350	263	31,13	32,75
Jumlah		803	803	100,00	100,00

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen "Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2023"

Tabel II.84 Jumlah Kampung Penerima dan Alokasi Dana Desa (Ribu Rupiah) di Papua Barat Tahun 2016-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kampung Penerima						
1	Fakfak	142	142	142	142	142
2	Manokwari	165	164	164	164	164
3	Teluk Bintuni	115	115	115	115	115
4	Teluk Wondama	76	76	75	75	75
5	Kaimana	84	84	84	84	84
6	Manokwari Selatan	57	57	57	57	57
7	Pegunungan Arfak	166	166	166	166	166
Papua Barat		805	804	803	803	803
Alokasi Dana Desa (Miliar Rupiah)						
1	Fakfak	138,14	136,99	136,99	118,54	117,9
2	Manokwari	140,85	143,53	143,53	126,60	125,96
3	Teluk Bintuni	112,65	117,82	120,31	98,70	100,30
4	Teluk Wondama	70,93	73,55	74,61	61,51	62,73

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
5	Kaimana	94,24	98,96	74,61	80,44	82,30
6	Manokwari Selatan	60,75	64,83	64,83	49,41	48,34
7	Pegunungan Arfak	139,46	142,95	142,95	131,66	124,97
Total 7 Kabupaten		757,02	778,63	757,83	666,86	662,5

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2024

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua Barat tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. Dana Desa sebagai wujud implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu tonggak perubahan paradigma pembangunan kampung di Provinsi Papua Barat. Kampung tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel II.84 diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 803 kampung di Provinsi Papua Barat yang menerima dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat, dengan total Rp662,5 miliar pada tahun 2023. Apabila meninjau tren setiap tahunnya, terdapat penurunan realisasi Dana Desa di Provinsi Papua Barat yang disebabkan beberapa faktor utama, salah satunya adalah perubahan struktur organisasi di sejumlah kampung, yang menghambat proses penyaluran Dana Desa. Selain itu, terdapat keterlambatan pemerintah daerah dalam melengkapi persyaratan administratif yang berkontribusi pada rendahnya realisasi Dana Desa di Papua Barat. Untuk mencapai optimalisasi alokasi Dana Desa di Papua Barat, diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, serta penguatan kapasitas aparatur kampung dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Dana Desa dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

2.1.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari 3,94% (2010-2020) menjadi 1,65% (2020-2024). Beberapa kabupaten di Papua Barat mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, seperti Kabupaten Teluk Bintuni dari 5,03% menjadi 1,2% dan Manokwari Selatan dari 5,93% menjadi 2,07%, sebagaimana yang ditampilkan Tabel II.85.

Tabel II.85 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Barat (%)

No	Kabupaten	2010-2020	2020-2023	2020-2024
1	Fakfak	2.38	1,35	1,52
2	Kaimana	2.92	1,86	1,84
3	Teluk Wondama	4.54	2,47	2,43
4	Teluk Bintuni	5.03	1,25	1,20
5	Manokwari	2.97	1,70	1,66
6	Manokwari Selatan	5.93	2,09	2,07

No	Kabupaten	2010-2020	2020-2023	2020-2024
7	Pegunungan Arfak	3,98	2,31	2,21
Papua Barat		3,94	1,68	1,65

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka, 2020

Dalam menganalisis penurunan laju pertumbuhan penduduk di Papua Barat, perlu mempertimbangkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi, untuk dapat mencerminkan efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB). Angka prevalensi kontrasepsi atau biasa disingkat sebagai CPR merupakan perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Selain itu, indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Berdasarkan Tabel II.86 diketahui bahwa terdapat penurunan prevalesi pemakaian kontrasepsi di Papua Barat dari 38,34% pada tahun 2019 menjadi 29,63% pada 2023. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan pada tahun 2023 di Papua Barat adalah suntikan (53,49%), pil (19,45%), dan susuk KB (13,27%).

Tabel II.86 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 2019-2023 (%)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	38,34	36,47	34,99	29,77	29,63

Sumber: BKKBN dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Papua Barat, 2023

Berdasarkan interpretasi terhadap data Tabel II.86 dan Tabel II.87, dapat disimpulkan bahwa penurunan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat tidak selalu bergantung pada prevalensi kontrasepsi saja. Faktor lain seperti migrasi keluar, penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, keterlambatan usia pernikahan, dan perubahan sosial-ekonomi juga berperan dalam menentukan jumlah penduduk di Papua Barat.

Tabel II.87 Metode KB yang Digunakan Oleh PUS (%)

No	Metode KB	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sterilisasi wanita / tubektomi	3,85	4,86	2,66	3,67	3,57
2	Sterilisasi pria / vasektomi	0,26	0,14	0,41	0,36	0,05
3	Spiral / IUD / AKDR	4,30	4,75	3,66	3,59	3,05
4	Suntikan	56,86	58,01	60,95	61,34	53,49
5	Susuk KB / implan	9,40	9,08	11,11	11,32	13,27
6	Pil	20,20	17,97	17,41	13,75	19,45
7	Kondom Pria / karet KB	0,30	1,20	0,22	0,58	2,12
8	Intravag/Kondom wanita	n.a	0,08	0,16	0,00	0,10
9	Menyusui alami	0,80	0,07	0,10	0,68	1,57
10	Pantang Berkala/Kalender	1,58	2,70	2,17	1,38	2,14

No	Metode KB	2019	2020	2021	2022	2023
11	Lainnya	2.45	1,15	1,16	3,33	1,19

Sumber: BPS Papua Barat (2023), dalam "Statistik Kesejahteraan Masyarakat"

Dalam konteks Papua Barat kebijakan pengendalian penduduk harus dilakukan dengan pertimbangan khusus, terutama terkait dengan keberlanjutan populasi Orang Asli Papua (OAP). Pengendalian penduduk di Papua Barat ke depan tidak hanya berfokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga pada peningkatan harapan hidup OAP, kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga, serta akses layanan kesehatan yang merata, terutama di daerah pedalaman. Program KB harus dirancang agar mendukung OAP dalam merencanakan keluarga sejahtera tanpa menghambat pertumbuhan populasi OAP dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan pro-OAP diperlukan untuk memperkuat identitas dan peran OAP dalam pembangunan. Dengan pendekatan yang lebih berkeadilan dan berbasis kesejahteraan, pengendalian penduduk di Papua Barat dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan populasi dan SDM OAP yang berkualitas.

2.1.4.2.9 Perhubungan

2.1.4.2.9.1 Transportasi Darat

Perkembangan jaringan jalan di Provinsi Papua Barat membuat aktivitas ekonominya bergantung pada transportasi darat. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah transportasi darat yang cenderung semakin meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan tingginya mobilitas penduduk. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Tabel II.88.

Tabel II.88 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua Barat (unit)

No.	Jenis angkutan darat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil penumpang (unit)	33.043	34.329	34.585	35.601	36.730
2	Bus (unit)	313	341	341	359	382
3	Truk/Mobil barang (unit)	15.507	16.446	16.614	17.458	18.151
4	Sepeda motor (unit)	262.442	282.377	287.292	303.320	321.687

X : Data 2020 dan 2021 hanya terdiri dari truk

Sumber: BPS RI dalam Papua Barat dalam Angka, 2021-2023

2.1.4.2.9.2 Transportasi Laut

Jalur laut merupakan salah satu transportasi yang menggerakkan perekonomian wilayah di Provinsi Papua Barat. Sebagian besar mobilitas orang dan barang di Provinsi Papua Barat masih menggunakan transportasi laut dikarenakan kondisi geografis wilayah. Provinsi Papua Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fakfak, dan Pelabuhan Kaimana. Pelabuhan utama digunakan sebagai pelabuhan komersil. Selain itu, terdapat pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah kepulauan, pesisir pantai maupun sungai-sungai, yaitu perintis Waisor, Windesi, Oransbari, Saukorem,

Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inawatan, Bintuni, Babo, dan Kokas. Kemudian, rute domestik dan lokal pelayaran di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel II.89.

Tabel II.89 Rute Pelayaran Domestik dan Pelayaran Lokal di Papua Barat

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
Pelayaran Domestik		
1	KM Labobar	Surabaya – Makassar – Bau-bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura PP
2	KM Ciremai	Tg. Priok - Surabaya - Makassar - Sorong - Manokwari - Biak PP
3	KM Sinabung	Surabaya - Makassar – Bau Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan - Sorong - Manokwari – Biak - Jayapura PP
4	KM Gunung Dempo	Tg. Priok - Surabaya – Makassar - Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura PP
5	KM Tidar	Makassar – Bau Bau – Namlea – Ambon - Fakfak - Sorong – Manokwari – Nabire- Wasior - Manokwari PP
6	KM Sirimau	Manokwari – Sorong - Ambon – Wanci - Baubau – Maumere - Lewoleba – Kupang – Kalabahi – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agats – Merauke PP
Pelayaran Lokal		
9	KMP Komodo	Sorong – Saonek Waisai – Kabare PP, Sorong – Linmalas – Waigama PP, Sorong Foley – Harapan Jaya PP, Sorong – Seget – Seremuk – Konda – Teminabuan – Mugim – Kais – Inawatan – Kokoda PP, Biak – Numfor – Manokwari PP
10	KM Kasuari Pasifik	Manokwari – Numfor – Biak PP
11	KMP Napan Wainami	Manokwari – Wasior – Nabire PP
12	KMP Margareth	Manokwari – Wasior PP
13	KMP Express Bahari	Manokwari – Wasior PP

Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Tabel II.90 Kunjungan Kapal Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kegiatan di Papua Barat

Kunjungan Kapal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunjungan dalam Negeri (unit kapal)	6.737	7.468	10.012	7.691	6.161	8.525	4.707
Debarkasi dalam Negeri (orang penumpang)	558.997	554.627	612.913	221.946	235.153	382.747	207.594

Kunjungan Kapal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Embarkasi dalam Negeri (orang penumpang)	521.301	562.809	649.776	232.990	214.349	387.555	195.397
Kunjungan luar negeri (unit kapal)	706	424	252	102	153	154	0
Debarkasi luar negeri (orang penumpang)	0	0	0	0	0	149	0
Embarkasi luar negeri (orang penumpang)	0	0	53	0	0	94	0

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2019-2023

Kunjungan kapal dalam negeri maupun luar negeri dapat dilihat pada Tabel II.90 Kunjungan kapal dalam negeri tertinggi di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2019-2023 terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 10.012 unit. Debarkasi (banyak penumpang datang) dan embarkasi (banyak penumpang berangkat) dalam negeri tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan masing-masingnya sebanyak 612.913 jiwa dan 649.776 jiwa. Kunjungan luar negeri tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 252 unit. Debarkasi dan embarkasi luar negeri tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan masing-masingnya sebanyak 149 jiwa dan 94 jiwa.

2.1.4.2.9.3 Transportasi Udara

Kehadiran Bandar Udara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Transportasi udara merupakan salah satu transportasi penting di Papua Barat, hal ini dikarenakan karakteristik wilayah yang cukup bergunung, curam, dan diliputi oleh hutan sehingga transportasi darat menjadi cukup sulit untuk mengakses beberapa daerah.

Tabel II.91 Banyaknya Pesawat dan Penumpang yang Datang, Berangkat, dan Transit di Bandar Udara yang Diusahakan di Provinsi Papua Barat

Pesawat/Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023
Pesawat					
Datang (unit)	16.126	13.489	10.770	13.392	6.475
Berangkat (unit)	16.698	13.621	10.757	13.438	6.489
Penumpang					
Datang (orang)	1.080.112	827.403	604.129	944.388	333.113
Berangkat (orang)	1.069.372	834.025	509.977	770.698	332.047
Transit (orang)	131.713	123.573	158.961	274.936	26.974

Sumber: BPS Papua Barat dalam Papua Barat dalam Angka 2018-2024

Berdasarkan Tabel II.91, diketahui bahwa kedatangan dan keberangkatan pesawat terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan masing-masingnya sebanyak 16.126 unit dan 16.698 unit. Jumlah penumpang pesawat terbanyak juga terjadi pada tahun 2019 baik

datang maupun berangkat dengan masing-masingnya sebanyak 1.080.112 jiwa dan 1.069.372 jiwa. Sementara transit paling banyak terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 274.936 transit.

2.1.4.2.9.4 Jumlah Angkutan Barang

Berdasarkan tabel II.92 berikut, diketahui bahwa jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan semakin meningkat dari 5000 ton pada tahun 2017 menjadi 7200 ton pada tahun 2021. Jumlah barang yang terangkut transportasi udara juga mengalami peningkatan yaitu dari 17 kg pada tahun 2017 menjadi 25 kg pada tahun 2021.

Tabel II.92 Jumlah Angkutan Barang yang Melalui Dermaga Pelabuhan/Transportasi Udara di Papua Barat di Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	5.000	5.430	6.543	6.890	7.200
Jumlah barang yang terangkut transportasi udara (ton)	17	20	23	24	25

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat

2.1.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting saat ini untuk memudahkan interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Provinsi Papua Barat. Sarana komunikasi yang telah berkembang di Papua Barat adalah penggunaan telepon seluler dan internet. Salah satu operator telepon seluler yang telah beroperasi di Papua Barat antara lain Telkomsel.

Tabel II.93 menunjukkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel di Papua Barat tahun 2017-2023. Berdasarkan Tabel II.93 diketahui terdapat peningkatan penduduk usia >5 tahun yang menggunakan telepon seluler dari 57,04% pada tahun 2017 menjadi 70,52% pada tahun 2023. Secara regional, kabupaten dengan persentase penduduk pengguna telepon seluler terbesar tahun 2023 terdapat di Teluk Bintuni (85,58%), dan Manokwari (77,92%). Adapun wilayah dengan persentase penduduk pengguna telepon adalah Pegunungan Arfak (50,08%).

Tabel II.93 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel di Papua Barat, 2017-2023

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	64,89	70,59	74,85	71,35	76,72	76,96	74,41
2	Kaimana	52,26	57,26	58,56	64,23	62,53	63,41	67,39
3	Teluk Wondama	56,58	66,09	65,13	70,29	73,00	60,59	68,44
4	Teluk Bintuni	66,63	70,96	76,59	81,30	85,69	86,82	85,58
5	Manokwari	73,05	76,15	80,96	82,79	82,93	79,05	77,92
6	Manokwari Selatan	60,21	61,18	60,34	68,73	71,33	68,01	69,86

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Pegunungan Arfak	25,64	42,79	34,94	40,57	44,02	44,34	50,08
Rata-rata		57,04	63,57	64,48	68,47	70,89	68,45	70,52

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.94 menunjukkan persentase penduduk berumur lebih dari 5 tahun yang menggunakan komputer di Papua Barat, baik berupa PC/desktop, laptop/notebook ataupun tablet. Berdasarkan Tabel II.94 diketahui persentase pengguna komputer mengalami trend stagnan dan bahkan cenderung menurun dari 14,51% pada tahun 2017 dan menjadi 10,12% pada tahun 2023. Wilayah dengan pengguna komputer terbesar di Papua Barat tahun 2023 adalah Kabupaten Fakfak (14,19%) dan Kaimana (11,49%). Adapun wilayah dengan pengguna komputer paling sedikit di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (tahun 2023: 1,29%).

Tabel II.94 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet), 2017-2023

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	15,22	21,90	18,93	16,88	15,04	14,63	14,19
2	Kaimana	16,12	20,48	11,40	10,97	11,45	12,36	11,49
3	Teluk Wondama	21,84	18,98	13,23	15,88	5,18	6,90	10,09
4	Teluk Bintuni	14,54	21,03	15,77	16,47	13,00	11,60	11,44
5	Manokwari	20,58	25,14	20,30	15,83	10,81	11,22	13,87
6	Manokwari Selatan	10,94	12,23	11,80	13,36	6,49	7,16	8,45
7	Pegunungan Arfak	2,30	3,86	3,11	2,08	0,77	1,53	1,29
Rata-rata		14,51	17,66	13,51	13,07	8,96	9,34	10,12

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II. 95 menunjukkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet di Papua Barat tahun 2017-2023. Berdasarkan Tabel II.95 diketahui terdapat peningkatan penduduk yang mengakses internet secara signifikan dari 35,92% pada tahun 2019 menjadi 60,01% pada tahun 2023. Wilayah dengan persentase pengakses internet terbesar di Papua Barat tahun 2023 adalah Teluk Bintuni (74,78%) dan Manokwari (63,82%). Adapun wilayah dengan cakupan pengakses internet terkecil tahun 2023 di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak (29,85%).

Tabel II.95 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	46,37	48,38	55,67	56,91	61,21
2	Kaimana	38,82	48,88	51,00	51,38	61,47
3	Teluk Wondama	34,12	47,36	48,19	42,88	44,26
4	Teluk Bintuni	39,77	54,20	64,43	65,55	74,78
5	Manokwari	53,58	58,85	58,70	63,30	63,82
6	Manokwari Selatan	33,74	38,09	42,52	45,93	51,05
7	Pegunungan Arfak	5,03	9,76	8,13	16,58	29,85
Rata-rata		35,92	43,65	46,95	48,93	60,01

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2023 dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat"

Tabel II.96 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019 dan 2024

No	Kabupaten	2019					2024				
		4G/ LTE	3G/ H/ H+ / EVDO	2,5G/ E/ GPRS	Tidak Ada	Jumlah	4G/ LTE	3G/ H/ H+ / EVDO	2,5G/ E/ GPRS	Tidak Ada	Jumlah
1	Fakfak	32	10	20	35	97	135	1	1	5	142
2	Kaimana	5	4	-	9	18	77	-	-	-	77
3	Teluk Wondama	20	4	14	26	64	75	-	-	-	75
4	Teluk Bintuni	42	14	7	16	79	207	5	9	2	223
5	Manokwari	51	48	13	49	161	138	19	12	3	172
6	Manokwari Selatan	11	4	4	7	26	33	12	8	-	53
7	Pegunungan Arfak	5	1	8	38	52	50	18	7	22	97
PAPUA BARAT		166	85	66	180	497	715	55	37	32	839

Sumber: BPS Papua Barat, 2024

Cakupan akses komunikasi dan informasi penduduk Papua Barat tidak terlepas dari cakupan pelayanan jaringan internet dan telepon seluler. Berdasarkan Tabel II.96 diketahui terdapat peningkatan jumlah kampung/kelurahan di Papua Barat yang dapat menerima sinyal internet telepon seluler dari 317 kampung pada tahun 2019 menjadi 807 kampung pada tahun 2024.

2.1.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Sebagai wadah ekonomi berbasis kebersamaan, koperasi membantu masyarakat memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan pelatihan usaha. Sementara itu, UKM menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan produk berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan yang tepat, koperasi dan UKM dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan UKM sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Tabel II.97 menunjukkan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.97 diketahui bahwa Berdasarkan data jumlah koperasi aktif, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan volume usaha koperasi di Provinsi Papua Barat tahun 2010-2021, terlihat bahwa perkembangan koperasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jumlah koperasi aktif meningkat dari 515 unit pada 2010 menjadi 785 unit pada 2014, sebelum kemudian mengalami penurunan hingga 608 unit pada 2019. Meskipun jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 723 unit pada 2021, hal ini tidak diiringi dengan stabilitas Sisa Hasil Usaha (SHU) dan volume usaha koperasi. SHU koperasi mengalami lonjakan drastis pada 2013 dan 2014, mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, namun setelahnya mengalami penurunan yang cukup tajam, terutama pada 2016 yang hanya sebesar 1,221 juta rupiah.

Demikian pula dengan volume usaha koperasi yang sempat mencapai puncaknya pada 2015 dengan nilai 192,669 juta rupiah, tetapi kemudian anjlok pada 2016 dan mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya.

Tabel II.97 Kondisi Koperasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi (Juta Rupiah)	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)
2010	515	6.975	52.914
2011	515	6.975	52.914
2012	515	6.975	52.914
2013	610	130.355	83.657
2014	785	101.188	159.957
2015	708	14.516	192.669
2016	770	1.221	2.130
2017	774	3.900	34.462
2018	792	3.520	33.151
2019	608	8.575	48.321
2020	663	6.856	39.862
2021	723	6.682	40.883

Sumber: BPS Nasional, 2015-2021

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi sempat meningkat, keberlanjutan usaha koperasi masih menjadi tantangan besar, terutama dalam mempertahankan kinerja keuangan dan daya saing koperasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas manajerial, minimnya akses permodalan, lemahnya pendampingan, serta kurangnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pengelolaan koperasi yang berbasis komunitas. Untuk meningkatkan peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi OAP, diperlukan beberapa intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan lokal.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi OAP, dalam aspek manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi bisnis. Program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri, tetapi juga mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Kedua, pemerintah daerah harus memperkuat akses permodalan bagi koperasi, baik melalui dana hibah, pinjaman berbunga rendah, maupun kemitraan dengan sektor swasta. Kebijakan ini perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha koperasi.

Ketiga, optimalisasi potensi lokal menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing koperasi. Pemerintah harus mendorong pengembangan koperasi berbasis sumber daya alam dan budaya lokal Papua, seperti sektor pertanian, perikanan, dan ekowisata. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan OAP, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya. Keempat, digitalisasi koperasi harus menjadi prioritas,

mengingat era ekonomi digital membuka peluang besar bagi koperasi dalam meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional. Penerapan teknologi digital dalam pemasaran dan manajemen koperasi dapat memperluas jangkauan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan intervensi kebijakan yang tepat, koperasi di Papua Barat dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal dan tidak hanya bersifat seremonial, sehingga koperasi dapat berkembang sebagai fondasi ekonomi yang kuat bagi Papua Barat.

2.1.4.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Tabel II.98 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Kabupaten	Jumlah Proyek					Realisasi Investasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	Juta Rupiah		US\$		
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	1	1	-	2	8	33.333	41.585	-	7.161.437	472.400
2	Kaimana	1	2	4	1	-	-	8.051	46.696	52.755	-
3	Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Bintuni	4	-	-	9	9	20.628	-	-	14.024.811	342.700
5	Manokwari	1	12	9	11	78	-	226.667	235.552	2.446.219	27.047.600
6	Manokwari Selatan	1	2	1	-	-	1	400	100	-	-
7	Pegunungan Arfak	1	1	1	-	-	-	550	150	-	-
Papua Barat		9	18	15	23	95	53.962	277.253	282.498	23.685.222	27.862.700

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tabel II.98 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) di Papua Barat tahun 2019-2023. Diketahui bahwa terdapat penambahan jumlah proyek sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Peningkatan realisasi investasi di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Manokwari. Sementara Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mengalami penurunan realisasi investasi menjadi 100 US\$ dan 150US\$. Teluk Wondama sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 tercatat tidak memiliki proyek sehingga tidak ada realisasi investasi yang terjadi di kabupaten tersebut.

Tabel II.99 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Proyek						
1	Fakfak	2	5	53	105	135
2	Kaimana	2	3	12	114	291
3	Teluk Wondama	1	3	4	9	113
4	Teluk Bintuni	3	4	7	29	85
5	Manokwari	6	7	81	144	603
6	Manokwari Selatan	-	-	-	1	28
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	2	46
Papua Barat		14	22	157	404	1.301
Realisasi Investasi (Juta Rupiah)						
1	Fakfak	9.035	3.125	23.085	1.552.291	405.117
2	Kaimana	2.827	27.953	136.511	63.399	156.027
3	Teluk Wondama	-	135	39	11.877	5.644
4	Teluk Bintuni	1.468	17.781	45.431	9.830	82.964
5	Manokwari	108.427	6.150	138.911	643.982	607.193
6	Manokwari Selatan	-	-	-	1.100	150
7	Pegunungan Arfak	-	-	-	1.892	15
Papua Barat		121.757	55.144	343.977	2.284.371	1.257.113

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Tabel II.99 menunjukkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Papua Barat Tahun 2019-2023. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, Papua Barat mengalami kenaikan jumlah proyek. Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Manokwari menjadi kabupaten dengan jumlah proyek tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 dengan masing-masing jumlah proyek sebanyak 135 proyek, 291 proyek, dan 113 proyek. Tahun 2023, nilai realisasi investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Manokwari yang mencapai sebesar 607 miliar rupiah diikuti Kabupaten Fakfak sebesar 405 miliar rupiah.

2.1.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.1.4.2.13.1 Kepemudaan

Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Papua Barat semakin meningkat dari 51,00 pada 2017 menjadi 55,17 pada 2023. Domain lapangan dan kesempatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Meskipun demikian, domain pendidikan cenderung stagnan pada angka 73,33 dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020-2023, IPP Provinsi Papua Barat berada di atas garis rata-rata IPP nasional yang menunjukkan kualitas IPP semakin membaik ditinjau dari setiap domain yang ditunjukkan pada Tabel II.100 dan Gambar II.128.

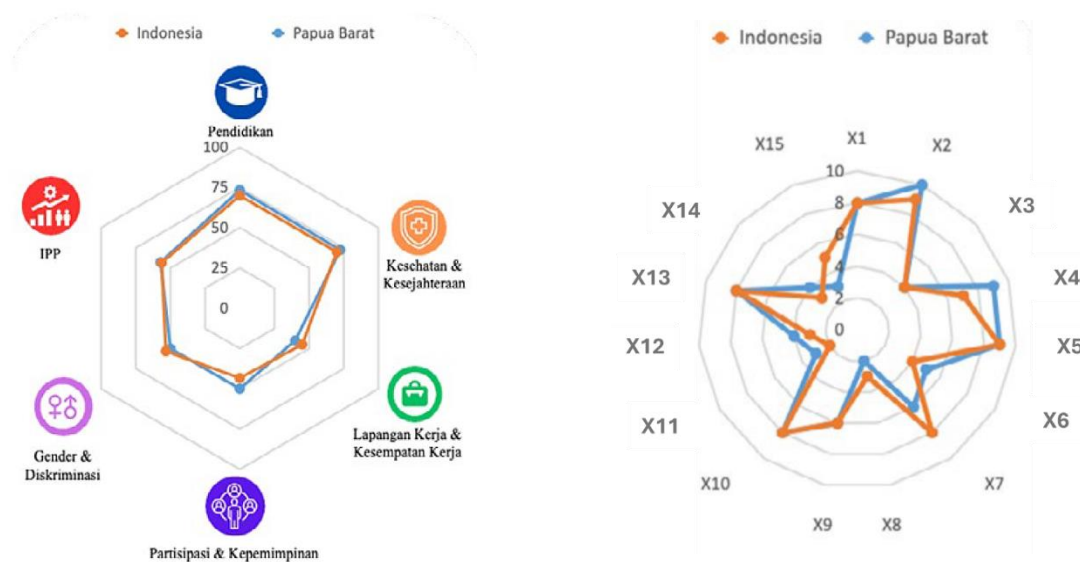
Tabel II.100 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Pemuda dan Domain Penyusunnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia 2017-2023

Indikator		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAPUA BARAT	Indeks Pembangunan Pemuda	51,00	50,83	50,17	51,33	55,17	56,67	57,17
	Ranking IPP	13	20	19	15	7	7	9
	a. Domain Pendidikan	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	60,00	62,50	57,50	60,00	67,50	75,00	72,50
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00	40,00
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	43,33	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	50,00
	e. Domain Gender dan Diskriminasi	43,33	43,33	40,00	43,33	43,33	43,33	50,00
INDONESIA	Indeks Pembangunan Pemuda	49,33	51,5	52,67	51,00	53,33	55,33	56,33
	a. Domain Pendidikan	63,33	66,67	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55,00	57,5	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00
	c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	40,00	45,00	40,00	40,00	45,00	45,00
	d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	46,67	46,67	46,67	46,67	43,33	43,33	43,33
	e. Domain Gender dan Diskriminasi	46,67	46,67	46,67	43,33	53,33	53,33	53,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga (2024), dalam dokumen "Indeks Pembangunan Pemuda"

Gambar II.127 Capaian Pembangunan Pemuda Papua Barat Tahun 2023

Perbandingan nilai indeks domain Perbandingan nilai transformasi indikator IPP Papua Barat dan nilai nasional pada 2023



Keterangan:

X1	Rata-rata lama sekolah	X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
X2	APK sekolah menengah	X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
X3	APK perguruan tinggi	X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat
X4	Angka kesakitan pemuda	X13	Angka perkawinan usia anak
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas
X6	Persentase pemuda merokok	X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal
X7	Persentase remaja hamil		
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih		
X9	TPT pemuda		

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga (2024), dalam dokumen "Indeks Pembangunan Pemuda"

Provinsi Papua Barat berada pada peringkat 9 secara nasional pada tahun 2023 dan cenderung meningkat dari tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan nasional, domain gender dan diskriminasi serta domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai domain gender dan diskriminasi melalui beberapa indikator (nilai transformasi) yang meliputi angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal, maupun jumlah pemuda wirausaha. Nilai transformasi indikator IPP Papua Barat dapat dilihat pada Gambar II.128.

2.1.4.2.13.2 Olahraga

Isu tentang gaya hidup sehat telah menjadi acuan banyak daerah dan lembaga untuk senantiasa mendorong masyarakat supaya aktif terlibat dalam aktivitas fisik, khususnya melalui kegiatan olahraga. Hidup aktif memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Selain menjauhkan dari berbagai penyakit fisik, olahraga juga dapat menjauhkan dari gangguan jiwa seperti depresi. Dengan kata lain, olahraga selain membuat jasmani menjadi lebih kuat juga membuat jiwa menjadi lebih sehat.

Kesadaran masyarakat Papua Barat dalam berolahraga masih cukup rendah. Seperti yang ditunjukkan Tabel II.101, pada tahun 2021 penduduk Papua Barat berusia 5 tahun ke atas yang berolahraga hanya sebesar 24,47%. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena masyarakat di Papua Barat kerap tidak memasukkan kegiatan olahraga ke dalam prioritas hidup. Masyarakat lebih cenderung mementingkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup dibandingkan dengan berolahraga. Partisipasi berolahraga penduduk perkotaan sebesar 31,62% lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan yang hanya sebesar 19,02%. Kondisi ini mengindikasikan fasilitas dan jenis olahraga yang berkembang di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Tabel II.101 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Berolahraga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Wilayah	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
		Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Papua Barat	31,62	19,02	28,33	20,17	24,47
2	Indonesia	32,44	20,05	29,52	24,76	27,14

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen "Statistik Sosial Budaya 2021"

Tabel II.102 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga Menurut Tujuan Utama Berolahraga dan Jalur/Wadah Utama Dalam Berolahraga, 2021

Kategori			Papua Barat	Indonesia
Berdasarkan Tujuan Utama Berolahraga (%)	1	Menjaga kesehatan	56,46	64,09
	2	Prestasi	0,70	0,78
	3	Hobi/Rekreasi	26,93	14,58
	4	Kurikulum Sekolah	14,26	18,96
	5	Menjaga Penampilan	NA	0,48
	6	Lainnya	NA	1,10
Berdasarkan Jalur/Wadah Utama Berolahraga (%)	1	Sendiri	59,61	58,37
	2	Sekolah	17,52	22,45
	3	Perkumpulan Olahraga	14,67	12,67
	4	Tempat Kerja	2,27	2,00
	5	Lainnya	5,92	4,51
Berdasarkan Jenis Olahraga (%)	1	Senam	14,56	21,67
	2	Atletik	0,56	1,80
	3	Lari/Jalan	40,76	41,54
	4	Tenis Meja	NA	0,42
	5	Bulu Tangkis	2,49	4,51
	6	Bola Voli	8,29	5,48
	7	Bola Basket	NA	0,62
	8	Sepak Bola/Futsal	25,27	13,22
	9	Renang	1,20	0,49
	10	Bela Diri	NA	0,70
	11	Bersepeda	1,72	7,06
	12	Lainnya	1,92	2,49

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen "Statistik Sosial Budaya 2021"

Setiap orang yang berolahraga mempunyai tujuan yang beragam, diantaranya sebatas hobi, menurunkan berat badan, menjaga Kesehatan, memulihkan tubuh, bagian dari pelajaran sekolah, berprofesi sebagai atlet dan untuk tujuan-tujuan lainnya. Berdasarkan Tabel II.102, diketahui bahwa mayoritas penduduk berusia 5 tahun ke atas di Papua Barat

yang berolahraga bertujuan untuk menjaga kesehatan sebesar 56,46%, hobi/rekreasi sebesar 26,93% dan bagian dari pelajaran/kurikulum sekolah sebesar 14,26%.

Pada tahun 2021 senam menjadi olahraga yang paling banyak dilakukan oleh penduduk berumur 5 tahun ke atas. Dari seluruh penduduk yang berolahraga di Papua Barat, sebesar 40,76% diantaranya melakukan olahraga lari/jalan. Lari/jalan menjadi olahraga yang menyenangkan sekaligus praktis karena tidak membutuhkan alat-alat khusus. Senam dan sepak bola/futsal juga menjadi olahraga yang paling banyak dilakukan di Papua Barat dengan persentase masing-masingnya sebesar 14,56% dan 25,27%. Tingginya minat penduduk Papua Barat terhadap olahraga didukung keberadaan fasilitas olahraga yang memadai, khususnya untuk bola voli dan speak bola yang ditunjukkan pada Tabel II.103.

Tabel II.103 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Lapangan Olah Raga Tahun 2021

No	Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
1	Fakfak	30	64	16	3	2	6	38	1	3	0	1
2	Kaimana	29	49	3	4	1	2	9	1	2	2	3
3	Teluk Wondama	26	69	3	1	1	1	7	0	1	1	0
4	Teluk Bintuni	49	114	25	9	1	11	18	3	2	5	2
5	Manokwari	53	124	13	8	3	13	21	1	5	8	2
6	Manokwari Selatan	8	38	3	1	1	3	2	0	1	0	3
7	Pegunungan Arfak	9	90	1	2	0	0	1	0	1	1	0

Sumber: BPS Nasional dalam dokumen "Statistik Sosial Budaya 2021"

2.1.4.2.14 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Provinsi Papua barat bekerjasama dengan BPS Provinsi Papua Barat telah merangkum berbagai statistik Provinsi Papua Barat. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Propinsi Papua Barat. Urusan Statistik ini dirujuk berdasarkan lampiran Permendagri No. 45 tahun 2010, yaitu adanya ketersediaan dokumen perencanaan berikut:

- a. Buku Provinsi Dalam Angka;
- b. Buku Statistik Daerah; serta
- c. Buku PDRB Provinsi.

Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel II.104. Provinsi Papua barat telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2011-2016 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Provinsi Papua Barat dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja,

sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Provinsi Papua Barat dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi Papua Barat dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Provinsi Papua barat berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Provinsi Papua Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta potensi yang ada di Provinsi Papua barat. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Provinsi Papua Barat memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Tabel II.104 Hasil Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2011-2023

Uraian		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Buku Provinsi Dalam Angka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Buku Statistik Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Buku PDRB Provinsi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2024

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyediakan buku PDRB Provinsi Papua barat baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama Periode 2011-2016, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat di akses melalui situs BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar

2010 serta sudah menerapkan konsep *System of national Accounts* 2008 seperti yang telah direkomendasikan oleh United Nations.

2.1.4.2.15 Kebudayaan

Gambaran Sosial-budaya tidak terlepas dari definisi manusia sebagai makhluk sosial/sosiale animale dengan sisi homo humanicus, homo economicus, dan juga homo kulturalis. Berdasarkan sisi-sisi tersebut maka manusia sejak dahulu kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai manusia, dari sisi kulturalis manusia kemudian menciptakan pranata adat dengan nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi. Manusia Adat di provinsi Papua Barat kemudian disebut oleh undang undang sebagai Masyarakat Hukum Adat/Indigenous People. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) Bab 1, Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Pada perubahan kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 2021 pasal 1 ayat 22 dipertegas dengan definisi Orang Asli Papua (OAP) yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

2.1.4.2.15.1 Kekerabatan

Sistem sosial masyarakat di tanah Papua mengenal empat (4) tipe karakteristik kekerabatan suku yang dijadikan dasar dalam pengelolaan wilayah adat yaitu Tipe Iroquois, Tipe Hawaiian, Tipe Omaha, dan tipe Iroquois-Hawaiian. Secara khusus pada wilayah Provinsi Papua Barat atau wilayah budaya Saireri, Domberai, dan Bomberai, dijumpai beberapa 3 tipe kekerabatan yang berpengaruh pada penguasaan wilayah dan potensi lokal, antara lain:

Tipe Iroquois

Sistem kekerabatan tipe iroquois mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu paralel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung dan berbeda dari istilah yang digunakan untuk saudara sepupu silang serta penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu. Misalnya, Suku Wandamen (Wilayah Adat Saireri) dan Suku Iha (Wilayah Adat Bomberai).

Tipe Hawaiian

Sistem kekerabatan tipe hawaiian ialah suatu sistem pengelompokan yang menggunakan istilah yang sama dan paralel. Tipe ini dijumpai pada Suku Mairasi (Wilayah Bomberai), Suku Arfak (Hatam, Meyah, Sough, dan Moile/Moskona).

Tipe Omaha

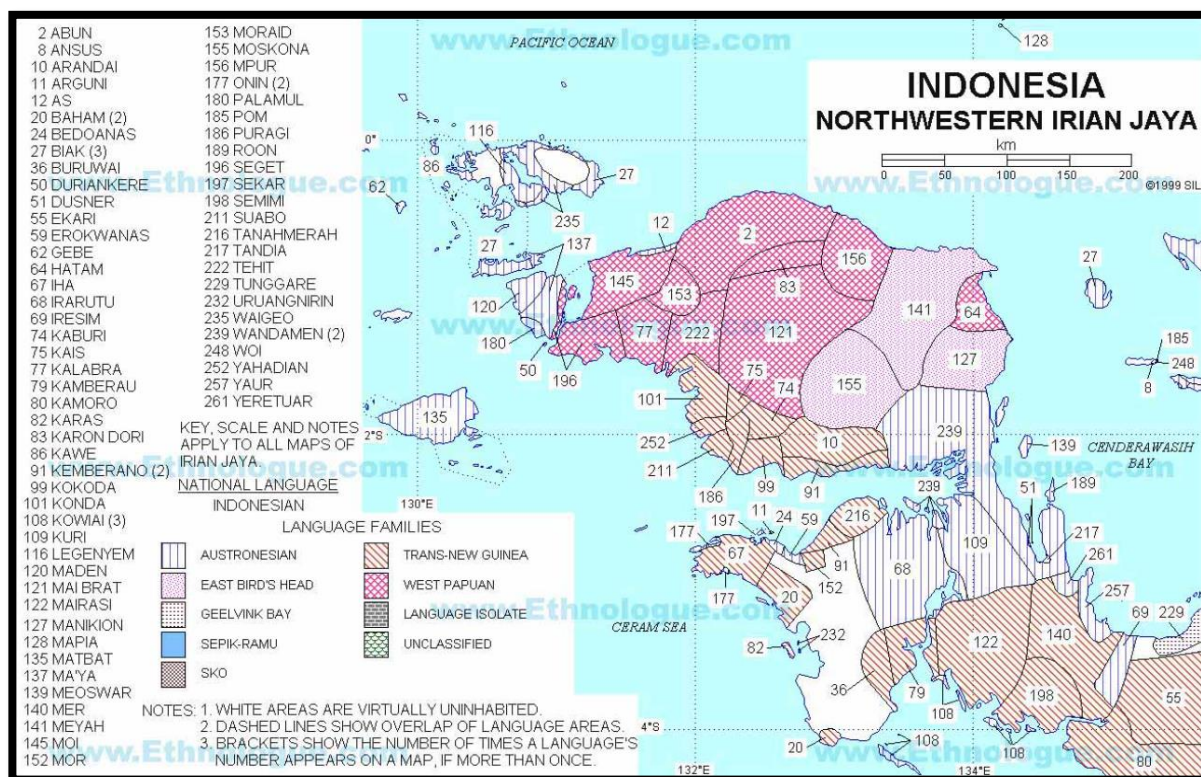
Sistem kekerabatan tipe omaha merupakan suatu sistem yang mengklasifikasikan saudara-saudara sepupu silang matrilineal dan patrilineal dengan istilah-istilah yang berbeda dan istilah untuk saudara sepupu silang itu dipengaruhi oleh tingkatan generasi dan bersifat

asimetris, sehingga istilah untuk anak laki-laki saudara laki-laki ibu adalah sama dengan saudara laki-laki ibu dan istilah untuk anak laki-laki saudara perempuan ayah adalah sama untuk anak laki-laki saudara perempuan. Tipe ini dijumpai pada Suku Maybrat. Sedangkan dilihat dari prinsip garis keturunan, maka terdapat prinsip pewarisan keturunan, yaitu: memiliki keturunan melalui garis ayah/patrilineal. Misalnya, suku-suku di Kepala Burung Maybrat, suku-suku di Teluk Cenderawasih suku Wandamen, Kuri, dst.

2.1.4.2.15.2 Bahasa

Pendekatan linguistik historis dan tipologi Bahasa membagi wilayah Papua barat dihuni oleh suku suku dengan Bahasa dari rumpun bahasa Austronesia yang berada dibagian bawah leher burung dikenal seperti Irarutu, Sekar, Kuri, Mor (di Semenanjung Bomberai). dan Bahasa Non Austronesia meliputi sub kelompok South Halmahera-West New Guinea (SHWNG) atau Bahasa West Papua termasuk didalamnya adalah Roon, Wandamen, Dusner, Yaur (di Teluk Cenderawasih), Ambel, Maya, Batanta, Matbat (di Kepulauan Raja Ampat), bagian kepala burung juga tersebar bahasa Hatam, Meyah, Sougb, Irires, Miyach, Maybrat, Kalabra, Moi, Abun, Moraid, Mpur dst.

Gambar II.128 Peta Bahasa Papua Barat Oleh SLI Internasional



Bahasa bahasa Austronesia berasal dari satu nenek moyang bahasa yaitu Proto-Austronesia yang berasal dari Taiwan di utara sampai Selandia Baru di selatan dan dari Kepulauan Paskah (Easter Island) di Timur sampai di Madagaskar di sebelah barat yaitu di pantai timur benua Afrika (lihat Blust, 1993, 2009; Ross, 2004; Pawley & Ross, 1993). Mayoritas bahasa-bahasa di Indonesia masuk ke dalam rumpun Austronesia, kecuali beberapa bahasa di Kepulauan Alor dan Pantar, Halmahera Utara, dan sebagian besar bahasa-bahasa di Tanah Papua yang dikategorikan ke dalam bahasa nonAustronesia (atau bahasa Papua). Bahasa yang terdiri dari banyak keluarga bahasa sendiri-sendiri. Diprediksi

kurang lebih terdapat 60 keluarga bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Papua, yang (Foley, 1986, 2000)

2.1.4.2.15.3 Sistem Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan adat yang dikenal di wilayah adat Bomberai dan Domberai seperti yang dijelaskan pada Tabel II.105.

Tabel II.105 Tiga Tipe Kepemimpinan yang Dianut di Dua Wilayah Adat Papua Barat

Bentuk Kepemimpinan	Penjelasan	Wilayah Suku
Bigman 'pria berwibawa'	Sistem di mana seorang pria perkasa meraih status kepemimpinan karena pencapaian atau "achievement" ditentukan oleh kemampuan pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki tubuh yang besar dan tegap, serta memiliki sifat murah hati dalam pembagian perolehan. Ciri lain dari tipe kepemimpinan ini ialah bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh pemimpin sejati itu secara otonomi tunggal.	Sistem bigman ini tergambar pada suku-suku di wilayah budaya Saireri seperti di teluk wondama, sebagian Doberai, dan Bomberai.
Sistem Raja Raja	bercirikan pewarisan kedudukan pemimpin dari orangtua kepada anak pria yang sulung, akan tetapi bila anak itu tidak mampu mewarisinya karena ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk jabatan tersebut, maka salah seorang adiknya atau seorang saudara ayahnya yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dapat memperoleh kedudukan tersebut. Dengan demikian hak kekuasaan selalu dipertahankan dan diwariskan dalam rangka kelompok kekerabatan besar, seperti klen, melalui sistem pewarisan atau "ascribed". Asas keabsahan disini adalah keturunan, yang diperkuat oleh mitologi dan religi.	Sistem kepemimpinan raja ini tergambar pada suku-suku di Doberai dan Bomberai, yakni Suku Maybrat di Kepala Burung, suku-suku di Kepulauan Raja Ampat, suku-suku di daerah Semenanjung Onim (Fakfak) dan di daerah Kaimana.
Sistem Campuran	pola yang timbul baik karena kemampuan sendiri maupun atas dasar keturunan, tetapi juga berkuasa sebagai tuan tanah yang mewariskan kekuasaan kepada anak sulung; sementara seorang mambri 'panglima perang' mencapai kekuasaannya karena keperkasaan pribadi namun pada kesempatan tertentu dapat menjalankan kekuasaan selaku kepala kampung atau kepala suku.	sebagian besar suku-suku di wilayah budaya Saireri, sebagian Doberai (suku besar Arfak), dan Bomberai (suku Kuri Wamesa)

Sumber : Mansoben (1995)

2.1.4.2.15.4 Tarian Adat

Keberagaman juga terlihat dari seni tari di Papua Barat. Di Papua Barat terdapat empat bentuk tarian adat dalam suku ini, yaitu:

Tup, merupakan gerakan berputar di tempat, atau berjalan atau berlari yang dilakukan sambil bernyanyi.

Weantagawi, merupakan gerakan dua orang yang saling berhadapan muka sambil menghentakkan kaki di tanah bersama-sama. Gerakan ini diikuti langkahmengikuti irama, maju dua langkah dan mundur dua langkah seirama dengan lagu yang dibawakan.

Pipakwean, merupakan gerakan berlari mondar-mondir di suatu tempat terbatas, seirama dengan lagu yang dibawakan.

Tem, gerakan ini diadakan di dalam rumah, di dalam sinar nyala api. Muda-mudi duduk berhadapan muka, dipisahkan oleh tungku apui, sambil bernyanyi kaum pemuda memberi daun kepada pemudi dan sebaliknya.

Sedangkan untuk tarian terdapat tiga macam, yaitu (1) tarian muda-mudi, tarian ini merupakan tarian yang dilakukan oleh para pemuda dengan cara melambai-lambaikan dedaunan kepada gais yang disukainya dan apabila si gadis menyukainya makan gais tersebut akan ikut menari bersama pemuda tadi; (2) tarian pesta, jeni lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu kegembiraan, kesenangan, serta pujian; dan (3) tarian perang, lagu-lagu yang dibawakan berisi lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat juang.

2.1.4.2.15.5 Nilai-nilai Kearifan Lokal

Keunikan budaya di provinsi Papua barat dapat kita temukan pada bentuk-bentuk kesenian, norma dan nilai adat, tipologi kepemimpinan serta nilai kearifan yang berkorelasi dengan sejarah/mitologi, religi dan membentuk karakter dan identitas jati dirinya. Nilai kearifan selalu berhubungan dengan alam sekitar dari wilayah pegunungan, lembah dan rawa, sungai sampai ke wilayah pantai dan perairan laut. Sebagai contoh terdapat beberapa bentuk kearifan lokal yang dianggap nilai penting yang dianut oleh suku suku di provinsi Papua barat antara lain di suku arfak, Suku Moi, suku wilayah pesisir di teluk wandama dan Suku Meybrat dan seterusnya seperti contoh yang ditunjukkan Tabel II.106.

Tabel II.106 Bentuk Bentuk Kearifan Lokal di Provinsi Papua barat

Suku	Kearifan Lokal	Penjelasan
Arfak	Igya Ser Hanjob, kearifan membagi kawasan menjadi 4 bagian: Bahamti, Situmti, Susti, Nimahanti Ibeiya, rumah tradisional kaki seribu Suku Moile Tradisi Budidaya ubi jalar	konsep Zonasi mata pencaharian tradisional yang membagi wilayah kelola menjadi empat zona. Keempat zona tersebut adalah: (1) Zona bahamti berada pada kawasan yang tinggi dari Pegunungan Arfak; (2) Zona nimahamti (nihamti) berada di sekitar Kawasan dengan topografilereng-lereng terjal; (3) Zona susti berada di sekitar lereng yang tidak terlalu terjal; dan (4) Zona situmti, berada pada kaki bukit yang datar sampai ke sekitar pemukiman , biasanya hanya dikenal 2 zona untuk pertanian budidaya yaitu zona Susti, Zona Situmti, sedangkan zona bahamti lebih banyak dipakai sebagai kawasan berburu dan mengambil hasil hutan seperti Kayu untuk rumah dan sumber tanaman obat.
Moi	Egek (sejenis Sasi tempat dan perairan)	merupakan pelarangan pengambilan sesuatu dari alam atau benda-benda tertentu dalam jangka waktu yang

Suku	Kearifan Lokal	Penjelasan
		sudah ditentukan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun.
Meybrat	Kmot aya	mengandung nilai, keyakinan dan sanksi atau aturan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya air terutama di daerah hulu sungai. telah diterapkan sejak nenek moyang, bentuk larangan di kmot aya melarang mandi dengan sabun dan dilarang menyiram air tanpa izin.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022

2.1.4.2.15.6 Sistem Penguasaan Tanah

Karakteristik suku-suku memandang tanah sebagai inti dan titik sentral pusat ekologi dan basis dari satu kesatuan ekosistem yang mengatur hubungan antara manusia dan semua makhluk hidup di alam. Tanah adalah sumber segala kehidupan di bumi. Di atas tanah, di dalam tanah, dan jauh dalam perut bumi tersimpan sumber mineral, deposit, dan kandungan bumi lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Tanah dipahami dan diklasifikasikan oleh kebanyakan masyarakat adat sebagai tanah itu sendiri beserta dusun sagu, sungai maupun hutan kayu yang berada di atasnya. Tanah dalam kaitannya dengan kepentingan hidup tidak selalu dipersepsikan dengan pandangan ekonomi saja, tetapi juga senantiasa dikaitkan dengan beberapa aspek seperti budaya, religi, dan politik. Karakteristik persepsi tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara ekonomis: tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya adalah media yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperluan hidupnya, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar maupun bahan untuk membuat rumah.

Secara budaya: tanah dipersepsikan sebagai “mama”, yakni pihak yang melahirkan dan membesarkan; oleh karenanya adalah “sah” bila sang mama menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengan kesuburan dan kelimpahan kekayaan alam. Di sisi lain sang anak dituntut untuk senantiasa memperhatikan kondisi sang “mama” tetap sempurna melakukan kewajibannya dan memberi hasil, yakni dengan cara menjaga norma-norma dan melakukan serangkaian seremonial, guna mengharapkan agar sang mama senantiasa memberikan kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak-anak cucunya.

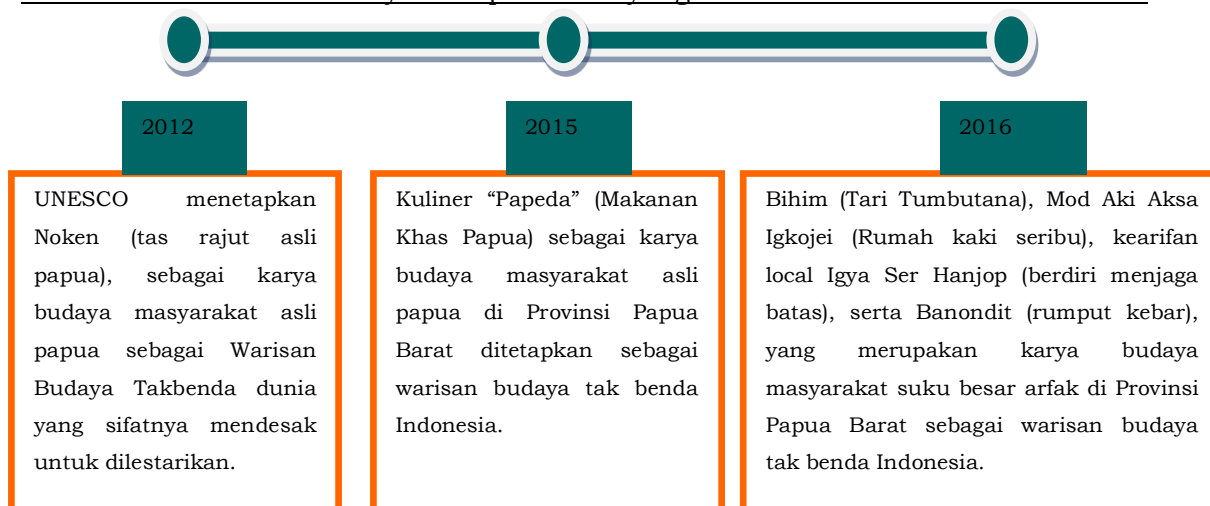
Secara religius: tanah senantiasa diasosiasikan dan atau dikaitkan dengan para leluhur, roh-roh dari nenek moyangnya. Bahkan keyakinan itu diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah atau tanah adalah warisan yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupannya. Dalam pandangan demikian, maka tanah mendapat penghargaan yang tinggi, karena menghargai tanah mempunyai makna sebagai bagian dari penghargaan terhadap para leluhur dan nenek moyangnya.

Secara politis: tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat. Eksistensi politis masyarakat diukur dari apakah ia mempunyai kawasan bagi kelompok-kelompok masyarakatnya dan seberapa besar tanah itu mampu mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyarakat tersebut. Tanah tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk melaksanakan hubungan dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya. (Warami, 2016).

2.1.4.2.15.7 Kerajinan

Apabila dilihat dari sisi kerajinan, kerajinan di Papua sangat bervariasi. Salah satunya adalah seni ukir. Ukiran-ukiran tersebut biasanya berbentuk busur, panah, maupun peralatan-peralatan perang lainnya. Warna-warna yang mendominasi yang digunakan dalam kerajinan adalah putih, hitam, merah dan kuning. Warna putih dibuat dari tanah liat, isi keladi putih yang membusuk atau abu dari tungku api. Warna hitam dibuat dari asap lemak babi dan damar, arang dapur atau dari buah-buahan hutan. Warna merah dibuat dari tanah merah yang digali dari dalam tanah. Sedangkan warna kuning dibuat dari akar tumbuh-tumbuhan dan tali-talian hutan.

Gambar II.129 Alur Kebudayaan Papua Barat yang Diakui Nasional dan Internasional



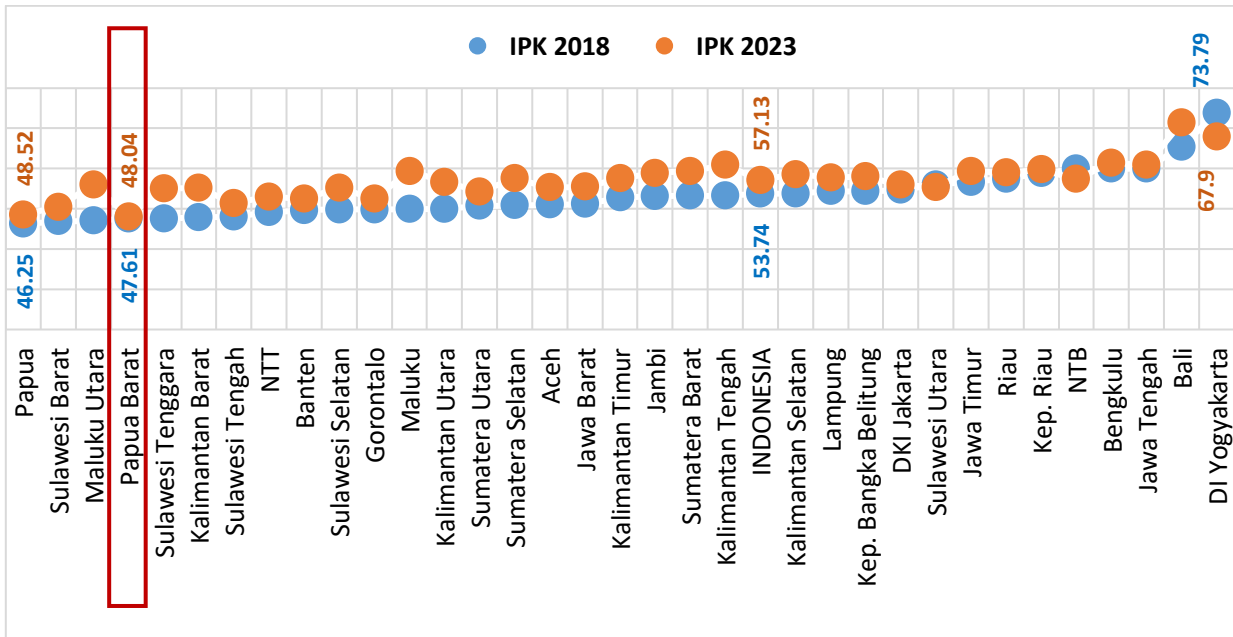
Sumber: RIPPDA Provinsi Papua Barat 2011-2030 (diolah)

Banyaknya hasil kerajinan dan budaya masyarakat Papua Barat membuat pemerintah harus giat untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya tersebut sebagai budaya asli Papua Barat, salah satu caranya adalah dengan mendaftarkannya baik secara nasional maupun internasional. Secara runtut waktu, dalam beberapa tahun terakhir pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar II.130.

2.1.4.2.15.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Terdapat hubungan erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban.

Gambar II.130 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber: Kemendikbud (2024), dalam dokumen “Indeks Pembangunan Kebudayaan”

Tabel II.107 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua Barat 2023

No.	Dimensi	Nilai Indeks	
		Papua Barat	Indonesia
1	Ekonomi Budaya	10,72	29,50
2	Pendidikan	70,87	73,35
3	Ketahanan Sosial Budaya	76,40	70,73
4	Warisan Budaya	24,99	51,54
5	Ekspresi Budaya	32,83	34,91
6	Budaya Literasi	51,02	60,49
7	Gender	57,69	58,71
IPK Total		48,04	57,13

Sumber: Kemendikbud dalam dokumen “Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018”

Sebagai salah satu instrument untuk mengukur kontribusi kebudayaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

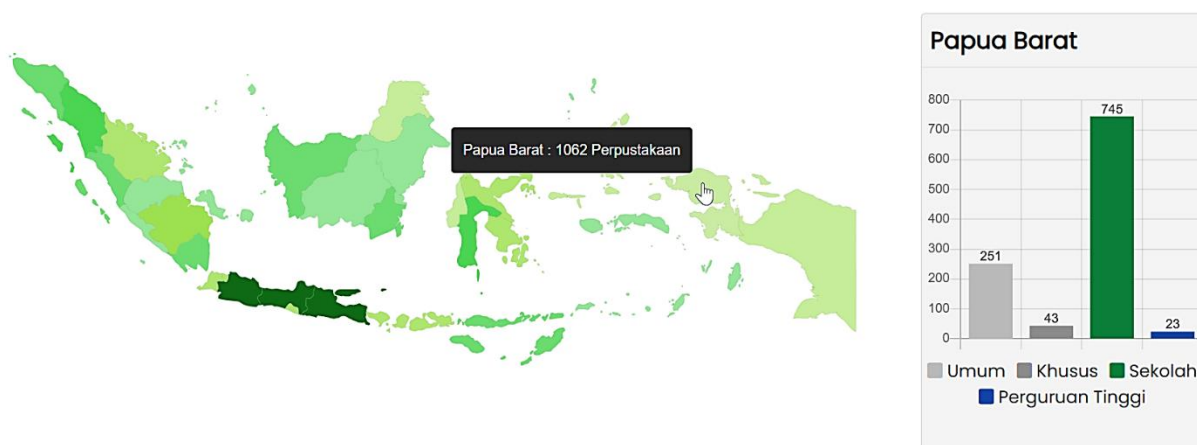
Gambar II.131 menunjukkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2018 dan 2023. Berdasarkan Tabel II.107 diketahui IPK Papua Barat

mengalami peningkatan dari 47,61 pada tahun 2018 menjadi 48,04 pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, IPK Papua Barat masih berada di bawah angka nasional (tahun 2023: 57,13). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan kebudayaan di Papua Barat masih membutuhkan usaha dan kerja keras berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Apabila meninjau dimensi penyusun IPK, pada tahun 2023 terdapat satu dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka nasional, yaitu: dimensi ketahanan sosial budaya. Sementara itu, lima dimensi lainnya masih berada di bawah angka nasional, dimana dimensi ekonomi budaya memiliki nilai indeks terkecil (lihat Tabel II.107).

2.1.4.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Berdasarkan data sebaran perpustakaan dalam peta oleh Perpustakaan Nasional, diketahui bahwa jumlah perpustakaan di Papua Barat tahun 2024 berjumlah 1062 unit yang tersebar di seluruh kabupaten, dan terdiri atas 251 unit perpustakaan umum, 43 unit perpustakaan khusus, 745 perpustakaan sekolah, dan 23 unit perpustakaan perguruan tinggi.

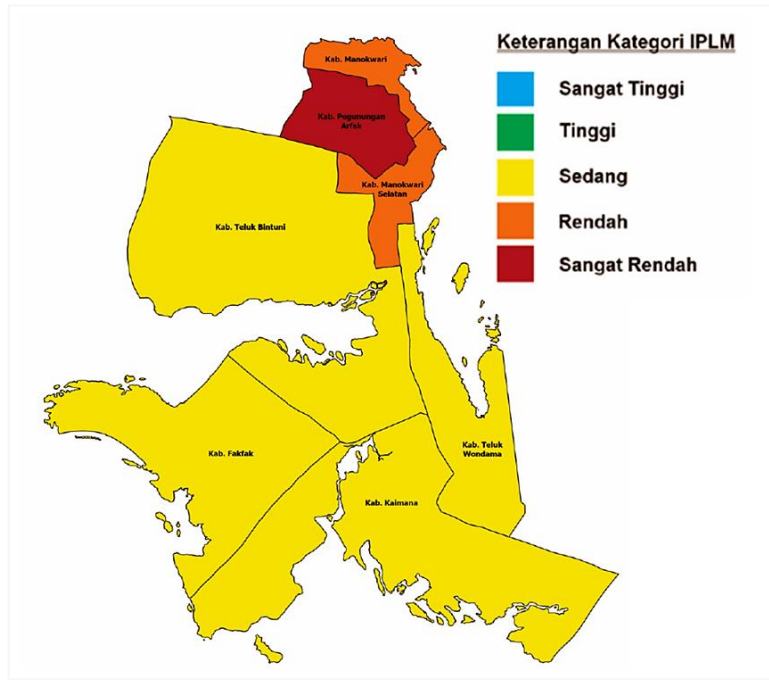
Gambar II.131 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional (Unit) Tahun 2024



Sumber: data.perpusnas.go.id

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM terdiri atas 7 (tujuh) unsur pembangunan, yaitu: pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1); ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM2); ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3); tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4); jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM5); keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6); serta anggota perpustakaan (UPLM7).

Gambar II.132 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Papua Barat Tahun 2023



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

Tabel II.108 Rekapitulasi Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat di Papua Barat Tahun 2023

Wilayah	2022	2023							IPLM
	IPLM	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	
Papua Barat	37,58	0,2071	0,6058	0,6234	0,0639	1,0000	1,0000	1,0000	64,29
Fakfak	79,23	0,4622	0,5390	0,3187	0,1118	1,0000	1,0000	1,0000	63,31
Manokwari	53,84	0,2357	0,5988	0,6723	0,0538	0,3609	1,0000	0,3095	46,16
Teluk Bintuni	30,97	0,1003	0,1632	0,2710	0,0342	1,0000	1,0000	1,0000	50,98
Teluk Wondama	36,68	0,1753	1,0000	1,0000	0,0423	0,5254	1,0000	1,0000	67,76
Kaimana	36,56	0,1042	0,1495	0,8643	0,0503	1,0000	1,0000	1,0000	59,55
Manokwari Selatan	3,63	0,1449	0,0216	0,1941	0,0065	0,0000	1,0000	0,7801	30,67
Pegunungan Arfak	12,71	0,0957	0,0329	0,1258	0,1081	0,0000	1,0000	0,5961	27,98

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

Nilai IPLM Kabupaten dan Provinsi Papua Barat tahun 2023 ditunjukkan dalam Gambar II.133 dan Tabel II.108. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pencapaian IPLM Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 64,29 dan masuk dalam kategori sedang. IPLM Papua Barat mengalami peningkatan signifikan dari 37,58 pada tahun 2022 menjadi 64,29 pada tahun 2023. Tiga kabupaten dengan pencapaian IPLM tertinggi tahun 2023 yaitu

Kabupaten Teluk Wondama (67,76), Fakfak (63,31), dan Kaimana (59,55). Sedangkan tiga kabupaten dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak (27,98), Manokwari Selatan (30,67), dan Manokwari (46,16).

2.1.4.2.17 Kearsipan

Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam ketersediaan dokumen. Peran dan fungsi arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai bahan utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Fungsi lain dari arsip adalah sebagai bukti perekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan dapat menjadi memori kolektif yang berguna bagi pembelajaran untuk pembangunan daerah di masa mendatang. Berikut adalah indikator-indikator kinerja bidang kearsipan Papua Barat yang ditunjukkan pada Tabel II.109.

Tabel II.109 Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Papua Barat, 2017-2021 (%)

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	-	10,00	10,00	-	10,00
2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat OPD	-	15,00	15,00	-	15,00
3	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
4	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi	-	1,00	1,00	-	1,00

Sumber: Bappeda / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, 2022

Berdasarkan Tabel II.109, dapat dilihat bahwa tingkat ketertiban administrasi kearsipan dan pengelolaan arsip di tingkat OPD masih relatif rendah. Begitu juga dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang belum dilakukan secara efektif. Arsip daerah yang telah terdigitalisasi juga dapat dilakukan peningkatan kedepannya. Kedepannya, OPD diharapkan dapat menerapkan arsip secara baku, memiliki tenaga pengelola kearsipan yang telah diberi pembekalan dan pelatihan sistem kearsipan, dan dapat mengelola arsip dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis). Penataan arsip diharapkan telah berdasarkan kode klasifikasi, serta OPD menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengarsipan yang efektif dan efisien.

2.1.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.3.1 Pariwisata

Keperiwisataan menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi potensi daya saing di wilayah Papua Barat. Potensi wisata dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah dan banyaknya layanan sarana dan prasarana serta akomodasi pendukung. Beberapa hal tersebut dapat ditinjau melalui

indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK), rata-rata lama tamu menginap serta Jumlah malam tamu hotel (lihat Tabel II.110).

Pada tahun 2023, tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa hotel berbintang memiliki rata-rata tingkat hunian yang lebih tinggi, yaitu 46,82%, dibandingkan hotel nonbintang yang hanya 20,57%. Tingkat hunian tertinggi hotel berbintang terjadi pada bulan November (62,06%), sedangkan hotel nonbintang mencapai puncaknya pada Oktober (25,78%). Sebaliknya, tingkat hunian terendah terjadi pada April untuk hotel berbintang (33,53%) dan September untuk hotel nonbintang (15,13%), yang mengindikasikan adanya pola musiman dalam okupansi hotel.

Dari segi rata-rata lama tamu menginap, tamu domestik cenderung menghabiskan waktu lebih lama (1,84 hari) dibandingkan tamu asing (1,43 hari), dengan rata-rata keseluruhan 1,81 hari. Lama menginap tertinggi terjadi pada bulan Juni (1,99 hari) dan terendah pada Maret (1,62 hari), yang menunjukkan variasi dalam lama tinggal wisatawan di Papua Barat. Sementara itu, jumlah malam tamu di hotel berbintang mencapai 526.288 malam, jauh lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang yang hanya 259.101 malam. Puncak jumlah malam tamu terjadi pada November dengan 61.659 malam di hotel berbintang dan 21.717 malam di hotel nonbintang, sementara jumlah terendah tercatat pada April dan Mei.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa hotel berbintang lebih diminati dibandingkan hotel nonbintang, baik dari segi tingkat hunian maupun jumlah malam tamu. Peningkatan signifikan pada Oktober hingga Desember dapat dikaitkan dengan liburan akhir tahun atau agenda tertentu. Selain itu, durasi menginap tamu domestik yang lebih lama dibandingkan tamu asing menunjukkan bahwa perjalanan domestik di Papua Barat lebih sering dilakukan untuk keperluan bisnis atau kunjungan keluarga. Oleh karena itu, terdapat peluang untuk mengembangkan sektor perhotelan, khususnya dalam meningkatkan tingkat hunian hotel nonbintang serta memperpanjang durasi menginap tamu di wilayah ini.

Tabel II.110 Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Rata-Rata Lama Tamu Menginap di Povinsi Papua Barat Tahun 2023

Bulan	Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)		Rata-Rata Lama Tamu Menginap (Hari)			Jumlah Malam Tamu	
	Hotel Berbintang	Hotel Nonbintang	Tamu Asing	Tamu Domestik	Jumlah	Hotel Berbintang	Hotel Nonbintang
Januari	37,38	21,81	1,76	1,64	1,64	28.965	20.954
Februari	44,25	22,57	1,24	1,74	1,71	31.808	19.650
Maret	42,93	19,69	1,23	1,65	1,62	37.424	22.492
April	33,53	18,66	1,26	1,73	1,68	32.017	16.598
Mei	48,32	20,41	1,51	1,75	1,74	42.417	15.566
Juni	43,51	22,76	1,37	2,01	1,99	44.045	18.444
Juli	47,56	20,99	1,49	1,95	1,94	45.783	20.971
Agustus	49,51	20,10	1,26	1,88	1,85	45.853	17.069
September	44,00	15,13	2,01	1,90	1,91	45.288	18.582
Oktober	56,21	25,78	1,61	1,92	1,90	57.009	22.823
November	62,06	22,36	1,19	1,97	1,92	61.659	21.717

Bulan	Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)		Rata-Rata Lama Tamu Menginap (Hari)			Jumlah Malam Tamu	
	Hotel Berbintang	Hotel Nonbintang	Tamu Asing	Tamu Domestik	Jumlah	Hotel Berbintang	Hotel Nonbintang
Desember	52,62	16,57	1,25	1,90	1,84	54.020	44.235
2023	46,82	20,57	1,43	1,84	1,81	526.288	259.101

Sumber: BPS Papua Barat (2024) dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka"

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran (Tabel II.110). Sektor pariwisata menunjukkan tren yang relatif stabil dari 2019 hingga 2022, dengan kontribusi sebesar 13,08% pada 2019, meningkat menjadi 13,36% pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 9,03%, yang mengindikasikan adanya tantangan besar di sektor ini.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pariwisata. Namun, subsektor ini juga mengalami penurunan drastis dari 8% pada 2022 menjadi 5,4% pada 2023, yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas ekonomi atau daya beli masyarakat. Transportasi dan Pergudangan juga mengalami penurunan bertahap, dari 3,19% pada 2019 menjadi 1,89% pada 2023, yang bisa mencerminkan berkurangnya mobilitas masyarakat atau dampak dari kebijakan tertentu yang mempengaruhi sektor transportasi. Sementara itu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor yang langsung terkait dengan industri pariwisata juga mengalami penurunan dari 0,74% pada 2022 menjadi 0,55% pada 2023, yang dapat mencerminkan penurunan jumlah wisatawan atau pergeseran pola konsumsi masyarakat. Informasi dan Komunikasi, yang sebelumnya sempat mengalami peningkatan hingga 2,01% pada 2020, juga menunjukkan tren penurunan menjadi 1,19% pada 2023. Secara keseluruhan, sektor pariwisata di Papua Barat mengalami kontraksi tajam pada 2023 setelah mengalami pertumbuhan yang stabil selama empat tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum, yang menunjukkan kemungkinan adanya dampak dari perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan, atau berkurangnya aktivitas wisata. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemulihan, seperti penguatan sektor perdagangan, peningkatan daya tarik wisata, serta inovasi dalam industri perhotelan dan transportasi untuk mendorong kembali kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tabel II.111 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap PDRB ADHB Papua Barat 2019-2023 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pariwisata	13,08	13,19	13,24	13,36	9,03
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	7,81	7,98	8,00	5,40
Transportasi dan Pergudangan	3,19	2,70	2,57	2,66	1,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,67	0,69	0,74	0,55
Informasi dan Komunikasi	1,75	2,01	2,00	1,96	1,19

Sumber: BPS Papua Barat (2024) dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka"

Tabel II.112 Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi Usaha Akomodasi di Papua Barat Tahun 2023

Wilayah	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Melati	Jumlah
Papua Barat	0	6	8	7	1	208	230
Fakfak	0	0	1	0	0	16	17
Kaimana	0	0	1	0	0	5	6
Teluk Wondama	0	0	0	0	0	3	3
Teluk Bintuni	0	0	0	1	0	39	40
Manokwari	0	1	1	2	0	22	26
Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	5	5
Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Papua Barat (2024) dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka"

Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata tentunya sangat didukung oleh fasilitas penunjang kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi berupa hotel. Berdasarkan Tabel II.112 diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah hotel berbintang di Papua Barat sangat terbatas. Hotel berbintang 4 dan 3 hanya dapat ditemui di Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Kaimana. Mayoritas hotel di Papua Barat merupakan hotel melati, yaitu sebanyak 208 hotel. Terdapat daerah yang tidak memiliki fasilitas/sarana akomodasi hotel berbintang dan hotel melati yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel II.113 Jumlah Tamu Hotel Asing dan Domestik di Provinsi Papua Barat Menurut Klasifikasi Hotel Tahun 2023

Klasifikasi Hotel	Tamu Asing	Tamu Domestik	Jumlah
Hotel Bintang	16.979	271.937	288.916
Bintang 1	10	9.205	9.215
Bintang 2	1.952	68.229	70.181
Bintang 3	1.353	90.472	91.825
Bintang 4	13.664	104.031	117.695
Hotel Non Berbintang	3.445	136.748	140.193
Kelompok Kamar < 10	1.127	5.582	6.709
Kelompok Kamar 10-24	1.012	60.237	61.249
Kelompok Kamar 25-40	1.159	53.356	54.515
Kelompok Kamar 41-100	147	17.573	17.720
Papua Barat	20.424	408.685	429.109

Sumber: BPS Papua Barat (2024) dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka"

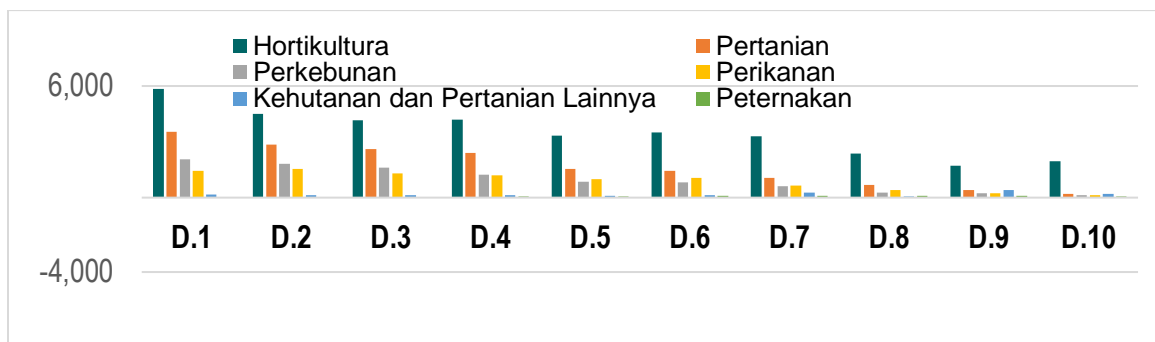
Tabel II.113 menunjukkan jumlah tamu hotel asing dan domestik di Provinsi Papua Barat menurut klasifikasi hotel tahun 2023. Berdasarkan data jumlah tamu hotel di Provinsi Papua Barat menurut klasifikasi hotel pada tahun 2023, total tamu yang menginap di hotel mencapai 429.109 orang, dengan rincian 20.424 tamu asing dan 408.685 tamu domestik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tamu hotel di Papua Barat berasal dari dalam negeri, dengan persentase tamu domestik mencapai sekitar 95,2% dari total tamu.

2.1.4.3.2 Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Provinsi Papua Barat. Di bidang ketenagakerjaan, sektor pertanian menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat. Selain itu, pentingnya sektor pertanian juga dilihat dari fungsinya sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian. Pembahasan sektor pertanian terbagi menjadi subbab tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Gambar II.134 menunjukkan penduduk bekerja di sektor pertanian berdasarkan kelompok pendapatan di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil analisis data Regsosek (2022) dalam SEPAKAT. Berdasarkan Gambar II.134 diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja subsektor pertanian terbesar di Provinsi Papua Barat paling banyak pada hortikultura, pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian, penduduk termiskin di Papua Barat juga paling banyak bekerja di sektor tersebut, sementara penduduk terkaya di Papua Barat paling banyak bekerja di sektor hortikultura dan kehutanan dan pertanian lainnya. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk pengoptimalan sektor hortikultura dan pertanian, yang banyak menyasar penduduk miskin Papua Barat.

Gambar II.133 Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

2.1.4.3.2.1 Tanaman Pangan

Tabel II.114 menunjukkan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Tabel II.114 diketahui bahwa wilayah dengan produksi beras tertinggi tahun 2023 adalah Kabupaten Manokwari (9.303,61 ton) dan Kabupaten Manokwari Selatan (3.181,13 ton). Adapun wilayah dengan produksi jagung dan kedelai terbesar (tahun 2019) adalah Kabupaten Manokwari (jagung: 1885 ton dan kedelai: 38 ton).

Tabel II.114 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Papua Barat (ton)

Kabupaten	Padi (Ton)		Beras (Ton)		Jagung*		Kedelai*	
	2022	2023	2022	2023	2019	2020	2019	2020
Fakfak	48,97	45,20	48,97	27,15	20,0	n.a	-	n.a
Kaimana	-	-	-	-	211,0	n.a	-	n.a
Teluk Wondama	-	66,23	-	39,79	37,0	n.a	-	n.a
Teluk Bintuni	422,20	684,52	422,20	411,30	696,0	n.a	4,0	n.a
Manokwari	15.545,55	15.484,08	15.545,55	9.303,61	1.885,0	n.a	38,0	n.a
Manokwari Selatan	4.928,00	5.294,38	4.928,00	3.181,13	723,0	n.a	-	n.a
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	n.a	-	n.a
Papua Barat	20.944,72	21.574,41	20.944,72	12.962,98	3.572,0	0,00	42,0	0,00

*) data produksi jagung dan kedelai yang tersedia berdasarkan publikasi BPS adalah tahun 2019
 Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Rencana pengembangan tanaman pangan tidak lepas dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini dicapai melalui penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. KP2B terdapat di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.

2.1.4.3.2.2 Holtikultura

Tabel II.115 menunjukkan produksi sayuran berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2022-2023. Berdasarkan Tabel II.115 diketahui bahwa secara umum, produksi sayuran terbesar di Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah kacang panjang (61.798 kuintal), tomat (42.111 kuintal), ketimun (37.015 kuintal), dan kangkung (33.076 kuintal). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, hasil produksi Kabupaten Manokwari mendominasi atau memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Barat. Selain Manokwari, Kabupaten yang juga memiliki kontribusi sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (terutama untuk komoditas bawang daun, bawang putih, bawang merah, kentang, labu siam dan wortel), Kabupaten Manokwari Selatan (terutama untuk komoditas bawang merah, bawang daun, cabai keriting, labu siam dan wortel), serta Kaimana (komoditas bawang merah, Cabai rawit dan kubis). Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat lebih meningkatkan produksi holtikultura dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah.

Tabel II.115 Produksi Sayuran di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2023 (kuintal)

Komoditas		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Peg. Arfak	Papua Barat
Bawang Daun	2022	6	34	-	39	165	262	516	1.022
	2023	-	-	58	375	-	108	1.408	1.949
Bawang Merah	2022	-	250	-	68	-	220	108	646
	2023	-	70	32	1.229	1	600	576	2.508
Bawang Putih	2022	-	-	-	-	-	-	27	27
	2023	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayam	2022	290	354	172	151	18.500	1.883	-	21.350
	2023	878	-	-	160	2.593	1.515	-	5.146
Buncis	2022	292	426	45	864	16.761	467	94	18.949
	2023	1.315	82	-	1.116	8.563	800	271	12.147
Cabai besar	2022	1	420	3	198	7.586	435	-	8.643
	2023	-	81	-	82	2.232	430	-	2.825
Cabai Keriting	2022	2	-	-	-	821	529	-	1.352
	2023	-	-	-	73	410	94	-	577
Cabai Rawit	2022	422	5.778	569	451	15.010	1.061	29	23.320
	2023	2.339	1.091	-	507	2.018	690	192	6.837
Kacang Panjang	2022	270	1.392	265	422	58.187	1.262	-	61.798
	2023	1.393	328	-	337	3.342	1.260	-	6.660
Kangkung	2022	534	4.577	171	328	26.205	1.261	-	33.076
	2023	1.515	728	-	511	5.563	975	-	9.292
Kentang	2022	-	-	-	-	150	-	137	287

Komoditas		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Peg. Arfak	Papua Barat
	2023	-	-	-	-	1.035	-	304	1.339
Ketimun	2022	130	617	267	234	34.190	1.577	-	37.015
	2023	1.198	103	-	365	6.289	1.042	-	8.997
Kubis	2022	-	667	-	402	2.400	-	339	3.808
	2023	-	-	-	202	686	44	1.551	2.483
Labu Siam	2022	40	-	-	-	390	655	762	1.847
	2023	1.024	-	-	-	594	696	3.997	6.311
Petsai/Sawi	2022	1.274	941	114	198	18.081	1.445	147	22.200
	2023	923	88	-	207	3.417	1.271	455	6.361
Terung	2022	256	1.625	372	211	19.935	750	-	23.149
	2023	1.136	325	-	197	8.533	611	-	10.802
Tomat	2022	148	1.299	522	687	37.449	2.001	5	42.111
	2023	1.029	365	-	636	12.951	1.503	-	16.484
Wortel	2022	-	-	-	-	263	70	160	493
	2023	-	-	-	-	494	140	583	1.217

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Tabel II.116 Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2023 (kuintal)

Komoditas		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Peg. Arfak	Papua Barat
Alpukat	2022	195	1.538	109	12	929	31	90.741	93.555
	2023	262	178	-	10	487	-	5.220	6.157
Belimbing	2022	36	60	205	12	270	2	13.332	13.917
	2023	53	-	-	8	114	-	397	572
Duku	2022	58	-	119	125	1.087	113.436	-	114.825
	2023	140	-	-	161	243	4.722	-	5.266
Durian	2022	281	20.950	267	598	1.456	43.360	-	66.912
	2023	2.700	600	-	1.165	420	4.046	-	8.931
Jambu Air	2022	61	402	19	9	161	11.540	-	12.192
	2023	311	15	-	70	38	669	-	1.103
Jambu Biji	2022	2	55	152	38	647	258.545	-	259.439
	2023	372	18	-	63	222	7.250	-	7.925
Jeruk Besar	2022	1	216	103	-	87	13.410	-	13.817
	2023	1	-	-	-	3	178	-	182
	2022	1	-	45	586	104	109.800	68	110.604

Komoditas		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Peg. Arfak	Papua Barat
Jeruk Siam	2023	4	-	-	150	62	5.022	13	5.251
Mangga	2022	404	12.330	2.546	331	2.155	107.275	-	125.041
	2023	2.175	-	-	305	579	21.648	-	24.707
Manggis	2022	-	-	65	-	-	-	-	65
	2023	74	-	-	-	-	-	-	74
Nangka	2022	41	150	11	955	1.045	71.630	-	73.832
	2023	219	-	-	619	23	5.478	-	6.339
Nenas	2022	33	437	11	192	8	8.744	219	9.644
	2023	54	199	-	143	6	-	124	526
Pepaya	2022	695	377	133	3.285	775	381.350	-	386.615
	2023	673	273	-	1.522	451	2.814	-	5.733
Pisang	2022	3.180	1.268.356	529	5.907	2.274	324.117	-	1.604.363
	2023	1.028	260.048	-	3.181	1.095	15.060	-	280.412
Rambutan	2022	182	9.655	151	487	4.838	69.627	-	84.940
	2023	542	-	-	535	1.287	4.720	-	7.084
Salak	2022	19	5.720	-	7.366	10	36.768	-	49.883
	2023	2	550	-	594	6	546	-	1.698
Sawo	2022	-	-	-	-	206	10.521	-	10.727
	2023	-	-	-	15	60	106	-	181
Sirsak	2022	4	2	16	-	216	16.385	-	16.623
	2023	50	-	-	24	116	314	-	504
Sukun	2022	17	1.064	8	-	886	14.500	-	16.475
	2023	47	512	-	91	299	201	-	1.150

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Tabel II.116 menunjukkan produksi buah-buahan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2023. Berdasarkan Tabel II.116 diketahui bahwa secara umum, produksi buah-buahan terbesar di Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah pisang (1.604.363 kuintal), pepaya (386.615 kuintal), jambu biji (259.439 kuintal), dan manga (125.041 kuintal). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, hasil produksi Kabupaten Manokwari Selatan mendominasi atau memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produksi buah-buahan regional di Papua Barat. Selain Manokwari, Kabupaten yang juga memiliki kontribusi sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (terutama untuk komoditas alpukat, belimbing dan nanas), Kabupaten Kaimana (terutama untuk komoditas pisang, sukun, dan durian), serta Teluk Wondama (komoditas manggis).

2.1.4.3.2.3 Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Tabel II.117 Produksi Perkebunan (ton) di Provinsi Papua Barat 2022-2023

Komoditas		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Peg. Arfak	Papua Barat
Kelapa Sawit	2022	-	-	-	2.869	80.158	-	-	83.027
	2023	-	-	-	2.869	80.158	-	-	83.027
Kelapa	2022	553	710	198	40	901	36	-	2.438
	2023	553	827	195	72	500	36	-	2.183
Kopi	2022	3	1	-	-	-	-	-	4
	2023	3	1	1	-	-	-	1	6
Kakao	2022	-	-	-	-	70	162	-	232
	2023	-	-	-	-	35	182	-	217
Pala	2022	1.700	318	22	-	1	8	-	2.049
	2023	2.172	434	10	8	-	8	-	2.632
Cengkeh	2022	25	-	-	-	1	-	-	26
	2023	33	-	-	-	1	-	-	34
Pinang	2022	10	-	77	-	11	5	-	103
	2023	10	-	28	-	1	5	-	44
Sagu	2022	2	-	147	26	1	-	-	176
	2023	2	13	143	49	-	-	-	207

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Tabel II.117 menunjukkan produksi perkebunan berdasarkan kabupaten di Papua Barat tahun 2022-2023. Berdasarkan Tabel II.117 diketahui bahwa produksi kelapa sawit hanya terdapat di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari (2023: 80.158 ton) dan Teluk Bintuni (2.869 ton). Selain kepala sawit terdapat produksi komoditas kelapa, kakao, kopi, pala, cengkeh, pinang dan sagu yang cukup tinggi pada tahun 2023. Daerah dengan produksi kelapa terbesar adalah Kaimana (2023: 827 ton) dan Manokwari (500 ton). Daerah dengan produksi kakao terbesar adalah Manokwari Selatan (2023: 182 ton) dan Manokwari (2023: 35 ton). Daerah dengan produksi pala terbesar adalah Fakfak (2023: 2172 ton) dan Kaimana (2023: 434 ton). Daerah dengan produksi sagu terbesar adalah Teluk Wondama (2023: 143 ton) dan Teluk Bintuni (49 ton). Daerah dengan produksi pinang terbesar adalah Teluk Wondama (2023: 28 ton) dan Fakfak (2023: 10 ton). Adapun komoditas kopi diproduksi di

Fakfak (2023: 3 ton), Kaimana (2023: 1 ton), Teluk Wondama (1 ton) dan Pegunungan Arfak (2023: 1 ton).

2.1.4.3.2.4 Peternakan

Tabel II.118 menunjukkan populasi ternak dan unggas di Papua Barat tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.118 diketahui bahwa daerah yang memiliki populasi ternak dan unggas tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Manokwari (babi = 37.010 ekor ; sapi potong = 22.569 ekor ; kambing = 8.239 ekor ; itik = 79.215 ekor). Kabupaten selanjutnya dengan populasi ternak dan unggas adalah Kabupaten Teluk Bintuni (sapi potong = 3.057 ekor ; ayam kampung = 141.960 ekor) dan Kabupaten Fakfak (kambing = 1.861 ekor ; ayam kampung = 423.939 ekor).

Tabel II.118 Populasi Ternak & Unggas di Papua Barat Tahun 2022 (ekor)

Kabupaten		Ternak						Unggas				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik / Itik Manila
1	Fakfak	-	5.997	-	-	1.861	-	850	423.939	-	-	1.178
2	Kaimana	-	763	-	-	565	-	229	26.088	-	-	354
3	Teluk Wondama	-	279	-	-	29	-	367	2.771	-	-	152
4	Teluk Bintuni	-	3.057	-	-	813	-	5.679	141.960	-	-	2.535
5	Manokwari	-	22.569	-	-	8.239	-	37.010	60.822	-	-	79.215
6	Manokwari Selatan	-	3.282	-	-	809	-	2.069	44.032	-	-	2.454
7	Pegunungan Arfak	-	1.476	-	-	248	-	7.239	49.988	-	-	-
PAPUA BARAT		-	37.423			12.564		53.443	758.600			85.888

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

2.1.4.3.3 Kelautan dan Perikanan

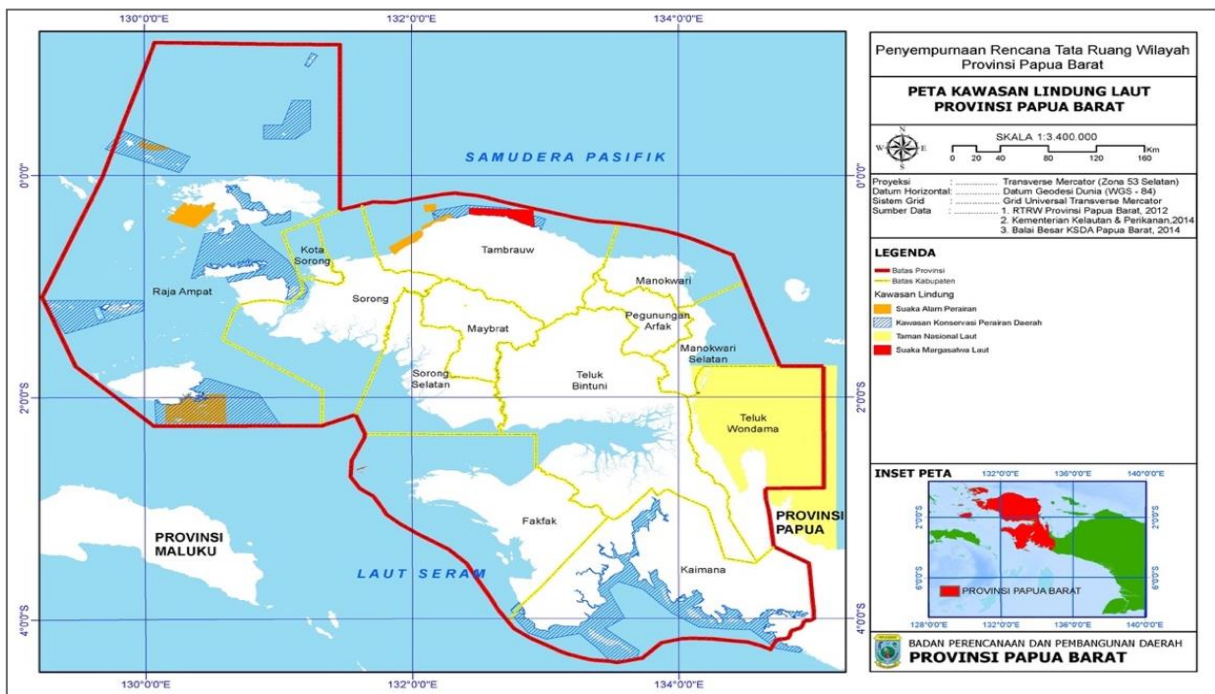
2.1.4.3.3.1 Kawasan Lindung Laut

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar baik untuk sektor perikanan, minyak dan gas, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Dengan potensi sumberdaya kelautan yang tinggi meliputi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga di masa mendatang, melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, kebutuhan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Dalam rangka perlindungan terhadap sumber daya perairan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan beberapa kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Papua Barat. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan perubahannya pada Undang-undang 45 Tahun 2009, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan perubahannya pada Undang-undang No. 1 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh

pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Ekosistem dan sumberdaya alam pesisir merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati dan nirhayati, yang secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem atau sistem ekologi. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut maka akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Di dalam suatu ekosistem pesisir terjadi transformasi energi yang berlangsung di antara kedua komponen dalam sistem tersebut maupun dengan komponen-komponen dari sistem lainnya. Kelangsungan fungsi ekosistem sangat menentukan kelestarian sumber daya alam sebagai komponen yang terlibat dalam sistem tersebut. Karena itu untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam, perlu diperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung di antara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem.

Gambar II.134 Peta Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat



Catatan: peta yang ditampilkan masih mencakup wilayah Provinsi Papua Barat sebelum penetapan DOB Papua Barat Daya
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033

Dalam RTRW Provinsi Papua Barat 2013-2033, kawasan konservasi atau lindung laut di Provinsi Papua Barat terdiri dari beberapa kriteria diantaranya suaka margastwa laut, cagar alam laut, Taman Nasional Laut, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Berdasarkan manfaatnya, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan sebagai perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan Teluk Bintuni, kawasan Teluk Cendrawasih, kawasan pesisir utara kepala burung (Sausapor, Manokwari), kawasan mangrove Bintuni; kawasan untuk kepentingan wisata dan ritual meliputi kawasan Teluk Triton dan Pulau Aiduna (Kaimana). Gambaran mengenai beberapa kawasan konservasi di perairan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih

Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNTC) terletak di Samudera Pasifik dan secara geografis terletak pada koordinat 01°43'-03°22' Lintang Utara dan 134°06'-135°10' Bujur Timur. Berdasarkan wilayah administrasi, TNTC berada di Kabupaten Teluk Wondama yang meliputi 13 distrik yaitu Distrik Wasior, Wondiboi, Rasiei, Naikere, Pesisir Kuri, Teluk Duairi, Roon, Rumberpon, Soug Wepu, Windesi, Wamesa, Dataran Wamesa, dan Roswar. TNTC merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove dan hutan tropika daratan pulau di Papua. TNTC merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Potensi karang TNTC tercatat 150 jenis dari 15 famili, dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentase penutupan karang hidup bervariasi antara 30,40% sampai dengan 65,64%. Umumnya, ekosistem terumbu karang terbagi menjadi dua zona yaitu zona rata-rata terumbu (reef flat) dan zona lereng terumbu (reef slope). Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni karang biru (*Heliopora coerulea*), karang hitam (*Antiphatas* sp.), family Faviidae dan Pectiniidae, serta berbagai jenis karang lunak.

Kawasan TNTC secara definitif ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.8009/Kpts-II/2002 tanggal 29 Agustus 2002 dengan luas 1.453.500 hektare, terdiri dari 68.000 hektare daratan yang meliputi 12.400 hektare (0,85%) pesisir pantai, 55.800 hektare (3,84%) daratan pada pulau-pulau, 80.000 hektare (5,5%) terumbu karang dan luas lautan 1.305.500 hektare (89,8%). Kawasan TNTC beriklim tropis lembab. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Fergusson, kawasan TNTC termasuk dalam iklim tipe A dengan nilai Q = 12,47%. Rata-rata curah hujan per tahun berkisar antara 1.500-3.500 mm dengan temperatur udara 25-30°C dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75-90%.

Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Kaimana, merupakan KKLD yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, melalui Peraturan Bupati Kaimana No. 04 Tahun 2008 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Kaimana. Luas wilayah yang dicadangkan menjadi KKLD adalah sebesar 597.747 Ha meliputi seluruh perairan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terakhir pulau terluar (seluruh wilayah perairan Kaimana) sehingga semua kampung masuk dalam kawasan, yaitu terdapat 7 distrik yang terdiri dari 84 kampung dan 2 kelurahan. Adapun di tingkat nasional telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dimana Luas KKD Kaimana adalah 499.804,13 Ha. Secara morfologi, Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari < 2% hingga di atas 70% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0-2.800 m di atas permukaan laut. Iklim secara umum dibagi menjadi 2 yaitu musim kemarau dan penghujan, namun masyarakat lokal lebih mengenal 4 musim yaitu pancaroba timur (Maret-Mei), angin timur (Juni- Agustus), pancaroba barat (September-November), dan musim angin barat (Desember-Februari). Temperatur permukaan perairan Kaimana pada bulan Agustus berkisar antara 25,6-27,0°C

dan 24,3-26,5°C di dasar (50 m), sedangkan pada bulan Februari temperatur bervariasi antara 28,4° dan 29,0°C di lapisan permukaan dan 27,3-29,6°C di dasar. Rata-rata perbedaan antara permukaan dan dasar perairan lebih besar di bulan Agustus daripada Februari. Salinitas pada perairan Kaimana tercatat antara 29,5- 34,1.

Persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 4-6 m berkisar antara 22-82%, sementara persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 12-15 m berkisar antara 4-57%, dan persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 20-25 m berkisar antara 3-68%. Spesies ikan yang paling sering dijumpai adalah *Lutjanus decussatus*, *Parupeneus barberinus*, *Parupeneus multifasciatus*, *Ctenochaetus binotatus* dan *Scarus flavipectoralis*. Sementara lebih dari setengah dari biomas ikan target yang tercatat terdiri dari famili *Caesionidae* (fusiliers), *Scaridae* (parrot fish) dan *Acanthuridae* (surgeon fish). Perairan daerah Kaimana memiliki terumbu karang tepi (fringing reef). Topografi daerah pesisirnya landai. Hasil penelitian dari CI sepanjang tahun 2006–2010, daerah KKLD Kaimana memiliki 1.003 jenis ikan, 471 jenis karang, 28 jenis udang, dan 2 mantis. Tutupan karang yang dihasilkan memperlihatkan bahwa tutupan karang mati mencapai 16%, karang hidup 15%, rubbles 10%, pasir 42% dan biota lainnya 17%. Daerah hutan mangrove terdapat di Teluk Triton, yaitu disekitar kampung Lobo dan Teluk Arguni di Distrik Yamor. Mangrove di wilayah KKLD Kaimana masih tergolong asli dan masih cukup baik.

2.1.4.3.3.2 Perikanan Laut dan Perairan Umum

Produksi perikanan tangkap laut Provinsi Papua Barat dihasilkan dari 6 (enam) kabupaten yang memiliki wilayah laut, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak hanya terdapat perikanan tangkap di perairan darat. Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap laut terbesar di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Kaimana (23.691 ton dengan nilai produksi 922,72 milyar rupiah) dan Kabupaten Fakfak (20.315 ton dengan nilai produksi 1,12 triliun rupiah).

Tabel II.119 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Perairan Umum Daratan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Kabupaten	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Tangkap di Perairan Darat		Total	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
Fakfak	20.315	1.119.152.000	-	-	20.315	1.119.152.000
Kaimana	23.691	922.724.525	206	4.589.025	23.897	927.313.550
Teluk Wondama	12.974	418.576.315	-	-	12.974	418.576.315
Teluk Bintuni	632	42.587.750	494	16.201.280	1.126	58.789.030
Manokwari	16.992	930.254.780	8	227.815	17.000	930.482.595
Manokwari Selatan	3.353	248.004.800	49	1.668.130	3.402	249.672.930
Pegunungan Arfak	-	-	25	798.000	25	798.000
Papua Barat	77.957	3.681.300.170	782	23.484.250	78.739	3.704.784.420

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2020"

Adapun produksi ikan tangkap di perairan darat (sungai dan danau) terbesar di Papua Barat terdapat di Kabupaten Kaimana (206 ton dengan nilai produksi 4,59 milyar rupiah) dan Teluk Bintuni (494 ton dengan nilai produksi 16,2 milyar rupiah), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.119. Perbedaan produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum darat tersebut sangat dipengaruhi jumlah dan komposisi armada penangkapan.

Semakin banyak jumlah armada penangkapan dan komposisi armadanya modern (kapal motor) tinggi, maka produksi perikanan tangkap juga akan mengalami peningkatan.

2.1.4.3.3.3 Perikanan Budidaya

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Barat juga berasal dari perikanan budidaya, baik pembesaran maupun pembenihan. Pada tahun 2022, produksi perikanan budidaya pembesaran terbesar di Provinsi Papua Barat terdapat di Kabupaten Manokwari (721 ton), Teluk Wondama (479 ton) dan Kaimana (118 ton), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.120. Adapun produksi budidaya pembenihan terbesar di Provinsi Papua Barat tahun 2022 terdapat di Kabupaten Manokwari (17.100 ekor) dan Teluk Wondama (4.811 ekor).

Tabel II.120 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2022

Kabupaten	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1.000 Ekor)
Fakfak	20	-
Kaimana	118	-
Teluk Wondama	479	4.811
Teluk Bintuni	15	1.680
Manokwari	721	17.100
Manokwari Selatan	16	752
Pegunungan Arfak	5	-
Papua Barat	1.374	24.343

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka"

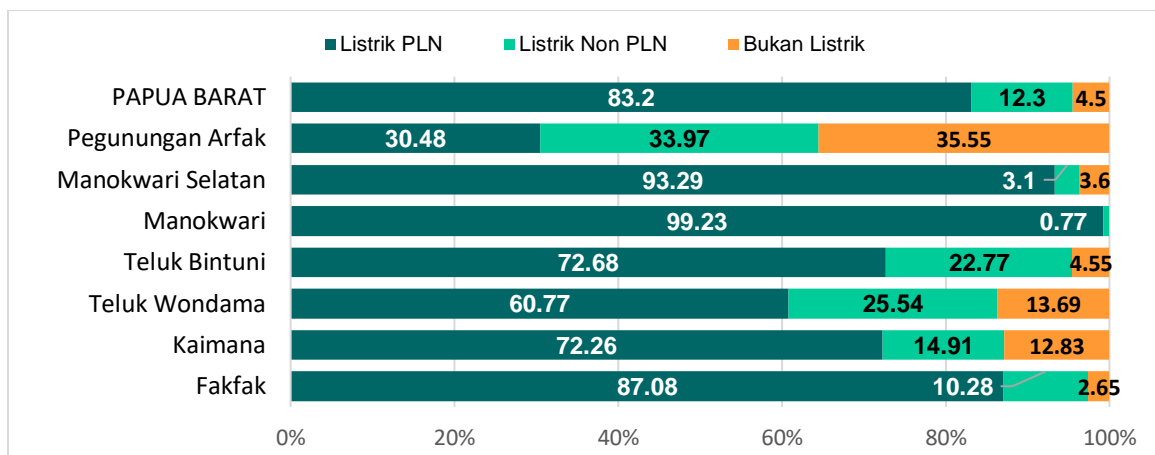
2.1.4.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.1.4.3.4.1 Energi

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua Barat.

Gambar II.136 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama di Papua Barat pada tahun 2023. Berdasarkan Gambar II.136 diketahui bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik di Papua Barat. Rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik pada tahun 2023 di Pegunungan Arfak sebanyak 35,55%, Teluk Wondama sebanyak 13,69%, Kaimana sebanyak 12,83%, Teluk Bintuni sebanyak 4,55%, Manokwari Selatan sebanyak 3,6%, serta Fakfak sebanyak 2,65%. Dalam hal ini, daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan pemenuhan akses listrik adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Kaimana.

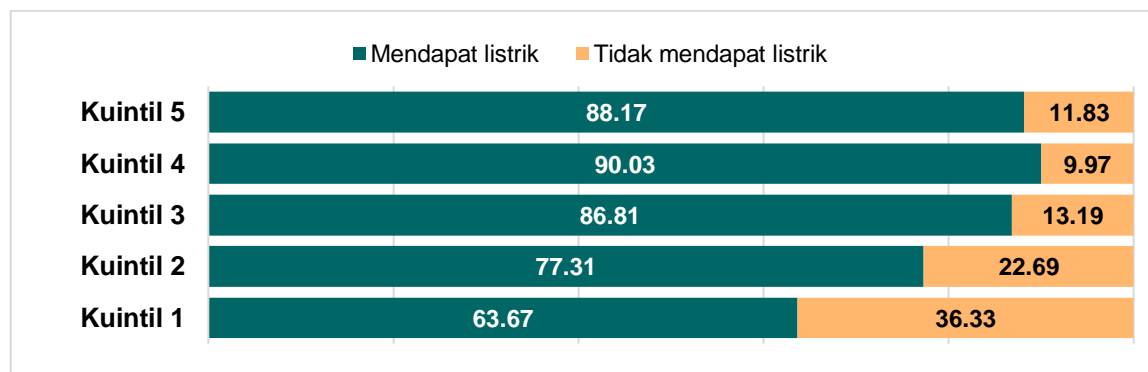
Gambar II.135 Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Papua Barat, 2023 (%)



Sumber: BPS Papua Barat, 2024 dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua Barat”

Gambar II.137 menunjukkan cakupan rumah tangga dengan akses listrik menurut kelompok kesejahteraan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Susenas 2023. Berdasarkan Gambar II.137 diketahui bahwa rumah tangga yang tidak mendapatkan listrik tersebar di seluruh kelompok pendapatan, terutama yang paling banyak tidak mendapatkan Listrik berada pada kelompok termiskin, yaitu sebanyak 36,33% penduduk 20% termiskin tidak mendapatkan akses Listrik. Dalam hal ini, pengeluaran listrik juga memiliki kontribusi yang tinggi pada pembentuk garis kemiskinan non-makanan.

Gambar II.136 Rumah Tangga dengan Akses Listrik Menurut Kelompok Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

Ketersediaan energi di Papua Barat merupakan persoalan yang krusial, yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, menipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil. Dalam hal ini, terdapat tekanan kepada negara dan daerah untuk dapat mendorong produksi dan penggunaan energi terbarukan, yang diawali kajian pasokan energi terbarukan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan penelitian “Analisis Kebutuhan Sumber Energi Alternatif Terbarukan (EBT) di Provinsi Papua Barat”, yang dilakukan di 4 (empat) kabupaten, yaitu Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak dan Kaimana. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui beberapa kesimpulan pengembangan EBT di Papua Barat,

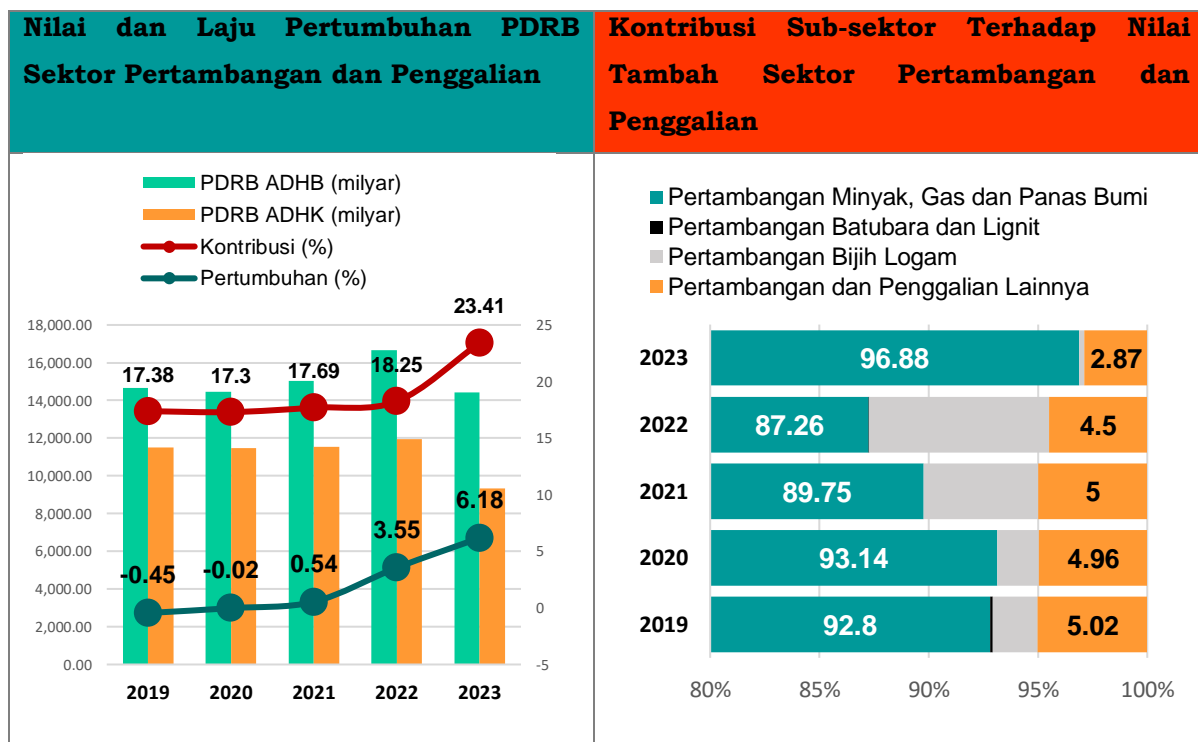
yaitu Implementasi energi terbarukan di Provinsi Papua Barat dapat digunakan sebagai pendukung program Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Penting untuk dapat mengkaji pola beban listrik yang lebih rinci dan akurat, termasuk pemilihan jenis potensi dan teknologi dengan tepat. Tujuan akhir Pengembangan energi terbarukan di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN adalah untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat. Dari semua potensi energi yang ada, hambatan utama pemanfaatan energi terbarukan adalah permasalahan biaya investasi yang tinggi untuk setiap kW kapasitas listrik.

2.1.4.3.4.2 Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,38%, sedangkan pada tahun 2022 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 18,25%. Kontribusi ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 23,41% pada tahun 2023. Adapun subsektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian di Papua Barat tahun adalah subsektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi yang mencapai 96,88% pada 2023. Dalam hal ini, produksi dari LNG Tangguh masih memberikan kontribusi terbesar pada sub-sektor ini.

Gambar II.137 Perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian di Papua Barat, 2019-2023



Sumber: BPS Papua Barat, 2024 dalam dokumen "PDRB Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2019-2023"

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumber daya mineral dan migas yang cukup besar yang tersebar di seluruh kabupaten, meliputi pertambangan mineral logam,

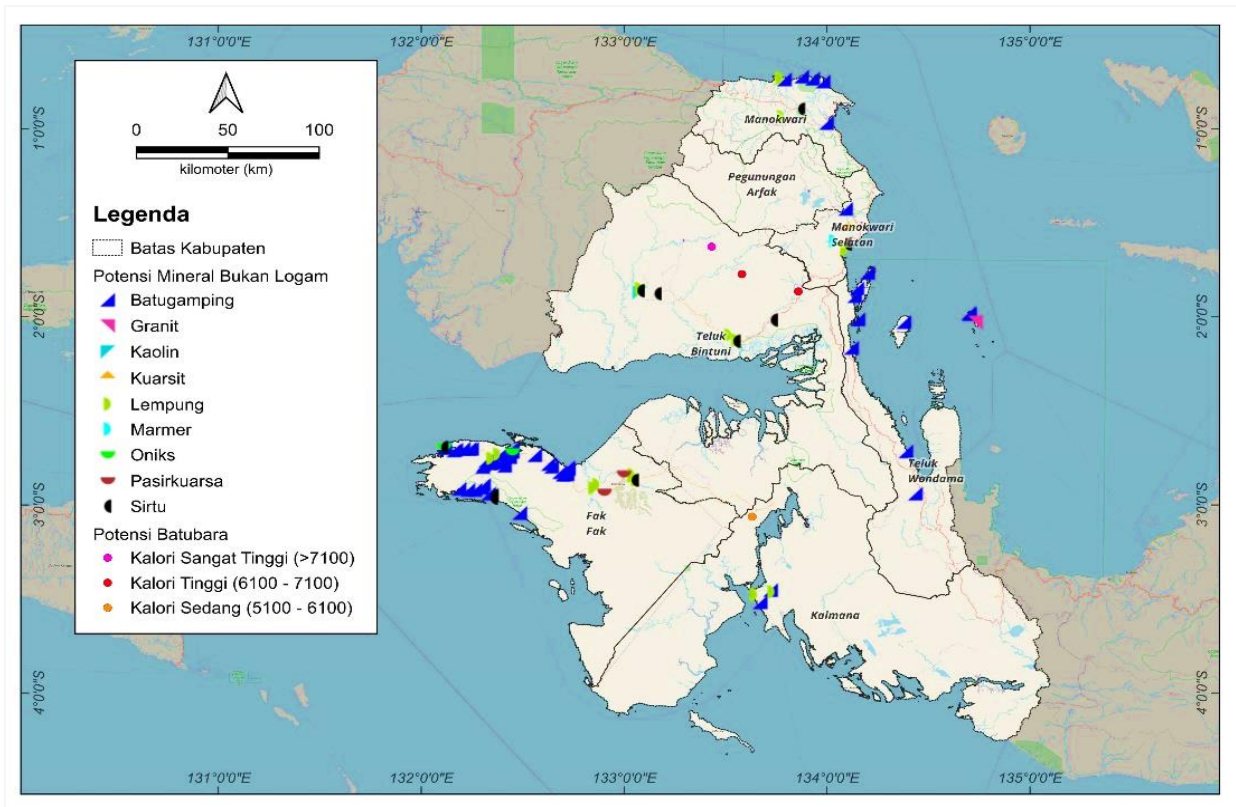
pertambangan mineral batuan, pertambangan batu bara (Gambar II.138), pertambangan minyak dan gas bumi (Gambar II.138), serta pertambangan panas bumi (Tabel II.121). Sebagian potensi dan kawasan pertambangan di Provinsi Papua Barat berada di Kawasan hutan.

Tabel II.121 Potensi Pertambangan

Potensi Pertambangan	Kabupaten	Keterangan
Mineral logam	Manokwari	Emas, mangan dan antimony
	Teluk Bintuni	Emas, besi, nikel
	Teluk Wondama	Emas
Mineral batuan	Fakfak	Gamping, lempung, bijih besi, pasir kuarsa
	Seluruh kabupaten	Sirtu
Batu bara	Fakfak	
	Manokwari	
	Teluk Wondama	
	Teluk Bintuni	
Minyak dan gas	Fakfak	Genting Oil
	Teluk Bintuni	Genting Oil Migas Tangguh LNG Train 3 Pertambangan lepas pantai
Panas bumi	Teluk Bintuni	

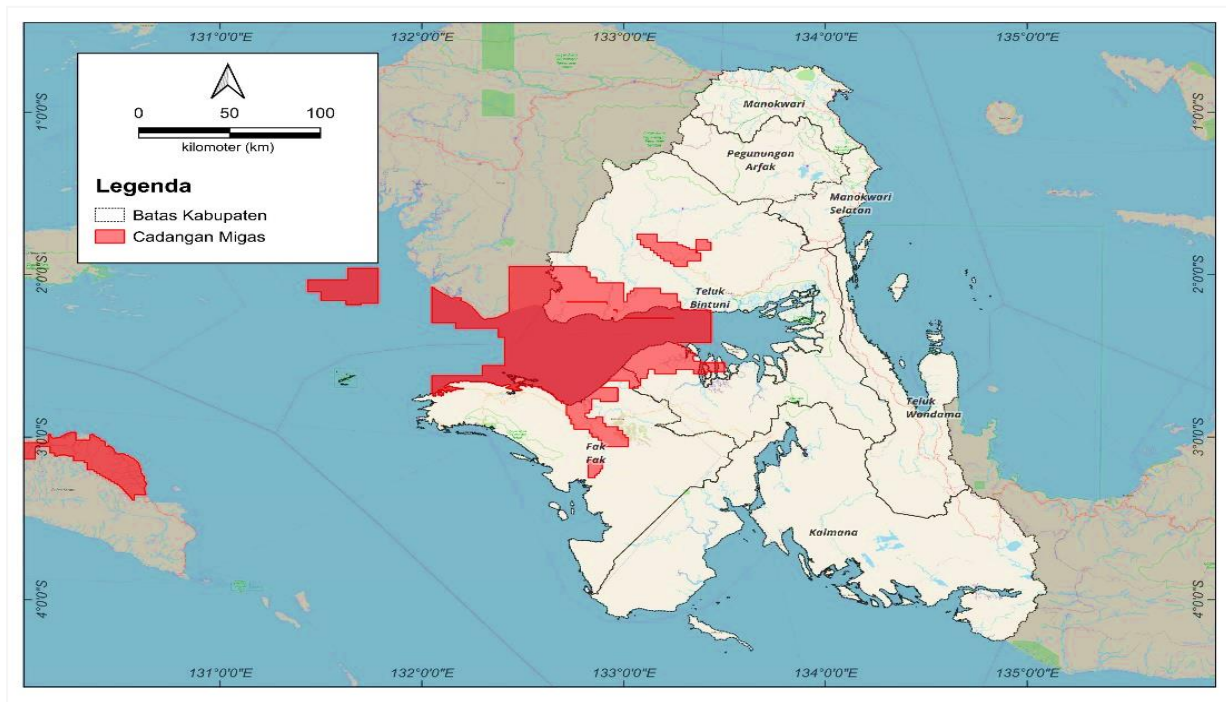
Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Papua Barat

Gambar II.138 Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batubara di Provinsi Papua Barat



Sumber: Kementerian ESDM, 2024 (<https://geoportal.esdm.go.id/>) (data diolah)

Gambar II.139 Peta Sebaran Cadangan Migas di Provinsi Papua Barat



Sumber: Kementerian ESDM, 2024 (<https://geoportal.esdm.go.id/>) (data diolah)

Apabila meninjau efisiensi pengelolaan potensi tambang di Provinsi Papua Barat, masih terdapat pemanfaatan potensi tambang di luar kawasan pertambangan melalui mekanisme perizinan lainnya, khususnya pada galian C dan pertambangan emas. Hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kerusakan lingkungan maupun kewajiban lainnya (pajak dan retribusi) sehingga mengakibatkan tidak efisiensinya pendapatan negara maupun masyarakat.

2.1.4.3.5 Perdagangan

Perdagangan di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari kegiatan impor maupun ekspor. Diketahui bahwa nilai ekspor Provinsi Papua Barat Tahun 2023 mencapai 3.078.725 ribu USD. Adapun nilai ekspor minyak dan gas di Papua Barat mencapai 3.026.645 ribu USD sementara nilai ekspor non-minyak mencapai 53.079 ribu USD. Negara yang menjadi tujuan ekspor utama antara lain adalah China, Jepang, dan Korea Selatan. Nilai impor Papua Barat pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 3.048.334 ribu USD.

2.1.4.3.5.1 Ekspor

Kegiatan ekspor dilihat dari volume dan nilai ekspor berdasarkan jenis komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat. Volume ekspor Provinsi Papua Barat menurut jenis komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat diketahui meningkat pada tahun 2023 yang diikuti juga dengan nilai ekspor yang semakin meningkat pada tahun yang sama. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel II.122 dan Tabel II.123.

Berdasarkan Tabel II.122 diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan total volume ekspor dari 5,23 juta kg menjadi 5,98 juta kg, serta peningkatan nilai FOB dari 2,73 miliar USD menjadi 3,08 miliar USD. Komoditas utama yang mendominasi ekspor adalah minyak dan gas (migas), dengan peningkatan volume dari 4,95 juta kg menjadi

5,68 juta kg dan nilai FOB dari 2,68 miliar USD menjadi 3,03 miliar USD. Sementara itu, ekspor non-migas juga mengalami peningkatan volume dari 280,2 juta kg menjadi 290,6 juta kg, dengan kenaikan nilai FOB dari 45,06 juta USD menjadi 52,08 juta USD. Beberapa komoditas non-migas yang mengalami kenaikan signifikan antara lain perhiasan/permata, kayu, dan barang buatan pabrik. Namun, beberapa komoditas seperti kayu mengalami penurunan volume yang cukup drastis, meskipun masih memberikan kontribusi besar dalam nilai ekspor. Secara keseluruhan, ekspor Papua Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan beberapa komoditas non-migas bernilai tinggi.

Tabel II.122 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal, 2022 dan 2023

Jenis Komoditi	Volume (kg)		Nilai FOB (US\$)	
	2022	2023	2022	2023
MINYAK DAN GAS	4.951.825.646	5.688.317.890	2.682.938.692	3.026.645.797
Bahan bakar mineral	4.951.825.646	5.688.317.890	2.682.938.692	3.026.645.797
NON-MINYAK DAN GAS	280.209.078	290.604.584	45.062.157	52.079.342
Ikan dan Udang	1.019.772	1.171.390	12.234.230	13.020.544
Produk Hewani	131.000	196.000	131.000	196.000
Kopi, Teh, Rempah-rempah	9.972	20.000	201.745	202.800
Hasil Penggilingan	36.000	-	18.896	-
Bahan-bahan Nabati	-	2.400	-	1.200
Daging dan Ikan Olahan	284.815	89.280	4.081.187	518.922
Kakao/Coklat	3	6	10	19
Berbagai Makanan Olahan	-	10	-	27
Garam, Belerang, Kapur	256.904.661	286.081.815	11.328.185	12.324.889
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi- wangan	-	8	-	217
Plastik dan Barang dari Plastik	-	297	-	594
Kayu, Barang dari Kayu	20.928.160	2.879.286	4.303.544	2.022.147
Jerami, Bahan Anyaman	610	-	0	-
Kapas Gumpalan, Tali	-	150	-	33
Barang-barang Rajutan	-	14	-	343
Kain Perca	-	150	-	597
Alas Kaki	-	1	-	20
Benda dari Batu, Gips, Semen	4.740	-	483	-
Perhiasan, Permata	2.042	1.419	11.640.044	23.494.631
Besi dan Baja	-	1.118	-	1.060
Benda dari Besi dan Baja	43.160	6.680	4.405	4.056
Perkakas, Perangkat Potong	49.700	400	432.918	398
Mesin, Pesawat Mekanik	181.823	32.413	306.614	92.817

Jenis Komoditi	Volume (kg)		Nilai FOB (US\$)	
	2022	2023	2022	2023
Mesin dan Peralatan Listrik	-	645	-	1.281
Kendaraan dan Bagiannya	41	70	40	240
Kapal Laut	591.000	111.000	350.000	14
Perangkat Optik	2.004	-	6.991	-
Berbagai Barang Buatan Pabrik	19.500	10.000	19.500	190.300
Paket Pos, Parcel dan Barang yang Dikembalikan	76	31	2.365	6.194
Jumlah	5.232.034.724	5.978.922.474	2.728.000.849	3.078.725.139

Sumber: BPS Papua Barat dokumen "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2024"

Tabel II.123 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	Volume (kg)		Nilai FOB (US\$)	
	2022	2023	2022	2023
Australia	26.633	107.016	359.374	39.502
Bahrain	25.500	-	14.560	-
Bangladesh	-	0	-	19
Canada	-	0	-	256
China	2.455.568.405	2.692.696.493	1.603.911.320	1.670.128.752
Cyprus	25.480	101.920	19.850	81.620
Denmark	4.236	-	31.185	-
East Timor	25.562.208	72.722.557	1.784.416	3.616.664
Estonia	-	0	-	25
France	3.000	37.905	12.000	224.527
Germany	-	14	-	869
Greece	119.425	264.350	245.687	381.068
Hong Kong	1.423	12.714	7.747.296	10.660.663
Iran	591.000	-	350.000	-
Ireland	-	0	-	13
Israel	-	0	-	102
Italy	-	0	-	192
Japan	840.832.055	924.012.478	483.794.430	633.198.646
Korea	1.347.647.718	1.356.304.516	492.728.173	461.980.592
Malaysia	68.394	121.967.837	350.611	70.529.611
Mexico	309.847.944	317.417.109	110.840.447	56.879.392
Netherlands	-	4	-	40
New Zealand	-	15.288	-	5.710
Oman	-	111.000	-	14
Papua New Guinea	83.804.661	72.592.127	4.227.085	3.708.592

Negara Tujuan	Volume (kg)		Nilai FOB (US\$)	
	2022	2023	2022	2023
Saudi Arabia	2.536.940	2.402.460	1.633.242	1.683.460
Singapore	539.409	245.209	3.594.371	2.592.545
Switzerland	-	8	-	32
Taiwan	164.246.718	205.165.816	7.960.603	41.479.467
Thailand	-	212.375.426	-	117.844.553
Turkey	610	-	0	-
United Kingdom	14	2	146	38
United States	510.879	295.014	7.673.259	2.999.202
Uruguay	12.420	13.000	57.083	67.000
Vietnam	59.652	62.208	665.712	621.972
Jumlah	5.232.034.724	5.978.922.474	2.728.000.849	3.078.725.139

Sumber: BPS Papua Barat dokumen "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2024"

Berdasarkan data ekspor Provinsi Papua Barat menurut negara tujuan tahun 2022 dan 2023, China menjadi negara tujuan utama ekspor dengan peningkatan volume dari 2,45 miliar kg menjadi 2,69 miliar kg dan nilai FOB dari 1,60 miliar USD menjadi 1,67 miliar USD. Jepang dan Korea juga merupakan pasar signifikan dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 633 juta USD dan 461 juta USD pada 2023. Beberapa negara seperti Taiwan dan Thailand mengalami lonjakan nilai ekspor yang cukup signifikan, sementara ekspor ke negara seperti Bahrain, Iran, dan Meksiko menurun drastis. Secara keseluruhan, ekspor Papua Barat menunjukkan pertumbuhan positif dengan diversifikasi tujuan ekspor ke beberapa negara baru.

2.1.4.3.5.2 Impor

Kegiatan impor terdiri dari volume dan nilai impor menurut negara asal maupun pelabuhan bongkar. Berdasarkan data impor Provinsi Papua Barat tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan total volume impor dari 226,8 juta kg pada 2022 menjadi 180,5 juta kg pada 2023, serta penurunan nilai CIF dari 32,2 juta USD menjadi 21,8 juta USD. Australia tetap menjadi negara asal impor terbesar dengan peningkatan volume dari 72,1 juta kg menjadi 113,3 juta kg dan nilai CIF dari 10,8 juta USD menjadi 14,3 juta USD. Sebaliknya, impor dari China dan Rusia mengalami penurunan drastis, dengan China tidak tercatat melakukan ekspor ke Papua Barat pada 2023. Dari sisi pelabuhan bongkar, Manokwari masih menjadi pintu masuk utama impor, meskipun mengalami penurunan volume yang signifikan, sementara impor melalui Sorong meningkat dari 3 juta kg menjadi 8,9 juta kg. Secara keseluruhan, tren impor Papua Barat menunjukkan penurunan baik dalam volume maupun nilai, dengan ketergantungan yang lebih besar pada impor dari Australia.

Tabel II.124 Volume dan Nilai Impor Provinsi Papua Barat Menurut Negara Asal dan Pelabuhan Bongkar Tahun 2022 dan 2023

		Volume (kg)		Nilai CIF (US\$)	
		2022	2023	2022	2023
Negara Asal	Australia	72.185.000	113.300.000	10.814.027	14.319.767
	China	51.100.000	-	6.945.875	-
	Malaysia	1.341.813	1.400.000	1.849.439	897.120
	Oman	53.580.000	58.300.000	2.507.544	1.661.550
	Russia Federation	46.839.998	-	9.050.326	-
	Singapore	1.750.000	10.386	1.064.000	55.884
	Vietnam	-	7.500.000	-	4.866.900
	Jumlah	226.796.811	180.510.386	32.231.211	21.801.221
Pelabuhan Bongkar	Manokwari	223.704.998	171.600.000	29.317.772	15.981.317
	Sorong	3.091.813	8.910.386	2.913.439	5.819.904
	Jumlah	226.796.811	180.510.386	32.231.211	21.801.221

Sumber: BPS Papua Barat dokumen "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2024"

2.1.4.3.5.3 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan dapat dilihat dari perkembangan nilai ekspor-impor dan perkembangan volume ekspor-impor. Perkembangan nilai dan volume ekspor-impor dan neraca perdagangan di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada Tabel II.125. Perkembangan ekspor-impor dan neraca perdagangan Provinsi Papua Barat selama periode 2010-2023 menunjukkan tren yang dinamis dengan kecenderungan surplus perdagangan yang kuat. Nilai ekspor meningkat dari 1,68 miliar USD pada 2010 menjadi 3,08 miliar USD pada 2023, meskipun sempat mengalami fluktuasi di beberapa tahun. Peningkatan ekspor ini didorong oleh dominasi sektor minyak dan gas serta komoditas unggulan lainnya. Di sisi lain, impor mengalami variasi signifikan, dengan lonjakan tertinggi pada 2019 sebesar 374,3 juta USD sebelum akhirnya menurun drastis menjadi 21,8 juta USD pada 2023. Tren ini mencerminkan berkurangnya ketergantungan Papua Barat terhadap impor, yang dapat menjadi peluang bagi penguatan industri dalam negeri. Meskipun neraca perdagangan selalu mencatat surplus, namun tren penurunan volume ekspor dari 7,04 miliar kg pada 2010 menjadi 5,97 miliar kg pada 2023 perlu mendapatkan perhatian. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur logistik, ketergantungan pada komoditas mentah tanpa peningkatan nilai tambah, serta persaingan di pasar global. Oleh karena itu, intervensi kebijakan diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekspor Papua Barat.

Tabel II.125 Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2023

Tahun	Perkembangan Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan (US Dollar)			Perkembangan Volume Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan (Kilogram)		
	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
2010	1.683.762.698	49.073.350	1.634.689.348	7.049.458.832	9.678.802	7.039.780.030
2011	2.975.436.442	40.325.979	2.935.110.463	7.985.567.090	24.157.057	7.961.410.033
2012	3.611.392.130	14.334.965	3.597.057.165	8.786.448.539	14.032.308	8.772.416.231
2013	3.467.166.882	30.830.193	3.436.336.689	8.538.877.578	8.944.659	8.529.932.919
2014	3.974.513.519	27.550.190	3.946.963.329	7.492.045.672	6.168.600	7.485.877.072
2015	2.741.794.405	35.653.618	2.706.140.787	6.796.750.053	12.260.770	6.784.489.283
2016	1.751.017.390	64.555.493	1.686.461.897	6.099.399.210	42.895.465	6.056.503.745
2017	1.960.812.074	68.531.508	1.892.280.566	6.003.173.959	11.932.150	5.991.241.809
2018	2.823.655.329	57.377.485	2.766.277.844	6.770.921.916	253.718.978	6.517.202.938
2019	2.332.677.326	374.303.647	1.958.373.679	6.721.218.357	355.039.598	6.366.178.759
2020	1.795.898.577	66.534.704	1.729.363.873	7.038.798.831	170.659.099	6.868.139.732
2021	2.077.293.581	68.750.335	2.008.543.246	5.927.169.699	313.326.826	5.613.842.873
2022	2.728.000.849	32.231.211	2.695.769.638	5.232.034.724	226.796.811	5.005.237.913
2023	3.078.725.139	21.801.221	3.056.923.918	5.978.922.474	180.510.386	5.798.412.088

Sumber: BPS Papua Barat dokumen "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2024"

Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk memperkuat sektor ekspor, antara lain: (1) penguatan infrastruktur logistik dan pelabuhan; (2) diversifikasi produk ekspor; (3) insentif bagi industri berorientasi ekspor; (4) peningkatan SDM dan teknologi produksi; serta (5) ekspansi pasar dan diplomasi ekonomi. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, Papua Barat dapat mempertahankan surplus perdagangan, meningkatkan kontribusi sektor industri dalam ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Keberlanjutan ekspor yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing di masa depan.

2.1.4.3.6 Perindustrian

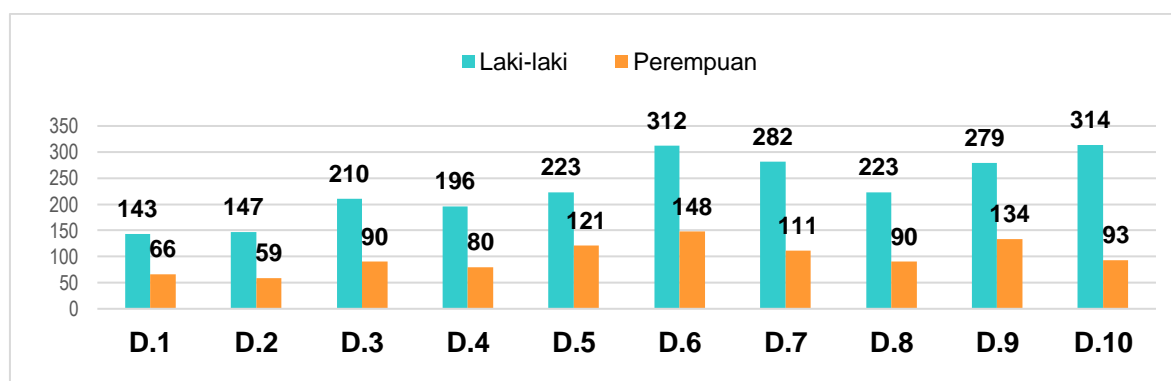
Sektor industri menjadi salah satu sektor yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap daya saing daerah. Perusahaan industri besar dan sedang di Papua Barat tahun 2022 tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana (lihat Tabel II.126). Sebagian besar industri besar dan sedang berada di Kabupaten Teluk Bintuni (8 industri) serta Kabupaten Manokwari (7 industri). Pada tahun 2022, perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Papua Barat mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.598 orang di Manokwari dan 593 orang di Teluk Bintuni (lihat Tabel II.126). Adapun lokasi dengan rata-rata balas jasa per bulan terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (tahun 2022 sebesar 6,18 juta rupiah).

Tabel II.126 Kondisi Industri Besar dan Sedang di Papua Barat Tahun 2022

Wilayah	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang	Jumlah Tenaga Kerja (orang)			Rata-rata Balas Jasa Per Bulan (juta rupiah)		
		Pekerja Produksi	Pekerja Lainnya	Total	Pekerja Produksi	Pekerja Lainnya	Seluruhnya
Kaimana	3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Teluk Bintuni	8	465	128	593	6,23	6,01	6,18
Manokwari	7	1.333	265	1.598	3,12	6,92	3,75
Papua Barat	18						

Sumber: BPS Papua Barat (2022) dalam dokumen "Statistik Industri Besar dan Sedang Papua Barat"

Gambar II.140 Penduduk Bekerja di Sektor Manufaktur/Industri Pengolahan Berdasarkan Kelompok Pendapatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Sumber: Regsosek, 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.141 menunjukkan penduduk bekerja di sektor industri pengolahan berdasarkan kelompok pendapatan di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil analisis data Regsosek (2022). Dalam Gambar II.141 diketahui bahwa meskipun sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat cukup besar dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, namun kurang banyak menyerap banyak tenaga kerja di Papua Barat. Hal ini terbukti dari penduduk bekerja sektor industri pengolahan di Papua Barat lebih didominasi oleh penduduk kelas menengah ke atas, dan terkonsentrasi pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Pembangunan dan pengembangan sektor industri besar dan sedang tidak berarti sekedar membangun pabrik-pabrik dan memasarkan hasil produksinya, namun bermakna membangun suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk hidup dan berkembang secara mandiri serta mengakar pada struktur ekonomi dan struktur masyarakat setempat. Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, industri yang akan dikembangkan di Papua Barat harus dipilih secara hati-hati, hemat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan energi, serta menggunakan teknologi yang efisien, produktif, dan bersih serta tidak membahayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan di masa mendatang. Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2022 jumlah usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua Barat sebanyak 6.273 usaha yang didominasi usaha industri mikro, dan sisanya adalah industri kecil (lihat Tabel II.127).

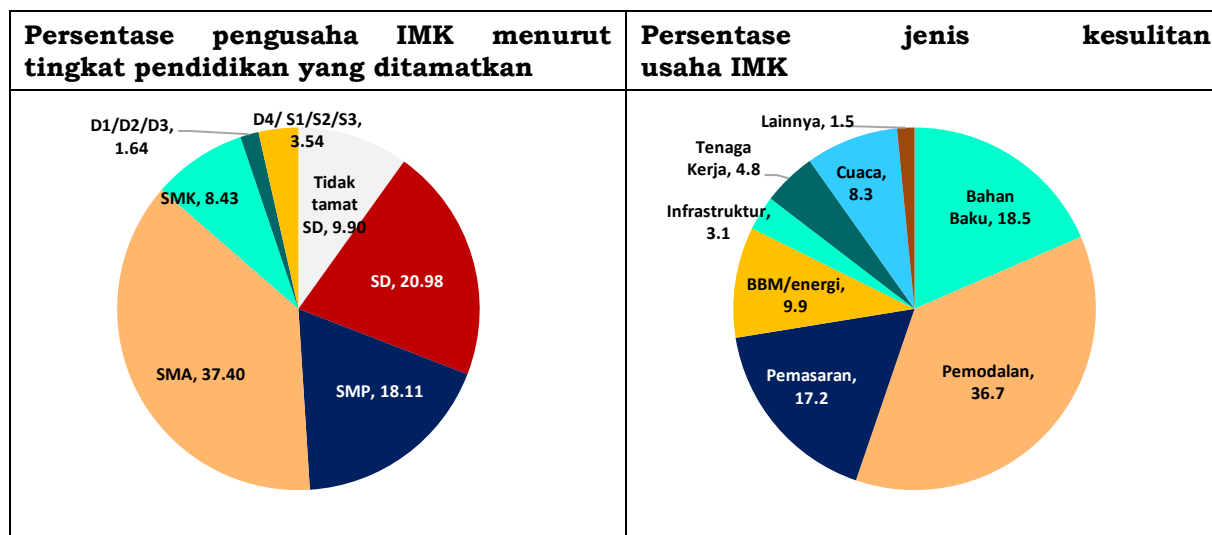
Tabel II.127 Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Barat, 2022

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha Baku	Banyaknya Usaha	Sumber Modal Utama					Tenaga Kerja	
			Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian / Sepenuhnya dari Pihak Lain					
				Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah		Lainnya
10	Industri makanan	3.683	3.211	109	106	70	174	13	6.655
11	Industri minuman	314	264	34	-	-	16	-	717
12	Industri pengolahan tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Industri tekstil	174	171	3	-	-	-	-	200
14	Industri pakaian jadi	429	352	27	-	8	42	-	832
15	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	703	576	23	-	82	22	-	1.344
17	Industri kertas dan barang dari kertas	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	63	54	9	-	-	-	-	225
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	9	6	-	-	3	-	-	18
21	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	10	6	-	-	-	4	-	14
22	Industri karet, barang dari karet dan plastik	4	4	-	-	-	-	-	8
23	Industri barang galian bukan logam	373	333	26	10	-	4	-	1.122
24	Industri logam dasar	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya	220	190	8	-	-	22	-	664
26	Industri komputer, barang elektronik dan optik	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Industri peralatan listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Industri alat angkut lainnya	22	6	16	-	-	-	-	62
31	Industri furnitur	97	65	7	-	-	25	-	216
32	Industri pengolahan lainnya	167	136	19	5	-	2	5	325
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	5	5	-	-	-	-	-	20
PAPUA BARAT		6.273	5.379	281	121	163	311	18	12.422

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Barat 2022"

Lebih dari separuh usaha IMK di Papua Barat yakni sebanyak 48,99% dipimpin oleh pengusaha yang berpendidikan SMP ke bawah. Sebagian besar pengusaha pendidikan rendah berusaha di sektor industri makanan. Sektor industri kayu, barang dari kayu, dst juga didominasi oleh pengusaha pendidikan SMP ke bawah. Sementara pengusaha yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah (Diploma I/II/III dan Sarjana (S1) atau lebih tinggi) hanya 5,18% dari seluruh pengusaha IMK di Papua Barat.

Gambar II.141 Persentase Penguasaha IMK Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, serta Persentase Jenis Kesulitan Usaha IMK Tahun 2022



Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Barat 2019"

Tabel II.128 Usaha Industri Mikro dan Kecil yang melakukan Inovasi dan Bentuk Inovasi di Provinsi papua Barat, 2020-2022

Tahun	Banyaknya Usaha	Melakukan Inovasi	Bentuk Inovasi			
			Produk	Distribusi	Teknologi/ Proses Produksi	Lainnya
2020	4.558	142	85	53	82	-
2021	6.069	159	153	51	29	-
2022	6.273	451	283	284	30	-

Sumber: BPS dalam dokumen "Profil Industri Mikro dan Kecil 2020-2022"

Kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha adalah hal yang biasa. Hal ini berlaku juga pada usaha IMK. Proporsi IMK paling banyak mengalami kesulitan pada pemodalan (36,7% atau 3489 usaha IMK). Kemudian secara berturut-turut berikutnya adalah bahan baku (18,5%), pemasaran (17,2%), BBM/Energi (9,9%), cuaca (8,3%), tenaga kerja (4,8%), infrastruktur (3,1%), dan lainnya (1,5%).

Sejak tahun 2020 hingga 2022, terdapat peningkatan banyaknya usaha IMK di Provinsi Papua Barat. Tahun 2022, sebanyak 451 unit usaha telah melakukan inovasi. Angka ini cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021 hanya sekitar 100 unit usaha. Bentuk inovasi IMK berdasarkan prosuk dan distribusi juga mengalami kenaikan hingga tahun 2022 yang berturut-turut berjumlah 283 produk dan 284 inovasi distribusi. Teknologi/proses produksi mengalami penurunan uang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

2.1.4.3.7 Transmigrasi

A. Kawasan Transmigrasi

Di wilayah Provinsi Papua Barat, menurut data Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada periode 2015-2023 terdapat 5 kawasan transmigrasi yang tersebar di 4 kabupaten. Jumlah seluruh transmigran di 5 kawasan tersebut adalah 12.318 KK. Papua

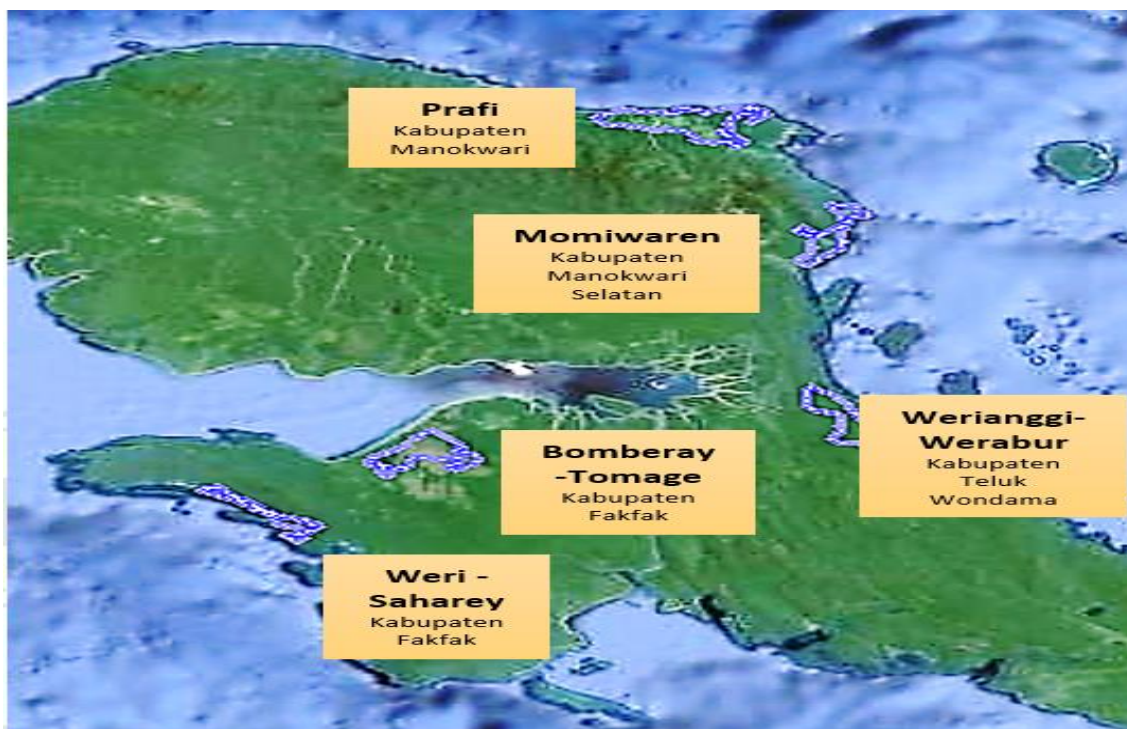
Barat merupakan salah satu provinsi tujuan transmigrasi, yang seluruhnya berjumlah 144 kawasan di seluruh Indonesia. Tabel II.129 menunjukkan lokasi kawasan transmigrasi tersebut. KK Transmigrasi terbanyak terdapat di Kabupaten Manokwari, yaitu di Kawasan Prafi dengan 9.172 KK transmigran. Kabupaten Fakfak memiliki 2 kawasan Transmigrasi,, namun dengan jumlah KK paling sedikit di antara kabupaten lainnya. Tabel II.129 menampilkan lokasi, luas kawasan dan jumlah KK di masing-masing kawasan.

Tabel II.129 Sebaran Kawasan dan Jumlah KK Transmigrasi di Papua Barat, 2023

No	Kabupaten	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah KK
1	Manokwari	Prafi	64,652.08	9,172
2	Manokwari Selatan	Momiwaren	26,216.00	2,466
3	Fakfak	Weri - Saharey	16,504.67	90
4	Fakfak	Bomberay-Tomage	16,039.89	167
5	Teluk Wondama	Werianggi-Werabur	37,121.32	423
Jumlah			160,533.96	12,318

Sumber: <https://sipukat.kemendesa.go.id/>

Gambar II.142 Peta Lokasi Kawasan Transmigrasi di Provinsi Papua Barat, 2023



Sumber: <https://sipukat.kemendesa.go.id/>

Program Transmigrasi

Program yang dijalankan terkait urusan transmigrasi adalah:

- program pengembangan transmigrasi lokal,
- program pengembangan wilayah transmigrasi, dan
- program pengembangan pemukiman transmigrasi lokal.

Transmigrasi lokal di Provinsi Papua Barat bukan berarti perpindahan penduduk dari satu provinsi ke provinsi lain, tetapi pemecahan penduduk di satu wilayah dengan tingkat ekonomi lemah sehingga diharapkan terjadi peningkatan ekonomi keluarga yang melakukan

transmigrasi. Kegiatan yang berkaitan dengan urusan transmigrasi antara lain adalah pembangunan/ penataan rumah penduduk, penjaminan kebutuhan beras bagi transmigran, pemberian lahan untuk usaha pertanian dengan luas yang memperhatikan konteks daerah, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan, pemberian sarana prasarana produksi usaha, pembangunan fasilitas pendukung (pos kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana keagamaan) di lokasi pengembangan transmigrasi.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, dimana pemecahannya melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pembahasan ini, disampaikan beberapa masalah pokok pembangunan di Papua Barat yang perlu diagendakan untuk dituntaskan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

2.2.1.1 Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan

Rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar ditandai dengan rendahnya akses dan mutu pendidikan; belum optimalnya akses dan derajat kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan” ditampilkan dalam Tabel II.130.

Tabel II.130 Pemetaan Masalah Pokok “Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan		
1	Rendahnya akses dan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan	Angka putus sekolah yang cukup tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih di bawah angka nasional pada jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi (PT), disebabkan karena faktor sosial ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta rendahnya jumlah sekolah yang bersertifikasi A dan B. Belum memadainya jumlah dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah setempat. Di samping itu, keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, pun rendah serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan Belum memadainya kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini

No	Masalah	Deskripsi
		<p>diperberat dengan belum adanya insentif secara rutin untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di daerah sulit akses dan terpencil. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan, seperti belum ada konsep/kesepakatan bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat.</p> <p>Belum tersedianya sarana pendukung akses pendidikan seperti transportasi/ mobil / bus sekolah untuk siswa bersekolah.</p> <p>Belum adanya skenario pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk belum tersedianya pendidikan inklusif dan SLB Terpadu di Provinsi Papua Barat</p> <p>Masih rendahnya SDM lokal berkompeten yang mampu/mendukung pengelolaan potensi unggulan daerah</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan bantuan biaya pendidikan (untuk pendidikan gratis wajib belajar 13 tahun).</p>
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	<p>Akses terhadap fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang masih terbatas, kualitas dan tata kelola pelayanan kesehatan yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata hingga ke daerah sulit</p> <p>Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi akibat akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang masih terbatas terutama di daerah yang sulit secara geografis, rendahnya pengetahuan masyarakat dan perilaku yang tidak menunjang peningkatan kesehatan reproduksi</p> <p>Tingginya prevalensi gizi buruk terutama stunting pada balita akibat rendahnya akses dan ketidakmampuan memperoleh pangan bergizi serta pengetahuan dan perilaku yang tidak menunjang upaya perbaikan gizi, dan diperberat oleh kondisi sanitasi yang buruk</p> <p>Tingginya prevalensi penyakit menular, terutama tuberkulosis, malaria dan HIV-AIDS akibat belum memadainya pengetahuan dan perilaku masyarakat serta kesulitan jangkauan pelayanan kesehatan</p> <p>Makin meningkatnya prevalensi penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan obesitas akibat pengetahuan dan perilaku yang tidak menunjang pola hidup sehat, termasuk kebudayaan olah raga</p> <p>Masih kurangnya keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya kesehatan, antara lain peran serta kader kesehatan dalam pelayanan posyandu dan upaya eliminasi malaria serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya</p> <p>Belum optimalnya pelayanan posyandu dalam kesiapan sarana prasarana, fasilitas pendukung dan ketersediaan tenaga kesehatan</p> <p>Belum optimalnya promosi dan pendampingan kesehatan dalam keluarga tentang upaya kesehatan</p> <p>Belum adanya Rumah Sakit Tipe A dan B di Provinsi Papua Barat, dan masih ada Kabupaten yang belum ada RS Tipe D</p> <p>Masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan dokter spesialis di daerah</p> <p>Minimnya pemahaman terkait Kesehatan reproduksi bagi remaja (laki-laki dan perempuan) dengan disabilitas;</p> <p>Tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandung, termasuk sangsi sosial yang sering didapatkan oleh perempuan dengan KTD;</p> <p>Terbatasnya ketersediaan obat-obatan, baik obat generik maupun obat paten.</p> <p>Belum adanya layanan kesehatan yang khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia.</p>
3	Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan	<p>Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa). Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpilah OAP dan non-OAP by name by address secara berkala yang dilakukan di tingkat kampung melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung.</p> <p>Lemahnya kualitas SDM dan tata kelola penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk insentif untuk kader/ pendamping / SDM di bidang rehabilitasi sosial.</p> <p>Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung</p>

No	Masalah	Deskripsi
		<p>pada APBN dan APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi.</p> <p>Sebagian besar masyarakat Papua Barat menjadi pekerja informal di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang rendah.</p> <p>Masih berlum terlindunginya hak-hak mendasar masyarakat adat Papua, terutama hak atas milik komunal, baik yang tangible (misalnya hak ulayat) maupun yang intangible (misalnya hak cipta komunitas adat).</p> <p>Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP</p> <p>Belum ada Kabupaten layak anak</p> <p>Belum tersedianya panti sosial di Provinsi Papua Barat.</p> <p>Masih rendahnya implementasi keberpihakan terkait gender, penyandang disabilitas dan kelompok rentan di berbagai sektor (pelayanan dasar dan fasilitas umum), termasuk berlum optimalnya mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau oleh OAP, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan untuk optimalisasi pelayanan dasar, termasuk dalam mengakomodasi perempuan kepala keluarga dan perempuan dengan disabilitas.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.1.2 Belum Efektifnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara Produktif, Inovatif, Berkelanjutan dan Inklusif serta Tingginya Kerawanan Pangan

Belum efektifnya pembangunan ekonomi ini ditandai dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi, belum optimalnya pengembangan pusat pertumbuhan, kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian wilayah sangat rendah, tenaga kerja yang belum berkualitas, daya saing investasi yang rendah, dan tingginya kerawanan pangan serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal secara produktif, inovatif, berkelanjutan dan inklusif, serta tingginya kerawanan pangan” ditampilkan dalam Tabel II.131.

Tabel II.131 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Efektifnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara Produktif, Inovatif, Berkelanjutan dan Inklusif, serta Tingginya Kerawanan Pangan”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Belum Efektifnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara Produktif, Inovatif, Berkelanjutan dan Inklusif		
1	Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi	<p>Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, dari wilayah dataran rendah hingga pegunungan. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah perbukitan (kelas ketinggian 100-1.000 m). Hal ini menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar dan tingginya biaya transportasi (high cost), yang menjadi hambatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata baik itu antarsektor maupun antarwilayah</p> <p>Berdasarkan kondisi kelerengan, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan bergunung sangat curam). Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan.</p>

No	Masalah	Deskripsi
2	Belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan berbasis industri dan pariwisata	Pengembangan sentra komoditas unggulan masih belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan ekonomi wilayah Belum terintegrasinya konektivitas dari dan menuju pusat pertumbuhan, serta yang menghubungkan sentra produksi dan pasar
3	Belum optimalnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal serta kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam hilirisasi komoditas lokal unggulan Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia Belum efektifnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Belum ada sinergisitas antar perangkat daerah yang membidangi peningkatan sumber daya manusia dalam mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Barat baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan Minimnya pelatihan kerja dan lapangan kerja bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas, termasuk belum adanya perlindungan bagi perempuan dan penyandang disabilitas di dunia kerja formal maupun informal; Minimnya perempuan yang menempati posisi strategis dalam dunia kerja.
4	Rendahnya daya tarik investasi dan kemudahan berusaha	Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan investor needs, diantaranya: (1) belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat; (2) belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Barat; serta (3) belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS. Rendahnya peningkatan nilai tambah dan produktivitas komoditas unggulan wilayah (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata) yang terintegrasi hulu-hilir Belum memadainya kondisi infrastruktur pendukung integrasi ekonomi hulu-hilir Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM, serta lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM, karena sulitnya akses modal bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas; Belum optimalnya penyediaan kemudahan berusaha bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan dan penyandang disabilitas
5	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuai kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian.
6	Tingginya kerawanan pangan	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan

No	Masalah	Deskripsi
	masyarakat, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	<p>pangan lokal. Hal ini diperberat dengan terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal.</p> <p>Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi. Daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi nasional.</p> <p>Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi yang disebabkan karena (1) masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan; serta (2) terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.1.3 Kerentanan Wilayah atas Perubahan Iklim, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana dan Peningkatan Emisi GRK

Deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan serta potensi bencana dan peningkatan emisi GRK” ditampilkan dalam Tabel II.132.

Tabel II.132 Pemetaan Masalah Pokok “Kerentanan Wilayah atas Perubahan Iklim, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana dan Peningkatan Emisi GRK”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Kerentanan Wilayah atas Perubahan Iklim, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana dan Peningkatan Emisi GRK		
1	Tingginya risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif	<p>Tingginya risiko bencana terutama ancaman bencana banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Frekuensi kejadian bencana di Wilayah Papua didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor (BNPB, 2022). Zona megathrust di sepanjang sisi utara Wilayah Papua berpotensi menimbulkan bahaya tsunami yang mengancam kawasan pariwisata.</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kapasitas aparat pemerintah daerah tentang pengelolaan risiko bencana mengakibatkan belum optimalnya penanganan kebencanaan.</p> <p>Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.</p>
2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	<p>Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai</p> <p>Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya</p> <p>Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi</p> <p>Penerapan pola penanganan dan pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (reduce, reuse and recycle).</p>

No	Masalah	Deskripsi
		Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah
3	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
4	Peningkatan Emisi GRK	Deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan kebakaran hutan menjadi salah satu faktor peningkatan emisi GRK. Di Papua Barat, emisi CO ₂ dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat, terutama pada tahun 2020. Meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam digunakan secara luas di Papua Barat sebagai sumber energi dalam industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan. Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan Terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang upaya pengurangan emisi GRK.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.3.1.4 Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Konektivitas Daerah

Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah ini ditandai dengan: (1) terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur; (2) belum efektifnya pengembangan konektivitas multimoda antarmoda; (3) belum optimalnya pemenuhan kebutuhan elektrifikasi baik untuk rumah tangga maupun sektor produktif; (4) belum optimalnya pembangunan dan terbatasnya pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan digital; diantaranya belum adanya literasi teknologi dan digital untuk kepentingan yang lebih produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas (5) belum memadainya infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih, sanitasi dan persampahan; yang ditandai dengan Sulitnya akses air bersih/air minum bagi perempuan dan penyandang disabilitas, terutama saat kemarau; dan belum memudahinya sanitasi yang layak di berbagai kampung sehingga meningkatkan jumlah penyakit dan kerentanan bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas 6) belum optimalnya akses pemukiman layak huni; (7) belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang; serta (8) belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas daerah” ditampilkan dalam Tabel II.133.

Tabel II.133 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Konektivitas Daerah”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Konektivitas Daerah		
1	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	Tingginya tingkat kesulitan geografis di Papua Barat berimplikasi pada Tingginya Indeks kemahalan konstruksi di wilayah pegunungan/ lereng yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan biaya logistik. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat termasuk dalam wilayah perbukitan (kelas ketinggian 100-1.000 m). Berdasarkan kondisi kelerengan, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan bergunung sangat curam). Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik maupun sistem transportasi darat. Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah Masih rendahnya manajemen infrastruktur (perencanaan, pelaksanaan dan Monev)
2	Belum efektifnya pengembangan konektivitas multimoda antarmoda	Belum memadainya infrastruktur jaringan transportasi (jalan, jembatan, pelayaran dan udara), yang menghubungkan lokasi penggerak ekonomi dan pelayanan dasar. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan.
3	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan elektrifikasi baik untuk rumah tangga maupun sektor produktif	Penyediaan tenaga listrik masih terbatas dan didominasi oleh konsumen rumah tangga dengan tingkat permintaan listrik masih relatif rendah Sistem ketenagalistrikan Papua Barat masih belum terintegrasi dan terdiri dari subsistem kecil terisolasi (isolated grid) yang tersebar, dengan pasokan listrik masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Pengembangan kapasitas terpasang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Papua masih sangat terbatas. Potensi energi hidro, energi surya, dan energi angin di Papua Barat belum dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi, sehingga menghambat akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan biru di Wilayah Papua.
4	Belum optimalnya pembangunan dan terbatasnya pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan digital	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital masih belum memadai yang disebabkan oleh kondisi geografis ekstrem berupa pegunungan, pemukiman yang terisolir dan sangat tersebar, serta rentan terjadinya gangguan keamanan. Pemanfaatan digital belum maksimal, masih sebatas sebagai media telekomunikasi dan belum optimal menjangkau pemanfaatan di sektor produktif Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial
5	Belum memadainya infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih, sanitasi dan persampahan	Belum tersedianya sarana prasarana pendukung air bersih Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber air baku Belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Papua Barat Belum tersedianya instalasi pembuangan limbah Tinja (IPLT) Belum tersedianya sarana prasarana persampahan
6	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni.

No	Masalah	Deskripsi
		Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten Provinsi Papua Barat, dengan penanganan yang kurang optimal Belum optimalnya jumlah rumah layak yang dibangun untuk Orang Asli Papua
7	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai Belum memadainya pemahaman stakeholders terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Barat Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan
8	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif karena: (1) banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas; (2) belum adanya database/pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di Papua Barat; (3) pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis; serta (4) rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi. Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat karena: (1) tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat; (2) belum maksimalnya pengakuan negara/ pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat; serta (3) belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.1.5 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus

Dalam bidang tata kelola, Provinsi Papua Barat masih menghadapi pemasalahan berupa belum optimalnya penyelenggaraan otonomi khusus dan tata kelola pemerintahan, mencakup penyelenggaraan pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi publik. Demikian pula kemandirian fiskal daerah yang tergolong rendahnya, dengan masih tingginya ketergantungan terhadap TKD.

Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inklusif diantaranya Rendahnya akses informasi kebijakan dan program bagi perempuan dan penyandang disabilitas; dan terbatasnya ruang-ruang pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh perempuan dan penyandang disabilitas mulai dari Kampung/Kelurahan, Distrik, kabupaten hingga provinsi;

Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inklusif nampak belum adanya mekanisme pengaduan yang mudah dan murah dan aksesibel bagi perempuan dan penyandang disabilitas; Rendahnya penggunaan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik yang ramah perempuan dan penyandang disabilitas.

Masalah keamanan dan ketertiban umum yang sering terjadi secara tidak langsung mempengaruhi jangkauan dan cakupan pelayanan dasar terutama kesehatan dan

pendidikan. Tingkat keamanan masyarakat di Provinsi Papua Barat belum tergolong baik. Rasa aman penduduk belum terlalu tinggi. Berdasarkan data Susenas proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 58,4 pada tahun 2020. Proporsi ini turun dibandingkan pada tahun 2014 dengan proporsi sebesar 69,79 persen.

Tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2018, dan 2019, mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori buruk dengan skor kurang dari 60. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pada tahun 2009-2013 kondisi IDI Papua Barat tidak berbeda jauh dengan IDI nasional dan berada pada kategori “sedang”. Selanjutnya mulai tahun 2014 setelah dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2014 IDI nasional secara konsisten bergerak positif. Namun IDI Papua Barat bergerak cukup fluktuatif berpindah antara kategori sedang dan buruk. Bahkan pada tahun 2019 (IDI nasional mencapai indeks tertinggi sejak pengukurannya), IDI Papua Barat justru tercatat berada pada kategori buruk dengan indeks sebesar 57,62. Deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan Otonomi Khusus” ditampilkan dalam Tabel II.134.

Tabel II.134 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus		
1	Belum Optimalnya Koordinasi Kewenangan Pemerintahan, Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Umum	Kuatnya prinsip money follow function dan money follow organization, serta belum efektifnya implementasi money follow programme Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra strategis lainnya Belum optimalnya kordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik, kelurahan dan kampung Belum optimalnya koordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasi penyelenggaran kebijakan dan program Otonomi Khusus Papua Barat Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Model e-government masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi sehingga pemanfaatan sistem Pemerintah Berbasis elektronik belum optimal
2	Belum Optimalnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan civil society Belum memadainya pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah, khususnya by name by address terpilah OAP dan non-OAP Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah karena keterbatasan sumber daya dan tingkat kesulitan geografis

		Rendahnya akses informasi kebijakan dan program bagi perempuan dan penyandang disabilitas; Terbatasnya ruang-ruang pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh perempuan dan penyandang disabilitas mulai dari Kampung/Kelurahan, Distrik, kabupaten hingga provinsi;
3	Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian Belum berkembangnya sistem reward untuk ASN berprestasi dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi Belum adanya mekanisme pengaduan yang mudah dan murah dan aksesibel bagi perempuan dan penyandang disabilitas; Rendahnya penggunaan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik yang ramah perempuan dan penyandang disabilitas.
4	Belum Optimalnya Kontribusi PAD terhadap Pembiayaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah Belum akuratnya database pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
5	Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otsus Belum tersedianya data by name by address terpilah OAP dan non-OAP yang dapat digunakan untuk mngeukur keberhasilan Otsus secara lebih tajam dna tepat sasaran.
6	Belum Optimianya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang	Terbatasnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperberat dengan belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan kajian kontekstual Papua Barat dalam pembangunan daerah. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal. Hal ini diperberat dengan Lemahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan Belum optimalnya penjangkaran aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Indikator capaian kinerja perangkat daerah belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-cascading), sehingga proses evaluasi dan monitoring belum dapat benar-benar mencerminkan kebermanfaatan program program untuk masyarakat dengan tepat sasaran

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.1.6 Masih Terjadi Konflik Horizontal dan Kriminalitas Meskipun dalam Intensitas Rendah

Deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah” ditampilkan dalam Tabel II.135.

Tabel II.135 Pemetaan Masalah Pokok “Masih Terjadi Konflik Horizontal dan Kriminalitas Meskipun dalam Intensitas Rendah”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Masih Terjadi Konflik Horizontal dan Kriminalitas Meskipun dalam Intensitas Rendah		
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
2	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Stabilitas Politik Daerah	Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.3.1.7 Belum Optimalnya Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Terhadap Anak

Deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan terhadap anak” ditampilkan dalam Tabel II.136.

Tabel II.136 Pemetaan Masalah Pokok “Belum Optimalnya Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Terhadap Anak”

No	Masalah	Deskripsi
MASALAH POKOK: Belum Optimalnya Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Terhadap Anak		
1	Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik khususnya capaian indikator-indikator layanan dasar lainnya yang terdapat dalam kabupaten layak anak, yaitu: (1) kepemilikan akte kelahiran; (2) Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (3) puskesmas ramah anak; (4) kampung anak sejahtera; (5) sekolah ramah anak; (6) pusat kreatifitas anak; (7) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); (8) Rute

No	Masalah	Deskripsi
		Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); (9) media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak). Dinamika komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak anak dan pembangunan kesetaraan gender;
2	Belum Optimalnya Perlindungan Hak, Peningkatan Kualitas Hidup serta Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan ASN. Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum yang semakin luas. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan di sektor informal. Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan Dinamika komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak anak dan pembangunan kesetaraan gender; Belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan Pengarusutamaan GEDSI; Data terpilah gender belum optimal digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penggaran daerah, termasuk belum optimalnya metode analisis gender (GEDSI) dalam memperkuat program, kegiatan, dan anggaran yang responsif GEDSI.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.2 Isu Strategis Daerah

2.2.2.1 Demografi, Urbanisasi dan Keterkaitan Kota-Kampung

Jumlah penduduk Papua Barat akan semakin bertambah dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua Barat, penduduk semakin terkonsentrasi di kota, dan keterkaitan ekonomi kampung-kota di Papua Barat semakin bertambah kuat dan meningkat. Selain faktor kelahiran (Fertility), penyebab bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Papua Barat selama ini adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap.

Selain migrasi, mobilitas penduduk di Papua dapat juga dicermati pada arus urbanisasi dari kampung ke kota, yang diindikasikan dengan rasio derajat urbanisasi. Dengan semakin berkembangnya daerah perkotaan, dan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, dipastikan arus mobilitas penduduk (migrasi dan urbanisasi) di Papua akan semakin meningkat dimasa depan yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan daerah jika tidak terkendali, seperti : (1) semakin minimnya lahan kosong, dan harga tanah yang terus naik; (2) menambah pencemaran lingkungan; (3) permukiman kumuh bertambah, dan bisa menjadi penyebab bencana alam; (4) tingkat kriminalitas meningkat; (5) bertambahnya golongan masyarakat miskin; (6) ketimpangan pendapatan meningkat, baik itu secara spasial, sektoral maupun personal. Namun disisi lain, apabila urbanisasi ditangani dengan baik bisa memberi dampak positif terhadap keterkaitan antara kampung-kota, antara lain : (1) meningkatnya kesejahteraan penduduk di kampung karena mendapatkan berbagai hal yang tak ada di desa seperti teknologi, informasi, dan lain-lain; (2) mempercepat pembangunan kampung karena adanya berbagai informasi yang diperoleh dari kota; (3)

meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota, terutama tenaga buruh yang berasal dari kampung; (4) kota dapat menjadi agen perubahan yang bisa ditiru pembangunan kampung agar semakin maju.

2.2.2.2 Percepatan Peningkatan Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan

Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk menjadi isu yang strategis bukan saja karena pemenuhannya merupakan hak asasi setiap orang, tetapi juga karena dengan pencapaian yang baik atas indikator-indikator yang ditetapkan dalam kedua bidang urusan ini merupakan sumbangan terbesar untuk keberhasilan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif menjadi arah kebijakan dan strategi dalam RIPPP 2022-2041.

Dalam bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator untuk mengukur dampak pembangunan bidang pendidikan. Isu-isu yang perlu ditangani antara lain peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup, peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Barat saat ini antara lain terjadi karena (1) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2) Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal. Selain ke-3 kondisi tersebut, tingginya prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat juga merupakan isu strategis mengingat stunting adalah kondisi yang dapat dicegah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Oleh karenanya prevalensi stunting juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di Papua Barat, bersama dengan Angka Harapan Hidup.

Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan upaya kesehatan masyarakat (kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan; Perluasan cakupan pendataan dan jangkauan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terutama bagi OAP, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas; Pelibatan OAP, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perencanaan, penetapan, implementasi dan evaluasi program-program pemenuhan kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial; Mengembangkan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau oleh OAP, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan untuk optimalisasi pelayanan dasar.

2.2.2.3 Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal secara Produktif, Inovatif, Berkelanjutan dan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multistakeholder di Papua Barat. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi periode sebelumnya menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi, belum optimalnya sektor penggerak ekonomi di Papua Barat dalam mengungkit kesejahteraan rumah tangga masyarakat Papua terutama OAP, serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan intervensi program konvergen dengan memperhatikan lokus wilayah prioritas kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat miskin ekstrem di Papua Barat, dan memfokuskan kepada 5 (lima) wilayah prioritas melalui Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Beberapa konvergensi instrument kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan dan perlu dilanjutkan yaitu:

Menurunkan Beban Pengeluaran melalui beberapa Program Strategis antara lain:

Program strategis peningkatan pembangunan kampung

Program Jaminan Kesehatan, terutama untuk OAP;

Program Pemberdayaan Sosial;

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terutama untuk OAP;

Program “Tangan Kasih” (pekerja formal, informal, disabilitas dan lintas agama);

Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

b. Meningkatkan Pendapatan melalui beberapa kegiatan antara lain:

Pemberdayaan UMKM, terutama UMKM OAP

Pengembangan ekonomi Lokal; dan

Penyuluhan pertanian

c. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan melalui beberapa kegiatan antara lain:

Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

Meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas lokal serta berbasis kampung yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Di samping itu perhatian juga harus diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Tingkat inflasi Provinsi Papua Barat berada di atas angka nasional, dengan penyumbang inflasi terbesar adalah pangan (beras, cabe, tembakau, ikan laut). Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah tentang ketersediaan stok dan alur

distribusi belum diimbangi kerjasama antar daerah dalam pengendalian harga, serta belum didukung pengadaan fasilitas penyimpanan bahan pangan.

2.2.2.4 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas

Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat yang belum signifikan juga dipengaruhi oleh rendahnya kinerja infrastruktur. Konektivitas wilayah di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Provinsi Papua Barat serta banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar kampung dan distrik akibatnya rendah, karena minimnya pengembangan jalan yang menghubungkan akses mereka untuk bermobilisasi. Selain itu, permasalahan konektivitas juga di pengaruhi oleh keadaan geografis yang ekstrim, sehingga moda angkutan umum di Provinsi Papua Barat sangat terbatas. Hal ini menjadikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas di Papua Barat.

2.2.2.5 Ketahanan Wilayah dan Kota yang Rentan Atas Perubahan Iklim, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Potensi Bencana, serta Pengurangan Emisi GRK

Derajat kerentanan wilayah dan kota dalam menghadapi berbagai macam dinamika atau perubahan beranekaragam, dan hal tersebut di tentukan berdasarkan kapasitas wilayah dan daerah yang bersangkutan. Kapasitas dalam hal ini mencakup kapasitas fisik (infrastruktur), ekonomi/fiskal, dan sosial. Maka dari itu, isu strategis ini sangat berkaitan dengan pembangunan di ketiga sektor tersebut. Disisi lain, perubahan yang dimaksud juga memiliki banyak konteks, misalnya perubahan sistem lingkungan dan fisik, maupun institusi. Contohnya, untuk perubahan lingkungan dan fisik bisa diakibatkan oleh perubahan iklim dan kejadian bencana. Sementara perubahan institusi bisa diakibatkan adanya pergeseran kebijakan atau perubahan struktur birokrasi. Papua Barat, baik di tingkat Provinsi maupun Daerah merupakan sebuah entitas wilayah yang dalam kadar tertentu memiliki risiko untuk mengalami perubahan-perubahan ini di masa yang akan datang, yang mungkin akan mengganggu sistem untuk mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, isu strategis dipersempit terhadap kerentanan terhadap tiga kondisi yang saat ini dianggap menjadi tiga faktor dominan yang akan menimbulkan perubahan sistem, yaitu; (1) Perubahan iklim; (2) Demografi; dan (3) Bencana dan Polusi.

Perubahan iklim merupakan isu global, yang ditandai dengan meningkatnya kadar emisi gas rumah kaca. Fenomena ini memiliki dampak terhadap dunia, tidak terkecuali di Papua Barat. Masyarakat rentan secara sosial (tidak berdaya secara ekonomi) dan yang hidup di lingkungan yang memiliki risiko terhadap perubahan iklim seperti fenomena banjir, perlu menjadi perhatian utama. Namun disisi lain, Papua Barat sebagai wilayah yang memiliki sumber daya kehutanan yang merupakan Kawasan konservasi menyumbang potensi untuk memitigasi perubahan iklim, Maka dari itu, sumberdaya perlu tersebut perlu di pertahankan. Papua Barat juga memiliki kerentanan terhadap perubahan demografi, dalam hal ini pergeseran komposisi penduduk. Tren tingkat rasio ketergantungan di Papua Barat cenderung meningkat. Apabila tidak di mitigasi dengan kebijakan yang tepat, kerentanan penduduk usia produktif terhadap beban pembiayaan hidupnya akan meningkat. Papua Barat juga memiliki risiko dan kerentanan terhadap bencana, utamanya banjir dan

kekeringan. Pada wilayah kabupaten yang memiliki tingkat bahaya terhadap bencana tersebut, risiko akan terpaparnya bencana akan semakin tinggi ketika kerentanan wilayah tinggi. Pada intinya, ketahanan dalam konteks di poin ini merupakan kemampuan wilayah dan kota untuk kembali pulih ketika ada suatu hal mengganggu atau berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemeliharaan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup merupakan sesuatu yang perlu dianggap strategis di seluruh wilayah, tidak terkecuali di Papua Barat. Pembangunan merupakan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak ada upaya untuk memitigasi penurunan kualitas lingkungan akibat dari pembangunan tersebut. Tentunya, dalam konteks ini yang dimaksud dengan pembangunan maupun dan lingkungan akan bersifat sangat luas. Maka dari itu, proses perencanaan pembangunan telah mengisyaratkan adanya kajian-kajian khusus lingkungan, misalnya KLHS. Operasionalisasi mitigasi terhadap ancaman kerusakan lingkungan perlu di detilkan lagi dalam dokumen strategis berbagai sektor. Kebijakan, arahan dan program yang pro-lingkungan perlu di prioritaskan. Isu global perubahan iklim, selain memerlukan upaya mitigasi juga memerlukan upaya adaptasi. Adaptasi perubahan iklim bisa berada di berbagai level, dari level komunitas sampai dengan level nasional. Di level provinsi, upaya adaptasi sulit terlihat operasionalisasinya, namun bisa diupayakan dengan penyusunan kebijakan untuk mendorong adanya upaya adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang terdampak. Untuk itu, Papua Barat perlu memetakan tingkat kerentanan perubahan iklim dilihat dari lokasi dan karakter masyarakatnya.

Berbagai macam bencana di Papua Barat memiliki keragaman indeks bahaya dan risiko yang berbeda-beda pula. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pembangunan fisik, berupa infrastruktur untuk mitigasi masih jauh berada di jangkauan anggaran selama ini. Sebagai Langkah awal, Papua Barat perlu memetakan kebutuhan pembangunan fisik apa yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, misalnya saja tanggul untuk upaya pencegahan banjir. Mitigasi, tidak hanya terbatas pada bencana alam, namun juga bencana non alam, misalnya bencana sosial. Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana sosial, dimana pada dua tahun terakhir perlu dihadapi oleh seluruh dunia. Ketidaksiapan Papua Barat dalam mengalami kejadian luar biasa ini juga perlu menjadi pembelajaran sendiri bagi daerah, untuk membuat rencana mitigasi apabila kejadian serupa akan terjadi lagi.

2.2.2.6 Disrupsi Teknologi dan Inovasi

Pada era disrupsi teknologi saat ini membuat segala hal menjadi instan, mudah dan modern. Gaya hidup masyarakat Papua Barat secara berangsur mulai mengalami perubahan yang cukup drastis, yang cenderung sangat bergantung pada berbagai gadget (gawai) yang setiap waktu terus mengalami perubahan, contohnya smartphone. Melalui smartphone semua informasi dan komunikasi dapat diakses dan disebar secara mudah, dengan jarak dan jangkauan yang tak terbatas. Dampaknya, saat ini telah muncul konsumen baru yaitu social-customer yang tahu segalanya dan terkoneksi secara intens tanpa ada batasan mengenai informasi produk atau layanan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan karena tersedianya koneksi internet yang semakin mudah diakses dan cepat melalui jaringan 4G.

2.2.2.7 Perdagangan Antardaerah dan Global yang Kompetitif

Perdagangan antardaerah atau antarpulau adalah perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu daerah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Secara umum perdagangan antardaerah terjadi karena dua faktor, yakni perbedaan aktor produks dan tingkat harga antardaerah. Adapun manfaat dari perdagangan antara daerah maupun global adalah: (1) menambah devisa negara untuk perdagangan global, dan menambah pendapatan daerah untuk perdagangan antarpulau; (2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi domestik; (3) menyediakan berbagai faktor-faktor produksi sebagai modal pembangunan; (4) meningkatkan produktifitas regional; (5) mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi; (6) menyerap lapangan kerja; (7) menstabilkan harga; (8) memperkuat kerjasama antardaerah dan antarnegara; (9) meningkatkan daya saing daerah; (10) mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah; (11) memperluas jangkauan pasar; (12) mempercepat alih teknologi. Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dari aktifitas perdagangan tersebut, maka sudah sepatutnya dimasa depan Papua Barat harus mampu meningkatkan daya saing perdagangan antaradaerah dan global. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Papua Barat, karena selama ini perdagangan antaradaerah selalu mengalami defisit sangat besar.

2.2.2.8 Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam berbagai urusan dan bidang kewenangan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima, disamping adanya kebijakan-kebijakan kontekstual khusus penyelenggaraan Pembangunan di Papua Barat terkait dengan kebijakan otonomi khusus.

Otonomi Khusus di Papua telah dilaksanakan selama 20 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua tersebut berdampak pada kemajuan pembangunan dari sisi ekonomi, tatanan demokrasi, sosial, kebudayaan, serta pelayanan publik oleh pemerintah di Papua. Namun demikian, meski telah berjalan 20 tahun, pemberian Otonomi Khusus tersebut belum mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umum pembangunan di Wilayah Papua, antara lain (1) rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia; (2) belum berkembangnya pengelolaan potensi unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3) rendahnya aksesibilitas, konektivitas wilayah, sarana-prasarana dasar perumahan, elektrifikasi, air minum, telekomunikasi dan informatika; (4) belum terjaganya kualitas lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan; serta (5) rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan serta tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Otonomi Khusus Papua.

Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan secara matang, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus secara akuntabel, efektif dan efisien, transparan, serta tepat sasaran. Selain

itu, perubahan Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan alokasi dana Otonomi Khusus dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Wilayah Papua yang pada akhirnya akan mewujudkan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik hingga ke kampung-kampung. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya regulasi mengenai representasi OAP di DPRD dan DPRD. Provinsi harus mempersiapkan Pansel, wilayah pemilihan, kriteria bakal calon, serta meningkatkan kapasitas DPRD dan DPRD hasil pengangkatan.

2.2.2.9 Perlindungan dan Penghormatan Keragaman Budaya Masyarakat Papua Barat

Semakin terbukanya Papua Barat di masa depan, yang ditandai dengan bertambahnya kota-kota pusat pertumbuhan baru, berimplikasi pada peningkatan proporsi penduduk Non-OAP yang diperkirakan pada tahun 2045 proporsinya bisa mencapai 60-65%. Sudah barang tentu, dengan semakin bertambahnya penduduk Non-OAP tersebut, khazanah budaya di Papua Barat akan semakin beragam. Sehingga bukan hanya budaya Papua Barat saja yang berkembang, tetapi juga budaya lainnya yang dibawa oleh penduduk migrasi Non-OAP, seperti budaya Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku akan sangat dirasakan masyarakat Papua.

Dampak positif keberagaman budaya tentunya merupakan peluang yang perlu dikelola secara optimal. Sedangkan dampak negatifnya akan menjadi tantangan dimasa depan, antara lain: (1) adanya sikap etnosentrisme, yaitu sebuah sikap atau pandangan yang bertumpu pada kebudayaan sendiri, yang akan menimbulkan perasaan atau sikap meremehkan suatu suku atau kebudayaan lain; (2) adanya stereotip, yang menimbulkan

pandangan yang negatif terhadap suatu kelompok budaya, dikarenakan adanya perbedaan budaya; (3) terjadinya konflik sosial dan budaya, yang disebabkan primordialisme, yaitu suatu sikap yang menganggap jika sukunya lebih baik dibanding suku lainnya; (4) cepatnya perubahan sosial dan budaya sebagai dampak dari kemajuan pembangunan dan teknologi, yang dapat mendegradasi nilai-nilai dan norma sosial budaya masyarakat Papua. Menurut Pamungkas (2021, dalam Papatungan, 2022), pada dasarnya penduduk OAP tidak menolak pembangunan, hanya saja butuh pemahaman yang baik terutama dari sisi tradisi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembangunan, sehingga OAP memang benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu penduduk Papua yang beraneka ragam budaya ini, nilai toleransi dan inklusif semakin penting untuk ditingkatkan guna menjaga kehidupan sosial yang damai sentosa.

2.3 EVALUASI RKPD TAHUN 2024

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, maka untuk menilai kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel II.137 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76 % < 90%	Tinggi
3	66 % < 75%	Sedang
4	51 % < 65%	Rendah
5	0 % < 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Berikut tabel di bawah ini yang menggambarkan Kategori capaian berdasarkan Serapan Anggaran maupun Kinerja Output di Provinsi Papua Barat tahun 2024.

Tabel II.138 Realisasi Serapan Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4	14	53	187.928.445.726,00	79.345.200.465	55,32	42,22	Rendah	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	5	12	88	102.292.006.267,00	80.179.649.102	63,61	99,77	Rendah	Tinggi
3	Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	3	10	31	70.822.194.724,00	56.128.202.453	54,84	93,87	Rendah	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	15	29	94	680.482.950.450	645.704.089.517	100	94,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	8	73	37.999.383.034,00	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	34	26.296.578.049,00	24.049.292.095	100	91,45	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Dinas Sosial	6	16	76	31.912.292.621,00	25.887.163.190	5,00	81,12	Sangat Rendah	Tinggi
8	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	8	16	39	29.455.061.914,00	24.785.974.871	65	96	Tinggi	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	41	20.276.975.585,00	18.692.865.605	5	92,19	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
10	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	35	22.468.467.416,97	20.822.999.653	97,00	92,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	12	22	51	39.162.760.039,00	31.179.660.511	71,33	79,62	Sedang	Tinggi
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	22	61	13.722.341.755,00	11.789.722.782	70,00	85,92	Sedang	Tinggi
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	6	17	73	26.838.865.594,00	24.344.454.919	41,00	90,71	Sangat Rendah	Tinggi
14	Dinas Perhubungan	5	11	21	74.369.995.793,00	58.449.334.683	23,81	78,59	Rendah	Tinggi
15	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik	5	11	46	31.384.433.639	29.711.008.610	72,00	94,67	Sedang	Sangat Tinggi
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	6	29	27.504.749.445,00	19.943.743.529	90,00	72,71	Tinggi	Sedang
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	17	48	14.648.850.196,99	21.545.723.605	73,00	147,00	Sedang	Sangat Tinggi
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4	9	27	101.248.569.052,00	10.149.056.481	11	3,2	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	9	23	54	20.718.533.809,00	17.534.044.828	62,00	84,63	Rendah	Tinggi
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	6	17	46	12.357.620.874,00	5.538.320.242	45,00	44,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9	31	74	42.679.260.665,00	33.452.290.418	39,00	76,94	Sangat Rendah	Tinggi
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	6	14	31	60.088.871.057,00	53.929.187.107	84,00	89,75	Tinggi	Tinggi
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	6	36	20.084.766.911,00	17.504.588.158	96,00	87,15	Sangat Tinggi	Tinggi
24	Dinas Kehutanan	4	17	61	175.669.003.461,00	137.179.521.314	95,00	77,37	Sangat Tinggi	Tinggi
25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	5	15	22	33.035.700.342,00	28.447.600.247	86	86	Tinggi	Tinggi
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8	22	47	24.984.601.329,00	21.834.565.000	0,00	87,39	Sangat Rendah	Tinggi
27	Sekretariat Daerah	1	9	23	207.108.475.358,00	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
28	Biro Umum	1	10	33	24.805.967.752,79	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
29	Biro Administrasi Pimpinan	1	6	16	7.000.000.000,00	6.490.598.241	91,67	92,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Prog	Keg	Sub Keg	Anggaran	Realisasi	K (%)	Rp (%)	Ket. (K)	Ket. (Rp)
30	Biro Organisasi	2	6	13	3.646.183.463,00	3.293.555.707	100,00	90,33	Sangat Tinggi	Tinggi
31	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2	6	13	8.949.998.362,00	2.127.283.487.394	54,49	Realisasi tidak Sesuai	Rendah	Sangat Tinggi
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	4	9	130.093.181.361,00	127.718.290.902,00	100,00	98,17	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
33	Biro Hukum	2	6	15	7.250.000.000,00	6.655.676.966	52,00	91,80	Rendah	Sangat Tinggi
34	Biro Perekonomian	2	8	18	5.549.990.066,00	5.151.297.560	55,00	97,66	Rendah	Sangat Tinggi
35	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	2	7	21	5.153.819.599,00	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
36	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	18	5.229.165.019,00	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
37	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	4	10	16	11.954.843.490,00	15.217.658.625	50,00	127,29	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	3	13	71	113.365.821.921	120.015.879.376	50,00	105,87	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	8	81	35.497.276.165,00	Tidak Mengumpulkan Tabel E.55				
40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3	14	95	2.004.603.431.216,00	1.797.024.779.261,00	54,00	89,64	Rendah	Tinggi
41	Badan Pendapatan Daerah	3	13	45	55.275.594.499	44.564.523.075	85,00	80,62	Tinggi	Tinggi
42	Badan Kepegawaian Daerah	2	11	62	27.069.489.277,00	24.204.674.448	52,69	89,42	Rendah	Tinggi
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	8	36	31.548.256.217,00	10.121.472.318	67,50	32,68	Sedang	Sangat Rendah
44	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2	8	26	10.851.331.458,00	8.869.455.407	77,82	81,74	Tinggi	Tinggi
45	Badan Penghubung Daerah	2	8	24	13.445.399.804,00	12.435.491.769	77,66	92,49	Tinggi	Sangat Tinggi
46	Inspektorat	3	6	35	41.643.794.865,00	35.390.529.467	87	85,69	Tinggi	Tinggi
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	8	69	477.709.964.553	470.188.597.661	100	98,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
48	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	2	8	30	60.189.723.167,00	45.122.190.371	91,00	74,97	Sangat Tinggi	Sedang

Sumber: Hasil Analisis Evaluasi RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024

Realisasi kinerja dan keuangan tahun 2024 dideskripsikan berdasarkan tabel di atas sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan OPD;
- Meningkatnya Partisipasi Warga negara usia 16-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA/SMK dan Meningkatnya Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus;
- Meningkatnya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 37
- Pagu : Rp25.521.406.996,00
- Realisasi : Rp18.855.362.367,00

Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 11
- Pagu : Rp161.036.917.243,00
- Realisasi : Rp 59.120.892.409,00

Program Pengembangan kurikulum terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp1.370.121.487,00
- Realisasi : Rp1.368.945.689,00

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp0,00
- Realisasi : Rp0,00

Pagu Anggaran : Rp187.928.445.726,00

Realisasi Anggaran : Rp 79.345.200.465,00

% Realisasi Anggaran : 42,22 %

% Kinerja : 55,32 %

2. Dinas Kesehatan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan secara Merata
- Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin
- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan secara merata
- Meningkatnya Akses Kemandirian, dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 32
- Pagu : Rp41.883.708.264,00
- Realisasi : Rp35.979.457.323,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- Kegiatan : 5
- Sub Kegiatan : 44
- Pagu : Rp49.318.942.384,00
- Realisasi : Rp34.067.677.257,00

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp9.936.477.995,00
- Realisasi : Rp9.070.750.272,00

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp155.220.724,00

- Realisasi : Rp111.834.400,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari:

- Kegiatan : 3

- Sub Kegiatan : 3

- Pagu : Rp997.656.900,00

- Realisasi : Rp949.929.850,00

Pagu Anggaran : Rp 80.366.501.605,00

Realisasi Anggaran : Rp 80.179.649.102,00

% Realisasi Anggaran : 99,77 %

% Kinerja : 63,61 %

3. BLUD RSUD Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan administrasi perangkat daerah
- Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit rujukan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7

- Sub Kegiatan : 26

- Pagu : Rp42.518.035.366,00

- Realisasi : Rp28.084.823.182,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- Kegiatan : 3

- Sub Kegiatan : 6

- Pagu : Rp25.224.705.358,00

- Realisasi : Rp24.964.771.435,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan : 1

- Pagu : Rp3.079.454.000,00

- Realisasi : Rp3.078.607.836,00

Pagu Anggaran : Rp70.822.194.724,00

Realisasi Anggaran : Rp56.128.202.453,00

% Realisasi Anggaran : 79,25 %

% Kinerja : 54,84 %

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Urusan Pemerintahan :
- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Sasaran :
- Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih, Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan Permukiman
 - Meningkatnya Pelayanan Dan Kualitas Jalan Provinsi, Infrastruktur Bangunan Gedung Pemerintahan, Dan Tata Ruang Dan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Di Wilayah Provinsi Papua Barat
 - Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Permukiman, Dan Kinerja Layanan Infrastruktur Irigasi Dan Berkurangnya Dampak Daya Rusak Air
 - Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Di Provinsi Papua Barat
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan, Dan Administrasi Perangkat Daerah

- Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 25
- Pagu : Rp 22.970.106.604
- Realisasi : Rp18.178.063.897

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 11
- Pagu : Rp54.690.257.000
- Realisasi : Rp48.182.946.391

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp32.102.250.000
- Realisasi : Rp30.764.236.000

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp54.000.000
- Realisasi : Rp40.000.000

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp21.963.900.000
- Realisasi : Rp20.294.467.000

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp3.299.900.000
- Realisasi : Rp2.298.660.000

Program Pengembangan Permukiman Terdiri Dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp 7.153.900.000
- Realisasi : Rp 6.911.850.000

Program Penataan Bangunan Gedung Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp16.707.845.300
- Realisasi : Rp13.089.099.746

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp10.147.289.700
- Realisasi : Rp 7.544.481.000

Program Penyelenggaraan Jalan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 10
- Pagu : Rp533.458.886.506
- Realisasi : Rp476.930.804.726

Program Pengembangan Jasa Konstruksi Terdiri Dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 13
- Pagu : Rp3.999.997.205
- Realisasi : Rp2.982.050.959

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Terdiri Dari:

- Kegiatan : 4

- Sub Kegiatan :11
- Pagu : Rp7.325.018.135
- Realisasi : Rp6.494.950.193

Program Pengembangan Perumahan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0

Program Kawasan Permukiman Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp14.351.000.000
- Realisasi : Rp11.992.479.605

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp649.000.000
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp680.482.950.450

Realisasi Anggaran : Rp645.704.089.517

% Realisasi Anggaran : 94,89 %

% Kinerja : 100 %

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 47
- Pagu : Rp29.801.507.034,00
- Realisasi : Rp0,00

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 14
- Pagu : Rp2.152.590.000,00
- Realisasi : Rp0,00

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 14
- Pagu : Rp6.045.286.000,00
- Realisasi: Rp

Pagu Anggaran : Rp37.999.383.034,00

Realisasi Anggaran : Rp0,00

% Realisasi Anggaran : %

% Kinerja : %

6. Badan Penanggulangan Bencana

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah

Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 20
- Pagu : Rp11.122.157.905
- Realisasi: Rp 9.959.188.115

Program Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 14
- Pagu : Rp14.335.780.944
- Realisasi: Rp14.090.103.980

Pagu anggaran : Rp21.623.497.782

Realisasi : Rp24.049.292.095

% Realisasi Anggaran : 100 %

% Kinerja : 100 %

7. Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sasaran :

- Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan : - Mewujudkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 33
- Pagu : Rp19.807.173.741
- Realisasi : Rp16.054.130.492

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp746.936.654
- Realisasi : Rp450.095.596

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 28
- Pagu : Rp2.399.999.880
- Realisasi : Rp2.092.516.829

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp6.205.119.000
- Realisasi : Rp4.326.463.291

Program Penanganan Bencana terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp2.500.000.000
- Realisasi : Rp2.851.442.117

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp253.063.346
- Realisasi : Rp112.514.865

Pagu Anggaran : Rp31.912.292.621

Realisasi Anggaran : Rp25.887.163.190

% Realisasi Anggaran : 81,12 %

% Kinerja : 5,00 %

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sasaran

- :
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Penganggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
 - Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Meningkatnya Penerapan Perundangan-undangan Tenaga Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Perusahaan di Papua Barat
 - Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
- Kegiatan : 7
 - Sub Kegiatan : 20
 - Pagu : Rp20.329.103.914
 - Realisasi : Rp15.813.421.559
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga terdiri dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp2.500.000.000
 - Realisasi : Rp2.452.177.370
- Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
- Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp1.000.000.000
 - Realisasi : Rp894.895.910
- Program Hubungan Industrial terdiri dari:
- Kegiatan : 2
 - Sub Kegiatan : 2
 - Pagu : Rp0
 - Realisasi : Rp3.634.623.300
- Program Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
- Kegiatan : 1
 - Sub Kegiatan : 3
 - Pagu : Rp800.000.000
 - Realisasi : Rp795.922.989
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri dari:
- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp350.000.000
- Realisasi : Rp349.749.210

Program Pembangunan Kawasan transmigrasi terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp200.000.000
- Realisasi : Rp199.074.200

Program Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp650.000.000
- Realisasi : Rp646.110.333

Pagu Anggaran : Rp25.829.103.914

Realisasi Anggaran : Rp24.785.974.871

% Realisasi Anggaran : 96 %

% Kinerja : 65 %

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
- Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Serta Ketersediaan Informasi data Gender dan Anak
- Meningkatnya Data Gender dan Anak
- Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan
- Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Anak
- Meningkatnya Kabupaten Kota Layak Anak

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 21
- Pagu : Rp11.041.218.760
- Realisasi : Rp10.561.794.258

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp2.926.400.436
- Realisasi: Rp2.404.081.707

Program Perlindungan Perempuan terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp1.680.108.596
- Realisasi: Rp1.680.108.596

Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp1.219.344.713
- Realisasi: Rp969.345.184

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp601.360.301
- Realisasi: Rp268.993.070

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp2.496.171.091
- Realisasi: Rp2.496.171.091

Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp312.371.688
- Realisasi: Rp312.371.699

Pagu Anggaran : Rp20.276.975.585

Realisasi Anggaran : Rp18.692.865.605

% Realisasi Anggaran : %

% Kinerja : 5 %

10. Dinas Ketahanan Pangan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 19

- Pagu : Rp12.519.115.171,97

- Realisasi : Rp10.914.820.174

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari:

- Kegiatan : 3

- Sub Kegiatan : 8

- Pagu : Rp5.199.352.585

- Realisasi : Rp5.174.728.202

Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari:

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 2

- Pagu : Rp1.600.000.000

- Realisasi : Rp1.599.623.696

Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari:

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 6

- Pagu : Rp3.149.999.660

- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp22.468.467.416,97

Realisasi Anggaran : Rp20.822.999.653

% Realisasi Anggaran : 93 %

% Kinerja : 97 %

11. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran :

- Meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 7

- Sub Kegiatan : 24

- Pagu : Rp15.287.211.034

- Realisasi : Rp12.812.831.474

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp2.550.000.061
- Realisasi : Rp1.611.691.690

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp593.965.755
- Realisasi : Rp476.243.000

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp2.411.542.443
- Realisasi : Rp2.162.748.719

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp14.980.826.604
- Realisasi : Rp11.222.316.421

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp299.999.741
- Realisasi : Rp299.641.041

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp800.000.005
- Realisasi : Rp799.710.606

Program Penetapan Tanah Ulayat

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp639.340.000
- Realisasi : Rp208.200.000

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp399.921.129
- Realisasi : Rp398.648.575

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp700.000.205
- Realisasi : Rp699.132.021

Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp499.953.062
- Realisasi : Rp488.496.564

Pagu Anggaran : Rp39.162.760.039

Realisasi Anggaran : Rp31.179.660.511

% Realisasi Anggaran : 79,62 %

% Kinerja : 71,33 %

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan :
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sasaran :
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk
- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil
- Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 32
- Pagu : Rp10.572.616.939

- Realisasi : Rp8.798.149.100

Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Kegiatan : 4

- Sub Kegiatan : 8

- Pagu : Rp1.149.724.816

- Realisasi : Rp1.091.544.442

Program Pencatatan Sipil terdiri dari :

- Kegiatan : 4

- Sub Kegiatan : 8

- Pagu : Rp700.000.000

- Realisasi : Rp678.845.086

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- Kegiatan : 4

- Sub Kegiatan : 10

- Pagu : Rp1.075.000.000

- Realisasi : Rp 996.649.659

Program Pengelolaan Profil Kependudukan terdiri dari :

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 3

- Pagu : Rp225.000.000

- Realisasi : Rp224.534.495

Pagu Anggaran : Rp13.722.341.755

Realisasi Anggaran : Rp11.789.722.782

% Realisasi Anggaran : 85,92 %

% Kinerja : 70,00 %

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Urusan Pemerintahan :

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sasaran :

- Meningkatkan kualitas penataan penyelenggaraan pemerintah desa
- Meningkatkan Kerjasama antar desa
- Meningkatkan pemerintah kampung yang transparan dan akuntabel
- Meningkatkan kapasitas jenis Lembaga kemasyarakatan desa
- Meningkatkan ekonomi Masyarakat desa dan kampung

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdiri Dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 24
- Pagu : Rp11.972.576.289
- Realisasi : Rp10.015.200.417

Program Penataan Desa Terdapat Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp869.281.686
- Realisasi : Rp860.506.758

Program Peningkatan Kerja Sama Desa Terdapat Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0

Program Administrasi Pemerintahan Desa Terdapat Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 15
- Pagu : Rp887.890.997
- Realisasi : Rp479.485.440

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Terdapat Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 7
- Pagu : Rp5.246.452.810
- Realisasi : Rp5.237.931.084

Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 22
- Pagu : Rp7.862.663.812
- Realisasi : Rp7.751.331.220

Pagu anggaran : Rp26.838.865.594

Realisasi : Rp24.344.454.919

% Realisasi Anggaran : 90,71%

% Kinerja : 41 %

14. Dinas Perhubungan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 13
- Pagu : Rp22.648.713.592
- Realisasi : Rp21.398.713.592

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp36.550.251.050,00
- Realisasi : Rp33.342.012.639,00

Program Pengelolaan Pelayaran terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp103.329.552,00
- Realisasi : Rp102.329.552,00

Program Pengelolaan Penerbangan terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp15.067.701.599,00
- Realisasi : Rp 3.606.278.900,00

Program Pengelolaan Perkeretaapian terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp0,00
- Realisasi : Rp0,00

Pagu anggaran : Rp74.369.995.793,00
Realisasi : Rp58.449.334.683,00
% Realisasi Anggaran : 78,59 %
% Kinerja : 23,81 %

15. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Urusan Pemerintahan :

- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur TIK
- Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan Sistem Informasi media pemerintah Daerah
- Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Daerah

	- Meningkatkan pengamanan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
	- Kegiatan : 7
	- Sub Kegiatan : 23
	- Pagu : Rp13.006.867.750
	- Realisasi : Rp11.735.088.202
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari :
	- Kegiatan : 1
	- Sub Kegiatan : 11
	- Pagu : Rp910.625.000
	- Realisasi : Rp910.452.700
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :
	- Kegiatan : 1
	- Sub Kegiatan : 7
	- Pagu : Rp16.558.400.615
	- Realisasi : Rp16.359.410.744
	Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari :
	- Kegiatan : 1
	- Sub Kegiatan : 2
	- Pagu : Rp234.789.274
	- Realisasi : Rp234.789.274
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari:
	- Kegiatan : 1
	- Sub Kegiatan : 3
	- Pagu : Rp473.751.000
	- Realisasi : Rp471.267.690
Pagu Anggaran	: Rp31.384.433.639
Realisasi Anggaran	: Rp29.711.008.610
% Realisasi Anggaran	: 94,67 %
% Kinerja	: 72 %

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan :	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Sasaran :	

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat
- Meningkatnya Investasi Daerah Guna Menopang Bertumbuhnya Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 21
- Pagu : Rp12.715.641.564
- Realisasi : Rp10.995.813.151

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp350.000.000
- Realisasi : Rp345.226.652

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp600.000.000
- Realisasi : Rp596.755.595

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp550.000.000
- Realisasi : Rp545.870.125

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp2.718.640.000
- Realisasi : Rp 667.675.000

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp1.950.044.062
- Realisasi : Rp 887.068.026

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp2.769.794.968

	- Realisasi	: Rp1.398.352.409
	Program Pengembangan UMKM terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 1
	- Pagu	: Rp5.850.628.851
	- Realisasi	: Rp4.506.982.571
Pagu anggaran		: Rp27.504.749.445
Realisasi		: Rp19.943.743.529
% Realisasi Anggaran		: 72,71 %
% Kinerja		: 90 %

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Sasaran	:	Meningkatnya Investasi Daerah guna Menopang Pertumbuhan
Program,Kegiatan/dan Sub Kegiatan	:	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
	- Kegiatan	: 8
	- Sub Kegiatan	: 33
	- Pagu	: Rp11.592.375.387
	- Realisasi	: Rp17.008.985.260
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 4
	- Sub Kegiatan	: 5
	- Pagu	: Rp749.948.384
	- Realisasi	: Rp949.413.330
	Program Promosi Penanaman Modal Terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 2
	- Pagu	: Rp649.994.875
	- Realisasi	: Rp938.232.760
	Program Pelayanan Penanaman Modal Terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 2
	- Sub Kegiatan	: 4
	- Pagu	: Rp750.008.156
	- Realisasi	: Rp 1.297.714.782
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 3
	- Pagu	: Rp906.523.395

	- Realisasi	: Rp1.351.377.473
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terdiri Dari:	
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 1
	- Pagu	: Rp0
	- Realisasi	: Rp0
Pagu anggaran	:	Rp14.648.850.197
Realisasi	:	Rp21.545.723.605
% Realisasi Anggaran	:	147 %
% Kinerja	:	73 %

18. Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Sasaran	:	
	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
	-	Meningkatnya Kreatifitas Pemuda
	-	Meningkatnya Prestasi Olahraga
	-	Meningkatnya Kreatifitas Kepramukaan
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari:
	- Kegiatan	: 6
	- Sub Kegiatan	: 19
	- Pagu	: Rp17.688.569.052
	- Realisasi	: Rp10.149.056.481
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terdiri Dari:
	- Kegiatan	: 2
	- Sub Kegiatan	: 4
	- Pagu	: Rp3.350.000.000
	- Realisasi	: Rp0
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Terdiri Dari:
	- Kegiatan	: 3
	- Sub Kegiatan	: 4
	- Pagu	: Rp80.010.000.000
	- Realisasi	: Rp0
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Terdiri Dari:
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 1

	- Pagu	: Rp200.000.000
	- Realisasi	: Rp600.000.002
Pagu Anggaran		: Rp101.248.569.052
Realisasi Anggaran		: Rp10.749.056.483
% Realisasi Anggaran		: 11 %
% Kinerja		: 3.2 %

19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Pemerintahan :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sasaran : -

Program,Kegiatan/ dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 29
- Pagu : Rp13.668.269.064
- Realisasi : Rp11.283.018.817

Program Pengembangan Kebudayaan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp1.049.999.761
- Realisasi : Rp 299.887.628

Program Pengembangan Kesenian Tradisional Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp1.199.999.852
- Realisasi : Rp1.194.426.592

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Terdiri Dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp313.745.671
- Realisasi : Rp310.499.221

Program Pengelolaan Permuseuman Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp186.254.413
- Realisasi : Rp177.417.375

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Terdiri Dari:

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp1.499.992.905
- Realisasi : Rp1.479.972.310

Program Pemasaran Pariwisata Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp1.599.986.438
- Realisasi : Rp1.598.729.832

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp399.999.750
- Realisasi : Rp399.167.933

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Terdiri Dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp800.285.955
- Realisasi : Rp790.925.120

Pagu anggaran : Rp20.718.533.809
Realisasi : Rp17.534.044.828
% Realisasi Anggaran : 84,63 %
% Kinerja : 62 %

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan :

- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sasaran :

- Meningkatnya nilai Tingkat kegemaran membaca Masyarakat
- Meningkatnya Indeks pembangunan literasi Masyarakat
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya ketersediaan arsip
- Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip

Program, Kegiatan/ dan Sub Kegiatan :

Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan: 11

- Pagu : Rp867.504.050

- Realisasi : Rp267.503.870

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Terdiri

Dari:

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan: 2

- Pagu : Rp150.000.000

- Realisasi : Rp150.000.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

terdiri Dari:

- Kegiatan : 8

- Sub Kegiatan: 25

- Pagu : Rp10.839.056.824

- Realisasi : Rp 5.020.816.372

Program Pengelolaan Arsip terdiri Dari:

- Kegiatan : 3

- Sub Kegiatan: 6

- Pagu : Rp501.060.000

- Realisasi : Rp100.000.000

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri Dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 1

- Pagu : Rp

- Realisasi : Rp

Program Perizinan Penggunaan Arsip terdiri Dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan: 1

- Pagu : Rp

- Realisasi : Rp

Pagu anggaran : Rp12.357.620.874

Realisasi : Rp 5.538.320.242

% Realisasi Anggaran : 45 %

% Kinerja : 24,73 %

21. Dinas Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
(BLUD)

Sasaran :

Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 9
- Sub Kegiatan: 31
- Pagu : Rp25.086.815.843
- Realisasi : Rp17.351.685.884

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 5
- Pagu : Rp699.971.706
- Realisasi : Rp693.677.901

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari :

- Kegiatan : 9
- Sub Kegiatan: 16
- Pagu : Rp8.966.126.850
- Realisasi : Rp8.060.374.342

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan: 12
- Pagu : Rp4.259.598.371
- Realisasi : Rp3.564.853.576

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 3
- Pagu : Rp1.369.999.750
- Realisasi : Rp1.366.701.140

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan: 7
- Pagu : Rp2.296.748.145
- Realisasi : Rp1.740.691.575

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD) terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp800.000.000
- Realisasi : Rp674.306.000

Pagu Anggaran : Rp43.479.260.665

Realisasi Anggaran : Rp33.452.290.418

% Realisasi Anggaran : 78 %
% Kinerja : 39 %

22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sasaran :

- Meningkatnya Administrasi penunjang Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Meningkatnya Infrastruktur sarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Meningkatnya Infrastruktur Prasarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Meningkatnya perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Meningkatnya Infrastruktur Prasarana pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Meningkatnya kualitas dan keterampilan SDM Pertanian Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 17
- Pagu : Rp33.875.345.612
- Realisasi : Rp27.847.847.141

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 4
- Pagu : Rp17.291.069.045
- Realisasi : Rp17.254.237.290

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp5.430.141.000
- Realisasi : Rp5.417.641.000

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp1.100.000.000

- Realisasi : Rp1.099.797.895

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan : 1

- Pagu : Rp1.267.315.400

- Realisasi : Rp1.185.014.831

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 1

- Sub Kegiatan : 1

- Pagu : Rp1.125.000.000

- Realisasi : Rp1.124.648.950

Pagu Anggaran : Rp60.088.871.057

Realisasi Anggaran : Rp53.929.187.107

% Realisasi Anggaran : 89,75 %

% Kinerja : 84 %

23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sasaran :

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Meningkatnya Tata Kelola, Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Asal Hewan

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 5

- Sub Kegiatan : 20

- Pagu : Rp15.471.112.907

- Realisasi : Rp12.895.230.529

Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari :

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 4

- Pagu : Rp1.275.000.000

- Realisasi : Rp 436.719.860

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 2

- Sub Kegiatan : 4

- Pagu : Rp2.335.000.000

- Realisasi : Rp2.332.327.128

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- Kegiatan : 4
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp643.654.004
- Realisasi : Rp643.321.460

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp25.000.000
- Realisasi : Rp25.000.000

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp335.000.000
- Realisasi : Rp334.920.000

Pagu Anggaran : Rp20.084.766.911

Realisasi Anggaran : Rp17.504.588.158

% Realisasi Anggaran : 87 %

% Kinerja : 96 %

24. Dinas Kehutanan

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sasaran : Meningkatnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 28
- Pagu : Rp96.305.460.480
- Realisasi : Rp66.030.769.764

Program Pengelolaan Hutan terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 25
- Pagu : Rp77.850.256.301
- Realisasi : Rp68.942.455.233

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp999.995.650

	- Realisasi	: Rp197.315.000
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan terdiri dari :	
	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 3
	- Pagu	: Rp2.143.295.718
	- Realisasi	: Rp2.008.981.316
Pagu Anggaran	:	Rp177.299.008.149
Realisasi Anggaran	:	Rp137.179.521.314
% Realisasi Anggaran	:	77,37 %
% Kinerja	:	95 %

25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya
Sasaran	:	<ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah- Meningkatkan elektrifikasi Daerah- Mengoptimalkan pengelolaan dan penatausahaan pertambangan mineral dan Batubara- Mengoptimalkan pengembangan sumber daya geologi dan air bawah tanah- Meningkatkan Elektrifikasi Daerah
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 5- Sub Kegiatan : 12- Pagu : Rp14.179.899.897- Realisasi : Rp10.649.375.210 <p>Program Pengelolaan Aspek Kegeologian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 2- Sub Kegiatan : 2- Pagu : Rp299.994.360- Realisasi : Rp299.515.250 <p>Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 4- Sub Kegiatan : 4- Pagu : Rp800.027.439- Realisasi : Rp797.222.990 <p>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan terdiri dari :</p>

	- Kegiatan	: 1
	- Sub Kegiatan	: 1
	- Pagu	: Rp197.923.088
	- Realisasi	: Rp197.659.986
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan terdiri dari :	
	- Kegiatan	: 3
	- Sub Kegiatan	: 3
	- Pagu	: Rp17.557.855.558
	- Realisasi	: Rp16.503.826.811
Pagu Anggaran	:	Rp33.035.700.342
Realisasi Anggaran	:	Rp28.447.600.247
% Realisasi Anggaran	:	86 %
% Kinerja	:	86 %

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Sasaran	:	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah - Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri - Meningkatnya Ekspor Non Migas Papua Barat - Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Industri Non
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari: - Kegiatan : 7 - Sub Kegiatan : 21 - Pagu : Rp17.443.846.710 - Realisasi : Rp14.379.156.960 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting terdiri dari : - Kegiatan : 4 - Sub Kegiatan : 6 - Pagu : Rp3.210.721.674 - Realisasi : Rp3.127.253.180 Program Pengembangan Ekspor terdiri dari : - Kegiatan : 1 - Sub Kegiatan : 3 - Pagu : Rp1.000.000.000 - Realisasi : Rp 999.558.960

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :

Kegiatan : 3
Sub Kegiatan : 4
Pagu : Rp1.000.000.000
Realisasi : Rp1.000.000.000

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari :

Kegiatan : 3
Sub Kegiatan : 3
Pagu : Rp330.000.000
Realisasi : Rp329.868.480

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp1.000.000.000
- Realisasi : Rp 999.290.051

Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 2
- Pagu : Rp148.627.785
- Realisasi : Rp148.531.700

Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari :

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp851.405.160
- Realisasi : Rp850.905.669

Pagu Anggaran : Rp24.984.601.329

Realisasi Anggaran : Rp21.834.565.000

% Realisasi Anggaran : 87,39 %

% Kinerja : 0 %

27. Biro Umum

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	- Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
	- Kegiatan : 10
	- Sub Kegiatan : 33
	- Pagu : Rp21.231.967.751
	- Realisasi : Rp
Pagu Anggaran	: Rp21.231.967.751
Realisasi Anggaran	: Rp
% Realisasi Anggaran	: %
% Kinerja	: %

28. Biro Administrasi Pimpinan

Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah
Sasaran	:
	Tercapainya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Daerah Provinsi Dalam Pelayanan Administrasi Pimpinan, Pelayanan Umum, Sekretariat dan Kerumahtangaan Pimpinan Daerah.
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
	- Kegiatan : 6
	- Sub Kegiatan : 16
	- Pagu : Rp7.000.000.000
	- Realisasi : Rp6.490.598.241
Pagu Anggaran	: Rp7.000.000.000
Realisasi Anggaran	: Rp6.490.598.241
% Realisasi Anggaran	: 92,72 %
% Kinerja	: 91,67 %

29. Biro Organisasi

Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah
Sasaran	: -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:
	- Kegiatan : 4
	- Sub Kegiatan : 5
	- Pagu : Rp746.183.463

	- Realisasi	: Rp718.959.160
	Program Penataan Organisasi terdiri dari:	
	- Kegiatan	: 2
	- Sub Kegiatan	: 8
	- Pagu	: Rp2.900.000.000
	- Realisasi	: Rp2.574.596.547
Pagu Anggaran		: Rp3.646.183.463
Realisasi Anggaran		: Rp3.293.555.707
% Realisasi Anggaran		: 90,33 %
% Kinerja		: 100,00 %

30. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah
Sasaran	: -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan	: 3
- Sub Kegiatan	: 4
- Pagu	: Rp129.999.818
- Realisasi	: Rp100.739.460

Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah terdiri dari:

- Kegiatan	: 3
- Sub Kegiatan	: 9
- Pagu	: Rp 7.819.723.910
- Realisasi	: Rp2.127.182.747.934

Pagu Anggaran	: Rp 7.949.723.728
Realisasi Anggaran	: Rp2.127.283.487.394
% Realisasi Anggaran	: 26.759 %
% Kinerja	: 54,49 %

31. Biro Kesejahteraan Rakyat

Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah
Sasaran	: Meningkatnya pelayanan Kepada Umat Beragama
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan	: 1
- Sub Kegiatan	: 1
- Pagu	: Rp3.499.999.590
- Realisasi	: Rp3.499.999.590

Program Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 8
- Pagu : Rp126.593.181.771
- Realisasi : Rp124.218.291.312

Pagu Anggaran : Rp130.093.181.361

Realisasi Anggaran : Rp127.718.290.902

% Realisasi Anggaran : 98,17%

% Kinerja : 100 %

32 Biro Hukum

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penataan Arsip Dinamis yang efisien
- Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang sesuai Kebutuhan Daerah
- Pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pertimbangan Hukum

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terdiri Dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 9
- Pagu : Rp1.359.650.000
- Realisasi : Rp1.178.022.780

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Terdiri Dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp5.890.350.000
- Realisasi : Rp5.477.654.186

Pagu Anggaran : Rp7.250.000.000

Realisasi Anggaran : Rp6.655.676.966

% Realisasi Anggaran : 91,80 %

% Kinerja : 52,00 %

33. Biro Perekonomian

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran : -

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 5
- Sub Kegiatan : 8
- Pagu : Rp566.873.588
- Realisasi : Rp179.675.408

Program Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 10
- Pagu : Rp4.708.116.899
- Realisasi : Rp4.971.622.152

Pagu Anggaran : Rp5.274.990.487
Realisasi Anggaran : Rp5.151.297.560
% Realisasi Anggaran : %
% Kinerja : %

34. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran :
Meningkatnya Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

- Kegiatan : 5
- Sub Kegiatan : 12
- Pagu : Rp1.290.000.000
- Realisasi : Rp

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari :

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 9
- Pagu : Rp3.863.819.599
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp5.153.819.599
Realisasi Anggaran : Rp
% Realisasi Anggaran : %
% Kinerja : %

35. Biro Administrasi Pembangunan

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Sasaran	: -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
	- Kegiatan : 7
	- Sub Kegiatan : 12
	- Pagu : Rp3.145.906.481
	- Realisasi : Rp
	Program Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terdiri dari :
	- Kegiatan : 2
	- Sub Kegiatan : 6
	- Pagu : Rp1.104.652.371
	- Realisasi : Rp
Pagu Anggaran	: Rp4.250.558.852
Realisasi Anggaran	: Rp
% Realisasi Anggaran	: %
% Kinerja	: %

36. Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus

Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah
Sasaran	:
	- Tercapainya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam pelayanan Administrasi Pimpinan, pelayanan Umum Sekretariat dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
	- Tercapainya pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :
	- Kegiatan : 7
	- Sub Kegiatan: 12
	- Pagu : Rp724.640.995
	- Realisasi : Rp975.273.711
	Program Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum terdiri dari:
	- Kegiatan : 1
	- Sub Kegiatan: 1
	- Pagu : Rp1.844.986.601
	- Realisasi : Rp1.844.986.601
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 1
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0

Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan: 2
- Pagu : Rp 9.385.215.894
- Realisasi : Rp12.397.398.313

Pagu Anggaran : Rp11.954.843.490
Realisasi Anggaran : Rp15.217.658.625
% Realisasi Anggaran : 127,29 %
% Kinerja : 50,00 %

37. Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah
Sasaran : -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 9
- Sub Kegiatan : 23
- Pagu : Rp207.108.475.358
- Realisasi : Rp

Pagu Anggaran : Rp207.108.475.358
Realisasi Anggaran : Rp
% Realisasi Anggaran : %
% Kinerja : %

38. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD
Sasaran : -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 10
- Sub Kegiatan : 33
- Pagu : Rp78.295.836.262
- Realisasi : Rp71.889.300.376

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
terdiri dari:

- Kegiatan : 8
- Sub Kegiatan : 35
- Pagu : Rp39.316.156.484
- Realisasi : Rp48.126.579.000

Program Sekretariat DPRD Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 3
- Pagu : Rp0
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp113.365.821.921
Realisasi Anggaran : Rp120.015.879.376
% Realisasi Anggaran : 105,87 %
% Kinerja : 50,00 %

39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Pemerintahan : Perencanaan

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus

Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 48
- Pagu : Rp19.534.371.655
- Realisasi : Rp

Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 9
- Pagu : Rp8.846.105.958
- Realisasi : Rp

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 24

	- Pagu	: Rp7.312.298.552
	- Realisasi	: Rp
Pagu Anggaran		: Rp35.497.276.165
Realisasi Anggaran		: Rp
% Realisasi Anggaran		: %
% Kinerja		: %

40. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Pemerintahan	: Keuangan
Sasaran	:
	- Meningkatnya Akuntabilitas, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
	- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah
	- Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan SOP
	- Meningkatnya Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan	: 8
- Sub Kegiatan	: 47
- Pagu	: Rp160.130.835.052
- Realisasi	: Rp 48.333.516.731

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan	: 5
- Sub Kegiatan	: 36
- Pagu	: Rp1.839.757.122.260
- Realisasi	: Rp1.744.627.139.333

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari:

- Kegiatan	: 1
- Sub Kegiatan	: 12
- Pagu	: Rp4.715.473.904
- Realisasi	: Rp4.064.123.197

Pagu Anggaran	: Rp2.004.603.431.216
Realisasi Anggaran	: Rp1.797.024.779.261
% Realisasi Anggaran	: 89,64 %
% Kinerja	: 54,00 %

41. Badan Pendapatan Daerah

Urusan Pemerintahan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
Sasaran	: -

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari: - Kegiatan : 8 - Sub Kegiatan : 30 - Pagu : Rp47.982.687.973 - Realisasi : Rp39.475.716.939 Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: - Kegiatan : 4 - Sub Kegiatan : 5 - Pagu : Rp953.940.660 - Realisasi : Rp943.868.208 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari: - Kegiatan : 1 - Sub Kegiatan : 15 - Pagu : Rp6.338.965.866 - Realisasi : Rp4.144.937.928
Pagu Anggaran	:	Rp55.275.594.499
Realisasi Anggaran	:	Rp44.564.523.075
% Realisasi Anggaran	:	80,62 %
% Kinerja	:	85,00 %

42. Badan Kepegawaian Daerah

Urusan Penunjang	:	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
Sasaran	:	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari : - Kegiatan : 7 - Sub Kegiatan : 29 - Pagu : Rp14.390.786.725 - Realisasi : Rp11.738.999.147 Program Kepegawaian Daerah terdiri dari: - Kegiatan : 4 - Sub Kegiatan : 33 - Pagu : Rp12.678.702.552 - Realisasi : Rp12.465.675.301
Pagu Anggaran	:	Rp27.069.489.277

Realisasi Anggaran : Rp24.204.674.448
% Realisasi Anggaran : 89,42 %
% Kinerja : 52,69 %

43. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Pendidikan Dan Pelatihan

Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penganggaran dan
Administrasi Perangkat

Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 23
- Pagu : Rp 12.378.482.614
- Realisasi : Rp 9.371.821.000

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 12
- Pagu : Rp 752.778.603
- Realisasi : Rp 435.794.958

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 1
- Pagu : Rp18.416.995.000
- Realisasi : Rp0

Pagu Anggaran : Rp31.548.256.217
Realisasi Anggaran : Rp10.121.472.318
% Realisasi Anggaran : 32,68 %
% Kinerja : 67,50 %

44. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian
Dan Pengembangan

Sasaran :
- Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Meningkatkan Kualitas, Kreativitas dan Inovasi dalam
Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah melalui
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program, Kegiatan, dan :
Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 21
- Pagu : Rp8.209.031.716
- Realisasi : Rp6.230.196.675

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- Kegiatan : 3
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp2.642.299.742
- Realisasi : Rp2.639.258.732

Pagu Anggaran : Rp10.851.331.458

Realisasi Anggaran : Rp 8.869.455.407

% Realisasi Anggaran : 81,74 %

% Kinerja :77,82 %

45. Badan Penghubung Daerah

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Penghubung
Sasaran :

- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan administrasi Perangkat Daerah;
- Meningkatnya Program Pelayanan Penghubung.

Program, Kegiatan, dan :
Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
terdiri dari:

- Kegiatan : 7
- Sub Kegiatan : 19
- Pagu : Rp11.519.881.878
- Realisasi : Rp10.516.988.071

Program Pelayanan Penghubung terdiri dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp1.925.517.926
- Realisasi : Rp1.918.503.698

Pagu Anggaran : Rp13.445.399.804

Realisasi Anggaran : Rp12.435.491.769

% Realisasi Anggaran : 92,49 %

% Kinerja : 77,66 %

46. Inspektorat

Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah
Sasaran	: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah- Meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Penganggaran dan administrasi Perangkat Daerah
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 6- Sub Kegiatan : 23- Pagu : Rp31.122.938.895- Realisasi : Rp24.887.088.188 Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 2- Sub Kegiatan : 9- Pagu : Rp10.126.855.970- Realisasi : Rp10.111.495.429 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 1- Sub Kegiatan : 2- Pagu : Rp394.000.000- Realisasi : Rp391.945.850
Pagu Anggaran	: Rp 41.643.794.865
Realisasi Anggaran	: Rp 35.390.529.467
% Realisasi Anggaran	: 85,69 %
% Kinerja	: 87,00 %

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Pemerintahan	: Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran	: -
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terdiri Dari: <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan : 8- Sub Kegiatan : 42- Pagu : Rp 13.207.324.518- Realisasi : Rp 11.551.873.350

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp4.060.699.472
- Realisasi : Rp1.755.755.879

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp10.645.845.843
- Realisasi : Rp 8.557.492.395

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp448.762.776.057
- Realisasi : Rp446.875.802.877

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 5
- Pagu : Rp108.815.500
- Realisasi : Rp108.805.500

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Terdiri Dari:

- Kegiatan : 1
- Sub Kegiatan : 6
- Pagu : Rp1.342.185.872
- Realisasi : Rp 1.338.867.660

Pagu Anggaran : Rp 478.127.647.262

Realisasi Anggaran : Rp 470.188.597.661

% Realisasi Anggaran : 98,43 %

% Kinerja : 100 %

48. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat

Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penganggaran dan Administrasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga MRP

Program, Kegiatan, dan :

Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari:

- Kegiatan : 6
- Sub Kegiatan : 21
- Pagu : Rp23.428.049.497
- Realisasi : Rp12.613.572.984

Program Utama Dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- Kegiatan : 2
- Sub Kegiatan : 9
- Pagu : Rp36.809.668.830
- Realisasi : Rp32.508.617.387

Pagu Anggaran : Rp60.237.718.327

Realisasi Anggaran : Rp45.122.190.371

% Realisasi Anggaran : 74,97 %

% Kinerja : 90,00 %

2.3.2. Capaian Kinerja Daerah Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Provinsi Papua Barat. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Target dan Capaian Indikator Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Tabel II.139 sebagai berikut :

Tabel II.139 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,55	67,21	66,84	67,69
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,54	66,67	68,28	68,47
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,79	14,14	13,16	13,17
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,40	8,78	7,66	7,86
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,28	84,95	84,18	82,26
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,05	65,01	62,42	55,89

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,27	57,40	57,17	0,00
Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen	25,00	50,00	25,00	50,00
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	26,00	22,00	24,80	24,60
Cakupan OAP penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persen	50,0	55,0	50,0	55,0
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,00	4,00	5,18	20,80
Tingkat Kemiskinan	Persen	21,00	19,00	20,49	21,09
Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita	RpRibu	56.123	57.806	71.924	85.513
Indeks Gini	Indeks	0,373	0,369	0,370	0,390
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,24	69,93	67,24	71,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,00	4,80	5,38	4,33
Nilai PDRB ADHK Sektor Pariwisata	RpMilyar	3364,40	3431,69	16121,08	21425,31
Kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	7,50	7,63	7,43	7,63
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	31,02	31,18	30,80	31,00
Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100,68	100,73	99,81	98,88
Nilai Investasi	RpTriliun	15.077,07	15.454,00	1.261,90	
Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya per tahun	Persen	10,00	10,00		80,00
Persentase UMKM yang meningkat omzetnya per tahun	Persen	10,00	10,00		90,00
Kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	Persen	5,56	5,73		6,73 (masih gabung dengan subsector pertanian + kehutanan)
Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	Persen	12,06	15,51	8,2	20,9
Cakupan sistem administrasi dan informasi kampung yang terhubung dengan Kabupaten dan Provinsi	Persen	65,00	80,00		
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	122,32	119,88	124,26	124,71
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	76,89	80,74	54,6	41,63
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	81,09	82,31	82,36	86,31
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persen	80,01	81,21	74,91	82,38

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024
Cakupan Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi	Persen	40,00	60,00		20,24
Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	58,25	59,70	56,92	58,22
Cakupan wilayah yang sudah terakses internet telepon seluler	Persen	85,14	87,70		
Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan wilayah kabupaten/kota pesisir yang terhubung dengan moda transportasi laut	Persen	100,00	100,00		
Cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi udara	Persen	100,00	100,00		
Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan non-PLN)	Persen	95,68	95,87	94,27	82,31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,82	78,45	83,31	83,75
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,25	56,35	59,52	63,25
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	91,98	94,74	86,83	86,28
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,17	92,27	96,22	94,40
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan	tCO ₂ /th	3.740.830	3.206.426	38.004,00	23.580,00
	Persen	70,00	60,00	60,00	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	B
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B	B	B
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2		
Opini pengelolaan keuangan daerah	Level	WTP	WTP	WDP	WDP
Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA)	Kategori	Inovatif	Inovatif	Klaster Papua Terinovatif (Kabupaten Kaimana)	Klaster Papua Terinovatif (Kabupaten Kaimana)
Capaian Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase Kab/ Kota yang Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
		2023	2024	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	63,00	65,00	65,55	65,55
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	142,05	141,34	145,76	145,76
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	82,10	82,92	76,20	72,84

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target capaian untuk tahun 2023 dan 2024 di berbagai sektor pembangunan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target IPM untuk tahun 2023 adalah 66,84 dan meningkat menjadi 67,69 pada tahun 2024. Angka Harapan Hidup (AHH) juga ditargetkan meningkat dari 68,28 tahun pada 2023 menjadi 68,47 tahun pada 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan HLS mencapai 13,17 tahun dan RLS mencapai 7,86 tahun pada 2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai 82,26 pada tahun 2024, sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan peningkatan dari 62,42 menjadi 55,89 dalam periode yang sama.

Sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama pembangunan di Papua Barat. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 20,80% pada tahun 2024, naik signifikan dari 5,18% pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sedikit meningkat dari 20,49% pada tahun 2023 menjadi 21,09% pada tahun 2024, meskipun Pendapatan per Kapita (PDRB ADHK) diharapkan meningkat dari Rp71.924.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp85.513.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan menurun menjadi 4,33% pada tahun 2024, dari 5,38% pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam perekonomian PDRB ADHK juga ditargetkan stabil pada 7,63% dan 31,00% masing-masing pada tahun 2024.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup juga menjadi prioritas. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ditargetkan meningkat dari 124,26 pada tahun 2023 menjadi 124,71 pada tahun 2024. Meskipun persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) menunjukkan penurunan menjadi 41,63% pada tahun 2024, cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dan air bersih terus ditingkatkan, dengan target masing-masing 86,31% dan 82,38% pada tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan target peningkatan dari 83,31 pada tahun 2023 menjadi 83,75 pada tahun 2024. Selain itu, cakupan wilayah yang sudah terakses internet telepon seluler, serta cakupan wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan moda transportasi darat, laut, dan udara ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berkomitmen pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) ditargetkan mencapai kategori "B" pada tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian Kategori Innovation Government Award (IGA) Provinsi Papua Barat ditargetkan sebagai "Klaster Papua Terinovatif (Kabupaten Kaimana)". Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Papua Barat ditargetkan

mencapai 65,55 pada tahun 2024. Target-target ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat.

2.4 PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Capaian penerapan SPM Provinsi Papua Barat secara akumulasi Sejak tahun 2020, pelayanan SPM menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dimulai dengan angka 20,44 pada tahun 2020, tercatat adanya peningkatan bertahap yang mencerminkan upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2021, pelayanan SPM terus mengalami kenaikan dengan angka mencapai 22,02, yang menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari pihak penyelenggara untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dengan angka yang hanya mencapai 1,56. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kendala eksternal atau internal yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan, atau dampak dari peristiwa tertentu yang mempengaruhi sektor pelayanan, dan pandemi. Meskipun demikian, pencapaian rendah pada tahun 2022 menjadi titik balik yang mendorong perbaikan dan penguatan sistem pelayanan di tahun-tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan yang luar biasa, dengan angka capaian SPM meningkat pesat hingga 52,32. Hal ini mencerminkan upaya pemulihan yang cepat serta inovasi dalam strategi penyelenggaraan pelayanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemulihan ini juga menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pelayanan publik.

Pada tahun 2024, angka capaian SPM terus mengalami peningkatan, mencapai 84,11, yang merupakan angka tertinggi sepanjang periode yang tercatat. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang lebih efektif, dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi.

Melihat tren positif yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024, diharapkan pada tahun 2025 pelayanan SPM dapat terus meningkat, dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan, inovasi teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan SPM dapat mencapai standar yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat

Gambar II.143 Rata-Rata Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024



Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Hasil analisa capaian penerapan SPM Provinsi Papua Barat berdasarkan setiap bidang urusan menunjukkan bahwa ditahun 2024 capaian penerapan SPM pada bidang Pekerjaan Umum dan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat telah mencapai 100%, sehingga capaian ini dapat mengindikasikan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada kedua bidang tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya capaian penerapan SPM terendah terlihat pada urusan bidang Perumahan Rakyat dengan persentase capaian 45,83%, dan disusul oleh capaian bidang Sosial dengan persentase capaian 68,52%. Adapun capaian penerapan SPM bidang Kesehatan cenderung menunjukkan penurunan dari 100% ditahun 2020 menjadi 95,24% pada tahun 2024. Kondisi penurunan ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan pemenuhan pelayanan kesehatan. Adapun capaian penerapan SPM menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat berdasarkan bidang urusan tahun 2020-2024 secara terperinci disajikan pada Tabel II.140.

Tabel II.140 Capaian Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Berdasarkan Urusan Tahun 2020-2024

Urusan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	22,65	79,39	0,00	44,29	95,05
Kesehatan	100,00	46,29	0,00	97,58	95,24
Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	85,00	100,00
Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	17,86	45,83
Trantibumlinmas	0,00	0,00	0,00	67,26	100,00
Sosial	0,00	6,41	9,35	1,93	68,52

Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Tabel II.141 Capaian Penerapan SPM Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Bidang Urusan Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	Kabupaten	Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial	Rata-Rata Capaian
2020	Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fakfak	53,86	59,14	81,37	26,50	67,00	66,00	58,98
	Teluk Bintuni	64,67	49,30	0,00	34,07	78,01	27,00	42,18
	Teluk Wondama	0,00	45,11	34,58	34,79	12,34	54,58	30,23
	Kaimana	46,55	74,92	68,38	0,52	34,17	20,00	40,75
	Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pegunungan Arfak	51,10	52,73	5,48	61,84	25,74	20,86	36,29
2021	Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fakfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teluk Bintuni	65,08	51,91	0,00	0,00	90,00	27,00	39,00
	Teluk Wondama	29,50	53,73	28,30	56,36	29,67	49,87	41,24
	Kaimana	45,07	73,93	6,12	0,00	0,00	0,00	20,86

Tahun	Kabupaten	Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibum-linmas	Sosial	Rata-Rata Capaian
	Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fakfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teluk Bintuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Manokwari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fakfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teluk Bintuni	81,21	60,49	30,69	15,67	97,78	13,97	49,97
	Teluk Wondama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaimana	76,46	45,80	46,45	40,00	5,59	46,41	43,45
	Manokwari Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Manokwari	91,08	68,51	55,83	46,53	95,22	72,28	71,57
	Fakfak	96,63	70,66	56,67	100,00	95,22	86,72	84,32
	Teluk Bintuni	87,98	47,29	67,61	0,00	1,09	62,93	0,00
	Teluk Wondama	0,00	45,35	55,12	57,49	0,00	67,35	0,00
	Kaimana	92,57	83,83	96,50	53,85	98,19	92,03	86,16
	Manokwari Selatan	40,24	78,72	0,00	64,83	84,89	0,00	0,00
	Pegunungan Arfak	0,00	16,67	17,26	0,00	58,18	49,36	0,00

Sumber : DITJEN Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 berpedoman pada kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 serta mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Upaya pembangunan pada tahun ini diarahkan kepada penguatan pondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian dalam koridor otonomi khusus. RKPD 2026 memiliki peran strategis dalam periode RPJMD 2025-2029 karena merupakan tahun pertama dimana implementasi arah kebijakan dalam periode RPJMD ini dapat dilaksanakan secara penuh, mengingat arah kebijakan pada tahun 2025 merupakan transisi dari periode sebelumnya ke RPJMD 2025-2029.

Sebagai bagian dari upaya penguatan pondasi transformasi, sebagaimana arahan pembangunan periode pertama RPJP Provinsi Papua Barat 2025-2045, arah kebijakan ekonomi daerah perlu mempertimbangkan kondisi riil Provinsi Papua Barat terkini dan proyeksinya di beberapa tahun yang akan datang. Pertimbangan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan indikator-indikator makroekonomi seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi inflasi, serta indikator ekonomi lainnya antara lain sebagai berikut.

3.2 KONDISI EKONOMI DAERAH

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode 2020-2024, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2020, total PDRB ADHK 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar Rp38.940.000.000.000,00 (Tiga puluh delapan triliun sembilan ratus empat puluh miliar rupiah) dan mengalami peningkatan menjadi Rp49.560.000.000.000,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus enam puluh miliar rupiah) pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kabupaten yang memiliki PDRB ADHK tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni Rp35.030.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun tiga puluh miliar rupiah) dan Kabupaten Manokwari Rp7.030.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga puluh miliar rupiah). Tingginya nilai PDRB Teluk Bintuni dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dari sektor migas.

Tabel III.1 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten di Papua Barat (Miliar Rupiah)

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Fakfak	3.440,58	3.474,01	3.551,88	3.603,90	3.717,40
Kaimana	1.752,82	1.716,00	1.735,22	1.791,37	1.829,57
Teluk Wondama	979,43	990,094	1.021,74	1.049,99	1.088,51
Teluk Bintuni	25.648,78	25.058,623	25.564,58	27.108,16	35.029,08
Manokwari	6.388,76	6.624,67	6.761,04	6.825,57	7.028,30
Manokwari Selatan	578,45	585,58	597,17	609,92	652,59

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Pegunungan Arfak	151,23	158,11	180,20	196,37	217,67
Total 7 Kabupaten	38.940,03	38.607,09	39.411,83	41.185,28	49.563,12

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2025

Tabel III.2 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tanpa Migas Kabupaten di Papua Barat (Milyar Rupiah) (Data Tersedia Terakhir 2022)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Fakfak	3.367,23	3.545,31	3.440,58	3.474,01
Kaimana	1.557,82	1.647,56	1.739,45	1.803,96
Teluk Wondama	971,46	1.012,03	979,43	990,09
Teluk Bintuni	2.090,87	3.247,02	3.154,21	3.222,87
Manokwari	6.579,07	6.815,96	6.388,76	6.593,32
Manokwari Selatan	548,39	595,22	578,45	586,83
Pegunungan Arfak	133,35	142,57	151,23	157,52
Total 7 Kabupaten	15.248,19	17.005,67	16.432,11	16.828,60

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2022

Apabila ditinjau berdasarkan nilai PDRB ADHK tanpa sektor migas, pada tahun 2021 wilayah yang memiliki nilai PDRB tertinggi adalah Kabupaten Manokwari Rp6.590.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus sembilan puluh miliar rupiah) dan Kabupaten Fakfak Rp3.470.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh miliar rupiah), sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.2. Apabila membandingkan nilai PDRB pada Tabel III.2 dan Tabel III.1 terlihat bahwa sektor migas memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap pendapatan regional Provinsi Papua Barat, terutama Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel III.3 menunjukkan laju pertumbuhan total PDRB menurut kabupaten di Papua Barat tahun 2020-2024. Berdasarkan Tabel III.3 diketahui bahwa selama periode 2021-2023, wilayah yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Papua Barat adalah Pegunungan Arfak yang mencapai 13,39 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2024 kabupaten Teluk Bintuni memiliki lonjakan laju pertumbuhan PDRB yang sangat besar yaitu sebesar 29,22 persen, namun perlu dicatat bahwa besarnya laju pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh sektor pengolahan gas bumi di wilayah tersebut.

Tabel III.3 Laju Pertumbuhan Total PDRB Menurut Kabupaten di Papua Barat (%)

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Fakfak	-2,95	0,97	1,85	1,86	3,15
Kaimana	-2,83	-2,1	1,03	3,32	2,13
Teluk Wondama	-3,22	1,09	3,19	2,77	3,67
Teluk Bintuni	1,06	-2,3	2,01	6,05	29,22
Manokwari	-6,27	3,69	2,05	0,96	2,97
Manokwari Selatan	-2,82	1,23	2,01	2,10	7,00
Pegunungan Arfak	6,07	4,55	13,39	9,53	10,85

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2025

3.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam subbab ini, pembahasan struktur ekonomi dirumuskan berdasarkan sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten di Papua Barat. Pada tahun 2020-2024, secara umum struktur ekonomi kabupaten di Papua Barat menunjukkan struktur ekonomi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Tabel III.4, diketahui bahwa 3 dari 7 wilayah kabupaten di Papua Barat memiliki struktur ekonomi yang didominasi kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan

perikanan, yakni kabupaten Kaimana 26,48 persen, Teluk Wondama 32,37 persen, dan Manokwari Selatan 58,91 persen. Dua kabupetn didominasi kontribusi sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu Manokwari sebesar 19,94 persen, dan Pegunungan Arfak sebesar 50,90 persen. Sedangkan kontribusi paling menonjol di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sektor Industri Pengolahan 50,15 persen, dan Kabupaten Fakfak sektor konstruksi sebesar 27,23 persen. Khusus untuk Kabupaten Teluk Bintuni, sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian adalah sektor pertambangan dan penggalian 35,95 persen, serta industri pengolahan 50,15 persen. Dalam hal ini, subsektor industri batubara dan pengilangan migas masih mendominasi dibandingkan industri pengolahan non-migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan pemeran utama adalah industri Liquid Natural Gas (LNG).

Tabel III.4 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2020-2024

Lapangan Usaha		Rata-rata Distribusi PDRB ADHK 2020-2024 (%)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,34	26,48	32,37	2,94	13,18	58,91	28,16
2	Pertambangan dan Penggalian	1,20	1,1	1,30	35,95	2,47	0,50	0,32
3	Industri Pengolahan	3,29	5,58	2,14	50,15	4,64	1,29	0,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,01	0,02	0,00	0,15	0,16	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,04	0,04	0,00	0,33	0,00	-
6	Konstruksi	27,23	19,82	17,34	7,34	18,79	3,58	14,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,67	11,54	8,42	0,49	14,89	1,29	0,13
8	Transportasi dan Pergudangan	5,45	5,08	2,26	0,15	4,87	2,53	0,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,26	0,84	0,41	0,03	1,69	0,40	0,23
10	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,56	1,52	0,18	4,91	1,62	0,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	2,02	0,42	0,05	4,11	0,27	0,05
12	Real Estate	2,31	1,92	1,62	0,16	3,16	0,30	0,48
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,1	0,06	0,00	0,25	0,09	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,90	20,86	27,77	2,21	19,94	22,98	50,90
15	Jasa Pendidikan	4,47	1,7	3,3	0,26	4,63	3,65	2,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	0,84	0,76	0,09	2,01	1,40	1,10
17	Jasa Lainnya	0,03	0,46	0,21	0,01	0,60	0,96	0,27
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keterangan:		kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut						

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2024 (diolah)

Dalam menganalisis struktur ekonomi daerah, selain mengkaji kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB juga perlu meninjau laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada rentang tahun tertentu. Berdasarkan Tabel III.5 terlihat bahwa terdapat laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa). Hal ini mengindikasikan mulai adanya transformasi struktural atau pergeseran pertumbuhan sektor

ekonomi yang dapat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja/struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di Papua Barat.

Tabel III.5 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Barat (%), 2020-2024

Lapangan Usaha		Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2020-2024 (%)						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,34	0,32	-0,75	-1,39	-0,88	0,52	-6,05
2	Pertambangan dan Penggalian	0,40	2,38	3,55	0,94	3,52	2,75	25,05
3	Industri Pengolahan	1,78	1,2	2,98	2,13	7,48	14,79	30,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,55	6,18	1,20	10,42	15,05	4,69	-0,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,16	1,54	2,17	3,02	3,73	30,36	-
6	Konstruksi	-0,09	-0,56	0,91	35,74	-9,41	0,59	41,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,17	4,96	4,97	6,73	6,68	3,55	22,71
8	Transportasi dan Pergudangan	1,17	-0,1	0,67	-3,10	0,41	0,81	25,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	3,2	4,06	2,46	4,47	1,60	35,32
10	Informasi dan Komunikasi	4,55	4,1	11,79	8,40	7,93	34,72	59,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,21	5,26	3,04	6,60	4,02	11,95	27,07
12	Real Estate	1,43	1,16	3,87	4,14	2,11	3,16	23,13
13	Jasa Perusahaan	2,36	2,66	2,16	2,90	2,22	0,49	-6,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	-1,76	2,79	3,83	4,30	5,80	9,85
15	Jasa Pendidikan	1,91	2,52	3,16	2,63	-2,17	3,77	4,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	7,52	5,89	8,34	5,16	6,85	5,01
17	Jasa Lainnya	3,47	3,08	8,05	5,32	5,67	1,46	6,68
PDRB		1,40	0,64	1,60	2,06	0,81	2,21	8,34
Keterangan:		Laju pertumbuhan lapangan usaha relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut						

Sumber: BPS Kabupaten-Kota, 2024 (diolah)

Untuk menganalisis struktur ekonomi kabupaten di Papua Barat dilakukan analisis Tipologi Klassen terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha di Papua Barat tahun 2019-2023. Tipologi Klassen membagi lapangan usaha menjadi 4 kategori yaitu: kuadran I adalah sektor maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor berkembang cepat, kuadran III adalah sektor maju tapi tertekan, serta kuadran IV adalah sektor yang relatif tertinggal (lihat Tabel III.6).

Tabel III.6 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen						
		Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3	3	4	3	3	3
2	Pertambangan dan Penggalian	4	4	4	3	4	4	2
3	Industri Pengolahan	4	3	4	3	2	4	4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2	2	2	2	2	4	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	4	4	4	4	2	4
6	Konstruksi	3	3	3	2	3	4	1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	1	1	4	1	4	4
8	Transportasi dan Pergudangan	4	4	4	4	4	4	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2	2	4	4	2	4	2
10	Informasi dan Komunikasi	2	2	4	2	2	2	2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2	2	2	2	2	2	2
12	Real Estate	4	4	2	4	4	4	4
13	Jasa Perusahaan	2	4	4	4	4	4	4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	3	4	3	3	3
15	Jasa Pendidikan	4	2	4	4	4	4	4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4	2	2	2	2	4	4
17	Jasa Lainnya	2	2	2	4	4	4	4

Berdasarkan Tabel III.6 dapat diketahui bahwa sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sektor konstruksi. Wilayah yang tidak memiliki sektor maju dan berkembang pesat adalah Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Di Kabupaten Teluk Bintuni, sektor pertambangan dan industri pengolahan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil sehingga termasuk dalam kategori “sektor maju tapi tertekan” (kuadran III). Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan karena sektor pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil.

Sebagai tindak lanjut dari analisis Tipologi Klassen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.6, dapat diketahui intervensi sektoral yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pembangunan ekonomi jangka pendek/menengah maupun jangka panjang. Untuk perbaikan ekonomi jangka pendek/menengah pemerintah provinsi/kabupaten dapat fokus pada perbaikan sektor potensial yang berkembang pesat.

3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami tren penurunan pada 2020-2022. Pada tahun 2020 rata-rata PDRB ADHK per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian menurun menjadi Rp63.080.000,00 (enam puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2021, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai menjadi Rp58.730.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 2022. Peningkatan PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Papua Barat kembali terjadi pada tahun 2023-2024. Hal ini mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian karena pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Adapun penurunan PDRB per kapita disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara regional, wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni Rp384.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada 2024. Tingginya PDRB per kapita pada Teluk Bintuni dipengaruhi adanya tambang minyak *Liquid Natural Gas* (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia.

Tabel III.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (Rp 000) 2020-2024

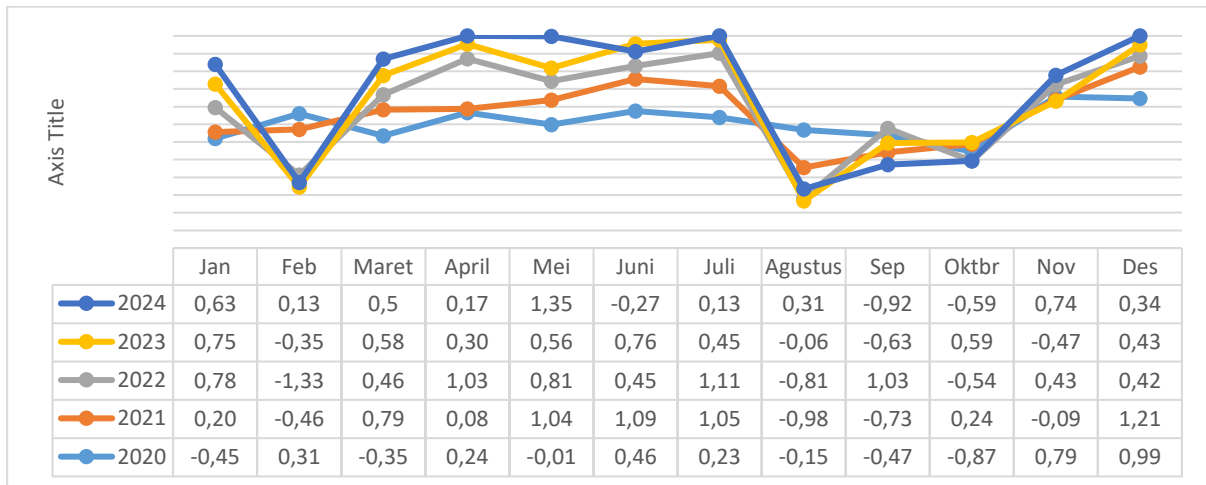
NO.	KABUPATEN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fakfak	40.323	40.269	40.395	40.546	41.226
2	Kaimana	28.152	27.172	26.949	27.353	27.448
3	Teluk Wondama	23.615	23.322	23.490	23.577	23.891
4	Teluk Bintuni	296.127	284.418	286.879	300.864	384.664
5	Manokwari	33.161	33.889	34.029	33.820	34.292
6	Manokwari Selatan	16.216	16.038	16.023	16.027	16.811
7	Pegunungan Arfak	3.969	4.058	4.499	4.827	5.249
Rata-rata		80.697	63.080	58.732	59.511	76.226

Sumber: BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2025"

3.2.4 Inflasi

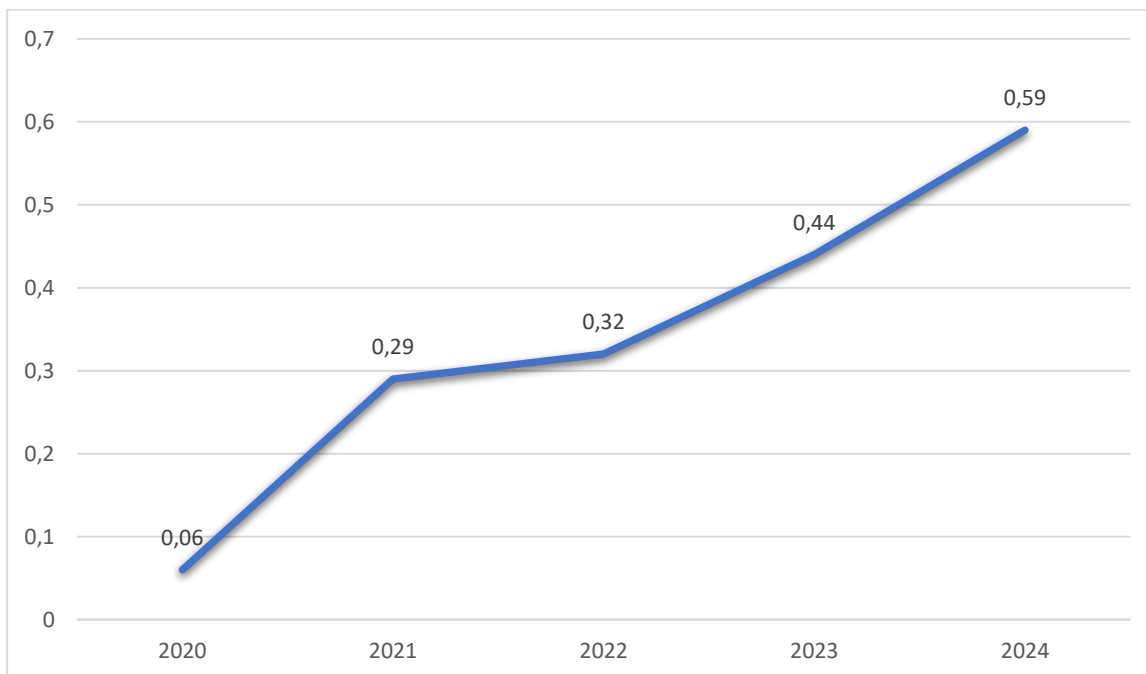
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam lima tahun terakhir, 2020-2024 inflasi Papua Barat cukup stabil dan terkendali dibawah 3 persen dan juga terjadi deflasi. Trend pergerakan sepanjang tahun dapat dilihat pada grafik 3.2.4.1. Inflasi tertinggi sebesar 1,35 persen terjadi pada bulan Mei 2020 dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar -1,33 persen. Beberapa penyebab terjadinya inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti liburan awal dan akhir tahun, lalu lintas perdagangan antar pulau, cuaca, kenaikan harga bahan bakar minyak, tingkat produksi kebutuhan pokok, naiknya konsumsi pada hari-hari besar keagamaan serta kenaikan pajak. Sedangkan penyebab terjadinya deflasi menurunnya tingkat konsumsi dan meningkatnya produksi yang berlebihan.

Gambar III.1 Inflasi Papua Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat 2024 diolah

Gambar III.2 Rata-rata Inflasi tahun 2020-2024 Papua Barat



Grafik diatas menunjukkan rata-rata inflasi Papua Barat Tahun 2020-2024. Inflasi tertinggi sebesar 0,59 persen terjadi pada tahun 2024 dan terendah 0,06 persen pada tahun 2020. Angka inflasi yang stabil menunjukkan stabilnya perekonomian daerah yang didukung oleh semua stakeholder dalam pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

3.2.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum angka kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebagai dampak ekonomi pandemi Covid-19. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebesar 112,54 ribu jiwa (26,88 persen) dan mengalami penurunan menjadi 110,16 ribu jiwa (21,66 persen) pada tahun 2024.

Secara regional seluruh daerah di Papua Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020-2024, Terdapat 3 kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dari tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Kaimana.

Adapun daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Papua Barat pada tahun 2024 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (31,76 persen), dan Teluk Wondama (28,47 persen) (lihat Tabel III.8).

Tabel III.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten, 2020-2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fakfak	17,72	18,51	18,13	17,84	17,67	22,27	22,86	22,06	21,38	20,86
2	Kaimana	9,52	10,31	10,11	9,90	10,06	15,50	16,04	15,29	14,57	14,41
3	Teluk Wondama	10,22	10,74	10,44	10,24	10,33	30,91	31,61	30,06	28,90	28,47
4	Teluk Bintuni	19,22	20,07	20,45	19,82	19,33	29,39	29,79	29,73	28,24	26,99
5	Manokwari	35,92	35,63	34,96	33,85	33,29	20,14	20,56	19,90	18,73	18,45
6	Manokwari Selatan	7,09	7,65	7,68	7,69	7,64	28,88	29,30	28,55	27,80	26,83
7	Pegunungan Arfak	10,68	11,85	11,87	11,71	11,87	22,81	34,70	33,71	32,29	31,76
Papua Barat		112,54	110,37	114,76	110,55	110,16	26,88	24,27	26,41	22,15	21,66

Sumber : BPS Papua Barat dalam dokumen "Papua Barat Dalam Angka 2024"

Arah kebijakan dan Strategi terkait penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrim sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu.

Pada Tabel III.9 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0) dan kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan. Terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 1,82 (tahun 2023) menjadi 1,28 (tahun 2024). Hal ini memberikan gambaran terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Papua Barat, namun masih terdapat ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel III.9 Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2024

No	Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (%) (P0)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Fakfak	21,38	20,86	4,92	4,60	1,62	1,35	671.021	725.257
2	Kaimana	14,57	14,41	3,13	3,17	0,91	1,01	609.865	682.231
3	Teluk Wondama	28,90	28,47	6,44	4,68	2,01	1,15	659.187	710.854
4	Teluk Bintuni	28,24	26,99	7,44	6,50	2,66	2,25	787.048	794.285
5	Manokwari	18,73	18,45	3,69	3,30	1,31	0,82	752.635	802.749
6	Manokwari Selatan	27,80	26,83	8,99	5,17	2,53	1,54	719.773	734.246
7	Pegunungan Arfak	32,29	31,76	6,21	5,54	1,70	1,38	723.662	738.135
Rata-rata		22,15	21,66	5,83	5,83	1,82	1,28	703.313	783.804

Sumber: BPS Nasional, 2024

3.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Secara teoritis, pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut mencerminkan penambahan output yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kapasitas produksi. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Rata-rata TPT Kabupaten di Papua Barat selama 5 tahun terakhir berfluktuasi, 5,65 persen pada tahun 2020 menjadi 3,30 persen pada tahun 2023, dan 4,13 persen di Tahun 2024 (Tabel III.9). Meskipun tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja dapat dianggap sebagai indikator yang informatif dalam mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja, namun perlu dipertimbangkan bahwa indikator ini belum cukup untuk menafsirkan ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel III.9 menunjukkan perkembangan TPAK di Papua Barat selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat, bahwa rata-rata TPAK kabupaten di Papua Barat mengalami tren kenaikan pada tahun 2020-2023 (73,41 persen pada tahun 2020 menjadi 74,16 persen pada tahun 2023).

Tabel III.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten di Papua Barat Tahun 2020-2024 (%)

No.	Kabupaten	TPAK					TPT				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fakfak	68,66	71,53	63,29	64,82		11,45	7,90	6,75	6,52	6,28
2	Kaimana	74,68	75,65	77,43	64,64		6,90	3,23	3,34	3,24	4,96
3	Teluk Wondama	75,83	74,97	72,77	69,13		4,43	2,90	2,86	2,77	2,39
4	Teluk Bintuni	69,44	67,35	70,58	69,33		8,58	4,74	3,58	3,52	3,16
5	Manokwari	70,29	71,49	63,88	68,19		7,47	7,04	5,41	5,97	5,34
6	Manokwari Selatan	82,74	84,61	77,40	80,47		2,43	2,90	1,06	1,56	2,54
7	Pegunungan Arfak	95,37	94,71	93,75	94,49		1,62	0,70	0,12	0,15	0,31
Rata-rata		73,41	76,72	77,19	74,16		5,65	6,13	4,20	3,30	4,13

Sumber: Profil Papua Barat, 2024

3.2.7 Tingkat Ketimpangan

Pembangunan mengharuskan adanya tingkat pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pendapatan yang tinggi perlu didukung oleh indikator utama lainnya yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang timpang menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat meskipun hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika peningkatan pendapatan hanya melibatkan sebagian kecil orang kaya, maka penanggulangan kemiskinan akan bergerak melambat dan ketimpangan semakin tinggi

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel III.11, rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Barat termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Meskipun demikian, pada tahun 2019-2023 tren rasio gini Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua Barat. Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan rendah pada tahun 2023 di Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (skor: 0,358). Adapun wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kaimana (skor: 0,392) dan Kabupaten Manokwari (skor: 0,388).

Tabel III.11 Angka Gini Rasio menurut Kabupaten di Papua Barat

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Fakfak	0,390	0,397	0,347	0,330	0,359
2	Kaimana	0,402	0,407	0,413	0,425	0,392
3	Teluk Wondama	0,413	0,410	0,391	0,386	0,403
4	Teluk Bintuni	0,364	0,390	0,366	0,377	0,383
5	Manokwari	0,383	0,381	0,372	0,390	0,388
6	Manokwari Selatan	0,403	0,363	0,371	0,339	0,378
7	Pegunungan Arfak	0,294	0,329	0,309	0,365	0,358
Rata-Rata Kabupaten		0,386	0,382	0,383	0,370	0,380

Sumber: BPS Papua Barat, 2024 dalam Angka

<https://papuabarat.bps.go.id/indicator/23/171/1/rasio-gini-menurut-kabupaten-kota.html>

3.3 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi gabungan Papua Barat tahun 2025 masih telatif kuat, namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2024. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 terutama disebabkan terjadinya normalisasi produksi dari penambahan kapasitas LNG Tangguh yakni Train III Tangguh yang telah beproduksi secara optimal pada tahun 2024. Pertumbuhan tahunan di 2025 diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan ekspor yang kuat baik ekspor dalam negeri maupun ekspor luar negeri didukung oleh peningkatan produksi dan pengiriman LNG Papua Barat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan meningkat namun tidak setinggi pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pendapatan dan insentif seperti penundaan kenaikan PPN dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2024 diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan LU pertanian yang lebih tinggi dan pertumbuhan LU pertambangan, LU industri pengolahan, serta LU perdagangan yang masih kuat. Peningkatan LU pertanian didukung oleh kondisi cuaca yang baik seiring dengan prediksi La Nina lemah pada semester I 2025, peningkatan pupuk subsidi dan perbaikan harga komoditas. LU pertambangan dan LU industri pengolahan masih akan didorong oleh operasional LNG Tangguh yang meningkat. Sementara itu, LU perdagangan akan didukung peningkatan konsumsi dan implementasi program Asta Cita di daerah. Inflasi IHK Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 2025 diperkirakan terkendali berada pada rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Secara umum, inflasi akan didorong oleh inflasi volatile foods (bahan makanan bergejolak) yang diperkirakan akan cukup tinggi pada tahun 2025. Peningkatan inflasi volatile foods diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pangan, fluktuasi harga ikan laut segar dan gangguan produksi pangan.

Profil perekonomian Papua Barat tahun 2024 dari sisi pengeluaran didominasi oleh net ekspor barang dan jasa, yang terutama didorong oleh ekspor gas LNG. Kondisi ini sejalan dengan struktur perekonomian berdasarkan Lapangan Usaha (LU), di mana sektor Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memperkuat perekonomian Papua Barat secara lebih berimbang, diperlukan pengembangan sektor lain seperti pertanian dan perikanan. Pemanfaatan lahan kosong sebagai area pertanian dapat meningkatkan produksi komoditas unggulan dan memperluas basis sektor pertanian. Selain itu, potensi perikanan yang besar dari perairan Papua Barat dapat dioptimalkan antara lain melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan laut untuk mendorong nilai tambah ekonomi serta memperkuat daya saing daerah, pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk meningkatkan produksi dan ekspor hasil laut, serta pembangunan cold storage dan pelabuhan perikanan di kota-kota pesisir utama.

Berdasarkan kondisi perekonomian Papua Barat saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Papua Barat Tahun 2025 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel III-12

Tabel III.12 Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat 2025

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	Proyeksi 2025
1.	Inflasi	2,5% ± 1% (yoy)
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18 % - 3.75-4.06 %
3.	Kemiskinan	22,15% - 19.62-20.12%

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	Proyeksi 2025
4.	Gini Ratio	0,393 – 0,370-0,380%
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,80 – 5,60% (yoy)

Sumber : BI, Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat, 2025

3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

3.4.1 Proyeksi Keuangan Daerah

3.4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel III.13 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020–2024 realisasi total pendapatan Papua Barat berfluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp8.520.000.000.000,00 (delapan triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah). Pada tahun 2021, realisasi pendapatan menurun sebesar 41,05 persen menjadi Rp5.020.000.000.000,00 (lima triliun dua puluh miliar rupiah). Tahun 2022, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp7.760.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh miliar rupiah) atau naik sebesar 35 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan sebesar 94 persen, sehingga realisasi hanya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan pendapatan menjadi Rp4.490.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Secara keseluruhan periode 2020–2024, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Provinsi Papua Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat (lebih dari 90 persen), khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode tersebut mengalami penurunan rata-rata sebesar 40,75 persen per tahun. Pendapatan transfer menurun rata-rata sebesar 38,65 persen per tahun, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah justru tumbuh sebesar 12,53 persen per tahun. Penurunan PAD dan pendapatan transfer tersebut tak lepas dari pengaruh signifikan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Dalam masa pandemi tersebut terlihat bahwa perekonomian daerah, khususnya yang tercermin dari objek-objek PAD di Provinsi Papua Barat, tergolong belum cukup stabil. Selain itu, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 juga turut memberikan dampak terhadap penurunan dana transfer pusat ke daerah serta turunnya pendapatan asli daerah. Pada tahun 2022, pendapatan Papua Barat yang semula sebesar Rp7.760.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh miliar rupiah) turun menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 94 persen..

Tabel III.13 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	Pendapatan Daerah	8.519.362	5.021.760	7.764.413	4.008.159	4.492.227	-14,79
	Pendapatan Asli Daerah	485.366	380.500	620.304	511.261	405.013	- 4,42

No	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
	Pendapatan Transfer	8.033.764	4.639.900	7.138.641	3.495.244	4.086.014	- 15,55
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	232	1.360	5.468	1.653	1.200	50,80
2	Belanja Daerah	9.746.946	4.574.470	7.536.640	5.175.995	4.725.940	-16,55
	Belanja Operasi	3.344.080	1.934.290	3.409.369	2.323.800	2.276.237	-9,17
	Belanja Modal	1.543.171	987.140	2.198.754	1.042.962	722.519	-17,28
	Belanja Tidak Terduga	456.288	20.450	44.397	7.535	6.900	-64,93
	Belanja Transfer	4.403.407	1.632.590	1.884.121	1.801.699	1.720.285	-20,94
3	SURPLUS/DEFISIT	- 1.224.584	447.290	227.773	- 1.167.836	-233.713	-95,24
	Pembiayaan Daerah	3.053	1.823	1.111	1.333	365.196	230,72
	Penerimaan Pembiayaan	3.053	1.823	1.111	1.333	365.196	230,72
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	- 1.224.532	449.143	228.884	- 1.166.504	131.483	-102,68

Ket: * Laporan Keuangan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 (Unaudited)

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Tabel III.14 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
4. Pendapatan Daerah	8.519.362	5.021.760	7.764.413	4.008.159	4.492.227	-14,79%
4.1. Pendapatan Asli Daerah	485.366	380.500	620.304	511.261	405.013	- 4,42%
4.1.1. Pajak Daerah	339.806,65	295.080,00	514.170,15	444.286,46	272.218,92	43,56%
4.1.2. Retribusi Daerah	3.260,41	3.950,00	5.502.016,59	5.441.995,32	1.693,62	34,82%
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.603,37	32.700,00	32.424.194,31	31.551.453,51	37.152,98	24,78%
4.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	120.695,12	48.770,00	68.207.911,35	29.981.271,1	93.947,31	34,96%
4.2. Pendapatan Transfer	8.033.764	4.639.900	7.138.641	3.495.244	4.086.014,51	- 15,55%
4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.033.764,31	4.639.900,00	7.138.640,58	3.495.244,22	4.086.014,51	- 15,55%
4.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	232	1.360	5.468	1.653	1.199,76	50,80%

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
4.3.1. Pendapatan Hibah	232,00	1.360,00	5.468.007,10	1.653.451,00	1.199.76	-27.44%
4.3.2. Dana Darurat	-	-	-	-		
4.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-		

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang pada umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Untuk Papua Barat sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua Barat didominasi oleh besarnya kontribusi dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2,25 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua. Kedua komponen tambahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pendapatan transfer, sehingga secara umum Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan tranfer, Lain-lain pendapatan yang sah masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan dua sumber pendapatan lainnya yang berasal dari pendapatan hibah dari Pemda lainnya dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri. (Tabel III.13)

Gambar III.3 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Gambar III.3 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2020-2024. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah meski nilai kontribusinya terus mengalami penurunan. Terlihat bahwa terjadi sedikit penurunan kontribusi pendapatan transfer bagi total pendapatan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2020 pendapatan transfer adalah sebesar 94,30 persen dan menurun hingga mencapai 90,96 persen di tahun 2024. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah, dan terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap total pendapatan. Pada tahun 2020 kontribusi PAD

terhadap total pendapatan sebesar 5,70 persen lalu meningkat menjadi 9,02 persen ditahun 2024. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi dengan kisaran angka 0,01 hingga 0,08 persen.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan PAD Provinsi Papua Barat Selama periode 2020-2024 atau dalam lima tahun terakhir (Tabel III.15), realisasi pendapatan daerah yang berada di atas target yaitu tahun 2022, sedangkan tahun 2020, 2021 dan 2023 realisasi pendapatan dibawah target. Tahun 2020 realisasi pendapatan turun sebesar 6,59 persen sebesar 8,5 triliun dari target 9,12 triliun. Demikian juga pada tahun 2021 dan 2023 dimana terjadi penurunan pendapatan dari target yaitu sebesar 25,8 persen dan 20,88 persen. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat mengalami pengurangan sebagaimana yang terjadi selama dua tahun terakhir, sebagai konsekuensi dari pandemi yang telah berdampak negatif pada keuangan negara.

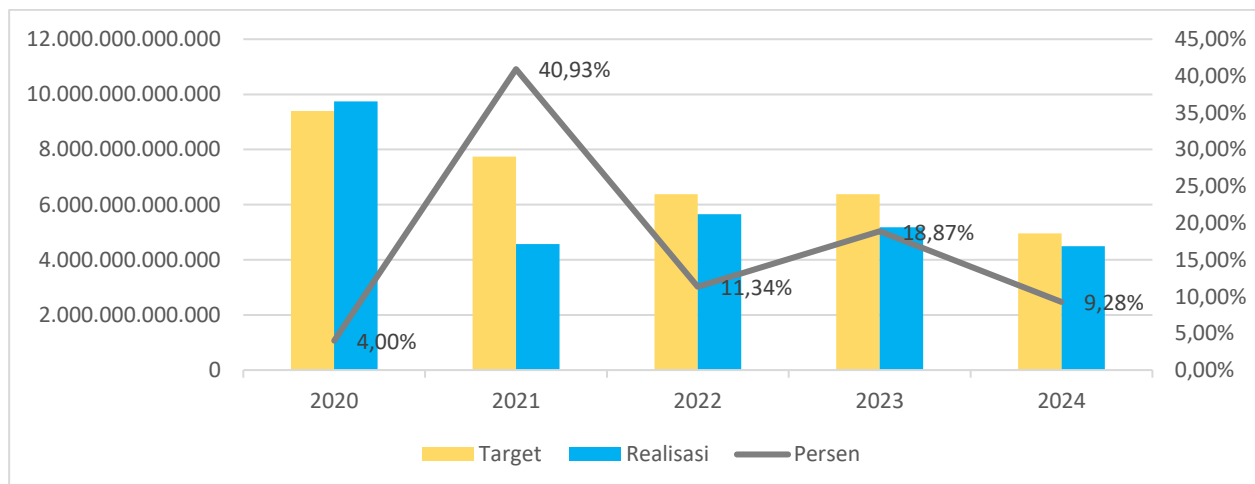
Besaran PAD dalam postur APBD merupakan indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, adanya kenaikan pada target PAD tersebut menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah daerah di Papua Barat untuk meningkatkan derajat kemandiriannya. Merujuk pada Tabel III.2 Komponen terbesar penyumbang pajak daerah pada PAD berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Rokok. Penurunan Pajak Daerah di Tahun 2020 dan 2021 disebabkan turunnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Rokok karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat efek dari adanya Pandemi Covid 19. Sedangkan kontribusi Pajak Air Permukaan tidak signifikan. Disamping pendapatan pajak, jenis pendapatan yang berasal dari retribusi seperti retribusi ijin Usaha Perikanan, retribusi Ijin Trayek dan retribusi Penjualan Produksi Jasa Usaha Daerah merupakan penyumbang terkecil komponen PAD yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Secara keseluruhan besarnya pendapatan pajak dan retribusi daerah tersebut merupakan hasil dari sektor migas, industri, perdagangan dan pariwisata yang menjadi unggulan Papua Barat. Sementara itu penerimaan lain-lain PAD yang sah Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan kontribusi kedua tertinggi setelah Pajak Daerah yang sebagian besar berasal dari hasil kerja sama daerah dengan pemda lainnya/pihak ketiga.

Tabel III.15 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSEN	SELISIH
2020	9.120.609.473.505,00	8.519.361.863.192,00	-6,59%	(601.247.610.313,00)
2021	6.711.780.735.373,00	5.021.760.000.000,00	-25,18%	(1.690.020.735.373,00)
2022	7.172.325.620.616,00	7.764.412.862.005,79	8,26%	592.087.241.389,79
2023	5.065.830.794.467	4.008.158.852.606,78	-20,88%	(1.057.671.941.860,22)
2024	4.951.911.688.695,78	4.492.227.105.667,07	-9,28%	(459.684.583.029)

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Gambar III.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

3.4.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, pengukuran kinerja dilakukan pula dari sisi realisasi belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan kelompok belanja modal terdiri atas jenis belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Adapun kelompok belanja transfer terdiri atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum dari tahun 2020 sampai tahun 2024, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat berfluktuasi. Tabel III.15 menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jumlah realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9.750.000.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). Kemudian pada tahun 2021, terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup signifikan menjadi Rp4.570.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus tujuh puluh miliar rupiah), dan meningkat menjadi Rp7.540.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah) pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi Rp5.180.000.000.000,00 (lima triliun seratus delapan puluh miliar rupiah). Selama periode 2020–2024, belanja daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar 19,76 persen atau Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) per tahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah, diketahui bahwa

alokasi belanja operasi dan belanja transfer memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis belanja lainnya.

Selama periode 2020–2024, belanja operasi rata-rata mengalami penurunan sebesar 25,01 persen atau Rp1.150.000.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar rupiah) per tahun, sementara belanja modal juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 30,78 persen atau Rp648.340.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) per tahun. Belanja tak terduga mengalami penurunan rata-rata sebesar 46,70 persen per tahun, sedangkan belanja transfer mengalami penurunan rata-rata sebesar 33,06 persen setiap tahunnya. Fluktuasi ini tidak lepas dari pengaruh penurunan signifikan masing-masing komponen belanja daerah pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, yang membuat pemerintah pusat dan daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja. Selain itu, terpisahnya Provinsi Papua Barat Daya dari Provinsi Papua Barat juga memberikan andil terhadap penurunan transfer pusat ke daerah yang berkorelasi dengan menurunnya belanja daerah.

Selama periode yang sama, pada pos belanja operasi, komponen belanja barang dan jasa merupakan alokasi dengan porsi terbesar. Namun, belanja barang dan jasa mengalami rata-rata penurunan per tahun paling tinggi, yaitu mencapai 34,36 persen. Sementara itu, pada pos belanja modal terjadi fluktuasi, namun secara rata-rata tetap mengalami penurunan sebesar 30,78 persen per tahun. Pada tahun 2020, belanja modal sebesar Rp1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah), lalu menurun hingga mencapai Rp987.140.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2021. Belanja transfer mengalami penurunan signifikan terutama pada tahun 2021, yaitu sebesar 62,92 persen, dari Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) pada tahun 2020 turun menjadi Rp1.630.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2021.

Sementara itu, pos belanja tak terduga pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp456.290.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp20.450.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Papua Barat dapat dilihat pada Tabel III.16.

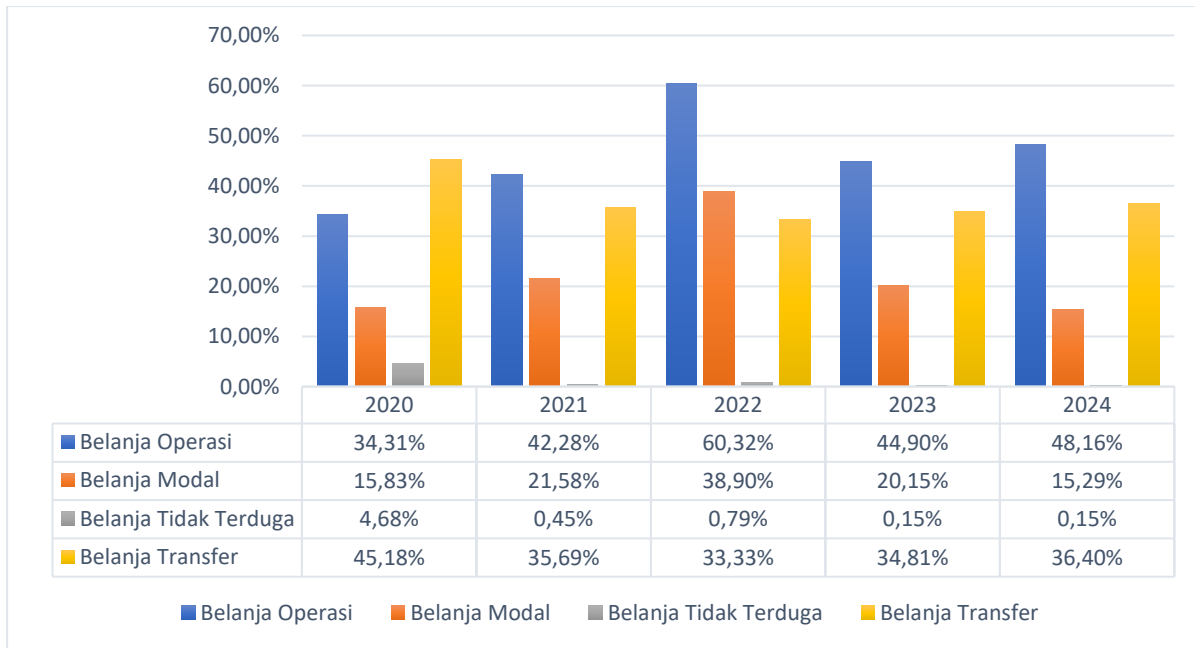
Tabel III.16 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
5. Belanja Daerah	9.746.946,23	4.574.470,00	7.536.640,00	5.175.995,00	4.725.940	- 16,55 %
51. Belanja Operasi	3.344.079,81	1.934.290,00	3.409.368,63	2.323.799,81	2.276.237,33	- 17,28 %
511. Belanja Pegawai	904.716,54	649.020,00	805.254,12	518.917,87	505.462,11	20,73 %
512. Belanja Barang dan Jasa	1.350.077,65	615.550,00	1.592.404,36	1.143.422,68	1.040.285,19	34,36 %
513. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
514. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
515. Belanja Hibah	1.047.338,11	634.440,00	979.542.133,51	657.079.790,45	726.297,20	27,71 %
516. Belanja Bantuan Sosial	41.947,51	35.280,00	32.168.023,43	4.379.469,80	4.192,83	53,6%
52. Belanja Modal	1.543.170,85	987.140,00	2.198.753,59	1.042.961,66	722.518,52	17,28 %
521. Belanja Modal Tanah	-	-	78.415.844,53	2.799.200,00	10.892,91	
522. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	156.578.703,84	144.553.117,53	60.367,11	
523. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	371.948.826,30	202.220.171,89	135.074,38	
524. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	1.582.081,79	691.609.472,59	516.058,58	
525. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	1.779.698,92	0,00	
526. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	9.728.426,24	0,00	125,54	
53. Belanja Tidak Terduga	456.288,45	20.450,00	44.396,79	7.535,00	6.899,81	- 64,93 %
531. Belanja Tidak Terduga	456.288,45	20.450,00	44.396,79	7.535,00	6.899,81	- 64,93 %
54. Belanja Transfer	4.403.407,12	1.632.590,00	1.884.120,99	1.801.698,53	1.720.284,51	- 20,94 %
541. Belanja Bagi Hasil	2.620.473,06	190.040,00	-	196.785.978,51	192.290,29	48,37 %
542. Belanja Bantuan Keuangan	1.782.934,05	1.442.550,00	-	21.554.461,28	1.527.994,23	15,17 %

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Gambar III.5 Komposisi Belanja Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024



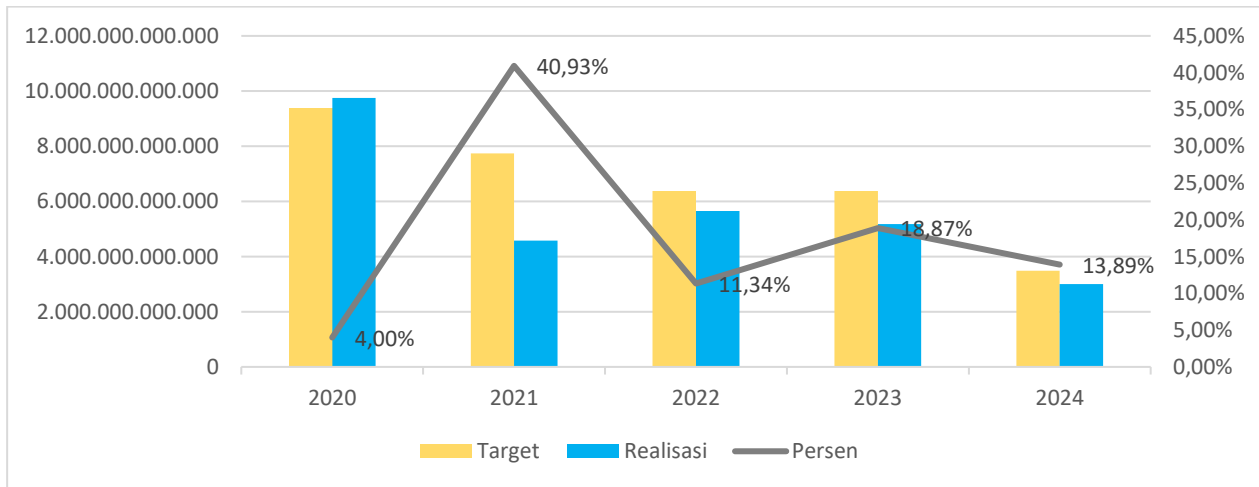
Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Selanjutnya apabila ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja operasi dan belanja transfer. Selama periode 2020 sampai 2024, peranan belanja operasi mencapai kisaran angka sebesar 34,31 persen sampai dengan 60,32 persen. Sementara itu, proporsi belanja transfer merupakan terbesar kedua dan mencapai kisaran angka 33,33 persen sampai dengan 45,18 persen. Belanja modal mengalami fluktuasi dengan nilai kontribusi berkisar dari 15,83 persen hingga 38,90 persen. Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan pada tahun 2020, menjadi sebesar 4,6 persen.

3.4.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2020-2024 rencana belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran di bawah 100 persen. Pada tahun 2020, capaian realisasi belanja melampaui target yang ditetapkan yaitu naik sebesar 7,41 persen dan 4,00 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi dibawah target belanja yang ditetapkan berturut-turut sebesar 40,93 persen, 11,34 persen, dan 18,87 persen. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam memulai kegiatan, yang diawali dengan terlambatnya penetapan APBD (paling cepat bulan maret), dan keterlambatan penetapan juknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, hingga terlambatnya penetapan pejabat struktural, pejabat perbendaharaan, hingga pengelola keuangan. Dapat dilihat pada Gambar III.6 dan Tabel III.16.

Gambar III.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024



Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSEN	SELISIH
2020	9.371.589.357.504	9.746.946.226.430	4,00%	375.356.868.926
2021	7.744.110.211.743	4.574.470.000.000	-40,93%	(3.169.640.211.743)
2022	6.375.985.370.466,00	5.652.519.018.430,39	-11,34%	(723.466.352.036)
2023	6.379.650.148.839	5.175.995.004.485,00	-18,87%	(1.203.655.144.354)
2024	3.490.305.008.202,20	3.005.655.662.500,96	-13,89%	(484,649,345,701)

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

3.4.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman

kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel III.18 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
6. Pembiayaan Daerah	3.052.79	1.852,95	1.111,05	1.332,65	365.196,22	230,72%
61. Penerimaan Pembiayaan	3.052.79	1.852,95	1.111,05	1.332,65	365.196,22	230,72%
611. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.052.79	1.852,95	1.111,05	1.332,65	365.196,22	230,72%
612. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-		
613. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-		
614. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
615. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
616. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-		
62. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-		
621. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-		
622. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-		
623. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-		
624. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		
625. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.224.531,58)	449.142,95	228.883,91	(1.166.503,50)	131.483,15	35,38%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Tabel III.18 menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Papua Barat sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

3.4.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi pemerintah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Provinsi Papua Barat pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah berfluktuasi seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020, nilai total aset daerah tercatat sebesar Rp16.280.000.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah). Pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp17.480.000.000.000,00 (tujuh belas triliun empat ratus delapan puluh miliar rupiah), kemudian pada tahun 2022 mencapai Rp18.020.000.000.000,00 (delapan belas triliun dua puluh miliar rupiah). Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp12.720.000.000.000,00 (dua belas triliun tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Tabel III.19 Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	1.825.275.124.813	1.101.469.065.973,08	1.317.710.569.851,50	(1.170.712.696.879,22)	290,840,039,290
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	33.218.658.397	0,00	725.341.073,92	4.018.622.400,00	2.338.267.111,00
Piutang Lainnya	23.657.194.065,24	13.839.714.693,24	5.779.905.619,00	14.003.140.081,76	21.701.259.167,76
Persediaan	1.564.329.523.719	1.824.168.739.618,18	1.964.593.537.433,53	2.056.407.660.268,16	1.998.862.121.582,51
Penyisihan Piutang	(7.782.519.313,24)	(9.774.521.327,74)	(9.701.408.758,24)	(10.202.777.578,76)	(10.598.387.649,86)
Beban Dibayar Dimuka	82.864.779.821	6.730.103.363,64	53.040.008.854,00	726.708.917,01	575.564.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.505.688.086.749	2.964.599.289.494,96	3.379.125.054.994,49	2.446.747.167.435,59	2.146.038.221.678,35
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	
Investasi Permanen	468.952.612.818	0,00	461.299.538.069,65	455.711.921.867,97	454.189.951.219,50
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	468.952.612.818	0,00	461.299.538.069,65	455.711.921.867,97	454.189.951.219,50
ASET TETAP					
Tanah	1.431.198.676.468	1.453.003.802.134,00	1.480.430.350.381,00	1.487.718.520.381,00	1.392.622.776.504,00
Peralatan dan Mesin	1.320.398.780.468	1.481.175.151.222,76	1.626.514.764.947,07	1.819.703.780.419,46	1.675.132.341.993,07
Gedung dan Bangunan	3.740.484.289.502	3.945.438.587.990,48	4.222.052.611.368,48	4.199.358.270.147,09	3.277.048.334.987,76
Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.686.249.253.970	9.071.315.188.269,09	10.228.397.147.714,02	11.150.279.473.515,10	11.214.094.721.638,10

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Tetap Lainnya	322.940.855.141	328.381.219.141,00	333.202.213.241,00	341.161.950.602,00	332.342.314.943,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	2.112.125.051.561	2.489.823.539.423,45	2.937.408.511.529,45	2.657.101.351.837,45	2.798.408.973.721,03
Akumulasi Penyusutan	(4.444.310.316.083)	(4.859.711.739.986,02)	(6.993.712.487.536,81)	(7.874.184.441.331,01)	(8.182.827.025.035,91)
JUMLAH ASET TETAP	12.169.086.591.027	13.909.425.748.194,80	18.022.575.583.990,53	13.781.138.905.571,10	12.506.822.438.751,10
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	13.176.840.663	14.504.780.045,00	140.722.599,00	32.678.180.559,00	32.770.992.559,00
Aset Lain-lain	127.439.197.134	127.439.197.134,18	325.009.364.638,18	583.418.016.510,18	447.329.644.468,18
JUMLAH ASET LAINNYA	140.616.037.797	141.943.977.179,18	347.857.879.282,18	616.096.197.069,18	480.100.637.027,18
JUMLAH ASET	16.284.343.328.392	17.483.465.957.334,50	18.022.575.583.990,53	17.299.694.191.943,80	15.587.151.248.676,10
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	69.315.257	0,00	140.722.599,00	56.696.519,00	
Utang Bunga		0,00	0,00	0,00	
Utang Pajak		0,00	0,00	0,00	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	24.343.190.000	22.300.000.000,00	0,00	6.113.268.600,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	628.283.333	350.046.400,00	332.558.972,00	586.196.782,00	470.043.661,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.850.187.829	0,00	21.074.700,00	21.074.700,00	-
Utang Beban	-	-	-	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-
Utang Belanja	441.833.357.261	58.891.372.249,00	88.102.049.152,00	94.397.090.369,00	1.208.307.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	472.724.333.680	81.541.418.649,00	88.596.405.423,00	101.117.630.451,00	1.678.350.661,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	-	-	154.141.681.676,00	-	-
Utang Luar Negeri	196.511.131.893	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	196.511.131.893	180.066.884.189,00	154.141.681.676,00	146.028.413.076,00	157.306.283.269,00
JUMLAH KEWAJIBAN	669.235.465.573	261.608.302.838,00	242.738.087.099,00	247.146.043.527,00	158.984.633.930,00
EKUITAS DANA		17.221.857.654.496,50	17.779.848.374.209,57	17.052.548.148.416,80	15.428.166.614.746,10
EKUITAS DANA LANCAR					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang	15.615.107.862.819				

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Cadangan untuk Persediaan					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek					
Pendapatan yang Ditangguhkan					
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR					
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang					
JUMLAH EKUITAS DANA	15.615.107.862,819	17.221.857.654.496,50	17.779.848.374.209,57	17.052.548.148.416,80	15.428.166.614.746,10

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu lima tahun (2020–2024) rata-rata mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah kewajiban daerah tercatat sebesar Rp669.230.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian turun signifikan menjadi Rp261.610.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2021, dan menurun secara gradual hingga mencapai Rp1.558.980.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2024.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2020–2024, nilai ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat cukup berfluktuasi. Ekuitas pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp15.610.000.000.000,00 (lima belas triliun enam ratus sepuluh miliar rupiah), meningkat menjadi lebih dari Rp17.000.000.000.000,00 (tujuh belas triliun rupiah) selama periode 2021–2023, kemudian kembali menurun menjadi Rp15.430.000.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2024.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok atau elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu, selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan perhitungan, rasio lancar neraca keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendek. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahapan untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga dihitung sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun, apabila diperhatikan, nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel III.20 Analisis Rasio Neraca Daerah Provinsi Papua Barat, 2020-2024

NO.	RUMUS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Likuiditas					
1.1	Rasio Lancar	7,42	36,36	38,14	24,20	1278,66
1.1.1	Aset Lancar	3.505.688.086.749	2.964.599.289.494,96	3.379.125.054.994,49	2.446.747.167.435,59	2.146.038.221.678,35
1.1.2	Kewajiban Jangka Pendek	472.724.333.680	81.541.418.649,00	88.596.405.423,00	101.117.630.451,00	1.678.350.661,00
1.2	Quick Ratio	4,11	13,99	15,97	3,86	87,69
1.2.1	Persediaan	1.564.329.523.719	1.824.168.739.618,18	1.964.593.537.433,53	2.056.407.660.268,16	1.998.862.121.582,51
2.	Rasio Solvabilitas					
2.1	Rasio total hutang terhadap total aset (%)	4,11%	1,50%	1,35%	1,43%	1,02%
2.1.1	Total Hutang	669.235.465.573	261.608.302.838,00	242.738.087.099,00	247.146.043.527,00	158.984.633.930,00
2.1.2	Total Aset	16.284.343.328.392	17.483.465.957.334,50	18.022.575.583.990,53	17.299.694.191.943,80	15.587.151.248.676,10
2.2	Rasio hutang terhadap modal	4,29%	1,52%	1,37%	1,45%	1,03%
2.2.1	Total Ekuitas	15.615.107.862.819	17.221.857.654.496,50	17.779.848.374.209,57	17.052.548.148.416,80	15.428.166.614.746,10

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

3.4.3 Realisasi Anggaran yang Berasal dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur menurut SKPD

Sampai dengan berakhirnya semester I 2025, realisasi anggaran yang berasal dari dari dana Otsus secara rata-rata baru mencapai 25 persen. Rendahnya penyerapan anggaran ini terutama disebabkan oleh keterlambatan dalam perbaikan/pemenuhan kelengkapan usulan-usulan kegiatan yang menggunakan dana Otsus. Dari tiga sumber dana Otsus, realisasi tertinggi adalah pada alokasi dana yang bersifat umum (1% DAU) yaitu sebesar 43 persen. Sementara itu, realisasi dua sumber dana Otsus lainnya masih sangat rendah, alokasi dana yang telah ditentukan penggunaannya (1,25% DAU) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) masing-masing sebesar 17 persen dan 14 persen.

Dalam periode pelaksanaan perubahan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggenjot realisasi anggaran yang berasal dari Dana Otsus, mengingat belanja-belanja pada sektor ini banyak bersentuhan langsung dengan urusan wajib pelayanan dasar dan pemberdayaan orang asli Papua. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini tentunya juga tetap memperhatikan asas kepatuhan terhadap penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Data realisasi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Otonomi Khusus disajikan dalam Tabel III.21

Tabel III.21 Daftar Alokasi Dan Realisasi Dana Otsus Dan Dti Sampai Dengan Semester I Di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat
Tahun Anggaran 2025 (Rp Juta)

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	%
1	2	3	4	5 =3-4	6=4/3	7	8	9=7-8	10=8/7	11	12	13=11-12	14=12/11
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,250	-	5,250	-	-	-	-	-	246,185	43,421	202,763	0.18
2	Dinas Sosial	1,230	283	947	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	766	500	267	0.65	12,827	672	12,155	5.24	-	-	-	-
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,378	80	1,298	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Ketahanan Pangan	4,069	413	3,656	0.10	712	-	712	-	-	-	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	9,918	256	9,662	0.03
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,974	-	1,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1,606	-	1,606	-	1,938	-	1,938	-	152	-	152	-
9	Dinas Koperasi Dan UKM	-	-	-	-	10,151	2,501	7,650	24.64	-	-	-	-
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,495	454	1,040	0.30	3,800	-	3,800	-	-	-	-	-
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	124	-	124	-	315	106	209	33.65	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	604	-	604	-	9,066	-	9,066	-	-	-	-	-
13	Biro Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	89,777	39,812	49,965	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus (SETDA)	848	-	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Badan Kepegawaian Daerah	1,768	269	1,498	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,427	10,724	703	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat	26,354	11,839	14,515	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	584	86	499	0.15	5,983	210	5,774	3.51	-	-	-	-
19	Dinas Kehutanan	-	-	-	-	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-
20	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	49,655	10,343	39,312	20.83	-	-	-	-
21	BLUD RSUD	-	-	-	-	2,500	1,397	1,103	55.88	-	-	-	-
22	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	69,832	15,690	54,143	22.47	-	-	-	-
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	1,476	-	1,476	-	-	-	-	-
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	4,920	1,364	3,556	27.73	-	-	-	-
25	Dinas Tanaman Pangan,	-	-	-	-	13,957	-	13,957	-	-	-	-	-

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGUNAAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
	Hortikultura dan Perkebunan												
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	42,884	4,736	38,148	0.11
27	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	44,969	470	44,499	0.01
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	5,312	238	5,075	0.04
	J u m l a h	149,255	64,460	84,795	0.43	188,332	32,282	156,050	0.17	349,420	49,121	300,299	0.14

3.5 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah dapat tergambar dari APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pada sub bab ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.5.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran memiliki tujuan mendapatkan gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Papua Barat pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan belanja di masa mendatang. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2019-2023 (1).

Tabel III.22 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019-2023

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP JUTA)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP JUTA)	PERSENTASE
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2019	847.781.618.060	9.369.298.181.082,14	9,05%
2020	904.716.537.784	9.746.946.226.430,00	9,28%
2021	649.020.000.000	4.574.470.000.000,00	14,19%
2022	805.254.120.293,17	5.652.519.018.430,39	14,25%
2023	518.917.870.396,00	5.175.995.004.485,00	10,03%
Rata-rata	745.138.029.307	6.903.845.686.085,51	11,36%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2019-2023

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja untuk pembangunan dan semakin kecilnya Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Belanja Aparatur merupakan pengeluaran wajib dan mengikat yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi selama periode

2019-2023 segi nominal namun dari segi proporsinya terhadap total pengeluaran cenderung mengalami peningkatan, meski sempat sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan, meski sempat sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp847.790.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). Pada tahun 2020, nominal belanja aparatur meningkat menjadi Rp904.710.000.000,00 (sembilan ratus empat miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Pada tahun 2021, belanja aparatur mengalami penurunan menjadi Rp649.020.000.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh juta rupiah). Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp805.255.000.000,00 (delapan ratus lima miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian menurun kembali menjadi Rp518.920.000.000,00 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2023.

Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2019, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 9,05 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan hingga mencapai 14,25 persen pada tahun 2022. Secara keseluruhan, rata-rata proporsi belanja aparatur selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 11,36 persen terhadap total pengeluaran pemerintah.

3.5.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2) pengeluaran pembiayaan.

Tabel III.23 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2020-2024 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	8.519.361,86	5.021.760,00	7.764.412,86	4.008.158,852	4.492.227,11
2	Belanja Daerah	9.746.946,23	4.574.470,00	5.652.519,02	5.175.995,00	4.725.940,18
	Surplus/Defisit	-1.227.584,36	447.290,00	227.772,85	-1.167.836,15	-233.713,07
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.052,79	1.825,29	1.111,05	1.332,65	365.196,22
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	3.052,79	1.825,29	1.111,05	1.332,65	365.196,22
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-1.224.531,58	449.142,95	228.883,91	-1.166.503,50	131.483,15

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

Tabel III.24 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat, 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
6. Pembiayaan Daerah	3.052.790.000,00	1.852.948.000,00	1.111.046.507,58	1.332.649.000,00	365.196.218.877,83	230,72%
61. Penerimaan Pembiayaan	3.052.790.000,00	1.852.948.000,00	1.111.046.507,58	1.332.649.000,00	365.196.218.877,83	230,72%
611. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.052.790.000,00	1.852.948.000,00	1.111.046.507,58	1.332.649.000,00	365.196.218.877,83	230,72%
62. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-
621. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
622. Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-
623. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
625. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	-	-	-

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R
Perundang-Undangan						
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1,224,531,580,000.00)	449,142,948,000.00	228,883,912,863.58	(1,166,503,500,000.00)	131,483,147,166.94	-102.68%

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel III.24, terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2020–2024 terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pembiayaan netto Pemerintah Provinsi Papua Barat tercatat sebesar Rp3.052.000.000.000,00 (tiga triliun lima puluh dua miliar rupiah). Pada tahun 2021, pembiayaan netto mengalami penurunan menjadi Rp1.825.200.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah). Penurunan signifikan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan nilai pembiayaan netto sebesar Rp1.111.000.000.000,00 (satu triliun seratus sebelas miliar rupiah).

Selanjutnya, pada tahun 2023 pembiayaan netto kembali meningkat menjadi Rp1.330.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar rupiah). Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai pembiayaan netto tercatat sebesar Rp131.480.000.000.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun empat ratus delapan puluh miliar rupiah).

3.5.2.1 Defisit Riil Anggaran

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua Barat selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel III.25.

Tabel III.25 Surplus/Defisit Riil APBD Papua Barat, 2020-2024 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	8.519.361,86	5.021.760,00	7.764.412,86	4.008.158,85	4.492.227,11
	Dikurangi:					
2.	Realisasi Belanja Daerah	9.746.946,23	4.574.470,00	7.536.640,00	5.175.995,00	4.725.940,18
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
	Surplus/Defisit Riil	1.227.584,37	447.290,00	227.772,87	1.167.836,15	-233.713,07

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

3.5.2.2 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, mengatur bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari : (a.) SiLPA; (b). pencairan Dana Cadangan; (c). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d.) penerimaan Pinjaman Daerah; (e). penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (f). penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah di luar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Papua Barat Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.26.

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA	RP (JUTA)	% DARI SILPA
Pembiayaan Neto	3.052.790,17	100,00%	1.825.210,00	100,00%	1.111.046.507.575,64	100,00%	(1,166,503,500,000.00)	100%	131.483,15	100%
Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-						

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

Merujuk kepada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa penyebab terjadinya SiLPA dapat bersumber dari : (a) Pelampauan Penerimaan PAD, (b) Pelampaun Penerimaan Pendapatan Transfer, (c) Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sert (d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan, (e)Penghematan Belanja, (f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum terselesaikan, (g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

3.5.2.4 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

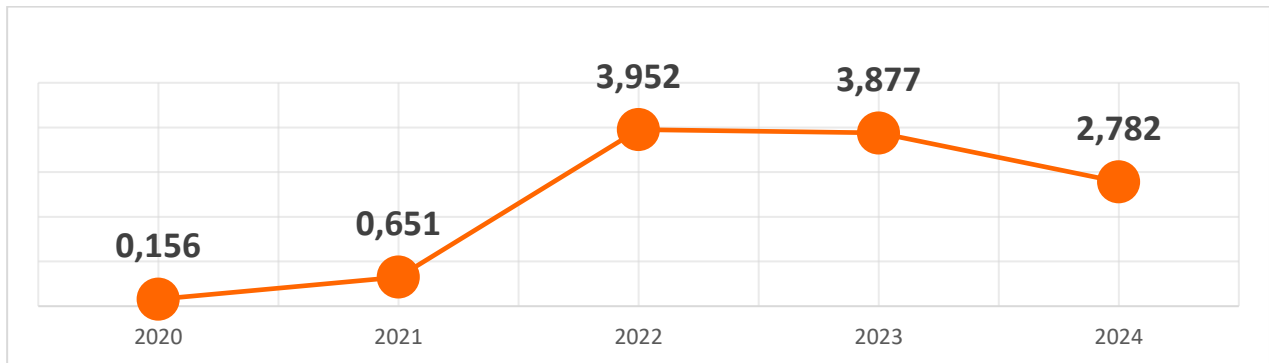
$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + OTSUS + TRANSFER PROV + LP) - BP}{JUMLAH PENDUDUK MISKIN}$$

Keterangan:

K	=	Kapasitas Fiskal	TRANSFER	=	Transfer Pemerintah Provinsi ke
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah	PROV	=	Kabupaten /Kota (bernilai positif
DBH	=	Dana Bagi Hasil		=	untuk Kabupaten /Kota dan ber
				=	nilai negatif untuk Provinsi)
DAU	=	Dana Alokasi Umum	LP	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang
				=	Sah
OTSUS	=	Dana Otonomi Khusus	BP	=	Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berangkat dari kategori sangat rendah (0,156) pada tahun 2020, meningkat menjadi kategori sedang (0,651) pada tahun 2021, dan sangat tinggi pada 3 tahun terakhir.

Gambar III.7 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Papua Barat



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan, 2020-2024

3.5.2.5 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya dapat mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun 2020 sebesar 0,87, pada tahun 2021, kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan hingga sebesar 1,10 dan 1,03 di Tahun 2022. Namun terjadi ketidakmampuan mendanai belanja daerah tahun 2023 dengan rasio belanja 0,77.

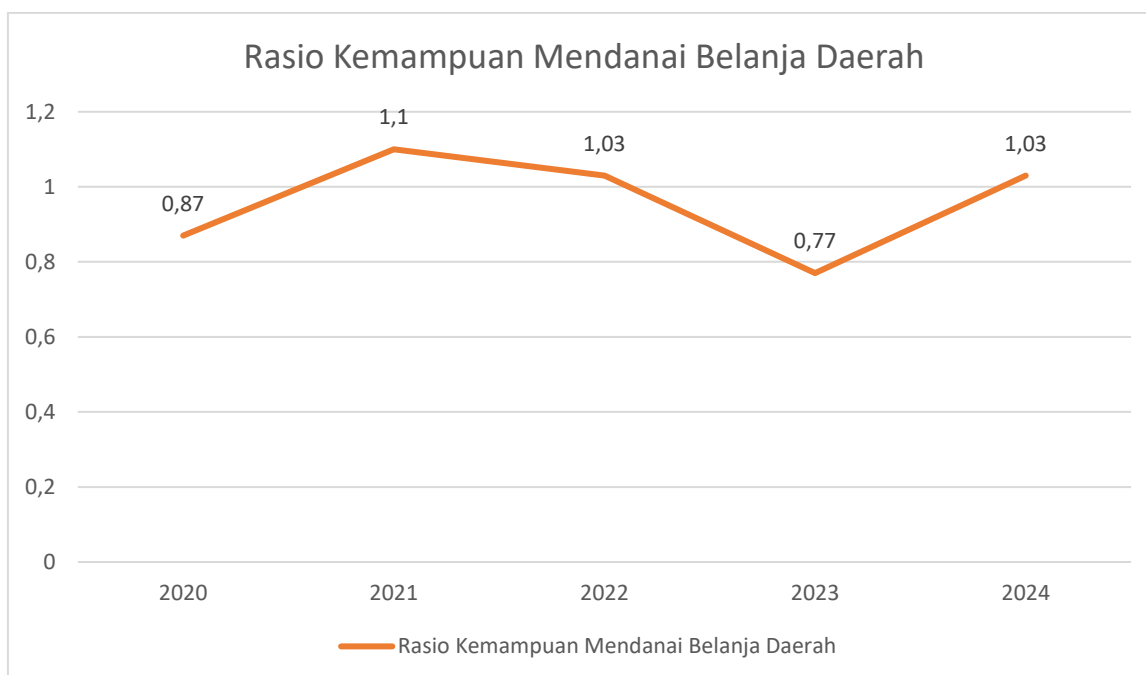
Berdasarkan data di atas, masih diperlukan upaya untuk mencari sumber penerimaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel III.28 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
Provinsi Papua Barat (Rp Juta)

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENGELUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
2020	8,519,361.86	3,052.79	8,522,414.65	9,746,946.23	-	9,746,946.23	0.87
2021	5,021,760.00	1,852.95	5,023,612.95	4,574,470.00	-	4,574,470.00	1.10
2022	7,764,412.86	1,111.05	7,765,523.91	7,536,640.00	-	7,536,640.00	1.03
2023	4,008,158.85	1,332.65	4,009,491.50	5,175,995.00	-	5,175,995.00	0.77
2024	4,492,227.11	365,196.22	4,857,423.32	4,725,940.18	5,000.00	4,730,940.18	1.03

Sumber: Data realisasi APBD Papua Barat, 2020-2024 (diolah)

Gambar III.8 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Provinsi Papua Barat 2020-2024



Sumber: BPKAD Papua Barat (diolah)

3.6 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan adanya kebijakan pemekaran Provinsi Papua Papua Barat Daya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 22 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap proyeksi dan kerangka pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2024. Proyeksi dan kerangka pendanaan daerah Provinsi Papua Barat tersebut dihitung berdasarkan justifikasi objektif terhadap pos-pos pendapatan daerah setelah adanya pemisahan dengan daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

3.6.1 Arah Kebijakan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Kondisi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 akan berjalan sangat dinamis sesuai dengan pergerakan ekonomi nasional dan regional. Pemberlakuan beberapa regulasi terbaru akan memberi warna terhadap pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua beserta beberapa Peraturan Pemerintah turunannya, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta yang terbaru Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Merespon kondisi tersebut, Arah dan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah selanjutnya akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

3.6.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 adalah:

1. Konsolidasi kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pasca berlakunya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya;
2. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pemungut pajak dan petribusi Daerah;

4. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Menginisiasi sumber pendapatan daerah dari Penyertaan modal pada BUMD yang sudah ada seperti Bank Papua serta perusahaan BUMD baru yang layak secara ekonomis dan punya prospek profitabilitas;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan daerah
10. Meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi regulasi pengajuan usulan dana tranfer dari Pusat dan Dana Otonomi Khusus;
11. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua dikelola secara efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD
12. Dana otonomi Khusus terutama diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP dan mengikat untuk dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
13. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus terutama dialokasikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan;
14. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;

3.6.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 adalah:

1. Konsolidasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pasca terbentuknya daerah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya;
2. Mendisain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien dan efektif ;
3. Penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
4. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah

- mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
6. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
 7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a. Belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun
 - b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undan
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal
 9. Penerimaan daerah terkait dengan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua berupa selisih antara 70% bagian Daerah sebagai DBH dalam rangka Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - a. 35% untuk belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - b. 25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - c. 30% untuk belanja infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - d. 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 10. Pengalokasian belanja yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan peraturan perundangan, yang antara lain diarahkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik;
 - b. Penggunaan dana otonomi khusus yang bersifat umum, antara lain untuk:
 - Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik.
 - Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat.
 - Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penggunaan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan:
 - Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan.
 - Paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat
11. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus dialokasikan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

3.6.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 adalah:

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
4. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6.2 Proyeksi Pendapatan

Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah

diharapkan mampu membiayai keuangannya secara mandiri. Hal ini merupakan salah satu indikator penunjang turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui upaya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah memiliki dana yang signifikan dalam rangka belanja dan pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kondisi normal, proyeksi pendapatan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tahun 2025. Dengan asumsi perekonomian telah berhasil pulih dari masa pandemi Covid-19 dan adanya lonjakan kenaikan harga komoditas di pasar internasional maka akan memberikan keuntungan bagi Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya minyak dan gas bumi. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yang cukup berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Asumsi ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan proyeksi pertumbuhan pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Papua Barat. Tabel berikut menggambarkan proyeksi keuangan daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2026-2030. Proyeksi keuangan daerah meliputi: proyeksi Pendapatan Daerah, proyeksi Belanja Daerah, dan proyeksi Pembiayaan Daerah.

Tabel III.29 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026-2030 (Rp juta)

URAIAN	Baseline Tahun 2025*	Proyeksi 2026-2030					Rata-Rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN DAERAH	3,237,488	3,340,764	3,447,334	3,557,304	3,670,782	3,787,880	3,19%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	334,906	345,589	356,614	367,989	379,728	391,842	3.19%
Pajak Daerah	229,327	236,643	244,192	251,982	260,020	268,314	3.19%
Retribusi Daerah	11,039	11,391	11,755	12,130	12,517	12,916	3.19%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,153	38,338	39,561	40,823	42,125	43,469	3.19%
Lain-lain PAD yang Sah	57,386	59,217	61,106	63,055	65,066	67,142	3.19%
PENDAPATAN TRANSFER	2,901,646	2,994,209	3,089,724	3,188,286	3,289,992	3,394,943	3.19%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,901,646	2,994,209	3,089,724	3,188,286	3,289,992	3,394,943	3.19%
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1,981,366	2,044,572	2,109,794	2,177,096	2,246,546	2,318,210	3.19%
Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	149,255	154,016	158,929	163,999	169,231	174,629	3.19%
DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua	118,514	122,295	126,196	130,222	134,376	138,663	3.19%
DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua	1,175,845	1,213,355	1,252,061	1,292,001	1,333,216	1,375,746	3.19%
Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	188,332	194,340	200,540	206,937	213,538	220,350	3.19%
DTI-Papua	349,420	360,566	372,068	383,937	396,185	408,823	3.19%
Dana Bagi Hasil (DBH)	430,843	444,586	458,769	473,403	488,505	504,088	3.19%
DBH Pajak	264,578	273,018	281,727	290,714	299,988	309,558	3.19%
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	165,167	170,436	175,872	181,483	187,272	193,246	3.19%
DBH Lainnya	1,098	1,133	1,169	1,207	1,245	1,285	3.19%
Dana Alokasi Umum (DAU)	477,490	492,722	508,440	524,659	541,396	558,667	3.19%
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	454,621	469,124	484,089	499,531	515,466	531,909	3.19%
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	22,869	23,599	24,352	25,128	25,930	26,757	3.19%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	11,947	12,328	12,721	13,127	13,546	13,978	3.19%
DAK Fisik	2,351	2,426	2,504	2,584	2,666	2,751	3.19%
DAK Non Fisik	9,596	9,902	10,218	10,543	10,880	11,227	3.19%

URAIAN	Baseline Tahun 2025*	Proyeksi 2026-2030					Rata-Rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936	966	997	1,029	1,062	1,095	3.19%
Pendapatan Hibah	936	966	997	1,029	1,062	1,095	3.19%
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	936	966	997	1,029	1,062	1,095	3.19%
BELANJA DAERAH	3,489,599	3,586,610	3,686,318	3,788,798	3,894,126	4,002,383	2,78%
BELANJA OPERASI	1,934,356	1,983,488	2,033,869	2,085,529	2,138,502	2,192,820	2,54%
Belanja Pegawai	868,490	883,949	899,683	915,698	931,997	948,587	1,78%
Belanja Barang dan Jasa	800,771	826,316	852,675	879,876	907,944	936,907	3.19%
Belanja Hibah	261,322	269,658	278,260	287,137	296,297	305,749	3.19%
Belanja Bantuan Sosial	3,773	3,893	4,017	4,145	4,277	4,414	3.19%
BELANJA MODAL	497,055	509,879	523,034	536,528	550,371	564,570	2,58%
Belanja Modal Tanah	9,400	9,700	10,009	10,329	10,658	10,998	3.19%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,063	45,468	46,919	48,416	49,960	51,554	3.19%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52,767	54,139	55,546	56,991	58,472	59,993	2.60%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	388,825	398,313	408,031	417,987	428,186	438,634	2.44%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,000	2,064	2,130	2,198	2,268	2,340	3.19%
BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000	30,957	31,945	32,964	34,015	35,100	3.19%
Belanja Tidak Terduga	30,000	30,957	31,945	32,964	34,015	35,100	3.19%
BELANJA TRANSFER	1,028,189	1,060,988	1,094,833	1,129,758	1,165,798	1,202,987	3.19%
Belanja Bagi Hasil	126,808	130,854	135,028	139,335	143,780	148,367	3.19%
Belanja Bantuan Keuangan	901,380	930,134	959,806	990,423	1,022,018	1,054,620	3.19%
Total Surplus/(Defisit)	(252,111)	(250,170)	(248,244)	(246,332)	(244,436)	(242,553)	-0,77%
PEMBIAYAAN DAERAH	(52,111)	(53,774)	(55,489)	(57,259)	(59,086)	(60,971)	3.19%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,000	103,190	106,482	109,879	113,384	117,001	3.19%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100,000	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	(152,111)	(156,964)	(161,971)	(167,138)	(172,469)	(177,971)	3.19%

3.6.3 Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan daerah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua berupa selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian Daerah sebagai DBH dalam rangka Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - a. 35 persen untuk belanja pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - b. 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - c. 30 persen untuk belanja infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
 - d. 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dengan prioritas OAP pada daerah penghasil dan terdampak;
2. Dana Otonomi Khusus Papua yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum yang merupakan dana. yang bersifat umum setara dengan 1 % (satu) persen, yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - Pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik
 - peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
 - Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan yang merupakan dana yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima) persen dari plafon DAU nasional, yang pengalokasiannya diatur sebagai berikut:
 - Paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan
 - paling sedikit 20 persen untuk belanja kesehatan dan
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah pusat dengan Dewan perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran, dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya serta juga memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sedangkan pengalokasian DTI, antara lain untuk:
 - a. Pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan
 - b. Energi listrik
 - c. air bersih
 - d. Telekomunikasi, dan
 - e. Sanitasi lingkungan

NO	NAMA OPD	ALOKASI DANA YG BERSIFAT UMUM (1%)				ALOKASI DANA YG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANYA (1,25%)				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)			
17	Sekretariat MRPProvinsi Papua Barat	26,354	11,839	14,515	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	584	86	499	0.15	5,983	210	5,774	3.51	-	-	-	-
19	Dinas Kehutanan	-	-	-	-	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-
20	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	49,655	10,343	39,312	20.83	-	-	-	-
21	BLUD RSUD	-	-	-	-	2,500	1,397	1,103	55.88	-	-	-	-
22	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	69,832	15,690	54,143	22.47	-	-	-	-
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	1,476	-	1,476	-	-	-	-	-
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	4,920	1,364	3,556	27.73	-	-	-	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	13,957	-	13,957	-	-	-	-	-
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	42,884	4,736	38,148	0.11
27	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	44,969	470	44,499	0.01
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	5,312	238	5,075	0.04
	J u m l a h	149,255	64,460	84,795	0.43	188,332	32,282	156,050	0.17	349,420	49,121	300,299	0.14

Secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana bagi hasil sumber daya alam akan ditransfer ke kabupaten penghasil dan kabupaten yang terdampak dengan sumber dana bagi hasil sumber daya alam migas tersebut. Selanjutnya sisa bagian dana yang dikelola oleh Pemerintah provinsi Papua Barat dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan prosentase yang ditentukan oleh peraturan perundangan terkait.

Tabel III.31 Kerangka Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua Barat Tahun 2024-2025

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Dana Otsus 1% Plafon DAU		
1.a	Proyeksi Penerimaan	145.665.423.000	148.578.731.460
1.b	Indikasi Belanja	145.665.423.000	148.578.731.460
	Belanja Administrasi Pemerintahan	104.726.201.155	106.820.725.178
	Belanja Keagamaan	25.773.310.933	26.288.777.252
	Belanja Sosial	10.448.407.165	10.657.375.308
	Belanja Kebudayaan	2.249.999.697	2.294.999.691
	Belanja Kepemudaan dan Olahraga	2.050.000.000	2.091.000.000
	Pendidikan	417.504.050	425.854.131
2	Dana Otsus 1,25% Plafon DAU		
2.a	Proyeksi Penerimaan	189.012.577.000	192.792.828.540
2.b	Indikasi Belanja	189.012.577.000	192.792.828.540
	Pendidikan	104.945.046.061	107.043.946.982
	Kesehatan	37.802.515.400	38.558.565.708
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	46.264.915.539	47.190.213.850

Sumber : BPKAD Papua Barat, diolah

Tabel III.30 menunjukkan kerangka pengalokasian dana otonomi khusus Papua Barat yang merupakan 2,25 persen dari plafon DAU nasional. dana otsus yang merupakan 1 persen dari plafon DAU dialokasikan untuk membiayai belanja administrasi pemerintahan (peningkatan kapasitas aparatur, penyelenggaraan pendataan, advokasi perempuan dan anak, pangan dan gizi, dan pelaksanaan hak MRP), belanja keagamaan, belanja sosial, belanja kebudayaan, belanja Pendidikan dan belanja kepemudaan dan olahraga sedangkan dana otsus yang merupakan 1,25 persen dari plafon DAU nasional dialokasikan pada belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel III.32 Kerangka Pengalokasian Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus Tahun 2024-2025

No	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1	Proyeksi Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	509.212.822.000	519.397.078.440
2	Indikasi Belanja DTI	509.212.822.000	519.397.078.440
	Belanja infrastruktur perhubungan	422.103.552.799	430.545.623.855
	Belanja energi listrik	15.276.384.541	15.581.912.232
	Belanja air bersih	47.256.500.000	48.201.630.000
	Belanja Telekomunikasi	15.276.384.660	15.581.912.353
	Belanja sanitasi lingkungan	9.300.000.000	9.486.000.000

Sumber: BPKAD Papua Barat, diolah

Tabel III.32 menunjukkan proyeksi penerimaan dan pengalokasian dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua selama periode tahun 2024-2025. Penerimaan DTI pada alokasi tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, yang dialokasikan untuk membiayai belanja infrastruktur perhubungan, belanja infrastruktur energi

listrik, belanja infrastruktur air bersih, belanja infrastruktur telekomunikasi dan belanja infrastruktur sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait.

BAB IV

SASASAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dilakukan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Tahun 2026 yang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang di peroleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 pada tahun pertama.

4.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial

Tujuan satu memiliki empat sasaran, yaitu:

- S1. Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan
- S2. Menurunnya angka prevalensi stunting
- S3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan

S4. Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, serta perlindungan jaminan sosial yang adaptif

4.1.2 Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global

Tujuan 2 memiliki tujuh sasaran, yaitu:

- S5. Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan
- S6. Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis wisata lokal
- S7. Terwujudnya Percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA dan PMDN
- S8. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, serta sektor pertambangan dalam perekonomian
- S9. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif
- S10. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif
- S11. Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat dan kampung

4.1.3 Tujuan 3: Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah

Tujuan 3 memiliki tiga sasaran, yaitu:

- S12. Meningkatnya pengembangan pangan lokal
- S13. Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan
- S14. Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat

4.1.4 Tujuan 4: Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif

Tujuan empat memiliki tiga sasaran, yaitu:

- S15. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur dasar dan teknologi informasi komunikasi, serta kualitas penataan ruang daerah
- S16. Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan
- S17. Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4.1.5 Tujuan 5: Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah

Tujuan lima memiliki tiga sasaran, yaitu:

- S18. Meningkatnya kententraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat
- S19. Peningkatan resiliensi Bencana dan perubahan iklim
- S20. Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat

4.1.6 Tujuan 6: Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik

Tujuan enam memiliki dua sasaran, yaitu:

- S21. Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta inovasi daerah
- S22. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan

4.1.7 Tujuan 7: Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP

Tujuan enam memiliki tiga sasaran, yaitu:

S23. Meningkatkan akses Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan OAP

S24. Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat

Tabel IV.1 Matrix Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target		
				2026	2029	
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial					
T1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat & Berketahanan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.69	69.38	71.06
S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	68.47	69.79	70.81
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	N.A	0.6	0.9
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	Persentase	14.29	28.57	71.43
S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting)%	Persentase	24.6	20.6	14.6
S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	Tahun	7.86	08.04	8.31
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	Tahun	13.17	13.19	13.22
		Skor Kemampuan Literasi SDLB	Skor	0	79.78	84.58
		Skor Kemampuan Literasi SMPLB	Skor	65.33	66.33	67.83
		Skor Kemampuan Literasi SMALB	Skor	71.17	72.17	73.67
		Skor Kemampuan Numerasi SDLB	Skor	0	48.58	50.38
		Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	Skor	49.08	50.93	52.68
		Skor Kemampuan Numerasi SMALB	Skor	47.16	48.16	49.66
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	65.86	68	80
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	57.2	59.22	61.92
S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Presentasi	N.A	0.56	0.7
		Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	NA	75.69	77.98
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82.26	83.26	84.76
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55.89	56.87	58.34
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.558	0.556	0.553
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.01	67.87	73.66
Misi 2	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif					

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target	
					2026	2029
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat kemiskinan (%)	Persen	21.66	18.85	16.54
S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB)%	Persen	2.24	2.26	2.37
		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB)%	Persen	3.03	3.85	4.00
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Rasio Gini	Rasio	0.389	0.374	0.356
S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata dan budaya lokal	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB)%	Persen	0.48	0.53	0.68
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48.52	48.62	48.76
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	20.8	5.35	5.84
S7	Terwujudnya percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA&PMDN	Meningkatkan nilai PMA&PMDN Realisasi investasi (PMA -PMDN) (Rp Triliun)	Rp. Triliun	13.036	1.068	1.16
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)	Persen	538.7	10.00	11.00
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta	131.64	151.14	257.6
S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB)%	Persen	38.93	39.10	39.20
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB)%	Persen	4.71	5.55	5.60
		Proporsi Koperasi dan UMKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	N.A	1.50	3.00
		Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	Persen	25.38	25.41	25.44

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target	
					2026	2029
		Kontribusi sektor MIGAS terhadap PDRB (%)	Persen	24.77	24.79	24.83
		Cakupan Potensi dan Pemberian Ijin dalam pemanfaatan Energi	Persen	N.A	55.00	70.00
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB non tambang per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta	98.22	100.99	106.97
S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Menyumbang PAD	Kontribusi Stok Carbon	Miliar Rupiah	0	0	8.00
		Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB)%	Persen	1.46	1.47	1.50
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.13	3.93	3.84
S10	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70.63	72.93	76.38
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.5541	0.5765	0.6118
S11	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat dan Kampung	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	persen	27.00	28.00	28.00
Misi 3	Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan					
T3	Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks		47.98	51.93
S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen		34.68	37.90
		Cakupan penanganan daerah Rentan Rawan pangan	Persen		42.32	27.32
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	21.91	20.71	19.02
		Indeks Keamanan Pangan	Indeks	21.89		
S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	NTP Sektor Pertanian	Persen	98.88	102.20	111.60
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101.61	104.10	108.10
S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial	Miliar Rupiah		5.00	8.00

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target	
					2026	2029
		Rata-rata laju deforestasi per tahun	Persen		28.00	22.00
		Luas hutan sosial kemasyarakatan (HKM) yang dikelola oleh masyarakat	Persen		48.00	72.00
		Luas hutan desa (HD) yang dikelola oleh kampung	Persen		44.00	56.00
Misi 4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas						
T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124.78	119.23	110.87
S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	40.41	44.63	53.63
T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83.75	83.05	83.53
S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi, serta Kualitas Penataan Ruang Daerah					
		Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	100	100	100
		Cakupan Wilayah yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	Persentase	35	39.33	46.84
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	ton		94.762	99.002
		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Persen	45.74	48.51	49.98
S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan		80	80.50	82.00
		Rasio Elektrifikasi		83	84.67	87.23
S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63.25	72.62	73.22
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86.28	86.99	87.14
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94.4	85.16	85.76
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Persen		5.48	18.7
Misi 5 Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah						
T5	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81	82	83.5

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target		
				2026	2029	
S18	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	65.55	65.74	68.73
S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145.76	144.34	141.93
		Indeks Demokrasi	Indeks	N.A.	66.74	69.72
S20	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	100	100	100
Misi 6	Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance					
T6	Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	BB
S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	NA	BAIK	BAIK
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89.92	90	90
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	N.A	65	70
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C	C	A
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N.A.	78.11	100
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	2.87	3.17	3.62
		Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B	B	A
		Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase	NA	100	100
		Indeks Pembangunan Statistik	Skala	1.3	2.3	3.8
		Indeks SPBE (terkait keamanan)	Persen	60.24	70.2	85.2
S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73.41	83	98
		Tingkat maturitas SPIP	Level	3.068	3	3
		Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	opini	WDP	WTP	WTP
		Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah	persen	5	5.010	5.025
		Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)	persen	5	5.010	5.025
Misi 7	Optimalisasi Otsus Untuk Menyejahterakan OAP di Papua Barat					
T7	Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks			
S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun			

Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Capaian Awal-2024	Target	
					2026	2029
		Harapan Lama Sekolah (HLS) Orang Asli Papua	Tahun			
		Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	Tahun			
		Persentase Penduduk Miskin Orang Asli Papua (OAP)	Persentase			
S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang termutakhirkan	Persentase	N.A	100	100
		Cakupan pemetaan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat		NA		

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RKPD dengan efektif dan efisien pada tahun 2026. Strategi pembangunan menunjukkan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah.

Arah kebijakan Pembangunan merupakan fokus pembangunan yang mencerminkan urgensi penyelesaian permasalahan yang hendak dilaksanakan. Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Barat tahun 2026 menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Penekanan fokus dalam setiap tahun 2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025 – 2029.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat 2026 ditunjukkan pada Tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
M1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN & PERLINDUNGAN SOSIAL
T1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat & Berketahanan Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	AK1	<p>Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan (Alat Kesehatan, Ketersediaan Obat dan Vaksin dan Sarana Prasarana Kesehatan lainnya), baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.</p>
		AK2	<p>Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.</p>
		AK3	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah, implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), pembudayaan olahraga di masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan kampung/kelurahan, serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.</p>
		AK4	<p>Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis dan Percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting, terutama bagi OAP dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.</p>

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK5	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.
		AK6	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
		AK7	Pengembangan masyarakat Papua Barat yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah,serta pengelolaan sampah dan limbah;
S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	AK8	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan/ Pengobatan Gratis dan Percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting, terutama bagi OAP dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
		AK9	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	AK10	Peningkatan Penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan
		AK11	Penyelenggaraan Bantuan Afirmasi Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Akademi Komunitas dan Sekolah Kekhususan Papua Barat, bagi OAP secara Gratis.
		AK12	Peningkatan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan informasi publik
		AK13	Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga, serta kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi
		AK14	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).
		AK15	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S4	<p>Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Jaminan Sosial yang adaptif</p>	AK16	<p>Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).</p>
		AK17	<p>Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p>
		AK18	<p>Pengembangan perlindungan sosial adaptif sesuai dengan konteks papua barat bagi seluruh masyarakat terutama OAP, kelompok rentan, dan daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p>
		AK19	<p>Pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, penguatan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.</p>
		AK20	<p>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat serta penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p>
		AK21	<p>Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.</p>
		AK22	<p>Percepatan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana; terutama bagi OAP.</p>

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
M2	MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH YANG INKLUSIF		
T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global		
S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	AK23	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, perkebunan dan pertambangan
		AK24	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan akademi komunitas sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.
		AK25	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim disertai upaya pembangunan rendah karbon.
		AK26	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.
		AK27	Percepatan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis industri dan pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata lokal	AK28	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja/tenaga kerja lokal, terutama OAP di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif, pertambangan, teknik bangunan dan infrastruktur, perbengkelan, elektronik serta pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development centre)
		AK29	Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.
		AK30	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif terutama pala Tomandin Fakfak.
		AK31	Pengembangan pusat dan kerja sama kelestarian budaya lokal masyarakat Papua Barat sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional
		AK32	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.
S7	Terwujudnya Percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA dan PMDN	AK33	Penciptaan iklim usaha dan ekosistem digital yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua
S8	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, serta sektor	AK34	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
	pertambahan dalam perekonomian	AK35	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi
		AK36	Peningkatan keterkaitan/kemitraan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		AK37	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.
		AK38	Peningkatan peran Papua Barat dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
		AK39	Percepatan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis industri dan pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan
S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Menyumbang PAD	AK40	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK41	Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna Papua Barat melalui penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan, termasuk sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.
S10	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	AK42	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		AK43	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja/tenaga kerja lokal, terutama OAP di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif, pertambangan, teknik bangunan dan infrastruktur, perbengkelan, elektronik serta pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development centre)
S11	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat dan Kampung	AK44	Dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang efektif dan inklusif untuk masyarakat, serta peningkatan kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat
		AK45	Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, termasuk pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data berbasis Kampung/Kelurahan dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pembangunan agar tepat sasaran.
		AK46	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.
		AK47	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
M3	MEMBANGUN PERTANIAN YANG MANDIRI, BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN		
T3	Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah		
S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	AK48	Percepatan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis industri dan pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan
		AK49	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.
		AK50	Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif.
S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	AK51	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, perkebunan dan pertambangan
		AK52	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim disertai upaya pembangunan rendah karbon.
		AK53	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK54	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan akademi komunitas sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.
		AK55	Percepatan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, dan perikanan termasuk hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis industri dan pariwisata, sentra kelautan dan perikanan terpadu, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan
S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	AK56	Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna Papua Barat melalui penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan, termasuk sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.
		AK57	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan
		AK58	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
M4	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MUDAH DIAKSES DAN BERKUALITAS		
T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif		

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S15	<p>Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi, serta Kualitas Penataan Ruang Daerah</p>	AK59	<p>Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang terintegrasi, termasuk percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p>
		AK60	<p>Pembangunan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut dan udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang, termasuk pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama sebagai transshipment hub domestik, pemanfaatan ALKI III C di sisi wilayah Papua secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global, serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p>
		AK61	<p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh</p>
		AK62	<p>Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi Rencana Tata Ruang, yang diiringi upaya pengendalian tata ruang</p>
		AK63	<p>Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua Barat melalui pengembangan bandara utama (Rendani di Manokwari), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan (waterbase) dan seaplane sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah</p>
		AK64	<p>Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p>
		AK65	<p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p>

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK66	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	AK67	Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia
		AK68	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik
		AK69	Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik
		AK70	Pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan
		AK71	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik
		AK72	Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas
		AK73	Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi
S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	AK74	Pengembangan masyarakat Papua Barat yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah,serta pengelolaan sampah dan limbah;
		AK75	Percepatan penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik
		AK76	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan
M5	MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN KONDUSIVITAS DAERAH		
T5	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah		

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S18	Meningkatnya ketentraman dan harmonisasi keragaman dalam masyarakat	AK77	Penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat serta optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
		AK78	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		AK79	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat serta optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	AK80	Pengembangan perlindungan sosial adaptif sesuai dengan konteks papua barat bagi seluruh masyarakat terutama OAP, kelompok rentan, dan daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		AK81	Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.
		AK82	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK83	Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna Papua Barat melalui penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan, termasuk sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.
S20	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan tanah adat	AK84	Penyusunan dan harmonisasi regulasi terkait pengakuan dan perlindungan tanah ulayat dan tanah adat dengan memperhatikan hukum adat setempat serta norma nasional.
		AK85	Peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa baik formal (pengadilan, BPN, dll.) maupun non-formal (lembaga adat, musyawarah adat) untuk menangani sengketa tanah adat secara adil dan inklusif.
		AK86	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan tanah adat.
		AK87	Penguatan peran masyarakat adat dalam proses identifikasi, verifikasi, dan mediasi tanah ulayat melalui pendekatan partisipatif dan berbasis hak.
		AK88	Fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat dan integrasinya dalam tata ruang dan basis data pertanahan daerah.
		AK89	Penyediaan akses bantuan hukum bagi masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa.
		AK90	Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai hak atas tanah ulayat, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pentingnya dokumentasi hak adat.
		M6	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU GOOD GOVERNANCE
T6	Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik		
S21	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	AK91	Dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang efektif dan inklusif untuk masyarakat, serta peningkatan kepastian hukum, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat adat

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	
serta Inovasi Daerah	AK92	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
	AK93	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.
	AK94	Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, termasuk pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data berbasis Kampung/Kelurahan dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pembangunan agar tepat sasaran.
	AK95	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
	AK96	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
	AK97	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.
	AK98	Peningkatan produktivitas BUMD.
	AK99	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
	AK100	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.
	AK101	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital serta peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
	AK102	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
		AK103	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		AK104	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		AK105	Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi serta penerapan hasilnya dalam implementasi pembangunan
S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	AK106	Percepatan Desain Penataan Daerah
		AK107	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		AK108	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
		AK109	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi
		AK110	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya penguatan pengendalian inflasi daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
M7	OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS UNTUK MENYEJAHTERAKAN ORANG ASLI PAPUA DI PAPUA BARAT		
T7	Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP		

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S23	Meningkatnya Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan bagi OAP	AK111	Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga, serta kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi
		AK112	Penyelenggaraan Bantuan Afirmasi Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Akademi Komunitas dan Sekolah Kekhususan Papua Barat, bagi OAP secara Gratis.
		AK113	Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan (Alat Kesehatan, Ketersediaan Obat dan Vaksin dan Sarana Prasarana Kesehatan lainnya), baik primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan telemedicine dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau, pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.
		AK114	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan/ Pengobatan Gratis dan Percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting, terutama bagi OAP dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
		AK115	Pengembangan perlindungan sosial adaptif sesuai dengan konteks papua barat bagi seluruh masyarakat terutama OAP, kelompok rentan, dan daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.

Misi/Tujuan/Sasaran		Arah Kebijakan	
S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	AK116	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan, serta peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
		AK117	Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua, termasuk pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data berbasis Kampung/Kelurahan dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pembangunan agar tepat sasaran.
		AK118	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		AK119	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.

4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan permasalahan-permasalahan pada tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Papua Barat untuk membuat perencanaan pada tahun 2026. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan
 - ▶ Termasuk masalah pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas.
2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berbasis potensi lokal serta masih tingginya kerawanan pangan
 - ▶ Termasuk ketimpangan ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan, pariwisata, industri, pemuda, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat.
3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pusat pertumbuhan yang mendukung pelayanan publik dan ekonomi
 - ▶ Termasuk persoalan elektrifikasi, air bersih, permukiman layak, telekomunikasi digital, sanitasi, transportasi multimoda, dan kepatuhan tata ruang.
4. Masih rendahnya efektivitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, kapasitas aparatur, dan implementasi Otonomi Khusus

- ▶ Termasuk koordinasi kewenangan, kelembagaan, PAD, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan Otsus.
5. Belum optimalnya mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
 - ▶ Termasuk emisi GRK, penurunan kualitas ekosistem, pencemaran, dan pengelolaan SDA yang belum terencana dengan baik.
 6. Masih rentannya stabilitas sosial dan politik akibat belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
 - ▶ Termasuk potensi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun intensitasnya rendah.
 7. Rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan berbasis inklusivitas dan keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal
 - ▶ Fokus pada keberpihakan terhadap Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam semua sektor pembangunan

4.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2026 merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat 2026 yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2026 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Bara (DPRPB).

4.4.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Papua Barat tahun rencana, maka prioritas Pembangunan Tahun 2026 adalah :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar serta Perlindungan Sosial bagi seluruh Lapisan Masyarakat;
2. Penguatan Ekonomi Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berbasis Potensi Lokal;
3. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan;
4. Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, serta Stabilitas dan Keamanan Daerah;
5. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efisien, dan Berbasis Digital;
6. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan;
7. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Pemerataan Pelayanan dan Pertumbuhan Ekonomi.

4.4.2 Agenda Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah Provinsi Papua Barat merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan wilayah Provinsi Papua Barat terintegrasi

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratis, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka menjaga konsistensi serta menterjemahkan pendekatan Holistic, Integratif, Tematik dan Spasial atau lebih dikenal dengan istilah “HITS” maka pendekatan pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Wilayah dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Adapun Agenda Pembangunan Wilayah Kabupaten akan dibahas lebih lanjut pada Bab V tentang Arah Kebijakan Kabupaten dalam dokumen ini. Selanjutnya berikut akan dijabarkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional beserta Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

4.4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD tahun kedua, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Matriks Keterkaitan Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)						
	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar serta Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Penguatan Ekonomi Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berbasis Potensi Lokal	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, serta Stabilitas dan Keamanan Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efisien, dan Berbasis Digital	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Pemerataan Pelayanan dan Pertumbuhan Ekonomi
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).				√			
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		√	√				

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)						
	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar serta Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Penguatan Ekonomi Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berbasis Potensi Lokal	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, serta Stabilitas dan Keamanan Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efisien, dan Berbasis Digital	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Pemerataan Pelayanan dan Pertumbuhan Ekonomi
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		√					√
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	√					√	

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)						
	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar serta Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Penguatan Ekonomi Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berbasis Potensi Lokal	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, serta Stabilitas dan Keamanan Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efisien, dan Berbasis Digital	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Pemerataan Pelayanan dan Pertumbuhan Ekonomi
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		√					
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	√					√	
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan				√	√		

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)						
	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar serta Perlindungan Sosial bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Penguatan Ekonomi Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berbasis Potensi Lokal	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, serta Stabilitas dan Keamanan Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efisien, dan Berbasis Digital	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Pemerataan Pelayanan dan Pertumbuhan Ekonomi
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			√				

4.4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan tahun 2026 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dan berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran Pembangunan Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Matrix Keterkaitan Prioritas Daerah dengan Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Tahun 2026

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial	T1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat & Berketahanan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.69		69.38		71.06		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	N.A		0.48		0.5		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	68.47		69.79		70.81		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat	Indeks	N.A		0.6		0.9		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.77		1.9	26.829.812.854	2.2	35.710.480.909	Kesehatan
			Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persentase	100		100	9.299.861.789	100	12.378.116.041	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase	100		100	3.715.184.652	100	4.594.059.835	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase	100		100	3.447.704.563	100	4.292.010.270	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu	176		132.60	897.782.600	111.53	1.194.948.641	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKBy) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	9		8	897.782.600	6.5	1.194.948.641	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase	100		100	105.459.200	100	289.380.045	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	107.26		100	16.868.734.000	100	22.452.284.955	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persentase	36.25		67.7	5.393.945.136	80.08	7.179.340.976	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di kampung	Layanan	4		4	550.000.000	7	732.050.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase	69.1		75.88	420.102.989	85	559.157.078	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	0		1	1.907.635.260	3	2.539.062.531	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase	88		90	934.007.849	90	1.779.793.308	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Prevalensi HIV	Persentase	2.3		2.15	842.762.544	1.96	1.555.295.640	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	89		91	883.852.244	95	1.176.407.336	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase faskes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	Persentase	N.A.		70	4.414.493.790	85	5.875.691.235	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok	Kab/Kota	N.A.		2	458.852.244	6	610.732.336	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persentase	10.33		20.25	172.408.393	55.56	229.475.571	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase	N.A.		30	1.623.196.472	80	2.577.802.785	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	Persentase	N.A.		20	1.003.241.800	80	1.484.328.685	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persentase	100		100	256.595.027	100	443.396.206	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase	N.A.		100	420.000.000	100	725.760.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	N.A.		32.08	3.259.482.892	80	4.338.371.729	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	16		24	5.500.000.000	36	7.320.500.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-OAP	Persentase	N.A		17.4	7.892.640.000	25.056	11.365.401.600	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kab/Kota	3		4	1.380.000.000	6	1.836.780.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	97.83		100	495.000.000	100	658.845.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe RSUD Provinsi	Tipe	C		C	14.448.865.717	B	15.796.396.953	Kesehatan	BLUD RSUD

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Nakes dan Non Nakes Bersertifikat keahlian pada RSUD Provinsi	Persentase	N.A.		65	1.596.496.000	85	6.928.795.360	Kesehatan	BLUD RSUD
	S1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	Persentase	14.29		28.57		71.43			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	13.09		7.98	403.933.600	2.73	1.654.512.026	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting(%))	Persentase	24.6		20.6		14.6			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persentase	100		100	3.600.000.000	100	6.220.800.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Persentase	100		100	250.000.000	100	325.000.000		DPPPA Dalduk KB
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase Keluarga Miskin Beresiko Stunting yang mendapatkan bantuan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kampung	Persentase	76.72		77.02	2.000.000.000	77.47	2.000.000.000		Dinas Pemberdaya an Masyarak dan Kampung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu aktif	Persentase	96.45		96.75	5.000.000.000	97.2	5.000.000.000		Dinas Pemberdaya an Masyarak dan Kampung
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase	N.A.		36	42.799.000.000	37.5	49.545.000.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	N.A.		33	2.199.000.000	39	2.545.600.000		PUPR

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persentase	N.A.		0.56	27.079.000.000	0.8	31.347.000.000		PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persentase	N.A.		95.6	5.000.000.000	96.1	5.788.100.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	Lokasi	N.A.		7	162.100.000.000	7	162.100.000.000		PUPR
		PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Persentase	52.32	1.600.000.000	42.32	1.000.000.000	27.32	1.092.727.000	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persentase	87.77	5.199.352.585	99.09	Rp3.650.000.000	100	Rp3.988.453.550	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PPH Konsumsi Pangan	Persentase							Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	Tahun	7.86		08.04		8.31			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	Tahun	13.17		13.19		13.22		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SDLB	Skor	0		79.78		84.58		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SMPLB	Skor	65.33		66.33		67.83		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Literasi SMALB	Skor	71.17		72.17		73.67		pendidikan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	Rasio	90		93	285.550.409.162	100	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi dan Numerasi	Persentase	94		100	285.550.409.162	100	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	Persentase	27.52		32.58	285.550.409.162	40.17	312.177.097.030	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	33.41		36.6	1.650.000.000	41.39	2.196.150.000	pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Kabupaten yang Menyediaan Pendidikan Akademi Komunitas	Persentase	N.A.		28.57	2.000.000.000	71.43	3.456.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	Skor	0		48.58		50.38			
			Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	Skor	49.08		50.93		52.68		pendidikan	Dinas Pendidikan
			Skor Kemampuan Numerasi SMALB	Skor	47.16		48.16		49.66		pendidikan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio	19.77		38.83	5.840.000.000	38.83	5.840.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio	19.77		38.83	5.840.000.000	38.83	5.840.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru SLB yang tersertifikasi	Persentase	0		25	787.500.000	40	911.629.687	pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase	8.73		15	220.000.000	65	235.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan pendidikan khusus yang tersusun	Silabus	80		95	600.000.000	100	600.000.000	pendidikan	Dinas Pendidikan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	65.86		68		80			
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Persentase	0		100	1.700.000.000	100	2.500.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Cakupan Perpustakaan yang diakreditasi sesuai SNP	Persentase	0		100	600.000.000	100	900.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Persentase	59.29		70	-	80	-	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Persentase	0		100	1.300.000.000	100	1.900.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat)	Persentase	0		100	1.700.000.000	100	2.500.000.000	perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	S3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	57.2		59.22		61.92			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persentase	NA		70	1.700.000.000	80	2.500.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persentase	100		100	6.250.000.000	100	9.000.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persentase	100		100	700.000.000	100	950.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	100		100	1.050.000.000	100	1.450.000.000	kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Presentasi	N.A		0.56		0.7			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	74.46		75.46	5.125.000.000	100	5.384.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	-		100	1.000.000.000	100	1.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persentase	92.22		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persentase	99.91		100	350.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	88.32		100	350.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	98.77		100	350.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	99.64		100	3.302.000.000	100	3.650.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase	N.A		100	1.700.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan Pendataan data Fakir Miskin	Persentase	N.A		100	350.000.000	100	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase	99.69		100	1.700.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase	N.A		100	1.700.000.000	100	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase	N.A		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Presentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase	N.A		100	300.000.000	100	600.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Persentase	N.A		100	100.000.000	100	250.000.000	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persentase	100		100	450.000.000	100	600.000.000	Sosial	Dinas Sosial
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	NA		75.69		77.98			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date di kabupaten di Provinsi Papua Barat	Persentase	100		100	352.000.000	100	400.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82.26		83.26		84.76			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 perempuan)	Persentase	10		10	1.350.000.000	10	1.600.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55.89		56.87		58.34			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	Persentase	100		100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.558		0.556		0.553			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase	100		100	1.000.000.000	100	1.300.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S4	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.01		67.87		73.66			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase	80		80	370.000.000	80	385.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	Persentase	80		80	550.000.000	80	585.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persentase	100		100	1.220.000.000	100	1.650.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Persentase	100		100	425.000.000	100	455.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	Persentase	10		10	1.210.000.000	10	1.500.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	Persentase	100		100	650.000.000	100	680.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Laju pertumbuhan penduduk	Persentase	70		70	355.000.000	70	370.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persentase	100		100	250.000.000	100	350.000.000	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak'	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat kemiskinan (%)	Persen	21.66		18.85		16.54			
	S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB%)	Persen	2.24		2.26		2.37			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	76.5	17.291.069.045	83.00	3.932.544.900	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen	75	5.430.141.000	81	2.244.724.000	90	2.452.870.522		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha di bidang pertanian yang memiliki ijin	Persen	85	1.267.315.400	87	255.676.000	90	279.384.068		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	1.100.000.000	80.00	517.055.100	88.00	565.000.068		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Pertanian	Persen	75	1.125.000.000	79.00	600.000.000	85.00	655.636.200		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persen	100	Rp1.275.000.000	100	1.597.000.000	100	1.294.335.132	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen	100	Rp2.335.000.000	100	2.400.400.000	100	2.813.772.025		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Presentase kasus penyakit hewan yang terkendali	Persen	100	Rp643.654.004	100	450.000.000	100	506.478.965		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		MASYARAKAT VETERINER										
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Peternakan	Persen	100	Rp335.000.000	100	867.055.100	100	731.580.727		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	Persen	100	0	100	50.000.000	100	56.275.441		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase jumlah perijinan yang dikeluarkan	Persen	100	Rp25.000.000	100	50.000.000	100	56.275.441		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S5	Meningkatnya pengembangan Ekonomi Lokal berbasis komoditas unggulan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB)%	Persen	3.03		3.85		4.00			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	75	Rp1.369.999.750	75	1.370.000.000	83	1.497.035.990	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	95		95		98		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah kelautan dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	78	Rp699.791.706	85	1.181.994.173	91	1.291.596.947	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	846.612		846.612		846.612		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.233	3.489.598.371	1.320	1.688.675.431	1.530	1.845.261.238	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	95.80		102		104.2		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	64.000	7.611.126.850	75.000	3.830.454.415	95.000	4.185.640.962	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	67.28	2.171.748.145	39.17	1.260.000.000	48.77	1.376.836.020	Urusan Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Rasio Gini	Rasio	0.389		0.374		0.356			
	S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata dan budaya lokal	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB(%)	Persen	0.48		0.53		0.68			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen		Rp1.598.729.872.00	40%	1.100.000.000.00	90%	1.201.999.700.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan	persentase		Rp399.167.933.00	40%	524.972.996.10	90%	573.652.167.11	Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan sumber daya OAP yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	persentase		Rp790.925.120.00	40%	500.000.000.00	90%	546.363.500.00	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	orang			50		50		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	persentase	20%	Rp1.479.972.310.00	25%	500.000.000.00	40%	546.363.500.00	Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			jumlah wisatawan domestik	orang			300.000		600.000			
			jumlah wisatawan mancanegara	Orang			1100		1400		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			rata rata lama tinggal wisatawan	hari			2.25		3		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Jumlah Event	event			3		6		Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S6	Meningkatnya daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis destinasi wisata dan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48.52		48.62		48.76			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya guna pelestarian	persentase		Rp310.499.221.00	40%	273.012.598.00	90%	298.328.237.17	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum yang dikelola secara baik	persentase		Rp177.417.375.00	40%	158.771.468.00	90%	173.493.869.91	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan guna pelestarian	persentase		Rp299.887.628.00	40%	358.215.927.00	90%	391.432.215.26	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	persentase		Rp1.194.426.592.00	40%	1.019.999.852.00	90%	1.114.581.378.28	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan sejarah yang didokumentasi, dilindung, dan dimanfaatkan	Persen			40%		90%		Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISAT A
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	20.8		5.35		5.84			
	S7	Terwujudnya percepatan investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA&PMDN	Meningkatkan nilai PMA&PMDN Realisasi investasi (PMA -PMDN) (Rp Triliun)	Rp. Triliun	13.036		1.068		1.16			
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	persentas e	75.25	749,948,384	77.27	499.000.150	80.33	577.655.049	Penanaman Modal	DPMPSTP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	persentas e	75.25	906,523,395	75.70	599.963.056	76.39	599.963.056	Penanaman Modal	DPMPSTP

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S7	Terwujudnya percepatan Investasi kawasan dalam upaya meningkatkan nilai PMA&PMDN	Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%)	Persen	538.7		10.00		11.00			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	persentase	9.99	649,994,875	10.05	499.999.680	10.14	499.999.680	Penanaman Modal	DPMPPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan	persentase	50.00	750,008,156	50.30	699.982.100.0	50.75	699.982.100.0	Penanaman Modal	DPMPPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	persentase	83.00	-	83.50	150.000.000	84.25	173.643.750	Penanaman Modal	DPMPPTSP
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta	131.64		151.14		257.6			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB%)	Persen	38.93		39.10		39.20			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	persentase	55.00	450,000,000.00	55.33	1,500,000,000	55.83	1,500,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	persentase	2	699,945,999.00	4	4,000,000,000	7	4,000,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
			Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	persen	2	150,000,000.00	4	1,000,000,000	7	1,000,000,000	Perindustrian	Dinas Perindag
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemantauan izin usaha industri	persen	50.00		65.00	1,000,000,000	80.00	1,000,000,000	perindustrian	Dinas Perindag
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB%)	Persen	4.71		5.55		5.60			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non Migas	Juta US\$	4.50	1.200.000.000	4.60	900.000.000	5.00	983.454.300	Perdagangan	Dinas Perindag
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	persen	15.00	310,000,000	21.00	319.300.000	30.00	348.907.731	Perdagangan	Dinas Perindag
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase inflasi tahunan	persen	2.53	1,440,000,000	2.45	1.570.000.000	2.30	1.715.581.390	Perdagangan	Dinas Perindag
			Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	persen	10.14		5.90		5.75		Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	persen	100	1,250,000,000.00	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	Perdagangan	Dinas Perindag
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Proporsi Koperasi dan UMKM menjalin kemitraan dan ekspor	Persen	N.A		1.50		3.00			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	persen			40.00	550,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	persen			60.00	650,000,000	100.00	800,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	persen			65.00	450,000,000	100.00	600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	persentase			60.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	persentase			60.00	650,000,000	100.00	800,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	persentase			70.00	550,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	persentase			70.00	300,000,000	100.00	450,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	persentase			60.00	550,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	persentase			40.00	550,000,000	100.00	700,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM yang di bina	persentase			60.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	persentase			40.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	persentase			40.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang				40.00	3,100,000,000	100.00	3,450,000,000	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	Persen	25.38		25.41		25.44			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	50	500.000.000	55.13	700.000.000	63.81	764.908.900	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	Persen	15		35		75			DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor pertambangan dalam perekonomian	Kontribusi sektor MIGAS terhadap PDRB (%)	Persen	24.77		24.79		24.83			
		PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Persen	60.00	0	65.00	1.500.000.000	80.00	1.639.090.500	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	S8	Meningkatnya Kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi serta sektor	Cakupan Potensi dan Pemberian Ijin dalam pemanfaatan Energi	Persen	N.A		55.00		70.00			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		pertambangan dalam perekonomian										
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	50	500.000.000	60	1.400.000.000	75	1.529.817.800	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persen	50	500.000.000	55.13	700.000.000	63.81	764.908.900	ESDM	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	PDRB ADHB non tambang per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta	98.22		100.99		106.97			
	S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor	Kontribusi Stok Carbon	Miliar Rupiah	0		0		8.00			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		Kehutanan Dalam Menyumbang PAD										
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha			1.529.818	31.860.666.791	1.695.868	34.815.010.841	Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
			Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persen			18.42		9.56			
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persen			28.82		35.96			
	S9	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Menyumbang PAD	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB(%))	Persen	1.46		1.47		1.50			
			Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persen			45.63		50.63			
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3/Tahun			854.236		884.436			
			Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha			25.9		32.28			
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persen			97.13		98.1			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen			Ada		Ada			
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang dikelola	Persen	100		100	800.000.000	100	830.000.000	Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
			Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen			60.84		65			
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.13		3.93		3.84			
	S10	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70.63		72.93		76.38			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase	12.02		12.51	550.000.000	13.27	550.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persentase	NA		52.33	7.050.000.000	59.33	7.050.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persentase	60.53		64.53	1.000.000.000	70.53	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persentase	4.51		4.69	1.000.000.000	4.98	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase	n.a		14.00	150.000.000	14.00	150.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Persentase	0.68		0.71	1.000.000.000	0.75	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Persentase	0.23		0.24	1.000.000.000	0.25	1.000.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase	17.00		17.69	200.000.000	18.77	200.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	T2	Meningkatkan perekonomian daerah, nilai investasi & pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pengembangan teknologi, inovasi serta rantai pasar domestik & global	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.5541		0.5765		0.6118			
	S11	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat dan Kampung	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	persen	27.00		28.00		28.00			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentasi Peningkatan Satus desa maju / mandiri	Persentase	4.17		4.3	1.800.000.000	4.6	1.800.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Jumlah pembinaan kelompok PKK	kelompok	95.56		97	1.200.000.000	100	1.500.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase kader desa yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persentase	59.53		60	350.000.000	62	350.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Mandiri	Persentase	1.04		1.2	500.000.000	1.5	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Persentase desa maju	Persentase	1.04		1.5	500.000.000	2.25	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase desa berkembang	Persentase	25.42		26	2.400.000.000	29	2.400.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	17.52		19	1.000.000.000	22	1.000.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat		ada/tidak ada		ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada/tidak ada	ada	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persentase	89.59		1	500.000.000	1	500.000.000	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persentase	20		50	1.900.000.000	60	1.900.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persentase	20		50	1.500.000.000	60	1.500.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi potensinya	Persentase	20		20	300.000.000	20	300.000.000	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan	T3	Mewujudkan kemandirian & kedaulatan pangan yang berkelanjutan berbasis pada komoditas unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks			47.98		51.93			
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen			34.68		37.90			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	76.5	17.291.069.045	83.00	3.932.544.900	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton			37.703.06		40.010.78			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton/Ha			45.22		46.6			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton			18.638		20.366			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton/Ha			41.53		42.79			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	Ton			24.237.83		24.360.61			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	Ton/Ha			51.59		52.12			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen	75	5.430.141.000	81	2.244.724.000	90	2.452.870.522	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persen	100	1.275.000.000	100	1.597.000.000	100	1.294.335.132	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen	100	2.335.000.000	100	2.400.400.000	100	2.813.772.025	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Cakupan penanganan daerah Rentan Rawan pangan	Persen			42.32		27.32			
		PROGRAM PENANGANAN RAWAN PANGAN	Presentase daerah rentan rawan pangan	Persentase	52.32	1.600.000.000	42.32	1.648.000.000	27.32	1.800.814.096	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persentase	87.77	5.199.352.585	99.09	Rp3.650.000.000	100	Rp3.988.453.550	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			PPH Konsumsi Pangan	Persentase	77.9		81.9		88.0			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	21.91		20.71		19.02			
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase	98.75	Rp3.149.999.660	90.89	Rp1.850.000.000	92.18	Rp2.431.012.500	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	S12	Meningkatnya pengembangan pangan lokal	Indeks Keamanan Pangan	Indeks	21.89							
	S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	NTP Sektor Pertanian	Persen	98.88		102.20		111.60			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persentase	76.5	17.291.069.045	83.00	3.932.544.900	93.00	4.297.197.991	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton			37.703.06		40.010.78			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton/Ha	37.18		45.22		46.60			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton			18.638		20.366			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	Ton/Ha			41.53		42.79			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	Ton			24.237.83		24.360.61			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	Ton/Ha			51.59		52.12			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase	75	5.430.141.000	81	2.244.724.000	90	2.452.870.522	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Sarana Peternakan	Persentase	100	Rp1.275.000.000	100	1.597.000.000	100	1.294.335.132	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	Persentase	100	Rp2.335.000.000	100	2.400.400.000	100	2.813.772.025	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	S13	Terwujudnya kawasan sentra produksi pangan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101.61		104.10		108.10			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.233	3.489.598.371	1.320	1.688.675.431	1.530	1.845.261.238	Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	95.80		102		104.2		Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	64.000	7.611.126.850	75.000	3.830.454.415	95.000	4.185.640.962	Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial	Miliar Rupiah			5.00		8.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha			1.529.818	31.860.666.791	1.695.868	34.815.010.841	Kehutanan	Dinas Kehutanan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase			18.42		9.56		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	Persentase			28.82		35.96		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	Persentase			45.63		50.63		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	m3/Tahun			854.236		884.436		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	Ha			25.9		32.28		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	Persentase			97.13		98.10		Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen			2		7		Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Rata-rata laju deforestasi per tahun	Persen			28.00		22.00			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah masyarakat dan penyuluh serta polisi hutan (Polhut) yang mendapatkan pemberdayaan kehutanan	Orang	200		220	3.670.762.207	250	4.011.140.974	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Luas hutan sosial kemasyarakatan (HKM) yang dikelola oleh masyarakat	Persen			48.00		72.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	Persentase	0	0	25	300.000.000	100	327.818.100	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	S14	Meningkatnya pengembangan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat	Luas hutan desa (HD) yang dikelola oleh kampung	Persen			44.00		56.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	Presentase Pengelolaan Hutan Adat	Persentase	0	0	25	300.000.000	100	327.818.100	Kehutanan	Dinas Kehutanan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas	T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124.78		119.23		110.87			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		Ruang Daerah yang inklusif										
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	40.41		44.63		53.63			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan	Persen			40.14	351.249.000.00 0	41.74	406.615.000.00 0		PUPR
	T4	Mewujudkan kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas antar Wilayah serta Kualitas Pengelolaan Tata Ruang Daerah yang inklusif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83.75		83.05		83.53			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi, serta Kualitas Penataan Ruang Daerah									
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Persen			35.03	5.250.000.000	43.52	6.077.531.250		PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	Rasio			35.03	20.087.550.000	47.5	23.253.850.069		PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan irigasi Multi Komoditas	Persentase			40.14	90.301.000.000	41.74	103.194.600.000		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase			27.27	6.278.000.000	27.27	6.278.000.000		PUPR

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase			58.47	12.252.000.000	58.63	14.183.000.000		PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Lokasi			100	5.000.000.000	100	5.000.000.000		PUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase			100	7.700.000.000	100	7.700.000.000		PUPR
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	100		100		100			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi		100		100	8.400.000.000	100	9.724.050.000		PUPR
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Cakupan Wilayah yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	Persentase	35		39.33		46.84			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	63		69.46	6.000.000.000	78	36.000.000.000		DISHUB
			V/C Ratio di Jalan Provinsi		47.25		52.09	6.000.000.000	60.3	36.000.000.000		DISHUB
			Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	Persen	36.75		40.52	6.000.000.000	46.9	36.000.000.000		DISHUB
			Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	Persen	42.86		48.21	6.000.000.000	77.19	36.000.000.000		DISHUB
			Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	25		27.56	6.000.000.000	31.91	36.000.000.000		
			Tersedianya Terminal Type B	Unit	ada/tidak ada		ada/tidak ada	6.000.000.000	ada/tidak ada	36.000.000.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Lokasi			ada/tidak ada	300.000.000.00	ada/tidak ada	17.800.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	Persen			10	1.000.000.000.00	80	9.000.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	ton	106.508.510		126.542.761	500.000.000.00	146.489.063	2.000.000.000.00		DISHUB

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	515.714		612.720	500.000.000.00	793.489	2.000.000.000.00		DISHUB
			Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	Persen	65.4		77.7	5.000.000.000.00	83.26	28.000.000.000.00		DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	18.530.000		22.015.493	500.000.000.00	25.485.685	1.800.000.000.00		DISHUB
			Jumlah arus penumpang angkutan udara	Orang	2.103.093		2.498.685	500.000.000.00	2.892.540	1.800.000.000.00		DISHUB
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi Informasi Komunikasi	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	ton			94.762		99.002			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola di TPA	Persen			60	500.000.000.00	65	800.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S15	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Teknologi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Persen	45.74		48.51		49.98			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		Informasi Komunikasi										
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Persentase	100		100	300.000.000	100	1.600.000.000		KOMINFO
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persentase	100		100	500.000.000	100	650.000.000		KOMINFO
	S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan		80		80.50		82.00			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan porsi EBT dalam bauran energi	persen	80	500.000.000	80.50	20.000.000.000	82.00	21.854.540.000		ESDM
	S16	Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi		83		84.67		87.23			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	persen	83	18.000.000.000	84.67	22.009.061.685	87.23	24.049.895.948		ESDM

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63.25		72.62		73.22			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Indeks	63.25		72.62	420.000.000	73.22	500.000.000	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86.28		86.99		87.14			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	persen			20	520.000.000.00	100	550.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100		100		100			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	persen			30	720.000.000.00	60	750.000.000.00	Urusan Lingkungan Hidup	DLHP

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Usuran	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94.4		85.16		85.76			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	persen			35	1.100.000.000.00	70	1.170.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUMADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	persen			40	400.000.000.00	60	550.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pelatihan yang diberikan kepada Lembaga Masyarakat yang ada di satu Provinsi	persen			20	560.000.000.00	50	590.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Usuran	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen			30	370.000.000.00	45	420.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	persen			30	520.000.000.00	80	550.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen	Ada		Ada/Tidak ada	500.000.000.00	Ada	2.000.000.000.00	Usuran Lingkungan Hidup	DLHP
	S17	Meningkatnya kualitas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Persen			5.48		18.7			
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen			93.60	491.971.336	100.00	537.590.362	Kehutanan	Dinas Kehutanan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen			60.84		65.00		Kehutanan	Dinas Kehutanan
Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah	T5	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama, keamanan & stabilitas wilayah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81		82		83.5			
	S18	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	65.55		65.74		68.73			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100		100	1.200.000.000	100	2.000.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase	100		100	2.600.000.000	100	3.200.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100		100	1.450.000.000	100	2.000.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100		100	800.000.000	100	1.400.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
	S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145.76		144.34		141.93			
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100		100	1.700.000.000	100	2.500.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100		100	1.500.000.000	100	2.200.000.000	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	Satpol PP

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Terselenggaranya program Penanggulangan Bencana	Persentase	100		100	9.775.000.000	100	11.315.784.375	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Bermasyarakat	BPBD
	S19	Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim	Indeks Demokrasi	Indeks	N.A.		66.74		69.72			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	Persentase	100		100	40.000.000.000	100	55.000.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100		100	150.000.000	100	300.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	100		100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase	100		100	250.000.000	100	400.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
			Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persentase	100		100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	100		100	2.000.000.000	100	5.500.000.000	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol
	S20	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100		100		100			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase			70	560.000.000.00	100	590.000.000	Urusan Pertanahan	DLHP
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										
	S20	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tanah adat	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	100		100		100			
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	persentase			70	15.000.000.000.00	100	19.000.000.000.00	Urusan Pertanahan	DLHP
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang di tetapkan	persentase			70	610.000.000.00	100	640.000.000.00	Urusan Pertanahan	DLHP
Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance	T6	Meningkatkan tata kelola dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan publik yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B		B		BB			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	NA		BAIK		BAIK			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persentase	80.11		86.11	1.700.000.000	95.11	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pasangan berakte nikah	Persentase	42.15		47	1.700.000.000	56	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase	39.79		43	1.700.000.000	52	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase	100		100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persentase	83.38		88.38	1.700.000.000	95.38	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	2.61		6.61	1.700.000.000	12.61	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	40.12		48.12	1.700.000.000	60.12	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	18.18		36.36	2.400.000.000	90.91	2.400.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100		100	300.000.000	100	300.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89.92		90		90			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100		100	5.000.000.000	100	7.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Hukum
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	N.A		65	266.780.245.500	70	320.453.245.300	Sekretariat Daerah	Biro Hukum

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		pemerintahan serta Inovasi Daerah										
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	Persentase	100		100	220.545.600.545	100	350.565.400.856	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan OTSUS	Persentase	100		100	198.300.350.556	100	256.756.400.345	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
			Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	Persentase	100		100	180.567.400.565	100	230.565.400.656	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100		100	1.450.000.000	100	1.750.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100		100	165.822.211.377	100	218.885.319.019	Sekretariat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100		100	6.909.999.746	100	9.909.999.746	Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	40		80		100		Sekretariat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	N.A		80	5.000.000.000	100	6.000.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100		100	4.500.000.000	100	6.000.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Perekonomian
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B		B	750.000.000	BB	1.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	A		A	1.700.000.000	A	2.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
			Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persentase	69.26		70	1.700.000.000	70	2.500.000.000	Sekretariat Daerah	Biro Organisasi
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Efektivitas Koordinasi, Komunikasi, dan Dukungan Layanan Pemerintahan Pusat dan Daerah	Persentase	100		100	3.772.615.959	100	5.021.351.842	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penghubung

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Persentase	100		100	5.402.915.264.00	100	7.802.915.264.00	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Administrasi Pimpinan
			Cakupan Pelayanan Umum Sekretariat Daerah	Persentase	100		100	38.715.999.994	100	51.125.119.977	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Umum
			Cakupan Pelayanan Umum Kerumahtanggaan Pimpinan	Persentase	100		100		100		Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Umum
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase				13.524.205.564		13.728.084.654	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase				25.383.363.208		25.766.020.581	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase				10.697.146.116		10.858.406.931	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRP, penjangkauan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRP	Persentase			85	2.988.158.219	100	3.058.206.125	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MEJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	Persentase Alat Kelengkapan MRP yang Memiliki Rencana Kerja Tahunan	Persentase	100		100	4.915.302.585	100	6.542.267.739	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
			Persentase Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	Persentase	100		100	1.495.446.370	100	1.990.439.117	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
			Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkauan aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	Persentase	100		100	32.653.379.200	100	43.461.647.715	Kekhususan Papua Barat	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C		C		A			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip sesuai NSKP	Persentase	N.A		100	700.000.000	100	950.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Persentase Digitalisasi Arsip dalam SIKN	Persentase	N.A		100	550.000.000	100	700.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Cakupan Pembinaan Kearsipan di Provinsi	Persentase	N.A		100	500.000.000	100	750.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	kategori	C		B	600.000.000	A	900.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Presentase Lembaga Kearsipan yang diakreditasi	Persentase	N.A		100	400.000.000	100	650.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Presentase Arsiparis yang disertifikasi	Persentase	N.A		100	600.000.000	100	850.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persentase	N.A		100	1.100.000.000	100	1.400.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	N.A		50	1.700.000.000	80	2.300.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N.A.		78.11		100			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persentase	90-100		90-100	1.750.000.000	90-100	2.450.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	Persentase	90-100		90-100	1.300.000.000	90-100	2.900.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kompetensi ASN	Persentase	90-100		90-100	2.600.000.000	90-100	5.380.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Cakupan peningkatan Kualitas Data ASN dan Penataan SDM Aparatur	Persentase	90-100		90-100	2.200.000.000	90-100	4.750.000.000	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase	100		100	1.658.520.000	100	1.760.034.692		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	2.87		3.17		3.62			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	presentase	100		100	14.825.000.000	100	19.732.075.000	Balitbangda	
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B		B		A			
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	presentase	100		100	7.150.000.000	100	9.516.650.000	Balitbangda	
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	Persentase	NA		100		100			
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	presentase	100		100	1.925.000.000	100	2.562.175.000	Balitbangda	

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Skala	1.3		2.3		3.8			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Tersedia dan di Perbaharui secara berkala dalam Portal SDI Papua Barat	Skala	1.3	200.000.000.00	2.3	200.000.000	3.8	1.200.000.000	Urusan Statistik	KOMINFO
	S21	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan serta Inovasi Daerah	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Persen	60.24		70.2		85.2			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100		100	400.000.000	100	700.000.000		KOMINFO
					100		100	3.025.000.000	100	4.026.275.000		Balitbangda
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73.41		83		98			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100		100	1.972.747.703	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100		100	1.972.747.703	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100		100	1.972.747.703	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKP	Persen	100		100	2.300.251.340	100	2.441.045.125	Perencanaan	Bappeda
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100		100	816.000.000	100	865.945.728	Perencanaan	Bappeda
			Cakupan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Persen	100		100	1.972.747.703	100	2.093.495.644	Perencanaan	Bappeda

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Tingkat maturitas SPIP	Level	3.068		3		3			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1	Persen	66.45		69	16.187.374.164	72	17.432.031.481	Pengawasan	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		3	4.301.556.000	3	4.632.305.329	Pengawasan	Inspektorat
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3		3	1.095.930.000	3	1.180.196.743	Pengawasan	Inspektorat
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	opini	WDP		WTP		WTP			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Waktu penetapan APDB	Tepat waktu/tidak tepat waktu			Tepat Waktu	17.143.649.324	Tepat Waktu	22.818.197.250	Keuangan	BPKAD
			Waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu/tidak tepat waktu			Tepat Waktu		Tepat Waktu			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Ya/Tidak			Ya	4.620.000.605	Ya	6.149.220.805	Keuangan	BPKAD

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah	persen	5		5.010		5.025			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase	5%	47,982,687,973	10%	41,046,558,622	25%	54,632,969,526	Keuangan	BAPENDA
			Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persentase	5%	2,738,965,428	10%	3,285,841,495	25%	4,373,455,029	Keuangan	BAPENDA
	S22	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)	persen	5		5.010		5.025			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Rasio	0.05	953,940,660	0.06	724,495,525	0.09	964,303,543	Keuangan	BAPENDA
Optimalisasi Otsus Untuk Menyejahterakan OAP di Papua Barat	T7	Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks								
	S23	Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun								
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Kartu Papua Cerdas OAP	Persentase				700.000.000		5.000.000.000		Dinas Pendidikan

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM OAP Bantuan Sosial Afirmasi bagi Lansia dan Kelompok Rentan (Gender dan Disabilitas)	Persentase			50	1.000.000.000	100	3.000.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase			350	3.302.000.000	500	3.650.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase			350	1.700.000.000	500	2.300.000.000	Sosial	Dinas Sosial
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase			7	350.000.000	7	500.000.000	Sosial	Dinas Sosial
	S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang termutakhirkan	Persentase	N.A		100		100			

Prioritas	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Urusan	Perangkat Daerah
					2024		2026		2029			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Data Penduduk Terpilah (OAP dan Non OAP) pada aplikasi SIAK	Persentase	N.A.		100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	Persentase	1		4	2.400.000.000	10	2.400.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Cakupan Data Kondisi Sosial Ekonomi OAP		40		80	3.000.000.000	100	1.500.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	S24	Tersedianya data terpilah OAP sebagai basis kebijakan pembangunan Otsus serta Peta Administasi Pemerintahan dan Wilayah Adat	Cakupan pemetaan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat		NA							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat OAP		na		100	8.015.000.000	100	8.364.651.875		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Dalam Rencana Pembangunan Tahun 2026 juga ditetapkan program unggulan berdasarkan Prioritas Daerah yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun program tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN & PERLINDUNGAN SOSIAL	1	Akselerasi akses dan mutu Kesehatan	KP1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak
				KP2	Penugasan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan bergerak
				KP3	Percepatan penurunan stunting
				KP4	Pemberian keamanan, insentif, dan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas
				KP5	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
				KP6	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
				KP7	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lanjut
				KP8	Peningkatan jangkauan jaminan kesehatan nasional (JKN)

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
				KP9	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, kusta, frambusia, filariasis, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain)
		2	Akselerasi Akses dan mutu Pelayanan Pendidikan	KP10	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik
				KP11	Penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual wilayah setempat
				KP12	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik yang bertugas
				KP13	Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan sesuai standar
				KP14	Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik
				KP15	Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C) dan keaksaraan
				KP16	Pengadaan Kelas Akselerasi bagi OAP sehingga dapat sekolah di Perguruan Tinggi yang berkualitas
				KP17	Pembangunan Akademi Komunitas
				KP18	Pembangunan Sekolah Luar Biasa
				KP19	Pemajuan dan pelestarian bahasa, budaya, dan sastra

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
		3	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)	KP20	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)
2	MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH YANG INKLUSIF	4	Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Komoditas unggulan	KP21	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan
				KP22	Optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih/bibit
				KP23	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan
				KP24	Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk
				KP25	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung ekonomi lokal
				KP26	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
				KP27	Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan modal dan kemudahan berusaha

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
				KP28	Penguatan kelembagaan kelompok dan korporasi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya
				KP29	Peningkatan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan ekosistem komoditas unggulan
				KP30	Fasilitasi sertifikasi ekspor dan penjaminan mutu
				KP31	Penguatan logistik pertanian dan peternakan
3	MEMBANGUN PERTANIAN YANG MANDIRI, BERDAULAT DAN BERKELANJUTAN	5	Pengembangan Pariwisata	KP32	Penyediaan dan pengembangan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas dengan prinsip pariwisata berkelanjutan
				KP33	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
				KP34	Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, IKM, dan BUMKam dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk
				KP35	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif
				KP36	Peningkatan promosi pariwisata

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
		6	Optimalisasi Investasi kawasan sehingga meningkatkan nilai PMA dan PMD	KP37	Pemberian rasa aman bagi investor
				KP38	Peningkatan kerja sama investasi
				KP39	Fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
				KP40	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi logistik dan perdagangan, termasuk simpul transportasi
				KP41	Fasilitasi pemasaran dan ekspor
				KP42	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
				KP43	Pembinaan dan pendampingan utamanya kepada pelaku usaha lokal
				KP44	Dukungan regulasi, stabilitas keamanan, dan insentif bagi pelaku usaha
		7	Pengembangan Pangan Lokal	KP45	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk memenuhi pangan lokal
				KP46	Optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran bibit untuk memenuhi pangan lokal

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
				KP47	Pemberdayaan kapasitas dan masyarakat dalam pengelolaan pangan lokal peningkatan
				KP48	Peningkatan riset dan inovasi dalam pengembangan pangan lokal mendukung
				KP49	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
				KP50	Peningkatan diversifikasi pangan lokal
		8	Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan berdasar ungulan daerah	KP51	Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan berdasar ungulan daerah
		9	Pengembangan Perhutanan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	KP52	Pengembangan Perhutanan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat
4	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MUDAH DIAKSES DAN BERKUALITAS	10	Optimalisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan program prioritas	KP53	Membangun konektivitas antar dan intra wilayah di Papua Barat
				KP54	Pengembangan Energi Baru Terbarukan
				KP55	Tingkat elektrifikasi
				KP56	Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
				KP57	Pembangunan Infrastruktur Dasar air minum layak dan sanitasi layak serta rumah layak huni

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
5	MEMPERKUAT KERUKUNAN BERAGAMA DAN KONDUSIFITAS DAERAH	11	Harmonisasi Sosial dengan program prioritas	KP58	Peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan, dan masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan dialog
				KP59	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
				KP60	Peningkatan stabilitas dan lingkungan yang kondusi
		12	Penataan Tanah Ulayat dan tanah adat	KP61	Inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat serta tanah adat/ulayat dan hutan adat
				KP62	Penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat dan hutan adat
				KP63	Penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang dilengkapi dengan peta delineasi tanah adat/ulayat dan hutan adat
				KP64	Peningkatan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah adat/ulayat dan hutan adat
				KP65	Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil
		13	Peningkatan resiliensi Bencana dan perubahan iklim	KP66	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal mitigasi bencana

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
				KP67	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana dan perubahan iklim kepada masyarakat
				KP68	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
				KP69	Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana
				KP70	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan
6	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU GOOD GOVERNANCE	14	Kelembagaan Tepat fungsi dengan program prioritas	KP71	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN
				KP72	Digitalisasi Pelayanan Publik
				KP73	Peningkatan integritas partai politik
		15	Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi	KP74	Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi
		16	Peningkatan inovasi Daerah	KP75	Peningkatan inovasi Daerah
7	OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS UNTUK MENYEJAHTERAKAN ORANG ASLI PAPUA	17	Data Terpilah Orang Asli Papua dengan program prioritas Pendataan Oorang asli papua dan pemetaan wilayah adat Masyarakat hukum adat OAP	KP76	Data Terpilah Orang Asli Papua dengan program prioritas Pendataan Orang asli papua dan pemetaan wilayah adat Masyarakat hukum adat OAP

7 MISI PEMBANGUNAN		20 PROGRAM PRIORITAS		80 KEGIATAN PRIORITAS	
		18	Jaminan sosial bagi OAP dengan program Keluarga Harapan Papua	KP77	Jaminan sosial bagi OAP dengan program Keluarga Harapan Papua
		19	Kartu Papua Barat Sehat dan Pintar	KP78	Kartu Papua Barat Sehat
		20	Bantuan Stimulan Bagi UMKM OAP	KP80	Bantuan Stimulan Bagi UMKM OAP

Tabel IV.6 Program Unggulan Berdasarkan Prioritas Daerah 2026

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
	PU	Akselerasi akses dan mutu Kesehatan					
	KPU 1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	100,00 100,00 2.2 : 1000 60 65 75 Persen Persen Rasio TT : 1000 Pen Persen Persen Persen	31.548.192.760,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			9.536.166.601,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	500.000.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	KPU 3	Percepatan Penurunan Stunting					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota Yang Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Persentase Kabupaten/kota Yang Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	100,00 100,00 2.2 : 1000 60 65 75 Persen Persen Rasio TT : 1000 Pen Persen Persen Persen	33.596.000.000,00	Kesehatan	Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	9.651.000.000,00		Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.066.100.639,00		Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat
	KPU 6	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Nakes dan Non Nakes RSUD Provinsi Papua Barat	65 persen	250.000.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang berkualitas	30 Orang	250.000.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
	KPU 7	Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lanjut serta percepatan penurunan stunting					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di kampung Angka Harapan Hidup	100 % 2 : 1000 RTT : 1000 Pdd 4 Layanan 69.79 Tahun	48.279.981.559,38	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	14.741.462.346,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	640.838.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	KPU 8	Peningkatan jangkauan jaminan kesehatan nasional (JKN)					
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kesakitan Malaria di Papua Barat	7,98 Per 1000 Penduduk	1.336.345.115,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			0,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Kesehatan	Dinas Kesehatan
	KPU 9	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, kusta, frambusia, filariasis, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain)					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Angka Kesakitan Malaria di Papua Barat	7,98 Per 1000 Penduduk	1.336.345.115,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			0,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	284.378.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
	PU	Akselerasi Akses dan mutu Pelayanan Pendidikan					
	KPU 10	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		Program Pengelolaan Pendidikan				Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Khusus				Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				Pendidikan	Dinas Pendidikan
	KPU 19	Pemajuan dan pelestarian bahasa, (pendidikan) budaya, dan sastra					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		Program Pembinaan Perpustakaan				Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			1.300.000.000,00	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	300.000.000,00	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	PU	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)					
	KPU 20	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial		Program Rehabilitasi Sosial				Sosial	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Pantii			3.490.000.000,00	Sosial	Dinas Sosial
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	50.000.000,00	Sosial	Dinas Sosial

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
		Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Komoditas unggulan					
	KPU 21	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah) 18.638 Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta) 24237.83 37703.06 Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar) 41.53 Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah) 45.22 Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta) 51.59 83.00 Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	3.932.544.900,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	244.274.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
	KPU 22	Optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih/bibit					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan			Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	18.638			
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	24237.83			
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	37703.06	3.932.544.900,00		
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	41.53			
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	45.22			
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	51.59			
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			2.300.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengelolaan penerbitan sertifikat benih				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
	KPU 23	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Progam Penyuluhan Pertanian				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
	KPU 24	Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			1.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	KPU 27	Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan modal dan kemudahan berusaha					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	3 Unit Usaha	150.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	PU	Pengembangan Pariwisata					
	KPU 32	Penyediaan dan pengembangan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi, dan amenities dengan prinsip pariwisata berkelanjutan			500.000.000,00		
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Daerah yang Inklusif							
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			100.000.000,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	50.000.000,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	KPU 33	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			524.972.996,10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif			424.972.996,10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif daerah				Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	KPU 35	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Produktifitas Tenaga kerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	02,20 Persen 17,69 Persen 2,50 Persen	1.600.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Persen	1.500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	30 Orang	500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	PU	Optimalisasi Investasi sehingga meningkatkan nilai PMA dan PMD					
	KPU 42	Peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Produktifitas Tenaga kerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	02,20 Persen 17,69 Persen 2,50 Persen	1.600.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Persen	1.500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	30 Orang	500.000.000,00	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	KPU 43	Pembinaan dan pendampingan utamanya kepada pelaku usaha lokal					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)			3.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	PU	Pengembangan Pangan Lokal					
	KPU 45	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk memenuhi pangan lokal					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan			Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	18.638			
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	24237.83			
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	37703.06	3.932.544.900,00		
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	41.53			
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	45.22			
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	51.59			
		Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman			2.300.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	244.274.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
	KPU 46	Optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran bibit untuk memenuhi pangan lokal					
Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			2.400.400.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Penataan prasarana pertanian				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	50 Ha	300.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
	KPU 47	Pemberdayaan kapasitas dan masyarakat peningkatan dalam pengelolaan pangan lokal					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			3.650.000.000,00	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			1.700.000.000,00	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	800.000.000,00	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	KPU 49	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			517.055.100,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi				Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
		Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150 Ha	400.000.000,00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan
	KPU 50	Peningkatan diversifikasi pangan local					
Membangun Pertanian yang Mandiri, Berdaulat dan Berkelanjutan		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			3.650.000.000,00	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan			1.150.000.000,00	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	PU	Optimalisasi penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)					
	KPU 53	Membangun konektivitas antar dan intra wilayah di Papua Barat					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan	40.14	334.245.881.294,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	108.006.545.500,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
	KPU 54	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (bid. Ekonomi)					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan			20.000.000.000,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral				Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	150 Unit	10.000.000.000,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	KPU 55	Tingkat elektrifikasi					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan			22.009.061.685,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			350.000.000,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	1 Dokumen	350.000.000,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	KPU 57	Pembangunan Infrastruktur Dasar air minum layak dan sanitasi layak serta rumah layak huni					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mudah Diakses dan Berkualitas		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	36	40.760.868.000,50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	250.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
	PU	Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi					
	KPU 74	Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi					
Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Menuju Good Governance		Program Pengelolaan Keuangan Daerah			1.073.703.702.259,00	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PU	Kartu Papua Barat Pintar					
	KPU 79	Kartu Papua Barat Pintar					

Prioritas Daerah	KODE	PU/ KPU/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2026			
				T	Rp.		
Optimalisasi Otsus Untuk Menyejahterakan OAP di Papua Barat		Program Pengelolaan Pendidikan			89.685.313.507,46	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP			2.975.000.000,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	700 Orang	2.975.000.000,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	PU	Bantuan Stimulan Bagi UMKM OAP					
	KPU 80	Bantuan Stimulan Bagi UMKM OAP					
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dan Investasi Daerah yang Inklusif		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)			3.000.000.000,00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Kecil				Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Bab ini memuat capaian serta arahan pembangunan per wilayah Kabupaten Se Provinsi Papua Barat yang akan dikerjakan sesuai dengan kewenangan Provinsi.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah adalah mengupayakan terwujudnya sinergi kebijakan antara Provinsi dan Kabupaten, dengan memperhatikan dan menampung aspirasi dan kebutuhan Kabupaten, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan pembangunan wilayah melibatkan serangkaian langkah dan kaidah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Selain itu pengembangan kewilayahan Provinsi Papua Barat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

5.2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN

Pada tahun 2026 diharapkan konsolidasi otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat diharapkan sudah semakin mantap dan seluruh pemangku pembangunan sudah bisa bergerak secara baik dalam koridor otonomi khusus. Dalam perspektif tersebut, Tema Pembangunan Daerah yang diusung pada tahun 2026 adalah ***Penguatan Fondasi Transformasi dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Reformasi Tata Kelola, Serta Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Pertanian, Dalam Koridor Otonomi Khusus.*** Sedangkan Prioritas yang menjadi panduan bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Dan Investasi Daerah Yang Inklusif
3. Membangun Pertanian Yang Mandiri, Berdaulat Dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Mudah Diakses Dan Berkualitas
5. Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Dan Kondusivitas Daerah
6. Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahn Yang Baik Menuju *Good Governance*
7. Optimalisasi Otonomi Khusus Untuk Mensejahterahkan Orang Asli Papua Di Papua Barat

Arah pembangunan masing-masing Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, sebagai berikut:

5.2.1 Kabupaten Fak-fak

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Fak-fak di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Fak-fak

Indikator	Capaian Kinerja Pembangunan			
	2022	2023	2024	Keterangan
IPM [UHH SP2020]	70,26	70,85	71,52	Naik
UHH (tahun) [SP2020]	71,22	71,44	71,57	Naik
RLS (tahun)	9,08	9,17	9,32	Naik
HLS (tahun)	14,64	14,78	14,79	Naik
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	7.678	7.851	8.159	Naik
TPT (%)	6,75	6,52	6,28	Turun
TPAK (%)	63,29	64,82	61,45	Naik
Tingkat Kemiskinan (%)	22,06	21,38	20,86	Turun
Gini Ratio	0,330	0,359		Naik
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,85	1,86	3,15	Naik
Prevalensi Stunting	29,00	30,50		Naik
IPG [UHH SP2020]	83,55	83,90	84,45	Naik
IDG	59,71	59,49		Turun
IKG	0,533	0,524		Turun
IKP	46,63	47,32	48,2	Rentan
Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	98,49	98,24	95,43	Turun
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	69,18	73,42	75,07	Naik
IKLH	86,65	60,33		cukup baik
IRB	105,20	105,20		Sedang

Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Fak-fak seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan dari 70,26 pada tahun 2022 menjadi 71,52 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Umur Harapan Hidup (UHH) naik dari 71,22 tahun pada 2022 menjadi 71,57 tahun pada 2024, menunjukkan membaiknya pelayanan kesehatan dan akses terhadap fasilitas hidup sehat. Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat dari 9,08 tahun pada 2022 menjadi 9,32 tahun pada 2024, menandakan meningkatnya partisipasi dan ketercapaian pendidikan dasar hingga menengah. Harapan Lama Sekolah naik tipis dari 14,64 tahun menjadi 14,79 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan hingga jenjang tinggi. Pengeluaran per kapita sebagai proksi kesejahteraan ekonomi naik dari Rp7.678.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp8.159.000,00 (delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada 2024, yang mengindikasikan daya beli masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat

Pengangguran Terbuka menunjukkan perbaikan, turun dari 6,75% pada 2022 menjadi 6,28% pada 2024, mencerminkan perbaikan iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik dari 63,29% ke 64,82% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 61,45% pada 2024, namun tetap menunjukkan partisipasi kerja yang relatif tinggi.

Tingkat Kemiskinan menurun dari 22,06% pada 2022 menjadi 20,86% pada 2024, mencerminkan dampak positif dari program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gini Ratio mengalami kenaikan dari 0,330 menjadi 0,359, yang menunjukkan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk, dan perlu menjadi perhatian khusus. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) meningkat signifikan dari 1,85% pada 2022 menjadi 3,15% pada 2024, menandakan adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pasca pandemi. Prevalensi Stunting justru naik dari 29% menjadi 30,5% pada 2023, yang mengindikasikan perlunya penguatan intervensi kesehatan gizi, sanitasi, dan edukasi keluarga. Indeks Pembangunan Gender terus meningkat dari 83,55 menjadi 84,45, yang mencerminkan peningkatan peran dan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender sedikit menurun dari 59,71 ke 59,49, menandakan masih adanya tantangan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Indeks Ketimpangan Gender menurun dari 0,533 menjadi 0,524, mengindikasikan ketimpangan gender berangsur menurun, meskipun masih memerlukan penguatan intervensi afirmatif. Indeks Ketahanan Pangan meningkat dari 46,63 menjadi 48,2, namun masih dalam kategori *rentan*, menandakan urgensi dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menurun dari 98,49% menjadi 95,43%, yang perlu ditindaklanjuti dengan penguatan infrastruktur air bersih. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 69,18% menjadi 75,07%, mencerminkan perbaikan signifikan dalam pelayanan sanitasi dasar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup turun dari 86,65 menjadi 60,33, walau masih dalam kategori cukup baik, tetapi menunjukkan perlunya peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Indeks Risiko Bencana tetap berada pada angka 105,20, yang termasuk kategori *risiko sedang*, menandakan perlunya penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.

Kabupaten Fakfak memiliki potensi pengembangan di sektor industri, perkebunan pala, perkebunan kenaf, perikanan dan peternakan sapi serta potensi pengembangan rumput laut.

5.2.2 Kabupaten Kaimana

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Kaimana di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Kaimana

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM [UHH SP2020]	67,72	68,31	69,2	naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	68,65	68,96	69,2	Naik
3	RLS (tahun)	8,74	8,8	8,97	Naik
4	HLS (tahun)	12,49	12,5	12,51	Naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	8.453	8.749	9.242	Naik

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
6	TPT (%)	3,34	3,24	4,96	Naik
7	TPAK (%)	77,43	64,64	66,95	Turun
8	Tingkat Kemiskinan (%)	15,29	14,57	14,41	Turun
9	Gini Ratio	0,425	0,392		Turun
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,03	3,32	2,13	Naik
11	Prevalensi Stunting	29,20	25,70		turun
12	IPG [UHH SP2020]	83,95	84,41	84,99	naik
13	IDG	73,35	80,75		naik
14	IKG	0,532	0,511		turun
15	IKP	45,43	47,12	48,19	rentan
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	85,88	87,41	85,15	naik
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	76,48	75,57	80,64	naik
18	IKLH	61,53	61,53		cukup baik
19	IRB	122,00	122,00		sedang

Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Kaimana seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan konsisten dari 67,72 pada 2022 menjadi 69,20 pada 2024, yang menggambarkan perbaikan umum dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 68,65 tahun menjadi 69,20 tahun, mengindikasikan peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan kualitas hidup penduduk Kaimana. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 8,74 tahun menjadi 8,97 tahun, menunjukkan semakin banyak penduduk yang menamatkan pendidikan dasar hingga menengah. Harapan Lama Sekolah (HLS) tetap mengalami sedikit kenaikan dari 12,49 tahun ke 12,51 tahun, menunjukkan stabilnya ekspektasi terhadap akses pendidikan di masa depan. Pengeluaran per kapita terus meningkat dari Rp8.453.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp9.242.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan dari 3,34% menjadi 4,96%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, meski kondisi sebelumnya lebih baik dari rata-rata provinsi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dari 77,43% pada 2022 menjadi 64,64% pada 2023, kemudian sedikit naik ke 66,95% pada 2024, namun masih menunjukkan perlunya upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pasar kerja. Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan bertahap dari 15,29% menjadi 14,41%, yang menandakan keberhasilan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Gini Ratio menurun dari 0,425 menjadi 0,392, mengindikasikan menurunnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, dan ini merupakan tren positif. Laju

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) meningkat dari 1,03% pada 2022 menjadi 3,32% pada 2023, meskipun menurun menjadi 2,13% pada 2024, namun tetap menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih kuat dibanding awal periode. Prevalensi Stunting menunjukkan kemajuan signifikan, turun dari 29,2% menjadi 25,7%, yang merupakan hasil positif dari upaya percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten. Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus naik dari 83,95 ke 84,99, menandakan peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 73,35 menjadi 80,75, menunjukkan makin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0,532 menjadi 0,511, yang berarti ketimpangan gender dalam pembangunan semakin menurun. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) naik dari 45,43 menjadi 48,19, namun masih dalam kategori rentan, sehingga perlu perhatian terhadap distribusi, akses, dan ketersediaan pangan. Akses rumah tangga terhadap air minum layak mengalami fluktuasi, naik dari 85,88% menjadi 87,41% pada 2023, lalu sedikit menurun ke 85,15% pada 2024, menandakan perlunya peningkatan keandalan dan cakupan layanan. Akses sanitasi layak terus meningkat dari 76,48% menjadi 80,64%, mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) stabil di angka 61,53, yang tergolong cukup baik, meski masih perlu peningkatan pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran. Indeks Risiko Bencana (IRB) tetap berada pada angka 122,00, yang termasuk dalam kategori risiko sedang, menandakan pentingnya penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kaimana.

Kabupaten Kaimana memiliki potensi pengembangan di sektor Pariwisata (Teluk Triton), perkebunan pala dan perikanan.

5.2.3 Kabupaten Teluk Wondama

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Teluk Wondama di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Teluk Wondama

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM [UHH SP2020]	63,02	63,84	64,52	Naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	65,03	65,32	65,5	Naik
3	RLS (tahun)	7,20	7,27	7,38	Naik
4	HLS (tahun)	11,69	11,90	11,91	Naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	8.177	8.490	8.887	Naik
6	TPT (%)	2,86	2,77	2,39	Turun
7	TPAK (%)	72,77	69,13	72,57	Turun
8	Tingkat Kemiskinan (%)	30,06	28,90	28,47	Turun
9	Gini Ratio	0,386	0,403		Naik

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,19	2,77	3,67	Turun
11	Prevalensi Stunting	26,10	19,70		Turun
12	IPG [UHH SP2020]	79,72	79,91	80,55	Naik
13	IDG	47,39	52,94		Naik
14	IKG	0,59	0,59		Turun
15	IKP	31,95	32,93	36,76	sangat rentan
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	23,97	25,77	30,49	Naik
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	53,00	54,53	61,17	Naik
18	IKLH	87,66	87,66		sangat baik
19	IRB	143,74	139,90		Sedang

Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 63,02 menjadi 64,52, menandakan peningkatan bertahap dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Wondama. Umur Harapan Hidup (UHH) naik dari 65,03 tahun pada 2022 menjadi 65,5 tahun pada 2024, mencerminkan perbaikan layanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan umum. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dari 7,20 tahun menjadi 7,38 tahun, menunjukkan semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 11,69 tahun menjadi 11,91 tahun, menunjukkan peningkatan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan jangka panjang. Pengeluaran per kapita naik dari Rp8.177.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp8.887.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), menandakan pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 2,86% menjadi 2,39%, mencerminkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya lapangan kerja lokal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit menurun dari 72,77% menjadi 72,57%, setelah sempat turun tajam di 2023, menandakan perlunya penguatan keterlibatan angkatan kerja secara konsisten. Tingkat Kemiskinan menurun dari 30,06% menjadi 28,47%, yang menunjukkan tren positif dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun masih tergolong tinggi dan memerlukan intervensi berkelanjutan. Gini Ratio meningkat dari 0,386 menjadi 0,403, yang menunjukkan adanya pelebaran kesenjangan pendapatan yang perlu diantisipasi. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) mengalami fluktuasi namun kembali naik dari 2,77% pada 2023 menjadi 3,67% pada 2024, menandakan pemulihan dan pergerakan positif perekonomian daerah. Prevalensi Stunting turun drastis dari 26,10% menjadi 19,70%, yang merupakan capaian signifikan dan menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kenaikan dari 79,72 ke 80,55,

menunjukkan semakin meningkatnya kesetaraan akses perempuan dalam pendidikan dan kesehatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 47,39 menjadi 52,94, mencerminkan perbaikan peran perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik lokal. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tetap di angka 0,59, namun hal ini menandakan ketimpangan gender masih relatif tinggi dan perlu diturunkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih kuat. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) naik dari 31,95 menjadi 36,76, tetapi masih dalam kategori sangat rentan, mengindikasikan perlunya penguatan ketersediaan, distribusi, dan akses pangan. Akses rumah tangga terhadap air minum layak meningkat dari 23,97% menjadi 30,49%, menunjukkan adanya progres, namun angka ini masih jauh dari memadai dan memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur air bersih. Akses sanitasi layak meningkat dari 53,00% menjadi 61,17%, yang merupakan capaian positif dalam peningkatan kesehatan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap tinggi pada angka 87,66, yang menunjukkan kondisi lingkungan di Kabupaten Teluk Wondama tergolong sangat baik, perlu dijaga dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Indeks Risiko Bencana (IRB) turun dari 143,74 menjadi 139,90, namun tetap dalam kategori risiko sedang, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana harus terus diperkuat.

Potensi daerah di Kabupaten Teluk Wondama memiliki potensi pengembangan di sector perkebunan kelapa, tanaman pangan sagu dan perikanan, potensi pengembangan hasil laut (Rumput laut dan teripang). Pengembangan wisata budaya Bukit Aitumeri.

5.2.4 Kabupaten Teluk Bintuni

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Teluk Bintuni di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM] UHH SP2020[68,29	69,01	69,79	Naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	67,38	67,75	68,05	Naik
3	RLS) tahun(8,35	8,51	8,67	Naik
4	HLS) tahun(12,43	12,44	12,62	Naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	9.979	10.324	10.592	Naik
6	TPT(%)	3,58	3,52	3,16	Turun
7	TPAK(%)	70,58	69,33	70,07	Turun
8	Tingkat Kemiskinan(%)	29,73	28,24	26,99	Turun
9	Gini Ratio	0,377	0,383		Naik
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK(%)	2,01	6,05	29,22	Naik
11	Prevalensi Stunting	22,80	19,60		Turun
12	IPG] UHH SP2020[86,57	86,77	86,87	Naik
13	IDG	57,80	53,82		Turun
14	IKG	0,57	0,56		Turun
15	IKP	39,37	40,88	43,12	Rentan

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak(%)	87,54	87,87	89,90	Naik
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak(%)	78,56	75,52	75,77	Turun
18	IKLH	59,60	59,60		kurang baik
19	IRB	166,80	166,80		Tinggi

Capaian Kinerja di Kabupaten Teluk Bintuni seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,29 menjadi 69,79, menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Umur Harapan Hidup (UHH) naik dari 67,38 tahun menjadi 68,05 tahun, mencerminkan perbaikan akses layanan kesehatan dan peningkatan taraf kesejahteraan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 8,35 tahun menjadi 8,67 tahun, menunjukkan peningkatan pencapaian pendidikan dasar oleh penduduk. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,43 tahun menjadi 12,62 tahun, menunjukkan ekspektasi positif terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda. Pengeluaran per kapita naik dari Rp9.979.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp10.592.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)., yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan perbaikan kesejahteraan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 3,58% menjadi 3,16%, menandakan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan iklim investasi daerah yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami sedikit penurunan dari 70,58% menjadi 70,07%, namun masih menunjukkan tingkat partisipasi kerja yang cukup tinggi.

Tingkat Kemiskinan menurun signifikan dari 29,73% menjadi 26,99%, mencerminkan efektifnya program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Gini Ratio naik dari 0,377 menjadi 0,383, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ekonomi yang inklusif. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) melonjak tajam dari 2,01% menjadi 29,22% pada 2024, yang mencerminkan ledakan aktivitas ekonomi, kemungkinan dipengaruhi oleh proyek strategis atau sektor unggulan yang tumbuh pesat. Prevalensi Stunting menurun dari 22,80% menjadi 19,60%, menandakan perbaikan dalam intervensi gizi, sanitasi, dan kesehatan ibu-anak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus meningkat dari 86,57 menjadi 86,87, menunjukkan semakin tingginya kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) justru menurun dari 57,80 menjadi 53,82, menandakan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun sedikit dari 0,57 menjadi 0,56, namun tetap menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) meningkat dari 39,37 menjadi 43,12, namun masih dikategorikan sebagai rentan, sehingga perlu peningkatan produksi dan distribusi pangan lokal. Akses rumah tangga terhadap air minum layak meningkat dari 87,54% menjadi 89,90%, menunjukkan capaian positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak menurun dari 78,56% menjadi 75,77%, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada penyediaan

infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap stagnan di angka 59,60, yang tergolong kurang baik, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola lingkungan dan pengendalian pencemaran. Indeks Risiko Bencana (IRB) berada pada angka 166,80, yang dikategorikan sebagai tinggi, menandakan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat kerentanan yang signifikan terhadap bencana, dan perlu diperkuat sistem mitigasi dan adaptasinya.

Potensi Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi pengembangan di sektor perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan sagu dan perikanan.

5.2.5 Kabupaten Manokwari

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Manokwari di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Manokwari

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM] UHH SP2020[73,92	74,52	75,15	naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	71,91	72,25	72,51	naik
3	RLS	8,45	8,54	8,67	naik
4	HLS	13,77	13,78	13,79	naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.179	12.566	13.008	naik
6	TPT(%)	5,41	5,97	5,34	Turun
7	TPAK(%)	63,88	68,19	70,59	Naik
8	Tingkat Kemiskinan(%)	19,9	18,73	18,45	Turun
9	Gini Ratio	0,390	0,388		Turun
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK(%)	2,05	0,96	2,97	Naik
11	Prevalensi Stunting	36,60	N/A		Tinggi
12	IPG] UHH SP2020[84,39	84,93	85,36	Naik
13	IDG	71,36	74,12		Naik
14	IKG	0,48	0,49		Naik
15	IKP	67,41	66,86	71,81	Tahan
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak(%)	81,05	83,27	84,40	Naik
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak(%)	82,58	86,54	89,13	Naik
18	IKLH	78,41	78,41		Baik
19	IRB	148,96	165,71		Tinggi

Capaian Kinerja di Kabupaten Manokwari seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami kenaikan dari 73,92 pada 2022 menjadi 75,15 pada 2024, menempatkan Manokwari sebagai daerah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Papua Barat, mencerminkan

capaian baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 71,91 tahun menjadi 72,51 tahun, menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dan meningkatnya harapan hidup penduduk.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik dari 8,45 tahun menjadi 8,67 tahun, memperlihatkan peningkatan dalam penyelesaian pendidikan dasar oleh masyarakat. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat secara stabil dari 13,77 menjadi 13,79 tahun, yang menandakan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi masih terjaga. Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp12.179.000,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp13.008.000,00 (tiga belas juta delapan ribu rupiah), yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat Manokwari yang kuat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,97% menjadi 5,34%, setelah sempat naik pada 2023, menandakan pemulihan penyerapan tenaga kerja di tahun 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami tren meningkat dari 63,88% menjadi 70,59%, menunjukkan perbaikan dalam partisipasi kerja dan dinamika pasar tenaga kerja yang aktif. Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 19,90% menjadi 18,45%, mengindikasikan efektivitas intervensi pengurangan kemiskinan meski angka kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Gini Ratio menurun sedikit dari 0,390 menjadi 0,388, yang menunjukkan sedikit perbaikan dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) meningkat dari 0,96% pada 2023 menjadi 2,97% pada 2024, menandakan adanya pemulihan aktivitas ekonomi lokal yang cukup baik pasca perlambatan. Prevalensi Stunting pada 2022 tercatat tinggi di angka 36,60%, dan data tahun 2024 belum tersedia. Namun angka tersebut menandakan perlunya perhatian serius terhadap program gizi dan kesehatan anak di Manokwari. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 84,39 menjadi 85,36, menunjukkan peningkatan kesetaraan gender, khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) naik dari 71,36 menjadi 74,12, mencerminkan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam peran strategis di masyarakat dan pemerintahan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami kenaikan dari 0,48 menjadi 0,49, menunjukkan adanya penurunan ketimpangan, meski masih perlu penguatan regulasi yang responsif gender. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) naik dari 67,41 menjadi 71,81, berada dalam kategori tahan, yang mengindikasikan kondisi ketahanan pangan relatif baik, namun tetap perlu dipertahankan dalam jangka panjang. Akses rumah tangga terhadap air minum layak meningkat dari 81,05% menjadi 84,40%, mencerminkan peningkatan akses terhadap layanan dasar yang penting untuk kesehatan masyarakat. Akses terhadap sanitasi layak juga meningkat signifikan dari 82,58% menjadi 89,13%, menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kebersihan dan kesehatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap berada di angka 78,41, yang dikategorikan baik, menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan berjalan cukup efektif. Indeks Risiko Bencana (IRB) meningkat dari 148,96 menjadi 165,71, dan berada dalam kategori tinggi, menandakan bahwa risiko bencana masih cukup signifikan dan menuntut penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.

Potensi Daerah di Kabupaten Manokwari yaitu pengembangan di sektor tanaman pangan jagung, padi dan ubi jalar, sektor perkebunan kelapa sawit dan kakao, sektor perikanan, sektor peternakan sapi, kambing, ayam, telur dan babi, dan sektor wisata memiliki potensi pengembangan wisata Budaya Pulau Mansinam.

5.2.6 Manokwari Selatan

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Manokwari Selatan di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.6 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM] UHH SP2020[60,68	61,55	62,45	Naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	67,84	68,09	68,26	Naik
3	RLS	6,90	6,96	7,17	Naik
4	HLS	12,37	12,56	12,78	Naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	5.691	5.948	6.139	Naik
6	TPT(%)	1,06	1,56	2,54	Naik
7	TPAK(%)	77,40	80,47	81,14	Naik
8	Tingkat Kemiskinan(%)	28,55	27,80	26,83	Turun
9	Gini Ratio	0,339	0,378		naik
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK(%)	2,01	2,10	7,00	naik
11	Prevalensi Stunting	27,20	20,40		turun
12	IPG] UHH SP2020[65,65	66,82	67,89	naik
13	IDG	63,66	63,86		naik
14	IKG	0,49	0,48		turun
15	IKP	69,46	67,12	74,91	tahan
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak(%)	89,30	85,71	83,12	turun
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak(%)	88,42	91,03	91,74	naik
18	IKLH	86,90	86,90		sangat baik
19	IRB	160,35	160,35		tinggi

Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan dari 60,68 menjadi 62,45, mencerminkan perbaikan secara bertahap dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di Manokwari Selatan. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 67,84 tahun menjadi 68,26 tahun, menandakan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup secara umum. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari 6,90 tahun menjadi 7,17 tahun, menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,37 menjadi 12,78 tahun, memperlihatkan harapan masyarakat terhadap peningkatan jenjang pendidikan di masa depan. Pengeluaran per kapita naik dari Rp5.691.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp6.139.000,00 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),.

menunjukkan perbaikan ekonomi rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 1,06% menjadi 2,54%, menandakan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja meski partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 77,40% menjadi 81,14%, mencerminkan semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Tingkat Kemiskinan menurun dari 28,55% menjadi 26,83%, yang mencerminkan tren positif dalam penanggulangan kemiskinan meskipun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Gini Ratio meningkat dari 0,339 menjadi 0,378, yang menandakan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan perlu perhatian dalam pemerataan hasil pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) melonjak dari 2,01% menjadi 7,00%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dalam struktur ekonomi lokal. Prevalensi Stunting menurun dari 27,20% menjadi 20,40%, memperlihatkan keberhasilan intervensi program kesehatan dan gizi anak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 65,65 menjadi 67,89, menandakan peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan dari 63,66 menjadi 63,86, meskipun peningkatannya masih terbatas dan perlu diperkuat. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sedikit menurun dari 0,49 menjadi 0,48, yang mencerminkan masih adanya ketimpangan gender yang perlu diatasi dengan kebijakan afirmatif. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) meningkat dari 69,46 menjadi 74,91, yang tergolong dalam kategori tahan, menandakan perbaikan dalam ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan di wilayah ini. Akses rumah tangga terhadap air minum layak justru menurun dari 89,30% menjadi 83,12%, menandakan perlunya perbaikan infrastruktur dan kualitas pelayanan air bersih. Akses sanitasi layak mengalami peningkatan dari 88,42% menjadi 91,74%, yang merupakan capaian baik dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) stabil di angka 86,90, dan tergolong sangat baik, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kondisi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Indeks Risiko Bencana (IRB) tetap tinggi di angka 160,35, yang berarti daerah ini sangat rentan terhadap bencana dan perlu upaya mitigasi yang lebih intensif.

Potensi Daerah di Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi pengembangan di sektor Perkebunan Kakao, Sektor Perikanan, dan Sektor Peternakan Sapi.

5.2.7 Kabupaten Pegunungan Arfak

Capaian Kinerja Pembangunan dan indikator capaian Kabupaten Pegunungan Arfak di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7 Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pegunungan Arfak

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
1	IPM] UHH SP2020[57,01	57,82	58,71	naik
2	UHH (tahun) [SP2020]	67,5	67,71	67,79	naik
3	RLS) tahun(5,34	5,51	5,72	naik
4	HLS) tahun(11,78	11,79	11,8	naik
5	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	5.203	5.438	5.722	naik
6	TPT(%)	0,12	0,15	0,31	naik
7	TPAK(%)	93,75	94,49	92,19	naik

Indikator		Capaian Kinerja Pembangunan			
		2022	2023	2024	Ket.
8	Tingkat Kemiskinan(%)	33,71	32,29	31,76	turun
9	Gini Ratio	0,365	0,358		naik
10	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK(%)	13,39	9,53	10,85	naik
11	Prevalensi Stunting	51,5	34,7		turun
12	IPG] UHH SP2020[77,73	78,94	79,99	naik
13	IDG	45,09	38,21		turun
14	IKG	0,645	0,651		naik
15	IKP	34,90	32,87	35,53	sangat rentan
16	Rumah tangga dengan akses air minum layak(%)	77,17	71,21	72,50	turun
17	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak(%)	34,98	30,98	49,90	naik
18	IKLH	87,85	87,85		sangat baik
19	IRB	160,35	160,35		tinggi

Capaian Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 57,01 menjadi 58,71, menunjukkan perbaikan bertahap dalam pembangunan SDM, walau masih tergolong rendah secara provinsi maupun nasional. Umur Harapan Hidup (UHH) naik dari 67,5 tahun menjadi 67,79 tahun, mencerminkan adanya perbaikan layanan dasar kesehatan dan akses terhadap kebutuhan dasar hidup sehat. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 5,34 tahun menjadi 5,72 tahun, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dasar masih rendah, namun mengalami perbaikan secara perlahan. Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan terbatas dari 11,78 menjadi 11,80 tahun, yang mengindikasikan keterbatasan ekspektasi masyarakat terhadap akses pendidikan lanjutan. Pengeluaran per kapita naik dari Rp5.203.000,00 (lima juta dua ratus tiga ribu rupiah) menjadi Rp5.722.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)., mengindikasikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meski nilainya masih relatif rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 0,12% menjadi 0,31%, tetapi tetap tergolong sangat rendah, menunjukkan masih kuatnya ikatan sosial dan aktivitas subsisten di wilayah ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tetap tinggi di atas 90%, meskipun sedikit menurun menjadi 92,19% pada 2024, menandakan dominannya aktivitas kerja informal di masyarakat Arfak.

Tingkat Kemiskinan turun dari 33,71% menjadi 31,76%, tetapi tetap merupakan salah satu yang tertinggi di Papua Barat, memerlukan pendekatan lebih intensif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,365 menjadi 0,358, menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan, walau belum signifikan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) tinggi dan cukup stabil, dari 13,39% pada 2022 menjadi 10,85% pada 2024, menandakan dinamika ekonomi lokal cukup baik meskipun dalam skala terbatas. Prevalensi Stunting turun drastis dari 51,5% menjadi 34,7%, mencerminkan keberhasilan intervensi gizi dan perbaikan sanitasi meski angka stunting masih di atas ambang batas

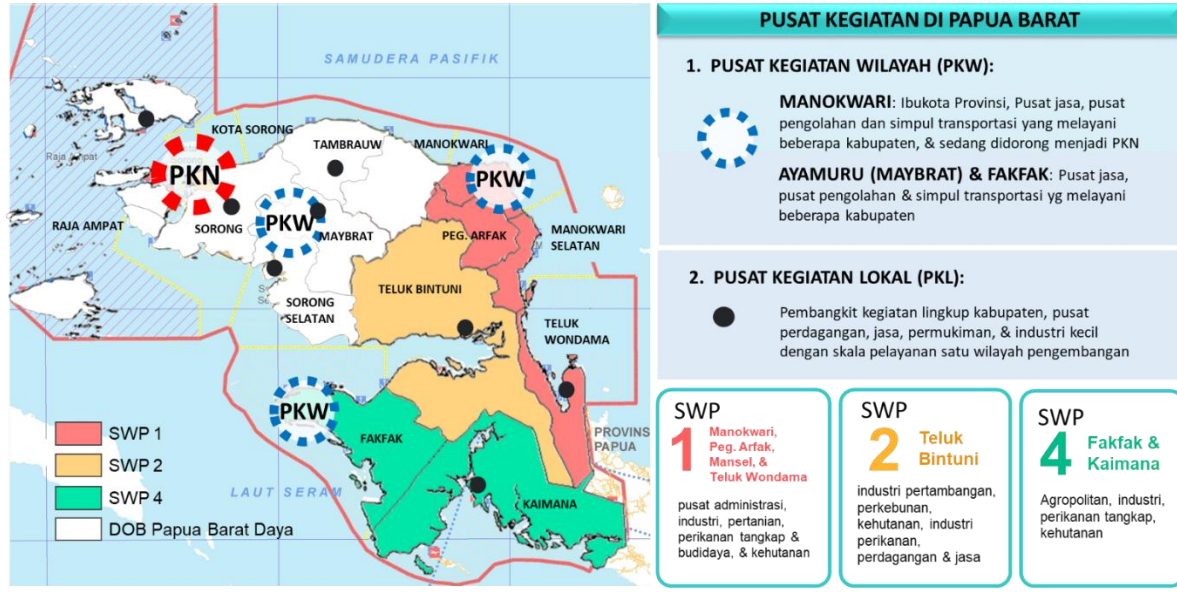
nasional. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 77,73 menjadi 79,99, mencerminkan perbaikan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan kesehatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) justru menurun tajam dari 45,09 menjadi 38,21, menandakan tantangan serius dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) naik dari 0,645 menjadi 0,651, mengindikasikan bahwa kesenjangan gender masih cukup tinggi dan membutuhkan strategi afirmatif lebih konkret. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sedikit meningkat dari 34,90 menjadi 35,53, namun masih tergolong sangat rentan, mengindikasikan keterbatasan dalam produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan bergizi. Akses rumah tangga terhadap air minum layak menurun dari 77,17% menjadi 72,50%, menandakan kemunduran dalam cakupan dan kualitas infrastruktur air bersih yang perlu segera diatasi. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak meningkat dari 34,98% menjadi 49,90%, yang menunjukkan perbaikan signifikan, namun masih di bawah standar pelayanan dasar. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap tinggi pada angka 87,85, tergolong sangat baik, mencerminkan kondisi lingkungan alam Pegunungan Arfak yang masih lestari dan terjaga. Indeks Risiko Bencana (IRB) berada pada angka 160,35, tergolong tinggi, menunjukkan urgensi peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas mitigasi bencana di wilayah ini.

Potensi Daerah yang dimiliki Kabupaten Pegunungan Arfak seperti potensi pengembangan di sektor Perkebunan Kopi, Sektor Hortikultura dan Sektor wisata yaitu pengembangan ekowisata Danau Anggi.

Pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pengembangan kewilayahan Provinsi Papua Barat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratis, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah, serta draft RIPPP. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam periode pembangunan tahun 2023-2026 kebijakan umum pembangunan hijau berkelanjutan diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua Barat, terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan daerah menjadi hal yang penting mengingat tingginya potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun potensi pariwisata di Papua Barat. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 dan pasca penetapan DOB Papua Barat Daya, maka struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat disusun menjadi 3 SWP (Satuan Wilayah Pengembangan). Pembagian SWP nantinya juga diikuti dengan pengembangan pusat-pusat hierarki dan penyediaan jaringan infrastruktur terutama transportasi, sehingga akan tercipta keterkaitan antar SWP yang terintegratif di wilayah Provinsi Papua Barat (lihat Gambar V.1). Dengan beralihnya wilayah Kota Sorong menjadi bagian Provinsi Papua Barat Daya, maka diperlukan perencanaan pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan baru di Papua Barat.

Gambar V.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Daerah di Papua Barat



Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat

Sebagai wujud dari rencana pengembangan wilayah dalam RTRW dan hasil analisis kondisi kinerja pembangunan kabupaten di Papua Barat, maka terdapat 7 prioritas kewilayahan implementasi program sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.8 Prioritas 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS KEWILAYAHAN (1/2/3)						PPSB (OTSUS)		
		MANOKWARI	MANSEL	PEG. ARFAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	FAKFAK		KAIMANA	
1	Akselerasi akses dan mutu Kesehatan	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak	-	-	√	√	√	√	√	-
		Penugasan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan bergerak	-	-	√	√	√	√	√	-
		Percepatan penurunan stunting	-	-	√	√	√	√	√	-
		Pemberian keamanan, insentif, dan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas	-	-	√	√	√	√	√	-
		Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	-	-	√	√	√	√	√	-
		Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	-	-	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lanjut	-	-	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan jangkauan jaminan kesehatan nasional (JKN)	-	-	√	√	√	√	√	-
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, kusta, frambusia, filariasis, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain)	-	-	√	√	√	√	√	-
		2	Akselerasi Akses dan mutu Pelayanan Pendidikan	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik	-	√	√	√	√	-
Penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual wilayah setempat	√			√	√	√	√	√	√	√
Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik yang bertugas	-			√	√	√	√	-	√	√
Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan sesuai standar	√			-	-	-	-	√	-	-
Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik	√			√	√	√	√	√	√	-
Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C) dan keaksaraan	-			√	√	√	√	-	√	√
Pengadaan Kelas Akselerasi bagi OAP sehingga dapat sekolah di Perguruan Tinggi yang berkualitas	√			-	-	-	-	√	-	√
Pembangunan Akademi Komunitas	√			-	-	-	-	√	-	-
Pembangunan Sekolah Luar Biasa	√			-	-	-	-	√	-	-
Pemajuan dan pelestarian bahasa, budaya, dan sastra	√			√	√	√	√	√	√	√
3	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan	Pemberian Jaminan Sosial bagi Lansia dan Kelompok Rentan (disabilitas dan Gender)	-	-	√	√	√	√	-	√

Tabel V.12 Prioritas 5 Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Kondusivitas Daerah

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PRIORITAS KEWILAYAHAN (1/2/3)							PPSB (OTSUS)	
		MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	PEGUNUNGAN ARFAK	TELUK BINTUNI	TELUK WONDAMA	FAKFAK	KAIMANA		
1	Harmonisasi Sosial dengan program prioritas	Peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan, dan masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan dialog	-	-	-	-	-	-	-	√
		Peningkatan keamanan dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan stabilitas dan lingkungan yang kondusi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penataan Tanah Ulayat dan tanah adat	Inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat serta tanah adat/ulayat dan hutan adat	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat dan hutan adat	√	√	√	√	√	√	√	-
		Penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang dilengkapi dengan peta delineasi tanah adat/ulayat dan hutan adat	√	√	√	√	√	√	√	-
		Peningkatan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah adat/ulayat dan hutan adat	√	√	√	√	√	√	√	√
		Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan resiliensi Bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam hal mitigasi bencana	√	√	√	√	-	-	-	-
		Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana dan perubahan iklim kepada masyarakat	√	√	√	√	-	-	-	-
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim	√	√	√	√	-	-	-	-
		Penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana	√	√	√	√	-	-	-	-
		Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan	√	√	√	√	-	-	-	-

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas harus telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendanaan daerah dapat didefinisikan sebagai bentuk keputusan keuangan untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penetapan rencana kerja dan pendanaan daerah Provinsi Papua Barat berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 periode pelaksanaan tahun ketiga serta target pembangunan nasional Tahun 2026 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2024. Sedangkan pendekatan penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 didasarkan pada pasal 7 Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu berorientasi pada proses pendekatan teknokratis, yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan perumusan prioritas pembangunan daerah; Kemudian Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan; Selanjutnya Pendekatan Politis, yaitu menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD; Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, berupa hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kampung, distrik, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Selain pendekatan diatas dilaksanakan pula Pendekatan Penyusunan Perencanaan sesuai amanah pasal 9 Permendagri 86 Tahun 2017 yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan : Tematik-Holistik: dalam mencapai sasaran prioritas daerah dirancang koordinasi berbagai PD atau lembaga yang terkait; Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Oleh karena itu, maka penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 meliputi penetapan target pencapaian beserta indikatornya dan indikasi penganggaran yang akan dibebankan pada APBD provinsi maupun sumber pendanaan lainnya serta lokasi pelaksanaannya

6.1 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan gambaran kondisi keuangan daerah Provinsi Papua Barat di masa lalu dan analisis terhadap berbagai faktor yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua Barat di masa datang maka diperkirakan adanya perkembangan kapasitas keuangan daerah yang tumbuh moderat dengan ruang fiskal tercipta cukup kecil untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah dalam horizon waktu berlakunya dokumen RKPD ini. Kedepan tantangan utama bagi Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan porsi pendapatan daerah dari PAD terutama dari sumber-sumber potensial yang belum tergalai.

Pengalokasian utama belanja daerah terutama akan dialokasikan pada pengeluaran mengikat dan pengeluaran wajib. Pengeluaran daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, sedangkan Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya gambaran belanja mengikat dan wajib yang terkandung dalam APBD Provinsi Papua Barat, antara lain:

- Belanja mengikat untuk membiayai program penunjang urusan provinsi yang harus dilaksanakan oleh PD terkait, termasuk belanja gaji, tunjangan dan kebutuhan rutin lain yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan;
- Belanja transfer mengikat terutama terdapat pada dana bagi Hasil migas dan sumber daya alam lainnya, disamping bagi hasil dari beberapa pos Pendapatan Asli daerah tertentu;
- Belanja program-program tertentu yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat, seperti misalnya belanja Pengawasan Pembangunan Daerah dan pembinaan aparatur
- Belanja fungsi Pendidikan yang mencapai 20 persen dari total belanja daerah yang teralokasi tidak hanya pada Dinas Pendidikan tapi juga pada Dinas terkait lainnya bahkan juga terdapat pada Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada kabupaten
- Belanja Bidang Kesehatan yang mencapai minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji yang juga teralokasi tidak hanya pada Dinas kesehatan tapi juga pada unit kesehatan lainnya termasuk Dana Hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan pada kabupaten/kota
- Belanja Bidang Infrastruktur daerah yang mencapai 40 persen dari total belanja daerah.
- Gambaran umum kerangka pendanaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 selanjutnya ditampilkan pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Uraian	2026
PENERIMAAN DAERAH	3.340.763.932.884,56
PENDAPATAN DAERAH	3.340.763.932.884,56
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN Dikurangi :	0
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH	4.911.733.767.607
Belanja Operasi	1.983.488.461.059,30
Belanja Transfer	1.060.987.781.625,85

Uraian	2026
Belanja Pengawasan Inspektorat	10.759.830.914,99
Belanja Pendidikan	717.322.060.999,04
Belanja Kesehatan	358.661.030.499,52
Belanja Infrastruktur (DAK FISIK + 0,25*DAU +DTI)	486.173.202.346,23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	934.893.222.344

Sedangkan plafon belanja berdasarkan Organisasi perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel VI.2 Indikasi Plafon Belanja PD Berdasarkan Kerangka Pendanaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026 (dalam Juta Rupiah)

No	Perangkat Daerah	2026
1	Dinas Pendidikan	137.436.833.081,47
2	Dinas Kesehatan	135.950.227.036,58
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	62.851.250.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	538.671.797.396,50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.808.904.313,12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.606.600.929,50
7	Dinas Sosial	29.807.702.638,60
8	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	27.049.209.656,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17.145.085.834,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	19.915.304.697,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	23.602.708.188,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.091.821.462,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	26.375.929.249,50
14	Dinas Perhubungan	75.130.002.132,50
15	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik	26.024.277.320,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	25.241.244.165,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu	13.561.071.285,00
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	35.032.206.629,50
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	18.334.600.796,10
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	12.548.830.772,50
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	37.639.980.546,00
22	BLUD KKP Kaimana Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat	800.000.000,00
23	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan	50.032.551.142,50
24	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	20.964.318.652,50
25	Dinas Kehutanan	98.845.417.606,00
26	Dinas Energi Dan Ber Daya Mineral	68.359.061.685,24
27	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23.043.243.483,00
28	Sekretariat Daerah	133.730.246.423,00
29	Biro Umum	24.240.000.001,25
30	Biro Administrasi Pimpinan	4.900.000.000,30
31	Biro Organisasi	3.500.000.000,00
32	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	6.909.999.746,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat	92.393.582.000,74

No	Perangkat Daerah	2026
34	Biro Hukum	4.849.999.900,00
35	Biro Perekonomian	4.999.920.111,00
36	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	5.500.000.000,00
37	Biro Administrasi Pembangunan	4.499.999.523,70
38	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	3.999.998.717,00
39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	118.729.942.131,75
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.966.045.200,50
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.285.770.048.928,65
42	Badan Pendapatan Daerah	43.407.824.963,50
43	Badan Kepegawaian Daerah	24.957.902.675,00
44	Badan Pengembangan Ber Daya Manusia Daerah	14.186.393.431,00
45	BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.737.194.040,00
46	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.859.843.740,50
47	Badan Penghubung Daerah	12.660.228.165,25
48	Inspektorat	31.851.803.831,78
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	54.288.308.724,97
50	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	50.468.589.700,00
Total Jumlah Belanja		3.570.278.052.654,00

6.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian peringkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Selanjutnya rekapitulasi jumlah program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 pada masing-masing urusan pemerintahan disajikan pada Tabel VI.3. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pemerintah daerah provinsi Papua Barat Tahun 2026 disajikan pada Tabel VI.4 dibawah ini. Sedangkan tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan daerah RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang bersumber dari RPJMD, RENSTRA PD dan Rencana Kerja PD dapat dilihat pada lampiran tabel dalam dokumen ini.

Tabel VI.3 Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Provinsi Papua Barat Tahun 2026 Pada Masing-Masing Urusan Pemerintahan

Urusan	Perangkat Daerah	Rekapitulasi		
		Program	Kegiatan	Subkegiatan
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	8	18
	Blud Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	3	9	14
	Dinas Kesehatan	5	16	55
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	15	27	64
	Dinas Pendidikan	3	13	38
	Dinas Sosial	5	13	31
	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	27
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	12	22
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	18	34

Urusan	Perangkat Daerah	Rekapitulasi		
		Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	16	39
	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	34
	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik	5	10	38
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9	17	42
	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	3	7	19
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	6	17	36
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	19	35
	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3	8	17
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu	5	12	32
	Dinas Perhubungan	3	9	17
	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	8	16	35
Urusan Pemerintahan Pilihan				
	Blud Kkp Kaimana Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat	2	2	2
	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	6	21	41
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	18	34
	Dinas Kehutanan	4	16	52
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6	16	24
	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8	15	33
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7	20	41
	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan	6	13	31
	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	8	16	35
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	5	9	12
	Biro Administrasi Pembangunan	3	10	19
	Biro Administrasi Pimpinan	1	8	18
	Biro Hukum	2	4	10
	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	4	9
	Biro Organisasi	2	6	12
	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1	3	9
	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	2	4	10
	Biro Perekonomian	2	5	12
	Biro Umum	1	9	26
	Sekretariat Daerah	1	8	21
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat	2	15	48
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Badan Kepegawaian Daerah	2	11	31
	Badan Pendapatan Daerah	3	13	45
	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2	10	26
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	8	18
	Badan Penghubung Daerah	2	8	27
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	65
	Blud Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	1	1
	Upt Samsat Kabupaten Fakfak	1	1	1
	Upt Samsat Kabupaten Kaimana	1	1	1
	Upt Samsat Kabupaten Manokwari	1	1	1

Urusan	Perangkat Daerah	Rekapitulasi		
		Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Upt Samsat Kabupaten Manokwari Selatan	1	1	1
	Upt Samsat Kabupaten Teluk Bintuni	1	1	1
	Upt Samsat Kabupaten Teluk Wondama	1	1	1
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
	Inspektorat	3	10	29
Unsur Pemerintahan Umum				
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	11	31
Unsur Kekhususan Dan Keistimewaan				
	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	2	10	36

Tabel VI.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2026

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PENDIDIKAN							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	Rasio	93	285,550,409,162	100	312,177,097,030	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi dan Numerasi	persen	100,00	285,550,409,162	100,00	312,177,097,030	
	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	95	285,550,409,162	100	312,177,097,030	
	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	Persen	92	285,550,409,162	100	312,177,097,030	
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	53,41	1,650,000,000	83,41	2,196,150,000	
	Persentase Kabupaten yang Menyediaan Pendidikan Akademi Komunitas	Persen	28,57	2,000,000,000	71,43	3,456,000,000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio	38,83	5,840,000,000	38,83	
Rasio guru/murid sekolah SMALB		Rasio	38,83	5,840,000,000	38,83	5,840,000,000	
Persentase Guru SLB yang tersertifikasi		Persentase	25	787,500,000	40	911,629,687	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase	15	220,000,000	65	235,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan khusus yang tersusun	Silabus	95	600,000,000	100	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
KESEHATAN							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1,9 : 1000	26.829.812.854	2.2 : 1000	35.710.480.909	DINAS KESEHATAN
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persentase	100	9.299.861.789	100	12.378.116.041	
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase	100	3.715.184.652	100	4.594.059.835	
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persentase	100	3.447.704.563	100	4.292.010.270	
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu	132,60	897.782.600	111,53	1.194.948.641	
	Angka Kematian Bayi (AKBy) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	8	897.782.600	6,5	1.194.948.641	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase	100	105.459.200	100	289.380.045	
	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persentase	100	16.868.734.000	100	22.452.284.955	
	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persentase	67,7	5.393.945.136	80,08	7.179.340.976	
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di kampung	Layanan	4	550.000.000	7	732.050.000	
	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase	75,88	420.102.989	85	559.157.078	
	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	1	1.907.635.260	3	2.539.062.531	
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persentase	90	934.007.849	90	1.779.793.308	
	Prevalensi HIV	Persentase	2,15	842.762.544	1,96	1.555.295.640	
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persentase	91	883.852.244	95	1.176.407.336	
	Persentase faskes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	Persentase	70	4.414.493.790	85	5.875.691.235	
	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok	Kab/Kota	2	458.852.244	6	610.732.336	
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi	Persentase	20,25	172.408.393	55,56	229.475.571	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	dalam sistem informasi kesehatan nasional						
	Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis	Persentase	30	1.623.196.472	80	2.577.802.785	
	Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	Persentase	20	1.003.241.800	80	1.484.328.685	
	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	7,98	403.933.600	2,73	1.654.512.026	
	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100	3.600.000.000	100	6.220.800.000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, KESEHATAN ALAT DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persentase	100	256,595,027	100	443,396,206	
	Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	Persentase	100	420,000,000	100	725,760,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	32.08	3,259,482,892	80	4,338,371,729	
	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	24	5,500,000,000	36	7,320,500,000	
	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-OAP	Persentase	17.4	7,892,640,000	25.056	11,365,401,600	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tipe RSUD Provinsi	Tipe	C	14.448.865.717	B	15.796.396.953	BLUD RSUD Provinsi
	Persentase SDM Nakes dan Non Nakes Bersertifikat keahlian pada RSUD Provinsi	Persentase	65	1,596,496,000	85	6,928,795,360	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan	persen	40,14	351.249.000.000	41,74	406.615.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	persen	74		75,00		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	95,6	5.000.000.000	96,1	5.788.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	persen	36	42.799.000.000	37,5	49.545.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persen	0,56	27.079.000.000	0,8	31.347.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	persen	35,03	20.087.550.000	47,5	23.253.850.069	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
							PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	Persen	100	8.400.000.000	100	9.724.050.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli	persen	35,03	5.250.000.000	43,52	6.077.531.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan irigasi Multi Komoditas	Persen	40,14	90.301.000.000	41,74	103.194.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	33	2.199.000.000	39	2.545.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	27,27	6.278.000.000	27,27	6.278.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	58,47	12.252.000.000	58,63	14.183.000.000	
	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	persen	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
SATPOL PP							
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	persen	100	1,700,000,000	100	5,200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	2.800.000.000,00	100	5.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	persen	100		100		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100		100		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100		100		
BPBD							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100,00	9,775,000,000	100,00	11,315,784,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Presentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100,00		100,00		
Sosial							
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM OAP Bantuan Sosial Afirmasi bagi Lansia dan Kelompok Rentan (Gender dan Disabilitas)	persen	50	3,302,000,000	100,00	3,640,000,000	DINAS SOSIAL
Tenaga Kerja							
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	12,51	550000	13,27	550000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Persen	73,30	550.000.000	77,78	550.000.000	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan Provinsi (%)	Persen	47,41	6.500.000.000	50,31	6.500.000.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	persen	0,71	1.000.000.000	0,75	1.000.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	persen	0,24	1.000.000.000	0,25	1.000.000.000	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	17,69	200.000.000	18,77	200.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	64,53	1.000.000.000	70,53	1.000.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen	4,69	1.000.000.000	4,98	1.000.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persen	14,00	150.000.000	14,00	150.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Persen	50	1.900.000.000	60	1.900.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	50	1.500.000.000	60	1.500.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada/tidak ada	20	300.000.000	20	300.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date pada kabupaten/kota di Papua Barat	persen	100	352.000.000	100	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Per 100 ribu perempuan	10/100 ribu Perempuan	1.350.000.000	10/100 ribu Perempuan	1.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	persen	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100	1.000.000.000	100	1.300.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	persen	80	1.000.000.000	80	1.300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	persen	80	370.000.000	80	385.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan organisasi pemerintah,	Persen	100	1.220.000.000	100	1.650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	persen	100	425.000.000	100	455.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	per 10 ribu anak	10/100ribu Anak	1.210.000.000	10/100ribu Anak	1.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pangan							
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daerah rentan pangan	Persen	42.32	1.648.000.000	27.32	1.800.814.096	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persen	90,89	Rp2.100.000.000	92,18	Rp2.431.012.500	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pertanahan							
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	70	560,000,000.00	100	590,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	Persen	70	15,000,000,000.00	100	19,000,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang di tetapkan	Persen	70	610,000,000.00	100	640,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Lingkungan Hidup							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	indeks	60	500,000,000.00	65	800,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Indeks	72.62	420,000,000	73.22	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	persen	20	520,000,000.00	100	550,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	persen	30	720,000,000.00	60	750,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	persen	35	1,100,000,000.00	70	1,170,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUMADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	40	400,000,000.00	60	550,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	persen	20	560,000,000.00	50	590,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persen	30	370,000,000.00	45	420,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasusu tindak pidana lingkungan hidup	persen	30	520,000,000.00	80	550,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	86,11	1.700.000.000	95,11	1.700.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN
	Persentase pasangan berakte nikah	Rasio	47	1.700.000.000	56	1.700.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	43	1.700.000.000	52	1.700.000.000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persentase	88,38	1.700.000.000	95,38	1.700.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase	6,61	1.700.000.000	12,61	1.700.000.000	
	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	48,12	1.700.000.000	60,12	1.700.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	100	918	100,00	3.709	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Persen	36,36	2.400.000.000	90,91	2.400.000.000	
	Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	Persen	4	2.400.000.000	10	2.400.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	100	300.000.000	100,00	300	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
							KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Cakupan Data Kondisi Sosial Ekonomi OAP	Persen	80		100		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat OAP	Persen	100	3.000.000.000	100	1.500.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Posyandu aktif	Persen	96,75	5.000.000.000	97,2	5.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Persentase kampung mandiri	Persen	0,05	1.800.000.000	5	1.800.000.000	
	Jumlah pembinaan kelompok PKK		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Keluarga Miskin Beresiko Stunting yang mendapatkan bantuan Air	Persen	77,02	2.000.000.000	77,47	2.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Bersih dan Sanitasi Layak di Kampung						MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung	Persen	0,4	350.000.000	0,4	350.000.000	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kampung mandiri	Persen	0	-	0,03	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Persentase kampung maju	Persen	0	-	0,03	1.000.000.000	
	Persentase kampung berkembang	Persen	0,15	2.400.000.000	0,15	2.400.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0,03	1.000.000.000	0,03	1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	Rumusan kebijakan dan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat			ada/tidak ada		ada/tidak ada	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan kampung yang dibina dan di awasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kampung	Persentase	100	500.000.000	100	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	persen	100	650.000.000	100	680.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Laju pertumbuhan penduduk	persen	70	355.000.000	70	370.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	persen	100	472	100,00	1.914	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	100	250.000.000	100	350.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perhubungan							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Provinsi		20	6.000.000.000	100	36.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	V/C Ratio di Jalan Provinsi		20	6.000.000.000	100	36.000.000.000	
	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	persen	20	6.000.000.000	100	36.000.000.000	
	Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	persen	20	6.000.000.000	100	36.000.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	persen	10		80	9.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	20		60	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut		20		60	2.000.000.000,00	
	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	persen	10		70	28.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton		500.000.000,00		1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
Komunikasi dan Informatika							
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Persen	100	300.000.000	100	1.600.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	100	500.000.000	100	650.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	40.00		100.00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase perluasan akses pasar, akses pembiayaan,	Persen	60.00	650,000,000	100.00	800,000,000	DINAS KOPERASI,

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha						USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Persen	65.00	450,000,000	100.00	600,000,000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persen	60.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen	60.00	650,000,000	100.00	800,000,000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	70.00	550,000,000	100.00	700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	70.00	300,000,000	100.00	450,000,000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen	60.00	550,000,000	100.00	700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase kesehatan Koperasi KSP/USP	Persen	40.00	550,000,000	100.00	700,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Persentase pertumbuhan UMKM yang di bina	Persen	60.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	DINAS KOPERASI,

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	40.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Persen	40.00	1,200,000,000	100.00	1,600,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	Persen	40.00	3,100,000,000	100.00	3,450,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penanaman Modal							
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	Persen	77.27	1,639,440,000	80.33	2.065.222.241	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	Persen	77.25	1,219,320,000	80.25	1.535.992.036	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Persen	33.33	1,311,120,000	99.99	1.651.633.597	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
							PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan	Persen	63.83	1,607,040,000	99.30	2.024.407.572	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan dan informasi penanaman modal yang berbasis aplikasi	Persen	89.00	442,800,000	97.89	557.800.474	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Kepemudaan, dan Olahraga							
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	Persen	70	1.700.000.000	80	2.500.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Persen	100	6.250.000.000	100	9.000.000.000	
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan (INMEN 02 Tahun 2025)	Persen					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Persen	100	700.000.000	100	950.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persen					
PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	1.050.000.000	100	1.450.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persen					
Statistik							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,3	200.000.000	3,8	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Persandian							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	400.000.000	100	700.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Kebudayaan							
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya guna pelestarian	Persen	40%	2.500.000.000,00	90%	4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum yang dikelola secara baik	Persen	40%	350.000.000,00	90%	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan guna pelestarian	Persen	40%	2.500.000.000,00	90%	4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan SDM Kesenian bersertifikat yang dibina	Persen	40%	2.500.000.000,00	90%	4.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan sejarah yang didokumentasi, dilindung, dan dimanfaatkan	Persen	40%	250.000.000,00	90%	500.000.000,00	
Perpustakaan							
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Persentase	100	1.700.000.000	100	2.500.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Cakupan Perpustakaan yang diakreditasi sesuai SNP	Persentase	100	600.000.000	100	900.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Persentase	70	-	80	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Persentase	100	1.300.000.000	100	1.900.000.000	
	Persentase Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat)	Persentase	100	1.700.000.000	100	2.500.000.000	
Kearsipan							
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip sesuai NSKP	Persen	100	700.000.000	100	950.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Digitalisasi Arsip dalam SIKN	Persen	100	550.000.000	100	700.000.000	
	Cakupan Pembinaan Kearsipan di Provinsi	Persen	100	500.000.000	100	750.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Kategori	B	600.000.000	A	900.000.000	
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Presentase Lembaga Kearsipan yang diakreditasi	Persentase	100	400.000.000	100	650.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Presentase Arsiparis yang disertifikasi	Persentase	100	600.000.000	100	850.000.000	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	Persen	100	1.100.000.000	100	1.400.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	50	1.700.000.000	80	2.300.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Kelautan dan Perikanan							
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya perikanan kewenangan Provinsi	Persen	75	362.994.696	83	479.152.999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.320	2.841.926.178	1.530	3.782.603.743	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks	96,4		98,2		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	75.000	4.968.820.635	95.000	6.613.500.265	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pariwisata							
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah wisatawan mancanegara	Orang	1100		1400		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	rata rata lama tinggal wisatawan	hari	2,25		3		
	Jumlah Event	event	3		6		

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	13	25.625	16,00	103.813	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen	83.00	21,150,000,000	93.00	24,484,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persen	80.00	20,950,000,000	88.00	24,252,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Perdagangan							
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	Persen	40.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PERLINDUNGAN KONSUMEN							DAN PERDAGANGAN
Perindustrian							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan ketersediaan data dan informasi pengembangan industri daerah	Persen	65.00	1,500,000,000	80.00	1,500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	7.00	4,000,000,000	15.00	4,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kehutanan							
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	Ha	1,529,818	61,477,000,000	1,695,868	66,422,000,000	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen	100	800,000,000	100	830,000,000	DINAS KEHUTANAN
Energi dan Mineral							
PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Persen	65.00	1,000,000,000.00	80.00	1,300,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	75.9	1,100,000,000.00	90	1,400,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona	Persen	65.00	1,100,000,000.00	80.00	1,400,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	165,822,211,377	100,00	218,885,319,019	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIRO ORGANISASI							
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	750,000,000	BB	1,500,000,000	BIRO ORGANISASI
	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	B	750,000,000	BB	1,500,000,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	A	1,700,000,000	A	2,500,000,000	
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	70	1,700,000,000	70	2,500,000,000	
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas Kerja Sama Daerah	persen	100	6,909,999,746	100,00	9,909,999,746	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	80	5,000,000,000	100	6,000,000,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIRO PEREKONOMIAN							

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	4,500,000,000	100,00	6,000,000,000	BIRO PEREKONOMIAN
Penghubung Daerah							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	11.936	100	48.459	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase capaian pelayanan publik yang dilaksanakan badan penghubung	persen	100	4.100	100,00	16.610	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Sekretariat DPRD							
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen		13.524.205.564		13.728.084.654	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen		25.383.363.208		25.766.020.581	
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen		10.697.146.116		10.858.406.931	
PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan DPRD, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD	Persen	85	2.988.158.219	100	3.058.206.125	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretariat MRP							
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA	Persentase Kelengkapan Alat MRP yang	Persen	100	4.915.302.585	100	6.542.267.739	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA BARAT	Memiliki Rencana Kerja Tahunan						PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
	Persentase Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	persen	100	1.495.446.370	100	1.990.439.117	
	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	persen	100	32.653.379.200	100	43.461.647.715	
Perencanaan Pembangunan Daerah							
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100,00	1.972.747.703	100,00	2.093.495.644	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100,00	1.972.747.703	100,00	2.093.495.644	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100,00	1.972.747.703	100,00	2.093.495.644	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	2.300.251.340	100	2.441.045.125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	816.000.000	100	865.945.728	
	Cakupan evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Persen	100	1.972.747.703	100	2.093.495.644	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Waktu penyampaian LKPD	Ya/Tidak	Ya	4.620.000.605	Ya	6.149.220.805	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	17.143.649.324	Tepat Waktu	22.818.197.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Waktu penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	-	
Pendapatan Daerah							
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio kemandirian keuangan daerah	Rasio	0.06	724,495,525	0.09	964,303,543	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persen	10	41,046,558,622	25	54,632,969,526	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persen	10	3,285,841,495	25	4,373,455,029	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan penerimaan PAD UPT Fak-Fak	Rp. Miliar	5	593	5	2.405	UPT SAMSAT KABUPATEN FAKFAK
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Kaimana	Rp. Miliar	5	594	5	2.411	UPT SAMSAT KABUPATEN KAIMANA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Manokwari	Rp. Miliar	5	1.205	5	4.889	UPT SAMSAT KABUPATEN MANOKWARI

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Raja Ampat	Rp. Miliar	5	415	5	1.685	UPT SAMSAT KABUPATEN RAJA AMPAT
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Sorong	Rp. Miliar	5	656	5	2.664	UPT SAMSAT KABUPATEN SORONG
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Sorong Selatan	Rp. Miliar	5	513	5	2.081	UPT SAMSAT KABUPATEN SORONG SELATAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Bintuni	Rp. Miliar	5	714	5	2.898	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Jumlah penerimaan PAD UPT Teluk Wondama	Rp. Miliar	5	492	5	1.996	UPT SAMSAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepegawaian Daerah							
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	persen	90-100	1.750.000.000	90-100	2.450.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Cakupan peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	persen	90-100	1.300.000.000	90-100	2.900.000.000	
	Cakupan peningkatan Kompetensi ASN	persen	90-100	2.600.000.000	90-100	5.380.000.000	
	Cakupan peningkatan Kualitas Data ASN dan Penataan SDM Aparatur	persen	90-100	2.200.000.000	90-100	4.750.000.000	
Badan Pengembangan SDM							

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	100,00	1.658.520.000	100,00	1.760.034.692	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan peningkatan kapasitas SDM	persen	100	4.379	100,00	17.306	BLUD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Inspektorat							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1	Persen	69	16,187,374,164	72	17,432,031,481	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	4,301,556,000	3	4,632,305,329	INSPEKTORAT
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3		3		
Penelitian dan Pengembangan							
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Riset Bidang Sosial Pemerintah yang dihasilkan	Persen	100,00	14.825.000.000	100,00	19.732.075.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Riset Ekonomi Pembangunan yang dihasilkan	Persen	100,00	7.150.000.000	100,00	9.516.650.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Cakupan Riset Pembinaan Masyarakat Daerah yang dihasilkan	Persen	100,00	1.925.000.000	100,00	2.562.175.000	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran 2026		Kondisi Akhir RPJMD 2029		PERANGKAT DAERAH
			T	Rp.	T	Rp.	
Kesatuan Bangsa dan Politik							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	persen	100	40,000,000,000	100	55,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100,00	150,000,000	100,00	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100,00	1,500,000,000	100,00	2,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	100,00	250,000,000	100,00	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase tingkat fasilitasi forkopimda	Persen	100,00	1,500,000,000	100,00	1,500,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	100,00	2,000,000,000	100,00	5,500,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target tahun 2026 dan akhir tahun perencanaan (2029)

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Provinsi Papua Barat. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel VII.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada Tabel VII.2.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel VII.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
1.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124,78	119,23	110,87
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,75	83,05	83,53
3.	Tingkat Kemiskinan	%	21,66	18,85	16,54
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,69	69,38	71,06
5.	Indeks Modal Manusia	Indeks	N.A	0,48	0,5
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,13	3,93	3,84
7.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	0	47,98	51,39
8.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	0	82	83,5
9.	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks	0	0	0
10.	Rasio Gini	Rasio	0,389	0,374	0,356
11.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	20,8	53,5	58,4
12.	PDRB ADHB per kapita	Rp	131,64	151,14	257,6
13.	PDRB ADHB non tambang per kapita	Rp	98,22	100,99	106,97
14.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,5541	0,5765	0,6118

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0	63,73	6730
16.	Persentase Penduduk Miskin Orang Asli Papua (OAP)	%	0	0	0
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,19	13,22
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	8,04	8,31
19.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,2	59,22	61,92
20.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	82,26	56,87	58,34
21.	Rasio Elektrifikasi	%	83,00	84,67	87,23
22.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,25	72,62	73,22
23.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,4	85,16	85,76
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100
25.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)	%	40,41	44,63	53,63
26.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3
27.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	0	69,79	70,81
28.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0	0,51	0,49

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
29.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89,92	90	90
30.	Rata-rata laju deforestasi pertahun	%	0	28	22
31.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3,03	3,85	4
32.	Indeks Demokrasi	Indeks	0	66,74	69,72
33.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	0	65	70
34.	Cakupan Wilayah yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	35	39,33	46,84
35.	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan	%	80	80,5	82
36.	Cakupan Potensi dan Pemberian Ijin dalam pemanfaatan Energi	%	0	55	70
37.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86,28	86,99	87,14
38.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	%	0	5,48	18,7
39.	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang termutakhirkan	%	0	100	100
40.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
41.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
42.	Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
43.	Cakupan pemetaan Wilayah Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	0
44.	Persentase Ketersediaan Pangan	%	0	34,68	37,9
45.	NTP Sektor Pertanian	Indeks	99,88	102,2	111,6
46.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101,61	104,1	108,1
47.	Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial	Rp	0	5.000.000.000	8.000.000.000
48.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,71	5,55	5,6
49.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	38,93	39,1	39,2
50.	Proporsi Koperasi dan UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	0	1,5	3
51.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	25,38	25,41	25,44
52.	Kontribusi sektor MIGAS terhadap PDRB	%	24,77	24,79	24,83
53.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,46	1,47	1,5
54.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145,76	144,34	141,93
55.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	100
56.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
57.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0	0,6	0,9
58.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	%	14,29	28,57	71,43
59.	Prevalensi Stunting (%)	%	24,6	20,6	14,6
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		65,86	68	80
61.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	2,87	3,17	3,62
62.	Presentasi kebijakan berbasis bukti	Indeks	0	100	100
63.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73,41	83	98
64.	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	0	75,69	77,98
65.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,01	67,87	73,66
66.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,26	83,26	84,76
67.	Skor Kemampuan Literasi SDLB	Skor	0	79,78	84,58
68.	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	Skor	65,33	66,33	67,83
69.	Skor Kemampuan Literasi SMALB	Skor	71,17	72,17	73,67
70.	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	Skor	0	48,58	50,38

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
71.	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	Skor	49,08	50,93	52,68
72.	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	Skor	47,16	48,16	49,66
73.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	0,56	0,7
74.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	65,55	65,74	68,73
75.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton	0	94,762	99,002
76.	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	%	45,74	48,51	49,98
77.	Cakupan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	42,32	27,32
78.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	21,91	20,71	19,02
79.	Indeks SPBE (terkait keamanan)	%	60,24	70,2	85,2
80.	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,68
81.	Indeks Pembangunan Statistik	poin	1,3	2,3	3,8
82.	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	%	538,7	10	11
83.	Meningkatkan nilai PMA&PMDN Realisasi investasi PMA - PMDN	Rp	13.036.000.000.000	1.068.000.000.000	1.160.000.000.000
84.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	78,11	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja (2026)	Kondisi Akhir RPJMD 2029
85.	Kontribusi Stok Carbon	Rp	0	0	8.000.000.000
86.	Luas hutan sosial kemasyarakatan (HKM) yang dikelola oleh masyarakat	%	0	48	72
87.	Luas hutan desa (HD) yang dikelola oleh kampung	%	0	44	56
88.	Cakupan kesesuaian pemanfaatanruang terhadap RTRW	%	100	100	100
89.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,63	72,93	76,38
90.	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	%	27	28	28
91.	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP
92.	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah	%	5	5,01	5,03
93.	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)	%	5	5,01	5,03
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	N.A	BAIK	BAIK
95.	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	%	2,24	226	237
96.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48,52	48,62	48,76
97.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C	C	A
98.	Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B	B	A

Tabel VII.2 Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Papua Barat Tahun 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Capaian Kategori Inovation Government Award	Kategori	B	B	A
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks		3.17	3.62
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	48,52	48,62	48,76
4	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	38.93	39.10	39.20
5	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.71	5.55	5.60
6	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3.03	3.85	4.00
7	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.48	0.53	0.68
8	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	%	2,24	2,26	2,37
9	Laju pertumbuhan ekonomi	%	20,8	5,35	5,84
10	Meningkatkan nilai PMA&PMDN Realisasi investasi PMA -PMDN	Rp	13.036.000.000.000	1.068.000.000.000	1.160.000.000.000
11	Presentasi kebijakan berbasis bukti	Indeks	0	100	100
12	Rasio Gini	Rasio	0,389	0,374	0,356

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,63	72,93	76,38
14	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	%	538.7	10.00	11.00
II ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
15	Cakupan Data Terpilah OAP dan Non OAP yang termutakhirkan	%	0	100	100
16	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	124.78	119.23	110.87
17	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	145.76	144.34	141.93
18	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)	%	40.41	44.63	53.63
19	Persentase Keluarga Miskin Beresiko Stunting yang mendapatkan bantuan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kampung	%	76.72	77.02	77.47
20	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	100	100	100
III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
21	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	9	8	6.5
22	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	176	132.60	111.53
23	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	%	27.52	32.58	40.17
24	Cakupan Kartu Papua Sehat OAP	%	0	0	0

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
25	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	88	90	90
26	Cakupan Peserta KB Aktif	%	100	100	100
27	Cakupan Wilayah yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	35	39.33	46.84
28	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.17	13.19	13.22
29	Harapan Lama Sekolah (HLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
30	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,5541	0,5765	0,6118
31	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0	0.6	0.9
32	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	0.56	0.7
33	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	0	47.98	51.39
34	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	Indeks	63.25	72.62	73.22
35	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63.25	72.62	73.22
36	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	86.28	86.99	87.14
37	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	0	75.69	77.98
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83.75	83.05	83.53

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
39	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100
40	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94.4	85.16	85.76
41	Indeks Modal Manusia	Indeks	0	0.48	0.5
42	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82.26	83.26	84.76
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		65.86	68	80
44	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.69	69.38	71.06
45	Indeks Pembangunan Manusia Orang Asli Papua	Indeks	0	0	0
46	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57.2	59.22	61.92
47	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	55.89	56.87	58.34
48	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.01	67.87	73.66
49	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	%	0	35	70
50	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1.46	1.47	1.50
51	Kontribusi sektor MIGAS terhadap PDRB	%	24.77	24.79	24.83
52	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	25.38	25.41	25.44

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
53	Kontribusi Stok Carbon	Rp	0	0	8.000.000.000
54	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	101.61	104.10	108.10
55	NTP Sektor Pertanian	Indeks	99.88	102.20	111.60
56	PDRB ADHB non tambang per kapita	Rp	98,22	100,99	106,97
57	PDRB ADHB per kapita	Rp	131,64	151,14	257,6
58	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	%	0	30	80
59	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	99.91	100	100
60	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	33.41	36.6	41.39
61	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan Pendataan data Fakir Miskin	%	0	100	100
62	Persentase Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang	%	27,00	28,00	28,00
63	Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	%	14.29	28.57	71.43
64	Persentase Ketersediaan Pangan	%	0	34.68	37.90
65	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	88.32	100	100
66	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	0	100	100

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
67	Persentase Limbah B3 yang terkelola	%	0	30	60
68	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	40	60
69	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	100	100	100
70	Persentase Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat)	%	0	100	100
71	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	98.77	100	100
72	Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	8.73	15	65
73	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0	100	100
74	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	99.64	100	100
75	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	92.22	100	100
76	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	20	50
77	Persentase Posyandu aktif	%	96.45	96.75	97.2
78	Persentase RTH	%	0	20	100
79	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	74.46	75.46	100
80	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	98.75	90.89	92.18

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
81	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	%	100.00	100.00	100.00
82	Prevalensi HIV	%	2.3	2.15	1.96
83	Prevalensi Stunting (%)	%	24.6	20.6	14.6
84	Proporsi Koperasi dan UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	0	1.50	3.00
85	Rasio guru/murid sekolah SMALB	Rasio	19.77	38.83	38.83
86	Rasio guru/murid sekolah SMPLB	Rasio	19.77	38.83	38.83
87	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	%	10	10	10
88	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 perempuan)	%	10	10	10
89	Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB	Angka	0	90	100
90	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.86	8.04	8.31
91	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
92	Skor Kemampuan Literasi SDLB	Skor	0	79.78	84.58
93	Skor Kemampuan Literasi SMALB	Skor	71.17	72.17	73.67
94	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	Skor	65.33	66.33	67.83

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
95	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	Skor	0	48.58	50.38
96	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	Skor	47.16	48.16	49.66
97	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	Skor	49.08	50.93	52.68
98	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	0	30	45
99	Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen	0	0	0
100	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton	0	94,762	99,002
101	Tingkat Kemiskinan	%	21,66	18,85	16,54
102	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	100	100	100
103	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.13	3.93	3.84
104	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.47	69.79	70.81
105	Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	Tahun	0	0	0
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
106	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	BB
107	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	0	65	70

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
108	Cakupan Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	%	100	100	100
109	Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	%	100	100	100
110	Cakupan organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	%	100	100	100
111	Cakupan organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	%	100	100	100
112	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak kewenangan provinsi	%	80	80	80
113	Cakupan Perpustakaan yang diakreditasi sesuai SNP	%	0	100	100
114	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang termanfaatkan	%	0	70	80
115	Indeks Demokrasi	Indeks	0	66,74	69,72
116	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Skor	C	C	A
117	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	A	A	A
118	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Kategori	N.A	BAIK	BAIK
119	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	89.92	90	90
120	Indeks Pembangunan Statistik	poim	1.3	2.3	3.8
121	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	65.55	65.74	68.73

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
122	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	0	78.11	100
123	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0	63,73	67,30
124	Indeks SPBE	%	100	100	100
125	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	0	80	100
126	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	%	45.74	48.51	49.98
127	Jumlah arus penumpang angkutan udara	Orang	2.103.093	2.498.685	2.892.540
128	Jumlah barang yang melalui dermaga pelabuhan (ton)	Ton	106.508.510	126.542.761	146.489.063
129	Jumlah bongkar/muat barang angkutan udara	Ton	18.530.000	22.015.493	25.485.685
130	Jumlah penumpang (keberangkatan/kedatangan) angkutan laut	Orang	515.714	612.720	793.489
131	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan pendidikan khusus yang tersusun	Berkas	0	90	100
132	Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	%	100	100	100
133	Konektivitas Laut	Lokasi	0	0	0
134	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	%	0	100	100
135	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	%	59.29	70	80

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
136	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	0	35.03	47.5
137	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	0	95.6	96.1
138	Persentase Data Sektorial yang Tersedia dan di Perbaharui secara berkala dalam Portal SDI Papua Barat	poin	1.3	2.3	3.8
139	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi terpasang	%	36.75	40.52	46.9
140	Persentase Kabupaten yang Menyediaan Pendidikan Akademi Komunitas	%	0	28.57	71.43
141	Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	25	27.56	31.91
142	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	%	0	100	100
143	Persentase Korban Bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	99.69	100	100
144	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	0	58.47	58.63
145	Persentase Luas Layanan irigasi Multi Komoditas	%	0	40.14	41.74
146	Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi	%	42.86	48.21	77.19
147	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	83.38	88.38	95.38
148	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	%	0	36	37.5
149	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	0	0.56	0.8

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
150	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	%	0	33	39
151	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	%	0	100	100
152	Persentase Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	%	0	100	100
153	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100	100	100
154	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi dan Numerasi	%	94	100	100
155	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	0	35.03	43.52
156	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola di TPA	%	0	60	66
157	PPH Ketersediaan pangan	%	87.77	99.09	100
158	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	0	100	100
159	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	0	100	100
160	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	0	100	100
161	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	100	100	100
162	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	63	69.46	78
163	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	%	27.27	27.27	27.27

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target Kinerja RPJMD 2026	Kondisi Akhir RPJMD 2029
164	Tersedianya Terminal Type B	Unit	0	0	0
165	Tingkat Kemantapan jalan	%	0	40.14	41.74
166	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	%	69.26	70	70
167	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100
168	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	%	65.4	77.7	83.26
169	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana moda perkeretaapian	%	0	10	80

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat Gambaran umum yang telah disampaikan dalam dokumen RKPD ini dan kaidah pelaksanaan RKPD serta catatan penting dalam rencana pelaksanaan pada implementasi ke dalam dokumen anggaran (APBD).

RKPD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045, RPJMD Papua Barat 2025-2029, RKP 2026, draft Rencana Induk Perecepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan lain yang diperintahkan peraturan dan/atau relevan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Perda tentang RKPD tahun 2026 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada Bab II, rumusan Arah Kebijakan tahun 2026 yang diambil dari RPJMD 2025 – 2029 serta persandingan prioritas Nasional sesuai arahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 maka RKPD tahun 2026 Provinsi Papua Barat difokuskan pada 7 (tujuh) Prioritas Daerah yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Dan Investasi Daerah Yang Inklusif
3. Membangun Pertanian Yang Mandiri, Berdaulat Dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Mudah Diakses Dan Berkualitas
5. Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Dan Kondusivitas Daerah
6. Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahn Yang Baik Menuju *Good Governance*
7. Optimalisasi Otonomi Khusus Untuk Mensejahterahkan Orang Asli Papua Di Papua Barat

Dari ketujuh prioritas daerah tersebut disatukan ke dalam tema “***Penguatan Fondasi Transformasi dengan Penekanan Pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Yang Mandiri, Dalam Koridor Otonomi Khusus.***”

8.1 KAJIDAH IMPLEMENTASI

Dokumen RKPD tahun 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah kabupaten se-Papua Barat dalam menyusun dokumen RKPD tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RKPD tahun 2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RKPD tahun 2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RKPD tahun 2026;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Papua pada Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Papua pada tahun 2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua tahun 2026;
5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tahun 2026 pada wilayah Provinsi Papua Barat mengacu RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2026 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua Barat.

8.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun RKPD tahun 2026. Penyusunan RKPD tahun 2026 berpedoman pada tujuan, sasaran pokok, arah kebijakan dan program RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 untuk tahun pelaksanaan 2026, RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Barat tahun 2026. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun RKPD tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2025, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

Akhirnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang tertuang didalam Dokumen RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2026 dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan tahun 2026.

L A M P I R A N

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				59 Unit	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					191 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
6	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan											
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center											
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	1.996.462.346,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		1.996.462.346,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			100 Persen	368.569.806,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	-	368.569.806,00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	368.569.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah		368.569.806,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-			100 Persen	850.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	-	850.000.000,00		
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit															
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
7	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				10 Orang	1.514.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata		1.514.367.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 03 1.02 0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan]													
1	02 03 4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
1	02 03 4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil													
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02 03 4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik													
1	02 03 4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02 03 4.07		Pendayagunaan tenaga kesehatan	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	
1	02 03 4.07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat													
			Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
1	02 03 4.08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP													
1	02 03 4.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP													
10	1 02 04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	-		100 Persen	336.170.811,00						-	336.170.811,00	
			[Meningkatkan kualitas mutu dan layanan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)]					336.170.811,00							336.170.811,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	-			4 Kabupaten	900.000.000,00						-	1.000.000.000,00		
					[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]						900.000.000,00								1.000.000.000,00	
	1	02	05	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	-	200.000.000,00		
	1	02	05	1.01	0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi															
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
12	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	0,00					-	0,00			
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	0,00					-	0,00			
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan				0 dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
13	1	02	07		PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN														
					[Meningkatkan akreditasi pelayanan kesehatan]	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	75	67	67	67	0,00						0,00		
						Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	97.53	91.35	96.29	96.29									
1	02	07	4.01	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta															
1	02	07	4.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/Bulan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	0,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT			
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-	273.993.300,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	-	40.080.993,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		
					-	-	-	-	-	29.000.250.000,00						38.840.065.634,00			
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada														
1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
					[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	29.000.250.000,00					38.840.065.634,00			
1	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada														
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	OPD RSUD Papua Barat	40.080.993,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	45.000.000,00				OPD RSUD Papua Barat	984.811.177,00			
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	OPD RSUD Papua Barat	667.370.672,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT			
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	OPD RSUD Papua Barat	194.888.781,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		
					-														
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	335.000.000,00				OPD RSUD Papua Barat	1.817.479.862,00			
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	OPD RSUD Papua Barat	74.970.000,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.825.384.604,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
1	02	01	1.09				100 Persen	150.000.000,00			-	-	OPD RSUD Papua Barat	-	1.572.860.420,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-											
1	02	01	1.09	0001												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			[Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100							38.840.065.634,00	
1	02	01	1.09	0006												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	OPD RSUD Papua Barat	-	967.434.000,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
1	02	01	1.09	0009												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	-	OPD RSUD Papua Barat	-	510.426.420,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
1	02	01	1.10				100 persen	25.000.000.000,00			-	-	OPD RSUD Papua Barat	-	25.000.000.000,00	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan BLUD	-											
1	02	01	1.10	0001												
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	OPD RSUD Papua Barat	-	25.000.000.000,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
16	1	02	02													
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tipe RSUD Provinsi	B	C	C	C							158.301.000.000,00	
			[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat di RSUD Provinsi Papua Barat]					33.596.000.000,00								
1	02	02	1.01													
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1	02	02	1.01	0009												
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
1	02	02	1.01	0010												
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan													
1	02	02	1.01	0013												
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
1	02	02	1.01	0027												
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
								33.596.000.000,00							158.301.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	0,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT			
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	OPD RSUD Papua Barat	6.000.000,00	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					538.671.797.396,50					733.806.443.603,00				
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
19	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	29.577.139.602,00					29.930.387.652,00				
					[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]														
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					655.267.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Aparatur	955.267.000,00				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aparatur	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Dokumen	4.077.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03 08 1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	10.045.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
28	1 03 10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
			[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Tingkat Kemantapan jalan	42.32	0	0	40.14	334.245.881.294,00						488.817.135.951,00	
1	03 10 1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi													
1	03 10 1.01	0030	Rehabilitasi Jalan													
								5.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03 10 1.01	0031	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	108.006.545.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN, DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN, DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL	-	-	-		108.006.545.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03 10 1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	1.856.718.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		1.856.718.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03 10 1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				100 KM	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
			-													
1	03 10 1.01	0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi													
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				5 KM	1.453.872.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	-	-		1.453.872.451,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]															
1	03 10	1.01 0054	Pembangunan Jembatan														
1	03 10	1.01 0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
1	03 10	1.01 0058	Pembangunan Jalan														
1	03 10	1.01 0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi														
				Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya			10 KM	911.326.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
29	1	03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
								2.000.000.000,00							2.300.000.000,00		
1	03 11	1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1.500.000.000,00							1.800.000.000,00		
1	03 11	1.01 0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
				Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan			20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
			[Meningkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi]														
1	03 11	1.01 0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
1	03 11	1.01 0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
1	03 11	1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					500.000.000,00							500.000.000,00		
1	03 11	1.03 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
				Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			50 Paket Pekerjaan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
30	1	03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
			[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]														
1	03 12	1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					2.500.000.000,00							2.500.000.000,00		
1	03 12	1.01 0006	Penetapan RTRW Provinsi														
				Jumlah Perda RTRW Provinsi			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	03 12	1.01 0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi														
				Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi			1 Dokumen	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
			-														
1	03 12	1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					1.750.000.000,00							1.750.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 1.01 0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			-	-	-	-	-	3.800.000.000,00							0,00	
1	05 02 1.01 0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			[Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada]													
1	05 02 1.01 0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 1.01 0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 1.01 0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 1.01 0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Pemberdayaan Sosial]	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100	0	100	100	850.000.000,00							100.000.000,00	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya		74.46	75.00	75.46									
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		88.32											
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya		92.22											
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		99.91											
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi											
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi			5 Lembaga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	1.02	0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi											
								850.000.000,00							100.000.000,00	
1	06	02	1.02	0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi											
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi			50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
					[Meningkatkan Pemberdayaan Sosial]											
1	06	02	1.02	0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi											
42	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				50.000.000,60						500.000.000,00	
1	06	02	4.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50.000.000,60						500.000.000,00	
1	06	02	4.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
					Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan			1 Dokumen	50.000.000,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	-	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT											
1	06	02	4.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan Pendataan data Fakir Miskin Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	0 98.77 99.64	100	100	4.950.000.000,00							0,00	
1	06 04 1.05 0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
			-	-	-	-	-	4.950.000.000,00							0,00	
1	06 04 1.05 0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
44	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
			-	-	-	-	-	10.000.000,00							0,00	
			[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]													
1	06 04 4.07	Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.														
1	06 04 4.07 0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah														
			Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
45	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
47	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	30.000.000,00						-	0,00	
								30.000.000,00							0,00	
1	06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
1	06 07 1.01 0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	30.000.000,00							0,00	
1	06 07 1.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				100 Makam	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
1	06 07 1.01 0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.399.209.656,00								26.373.341.959,00
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
48	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	17.549.209.656,00						-	17.973.341.959,00	
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]													
2	07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	75.000.000,00					ANS Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	-	130.000.000,00	
2	07 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ANS Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	17.549.209.656,00						17.973.341.959,00	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		15.000.000,00	
2	07	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
2	07	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah											
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		650.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
	2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
	2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
	2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	45.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.068.562.080,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.068.562.080,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	290.920.000,00			-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	-	290.920.000,00	
2	07 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	90.920.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		90.920.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
49	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
			[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	100	0	0	0	0,00							0,00	
2	07 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-			100 Persen	0,00			-	-	Pencari Kerja	-	0,00	
2	07 02 1.01 0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
2	07 02 1.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				28 Orang	0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Pencari Kerja		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
50	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan b. Proxy: Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.77 11.79 13 19.14 49.19 750	0 0.8 17.00 5.79 40 6.79	0 0.69 1 17.34 40 7.79	0.71 150 17.69 2 41.69 7.79	1.600.000.000,00							1.600.000.000,00	
2	07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-			100 Persen	1.500.000.000,00					Pencari Kerja	-	1.500.000.000,00	
2	07 03 1.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	Pencari Kerja		500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 03 1.01 0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Manokwari Selatan, Oransbari, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	Pencari Kerja		1.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-			100 Persen	0,00			-	-	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	0,00	
2	07 03 1.02 0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
2	07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	-			100 Persen	100.000.000,00			-	-	Tenaga Kerja	-	100.000.000,00	
2	07 03 1.04 0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	Tenaga Kerja		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
51	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	7.21	1.21	2.21	3.21	400.000.000,00						400.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	0,00					Pencari Kerja	-	0,00		
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan															
						Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD				10 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Pencari Kerja		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			100 Persen	400.000.000,00					Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	-	400.000.000,00		
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online															
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja															
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				30 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	Tenaga Kerja dan Pencari Kerja		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
52	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
					[Meningkatkan pekerja Indonesia yang terlindungi]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	13.54	12.02	12.26	12.51	5.300.000.000,00								5.850.000.000,00	
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	51.32	45.57	46.48	47.41										
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-			100 Persen	50.000.000,00					Tenaga Kerja dan Perusahaan	-	100.000.000,00		
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial															
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				20 Perusahaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	Tenaga Kerja dan Perusahaan		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja															
										0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Tenaga Kerja dan Perusahaan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-			100 Persen	150.000.000,00					Tenaga Kerja	-	150.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	warga Tarnsmigrasi		300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
55	3	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
			[Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi]	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	33.33	22.22	22.22	33.33	750.000.000,00						750.000.000,00					
	3	32	03	1.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
	3	32	03	1.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
	3	32	03	1.01	0005		Penyuluhan Transmigrasi													
	3	32	03	1.01	0006		Pelatihan Transmigrasi													
	3	32	03	1.01	0009		Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota													
	3	32	03	1.01	0017		Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)													
							Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran				25 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Warga Transmigrasi		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	32	03	1.01	0018		Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi													
							Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				5 Lokasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Warga Transmigrasi		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
56	3	32	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
			[Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	33.33	22.22	22.22	33.33	600.000.000,00						300.300.000.000,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
2	08 01 1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
2	08 01 1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
2	08 01 1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				36 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	08 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	37.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08 01 1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	08	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	-	1.200.000.000,00	-	-	-	-	0,00			
					Urusan Pemerintah Daerah														
	2	08	01	1.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	2	08	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	0,00			
	2	08	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	2	08	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	2	08	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	0,00			
	2	08	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
58	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
											1.460.500.000,00					0,00			
	2	08	02	1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi														
	2	08	02	1.01	0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
					[Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan]	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	100	100	100	100	1.460.500.000,00					0,00			
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah													
	2	08	02	1.01	0012 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi														
											200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.905.304.697,00							22.549.814.158,00	
	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						19.905.304.697,00							22.549.814.158,00	
65	2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
		[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	13.405.304.697,00							15.564.814.158,00	
	2 09 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	2 09 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	2 09 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.715.591.698,00							13.145.125.557,00	
	2 09 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	10.415.304.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.838.334.567,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	10.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	09	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	91.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	151.690.990,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
2	09	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	191.114.089,68				-	-	-	192.500.000,00		
2	09	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	116.114.089,68	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
					[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]														
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	965.453.929,32				-	-	-	1.237.500.000,00		
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.689.999,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	881.763.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang														
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	46.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	47.844.885,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	09	04	1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	800.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00			
	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi															
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					2 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
68	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	-	-	1.850.000.000,00							-	2.255.000.000,00		
					[Meningkatkan penanganan pengawasan mutu dan keamanan pangan]	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	91.95	0	88.77	89.72	1.850.000.000,00								2.255.000.000,00		
	2	09	05	1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan															
						Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					40 Sertifikat	315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan															
	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan															
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		825.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan															
	2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan															
	X					NON URUSAN					10.000.000,00									0,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
69	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	10.000.000,00							-	0,00		
						-					10.000.000,00									0,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00				-	-	-	-	0,00		
	X	XX	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN						23.602.708.188,00								28.907.000.000,00	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	244.883.237,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
76	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP														
						[Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup]	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	500.000.000,00						600.000.000,00		
	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-		-	500.000.000,00				Pemerintah, Masyarakat	-	600.000.000,00			
	2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
77	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
						[Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	73.42	63.25	72.42	72.62	1.475.000.000,00						2.010.000.000,00		
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-		-	1.075.000.000,00				-	-	1.510.000.000,00			
	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	03	1.01	0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
						Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				8 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
											125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		
	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	11	03	1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	500.000.000,00				
	2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
78	2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
					[Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	Persentase RTH	100	0	0	20	200.000.000,00						250.000.000,00		
	2	11	04	1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	250.000.000,00				
	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				2 Orang	200.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
79	2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
					[Meningkatkan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbayu dan beracun (Limbah B3)]	Persentase Limbah B3 yang terkelola	100	0	0	30	260.000.000,00						350.000.000,00		
	2	11	05	1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengumpulan limbah lintas kab /kota di satu Provinsi	-	-	-	100 persen	260.000.000,00	-	-	-	-	350.000.000,00			
	2	11	05	1.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha													
						Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				1 Dokumen	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi													
80	2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
					[Meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]					-	300.000.000,00						450.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100	0	0	20	350.000.000,00					450.000.000,00			
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi														
2	11	08	1.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				35 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	08	1.01	0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
						Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
84	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00		
					[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]														
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	150.000.000,00				-	-	-	200.000.000,00		
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
85	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
					[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	0	0	30	200.000.000,00						300.000.000,00		
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-	-	-	200.000.000,00				-	-	-	300.000.000,00		
2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi														
						Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				1 Perkara	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
2	11	10	1.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
86	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Cakupan Data Penduduk Terpilah (OAP/Non OAP) Pada Aplikasi SIAK Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	-			88,38 Persen 6,61 Persen 100 Persen 48,12 Persen	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2	12	02	4.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN	-	200.000.000,00	
	2	12	02	4.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi													
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil di Provinsi	-			100 Persen	100.000.000,00			ASN	-	200.000.000,00			
	2	12	03	4.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi													
92	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	-		36,36 Persen 4 Lembaga Pengguna	750.000.000,00				-	2.200.000.000,00			
						[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Data Terpilah OAP dan Non OAP]													
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-		100 Persen	593.945.780,00			Penduduk Papua Barat, Perangkat Daerah, Organisasi dan Perguruan Tinggi	-	1.700.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
93	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Pemanfaatan Data Kependudukan OAP	-			36,36 Persen 4 Lembaga Pengguna	100.000.000,00				-	200.000.000,00			
	2	12	04	4.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi														
	2	12	04	4.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi													
94	2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-			100 Persen	200.000.000,00				-	300.000.000,00			
					[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	200.000.000,00					300.000.000,00			
	2	12	05	1.01	Penyediaan Profil Kependudukan														
	2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi													
	2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain													
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG														
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						26.375.929.249,50					0,00			
95	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	13.793.823.703,00				0,00			
	2	13	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
	2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
					[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]														
						Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	13.793.823.703,00					0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
											50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
											150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang														
	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				732.894.453,00			-	-	-	0,00			
	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	212.894.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				880.000.000,00			-	-	-	0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13 04 1.01 0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
99	2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
		[Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan]	Persentase Posyandu aktif	5	4.17	4.2	4.3	3.855.633.830,00							0,00	
			Presentasi Peningkatan Satus desa maju / mandiri	97.35	96.45	96.6	96.75									
2	13 05 1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	3.855.633.830,00				-	-	-	-	0,00	
2	13 05 1.01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13 05 1.01 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				10 Lembaga	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13 05 1.01 0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13 05 1.01 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13 05 1.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2 Laporan	2.005.633.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
			[Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]														
##	2	13	07					6.340.223.483,00							0,00		
				[Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung]													
	2	13	07	4.01				200.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
	2	13	07	4.01	0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung											
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung									0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung											
	2	13	07	4.02	0001	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung											
	2	13	07	4.02	0002	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional											
	2	13	07	4.03				2.100.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
	2	13	07	4.03	0001	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung											
						Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung									0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.03	0002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)									0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.03	0003	Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi									0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.03	0004	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat											
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat									0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2	13	07	4.04		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung											
	2	13	07	4.04	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP											
	2	13	07	4.04	0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 03 1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	-	-	-	-	-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	2 15 03 1.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Laporan	0,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	-	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			[Meningkatkan Kualitas layanan transportasi laut]													
	2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	-	-	20.000.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000.000,00	
	2 15 03 1.09 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	20.000.000.000,00	Kab. Manokwari, Masni, Masni	DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	-	-	-		20.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
##	2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
	2 15 03 4.17	Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	-	-	-	-	-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	
	2 15 03 4.17 0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran														
##	2 15 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN														
			-	-	-	-	-	20.000.000.000,00							20.000.000.000,00	
	2 15 04 4.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	-	-	-	-	-	20.000.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000.000,00	
	2 15 04 4.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara														
			Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia				5 Unit	20.000.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Bintuni, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Teluk Wondama, Wasior, Wasior I Kab. Manokwari Selatan, Ransiki, Abreso	DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	-	-	-		20.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK						26.024.277.320,00							0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	100.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	575.000.000,00			-	-	-	0,00			
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan														
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	300.000.000,00				-	-	-	0,00		
2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
##	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
					[Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	-	-	-	-	-	1.250.000.000,00						0,00		
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi														
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten														
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				15 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						25.241.244.165,00							0,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						25.241.244.165,00							0,00		
##	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	17.556.527.861,00							0,00		
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	295.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD												
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah												
2	17	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												
2	17	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Koperasi Aktif	100.00	0	60.00	70.00	250.000.000,00								
						Persentase peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan													
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-			-	100.000.000,00			-	-	0,00			
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				5 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
##	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		-			-	500.000.000,00				-	0,00			
					[Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi]														
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-			-	500.000.000,00			-	-	0,00			
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
##	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
					[Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian]	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	100.00	0	50.00	60.00	1.000.000.000,00					0,00			
						Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM													
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
##	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-			-	1.000.000.000,00				-	0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				2 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
								1.000.000.000,00							0,00	
2	17 06 1.01	0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				2 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17 06 1.01	0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				3 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pebiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	0.83 100.00 1.96	0 50.00 55.00	0.53 1.56 60.00 65.00	1.000.000.000,00							0,00	
			[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Perluasan Akses Pasar, Akses Pebiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha												
			[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)												
			[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)												
2	17 06 1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
##	2 17 07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					3.000.000.000,00							0,00	
			[Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]													
2	17 07 1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					3.000.000.000,00							0,00	
2	17 07 1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				20 Unit Usaha	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17 07 1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan													

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatnya Legalitas Koperasi]	Persentase Kelompok Pra Koperasi Yang mendirikan Koperasi Persentase Koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akta Notaris	100.00	0	20.00	40.00	384.716.304,00							0,00		
2	17	09	4.01	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.													
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi												
2	17	09	4.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	-		-	50.000.000,00						0,00		
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi												
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				13.561.071.285,00						14.481.999.648,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.561.071.285,00						14.481.999.648,00		
##	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
					[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	11.362.126.299,00					11.642.000.000,00	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					-	-	-	-	-	11.362.126.299,00					11.642.000.000,00		
2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
					[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	11.362.126.299,00					11.642.000.000,00	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.160.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	28.400.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah												
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				31 Data	30.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah												

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				31 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	8.884.851.573,00			-	-	-	-	8.949.000.000,00	
2	18 01 1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/Bulan	8.561.071.573,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	252.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	25.800.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
2	18 01 1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
2	18 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	20.900.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	
2	18 01 1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.900.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	106.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 01	1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.323.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
##	2	18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-			-	399.000.150,00						-	650.000.000,00	
			[Meningkatkan kemudahan berinvestasi]													
2	18 02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-			-	100.000.150,00						-	200.000.000,00	
2	18 02	1.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	100.000.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi													
2	18 02	1.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi													
								100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 02	1.02 0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)													
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				3 Daerah	99.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2	18 02	1.02 0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi													
##	2	18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-			-	499.999.680,00						-	549.999.648,00	
			[Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal]													
2	18 03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-			-	499.999.680,00						-	549.999.648,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi													
##	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL [Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko]	-	-	-	699.982.100,00				-	950.000.000,00				
	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	699.982.100,00				-	950.000.000,00				
	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	600.006.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	
	2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	99.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	
##	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL [Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]		72	58	60	62.50					690.000.000,00			
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	-	-	599.963.056,00				-	690.000.000,00			
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal													
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	161.438.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					35.032.206.629,50					0,00			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					33.617.206.629,50					0,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	19	02	1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	2.500.000.000,00	-	-	-	-	0,00			
	2	19	02	1.02	0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda				80 Persentase	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
##	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
					[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]	Cakupan cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	100	0	100	100	12.480.217.050,00					0,00			
						Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang dimanfaatkan	85	100	67	70									
	2	19	03	1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	-	-	-	5.980.217.050,00					0,00			
	2	19	03	1.02	0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				200 Orang	1.980.217.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	1.02	0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				7 Kegiatan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional														
	2	19	03	1.03	0001 Seleksi Atlet Daerah														
	2	19	03	1.03	0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
	2	19	03	1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00					0,00			
	2	19	03	1.04	0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				0 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2	19	03	1.04	0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				0 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
##	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						1.460.000.000,00					0,00			
					[Meningkatnya Kualitas Kepramukaan]														
	2	19	04	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	-	-	1.460.000.000,00					0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]													
2	22 01 1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			-	-	-	-	-	13.899.627.955,00							15.289.590.749,70	
2	22 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					178.788.040,00							196.666.844,00	
2	22 01 1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin													
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22 01 1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	95.912.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		105.503.574,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]													
2	22 01 1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
2	22 01 1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			-	-	-	-	-	13.899.627.955,00							15.289.590.749,70	
2	22 01 1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]													
2	22 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					958.152.264,00							1.053.967.490,00	
2	22 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		99.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
2	22 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			-	-	-	-	-	13.899.627.955,00							15.289.590.749,70	
2	22 01 1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]					13.899.627.955,00							15.289.590.749,70	
2	22 01 1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		110.055.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	686.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		755.125.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				1 Lokasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26 02 1.03 0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26 02 1.03 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
								100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26 02 1.03 0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
##	3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
			-	-			-	0,00						-	0,00	
3	26 02 4.05	Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi														
3	26 02 4.05 0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi														
##	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
			-	-			-	1.100.000.000,00						-	1.210.000.000,00	
			[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]													
3	26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
3	26 03 1.01 0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26 03 1.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
##	3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
			[Meningkatnya kualitas ekonomi ekosistem kreatif]	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan	14	0	0	10	524.972.996,10						577.470.296,00	
3	26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif														
3	26 04 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif															
3	26	04	1.02	0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah															
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual															
											524.972.996,10						577.470.296,00			
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah															
						Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
					[Meningkatkan kualitas ekonomi ekosistem kreatif]	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan	14	0	0	10	524.972.996,10						577.470.296,00			
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah															
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	124.972.996,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	137.470.296,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
##	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
						[Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Cakupan Sumberdaya OAP yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, pembinaan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	20	0	0	15	500.000.000,00						550.000.000,00		
						Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	50		50	50										
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan															
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	26 05 1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00		
3	26 05 1.02 0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif															
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X			NON URUSAN														
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					0,00							0,00		
##	X	XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					0,00							0,00		
X	XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
X	XX 01 1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X	XX 01 1.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.548.830.772,50							15.852.000.000,00		
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
##	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	3.500.000.000,00						-	4.450.000.000,00		
			[Meningkatkan Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan]														
2	23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.200.000.000,00			-	-	-	-	2.850.000.000,00		
2	23 02 1.01 0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi															
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				45 Perpustakaan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23 02 1.01 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan															
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				40 Perpustakaan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23 02 1.01 0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi															
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				40 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23 02 1.01 0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit															
2	23 02 1.01 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				50 Arsip	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-			-	200.000.000,00				-	-	250.000.000,00			
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				50 Arsip	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
##	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP														
					[Meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup]	Prosentase Pemberian Izin Penggunaan Arsip	100	0	100	100	200.000.000,00				250.000.000,00				
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi														
2	24	04	1.01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
2	24	04	1.01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
##	2	24	05		PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI				-	400.000.000,00				-	500.000.000,00				
					[Meningkatkan kapasitas SDM bidang kearsipan]														
2	24	05	4.04		Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	-			-	200.000.000,00			-	-	250.000.000,00				
2	24	05	4.04	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi				5 Sertifikat	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	250.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
2	24	05	4.06		Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi														
2	24	05	4.06	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi														
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					37.639.980.546,00					50.480.024.321,00				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					37.639.980.546,00					50.480.024.321,00				
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					37.639.980.546,00					50.480.024.321,00				
##	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
					[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	29.340.084.167,00				37.353.000.000,00				
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				864.216 Ha	369.999.608,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Katebu Kab. Fak Fak, Kokas, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Karas, Semua Kel/Desa Kab. Fak Fak, Arguni, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Kaimana, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Buruway, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Teluk Arguni Atas, Semua Kel/Desa Kab. Kaimana, Teluk Etna, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR SANITASI LINGKUNGAN	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 02 1.01 0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					2,5 Ha	286.994.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 02 1.01 0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir					1 Dokumen	300.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		420.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25 02 1.01 0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi					1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
##	3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3	25 02 4.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					-	0,00			-	-	-		250.000.000,00	
3	25 02 4.03 0005	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut					20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			-													
3	25 02 4.06	Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.					-	0,00			-	-	-		250.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	25	02	4.06	0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut														
3	25	02	4.07		Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan	-					0,00					250.000.000,00			
3	25	02	4.07	0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan														
					Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penatapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan				10 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	02	4.08		Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan														
3	25	02	4.08	0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua														
					Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan				1 Perkada	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
##	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
					[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	Produksi Perikanan Tangkap	97.000	64.000	65.000	75.000	3.355.454.415,00					4.526.000.020,00			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil														
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
					[Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap]	Ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap	450	150	200	250	3.355.454.415,00					4.526.000.020,00			
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-					1.130.454.415,00					1.700.000.000,00			
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia					3 Unit	900.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Barat, Sanggeng Kab. Fak Fak, Pariwari, Dulanpokpok Kab. Teluk Wondama, Wasior, Dotir	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT				1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	1.788.675.431,00					-		3.106.024.301,00		
					[Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya]	Produksi Perikanan Budidaya	1.600	1.233	1.250	1.320	1.788.675.431,00						3.106.024.301,00		
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-	75.000.000,00				-	-	-	200.000.000,00		
3	25	04	1.04	0004	Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi														
					Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi				4 Rekomendasi	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-	-	-	760.000.000,00				-	-	-	1.806.024.301,00		
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	335.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Timur, Mansinam	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
					[Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan]	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	105.3	0	101.7	102	1.788.675.431,00						3.106.024.301,00		
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
					Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	04	1.05	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan														
					Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan				2 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				220 Orang/Bulan	32.212.944.542,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.434.238.997,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
3	27 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	800.000.000,00			-	-	-	-	880.000.000,00	
3	27 01 1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	2.700.000.000,00			-	-	-	-	2.970.000.000,00	
3	27 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		880.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		825.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
3	27 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	1.200.000.000,00			-	-	-	-	1.320.000.000,00	
3	27 01 1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura				1 laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		247.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			[Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan]													
			[Meningkatnya produksi pangan lokal (Sagu, Kelapa, Akabi)]												4.325.799.390,00	
			Persentase produksi pangan lokal	20369	0	18095	18638	3.932.544.900,00								
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	24360.80	76.5	24204.52	24237.83									
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	40012.78		36963.78	37703.06									
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	43.81		41.12	41.53									
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	47.60		44.78	45.22									
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	52.37		51.51	51.59									
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	95.00		80.50	83.00									
3	27 02 1.01 0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			[Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan]													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya produksi pangan lokal (Sagu, Kelapa, Akabi)]	Persentase produksi pangan lokal	20369	0	18095	18638	3.932.544.900,00							4.325.799.390,00	
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	24360.80	76.5	24204.52	24237.83									
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	40012.78		36963.78	37703.06									
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	43.81		41.12	41.53									
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	47.60		44.78	45.22									
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	52.37		51.51	51.59									
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	95.00		80.50	83.00									
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman												
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih											
							125 Sertifikat	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				[Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan]												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatkan produksi pangan lokal (Sagu, Kelapa, Akabi)]	Persentase produksi pangan lokal	20369	0	18095	18638	3.932.544.900,00							4.325.799.390,00		
			Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah)	24360.80	76.5	24204.52	24237.83										
			Produksi Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi arabika, Kopi Robusta)	40012.78		36963.78	37703.06										
			Produksi Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	43.81		41.12	41.53										
			Produktivitas Hortikultura (Sayuran dan Buah)	47.60		44.78	45.22										
			Produktivitas Perkebunan(Sawit, Kelapa Dlm, Sagu, Pala, Pinang, Kakao, Cengkeh, Kopi Arabika, Kopi Robusta)	52.37		51.51	51.59										
			Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	95.00		80.50	83.00										
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih												
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				2 Ton	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				[Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan]	Persentase pertumbuhan produksi komoditas unggulan	3.98	3.36	3.69	3.75	3.932.544.900,00						4.325.799.390,00	
					Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	95.00	76.5	80.50	83.00								
					-												
3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi												
				[Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan]	Persentase pertumbuhan produksi komoditas unggulan	3.98	3.36	3.69	3.75	3.932.544.900,00						4.325.799.390,00	
					Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	95.00	76.5	80.50	83.00								
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan												

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	784.803.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	863.283.630,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
X	XX	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					20.964.318.652,50						0,00			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					20.964.318.652,50						0,00			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					20.964.318.652,50						0,00			
##	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
					[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	15.543.863.552,50						0,00		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
										150.544.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	16.652.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	17.032.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				100 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
3	27	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Usuran Selain Renstra PD dan Renja PD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	13.781.183.652,50				-	-	-	0,00		
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164 Orang/Bulan	13.414.318.652,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	322.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	233.326.000,00				-	-	-	0,00		
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	432.183.678,00				-	-	-	0,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	118.821.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				1000 Dosis	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27 02 1.07 0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
								100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
##	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
		[Meningkatkan Kualitas Prasarana Peternakan]	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	100	100	100	100	2.656.076.000,00							0,00	
3	27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian														
			-	-			-	2.156.076.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	27 03 1.01 0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27 03 1.01 0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		[Meningkatkan distribusi prasarana peternakan]	Presentase Peningkatan Prasarana Peternakan	100	100	100	100	2.656.076.000,00							0,00	
3	27 03 1.01 0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1.850.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27 03 1.01 0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet														
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				1 Unit	305.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27 03 1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
3	27 03 1.02 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			[Peningkatan pengawasan prasarana peternakan]													
3	27 03 1.02 0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					[Meningkatkan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]	Presentase jumlah perijinan yang dikeluarkan	100	100	100	100	50.000.000,00					0,00			
	3	27	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota													
##	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	-	867.055.100,00					-	0,00			
					[Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]														
	3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	817.055.100,00					-	0,00			
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian													
						Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			1 Dokumen	817.055.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-PENDIDIKAN				0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan														
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani													
	X				NON URUSAN					0,00						0,00			
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					0,00						0,00			
##	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
					-	-	-	-	-	0,00						0,00			
	X	XX	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	0,00					-	0,00			
	X	XX	01	1.07	0006	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					DINAS KEHUTANAN					98.845.417.606,00						96.136.959.410,00			
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					98.845.417.606,00						96.136.959.410,00			
	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					98.845.417.606,00						96.136.959.410,00			
##	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	61.784.750.814,80					-	63.736.292.610,00			
	3	28	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				77.000.000,00	DINAS KEHUTANAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	61.784.750.814,80				63.736.292.610,00			
	3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	88.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/Bulan	44.496.292.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	44.496.292.610,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	88.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
	3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	440.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	61.784.750.814,80				63.736.292.610,00			
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut													
											1.300.000.000,00					1.430.000.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
3	28 01 1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
3	28 01 1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
3	28 01 1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu													
3	28 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			-				-	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan													
3	28 01 1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
3	28 01 1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		990.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28 01 1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	1750868 51.63 7.18 98.0	0 21.68 39.68 89.11	1474263 18.42 45.63 97.13	1529818	31.260.666.791,20							28.660.666.800,00	
3	28	03	1.01	0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)											
				Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan			1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		660.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
				[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]												
		[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	1750868 51.63 7.18 98.0	0 21.68 39.68 89.11	1474263 18.42 45.63 97.13	1529818	31.260.666.791,20							28.660.666.800,00	
3	28	03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-		-	600.000.000,00			-	-	-	-	1.320.000.000,00	
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P											
				Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P			1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		660.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
				[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]												
3	28	03	1.02	0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan											
								300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		660.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	1750868 51.63 7.18 98.0	0 21.68 39.68 89.11	1474263 18.42 45.63 97.13	1529818	31.260.666.791,20							28.660.666.800,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]	Persentase Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	1	0	1	1	31.260.666.791,20							28.660.666.800,00	
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	34.42		23.76	25.90									
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	38.34		26.44	28.82									
			Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	891186		837486	854236									
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara											
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
			[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	1750868	0	1474263	1529818	31.260.666.791,20						28.660.666.800,00	
			Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	51.63		21.68	18.42									
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	7.18		39.68	45.63									
			Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	98.0		89.11	97.13									
3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara											
			Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				35 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
			[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]													
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara											
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				160 Ha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		880.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
			[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]													
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan											
			[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]	Persentase Luas Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	1	0	1	1	31.260.666.791,20						28.660.666.800,00	
			Presentase Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis	34.42		23.76	25.90									
			Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	38.34		26.44	28.82									
			Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	891186		837486	854236									
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan lanjutnya berupa peneanaan Sanksi Administratif				16 Unit Managemen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]																
			[Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD melalui pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan dan diversifikasi produk kehutanan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pendapatan daerah.]	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Barat	1750868	0	1474263	1529818	31.260.666.791,20						28.660.666.800,00	
				Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan	51.63		21.68	18.42								
				Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan	7.18		39.68	45.63								
				Presentase Kerusakan Kawasan Hutan	98.0		89.11	97.13								
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan											
									300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
[Pengembangan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan adat]																
									31.260.666.791,20						28.660.666.800,00	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan				6.900.000.000,00						1.320.000.000,00	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih											
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit											
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan											
3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan											
##	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			-		600.000.000,00					660.000.000,00	
3	28	03	4.10		Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain											
3	28	03	4.10	0001	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan											
							20 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
3	28	03	4.10	0002	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain											
							1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	330.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
##	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			-		4.600.000.000,00					2.420.000.000,00	
[Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan]																
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			-		4.600.000.000,00					2.420.000.000,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
		[Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	22.110.000.000,00							0,00	
3	29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3	29 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
								700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
								50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
3	29 01 1.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
3	29 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
3	29 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
3	29 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.650.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	29 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	22.110.000.000,00						0,00		
3	29 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
##	3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	[Meningkatkan tata kelola kegeologian]	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	67.00	15	20	35	700.000.000,00					0,00		
				Cakupan Penatausahaan Ijin Penggunaan Air Tanah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Zona konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	80	50	52.50	55.13								
3	29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	0,00		
3	29 02 1.01 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-	0,00		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-				-	-	-			
3	29 02 1.03 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
##	3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-			-	650.000.000,24						0,00		
3	29 02 4.10	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah						300.000.000,24						0,00		
3	29 02 4.10 0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah						300.000.000,24	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29 02 4.13	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	-	-			-	350.000.000,00			-	-	-	0,00		
3	29 02 4.13 0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)														
##	3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-			-	1.390.000.000,00						0,00		
			-	-			-	1.390.000.000,00						0,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	29	03	4.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
	3	29	03	4.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan													
	3	29	03	4.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat													
						Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				0 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	4.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
	3	29	03	4.03	0006	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan													
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan				0 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	4.03	0007	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan													
##	3	29	04		PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	-				-	1.500.000.000,00						-	0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	-	-	-	350.000.000,00			-	-	0,00				
3	29	06	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
					-	-	-	-	-	22.009.061.685,00					0,00				
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
					[Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan]	Cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	769.93	0	594.00	625.63	22.009.061.685,00				0,00				
						Konsumsi listrik per kapita (kWh)	88.11	83	83.83	84.67									
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				300 Unit	21.009.061.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-PAPUA-ENERGI LISTRIK	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					23.043.243.483,00					500.000.000,00				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					23.043.243.483,00					500.000.000,00				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
##	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.253.243.484,00				-	0,00				
					[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]														
3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000,00				-	0,00				
3	30	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	14.843.243.484,00			-	0,00				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	30 01 1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/Bulan	13.793.243.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
								17.253.243.484,00							0,00	
3	30 01 1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	30 01 1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	17.253.243.484,00						0,00	
3	30 01 1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
3	30 01 1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
3	30 01 1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 01 1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				220.000.000,00					0,00			
	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						-					17.253.243.484,00					0,00			
	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					230.000.000,00					0,00			
	3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
##	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN													
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-				100.000.000,00					0,00			
	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA													
##	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-				1.570.000.000,00					500.000.000,00			
						[Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]					1.570.000.000,00					500.000.000,00			
	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					120.000.000,00					500.000.000,00			
	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor													
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						-					1.570.000.000,00					500.000.000,00			
	3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor													
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10.00	10.14	10.12	10.10	1.570.000.000,00							500.000.000,00	
			Persentase inflasi tahunan	2.30	2.53	2.5	2.45									
3	30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	1.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	30 04 1.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 04 1.02 0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			-													
3	30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	30 04 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
##	3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	900.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]														
3	30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-			-	900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
3	30 05 1.01 0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 05 1.01 0002	Pameran Dagang Lokal														
3	30 05 1.01 0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
##	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	1.219.999.999,00						-	0,00	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	220.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
										200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				5 Pengaduan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	999.999.999,00			-	-	-	-	0,00		
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	999.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
##	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
					[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	33	15	18	21	300.000.000,00							0,00	
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				5 UMKM	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.700.000.000,00							0,00		
##	3	31	02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
					[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	75	0	15	30	100.000.000,00							0,00	
						Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	8	2	3	4									
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
##	3	31	02		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-	-	-	900.000.000,00			-	-	-	-	0,00		
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan				20 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31 02 4.01 0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi														0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31 02 4.01 0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi														0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
##	3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														0,00	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]															
3	31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi														0,00	
			-				-	250.000.000,00			-	-	-				
3	31 03 1.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			-				-	250.000.000,00							0,00		
3	31 03 1.01 0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
##	3	31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-			-	450.000.000,00						-	0,00	
			[Meningkatkan pemanfaatan informasi industri]													
	3	31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	3	31 04 1.01 0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31 04 1.01 0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas													
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31 04 1.01 0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian													
								150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			SEKRETARIAT DAERAH					121.180.322.053,99							151.225.847.954,73	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	768.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	10.428.055.672,00				-	-	-	12.587.371.472,00			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.037.371.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	12.037.371.472,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	2.001.160.000,00				-	-	-	2.211.160.000,00			
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	338.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	438.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
						-	-	-	-	121.180.322.053,99							151.225.847.954,73			
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
					[Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah]	Cakupan pelayanan kerumahtanggaan pimpinan daerah	100	100	100	100	121.180.322.053,99						151.225.847.954,73			
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	22.671.004.039,00				-	-	-	24.636.367.645,73			
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	452.488.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	497,73	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Efektivitas pelayanan administrasi perencanaan dan kepegawaian serta terselenggaranya fasilitasi komunikasi pimpinan dan keprotokolanan secara dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sekretariat Daerah]	Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolanan	100	100	100	100	4.900.000.000,00							5.441.240.720,00	
4	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	
4	01 01 1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		60.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
			-													
4	01 01 1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				10 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
			[Meningkatnya Efektivitas pelayanan administrasi perencanaan dan kepegawaian serta terselenggaranya fasilitasi komunikasi pimpinan dan keprotokolanan secara dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sekretariat Daerah]													
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	
4	01 01 1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.181.240.720,00			-	-	-	-	1.231.240.720,00	
4	01 01 1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	831.240.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		851.240.720,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
								120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		130.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
4	01 01 1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
4	01 01 1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
4	01 01 1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
								4.900.000.000,00							5.441.240.720,00	
4	01 01 1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					98.782.780,00							110.000.000,00	
			Urusan Pemerintah Daerah													
4	01 01 1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	98.782.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
4	01 01 1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			[Meningkatkan Efektivitas pelayanan administrasi perencanaan dan kepegawaian serta terselenggaranya fasilitasi komunikasi pimpinan dan keprotokolan secara dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Sekretariat Daerah]		100	100	100	100	4.900.000.000,00						5.441.240.720,00	
4	01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan														
4	01 01 1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan													
								300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
								250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-		270.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-		450.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4	01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	1.750.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000.000,00	
4	01 02 1.02 0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4	01 02 1.02 0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4	01 02 1.02 0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4	01 02 1.02 0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4	01 02 1.02 0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.909.999.746,00							6.909.999.746,00	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH														
##	4	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		-	520.999.839,00						-	520.999.839,00	
			-	-	-	-	-	520.999.839,00							520.999.839,00	
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
4	01 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
##	4	01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-		-	6.388.999.907,00						-	6.388.999.907,00	
			[Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah]													
4	01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	2.149.999.907,00						-	2.149.999.907,00	
4	01 03 1.01 0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				2 Dokumen	749.999.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS PAPUA	-	-	-		749.999.907,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01 03 1.01 0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01 03 1.01 0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
	4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	-	500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
						BIRO HUKUM													
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4.849.999.900,00						5.780.000.000,00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH													
##	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			1.409.999.900,00				-		1.430.000.000,00			
						-													
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			160.001.200,00				-		170.000.000,00			
	4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	160.001.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	170.000.000,00	BIRO HUKUM		
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1.249.998.700,00				-		1.260.000.000,00			
	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
##	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM [Meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan]	-			3.440.000.000,00				-		4.350.000.000,00			
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-			1.900.000.000,00				-		2.600.000.000,00			
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum													
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun			20 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.000.000.000,00	BIRO HUKUM		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum							150 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya							20 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum							25 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					-	-	-	1.540.000.000,00			-	-	-	-	1.750.000.000,00		
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum							5 Kasus	1.240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.250.000.000,00	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM							3 Kasus	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO HUKUM	
					BIRO PEREKONOMIAN																	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								4.449.920.111,00							0,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																	
##	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	-	-	550.000.000,00						-	0,00		
					-																	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	-	550.000.000,00						-	0,00		
4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							1 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN	
##	4	01	06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
					[Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan]					Aset Dana Pensiun/ PDRB	0.44	0	0.3	0.32	3.899.920.111,00						0,00	
										Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	100	100	100	100								
										Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.95-5.60		17.3	17.84								
										Tingkat Inflasi	20.18		2.8-3.5	2094542.8								
										Total Kredit/ PDRB	7297526.62		801298.08	2.61-3.85								
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian																	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							1 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam														
	4 01 06 1.02 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
	4 01 06 1.02 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
	4 01 06 1.02 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
	4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	1.499.920.111,00			-	-	-	-	0,00	
	4 01 06 1.03 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4 01 06 1.03 0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	299.920.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4 01 06 1.03 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4 01 06 1.03 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
								300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X	NON URUSAN														
	X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
	## X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
								550.000.000,00							0,00	
	X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	X XX 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	X XX 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan													
	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					499.999.924,00					0,00			
	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				0,00	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				2 Dokumen	499.999.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				0,00	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
##	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
						[Meningkatkan Kualitas Produk Hukum OTSUS yang Dihasilkan]	Persentase produk hukum OTSUS yang difasilitasi	100	100	100	100	900.000.000,00					0,00		
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan													
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum													
						Pengaturan													
											900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				0,00	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
##	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
						-	-	-	-	-	0,00					-	0,00		
	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					0,00					-	0,00		
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT				0,00	BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS	
##	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
											536.999.826,00					-	0,00		
	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah													
											536.999.826,00					-	0,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	7.500.160.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.537.661.764,80	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X			NON URUSAN													
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					18.896.808.725,00							18.790.260.885,02	
##	X	XX	01					18.896.808.725,00							18.790.260.885,02	
								18.896.808.725,00							18.790.260.885,02	
X	XX	01	1.01					404.153.708,00			-	-	-	-	406.174.476,55	
X	XX	01	1.01	0001												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.075.288,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.325.664,44	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.01	0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.625.025,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	151.378.150,13	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.01	0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen									
								151.708.375,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.466.916,88	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.01	0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	51.745.020,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	52.003.745,10	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	18.492.655.017,00		-	-	-	-	18.384.086.408,47	
X	XX	01	1.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/Bulan	16.664.953.567,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	16.748.278.334,84	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas									
								1.047.276.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.052.512.380,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
X	XX	01	1.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	580.393.725,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	583.295.693,63	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
X	XX	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						30.966.045.200,50					0,00			
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						30.966.045.200,50					0,00			
					PERENCANAAN						30.966.045.200,50					0,00			
##					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.732.045.200,50					0,00			
					[Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah]	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	21.732.045.200,50					0,00			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				497.686.901,00					0,00			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	161.848.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						75.318.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen														
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	66.642.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
											26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.034.543,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	63.745.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah														
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					53 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah						0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.766.639.085,60					0,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi													
	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				875.000.000,00					0,00			
	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah													
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				7 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
##	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				5.510.000.000,00					0,00			
						[Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia]													
	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				1.980.000.000,00					0,00			
	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
	5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
	5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	1.790.000.000,00			-	-	0,00		
	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2.400.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota															
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				7 Laporan	419.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah															
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	1.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				47 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				15000 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
	5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD												
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1.199.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi												
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	700.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	650.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	1.260.000.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
##	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	17.107.902.675,00				-	19.057.000.000,00				
					[Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]														
	5	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	185.000.000,00			-	-	232.000.000,00				
	5	03	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
					-														
	5	03	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
	5	03	01	1.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
					[Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	17.107.902.675,00				19.057.000.000,00				
	5	03	01	1.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
	5	03	01	1.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
	5	03	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
										120.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
	5	03	01	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
					-														
	5	03	01	1.01	0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
	5	03	01	1.01	0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
										0,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
					[Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]					17.107.902.675,00					19.057.000.000,00				
	5	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.127.902.675,00			-	-	13.755.000.000,00				
	5	03	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/ Bulan	12.507.902.675,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	13.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 01 1.09 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	10.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
##	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
		[Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah Cakupan peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN Cakupan peningkatan Kompetensi ASN Cakupan peningkatan Kualitas Data ASN dan Penataan SDM Aparatur	90-100	90-100	90-100	90-100	7.850.000.000,00							10.150.000.000,00	
5	03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
5	03 02 1.01 0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
5	03 02 1.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
5	03 02 1.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
5	03 02 1.01 0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
5	03 02 1.01 0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN														
5	03 02 1.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
5	03 02 1.01 0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.01 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.01 0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													
5	03 02 1.02		Mutasi dan Promosi ASN	-			-	1.750.000.000,00			-	-	-	-	1.950.000.000,00	
5	03 02 1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
5	03 02 1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN													
5	03 02 1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-			-	2.600.000.000,00			-	-	-	-	3.550.000.000,00	
5	03 02 1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center				1 0	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-PENDIDIKAN	-	-	-		1.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				500 Orang	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03 02 1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				50 Orang	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	300.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan															
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	186.393.431,00			-	-	-		186.393.431,00		
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	186.393.431,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.393.431,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
##	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
					[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100	100	100	100	2.150.000.000,00								2.150.000.000,00	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis															
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
						Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang	200.000.000,00	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
5	05	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah														
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			1 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah														
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
5	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	170.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-													
5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										835.000.000,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-	-	50.000.000,00			-	-	-	55.000.000,00			
5	05	01	1.07	0006	Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	25.000.000,00			-	-	-	35.000.000,00			
5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
5	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
##	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	1.700.004.373,50				-	-	2.000.000.000,00			
					[Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]														
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	250.000.000,00			-	-	-	300.000.000,00			
5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan														
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	850.004.373,50			-	-	-	-	1.000.000.000,00	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	450.004.373,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-	-	500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
##	5	05	03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH														
					[Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan.]	Persentase Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	100	0	0	40	1.650.000.000,00							2.350.000.000,00	
5	05	03	1.02		Invensi dan Inovasi														
5	05	03	1.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi														
5	05	03	1.02	0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi														
5	05	03	1.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi														
J U M L A H											3.570.278.052.654,00							2.445.122.838.454,93	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	03	1.02	0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				2 Laporan	158.016.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
						Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				3 Laporan	66.536.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	140.032.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	514.377.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
X					NON URUSAN						482.603.025,00						0,00			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						482.603.025,00						0,00			
##	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	482.603.025,00					-	0,00			
					-	-	-	-	-	-	482.603.025,00						0,00			
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	482.603.025,00					-	0,00			
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	404.603.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
					INSPEKTORAT						31.851.803.831,78						0,00			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						31.851.803.831,78						0,00			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						31.851.803.831,78						0,00			
##	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	24.320.072.906,78					-	0,00			
					[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah]	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	24.320.072.906,78						0,00			
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	432.187.500,00					-	0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				46 Laporan	1.083.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.01	0003		Reviu Laporan Kinerja															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				70 Laporan	530.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.01	0004		Reviu Laporan Keuangan															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	149.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.01	0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1 Laporan	43.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.01	0006		Kerjasama Pengawasan Internal															
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.01	0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	577.174.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			-	741.640.000,00			-	-	-		0,00			
	6	01	02	1.02	0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	1.02	0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				49 Laporan	741.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT		
##	6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-			-	3.511.156.000,00							-	0,00		
							[Meningkatkan Kualitas Pendampingan dan Asistensi]															
							Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3.511.156.000,00									0,00	
	6	01	03	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			-	365.716.000,00			-	-	-		-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0009			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	1.01	0011			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					-	33.124.784,00			-	-	-		33.124.784,00	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	33.124.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		33.124.784,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					-	927.265.015,00			-	-	-		927.265.015,00	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					70 Paket	288.466.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		288.466.015,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					44 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	128.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		128.808.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					48 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					12 Orang	218.121.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		218.121.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENGUATAN KELEMBAGAAN	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	25.286.049.998,00					-	25.286.049.998,00		
						[Meningkatkan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	25.286.049.998,00							25.286.049.998,00	
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	25.286.049.998,00					-	-	25.286.049.998,00	
	8	01	04	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				170 Orang	24.729.799.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		24.729.799.998,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
##	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	787.387.500,00						-	787.387.500,00		
						[Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budanya Masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	787.387.500,00								787.387.500,00	
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	787.387.500,00						-	787.387.500,00		
	8	01	05	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	370.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-KESEHATAN DAN PERBAIKAN GIZI	-	-	-	370.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
										-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	139.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	139.062.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	-	-	4.300.000.000,00						-	4.300.000.000,00	
					[Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100	100	100	100	4.300.000.000,00							4.300.000.000,00	
						Persentase tingkat fasilitasi forkopimda													
	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	4.300.000.000,00			-	-	-	-	4.300.000.000,00	
	8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI-PAPUA-INFRASTRUKTUR	-	-	-		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT							50.468.589.700,00							55.515.548.668,00	
9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN							50.468.589.700,00							55.515.548.668,00	
9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT							15.775.588.546,00							17.353.147.399,00	
##	9	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							15.775.588.546,00							17.353.147.399,00	
					[Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Daerah]	Persetase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	15.775.588.546,00								17.353.147.399,00	
9	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							170.000.000,00							187.000.000,00	
9	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.210.000.000,00			-	-	-	-	1.331.000.000,00	
9	03 01 1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.05	0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT					34.693.001.154,00							38.162.401.269,00	
##	9 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	2.160.144.000,00						-	2.376.158.400,00	
9	03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.010.144.000,00			-	-	-	-	2.211.158.400,00	
9	03 01 1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	2.010.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		2.211.158.400,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT					15.775.588.546,00							17.353.147.399,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	316.708.407,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		348.379.247,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT					34.693.001.154,00							38.162.401.269,00	
##	9 03 02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	-	-			-	32.532.857.154,00						-	35.786.242.869,00	
		[Meningkatkan Efektivitas Fungsi Representasi, Legislasi, dan Pengawasan MRP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah]	Persentase Alat Kelengkapan MRP yang Memiliki Rencana Kerja Tahunan Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP Persentase Rekomendasi pertimbangan dan saran yang terealisasi dalam kebijakan pembangunan	100	100	100	100	32.532.857.154,00							35.786.242.869,00	
9	03 02 4.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	-	-			-	14.031.356.000,00			-	-	-	-	15.434.591.600,00	
9	03 02 4.01 0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan				3 Dokumen	2.238.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-		2.461.958.400,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
9	03 02 4.01 0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	9	03	02	4.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.01	0005	Penyusunan Peraturan MRP														
						Jumlah Peraturan MRP yang Disusun				3 Dokumen	219.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	241.573.200,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.01	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan														
						Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan				6 Unit	8.468.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	9.314.900.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.01	0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP														
						Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP				2 Dokumen	105.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	116.160.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.01	0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP				3 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	-				18.501.501.154,00			-	-	-	20.351.651.269,00			
	9	03	02	4.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota														
						Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan				33 Orang	16.107.601.154,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	17.718.361.269,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan				3 Dokumen	156.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	172.370.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
	9	03	02	4.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi				3 Dokumen	226.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	248.820.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9	03	02	4.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP				2 Dokumen	161.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	177.100.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
9	03	02	4.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP															
						Jumlah Peraturan MRP yang Disusun				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	55.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
9	03	02	4.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan															
						Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan				6 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
9	03	02	4.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua															
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA PERTAMBANGAN GAS ALAM-PAPUA-BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		
9	03	02	4.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama															
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	110.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT		

No	Kode					Ususan / Bidang Ususan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9	03	02	4.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan					2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeUdesa	DAJAH OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-SOSIAL	-	-	-	110.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	
9	03	02	4.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP					33 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DAJAH OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAJAJARI	-	-	-	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT	

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGOUS MANDACAN

